PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 474 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Solok Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Solok Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Solok Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 474 - 2023

TANGGAL : 4 JULI 2023

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp854.266.062.246,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp962.869.500.804,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp854.266.062.246,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp962.869.500.804,00 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Bupati Solok Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk dibahas bersama melalui surat Bupati nomor 900/304/BPKD-2023 tanggal 2 Mei 2023. Hal ini *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 6 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 9 Juni 2022, *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

   Ke depannya, Bupati Solok Selatan dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kelengkapan Dokumen

   Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

   a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

      1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

         a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

         b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

         c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3) Lampiran III : Laporan operasional;

4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

5) Lampiran V : Neraca;

6) Lampiran VI : Laporan arus kas;

7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;

2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp884.655.899.039,10 atau 103,56% dari target yang dianggarkan sebesar Rp854.266.062.246,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp11.969.536.739,00, atau 1,38% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp866.235.598.985,00.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Pendapatan Daerah pada Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp884.655.899.039,10 dengan Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan halaman 367 dinarasinya tertulis sebesar Rp884.656.560.392,10.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp92.121.048.046,10 atau 124,68% dari target yang dianggarkan sebesar Rp73.885.025.000,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah Rp6.574.828.847,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.459.853.847,00 atau turun sebesar 8,17%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.006.714.870,10 atau 90,08% masih kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.218.945.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih rendah sebesar Rp4.281.224.327,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp16.500.169.327,00 atau turun 25,95%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

(1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.999.906.655,00 atau 132,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.509.000.000,00.

(2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp139.606.846,00 atau 126,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.

(3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp5.457.965.943,00 atau 107,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.090.775.000,00.

(4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp692.749.243,00 atau 138,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

(1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp97.148.159,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp1.315.706.188,10 atau 65,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

(3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.294.461.836,00 atau 44,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.11.263.000.000,00	Rp. 7.618.652.369,80	67,64
2019	Rp.12.908.000.000,00	Rp. 8.435.031.570,50	65,35
2020	Rp. 6.599.221.993,00	Rp. 6.800.569.115,50	103,05
2021	Rp.18.526.000.000,00	Rp.16.500.169.327,00	89,06
2022	Rp.12.218.945.000,00	Rp.11.006.714.870,10	90,08

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi, dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali Tahun 2020 yang melebihi dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum optimal dalam upaya pencapaian realisasi pajak daerah sesuai target yang ditetapkan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih cermat lagi dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.354.215.128,00 atau 112,94% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.084.500.000,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.235.018.343,00 naik sebesar Rp849.481.657,00 atau 68,78%.

Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp122.519.000,00 yang semula tidak dianggarkan.

(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp507.447.501,00 atau 187,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp271.000.000,00.

(3) Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp753.745.227,00 atau 225,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00.

(4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, terealisasi sebesar Rp282.505.000,00 atau 111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.500.000,00.

(5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp35.915.000,00 yang semula tidak dianggarkan.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain :

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp132.471.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.

(2) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp56.252.000,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp45.048.000,00 atau 18,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.2.085.000.000,00	Rp. 922.009.350,00	44,22
2019	Rp.2.940.000.000,00	Rp.1.362.801.219,00	46,35
2020	Rp. 996.875.000,00	Rp.1.199.290.189,50	120,30
2021	Rp.1.458.750.000.00	Rp.1.235.018.343,00	84,66
2022	Rp.2.084.500.000,00	Rp.2.354.215.128,00	112,94

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang sudah mencapai target adalah pada tahun 2020 dan tahun 2022. Namun pada tahun 2020 tersebut target yang ditetapkan jauh di bawah realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya serta secara nominal pencapaian realisasi tersebut merupakan yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 atau 100,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp699.448.981,00 atau naik 41,13% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.700.551.019,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.1.500.000.000,00	Rp.1.470.319.095,00	98,02
2019	Rp.2.500.000.000,00	Rp.1.677.244.574,00	67,09
2020	Rp.1.843.023.859,00	Rp.1.843.023.859,00	100,00
2021	Rp.1.700.551.019,00	Rp.1.700.551.019,00	100,00
2022	Rp.2.400.000.000,00	Rp2.415.762.950,00	100,66

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.344.355.098,00 atau 133,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.181.580.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah Rp3.842.535.158,00 atau turun 6,30% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.024.115.158,00.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Jasa Giro pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan halaman 367 tertulis pada Tabel V.1 .1 5 Anggaran dan Realisasi Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp2.032.953.705,00 sedangkan pada Tabel V.1.16 Kenaikan/ Penuruna Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021 tertulis sebesar Rp2.034.220.058,00, untuk dijelaskan.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp1.760.126.100,00 atau 305,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp575.433.904,00.

(2) Pendapatan Bunga, realisasi sebesar Rp5.376.329.638,00 yang semula tidak dianggarkan.

(3) Tuntutan Ganti kerugian Daerah, realisasi sebesar Rp2.299.096.037,00 yang semula tidak dianggarkan.

(4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, realisasi sebesar Rp6.841.059.102,00 atau 101,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.726.146.096,00.

(5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp78.066.055,00 yang semula tidak dianggarkan.

(6) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp57.952.336.661,00 atau 131,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.080.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target hanya Penerimaan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp2.032.953.705,00 atau 35,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.800.000.000,00. terdapat perbedaan nilai realisasi Jasa Giro pada Tabel V.1.15 dengan tabel V.1.16 dalam CALK halaman 377.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.54.019.543.222,00	Rp.50.534.315.545,63	93,42
2019	Rp.58.081.704.083,00	Rp.56.367.708.480,53	97,05
2020	Rp.60.894.228.405,00	Rp.67.021.427.677,81	110,06
2021	Rp.63.646.859.275,00	Rp.61.024.115.158,00	95,88
2022	Rp.57.181.580.000,00	Rp.76.344.355.098,00	133,51

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung fluktuatif dan di tahun 2022 capaian realisasinya jauh lebih baik dari capain realisasi tahun 2021 serta melebihi target yang ditetapkan yaitu 133,51% yang disebabkan karena beberapa rincian objek Lain-lain Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang terealisisr tidak dianggarkan sebelumnya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp784.706.642.887,00 atau 101,84% dari yang dianggarkan Rp770.505.887.246,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp741.085.202.403,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.420.684.843,00 atau 3,97%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.828.208.106,00 atau 79,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.875.150.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp44.690.542.735,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp34.815.392.735,00 atau 77,90%. Penurunan ini disebabkan oleh Dana Hibah BOS sudah tergabung kedalam DAK Non Fisik BOS Reguler dan Kinerja pada Dana Transfer Pusat Tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :

(1) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp122.519.000,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp57.952.336.661,00 atau 131,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.080.000.000,00.

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp507.447.501,00 atau 187,25% dari yang dianggarkan Rp271.000.000,00.

(4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp282.505.000,00 atau 111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.500.000,00.

(5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp1.999.906.655,00 atau 132,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.509.000.000,00.

(b) Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp5.457.965.943,00 atau 107,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.090.775.000,00.

(c) Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp538.072.000,00 atau 269,04% dari yang dianggaran sebesar Rp200.000.000,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp132.471.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.

(2) Dinas Perhubungan pada :

(a) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp56.252.000,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

(b) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp45.048.000,00 atau 18,77% dari yang dianggaran sebesar Rp240.000.000,00.

(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp1.315.706.188,00 atau 65,79% dari yang dianggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

(b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar Rp1.294.461.836,00 atau 44,64% dari yang dianggaran sebesar Rp2.900.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, yang hanya mencapai realisasi 44,64% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.900.000.000,00, agar pencapaian realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.

2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.

3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah.

2) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.

3) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

4) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.

6) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.

7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp813.620.609.303,77 atau 92,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp875.616.941.804,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp730.565.958.343,95 terjadi kenaikan sebesar Rp145.050.983.460,05 atau 19,85%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a) Belanja Operasi Tahun 2022 tercalisasi sebesar Rp608.487.257.791,10 atau 93,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp651.903.104.887,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp375.198.145.727,83 atau 96.25% dari yang dianggarkan sebesar Rp389.819.286.181,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.325.387.739.329,00	Rp.316.931.115.174,00	97,04
2019	Rp.360.438.357.095,00	Rp.341.301.328.489,01	94,69
2020	Rp.365.112.375.936,00	Rp.348.620.480.143,00	93,51
2021	Rp.380.470.171.065,00	Rp.372.832.719.871,00	97,99
2022	Rp.389.819.286.181,00	Rp.375.198.145.727,83	96,25

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya. Terdapat capaian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang kurang optimal Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tercalisasi sebesar Rp283.592.074,00 atau 90,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp312.952.974,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.250.350.259,27 atau 88,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.797.163.246,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

(a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp89.239.537.601,27 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.529.317.385,82.

(b) Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan terealisasi sebesar Rp982.225.155,00 atau 74,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.311.854.213,00.

(c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.086.622.025,00 atau 85,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.276.394.910,00.

(d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi sebesar Rp1.202.188.080,00 atau 75,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.602.500.000,00.

(e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp41.066.968.641,00 atau 81,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.333.032.680,00.

(f) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

(g) Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp2.734.072.027,00 atau 70,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.888.572.027,00.

Gamberan capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.193.461.817.260,00	Rp.181.141.399.111,12	93,63
2019	Rp.227.031.473.180,00	Rp.208.116.228.520,01	91,67
2020	Rp.213.988.202.113,00	Rp.200.105.481.056,00	93,51
2021	Rp.262.567.458.456,00	Rp.221.928.878.307,95	84,52
2022	Rp.252.797.163.246,00	Rp.224.250.350.259,27	88,71

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif meskipun nominal realisasinya cenderung memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.9.038.761.804,00 atau 97,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.286.655.460,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.969.922.995,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.1.316.732.465,00 atau 16,52%.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp202.072.297.511,67 atau 91,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp219.977.614.670,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp127.046.936.090,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp92.930.678.580 atau 73,15% Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp31.337.496.900,00 atau 87,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.627.253.955,00.

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp9.288.671.660,08 atau 88,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.624.325.056,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.217.614.380.733,00	Rp.196.414.321.045,00	90,26
2019	Rp.301.666.389.574,00	Rp.210.375.471.214,00	69,74
2020	Rp.156.252.380.478,00	Rp.124.575.198.868,00	79,73
2021	Rp.170.062.407.944,00	Rp.127.046.936.090,00	74,71
2022	Rp.219.977.614.670,00	Rp.202.072.297.511,67	91,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung naik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.061.054.001.00 atau 81,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.736.222.247,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

sebesar Rp641.815.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.094.407.247,00 atau 482,13%. Hal ini disebabkan adanya Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.221.054.001,00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp86.917.238.179,00 atau 99,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.252.559.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.571.875.630,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.319.316.630,00 atau 8,70%, yang terdiri dari :

a) Transfer Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.095.023.679,00 atau 76,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.430.344.500,00 terdiri dari :

(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp923.276.367,00 atau 75,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.221.897.300,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

(2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp171.747.312,00 atau 82,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp208.447.200,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp85.822.214.500,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.822.214.500,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan kc Desa yang diperuntukkan untuk 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi serta realisasi belanja yang melebihi anggaran :

a) SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi antara lain :

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan :

(a) 02.2.01.21.5.1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp804.030.000,00 atau 59,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.340.490.000,00.

(b) 02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp324.501.600,00 atau 51,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp627.309.800,00.

(c) 02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik terealisasi sebesar Rp59.050.000,00 atau 0,85% dari yang dianggarkan Rp6.922.457.863,00.

(d) 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan terealisasi sebesar Rp63.576.804,00 atau 5,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.225.821.938,00.

(e) 03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi terealisasi sebesar Rp242.199.100,00 atau 55,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.520.800,00.

(2) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :

(a) 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp163.150.200,00 atau 43,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp373.192.117,00.

(b) 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp158.766.400,00 atau 28,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.312.574,00.

(c) 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp26.457.500,00 atau 18,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.743.580,00.

(d) 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp100.329.000,00 atau 35,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp280.679.099,00.

(e) 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp75.898.400,00 atau 24,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp305.612.551,00.

(f) 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp77.504.800,00 atau 40,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp192.798.100,00.

(g) 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terealisasi sebesar Rp57.078.000,00 atau 42,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.983.548,00.

(h) 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terealisasi sebesar Rp2.310.000,00 atau 7,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.379.537,00.

(i) 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terealisasi sebesar Rp10.874.000,00 atau 21,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.280.000,00.

(j) 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar Rp520.366.252,00 atau 44,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.165.932.361,00.

(k) 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp539.395.100,00 atau 42,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.258.227.899,00.

(l) 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terealisasi sebesar Rp883.246.000,00 atau 46,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.920.283.267,00.

(m) 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp745.245.150,00 atau 40,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.818.505.882,00.

(n) 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp10.774.300,00 atau 3,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.499.800,00.

(o) 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar yang tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp623.700.000,00.

(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup antara lain pada sub kegiatan 03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp21.773.822,00 atau 10,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp201.765.800,00.

b) SKPD yang realisasi belanjanya melebihi anggaran antara lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan :

(1) 02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik terealisasi sebesar Rp24.769.817.055,00 atau 128,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.285.675.600,00.

(2) 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD terealisasi sebesar Rp3.559.520.700,00 atau 116,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.042.456.140,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.

2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.

4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.

5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.

2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimen ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.

7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.

8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.

10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

12) *Khusus terhadap belanja pada SKPD Dinas Pendidikan yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.*

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp92.755.109.943,27 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp962.869.500.804,00 adalah 9,63%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp. 831.424.635.064,00	Rp. 22.004.356.720,06	2,65%
2019	Rp. 998.194.358.064,00	Rp. 66.825.361.913,08	6,69%
2020	Rp. 930.210.853.201,00	Rp. 69.573.319.582,89	7,47%
2021	Rp. 919.633.509.773,00	Rp. 109.103.438.557,94	11,86%
2022	Rp. 962.869.500.804,00	Rp. 92.755.109.943,27	9,63%

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2021 cenderung meningkat secara konsisten dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2021 mencapai 11,86%, namun di tahun 2022 turun menjadi 9,63%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.048.029.212.807,39 atau terjadi peningkatan sebesar Rp111.612.462.438,09 atau 5,76% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.936.416.750.369,30.

Aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(14.029.162.639,18) atau (9,26%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp151.550.272.766,85. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

(1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.792.228.072,27 yaitu :

(a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp79.143.345.993,74.

Terhadap sisa kas pada kas daerah sebesar Rp79.143.345.993,74 yang bukan hak pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar dilakukan koordinasi dengan Bank Nagari agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan penyetoran ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp167.208.566,69.

Terjadi peningkatan saldo kas di bendahara pengeluaran secara signifikan sebesar 1.116,82%. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

(c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.220.678,00.

Terhadap saldo di bendahara penerimaan yang sampai akhir tahun masih bersisa sebesar Rp37.220.678,00 yang baru disetorkan sampai dengan 10 Januari 2023, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Halaman 205 huruf c angka) yang berbunyi Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan.

(d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp12.193.379.820,62.

(e) Kas Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp549.090.169,22.

(f) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp701.982.844,00.

Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pendapatan ataupun pengembalian belanja ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan kas mengingat kas mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu dengan pengelolaan kas yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan cash flow sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan kas melalui peningkatan kompetensi SDM seperti pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya serta menyempurnakan standar operasional dan prosedur dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

2) Saldo Piutang Daerah

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp53.920.297.565,38 terdiri dari :

a)	Piutang Pajak	Rp 18.018.014.963,00
b)	Piutang Retribusi	Rp 1.970.109.750,00
c)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 30.242.352.032,38
d)	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 3.534.765.320,00

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp36.865.589.673,88, yang meliputi :

a)	Penyisihan Piutang Pajak	Rp (10.381.931.529,09)
b)	Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (1.926.103.288,00)
c)	Penyisihan Piuteng Lain-lain PAD yang Sah	Rp (24.556.779.579,29)

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp17.054.707.891,50 yang terdiri dari :

a)	Piutang Pajak	Rp 7.636.083.433,91
b)	Piutang Retribusi	Rp 44.006.462,00
c)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 5.685.572.453,00
d)	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 3.534.765.320,00

Saldo piutang daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

(1) PBB-P2 sebesar Rp7.167.325.584,00

(2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp468.757.849,91.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang terindentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp44.006.462,00.

c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :

(1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp8.633.436,55.

(2) BLUD RSUD sebesar Rp5.675.638.039,78.

(3) Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.300.976,76.

d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :

(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.154.959.077,00.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp661.047.607,00.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp1.691.359.974,00.

(4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp27.398.662,00.

3) Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp380.518.319,00 yang merupakan Beban Pajak Kendaraan Bermotor.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.293.655.844,90 mengalami peningkatan sebesar Rp9.406.134.496,00 atau 52,58% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.887.521.348,90.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

(a) Obat-Obatan sebesar Rp9.969.519.422,00.

(b) Alat Kebersihan sebesar Rp1.386.066.262,00.

(c) Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp13.428.228.942,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf a) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pertanian. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga yang meningkat dari Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berupa investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24 mengalami peningkatan sebesar Rp17.300.050.761,24 atau 41,61% dari tahun 2021 sebesar Rp41.574.364.596,00 dengan rincian antara lain :

(1) Bank Nagari sebesar Rp15.496.000.000,00..

(2) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00

(3) PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai sebesar Rp41.878.415.357,24.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp2.992.000.662.981,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.755.015.758.203.27 terjadi penambahan sebesar Rp99.844.758.749,91 atau 5,73%, antara lain :

1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp366.709.927.859,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp352.946.797.525,00 terjadi peningkatan sebesar Rp13.763.130.334,00 atau 3,90%.

2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp343.963.123.810,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp318.584.122.340,99 terjadi peningkatan sebesar Rp25.379.001.470,00 atau 7,97%.

3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp757.522.080.597,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp673.008.616.814,20 terjadi peningkatan sebesar Rp84.513.463.783,00 atau 12,56%.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.410.782.448.374,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.318.365.723.727,04 terjadi peningkatan sebesar Rp92.416.724.647,00 atau 7,01%.

5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.007.519.047,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.511.102.598,04 terjadi penambahan sebesar Rp9.496.416.449,00 atau 26,01%.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.015.563.293,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.599.395.198,00 terjadi penambahan sebesar Rp11.416.168.095,00 atau 20,53%, penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan antara lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila

pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp10.333.988.409,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.837.172.842,88 terjadi peningkatan sebesar Rp8.496.815.566,12 atau 462,49% antara lain berasal dari :

1) Aset Tak Berwujud sebesar Rp602.315.229,00, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* antara lain yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

2) Aset Lain-Lain sebesar Rp4.367.493.227,00 yang antara lain berasal dari aset rusak berat senilai Rp.8.859.566.377,00. Adapun Pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp.5.960.483.341,00 yang merupakan penghapusan atas Aset Lain-Lain.

3) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.364.179.953,00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.302.465.783,51 mengalami peningkatan sebesar Rp2.550.490.566,51 atau 12,29% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.751.975.217,00.

Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp44.512.023,00 antara lain pada BLUD RSUD sebesar Rp37.500.000,00 merupakan pendapatan atas sewa ATM. Sementara Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.012.023 pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame.

2) Utang Beban sebesar Rp.23.220.835.631,51, terdiri dari :

   (a) Utang Beban Pegawai sebesar Rp.1.572.923.689,51 merupakan utang kepada pegawai terhadap pengajuan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

   (b) Utang Beban Barang dan Jasa di beberapa SKPD sebesar Rp.20.687.008.389,00 antara lain yang terbesar terdapat pada RSUD sebesar Rp.16.175.527.664,00 berupa Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

   (c) Utang Beban Transfer sebesar Rp.358.040.853,00 terdiri dari kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, belum dibayarkan atau dibagihasilkan kepada Pemerintah Nagari.

(d) Utang Beban Belanja Modal sebesar Rp.602.862.700,00 merupakan utang pada Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung Puskesmas Mercu sebesar Rp590.920.000,00 pada tahun 2020 sampai 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayarannya.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.37.118.129,00 merupakan pengembalian Dana BOS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Khusus untuk RSUD yang sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan sistim BLUD, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BLUD berjalan dengan baik sehingga beban dapat diperkecil setiap tahun.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.874.584.431,14 naik sebesar Rp60.960.836.745,14 atau 7,31% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp833.913.747.686,00. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp93.825.454.492,14 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.535.025.000,00 atau 127,59%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.512.850.774,10 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.059.775.000,00 atau 103,76%.

2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.416.790,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.084.500.000,00 atau 105,85%.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 89,47%.

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.690.423.978,04 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.690.750.000,00 atau 135,28%.

b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp739.311.478.401,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp760.357.112.021,00 atau 97,23%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp676.345.758.562,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp712.410.164.200,00 atau 94,94%.

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.965.719.839,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.946.947.821,00 atau 131,32%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.737.651.538,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.875.150.000 atau 625,18%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Retribusi-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

KODE			URAIAN	Total		
1			2	Anggaran	Belanja	Realisasi
1			PELAYANAN UMUM	249,055.124.629,00	237.379.587.804,00	95,31%
1	2	09	Pangan	4.269.898.661,00	4.082.230.553,00	95,60%
1	2	15	Komunikasi dan Informatika	7.507.584.410,00	7.304.313.416,00	97,29%

1	2	20			Statistik	95.305.000,00	91.239.200,00	95,72%
1	2	21			Persandian	37.500.000,00	36.253.300,00	96,70%
1	2	24			Kearsipan	122.896.516,00	121.728.100,00	99,05%
1	4	01			Sekretariat Daerah	37.097.208.369,00	33.399.601.985,00	90,03%
1	4	02			Sekretariat DPRD	27.894.793.850,00	26.759.402.910,00	95,93%
1	5	01			Perencanaan	5.262.511.689,00	4.589.140.190,00	87,20%
1	5	02			Keuangan	115.308.079.646,00	112.669.341.578,00	97,71%
1	5	03			Kepegawaian	28.861.895.605,00	26.652.779.972,00	92,35%
1	5	04			Pendidikan dan Pelatihan	895.711.800,00	826.470.488,00	92,27%
1	5	05			Penelitian dan Pengembangan	119.553.000,00	53.947.900,00	45,12%
1	6	01			Inspektorat	4.739.846.335,00	4.484.466.996,00	94,61%
1	7	1			Kesatuan Bangsa dan Politik	16.842.339.748,00	16.308.671.216,00	96,83%
3					**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**37.286.294.948,00**	**35.933.738.114,30**	**96,37%**
3	2	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.909.337.364,00	32.806.904.033,30	96,75%
3	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik	3.376.957.584,00	3.126.829.081,00	92,59%
4					**EKONOMI**	**45.569.747.488,00**	**42.005.097.254,07**	**92,18%**
4	2	07			Tenaga Kerja	4.299.017.402,00	3.871.851.839,00	90,06%
4	2	13			Pemberdayaan Masyarakat Desa	504.166.900,00	461.599.023,00	91,56%
4	2	15			Perhubungan	6.974.880.258,00	6.604.359.408,00	94,69%
4	2	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.646.837.350,00	1.434.780.307,00	87,12%
4	2	18			Penanaman Modal	4.129.886.397,00	3.992.296.543,00	96,67%
4	3	25			Kelautan dan Perikanan	1.339.213.940,00	1.278.305.058,00	95,45%
4	3	27			Pertanian	18.467.254.620,00	17.786.791.593,00	96,32%
4	3	29			Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00%
4	3	30			Perdagangan	3.066.830.373,00	2.637.256.551,07	85,99%
4	3	31			Perindustrian	5.131.350.548,00	3.928.671.032,00	76,56%
4	3	32			Transmigrasi	10.301.800,00	9.185.900,00	89,17%
5					**LINGKUNGAN HIDUP**	**15.081.895.305,00**	**14.151.469.140,00**	**93,83%**
5	2	10			Pertanahan	12.032.840.570,00	11.640.117.877,00	96,74%
5	2	11			Lingkungan Hidup	3.049.054.735,00	2.511.351.263,00	82,36%
6					**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**137.785.308.579,00**	**127.414.852.370,12**	**92,47%**
6	1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.179.718.563,00	108.451.905.513,12	91,77%
6	1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.608.590.016,00	18.962.946.857,00	96,71%
7					**KESEHATAN**	**176.819.571.305,00**	**160.412.771.979,08**	**90,72%**
7	1	02			Kesehatan	171.205.860.312,00	155.967.135.237,08	91,10%
7	2	14			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.613.810.993,00	4.446.636.742,00	79,21%
8					**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**6.493.769.170,00**	**6.126.304.357,00**	**94,33%**
8	2	22			Kebudayaan	1.459.206.321,00	1.280.973.648,00	87,79%
8	3	26			Pariwisata	5.034.562.849,00	4.844.330.709,00	96,22%
10					**PENDIDIKAN**	**280.744.488.259,00**	**265.573.570.201,20**	**94,60%**
10	1	01			Pendidikan	262.258.574.552,00	250.541.500.492,14	95,53%
10	2	19			Kepemudaan dan Olah Raga	5.325.072.052,00	4.494.861.422,00	84,41%

10	2	23			Perpustakaan	13.160.841.655,00	10.537.208.287,06	80,06%
11					**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**14.030.201.121,00**	**11.340.461.263,00**	**82,26%**
11	1	06			Sosial	7.219.845.037,00	5.061.431.381,00	70,10%
11	2	08			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.598.328.080,00	1.410.416.937,00	88,24%
11	2	12			Administrasi Kependudukan dan Capil	5.212.028.004,00	5.068.612.945,00	97,25%
					JUMLAH	962.869.500.804,00	900.537.847.482,77	93,53%
					JUMLAH BELANJA	**962.869.500.804,00**	**900.537.847.482,77**	93,53%
					PERSENTASE	100,00%	**100,00%**	

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga kesclarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp962.869.500,804,00 terdapat sebesar 93,53% atau sejumlah Rp900.537.847.482,77 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpadun dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp270.105.297.102,00 atau 28,05% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp257.419.878.654,14 atau 28,59% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini *telah memenuhi* alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai brikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	a. Belanja Pada Dinas Pendidikan	287.394.832.902,00	265.038.384.914,14	95,00
	1) Belanja Operasi	237.046.189.371,00	207.905.360.000,00	96,00
	a. Belanja Pegawai	178.607.446.083,00	174.515.392.901,00	98,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	31.960.439.208,00	27.153.645.139,00	85,00
	c. Belanja Hibah	6.477.284.080,00	6.236.721.960,00	96,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	50.348.682.731,00	47.130.001.914,14	94,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang	2.710.485.000,00	2.383.516.740,00	88,00
	1) Belanja Transfer	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	a. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)	1.598.465.000,00	1.271.516.740,00	80,00
	a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Kesra)	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	100,00
	a. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pustaka)	172.943.900,00	148.476.000,00	86,00
	a. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Pustaka)	19.609.100,00	18.798.500,00	96,00
2.	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN	270.105.297.902,00	257.419.678.654,14	95,30
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	962.868.900.804,00	900.537.847.482,77	
4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100	28,05	28,59	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatn sebesar Rp172.689.016.652,00 atau 17,93% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp149.993.517.842,76 atau 22,16% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini *telah memenuhi* alokasi fungsi keehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji*, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	a. Belanja Pada Dinas Kesehatan	91.613.008.903,00	77.348.793.530,78	85,00
	1) Belanja Operasi	82.312.626.069,00	70.838.700.120,78	85,00
	a. Belanja Pegawai	43.401.794.883,00	40.173.651.406,33	93,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	39.911.031.186,00	30.522.048.714,45	76,00
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	9.200.230.834,00	7.148.093.410,00	87,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan,	81.175.859.749,00	72.148.724.261,98	89,00
	1) Belanja Transfer :			
	Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	21.431.491.046,00	13.097.634.370,00	61,00
	3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RSUD)	404.947.000,00	404.947.000,00	100,00
	4) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	10.359.225.853,00	10.102.777.235,98	98,00
	5) Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik Fasilitas	683.337.422,00	408.360.000,00	60,00
	6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	7) Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	46.794.018.458,00	46.794.018.458,00	100,00
	8) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	146.015.000,00	146.015.000,00	100,00
	9) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) (DP2KB)	187.200.000,00	122.720.000,00	65,00
	10) Pembinaan Perkotaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.600.000,00	66.059.450,00	71,00
	11) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	752.124.940,00	719.512.375,00	96,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat 12) Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (DP2KB)	324.000.000,00	287.660.370,00	89,00
2.	ANGGARAN KESEHATAN (a + b)	172.659.016.652,00	149.993.517.842,76	86,88
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	962.859.500.804,00	900.537.947.452,77	
4.	GAJI ASN	228.627.648.609,00	223.722.201.464,00	
5.	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)	734.231.852.196,00	676.815.746.021,77	
4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2/3) x 100	17,93	22,16	-

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp271.454.509.828,00 atau 62,56% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp433.899.135.698,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp249.856.979.043,67 atau 53,20% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp469.657.346.729,00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *sudah* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah ***yang langsung terkait*** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar tetap konsisten secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	Komponen Perhitungan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	BELANJA MODAL	223.326.027.120,00	202.072.297.511,67	90
	a. Tanah	11.631.393.810,00	11.211.952.057,00	96
	b. Peralatan dan Mesin	35.760.992.605,70	31.337.496.905,02	88
	c. Gedung dan Bangunan	78.487.011.717,30	69.286.671.630,36	88
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.429.582.481,00	89.126.226.699,59	93
	e. Aset Tetap Lainnya	1.276.636.997,00	1.109.945.178,20	87
	f. Aset Lainnya	739.409.010,00	0,00	0
	BELANJA PEMELIHARAAN	6.672.440.337,00	6.672.440.337,00	100
	BELANJA HIBAH	9.392.502.980,00	9.038.761.804,00	96
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR	32.073.479.391,00	32.073.479.391,00	100
2.	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH	271.464.509.828,00	249.856.979.043,67	92
3.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Belanja Untuk dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 20x2	52,56	52,96	50,94

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggara 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp54.253.844.931,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.643.724.692,00 atau 56,48% dari total realisasi Urusan Bidang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.

4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.109.621.107,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.776.400,00 atau 8,66% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.

4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp15.042.795.508,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.111.465.031,00 atau 93,81% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp308.049.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp279.995.000,00 atau 90,89% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp24.986.577.823,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.105.173.497,30 atau 88,47% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp205.592.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.548.820,00 atau 88,79% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.697.010.472,00 atau 3,40% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp14.894.866.357,00 atau 4,73% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Terhadap rendahnya pencapaian realisasi penggunaan produk dalam negeri ini agar diberikan penjelasan.

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp919.633.509.773,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.018.408.444.861,00 atau 110,74% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp20.153.057.078,00 atau 11,67% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp172.689.016.652,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp16.619.902.049,00 atau 82,47% dari total alokasi dana yang dianggarakan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada

kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp19.063.563.648,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp10.778.408.527,00 atau dengan tingkat capaian 56,54%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait rendahnya serapan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memberikan penjelasan dan kemudian disiapkan langkah-langkah perbaikan untuk masa depan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Memadai.
2. Hilangnya Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Kekurangan Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp103.869.445,00.
4. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp245.143.500,00 dan Pemborosan sebesar Rp32.328.000,00 atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD.
5. Pembayaran atas Belanja Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp11.100.000,00.

6. Data Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp15.411.400,00 tidak akurat.
7. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp912.360.200,00.
8. Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan.
9. Kesalahan Pelanggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp4.852.774.305,22.
10. Perjanjian Kerja Sama atas Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Memadai dan Pengelolaan Rekening Belum Tertib.
11. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Kategori Macet.
12. Penatausahaan Persediaan pada Empat OPD Belum Tertib.
13. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

TANGGAPAN RANPERDA DAN RANPERBUP KAB. SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2022

1. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KHUSUS

RANPERDA

a. Judul, nomor dan tahun ditulis dengan tanda baca berupa 3 (tiga) titik (ellipsis).

b. Pembukaan:

1) Konsiderans "Menimbang", rumusan diubah menjadi:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2) Dasar hukum "Mengingat":

a) angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b) angka 4, rumusan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Diktum kata "MEMUTUSKAN", ditambahkan tanda baca titik dua, sesuai dengan angka 54 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

4) Diktum kata "Menetapkan", disesuaikan dengan angka 59 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga rumusan diubah menjadi:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

c. Penulisan setiap kata dalam Ranperda tidak perlu ditebalkan (*bold*).

d. Sesuai dengan angka 243 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Sehingga, secara keseluruhan huruf awal dari setiap kata dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang tidak termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 243 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak ditulis dengan huruf awal kapital.

e. Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.

Sehingga seluruh penulisan angka dalam batang tubuh perlu disesuaikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas:

a. pendapatan sebesar Rp884.655.899.039,10 (delapan ratus delapan puluh empat miliar ...dst);

b. belanja dan transfer sebesar Rp900.537.847.482,77 (sembilan ratus miliar ... dst);

c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar ...dst;

d. pembiayaan terdiri atas:

1. penerimaan pembiayaan sebesar ... dst; dan
2. pengeluaran pembiayaan sebesar ... dst.

e. surplus/deficit (*agar ditentukan apakah surplus atau deficit*) antara penerimaan dan pengeluaran sebesar ...dst.

f. sisa lebih penghitungan anggaran sebesar ... dst.

f. Penulisan sebagaimana dalam Pasal 2, juga berlaku untuk Pasal 3, Pasal 4 dan pasal-pasal lainnya.

g. Pasal 5 dan Pasal 8, singkatan "LO" agar dipanjangkan.

h. Pasal 8, singkatan "LPE" dihapus.

I. Pasal 9, kata "pos-pos" diubah jadi "pos", sesuai dengan angka 243 huruf f, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

J. Pasal 10, tabulasi penulisan disesuaikan dengan angka 87 s.d angka 89 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga rumusan diubah menjadi:

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
   1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. rincian laporan realisasi anggaran menurut ... dst.
b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. lampiran III memuat laporan operasional;
d. ... dst.

k. Pasal 11, rumusan diubah menjadi: Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

l. Peraturan Daerah agar ditambahkan "Penjelasan", sesuai dengan angka 174 s.d angka 194 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

m. Naskah Rancangan Peraturan Daerah diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 3 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

RANPERBUP

a. Nomor dan tahun ditulis dengan tanda baca berupa 3 (tiga) titik (ellipsis).

b. Konsiderans "Menimbang", rumusan diubah menjadi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

c. Dasar hukum "Mengingat"
   1. angka 2, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
   2. angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Diktum kata "Menetapkan", rumusan diubah menjadi:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

e. Penulisan setiap kata dalam Ranperbup tidak perlu ditebalkan (*bold*).

f. Sesuai dengan angka 243 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Sehingga, secara keseluruhan huruf awal dari setiap kata dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang tidak termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 243 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak ditulis dengan huruf awal kapital

g. Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.

Sehingga seluruh penulisan angka dalam batang tubuh perlu disesuaikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1:

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

a. pendapatan daerah sebesar Rp884.655.699.039,10 (delapan ratus delapan puluh empat miliar enam ratus .. dst), terdiri atas:
   1. pendapatan asli daerah sebesar Rp92.121.048.046,10 (Sembilan puluh dua miliar seratus ... dst);
   2. pendapatan transfer sebesar ... dst; dan
   3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar ... dst.

b. belanja daerah sebesar Rp608.467.267.791,10 (enam ratus delapan miliar ... dst). terdiri atas:
   1. dst.

h. Rumusan perintah pengundangan diubah menjadi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

i. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm. sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMATERA BARAT

JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 903 - 536 - 2022

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
1 Judul	a. Lambang Negara, hanya dicantumkan pada naskah rancangan Peraturan Daerah yang akan diterapkan oleh Kepala Daerah. b. Untuk judul Rancangan Peraturan Daerah, nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).	a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Perpres 87/2014 b. Sesuai dengan angka 4a Lampiran II UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
2. Konsiderans "Menimbang"	Rumusan diubah menjadi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;		menjadi perhatian dimasa yang akan datang
3. Dasar hukum "Mengingat"	- angka 2 dan angka 3 rumusan diubah dengan mencantumkan "Republik Indonesia" setelah frasa "Tambahan Lembaran Negara" - angka 9, 10 dan angka 11 ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Daerah".	Sesuai dengan angka 47 dan angka 49 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
4. Diktum	Sebelum kata Memutuskan kata "Dan" pada Frasa "Dengan Persetujuan Bersama" ditulis dengan awalan hurul kecil	Sesuai dengan angka 56 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
5. Pasal 1 ayat (1)	Tabulasi penulisan diubah: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;	Sesuai dengan angka 87 s d angka 94 Lampiran II UU 12/2011.	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
	f. Laporan Perubahan Ekuitas; **dan** Catatan atas Laporan Keuangan.		
6. Pasal 1 ayat (2)	- Tanda baca titik koma diubah menjadi tanda baca titik. - Untuk perusahaan daerah, apakah bukan merupakan badan usaha milik daerah? Jika sama, maka "perusahaan daerah" yang tercantum dalam pasal-pasal lainnya dihapus.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
7. Pasal 2	- Rumusan diubah menjadi: Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a **terdiri atas: ... dst**		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
8. Pasal 3	- Rumusan diubah menjadi: Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **terdiri atas: ... dst** - Penulisan "(1)", "(2)" ..**dst** diubah menjadi huruf "a", "b" dst.	Sesuai dengan angka 87 s.d angka 94 Lampiran II UU 12/2011.	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
9. Pasal 4	Rumusan diubah menjadi: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (1)** huruf e per 31 Desember 2021 **terdiri atas**: dst.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
			perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
10.Pasal 5	Rumusan diubah menjadi: Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **ayat (1)** huruf d per 31 Desember 2021 **terdiri atas**: ... dst		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang
11.Pasal 6	Rumusan diubah menjadi: Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **ayat (1)** huruf b per 31 Desember 2021 **terdiri atas:**		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
12.Pasal 7	Rumusan diubah menjadi: Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **ayat (1)** huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 **terdiri atas**:		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
13.Pasal 8	Rumusan diubah menjadi: Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **ayat (1)** huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 **terdiri atas**:		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
14.Pasal 9	Rumusan diubah menjadi: Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **ayat (1)** huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
15.Pasal 10 huruf a	Sesuai dengan ketentuan angka 194 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. Sehingga, jika Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas beberapa uraian, tidak menggunakan penyebutan "Lampiran I.1, Lampiran I.2" atau seterusnya. Cukup diuraikan menjadi bagian Lampiran I.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
16.Pasal 11	Rumusan diubah menjadi: Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rinclan lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
			menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
17. Pasal 12	Tanda baca titik koma diubah menjadi tanda baca titik.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
18. Perintah pengundangan	Rumusan diubah menjadi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.	Sesuai dengan angka 163 Lampiran II UU 12/2011	Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
19 Penjelasan	Ditambahkan Penjelasan sesuai dengan angka 174 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.		Terimakasih atas masukan dan sarannya. Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
20.	Naskah Raperda diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah	Sesuai dengan angka 284a Lampiran II UU 12/2011	Terimakasih atas masukan dan sarannya.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN	TANGGAPAN
	pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.		Hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

Padang Aro, Juli 2022
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 903 - 474 - 2023

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	HASIL EVALUASI	TANGGAPAN	KET
I.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :		
A.	KONSISTENSI		
	Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja		

	dan pembiayaan. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp854.266.062.246,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp962.869.500.804,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp854.266.062.246,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp962.869.500.804,00 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022. 2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022. 3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022. Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.	Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten menyusun Perda	

		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.	
B.	LEGALITAS Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :		
1.	Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ditandatangani tanggal 20 Juni 2022, selangkan tanggal surat Bupati kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama adalah tanggal 23 Mei 2022. Hal ini *sudah sesuai* dengan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa	

		oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	
2.	Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 6 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 9 Juni 2022, *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. Ke depannya, Bupati Solok Selatan dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten sesuai dengan maksud Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.	
3.	Kelengkapan Dokumen Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi	Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap konsisten memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas : a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas : 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3) Lampiran III : Laporan operasional; 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 5) Lampiran V : Neraca; 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;		

	7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah		

	b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas : 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.		
C.	KEBIJAKAN Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :		
	1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		
	a. PENDAPATAN DAERAH Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp884.655.899.039,10 atau 103,56% dari target yang dianggarkan sebesar Rp854.266.062.216,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp11.969.536.739,00, atau 1,38% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp866.235.598.985,00.		

	Terdapat perbedaan jumlah realisasi Pendapatan Daerah pada Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp884.655.899.039,10 dengan Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan halaman 367 dinarasinya tertulis sebesar Rp884.656.560.392,10. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas : 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp92.121.048.016,10 atau 124,68% dari target yang dianggarkan sebesar Rp73.885.025.000,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah Rp6.574.828.847,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.459.853.847,00 atau turun sebesar 8,17%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas : a) Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.006.714.870,10 atau 90,08% masih kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.218.945.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih rendah sebesar Rp4.281.224.327,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp16.500.169.327,00 atau turun 25,95%.	Terdapat perbedaan karena terjadinya kesalahan dalam narasi dalam laporan keuangan halaman 367, namun dalam Laporan Keuangan, di dalam judul dan tebel angkanya sesuai yaitu Rp884.655.899.039,10, selanjutnya kami akan melakukan perbaikan.	

		Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah : (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.999.906.655,00 atau 132,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.509.000.000,00. (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp139.606.846,00 atau 126,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00. (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp5.457.965.943,00 atau 107,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.090.775.000,00. (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp692.749.243,00 atau 138,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain : (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp97.148.159,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp1.315.706.188,10 atau 65,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00. (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.294.461.836,00 atau 44,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00. Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :		

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.11.263.000.000,00	Rp. 7.618.652.369,80	67,64
2019	Rp.12.908.000.000,00	Rp. 8.435.031.570,50	65,35
2020	Rp. 6.599.221.993,00	Rp. 6.800.569.115,50	103,05
2021	Rp.18.526.000.000,00	Rp.16 500.169.327,00	89,06
2022	Rp.12.218.945.000,00	Rp.11.006.714.870,10	90,08

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi, dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali Tahun 2020 yang melebihi dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum optimal dalam upaya pencapaian realisasi pajak daerah sesuai target yang ditetapkan

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih cermat lagi dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

Terimakasih, Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih cermat lagi dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah

	b) Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.354.215.128,00 atau 112,94% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.084.500.000,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.235.018.343,00 naik sebesar Rp849.481.657,00 atau 68,78%. Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp122.519.000,00 yang semula tidak dianggarkan. (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp507.447.501,00 atau 187,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp271.000.000,00. (3) Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar	tahun-tahun sebelumnya dan akan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.	

Rp753.745.227,00 atau 225,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00.

(4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, terealisasi sebesar Rp282.505.000,00 atau 111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.500.000,00.

(5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp35.915.000,00 yang semula tidak dianggarkan.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain :

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp132.471.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.

(2) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp56.252.000,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp45.048.000,00 atau 18,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4

2018	Rp.2.085.000.000,00	Rp. 922.009.350,00	44,22
2019	Rp.2.940.000.000,00	Rp.1.362.801.219,00	46,35
2020	Rp 996.875.000,00	Rp.1.199.290.189,50	120,30
2021	Rp.1.458.750.000,00	Rp 1.235.018.343,00	84,66
2022	Rp.2.084.500.000,00	Rp.2.354.215.128,00	112,94

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang sudah mencapai target adalah pada tahun 2020 dan tahun 2022. Namun pada tahun 2020 tersebut target yang ditetapkan jauh di bawah realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya serta secara nominal pencapaian realisasi tersebut merupakan yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

Terimakasih untuk tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi

melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 atau 100,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp699.148.981,00 atau naik 41,13% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.700.551.019,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.1.500.000.000,00	Rp.1.470.319.095,00	98,02

2019	Rp.2.500.000.000,00	Rp.1.677.244.574,00	67,09
2020	Rp.1.843.023.859,00	Rp.1.843.023.859,00	100,00
2021	Rp.1.700.551.019,00	Rp 1.700.551.019,00	100,00
2022	Rp.2.400.000.000,00	Rp2.415.762.950,00	100,66

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, akan tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.344.355.098,00 atau 133,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.181.580.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah Rp3.842.535.158,00 atau turun 6,30% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.024.115.158,00. *Terdapat perbedaan jumlah realisasi Jasa Giro pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan halaman 367 tertulis pada Tabel V.1 .1 5 Anggaran dan Realisasi Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp2.032.953.705.00 sedangkan pada Tabel V.1.16 Kenaikan/Penuruna Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021 tertulis sebesar Rp2.034.220.058.00, untuk dijelaskan.* Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain : (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp1.760.126.100.00 atau 305,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp575.433.904,00. (2) Pendapatan Bunga, realisasi sebesar Rp5.376.329.638,00 yang semula tidak dianggarkan.	Terimakasih, memang terdapat kesalahan dalam table V.1.16 karena kurang teliti dalam penyusunan CALK Kab. Solok Selatan Tahun 2022, kedepannya kami akan lebih cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan yang berikutnya. dan akan kamu lakukan perbaikan terhadap laporan keuangan.	

(3) Tuntutan Ganti kerugian Daerah, realisasi sebesar Rp7.299.096.037,00 yang semula tidak dianggarkan.

(4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, realisasi sebesar Rp6.841.059.102,00 atau 101,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp6 726.146.096,00

(5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp78.066.055,00 yang semula tidak dianggarkan.

(6) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp57.952.336.661,00 atau 131,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.080.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target hanya Penerimaan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp2.032.953.705,00 atau 35,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp5 800.000.000,00. terdapat perbedaan nilai realisasi Jasa Giro pada Tabel V.1.15 dengan tabel V.1.16 dalam CALK halaman 377.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.54.019.543.222,00	Rp.50.534.315.545,63	93,42
2019	Rp.58.081.704.083,00	Rp.56.367.708.480,53	97,05

2020	Rp.60.894.228.405,00	Rp.67.021.427.677,81	110,06
2021	Rp.63.646.859.275,00	Rp.61.024.115.158,00	95,88
2022	Rp.57.181.580.000,00	Rp.76 341.355.098,00	133,51

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain lain PAD yang Sah cenderung fluktuatif dan di tahun 2022 capaian realisasinya jauh lebih baik dari capain realisasi tahun 2021 serta melebihi target yang ditetapkan yaitu 133,51% yang disebabkan karena beberapa rincian objek Lain-lain Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang terealisasi tidak dianggarkan sebelumnya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Terimakasih. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp784.706.642.887,00 atau 101,84% dari yang dianggarkan Rp770.505.887.246,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran

	2021 sebesar Rp741.085.202.403,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.420.684.813,00 atau 3,97%. Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.878.208.106,00 atau 79,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.875.150.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.690.542.735,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp34.815.392.735,00 atau 77,90%. Penurunan ini disebabkan oleh Dana Hibah BOS sudah tergabung kedalam DAK Non Fisik BOS Reguler dan Kinerja pada Dana Transfer Pusat Tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terimakasih, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat	

	pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain : a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada : (1) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp122.519.000,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan. (2) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp57.957.336.661,00 atau 131,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.080.000.000,00. (3) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp507.447.501,00 atau 187,25% dari yang dianggarkan Rp271.000.000,00. (4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp282.505.000,00 atau	Terima kasih atas sarannya, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

	111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.500.000,00. (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada : (a) Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp1.999.906.655,00 atau 132,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.509.000.000,00. (b) Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp5.457.965.943,00 atau 107,21% dari yang dranggarkan sebesar Rp2.090.775.000.00. (c) Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp538.072.000,00 atau 269,04% dari yang dianggaran sebesar Rp200.000.000,00. b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain : (1) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp132.471.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00. (2) Dinas Perhubungan pada : (a) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp56.252.000,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. (b) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp45.048.000,00 atau 18,77% dari yang dianggaran sebesar Rp240.000.000,00. (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada : (a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar		

	Rp1.315.706.188,00 atau 65,79% dari yang dianggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. (b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar Rp1.294.461.836,00 atau 44,64% dari yang dianggaran sebesar Rp2.900.000.000,00. Khusus untuk PBB-P2, yang hanya mencapai realisasi 44,64% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.900.000.000,00, agar pencapaian realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain : 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021. 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu. 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah. Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah : 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi	Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan. Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah langkah yang disarankan agar realisasi pendapatan daerah dapat	

		target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nn. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah. 2) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat. 3) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. 4) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi. 5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer. 6) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat. 7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.	tercapai secara maksimal.	

Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realrsasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp813.620.609.303,77 atau 92,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp875.616.941.804,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp730.565.958.343,95 terjadi kenaikan sebesar Rp145.050.983.460,05 atau 19,85%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp608.487.257.791,10 atau 93,34% dari yang dranggarkan sebesar Rp651.903.104.887,00. Realrsasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp375.198.145.727,83 atau 96,25% dari yang dranggarkan sebesar Rp389.819.286.181,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%

1	2	3	4
2018	Rp.325.387.739.329,00	Rp.316.931.115.174,00	97,04
2019	Rp.360.438.357.095,00	Rp 341.301 328.489,01	94,69
2020	Rp.365.112.375.936,00	Rp.348.620.480.143,00	93,51
2021	Rp.380.470.171.065,00	Rp.372.832.719.871,00	97,99
2022	Rp.389.819.286.181,00	Rp.375.198.145.727,83	96,25

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya. Terdapat capaian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang kurang optimal Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp283.592.074,00 atau 90,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp312.952.974,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Sesuai aturan yang berlaku.

		(2) Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.250.350.259,27 atau 88,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.797.163.246,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya : (a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp89.739.537.601,27 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.529.317.585,82. (b) Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan terealisasi sebesar Rp982.225.155,00 atau 74,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.311.854.213,00. (c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.086.622.025,00 atau 85,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.276.394.910,00. (d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi sebesar Rp1.202.188.080,00 atau 75,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.602.500.000,00. (e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp41.066.968.641,00 atau 81,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.333.032.680,00. (f) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00. (g) Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar		

Rp2.734.072.027,00 atau 70,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.888.572.027,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.193.461.817.260,00	Rp.181.141.399.111,12	93,63
2019	Rp.227.031.473.180,00	Rp.208.116.228.520,01	91,67
2020	Rp.213.988.202.113,00	Rp.200.105.181.056,00	93,51
2021	Rp.262.567.458.456,00	Rp.221.928.878.307,05	84,52
2022	Rp.252.797.163.246,00	Rp.224.250.350.259,27	88,71

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif meskipun nominal realisasinya cenderung memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus lebih

Terimakasih, Pemerintah

	optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.	Kabupaten Solok Selatan akan lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.	
	(3) Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.9.038.761.004,00 atau 97,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.286.655.460,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.969.922.995,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.1.316.732.465,00 atau 16,52%. b) Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sebesar Rp202.072.297.511,67 atau 91,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp219.977.614.670,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp127.046.936.090,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp92.930.678.580 atau 73,15% Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.		

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp31.337.496.900,00 atau 87,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.627.253.955,00

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp9.288.671.660,08 atau 88,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.624.325 056,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.217.614.380.733,00	Rp.196.414.321.045,00	90,26
2019	Rp.301.666.389.574,00	Rp.210.375.471.214,00	69,74
2020	Rp.156.252.380.478,00	Rp.124.575.198.868,00	79,73
2021	Rp.170.062.407.944,00	Rp.127.046.936.090,00	74,71
2022	Rp.219.977.614.670,00	Rp.202.072.297.511,67	91,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung naik selama 3

		(tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. c) Belanja Tak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.061.054.001,00 atau 81,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.736.222.247,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp641.815.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.094.407.247,00 atau 482,13%. Hal ini disebabkan adanya Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan	Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	

		Rekonstruksi Tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.221.054.001,00. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.	Terimakasih atas sarannya, Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan akan lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.	
		2) Belanja Transfer Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp86.917.238.179,00 atau 99,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.252.559.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.571.875.630,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.319.316.630,00 atau 8,70%, yang terdiri dari : a) Transfer Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.095.023.679,00 atau 76,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.430.344.500,00 terdiri dari : (1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp923.276.367,00 atau 75,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.221.897.300,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa. (2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar		

	Rp171.747.312,00 atau 82,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp208.447.200,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa. b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp85.822.214.500,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.822.214.500,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b) merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut. 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi serta realisasi belanja yang melebihi anggaran :	Terimakasih. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih mendorong Desa/Nagari agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari.	

	a) SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi antara lain : (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan : (a) 02.2.01.21.5.1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp804.030.000,00 atau 59,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.340.490.000,00. (b) 02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp324.501.600,00 atau 51,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp627.309.800,00. (c) 02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik terealisasi sebesar Rp59.050.000,00 atau 0,85% dari yang dianggarkan Rp6.922.457.863,00. (d) 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan terealisasi sebesar Rp63.576.804,00 atau 5,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.225.821.938,00. (e) 03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi terealisasi sebesar Rp242.199.100,00 atau 55,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.520.800,00. (2) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :		

		(a) 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp163.150.200,00 atau 43,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp373.192.117,00. (b) 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp158.766.400,00 atau 28,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.312.574,00. (c) 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp26.457.500,00 atau 18,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.743.580,00. (d) 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp100.329.000,00 atau 35,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp280.679.099,00. (e) 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp75.898.400,00 atau 24,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp305.612.551,00. (f) 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp77.504.800,00 atau 40,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp192.798.100,00. (g) 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terealisasi sebesar Rp57.078.000,00 atau 42,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.983.548,00. (h) 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terealisasi sebesar Rp2.310.000,00 atau		

		7,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.379.537,00. (i) 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terealisasi sebesar Rp10.874.000,00 atau 21,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.280.000,00. (j) 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar Rp520.366.252,00 atau 44,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.165.932.361,00. (k) 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp539.395.100,00 atau 42,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.258.227.899,00. (l) 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terealisasi sebesar Rp883.246.000,00 atau 46,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.920.283.267,00. (m) 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp745.215.150,00 atau 40,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.818.505.882,00. (n) 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp10.774.300,00 atau 3,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.499.800,00. (o) 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar yang tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp623.700.000,00.		

	(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup antara lain pada sub kegiatan 03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp21.773.822,00 atau 10,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp201.765.800,00 b) SKPD yang realisasi belanjanya melebihi anggaran antara lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan : (1) 02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik terealisasi sebesar Rp24.769.817.055,00 atau 128,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.285.675.600,00. (2) 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD terealisasi sebesar Rp3.559.520.700,00 atau 116,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.042.456.140,00. Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti : 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan. 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.		

	3) Kesulitan melaksanakan kegiatan drakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK. 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah disyaratkan sebelumnya. 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebaimana yang telah diatur dalam juknisnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah diterapkan dalam APBD, antara lain : 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa. 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah,	Terimakasih sarannya, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran yang telah diretapkan APBD	

	sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaiman ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran. 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam. 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.		

	10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum. 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. *12) Khusus terhadap belanja pada SKPD Dinas Pendidikan yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.* c. PEMBIAYAAN Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp92.755.109.943,27 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp962.869.500.801,00 adalah 9,63%. Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :	Terimakasih sarannya kedepannya pemerintah kabupaten solok selatan akan lebih memperhatikan agar tidak terjadi kelebihan belanja dimasa mendatang, hal ini di sebabkan karena Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan tidak cermat menyesuaikan jumlah anggaran di perubahan APBD belanja BOS, sementara uangnya masuk ke rekening sekolah dan kedepannya dinas pendidikan tidak akan mengulang kesalahan tersebut dan secara berkala akan melakukan rekonsiliasi dengan sekolah supaya meminimalisir kesalahan.	

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp. 831.424.635.064,00	Rp. 22.004.356.720,06	2,65%
2019	Rp. 998.194.358.064,00	Rp. 66.825.361.913,08	6,69%
2020	Rp. 930.210.853.201,00	Rp 69.573.319.582,89	7,47%
2021	Rp. 919.633.509.773,00	Rp. 109.103.438.557,94	11,86%
2022	Rp. 962.869.500.804,00	Rp. 92.755.109.943,27	9,63%

d. Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2021 cenderung meningkat secara konsisten dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2021 mencapai 11,86%, namun di tahun 2022 turun menjadi 9,63%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Terimakasih atas sarannya.

		Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.	
	2. NERACA		
	1. NERACA Saldo asel per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.048.029.212.807,39 atau terjadi peningkatan sebesar Rp111.612.462.438,09 atau 5,76% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.936.416.750.369,30. Aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain : a. Aset Lancar Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(14.029.162.639,18) atau (9,26%) dari saldo		

		31 Desember 2021 sebesar Rp151.550.272.766,85. Aset tersebut antara lain terdiri atas : 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.792.228.072,27 yaitu : (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp79.143.345.993,74. Terhadap sisa kas pada kas daerah sebesar Rp79.143.345.993,74 yang bukan hak pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar dilakukan koordinasi dengan Bank Nagari agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan penyeloran ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan. (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp167.208.566,69. Terjadi peningkatan saldo kas di bendahara pengeluaran secara signifikan sebesar 1.116,82%. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.220.678,00. Terhadap saldo di bendahara penerimaan yang sampai akhir tahun masih bersisa sebesar Rp37.220.678,00 yang baru disetorkan sampai dengan 10 Januari 2023, tidak sesuai dengan yang	Termaksasih atas sarannya, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	

	tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Halaman 205 huruf c angka) yang berbunyi Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. (d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp12.193.379.820,62. (e) Kas Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp549.090.169,77. (f) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp701.982.844,00. Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pendapatan ataupun pengembalian belanja ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan kas mengingat kas mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu dengan pengelolaan kas yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan cash flow sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan kas melalui peningkatan kompetensi SDM seperti pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya serta menyempurnakan standar operasional dan prosedur dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.	Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan kas melalui peningkatan	

	2) Saldo Piutang Daerah Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp53.920.297.565,38 terdiri dari : (a) Piutang Pajak Rp 18.018.014.963,00 (b) Piutang Retribusi Rp 1.970.109.750,00 (c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 30.242.352.032,38 (d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 3.534.765.320,00 Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai	kompetensi SDM seperti pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya serta menyempurnakan standar operasional dan prosedur dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan	

	penyisihan piutang sebesar Rp36.865.589.673,88, yang meliputi : a) Penyisihan Piutang Pajak Rp (10.381.931.529,09) b) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (1.926.103.288,00) c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp (24.556.779.579,29) Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp17.054.707.891,50 yang terdiri dari : a) Piutang Pajak Rp 7.636.083.433,91 b) Piutang Retribusi Rp 44.006.462,00 c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 5.685 572.453,00 d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 3.534.765.320,00 Saldo piutang daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : a) Piutang Pajak yang bersumber dari : (1) PBB-P2 sebesar Rp7.167.325.584,00 (2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp468.757.849,91. Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam		

	melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet. b) Piutang Retribusi bersumber dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp44.006.462,00. c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari : (1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp8.633.436,55. (2) BLUD RSUD sebesar Rp5.675.638.039,78. (3) Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.300.976,76. d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari : (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.154.959.077,00. (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp661.047.607,00. (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp1.601.359.974,00. (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp27.398.662,00. 3) Beban Dibayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp380.518.319,00 yang merupakan Beban Pajak Kendaraan Bermotor. Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi	Terimakasih. kedepannya	

		terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya. 4) Persediaan Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.293.655.844,90 mengalami peningkatan sebesar Rp9.406.134.496,00 atau 52,58% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.887.521.348,90. Saldo persediaan tersebut antara lain : (a) Obat-Obatan sebesar Rp9.969.519.422,00. (b) Alat Kebersihan sebesar Rp1.386.066.262,00.	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sesungguhnya. Selain itu juga akan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Dan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, akan tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya	

		(e) Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp13.428.228.942,00. Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf a) merupakan antara lain persediaan obat obatan pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pertanian. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut. Terhadap persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga yang meningkat dari Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.	Terimakasih kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan pengendalian yang lebih baik terhadap persediaan Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya akandilaksanakan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan	

	b. Investasi Jangka Panjang Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berupa investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24 mengalami peningkatan sebesar Rp17.300.050.761,24 atau 41,61% dari tahun 2021 sebesar Rp41.574 364.596,00 dengan rincian antara lain : 1) Bank Nagari sebesar Rp15.496.000 000,00., 2) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00 3) PDAM Solok Selatan Inta Saribu Sungai sebesar Rp41.878.415.357,24. c. Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp2.992.000.662.981,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.755.015 758.203,27 terjadi penambahan sebesar Rp99.844.758.749,91 atau 5,73%, antara lain : 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp366.709.927.859,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp352.946.797.525,00 terjadi peningkatan sebesar Rp13.763.130.334,00 atau 3,90%. 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp343.963.123.810,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp318.584.122.340,99 terjadi peningkatan sebesar Rp25.379.001.470,00 atau 7,97%. 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp757.522.080.597,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp673.008.616.811,20 terjadi peningkatan sebesar	di akhir tahun	

	Rp84.513.463.783,00 atau 12,56%. 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.410.782.448.374,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.318.365.723.727,04 terjadi peningkatan sebesar Rp92.416.724.647,00 atau 7,01%. 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.007.519.047,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.511.102.598,04 terjadi penambahan sebesar Rp9.496.416.449,00 atau 26,01%. 6) Konstruksi dalam Pengerjaan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.015.563.293,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.599.395.198,00 terjadi penambahan sebesar Rp11.416.168.095,00 atau 20,53%, penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan antara lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam Cal K. Namun, apabila	Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang	

	pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. d. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp10.333.988.409,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.837.172.842,88 terjadi peningkatan sebesar Rp8.496.815.566,12 atau 462,49% antara lain berasal dari : 1) Aset Tak Berwujud sebesar Rp602.315.229,00, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* antara lain yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. 2) Aset Lain Lain sebesar Rp1.367.493.227,00 yang antara lain berasal dari aset rusak berat senilai Rp.8.859.566.377,00. Adapun Pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp.5.960.483.341,00 yang merupakan penghapusan atas Aset Lain-Lain. 3) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.364.179.953,00. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal.	dihentikan tersebut Terimakasih. kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset agar pemanfaatannya lebih	

	c. Kewajiban Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.302.466.783,51 mengalami peningkatan sebesar Rp2.550.490.566,51 atau 12,29% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.751.975.217,00. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas : 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp44.512.023,00 antara lain pada BLUD RSUD sebesar Rp37.500.000,00 merupakan pendapatan atas sewa ATM. Sementara Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.012.023 pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame. 2) Utang Beban sebesar Rp.23.220.835.631,51, terdiri dari : a) Utang Beban Pegawai sebesar Rp.1.572.923.689,51 merupakan utang kepada pegawai terhadap pengajuan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah. b) Utang Beban Barang dan Jasa di beberapa SKPD sebesar Rp.20.687.008.389,00 antara lain yang terbesar terdapat pada RSUD sebesar Rp.16.175.527.664,00 berupa Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. c) Utang Beban Transfer sebesar Rp.358.040.853,00 terdiri dari kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. belum	maksimal	

	dibayarkan atau dibagihasilkan kepada Pemerintah Nagari. d) Utang Beban Belanja Modal sebesar Rp.602.862.700,00 merupakan utang pada Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung Puskesmas Mercu sebesar Rp590.920.000,00 pada tahun 2020 sampai 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayarannya. 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.37.118.129,00 merupakan pengembalian Dana BOS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Khusus untuk RSUD yang sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan sistim BLUD, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BLUD berjalan dengan baik sehingga beban dapat diperkecil setiap tahun. Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan	Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BLUD berjalan dengan baik sehingga beban dapat diperkecil setiap tahun Terimakasih atas sarannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan segera menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan	
	3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)		

	Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.874.584.431,14 naik sebesar Rp60.960.836.745,14 atau 7,31% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp833.913.747.686,00. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp93.825.451.492,14 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.535.025.000,00 atau 127,59%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas : 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.512.850.774,10 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.059.775.000,00 atau 103,76%. 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.416.790,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.084.500.000,00 atau 105,85%. 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 89,47%. 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.690.423.978,04 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.690.750.000,00 atau 135,28%. b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar		

	Rp739.311.478.401,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp760.357.112.021,00 atau 97,23% Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas : 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp676.345.758.562,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp712.410.164.200,00 atau 94,94%. 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.965.719.839,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.946.947.821,00 atau 131,32%. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.737.651.538,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.875.150.000 atau 625,18%. Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Retribusi-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	Terima kasih atas sarannya, terkait dengan Pendapatan LO yang bersumber antara lain dari Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Retribusi-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan menjadikan	

		Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	
II.	Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut : 1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut: Tabel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan		

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

KODE			URAIAN	Total		
1			2	Anggaran	Belanja	Realisasi
1			**PELAYANAN UMUM**	**249.065.124.629,00**	**237.379.587.804,00**	**95,31%**
1	2	09	Pangan	4.200.806.661,00	4.082.230.553,00	95,60%
1	2	10	Komunikasi dan Informatika	7.507.584.410,00	7.304.313.416,00	97,29%
1	2	20	Statistik	95.305.000,00	91.779.700,00	96,72%
1	2	21	Persandian	37.500.000,00	36.269.300,00	96,70%
1	2	24	Kearsipan	122.096.516,00	121.728.100,00	99,05%
1	4	01	Sekretariat Daerah	37.097.208.369,00	33.399.601.985,00	90,03%
1	4	02	Sekretariat DPRD	27.694.793.850,00	26.759.402.910,00	96,93%
1	5	01	Perencanaan	5.267.511.689,00	4.589.140.190,00	87,20%
1	5	02	Keuangan	115.308.079.646,00	112.669.341.578,00	97,71%
1	5	03	Kepegawaian	28.861.895.605,00	26.652.779.972,00	92,35%
1	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	895.711.800,00	826.470.488,00	92,27%

		1	5	05			Penelitian dan Pengembangan	119.693.000,00	53.947.900,00	45,12%		
		1	6	01			Inspektorat	4.739.846.335,00	4.484.466.996,00	94,61%		
		1	7	1			Kewilayahan Administrasi Pemerintahan	10.842.339.748,00	16.308.671.216,00	96,83%		
		3				**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		**37.286.294.948,00**	**35.933.733.114,30**	**96,37%**		
		3	1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.900.337.364,00	32.806.904.033,30	96,77%		
		3	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik	3.370.007.584,00	3.126.829.081,00	92,79%		
		4				**EKONOMI**		**45.569.747.468,00**	**42.005.097.254,07**	**92,18%**		
		4	2	07			Tenaga Kerja	7.299.017.402,00	3.871.861.830,00	90,06%		
		4	2	13			Pemberdayaan Masyarakat Desa	501.165.900,00	461.500.022,00	91,56%		
		4	2	15			Perhubungan	6.974.880.258,00	6.601.359.400,00	94,69%		
		4	2	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.046.857.350,00	1.434.700.107,00	97,12%		
		4	2	18			Penanaman Modal	4.129.886.397,00	3.992.296.543,00	96,67%		
		4	3	25			Kelautan dan Perikanan	1.339.213.940,00	1.278.305.056,00	95,45%		

4	3	27			Pertanian	18.467.254.620,00	17.780.791.593,00	96,32%				
4	3	29			Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00%				
4	3	30			Perdagangan	3.060.830.273,00	2.637.256.551,07	85,99%				
4	3	31			Perindustrian	5.131.350.548,00	3.928.671.032,00	76,56%				
4	3	32			Transmigrasi	10.301.500,00	9.186.900,00	89,17%				
5				**LINGKUNGAN HIDUP**		**15.081.885.306,00**	**14.161.469.140,00**	**93,83%**				
5	2	10			Pertanahan	12.032.840.970,00	11.640.117.877,00	96,74%				
5	2	11			Lingkungan Hidup	3.049.064.736,00	2.511.351.263,00	82,36%				
6				**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**137.788.308.579,00**	**127.414.852.370,12**	**92,47%**				
6	1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.179.718.563,00	108.451.905.513,12	91,77%				
6	1	04			Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	19.608.590.016,00	18.962.946.857,00	96,71%				
7				**KESEHATAN**		**176.819.671.305,00**	**160.413.771.979,08**	**90,72%**				
7	1	02			Kesehatan	171.205.860.312,00	155.967.135.237,08	91,10%				
7	2	11			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.613.810.993,00	4.446.636.742,00	79,21%				
8				**PARIWISATA DAN BUDAYA**		**6.493.769.170,00**	**6.125.304.357,00**	**94,33%**				

8	2	22		Kebudayaan	1.459.206.321,00	1.200.973.648,00	87,70%
0	3	20		Pariwisata	5.064.562.849,00	4.344.330.709,00	86,22%
10				**PENDIDIKAN**	**280.744.488.259,00**	**265.573.570.201,20**	**94,60%**
10	1	01		Pendidikan	262.258.574.552,00	250.541.500.492,14	95,53%
10	2	10		Kepemudaan dan Olah Raga	5.329.072.052,00	4.494.061.422,00	84,33%
10	2	23		Perpustakaan	13.160.841.655,00	10.537.208.287,06	80,06%
11				**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**14.030.201.121,00**	**11.540.461.263,00**	**82,25%**
11	1	06		Sosial	7.219.845.037,00	5.081.431.381,00	70,38%
11	2	08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.590.328.080,00	1.410.416.027,00	88,69%
11	2	12		Administrasi Kependudukan dan Capil	5.272.028.004,00	5.068.612.945,00	96,14%
				JUMLAH	962.869.500.804,00	900.537.847.482,77	93,53%
				JUMLAH BELANJA	**962.869.500.804,00**	**900.537.847.482,77**	93,53%
				PERSENTASE	**100,00%**	**100,00%**	

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

	pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp962.869.500.804,00 terdapat sebesar 93,53% atau sejumlah Rp900.537.847.482,77 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten untuk meningkatkan kumitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpadun dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.	Terimakasih atas sarannya. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara	
	2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*) a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp270.105.297.102,00 atau 28,05% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp257.419.878.654,14 atau 28,59% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini *telah memenuhi* alokasi fungsi pendrdikan sekurang-kurangnya 20% (dua pufuh persen) dari total Belanja		

		Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir 6.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai brikut: **Tabel** Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan	Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan terus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	a. Belanja Pada Dinas Pendidikan	267.394.602.102,00	255.030.201.914,14	95,00
	1) Belanja Operasi	217.046.105.371,00	207.906.369.000,00	96,00
	a. Belanja Pegawai	170.607.446.063,00	174.515.982.901,00	98,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	31.960.439.208,00	27.153.646.139,00	85,00
	c. Belanja Hibah	6.477.704.000,00	6.236.721.960,00	96,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	50.349.662.731,00	47.130.001.914,14	94,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang	2.710.465.000,00	2.383.516.740,00	88,00
	1) Belanja Transfer	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)	1.598.465.000,00	1.271.516.740,00	80,00
	a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Kesra)	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	100,00
	a. Pengembangan Kerjasama Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pustakal	172.943.900,00	148.470.000,00	86,00
	a. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Pustaka)	19.609.100,00	18.798.500,00	96,00
2.	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN	270.105.297.102,00	257.413.878.654,14	95,30
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	962.869.500.804,09	900.537.847.632,77	
4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100	28,05	28,59	

	f. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp172.689.016.652,00 atau 17,93% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp149.993.517.842,76 atau 27,16% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini *telah memenuhi* alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh person) dari total Belanja Daerah di luar gaji*, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:	Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan selalu konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji,	

	Tabel Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan	sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	a. Belanja Pada Dinas Kesehatan	98.513.026.903,00	77.843.790.530,70	05,00
	1) Belanja Operasi	83.512.826.069,00	70.465.700.130,70	85,00
	a. Belanja Pegawai	41.401.754.883,00	40.173.651.406,33	93,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	50.911.031.186,00	30.292.048.724,45	76,00
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	8.200.200.834,00	7.148.095.480,00	87,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan,	01 475 958.748,00	72.148.724.261,98	69,00
	1) Belanja Transfer			
	Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PSU)	21.431.401.048,00	13.093.634.370,00	61,00
	3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RS.UD)	404.947.000,00	404.947.000,00	100,00
	4) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	10.455.725.000,00	10.102.777.230,90	98,00
	5) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Lengkap	683.237.422,00	408.360.200,00	60,00
	6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	7) Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	46.704.018.458,00	46.704.018.458,01	100,00
	a Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	140.015.000,00	140.015.000,00	100,00
	9) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (DP2KB)	197.250.000,00	122.320.000,00	86,00
	a Pembinaan Perkiraan Pengembalian Penghutik Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.600.000,00	66.059.450,00	31,00
	10 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	752.124.946,00	718.512.975,00	96,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat a Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keserta Ber- KB (DP2KB)	324.000.000,00	287.660.370,00	89,00
2.	ANGGARAN KESEHATAN (a + b)	172.889.046.652,00	149.893.537.042,76	86,85
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	953.059.500.404,00	930.537.047.482,77	
4.	GAJI ASN	220.627.640.808,00	223.722.201.461,00	
5	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)	734.241.862.186,00	676.815.046.021,77	
6.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100	17,80	22,16	-

	c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp271.454.509.828,00 atau 62,56% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp433.899.135.698,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp249.856.979.043,67 atau 53,20% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp469.657.346.729,00. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *sudah* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir F.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah ***yang langsung terkait*** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar tetap konsisten secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur		

pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel

Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	Komponen Perhitungan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	BELANJA MODAL	223.826.027.820,00	202.072.297.611,87	90
	a. Tanah	11.631.338.810,00	11.111.352.377,00	95
	b. Peralatan dan Mesin	35.762.052.805,00	31.937.496.405,00	89
	c. Gedung dan Bangunan	78.689.011.717,00	69.959.671,561,00	88
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.429.582.441,00	89.128.228.699,59	93
	e. Aset Tetap Lainnya	1.313.031.977,00	1.205.948.176,00	91
	f. Aset Lainnya	337.402.000,00	0,00	-
	BELANJA PEMELIHARAAN	6.672.440.337,00	6.672.440.337,00	100
	BELANJA HIBAH	9.382.662.980,00	9.035.761.604,00	96
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR	82.973.479.391,00	82.078.479.391,00	100
2.	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH	271.454.509.928,00	249.856.979.043,87	92
3.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	62,76	53,20	85,04

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *akan tetap konsisten secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut

	Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut: a. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggara 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp54.253.844.931,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.643.724.692,00 atau 56,48% dari total realisasi Urusan Bidang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari: 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.		

	3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama. 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. *Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.* b. SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.109.621.107,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.776.400,00 atau 8,66% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:	Terimakasih, hal ini disebabkan kesalahan memasukkan realisasi di kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang seharusnya tercalisasi 100% dan sudah kami perbaiki	

	1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan. 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan. 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan. 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan. 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan. 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan. 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar		

	Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. *Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.* c. SPM Bidang Pekerjaan Umum Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp15.042.795.508,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.111.465.031,00 atau 93,81% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari: 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terimakasih, hal ini disebabkan tidak berjalannya sebagian kegiatan oleh OPD terkait, kedepannya akan dilakukan langkah-langkah supaya dapat tercalisasi 100%	

	Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp308.049.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp279.995.000,00 atau 90,89% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari: 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018. e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp24.986.577.823,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.105.173.497,30 atau 88,47% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:		

	1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota. f. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp205.592.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.548.820,00 atau 88,79% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari: 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.		

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.697.010.172,00 atau 3,40% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp11.894.866.357,00 atau 4,73% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa

	ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah. Hal ini *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. *Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Terhadap rendahnya pencapaian realisasi penggunaan produk dalam negeri ini agar diberikan penjelasan.* 5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional	Terimakasih, kedepannya kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target minimal	

	Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp919.633.509.773,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.018.408.444.861,00 atau 110,74% dari yang ditargetkan. *Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.*	yang dipersyaratkan Terimakasih, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatsn akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan	
	6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp20.153.057.078,00 atau 11,67% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp172.689.016.652,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022,		

	anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp16.619.902.049,00 atau 82,47% dari total alokasi dana yang dianggarakan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan. 7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp19.063.563.648,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp10.778.408.527,00 atau dengan tingkat capaian 56,54%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan		

	penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait rendahnya serapan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memberikan penjelasan dan kemudian disiapkan langkah langkah perbaikan untuk masa depan. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan : Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :	Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahtoraan masyarakat	

	1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Memadai. 2. Hilangnya Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Kekurangan Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp103.869.145,00. 4. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp245.143.500,00 dan Pemborosan sebesar Rp32.328.000,00 atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD. 5. Pembayaran atas Belanja Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp11.100.000,00. 6. Data Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp15.411.400,00 tidak akurat. 7. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp912.360.200,00. 8. Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan. 9. Kesalahan Pelanggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp4.852.774.305,22. 10. Perjanjian Kerja Sama atas Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Memadai dan Pengelolaan Rekening Belum Tertib. 11. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Kategori Macet. 12. Penatausahaan Persediaan pada Empat OPD Belum Tertib. 13. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib. Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti		

	maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.	Terimakasih, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti temuan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.	
III.	LAIN-LAIN		
	Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar	Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan langkah-langkah yang	

	Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.	diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	

Padang Aro, Juli 2022
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 BERDASARKAN HASIL EVALUASI DALAM KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 903 – 474 – 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah keluarnya hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 474 – 2023, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Hasil Evaluasi Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 474 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-474-2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Hasil Evaluasi Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-474-2023.

KEDUA : Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dan disempurnakan sebagaimana Hasil Evaluasi dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-474-2023.

KETIGA : Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ZIGO ROLANDA

Tembusan:
1. Yth. Sdr. Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Sdr. Kepala BPKD Kab Solok Selatan di Padang Aro.
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab Solok Selatandi Padang Aro.
4. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Solok Selatandi Padang Aro.

BERITA ACARA

Nomor : 130.05/BA/BUPATI-SS/VII/2023

Nomor : 6/BA/VII/DPRD/2023

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SOLOK SELATAN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 BERDASARKAN HASIL EVALUASI DALAM KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 903 – 474 – 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **H. KHAIRUNAS**
Jabatan	: Bupati Solok Selatan
Alamat Kantor	: Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	: **ZIGO ROLANDA, SE.,MM.**
Jabatan	: Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor	: Padang Aro
Nama	: **YENDRI SUSANTO**
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor	: Padang Aro
Nama	: **ARMEN SYAHJOHAN, S.IP**
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat	: Padang Aro

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 474 – 2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama telah melakukan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah kami sempurnakan bersama, dan seluruh Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

BUPATI SOLOK SELATAN,

H. KHAIRUNAS

PIHAK KEDUA

KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ZIGO ROLANDA, SE.,MM.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YENDRI SUSANTO

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ARMEN SYAHJOHAN,S.IP

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1.	pendapatan	Rp884.655.899.039,10
2.	belanja dan transfer	Rp900.537.847.482,77
	defisit	Rp(15.881.948.443,67)
3.	pembiayaan	
	a. penerimaan pembiayaan	Rp109.137.058.386,94
	b. pengeluaran pembiayaan	Rp500.000.000,00
	surplus	Rp108.637.058.386,94
	SILPA	Rp92.755.109.943,27

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp30.389.836.793,10 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp854.266.062.246,00
b. realisasi	Rp884.655.899.039,10
selisih lebih	Rp30.389.836.793,10

b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(61.996.332.500,23) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp875.616.941.804,00
b. realisasi	Rp813.620.609.303,77
selisih lebih	Rp61.996.332.500,23

c selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(109.171.084.594,05) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran defisit setelah perubahan	Rp(108.603.438.558,37)
b. realisasi	Rp(15.881.948.443,67)
selisih kurang	Rp(124.485.387.002,04)

d selisih anggaran dengan penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(33.619.828,94) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp109.103.438.558,00
b. realisasi	Rp109.137.058.386,94
selisih kurang	Rp. (33.619.828,94)

e selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp500.000.000,00
b. realisasi	Rp500.000.000,00
selisih lebih (kurang)	Rp0,00

f selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(33.619.829,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp108.603.438.558,00
b. realisasi	Rp108.637.058.386,94
selisih kurang	Rp(33.619.829,00)

Pasal 4

laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	saldo anggaran lebih	Rp108.603.438.558,00
b.	penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp109.137.058.386,94
	sub total	Rp(33.619.829,00)
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	Rp92.755.109.943,27
	sub total	Rp92.721.490.114,27
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp33.058.324,00
e.	lain-lain	Rp0,00
	saldo anggaran lebih akhir	Rp92.755.109.943,27

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	pendapatan laporan operasional	Rp894.874.584.431,14
b.	beban	Rp793.698.394.937,27
	surplus	Rp101.176.189.493,87
c.	defisit kegiatan non operasional	Rp(10.809.237.485,00)
	surplus sebelum pos luar biasa	Rp90.366.952.008,87
d.	defisit dari pos luar biasa	Rp(840.000.000,00)
	surplus laporan operasional	Rp89.526.952.008,87

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	jumlah aset	Rp2.048.029.212.807,39
b.	jumlah kewajiban	Rp23.302.465.783,51
c.	jumlah ekuitas	Rp2.024.726.747.023,88

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.109.314.512.460,94
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp184.430.222.968,00
c.	arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(200.812.171.411,67)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp(173.955.774,00)
f.	aaldo akhir per 31 Desember 2022	Rp92.792.228.072,27

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri atas:

a.	ekuitas awal	Rp1.915.664.775.152,30
b.	Surplus laporan operasional	Rp89.526.952.008,87
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp19.535.019.862,71
d.	koreksi nilai persediaan	Rp0,00
e.	selisih revaluasi aset tetap	Rp0,00
f.	koreksi ekuitas lainnya	Rp0,00
g.	ekuitas akhir	Rp2.024.726.747.023,88

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I laporan realisasi anggaran, terdiri atas;
   1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   3. rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
   4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b.	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	Neraca;
f.	Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/38/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3

DAFTAR ISI
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

NO	URAIAN / SKPD		NOMOR HALAMAN
1	2		3
	Daftar Isi		
	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan		i - vii
	LAMPIRAN		
	Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1 - 3
	Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	4 - 15
	Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	16 - 17
	Lampiran I.3	Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga		18 - 24
2	Dinas Kesehatan		25 - 33
3	RSUD Solok Selatan		34 - 35
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan		36 - 44
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		45 - 51
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		52 - 55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		56 - 59
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		60 - 64
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		65 - 68
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		69 - 73
11	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil		74 - 78
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		79 - 85
13	Dinas Perhubungan		86 - 90
14	Dinas Komunikasi dan Informatika		91 -95
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		96 - 99
16	Dinas Pustaka dan Arsip		100 - 103
	URUSAN PILIHAN		
17	Dinas Pariwisata Kebudayaan		104 - 108
18	Dinas Pertanian		109 - 115
19	Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM		116 - 122
	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG		
20	Sekretariat Daerah		123 - 130
31	Inspektorat		131 - 134
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		135 - 142
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)		143 - 149
34	Badan Kepegawai Daerah dan SDM		150 - 154
35	Sekretariat DPRD		155 - 159
36	Kecamatan KPGD		160 - 163
37	Kecamatan Sungai Pagu		164 - 168
38	Kecamatan Sangir		169 - 173
39	Kecamatan Sangir Jujuan		174 - 178
40	Kecamatan Sangir Batang Hari		179 - 183
41	Kecamatan Pauh Duo		184 - 188
42	Kecamatan Sangair Balai janggo		189 - 193
43	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		194 - 197
	Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	198 - 318
	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	319
	Lampiran III	Laporan Operasional	320 - 322
	Lampiran IV	LPE	323
	Lampiran V	Neraca	324 - 326
	Lampiran VI	Laporan Arus Kas	327 - 329
	Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	330 - 564
	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	565

	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	566
	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	567
	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	568
	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	569
	Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	570
	Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	571
	Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	572
	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	573
	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	574
	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	575
	Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	576
	Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah	577
	Lampiran XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (laporanlaba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah	579

LAMPIRAN I

Laporan Ralisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE REK	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN - LRA		854.266.062.246,00	884.655.899.039,10	103,56	866.235.598.985,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		73.885.026.000,00	92.121.049.046,10	124,69	80.459.853.847,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.A.1	12.219.945.303,00	11.006.714.873,10	90,08	16.500.169.327,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.A.2	2.054.500.303,00	2.354.215.128,00	114,94	1.335.018.343,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.A.3	2.400.000.000,00	2.415.762.950,00	100,66	1.700.551.019,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.2.1.A.4	57.191.580.000,00	76.374.355.058,00	133,51	61.024.115.158,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA		770.505.887.246,00	784.700.642.887,00	101,84	741.085.202.403,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.B.1	670.317.001.555,00	678.013.344.009,00	100,85	632.792.065.983,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.B.1.a	30.783.660.000,00	51.482.888.775,00	167,24	37.537.868.415,00
4.2.1.2	Bagi Hsl. Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.B.1.b	14.388.965.000,00	18.897.660.392,00	131,36	14.637.097.065,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.B.1.c	436.929.974.198,00	436.897.980.562,00	99,99	437.774.072.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.B.1.d	188.216.802.357,00	168.734.846.280,00	89,65	143.242.038.502,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.B.2	37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00	56.256.306.000,00
4.2.2.5	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.B.2.a	37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00	56.256.306.000,00
4.2.2.4	Dana Otsus - LRA	5.1.1.B.2.b	0,00	0,00		0,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.B.3	51.067.734.691,00	59.572.147.878,00	116,65	49.536.830.420,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.B.3	51.067.734.691,00	59.572.147.878,00	116,65	49.536.830.420,00

KODE REK	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA		11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.B.4	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.C	9.875.150.000,00	7.828.208.105,00	79,27	44.690.542.735,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.C.1				21.790.000.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.C.2	9.875.150.000,00	7.828.208.105,00	79,27	22.900.542.735,00
5	BELANJA		875.616.941.804,00	813.620.809.303,77	92,92	730.565.958.343,95
5.1	BELANJA OPERASI		651.903.104.887,00	608.487.257.791,10	93,34	602.877.207.253,95
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.A.1	389.819.286.181,00	375.138.145.727,83	96,25	372.952.719.871,00
5.1.2	Belanja Barang	5.1.2.A.2	252.797.163.246,00	224.250.350.259,27	88,71	221.928.878.307,95
5.1.3	Belanja Hibah	5.1.2.A.3	9.286.655.460,00	9.038.761.804,00	97,33	7.368.522.995,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A.4	0,00	0,00	0,00	145.636.080,00
5.2	BELANJA MODAL		219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86	127.046.936.090,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.B.1	11.375.594.791,00	11.111.952.077,30	97,68	13.254.518.800,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.B.2	35.627.253.955,30	31.337.436.900,30	87,96	24.156.830.388,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.B.3	78.624.325.058,30	69.238.671.680,98	88,13	22.800.307.739,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.B.4	93.071.814.551,30	89.126.228.639,59	95,76	62.841.156.713,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B.5	1.276.630.307,00	1.205.948.175,00	94,46	1.194.424.450,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA		3.736.222.247,00	3.061.054.001,00	81,93	641.815.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.C	3.736.222.247,00	3.061.054.001,00	81,93	641.815.000,00
6	TRANSFER		87.252.559.000,00	86.917.238.179,00	99,62	95.571.875.630,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.430.344.500,00	1.095.023.679,00	76,56	1.641.329.910,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasi Pajak Daerah	5.1.3.1.a	1.221.997.300,00	923.276.367,00	75,56	1.507.491.166,20
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.b	208.747.200,00	171.747.312,00	82,39	133.838.744,20
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	85.822.214.500,00	85.822.214.500,00	100,00	93.930.545.720,00

KODE REK	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.a	85.822.214.500,00	85.822.214.500,00	100,00	93.930.545.720,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.b	0,00	0,00		0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.4	(108.603.438.558,00)	(15.881.948.443,67)	14,62	40.097.765.011,05
7	PEMBIAYAAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5	109.103.438.558,00	109.137.058.386,94	100,03	69.505.673.546,89
7.1.1	Penggunaan SiLPA		109.103.438.558,00	109.137.058.386,94	100,03	69.505.673.546,89
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.7	108.603.438.558,00	108.637.058.386,94	100,03	69.005.673.546,89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			0,00	92.755.109.943,27		109.103.438.557,94

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, 20 Juli 2023

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN I.1

Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Lampiran I.1 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	554.265.062.240,00	884.035.899.039,10	30.180.836.798,10	103,56
4 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	44.360.000.000,00	58.307.320.661,00	13.852.320.661,00	131,23
4 . 1.02	**Kesehatan**	44.000.000.000,00	58.074.855.861,00	13.984.955.861,00	131,75
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	0,00	122.519.000,00	122.519.000,00	0,00
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	44.000.000.000,00	57.952.336.861,00	13.952.336.861,00	131,47
4 . 1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	275.000.000,00	132.471.000,01	(142.529.000,00)	48,17
4 . 1.04 . 1-04.2-11.1-07.01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	275.000.000,00	132.471.000,00	(142.529.000,00)	48,17
4 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	761.000.000,00	609.595.001,00	(151.404.999,00)	80,09
4 . 2.09	**Perhubungan**	490.000.000,00	101.300.000,00	(388.700.000,00)	20,67
4 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	490.000.000,00	101.300.000,00	(388.700.000,00)	20,67
4 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	271.000.000,00	507.447.501,00	236.447.501,00	187,25
4 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	271.000.000,00	507.447.501,00	236.447.501,00	187,25
4 . 2.12	**Penanaman Modal**	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
4 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint.	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
4 . 3	**Urusan Pilihan**	713.500.000,00	700.817.400,00	(12.682.600,00)	98,22
4 . 3.07	**Pariwisata**	267.500.000,00	282.505.000,00	30.005.000,00	111,68
4 . 3.07 . 3-26.2-22.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	252.500.000,00	282.505.000,00	30.005.000,00	111,88
4 . 3.07	**Perindustrian**	461.000.000,00	418.312.400,00	(42.687.600,00)	90,74
4 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	461.000.000,00	418.312.400,00	(42.687.600,00)	90,74
4 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	808.436.562.246,00	825.138.249.977,10	16.301.687.731,10	102,07
4 . 4.04	**Keuangan**	808.436.562.246,00	825.138.249.977,10	16.301.687.731,10	102,07
4 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	808.436.562.246,00	825.138.249.977,10	16.301.687.731,10	102,07
5	**BELANJA DAERAH**	963.809.500.804,00	880.587.847.482,77	(83.221.653.321,23)	91,63
5 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	672.301.925.044,00	571.791.823.513,94	(100.510.101.530,06)	85,05
5 . 1.01	**Pendidikan**	282.258.574.552,00	250.241.500.192,14	(32.017.074.059,86)	88,65

Printed by SIPD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	262.256.574.592,00	250.541.500.460,14	(11.717.074.068,06)	95,53
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	213.631.306.551,00	205.153.032.930,00	(8.380.273.721,00)	96,08
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	178.594.946.083,00	174.507.282.901,00	(4.087.601.102,00)	97,71
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.320.640.568,00	25.172.704.679,00	(4.147.935.933,00)	85,85
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Subsidi	5.617.720.000,00	5.473.082.400,00	(144.654.600,00)	97,43
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	48.624.267.901,00	45.387.467.982,14	(3.236.800.333,286)	93,15
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.998.352.238,00	15.691.035.768,00	(306.316.470,00)	98,09
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.160.271.356,00	28.391.486.619,14	(2.768.775.736,86)	90,88
5 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.276.676.303,00	1.205.945.175,00	(72.658.153,00)	94,32
5 . 1.02	Kesehatan	171.205.360.312,00	155.967.131.231,08	(15.238.325.074,02)	91,10
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	91.333.860.503,00	77.849.791.500,70	(13.483.996.922,22)	85,24
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	83.303.099.696,00	70.695.700.120,70	(12.607.399.510,22)	84,86
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	43.407.349.589,00	40.178.651.405,33	(3.228.698.183,67)	92,56
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.931.310.068,00	30.522.048.714,45	(9.409.261.374,55)	76,44
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	8.230.760.807,00	7.140.068.460,00	(1.090.692.347,00)	87,17
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.141.888.333,00	3.816.160.035,00	(325.728.304,00)	92,13
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.715.972.301,00	3.049.932.525,00	(725.789.566,00)	80,38
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	281.000.000,00	219.601.000,00	(61.010.107,00)	99,04
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	79.871.959.809,00	78.121.341.536,38	(1.648.628.152,70)	96,06
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	67.204.592.354,00	66.735.204.223,32	(949.388.030,68)	99,60
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	28.281.631.812,00	25.991.602.980,50	(1.301.076.013,50)	95,15
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.830.960.642,00	41.103.621.224,82	363.660.582,82	100,67
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	11.637.377.555,00	11.318.137.432,98	(998.240.122,02)	24,98
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.302.557.422,00	1.185.028.022,00	(117.029.400,00)	91,02
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.352.215.883,00	10.152.680.410,98	(199.706.472,02)	98,07
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Lainnya	282.604.250,00	0,00	(282.604.250,00)	0,00
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.179.718.563,00	108.451.905.513,12	(9.727.813.049,88)	91,77
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	110.179.718.563,00	106.451.905.513,12	(9.727.813.049,88)	91,73
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	30.275.029.306,00	28.145.022.156,00	(2.129.006.230,00)	92,97
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.158.240.767,00	6.072.041.184,00	(105.559.583,00)	97,26
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.516.782.619,00	21.973.080.972,00	(1.543.706.647,00)	91,33
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	83.961.090.177,00	80.305.483.357,12	(3.598.806.819,88)	91,19
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.227.127.700,00	4.552.351.194,00	(1.675.276.506,00)	73,10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.207.641.927,00	12.127.757.302,90	(2.079.884.624,10)	85,37
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.969.318.150,00	63.565.734.830,22	(3.403.583.319,78)	94,92
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.608.590.010,00	18.962.946.855,00	(645.643.155,00)	96,71
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	19.608.590.010,00	18.962.946.852,00	(645.643.158,00)	96,71
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 1	BELANJA OPERASI	10.824.589.276,00	10.472.666.914,00	(351.922.361,00)	96,75
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.551.061.001,00	3.409.736.710,00	(176.324.341,00)	95,03
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.279.928.194,00	7.064.529.124,00	(135.329.420,00)	97,56
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 2	BELANJA MODAL	8.784.000.741,00	8.490.280.543,00	(293.720.398,00)	96,66
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.021.650,00	65.840.594,00	(6.181.056,00)	91,57
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.609.302.000,00	4.531.500.350,00	(78.482.250,00)	98,30
5 . 1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.101.967.091,00	3.892.821.599,00	(209.105.192,00)	94,90
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.509.317.254,00	32.006.804.003,30	(1.102.103.330,70)	95,75
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.431.164.406,00	8.186.013.143,00	(240.177.352,00)	97,15
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.154.436.006,00	7.974.050.143,00	(180.327.862,00)	97,79
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.892.629.172,00	5.583.528.194,00	(109.101.078,00)	98,18
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.808.733,00	2.090.521.949,00	(71.276.784,00)	96,75
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	282.716.400,00	232.017.000,00	(50.799.400,00)	70,05
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.716.400,00	232.917.000,00	(50.799.400,00)	78,85
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	Kedan Penanggulangan Bencana Daerah	25.472.192.069,00	24.809.926.060,00	(662.255.978,70)	96,61
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	5.486.150.512,00	4.690.657.892,00	(676.492.370,00)	85,54
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.256.960.644,00	3.171.429.223,00	(85.436.821,00)	91,33
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.230.200.870,00	1.519.220.670,00	(320.052.849,00)	67,84
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	19.976.009.797,00	18.919.289.000,30	(56.763.208,70)	90,72
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.342.000,00	5.577.250,00	(8.164.750,00)	47,50
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.864.280.297,00	19.913.691.138,30	(50.598.958,70)	99,75
5 . 1.06	Sosial	7.219.845.037,00	5.061.431.301,00	(2.158.413.656,00)	70,10
5 . 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.219.845.037,00	5.061.431.381,00	(2.158.413.656,00)	70,10
5 . 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	7.200.711.177,00	5.044.031.381,00	(2.156.679.796,00)	70,05
5 . 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.537.257.662,00	2.102.100.007,00	(75.107.055,00)	97,06
5 . 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.643.443.515,00	2.561.320.774,00	(2.081.672.741,00)	55,17
5 . 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	19.133.860,00	17.400.000,00	(1.733.860,00)	90,94
5 . 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.133.860,00	17.400.000,00	(1.733.860,00)	90,94
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	72.034.163.344,00	69.394.030.010,06	(2.640.133.333,94)	96,33
5 . 2.01	Tenaga Kerja	4.299.017.400,00	3.871.951.839,00	(427.165.561,00)	90,06

Printed By SIMDA

KODE URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.01 . 2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.239.017.402,00	3.831.051.939,00	(407.965.563,00)	90,38
5 . 2.01 . 2-07.3-32.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.744.697.506,00	3.492.566.899,00	(252.128.607,00)	93,27
5 . 2.01 . 2-07.3-32.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.110.960.105,00	1.992.010.614,00	(118.949.491,00)	94,37
5 . 2.01 . 2-07.3-32.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.633.737.401,00	1.499.556.285,00	(134.178.116,00)	91,79
5 . 2.01 . 2-07.3-32.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	554.319.896,00	379.282.940,00	(175.036.956,00)	68,42
5 . 2.01 . 2-07.3-32.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.319.896,00	379.282.940,00	(175.036.956,00)	68,42
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.598.328.080,00	1.410.416.937,00	(187.911.143,00)	88,24
5 . 2.02 . 2-14.2-09.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.598.328.080,00	1.410.416.937,00	(187.911.143,00)	88,24
5 . 2.02 . 2-14.2-09.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.598.328.080,00	1.410.416.937,00	(187.911.143,00)	88,24
5 . 2.02 . 2-14.2-09.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.598.328.080,00	1.410.416.937,00	(187.911.143,00)	88,24
5 . 2.03	Pangan	4.348.090.661,00	4.022.290.553,00	(101.800.108,00)	95,60
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.260.805.661,00	4.092.290.553,00	(101.800.108,00)	96,60
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.259.009.661,00	4.071.543.053,00	(187.526.748,00)	95,60
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.144.007.401,00	2.365.916.254,00	178.971.147,00	96,77
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.214.132.400,00	1.705.626.799,00	(108.505.601,00)	94,02
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	10.828.860,00	10.587.500,00	(141.360,00)	98,89
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.828.860,00	10.587.500,00	(141.360,00)	98,89
5 . 2.04	Pertanahan	12.032.840.530,00	11.840.117.837,00	(192.722.693,00)	98,34
5 . 2.04 . 1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	12.032.840.530,00	11.840.117.837,00	(192.722.693,00)	98,34
5 . 2.04 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	648.968.699,00	519.950.800,00	(129.018.899,00)	80,12
5 . 2.04 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.968.699,00	519.950.800,00	(129.018.899,00)	80,12
5 . 2.04 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	11.383.810.871,00	11.320.167.077,00	(963.703.794,00)	97,68
5 . 2.04 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	11.375.594.791,00	11.111.952.077,00	(263.642.714,00)	97,69
5 . 2.04 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.215.080,00	8.215.080,00	(71.080,00)	99,14
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	3.049.054.735,00	2.511.351.263,00	(537.703.472,00)	82,36
5 . 2.05 . 1-04.2-11.1-03.01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.049.054.735,00	2.511.351.263,00	(537.703.472,00)	82,36
5 . 2.05 . 1-04.2-11.1-03.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.011.054.735,00	2.480.851.263,00	(530.203.472,00)	82,39
5 . 2.05 . 1-04.2-11.1-03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.070.000,00	0,00	(1.070.000,00)	0,00
5 . 2.05 . 1-04.2-11.1-03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.015.984.735,00	2.480.851.263,00	(535.133.472,00)	82,26
5 . 2.05 . 1-04.2-11.1-03.01 . 2	BELANJA MODAL	38.000.000,00	30.500.000,00	(7.500.000,00)	95,71
5 . 2.05 . 1-04.2-11.1-03.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	30.500.000,00	(7.500.000,00)	95,31
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.212.028.009,00	5.059.612.945,00	(152.415.059,00)	97,25

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.06 . 2-12.0 00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.212.028.034.00	5.068.612.045.00	(143.415.059,00)	97.25
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.847.400.473,00	4.719.941.564,00	(127.538.859,00)	97.37
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.079.828.241,00	2.048.709.205,00	(31.119.036,00)	98,50
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.867.572.102,00	1.709.133.279,00	(91.438.903,00)	94.98
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	360.627.591,00	351.771.331,00	(15.856.200,00)	95,11
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.627.591,00	351.771.101,00	(15.856.200,00)	95.31
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	504.165.900,00	461.599.023,00	(42.566.877,00)	91.56
5 . 2.07 . 1-06.2-13.0-00.01	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	504.165.900,00	461.599.023,00	(42.566.877,00)	91,56
5 . 2.07 . 1-06.2-13.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	504.165.900,00	461.598.023,00	(42.566.877,00)	91,56
5 . 2.07 . 1-06.2-13.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.165.900,00	461.598.023,00	(42.566.877,00)	91,56
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.613.810.993,00	4.446.636.742,00	(1.167.174.251,00)	79,21
5 . 2.08 . 2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.613.810.993,00	4.446.636.742,00	(1.167.174.251,00)	79,21
5 . 2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	5.458.122.183,00	4.299.125.142,00	(1.158.997.041,00)	78,77
5 . 2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.308.541.405,00	2.233.835.661,00	(74.705.752,00)	96,76
5 . 2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.149.580.778,00	2.065.289.481,00	(1.084.291.289,00)	65,58
5 . 2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	155.688.810,00	147.511.600,00	(8.177.210,00)	94,75
5 . 2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.688.810,00	147.511.600,00	(8.177.210,00)	94,75
5 . 2.09	Perhubungan	8.971.009.258,00	8.604.360.408,00	(370.648.850,00)	94,69
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	8.971.009.258,00	8.604.359.408,00	(370.649.850,00)	94,69
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.368.022.008,00	8.052.496.408,00	(315.525.600,00)	94,60
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.175.756.885,00	4.939.220.423,00	(236.536.462,00)	95,43
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.222.265.134,00	1.114.287.985,00	(107.984.139,00)	91,16
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	576.867.249,00	551.863.000,00	(25.004.249,00)	95,67
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	576.867.249,00	551.863.000,00	(25.004.249,00)	95,67
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	7.507.504.410,00	7.304.313.416,00	(203.190.994,00)	97,29
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.507.504.410,00	7.304.313.416,00	(203.190.994,00)	97,29
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	6.637.475.240,00	6.482.619.041,00	(154.856.199,00)	97,66
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.840.044.042,00	2.783.195.979,00	(56.848.034,00)	98,12
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.796.870.298,00	3.699.423.133,00	(141.407.165,00)	96,26
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2	BELANJA MODAL	870.109.170,00	861.694.375,00	(8.414.795,00)	99,03
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	870.109.170,00	861.694.375,00	(8.414.795,00)	99,03
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.646.037.330,00	1.434.780.307,00	(212.057.023,00)	87,12

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAHAN / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.11 . 3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.646.837.350,00	1.434.780.307,00	(212.057.043,00)	87,12
5 . 2.11 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.646.837.350,00	1.434.780.307,00	(212.057.043,00)	87,12
5 . 2.11 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.646.837.350,00	1.434.780.307,00	(212.057.043,00)	87,12
5 . 2.12	Penanaman Modal	4.139.086.387,00	3.992.296.543,00	(137.589.854,00)	96,67
5 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.129.886.387,00	3.992.296.543,00	(137.589.854,00)	96,67
5 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.101.062.401,00	3.930.098.543,00	(170.963.950,00)	95,74
5 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.152.231.938,00	2.080.892.644,00	(71.339.294,00)	97,41
5 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.951.830.463,00	1.849.205.899,00	(62.624.656,00)	94,75
5 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	28.023.986,00	22.198.000,00	(5.825.986,00)	95,50
5 . 2.12 . 2-18.3-29.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.023.986,00	22.198.000,00	(5.825.986,00)	95,50
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	5.325.072.062,00	4.494.861.472,00	(830.210.590,00)	84,41
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	5.325.072.062,00	4.494.861.472,00	(830.210.590,00)	84,41
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.603.428.720,00	2.753.327.070,00	(748.001.650,00)	76,69
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	8.730.000,00	(3.770.000,00)	69,84
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.726.270.160,00	1.980.940.510,00	(745.329.650,00)	72,66
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	763.656.560,00	763.656.560,00	0,00	100,00
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	1.823.646.332,00	1.741.534.402,00	(82.110.980,00)	95,50
5 . 2.13 . 1-01.2-19.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.823.646.332,00	1.741.534.402,00	(82.110.980,00)	95,50
5 . 2.14	Statistik	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72
5 . 2.15	Persandian	37.500.000,00	36.263.300,00	(1.236.700,00)	96,70
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.500.000,00	36.263.300,00	(1.236.700,00)	96,70
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.263.300,00	(1.236.700,00)	94,50
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.263.300,00	(1.236.700,00)	94,50
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.16	Kebudayaan	1.459.236.921,00	1.280.973.648,00	(178.263.273,00)	87,79
5 . 2.16 . 3-26.2-22.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.459.236.921,00	1.280.973.648,00	(178.263.273,00)	87,79
5 . 2.16 . 3-26.2-22.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.261.046.321,00	1.084.134.248,00	(176.911.073,00)	85,97
5 . 2.16 . 3-26.2-22.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.910.000,00	1.800.000,00	(1.110.000,00)	61,86

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.16 . 5-26.2-22.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.258.130.321,00	1.092.294.748,00	(165.841.573,00)	86,82
5 . 2.16 . 5-26.2-22.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	196.160.000,00	196.838.900,00	(1.321.100,00)	99,32
5 . 2.16 . 5-26.2-22.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.160.000,00	136.838.900,00	(1.321.100,00)	99,33
5 . 2.17	Perpustakaan	13.160.841.655,00	10.537.208.287,00	(2.623.633.367,00)	80,06
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.160.841.655,00	10.537.208.287,00	(2.623.633.367,00)	80,06
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.065.745.655,00	2.003.709.927,00	(61.935.728,00)	97,00
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.244.451.243,00	2.216.921.700,00	(10.529.543,00)	99,02
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	641.294.412,00	587.867.527,00	(53.426.885,00)	91,67
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	10.275.768.000,00	7.713.419.060,06	(2.561.576.939,94)	75,07
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.275.000.000,00	7.713.410.060,06	(2.561.576.939,94)	75,07
5 . 2.18	Kearsipan	122.896.516,00	121.728.100,00	(1.168.416,00)	99,05
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	122.896.516,00	121.728.100,00	(1.168.416,00)	99,05
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	122.896.516,00	121.728.100,00	(1.168.416,00)	99,05
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.896.516,00	121.728.100,00	(1.168.416,00)	99,05
5 . 3	Urusan Pilihan	33.048.514.030,00	30.484.540.843,00	(2.564.073.186,00)	92,24
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	1.330.213.940,00	1.270.305.058,00	(60.908.882,00)	95,45
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.330.213.940,00	1.270.305.058,00	(60.908.882,00)	95,45
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.231.213.940,00	1.170.503.058,00	(60.708.882,00)	95,07
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	100,00
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.223.373.940,00	1.162.663.058,00	(60.708.882,00)	95,04
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.800.000,00	(200.000,00)	99,81
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	100.000.000,00	100.800.000,00	(200.000,00)	99,81
5 . 3.02	Pariwisata	5.034.562.849,00	4.844.330.709,00	(190.232.140,00)	96,22
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.034.562.849,00	4.844.330.709,00	(190.232.140,00)	96,22
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.013.915.007,00	4.850.642.332,00	(163.272.335,00)	96,81
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.200.705.892,00	3.196.810.228,00	(53.375.764,00)	99,16
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.531.720.096,00	1.453.832.104,00	(78.096.901,00)	94,79
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	220.647.792,00	193.688.377,00	(26.958.405,00)	87,78
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.647.792,00	68.967.572,00	(26.680.205,00)	72,11
5 . 3.02 . 3-26.2-22.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	124.720.000,00	(279.200,00)	99,78
5 . 3.03	Perhubungan	16.467.254.020,00	17.786.701.593,00	(80.163.027,00)	99,32
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	16.467.254.020,00	17.786.701.593,00	(681.463.027,00)	99,32
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	17.974.661.807,00	17.294.076.350,00	(679.775.280,00)	96,22

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.443.535.188,00	9.234.580.928,00	(213.356.260,00)	97,74
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.525.215.894,00	8.360.295.065,00	(466.140.829,00)	94,53
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	492.602.933,00	191.919.200,00	(887.730,00)	99,06
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.174.200,00	85.054.000,00	(120.700,00)	90,86
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	407.428.200,00	406.861.200,00	(567.000,00)	99,86
5 . 3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.05 . 2-18.3-29.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.05 . 2-18.3-29.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.05 . 2-18.3-29.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.06	Perdagangan	3.066.330.211,00	2.637.256.561,07	(429.573.321,93)	85,99
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.066.830.211,00	2.637.256.561,07	(429.573.321,93)	85,99
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.341.322.050,00	1.192.316.015,00	(149.006.035,00)	88,89
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	70.120.000,00	60.710.000,00	(9.410.000,00)	86,58
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.002.050,00	1.172.006.015,00	(139.996.035,00)	89,33
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 2	BELANJA MODAL	1.725.507.423,00	1.444.939.726,07	(280.567.696,93)	83,74
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.554.480,00	126.531.000,00	(4.023.480,00)	96,92
5 . 3.06 . 3-31.2-17.3-30.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.544.952.943,00	1.268.490.726,07	(276.454.216,93)	82,11
5 . 3.07	Perindustrian	5.131.350.548,00	3.928.671.032,00	(1.202.679.516,00)	76,56
5 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.131.350.548,00	3.928.671.032,00	(1.202.679.516,00)	76,56
5 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.147.900.087,00	3.099.872.032,00	(240.020.055,00)	94,02
5 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.992.421.941,00	2.874.770.272,00	(57.651.109,00)	96,00
5 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.215.478.746,00	1.025.101.800,00	(190.376.946,00)	84,34
5 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01 . 2	BELANJA MODAL	983.450.461,00	28.799.000,00	(954.651.461,00)	2,93
5 . 3.07 . 3-31.2-17.3-30.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	983.450.461,00	28.799.000,00	(954.651.461,00)	2,93
5 . 3.08	Transmigrasi	10.301.800,00	9.185.900,00	(1.115.900,00)	89,17
5 . 3.08 . 2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.301.800,00	9.185.900,00	(1.115.900,00)	89,17
5 . 3.08 . 2-07.3-32.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	10.301.800,00	9.185.900,00	(1.115.900,00)	89,17
5 . 3.08 . 2-07.3-32.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.301.800,00	9.185.900,00	(1.115.900,00)	89,17
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	240.368.830.626,00	228.870.652.316,00	(11.498.246.310,00)	95,22
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	37.097.205.089,00	33.999.801.905,00	(3.097.603.184,00)	91,65
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	37.097.205.089,00	33.999.801.905,00	(3.097.603.184,00)	91,65
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	34.160.005.223,00	30.802.668.153,00	(3.357.337.070,00)	90,17

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.410.713.527,00	10.471.543.401,00	(938.170.126,00)	91,78
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.614.191.696,00	18.298.934.982,00	(2.315.256.714,00)	88,80
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	2.035.000.000,00	1.931.790.900,00	(103.209.100,00)	94,93
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	2.937.303.146,00	2.596.932.832,00	(340.370.314,00)	88,41
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.927.303.146,00	2.590.012.832,00	(340.290.314,00)	88,37
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	(0,00)	99,97
5 . 4.02	Pengawasan	4.739.840.335,00	4.484.460.996,00	(255.379.339,00)	94,61
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	4.739.840.335,00	4.484.460.996,00	(255.379.339,00)	94,61
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.334.346.335,00	4.478.966.996,00	(255.379.339,00)	94,61
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.824.219.237,00	2.810.883.488,00	(13.335.749,00)	99,53
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.510.127.098,00	1.668.083.508,00	(242.043.590,00)	97,33
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.03	Perencanaan	5.252.511.689,00	4.578.140.190,00	(633.371.499,00)	87,20
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.202.511.689,00	4.569.140.190,00	(673.371.499,00)	87,80
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.03 . 1	BELANJA OPERASI	5.206.092.949,00	4.545.159.462,00	(661.752.087,00)	87,29
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.092.357.981,00	3.040.291.977,00	(52.066.004,00)	98,31
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.114.534.968,00	1.505.047.535,00	(609.487.053,00)	71,18
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.03 . 2	BELANJA MODAL	55.618.740,00	44.000.728,00	(11.618.412,00)	79,11
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.03 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.618.740,00	44.000.728,00	(11.618.412,00)	79,11
5 . 4.04	Keuangan	115.308.079.646,00	112.669.341.578,00	(2.638.738.068,00)	97,71
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.308.079.646,00	112.669.341.578,00	(2.638.738.068,00)	97,71
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 1	BELANJA OPERASI	23.797.083.370,00	22.281.940.458,00	(1.515.886.912,00)	93,63
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	19.467.917.374,00	18.566.253.629,00	(901.663.745,00)	95,37
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.334.921.286,00	3.721.695.869,00	(613.225.417,00)	85,85
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 2	BELANJA MODAL	521.464.789,00	409.102.700,00	(112.362.089,00)	78,45
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.536.000,00	213.027.000,00	(108.477.000,00)	65,87
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.303.789,00	119.950.700,00	(353.089,00)	99,85
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.625.000,00	75.125.000,00	(2.500.000,00)	96,78
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.736.222.247,00	3.061.054.031,00	(675.168.216,00)	81,93
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	3.736.222.247,00	3.061.054.031,00	(675.168.216,00)	81,93
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 4	BELANJA TRANSFER	87.252.159.000,00	86.917.238.139,00	(334.920.821,00)	99,62
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	1.450.944.500,00	1.085.023.679,00	(365.920.821,00)	74,78

Printed by SIMDA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.04 . 5 02.0-00.0-00.05 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	85.822.314.500,00	85.822.314.500,00	0,00	100,00
5 . 4.05	Kepegawaian	26.961.895.905,00	26.652.779.972,00	(309.115.933,00)	98,85
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.861.795.605,00	26.652.779.972,00	(2.209.115.633,00)	92,35
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	28.720.485.605,00	26.526.592.972,00	(2.193.892.633,00)	92,36
5 . 4.05 . 5-03.5-01.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.491.262.760,00	15.892.051.840,00	(1.599.210.920,00)	90,86
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.226.222.837,00	10.634.541.124,00	(591.681.713,00)	94,73
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	141.410.000,00	126.287.000,00	(15.123.000,00)	89,31
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.410.000,00	126.287.000,00	(15.123.000,00)	89,31
5 . 4.06	Pendidikan dan Pelatihan	895.311.800,00	826.470.488,00	(68.841.312,00)	92,31
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	895.311.800,00	826.470.488,00	(68.841.312,00)	92,31
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	895.311.800,00	826.470.488,00	(68.841.312,00)	92,31
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	895.311.800,00	826.470.488,00	(68.841.312,00)	92,31
5 . 4.07	Penelitian dan Pengembangan	119.553.000,00	53.947.900,00	(65.605.100,00)	45,12
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	119.553.000,00	53.947.900,00	(65.605.100,00)	45,12
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	119.553.000,00	53.947.900,00	(65.605.100,00)	45,12
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.553.000,00	53.947.900,00	(65.605.100,00)	45,12
5 . 4.08	Sekretariat DPRD	27.894.793.850,00	26.759.109.910,00	(1.135.360.940,00)	95,93
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	27.894.793.850,00	26.759.402.910,00	(1.135.390.940,00)	95,93
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	27.694.070.410,00	26.661.774.010,00	(1.122.604.400,00)	95,95
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.303.230.243,00	11.031.905.670,00	(421.364.573,00)	96,59
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.101.103.181,00	14.329.868.340,00	(701.239.827,00)	95,47
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	110.416.440,00	97.628.900,00	(12.786.540,00)	88,42
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.416.440,00	97.630.900,00	(12.785.540,00)	88,42
5 . 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	16.842.339.748,00	16.308.631.216,00	(533.708.532,00)	96,83
5 . 4.11 . 7-02.0-00.0-00.01	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	2.936.637.020,00	2.870.170.187,00	(33.468.831,00)	98,86
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.706.903.288,00	2.672.764.187,00	(33.143.101,00)	98,76
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.194.769.197,00	2.182.701.293,00	(12.067.904,00)	99,45
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	511.133.091,00	490.062.894,00	(21.070.197,00)	95,89
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	203.433.091,00	200.406.000,00	(325.800,00)	99,04
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.150.000,00	5.150.000,91	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.279.000,00	198.256.000,00	(323.000,00)	99,84
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Sungai Pagu	2.537.230.148,00	2.484.866.454,00	(38.344.795,00)	98,48
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	2.514.625.636,00	2.476.316.591,00	(38.320.041,00)	98,48

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.11 . 1 01.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.901.820.129,00	1.904.552.892,00	(6.075.769,00)	99,65
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	542.893.500,00	511.552.722,00	(31.344.778,00)	94,23
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	8.705.114,00	8.680.860,00	(24.254,00)	99,72
5 . 4.11 . 2 01.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.705.114,00	8.680.860,00	(24.254,00)	99,72
5 . 4.11 . 1-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Sangir	2.389.046.581,00	2.290.225.102,30	(98.821.330,00)	95,86
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.03 . 1	BELANJA OPERASI	2.356.557.561,00	2.230.836.162,00	(96.721.399,00)	95,90
5 . 4.11 . 2 01.0-00.0-00.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.491.408.670,00	1.479.644.772,00	(11.764.060,00)	99,21
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	865.148.891,00	780.191.410,00	(84.956.501,00)	90,18
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.03 . 2	BELANJA MODAL	33.389.020,00	33.389.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 2 01.0-00.0-00.03 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.389.020,00	33.389.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Sangir Jujuan	2.109.040.733,00	1.927.020.046,00	(182.020.733,00)	91,37
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.04 . 1	BELANJA OPERASI	2.009.040.787,00	1.907.030.066,00	(102.010.721,00)	0,29
5 . 4.11 . 1 01.0-00.0-00.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.555.084.807,00	1.425.254.376,00	(129.830.261,00)	91,67
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	524.014.930,00	481.715.490,00	(42.239.450,00)	91,94
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.04 . 2	BELANJA MODAL	19.991.012,00	19.000.000,00	(1.012,00)	99,99
5 . 4.11 . 2 01.0-00.0-00.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.991.012,00	19.990.000,00	(1.012,00)	99,99
5 . 4.11 . 1 01.0-00.0-00.05	Kecamatan Sangir Batang Hari	2.504.063.263,00	2.523.336.136,00	(32.140.179,00)	93,22
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.05 . 1	BELANJA OPERASI	2.514.240.407,00	2.445.100.178,00	(69.140.269,00)	93,25
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.951.062.257,00	1.836.971.308,00	(35.090.059,00)	97,18
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.178.150,00	549.129.340,00	(14.049.410,00)	97,51
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.05 . 2	BELANJA MODAL	80.742.860,00	77.736.000,00	(3.006.860,00)	96,28
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.05 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.742.860,00	77.736.000,00	(3.006.860,00)	96,28
5 . 4.11 . 2 01.0-00.0-00.06	Kecamatan Pauh Duo	2.143.049.556,00	2.123.331.301,00	(19.698.255,00)	99,08
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.06 . 1	BELANJA OPERASI	2.117.266.696,00	2.097.976.301,00	(19.319.395,00)	99,09
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.617.971.400,00	1.606.208.172,00	(11.763.228,00)	99,27
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.324.290,00	491.768.129,00	(7.556.167,00)	98,49
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.06 . 2	BELANJA MODAL	25.753.960,00	25.375.000,00	(378.960,00)	98,53
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.753.960,00	25.375.000,00	(378.960,00)	98,53
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.172.451.700,00	2.081.191.888,00	(91.259.020,00)	95,80
5 . 4.11 . 1 01.0-00.0-00.07 . .	BELANJA OPERASI	2.089.352.473,00	2.010.671.530,00	(80.680.075,00)	96,13
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.07 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.461.408.148,00	1.378.079.238,00	(83.328.910,00)	94,27
5 . 4.11 . 2-01.0-00.0-00.07 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	548.944.325,00	541.192.300,00	(7.752.025,00)	98,76
5 . 4.11 . 2 01.0-00.0-00.07 . 2	BELANJA MODAL	162.699.215,00	162.319.350,00	(300.505,00)	99,76

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.11 . 5-01.0-00.0-00.07 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.020.035,00	14.969.350,00	(50.685,00)	99,66
5 . 4.11 . 5-01.0-00.0-00.07 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.679.200,00	147.342.000,00	(337.200,00)	99,77
5 . 4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.376.957.584,00	3.126.829.081,00	(250.128.503,00)	92,59
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.376.957.584,00	3.126.829.081,00	(250.128.503,00)	92,59
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.356.057.584,00	3.106.029.081,00	(250.028.503,00)	92,55
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.334.566.566,00	1.293.021.622,00	(41.544.887,00)	96,89
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.197.312.135,00	903.650.515,00	(293.661.620,00)	75,47
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	830.278.900,00	830.248.944,00	(29.956,00)	100,00
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50
5 . 4.12 . 5-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
6 . 1.01	Pendidikan				
6 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga				
6 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	1.841.193,00	1.841.193,00	0,00
6 . 1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	1.841.193,00	1.841.193,00	0,00
6 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
6 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
6 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	35.000,00	(35.000,00)	0,00
6 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(35.000,00)	(35.000,00)	0,00
6 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
6 . 4.04	Keuangan				
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.103.438.558,00	109.135.452.193,94	32.013.635,94	100,03
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.103.438.558,00	109.135.452.193,94	32.013.635,94	100,03
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.05 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00

Lampiran I.2

Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Lampiran I.2 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	**PENDAPATAN DAERAH**	894.200.002.240,00	884.695.890.039,10	103,56	856.236.560.856,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	73.505.075.000,00	97.121.040.016,10	127,63	80.499.653.847,00
4.1.1	Pajak Daerah	12.218.943.000,00	11.006.714.826,10	90,08	16.530.169.327,00
4.1.2	Retribusi Daerah	2.084.500.000,00	2.354.215.120,00	112,94	1.236.018.748,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.415.762.660,00	100,66	1.700.951.019,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	57.101.500.000,00	79.344.355.098,00	138,97	61.024.115.150,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	730.505.887.240,00	704.706.842.007,00	101,94	741.063.202.403,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707.936.152.535,00	713.034.495.009,00	100,80	684.040.511.905,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	670.317.001.535,00	676.013.344.009,00	100,85	637.392.056.905,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.267.934.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00	40.380.521.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.569.734.705,00	25.672.347.998,00	113,75	56.936.830.470,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	51.087.734.891,00	59.672.347.998,00	116,80	49.536.830.470,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	9.875.150.000,00	7.826.208.106,00	79,27	44.699.542.006,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	21.750.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000,00	7.826.208.106,00	79,27	22.949.542.006,00
5	**BELANJA DAERAH**	962.859.980.864,00	900.537.842.482,27	93,53	826.137.053.973,96
5.1	**BELANJA OPERASI**	691.940.134.907,00	609.407.252.781,10	95,14	602.837.907.956,96
5.1.1	Belanja Pegawai	389.810.286.181,00	375.790.119.721,00	96,25	372.832.719.871,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252.797.151.216,00	224.250.350.259,27	88,71	221.690.070.307,96
5.1.3	Belanja Hibah	9.286.656.460,00	9.168.781.034,00	98,73	7.969.922.926,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	145.196.080,00
5.2	**BELANJA MODAL**	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86	172.048.936.890,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.315.584.194,00	11.111.552.077,00	98,19	18.254.516.900,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.037.057.235,00	31.337.496.900,00	89,44	34.150.930.388,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.342.017.506,00	68.252.071.560,00	97,03	20.609.001.708,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.021.814.561,00	80.178.228.609,67	96,58	62.841.155.713,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.270.000.307,00	1.209.948.175,00	94,52	1.194.421.450,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	202.301.250,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.736.222.247,00	3.061.054.001,00	81,93	641.015.030,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.736.222.247,00	3.061.054.001,00	81,93	641.015.030,00
5.4	BELANJA TRANSFER	97.252.358.000,00	96.917.235.179,00	99,67	95.571.975.830,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.430.144.500,00	1.095.023.079,00	76,56	1.641.329.910,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	94.822.214.500,00	95.822.214.500,00	100,00	93.930.645.920,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(108.603.438.558,00)	(15.901.940.443,67)	14,62	40.091.765.071,05
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.103.438.558,00	109.137.059.386,94	100,03	60.505.673.546,89
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.103.438.558,00	109.137.059.386,94	100,03	59.905.673.546,89
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	600.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	108.603.438.558,00	108.637.059.386,94	100,03	60.005.673.546,89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	92.735.109.943,27	0,00	100.103.438.557,94

Powered by SIMDA

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan
Organisasi : 1.01 1.01.2.19.0-00.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01	BELANJA DAERAH	267.583.016.804,00	255.036.061.914,14	(12.546.954.889,86)	95,31	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	179.231.191.014,00	175.081.304.126,00	(4.149.710.888,00)	97,68	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.365.986.083,00	134.310.042.981,00	(2.055.043.102,00)	98,51	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	177.092.966.083,00	173.810.992.901,00	(3.281.973.182,00)	98,15	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.02.01 5.1	BELANJA OPERASI	177.092.966.083,00	173.810.992.901,00	(3.281.973.182,00)	98,15	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.09.01 5.1.1	Belanja Pegawai	568.020.000,00	494.950.000,00	(73.070.000,00)	87,14	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	568.020.000,00	494.950.000,00	(73.070.000,00)	87,14	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.09.02 5.1	BELANJA OPERASI	568.020.000,00	494.950.000,00	(73.070.000,00)	87,14	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.02.02 5.1.1	Belanja Pegawai	415.916.132,00	396.270.529,00	(21.645.603,00)	94,91	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.497.819,00	7.475.000,00	(22.819,00)	99,70	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.01	Penyediaan Komputer, Peralatan Pendukung/Perangkat Jaringan Kantor	7.497.819,00	7.475.000,00	(22.819,00)	99,70	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.01 5.1	BELANJA OPERASI	7.497.819,00	7.475.000,00	(22.819,00)	99,70	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.01 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	128.584.755,00	121.616.039,00	(6.968.716,00)	94,58	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.997.755,00	73.979.000,00	(18.755,00)	99,97	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.02 5.1	BELANJA OPERASI	73.997.755,00	73.979.000,00	(18.755,00)	99,97	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.02 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.587.000,00	53.536.036,00	(2.050.964,00)	96,31	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.02 5.2	BELANJA MODAL	55.587.000,00	53.536.036,00	(2.050.964,00)	96,31	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.02 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.532.550,00	8.489.000,00	(43.550,00)	99,49	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.532.550,00	8.489.000,00	(43.550,00)	99,49	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.03 5.1	BELANJA OPERASI	8.532.550,00	8.489.000,00	(43.550,00)	99,49	
1.01 1.01.2.19.0-00.01 01 2.06.03 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	262.504.250,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.706.242.241,00	3.061.054.001,00	01,90	641.895.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.706.242.241,00	3.061.054.001,00	01,90	641.895.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	87.252.539.000,00	86.917.238.179,00	99,62	86.571.875.530,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.430.039.500,00	1.095.023.679,00	76,56	1.041.329.610,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	85.822.214.500,00	85.822.214.500,00	100,00	83.930.545.720,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(108.603.438.585,00)	(15.381.048.443,67)	14,62	40.090.765.011,05
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.103.438.585,00	100.132.060.386,94	100,03	89.905.673.546,89
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.103.438.585,00	100.132.060.386,94	100,03	89.905.673.546,89
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	100.603.438.585,00	100.632.060.386,94	100,03	89.905.673.546,89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	50.755.109.943,27	0,00	129.101.438.557,94

Printed By SAKD

LAMPIRAN I.3

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN & OLAH RAGA

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan
Organisasi : 1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 00.0.00.00 , 5	**BELANJA DAERAH**	267.583.646.000,00	255.036.361.014,14	(12.547.284.985,86)	95,31	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	179.231.104.014,00	175.081.384.726,00	(4.149.719.288,00)	97,68	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	176.085.908.003,00	174.910.972.901,00	(1.174.935.102,00)	99,33	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	177.797.965.083,00	174.815.992.901,00	(2.981.972.182,00)	98,32	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	177.797.965.083,00	174.815.992.901,00	(2.981.972.182,00)	98,32	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	177.797.965.083,00	174.815.992.901,00	(2.981.972.182,00)	98,32	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	568.020.000,00	494.060.000,00	(73.960.000,00)	87,14	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	568.020.000,00	494.060.000,00	(73.960.000,00)	87,14	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	568.020.000,00	494.060.000,00	(73.960.000,00)	87,14	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.916.132,00	395.270.529,00	(21.645.603,00)	94,81	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.497.819,00	2.475.000,00	(22.819,00)	99,09	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	2.497.819,00	2.475.000,00	(22.819,00)	99,09	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.497.819,00	2.475.000,00	(22.819,00)	99,09	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.561.755,00	127.515.000,00	(2.089.378,00)	98,40	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	73.997.755,00	73.979.000,00	(18.755,00)	99,97	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.997.755,00	73.979.000,00	(18.755,00)	99,97	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.2	BELANJA MODAL	55.567.000,00	53.536.036,00	(2.030.964,00)	96,31	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.2.2	Belanja Mesin Peralatan dan Mesin	55.567.000,00	53.536.036,00	(2.030.964,00)	96,31	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.532.556,00	8.489.000,00	(43.556,00)	99,49	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1	BELANJA OPERASI	8.532.556,00	8.489.000,00	(43.556,00)	99,49	
1.01 , 1-01.2-19.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.532.556,00	8.489.000,00	(43.556,00)	99,49	

Profile By SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.2.19.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.250.000,00	30.734.300,00	(3.515.700,00)	89,74
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	34.250.000,00	30.734.300,00	(3.515.700,00)	89,74
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	30.734.300,00	(3.515.700,00)	89,74
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.051.000,00	221.057.193,00	(15.993.807,00)	93,25
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	237.051.000,00	221.057.193,00	(15.993.807,00)	93,25
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237.051.000,00	221.057.193,00	(15.993.807,00)	93,25
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.619.799,00	184.939.374,00	(8.680.425,00)	95,52
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	19.665.428,00	(7.334.572,00)	72,83
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	27.000.000,00	19.665.428,00	(7.334.572,00)	72,83
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	19.665.428,00	(7.334.572,00)	72,83
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.839.799,00	150.060.000,00	(779.799,00)	99,48
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.660.000,00	1.360.000,00	(300.000,00)	81,93
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	1.360.000,00	(300.000,00)	81,93
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	BELANJA MODAL	149.979.799,00	148.700.000,00	(1.279.799,00)	99,15
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.979.799,00	149.500.000,00	(479.799,00)	99,68
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.463.946,00	(536.054,00)	96,43
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.463.946,00	(536.054,00)	96,43
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.463.946,00	(536.054,00)	96,43
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	77.330.465,00	(12.669.535,00)	85,93
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	59.904.965,00	(10.095.035,00)	85,58
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	59.904.965,00	(10.095.035,00)	85,58
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	59.904.965,00	(10.095.035,00)	85,58
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	9.434.500,00	(2.565.500,00)	78,62
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.434.500,00	(2.565.500,00)	78,62
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.434.500,00	(2.565.500,00)	78,62
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.562.000,00	112.842.457,00	(61.119.543,00)	58,91

Printed By SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.600.000,00	80.411.180,00	(44.188.820,00)	64,54	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	124.600.000,00	80.411.180,00	(44.188.820,00)	64,54	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124.600.000,00	80.411.180,00	(44.188.820,00)	64,54	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.962.000,00	32.431.277,00	(7.530.723,00)	81,16	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	39.962.000,00	32.431.277,00	(7.530.723,00)	81,16	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.962.000,00	32.431.277,00	(7.530.723,00)	81,16	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	83.779.260.334,00	72.657.924.590,14	(11.116.343.671,86)	86,73	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan berupa Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	49.340.160.002,00	27.851.044.389,00	(21.489.115.613,00)	56,44	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Penangkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	251.896.000,00	157.273.100,00	(100.622.900,00)	60,08	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	251.896.000,00	157.273.100,00	(100.622.900,00)	60,08	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237.896.000,00	157.273.100,00	(100.622.900,00)	60,50	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	26.015.032.202,00	25.452.560.300,00	(1.352.433.802,00)	94,92	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	464.732.624,00	317.448.500,00	(147.284.124,00)	68,31	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	102.490.300,00	101.740.000,00	(750.000,00)	99,27	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	362.242.324,00	215.708.500,00	(146.534.124,00)	59,55	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.2	BELANJA MODAL	25.550.269.878,00	25.135.120.200,00	(1.215.149.678,00)	95,39	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.840.317.000,00	10.628.940.000,00	(21.377.000,00)	99,80	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.401.952.878,00	14.506.180.200,00	(1.193.771.818,00)	92,40	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	488.001.800,00	436.215.800,00	(52.666.000,00)	89,39	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	488.001.800,00	436.215.800,00	(52.666.000,00)	89,39	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	487.401.800,00	435.615.800,00	(52.666.000,00)	89,31	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.14	Pengadaan Meja Sekolah	20.000.000,00	19.440.000,00	(560.000,00)	97,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.14 . 5.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	79.440.000,00	(560.000,00)	99,30	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.14 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.440.000,00	(560.000,00)	99,30	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.340.450.000,00	804.030.000,00	(536.460.000,00)	59,98	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.21 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.340.490.000,00	804.030.000,00	(536.460.000,00)	59,98	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.21 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.340.490.000,00	804.030.000,00	(536.460.000,00)	59,98	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19.285.675.600,00	24.782.817.055,00	5.497.141.455,00	128,51	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.338.809.485,00	19.967.306.722,00	4.628.497.237,00	130,18	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.969.485,00	17.800.443.322,00	3.849.473.837,00	127,59	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23 . 5.1.5	Belanja Hibah	1.387.840.000,00	2.167.062.400,00	779.222.400,00	156,15	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23 . 5.2	BELANJA MODAL	3.946.866.115,00	4.814.510.333,00	867.644.218,00	121,98	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.768.790.960,00	3.805.060.150,00	1.036.269.190,00	137,43	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	903.075.155,00	1.025.940.175,00	122.865.020,00	113,60	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	148.814.900,00	140.465.455,00	(8.349.445,00)	94,39	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.24 . 5.1	BELANJA OPERASI	148.814.900,00	140.465.455,00	(8.349.445,00)	94,39	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.24 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	148.814.900,00	140.465.455,00	(8.349.445,00)	94,39	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	67.640.000,00	56.120.000,00	(11.520.000,00)	82,97	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.25 . 5.1	BELANJA OPERASI	67.640.000,00	56.120.000,00	(11.520.000,00)	82,97	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.25 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.640.000,00	56.120.000,00	(11.520.000,00)	82,97	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	627.309.000,00	324.501.800,00	(302.807.200,00)	51,73	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.27 . 5.1	BELANJA OPERASI	627.309.000,00	324.501.800,00	(302.807.200,00)	51,73	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.27 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	627.309.000,00	324.501.800,00	(302.807.200,00)	51,73	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	236.430.000,00	192.713.200,00	(43.716.800,00)	81,51	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.28 . 5.1	BELANJA OPERASI	236.430.000,00	192.713.200,00	(43.716.800,00)	81,51	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.28 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	236.430.000,00	192.713.200,00	(43.716.800,00)	81,51	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.714.625.607,00	70.725.209.418,14	(10.046.308.161,86)	65,09	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.958.749.224,00	17.691.644.319,14	(2.265.104.904,86)	88,65	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.239.407.302,00	2.740.817.700,00	(498.589.602,00)	84,61	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.1.1	Belanja Pegawai	122.710.000,00	91.300.000,00	(31.410.000,00)	74,40	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.116.697.302,00	2.649.517.700,00	(467.179.602,00)	85,01	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.2	BELANJA MODAL	16.719.341.922,00	14.950.826.619,14	(1.768.515.302,86)	89,43	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.283.040.000,00	1.200.018.900,00	(83.021.100,00)	93,52	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.436.301.922,00	13.750.807.719,14	(1.685.494.202,86)	89,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.255.124.900,00	573.158.900,00	(681.966.000,00)	45,67	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.255.124.900,00	573.158.900,00	(681.966.000,00)	45,67	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.255.124.900,00	573.158.900,00	(681.966.000,00)	45,67	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6.932.457.863,00	59.050.000,00	(6.873.407.863,00)	0,85	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.638.606.731,00	59.050.000,00	(5.579.556.731,00)	1,05	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.113.176.731,00	59.050.000,00	(5.054.126.731,00)	1,15	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.1.5	Belanja Hibah	525.430.000,00	0,00	(525.430.000,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.2	BELANJA MODAL	1.293.851.132,00	0,00	(1.293.851.132,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	906.290.000,00	0,00	(906.290.000,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	387.561.132,00	0,00	(387.561.132,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	496.449.800,00	303.987.200,00	(192.462.600,00)	61,23	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.40 . 5.1	BELANJA OPERASI	496.449.800,00	303.987.200,00	(192.462.600,00)	61,23	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.40 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	496.449.800,00	303.987.200,00	(192.462.600,00)	61,23	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	141.843.820,00	98.399.000,00	(43.444.820,00)	69,37	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.41 . 5.1	BELANJA OPERASI	141.843.820,00	98.399.000,00	(43.444.820,00)	69,37	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.41 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	141.843.820,00	98.399.000,00	(43.444.820,00)	69,37	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.425.660.181,00	4.840.843.503,00	422.905.242,00	109,56	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.929.214.051,00	1.849.149.533,00	(80.064.518,00)	93,48	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.030.271.434,00	976.242.533,00	(54.028.901,00)	94,76	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	1.920.000,00	(180.000,00)	91,43	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.028.171.434,00	974.322.533,00	(53.850.901,00)	94,76	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.2	BELANJA MODAL	197.940.617,00	171.907.000,00	(26.033.617,00)	86,85	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.940.617,00	171.907.000,00	(1.033.617,00)	99,40	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.042.456.140,00	3.590.520.700,00	611.064.560,00	118,09	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.606.456.140,00	3.590.520.700,00	973.064.560,00	119,19	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	425.056.140,00	186.820.700,00	(261.235.440,00)	30,56	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.1.5	Belanja Hibah	2.561.400.000,00	3.395.300.000,00	834.000.000,00	132,57	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.2	BELANJA MODAL	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	113.650.000,00	105.013.000,00	(11.736.700,00)	92,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.16 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	117.550.000,00	105.813.300,00	(11.736.700,00)	90,02	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.16 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.550.000,00	105.813.300,00	(11.736.700,00)	90,02	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.17	Pemeliharaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	37.440.000,00	35.160.000,00	(2.280.000,00)	93,91	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.440.000,00	35.160.000,00	(2.280.000,00)	93,91	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.17 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.440.000,00	35.160.000,00	(2.280.000,00)	93,91	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.296.021.438,00	63.576.904,00	(1.232.245.534,00)	5,19	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.225.821.038,00	63.576.904,00	(1.162.245.134,00)	5,19	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.102.340.600,00	63.576.904,00	(1.038.813.696,00)	5,38	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	236.340.600,00	63.576.904,00	(172.763.696,00)	26,09	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12 . 5.1.5	Belanja Hibah	946.000.000,00	0,00	(946.000.000,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12 . 5.2	**BELANJA MODAL**	43.431.438,00	0,00	(43.431.438,00)	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.431.438,00	0,00	(43.431.438,00)	0,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepariwisataan**	4.256.292.452,00	3.637.227.522,00	(619.064.930,00)	85,46	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	2.002.953.932,00	1.870.145.902,00	(132.808.030,00)	93,37	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.002.953.932,00	1.870.145.902,00	(132.808.030,00)	93,37	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	179.997.500,00	129.611.150,00	(50.697.050,00)	71,73	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	8.130.000,00	(3.770.000,00)	68,32	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.097.500,00	121.481.150,00	(46.927.050,00)	71,91	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.822.645.347,00	1.741.534.752,00	(82.110.595,00)	95,50	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.823.645.332,00	1.741.534.752,00	(82.110.580,00)	95,50	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1.106.991.160,00	878.071.460,00	(228.920.000,00)	79,32	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	285.166.700,00	229.985.800,00	(55.180.900,00)	80,65	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	285.166.700,00	229.985.800,00	(55.180.900,00)	80,65	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.166.700,00	229.985.800,00	(55.180.900,00)	80,65	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	821.824.760,00	648.085.660,00	(173.739.100,00)	78,86	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	821.824.760,00	648.085.660,00	(173.739.100,00)	78,86	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	821.824.760,00	648.085.660,00	(173.739.100,00)	78,86	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	144.659.200,00	83.156.660,00	(61.502.540,00)	57,48	

Powered by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.03.02	Pemotongan Latihan Daerah, Riset Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (Sport Science)	144.669.200,00	83.154.000,00	(61.515.200,00)	57,48	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	144.669.000,00	83.154.000,00	(61.515.200,00)	57,48	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.669.000,00	83.154.000,00	(61.515.200,00)	57,48	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	563.656.560,00	563.656.560,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Kepelatihagan	563.656.560,00	563.656.560,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.04.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	563.656.560,00	563.656.560,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.04.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	563.656.560,00	563.656.560,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	438.520.800,00	242.199.100,00	(196.321.700,00)	55,23	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	438.520.800,00	242.199.100,00	(196.321.700,00)	55,23	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.05.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	438.520.800,00	242.199.100,00	(196.321.700,00)	55,23	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.05.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.520.800,00	242.199.100,00	(196.321.700,00)	55,23	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04	Program Pengembangan Kapasitas Kependudukan	321.481.800,00	264.125.000,00	(57.356.800,00)	82,16	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kependudukan	321.481.800,00	264.125.000,00	(57.356.800,00)	82,16	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kependudukan Tingkat Daerah	121.481.800,00	64.125.000,00	(57.356.800,00)	52,79	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	121.481.800,00	64.125.000,00	(57.356.800,00)	52,79	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.481.800,00	64.125.000,00	(57.356.800,00)	52,79	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kependudukan Tingkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1.5	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(207.983.040.004,00)	(255.036.361.014,14)	12.643.264.689,86	95,31	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 00.0.00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 00.0.00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	1.641.193,00	1.641.193,00	0,00	
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 00.0.00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	1.641.193,00	1.641.193,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	1.641.193,00	1.641.193,00	0,00	

DINAS KESEHATAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah

Nomor : 3

Tanggal : 23 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	6 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	0,00	122.519.000,00	122.519.000,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	0,00	122.519.000,00	122.519.000,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	0,00	122.519.000,00	122.519.000,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	38.110.454.797,00	37.088.128.912,00	(1.021.325.781,00)	97,32	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	36.506.420.198,00	35.663.340.523,00	(842.079.675,00)	97,69	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.075.360.198,00	35.279.925.523,00	(795.434.675,00)	97,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	36.075.360.198,00	35.279.925.523,00	(795.434.675,00)	97,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	36.075.360.198,00	35.279.925.523,00	(795.434.675,00)	97,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.060.000,00	383.415.000,00	(46.645.000,00)	89,15	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	430.060.000,00	383.415.000,00	(46.645.000,00)	89,15	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	421.740.000,00	378.825.000,00	(44.915.000,00)	89,40	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	4.590.000,00	(3.730.000,00)	32,61	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	985.021.189,00	895.221.295,00	(89.806.394,00)	90,88	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.749.989,00	52.892.500,00	(4.857.489,00)	91,59	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	57.749.989,00	52.892.500,00	(4.857.489,00)	91,59	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.05.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.749.989,00	52.892.500,00	(4.857.489,00)	91,59	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	439.000.000,00	416.696.956,00	(22.303.044,00)	94,92	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.606.382,00	33.803.500,00	(18.801.482,00)	70,70	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.730.000,00	4.020.000,00	(1.710.000,00)	70,16	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.876.382,00	29.783.500,00	(17.092.882,00)	63,53	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	406.337.618,00	382.893.456,00	(23.444.162,00)	94,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.393.018,00	402.893.976,00	(2.499.042,00)	99,38	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.437.600,00	111.414.027,00	(19.023.573,00)	85,42	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.770.685,00	5.352.300,00	(726.105,00)	80,05	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	96,15	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.438.685,00	1.852.300,00	(586.185,00)	75,96	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.2	BELANJA MODAL	124.358.915,00	106.061.527,00	(18.297.388,00)	85,29	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.358.915,00	106.061.527,00	(18.297.388,00)	85,29	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.020.000,00	49.431.103,00	(588.897,00)	98,82	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.020.000,00	49.431.103,00	(588.897,00)	98,82	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.020.000,00	49.431.103,00	(588.897,00)	98,82	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.820.000,00	206.786.709,00	(11.033.291,00)	94,93	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	217.820.000,00	204.786.709,00	(13.033.291,00)	94,02	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.820.000,00	204.786.709,00	(13.033.291,00)	94,02	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.000.000,00	267.564.897,00	(32.435.103,00)	38,19	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	300.000.000,00	267.564.897,00	(32.435.103,00)	89,18	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.072.072,00	2.000.000,00	(8.072.072,00)	20,02	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	1.650.000,00	(7.050.000,00)	18,01	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.372.072,00	350.000,00	(1.022.072,00)	25,45	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	289.927.928,00	265.564.897,00	(24.363.031,00)	91,60	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.927.928,00	265.564.897,00	(24.363.031,00)	91,60	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.700.000,00	83.389.958,00	(37.310.042,00)	69,09	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000,00	70.990.248,00	(37.009.752,00)	65,73	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	70.990.248,00	(37.009.752,00)	65,73	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	70.990.248,00	(37.009.752,00)	65,73	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.903.750,00	(96.250,00)	99,04	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.903.750,00	(96.250,00)	99,04	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.903.750,00	(96.250,00)	99,04	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.036.503,00	180.111.799,00	(48.884.704,00)	78,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.980.500,00	180.111.799,00	(49.884.701,00)	78,31	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	229.995.500,00	180.111.799,00	(49.884.701,00)	78,31	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229.995.500,00	180.111.799,00	(49.884.701,00)	78,31	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.06 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.467.479.291,00	34.430.491.120,00	(18.036.988.083,00)	65,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.003.003.291,00	10.531.876.386,00	(1.463.126.905,00)	87,74	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	249.200.000,00	235.796.896,00	(13.403.104,00)	94,62	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	12.815.000,00	(12.385.000,00)	50,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.880.000,00	1.710.000,00	(3.170.000,00)	35,04	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,00	11.105.000,00	(9.215.000,00)	54,65	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.2	BELANJA MODAL	224.000.000,00	222.981.896,00	(1.018.104,00)	99,55	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.2.4	Belanja Modal Tanah, Tanaman, dan Ternak	224.000.000,00	222.981.896,00	(1.018.104,00)	99,55	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	3.384.536.240,00	1.662.521.431,00	(1.721.962.809,00)	78,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	119.033.500,00	87.027.800,00	(32.005.700,00)	73,11	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	11.340.000,00	(3.660.000,00)	75,6	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.033.500,00	71.687.800,00	(32.345.700,00)	33,68	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.2	BELANJA MODAL	3.265.502.240,00	2.575.555.635,00	(689.946.605,00)	78,87	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.265.502.240,00	2.575.555.635,00	(689.946.605,00)	78,87	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	438.425.211,00	351.212.700,00	(87.182.511,00)	80,11	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	85.100.479,00	44.218.300,00	(41.162.179,00)	51,96	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	10.680.000,00	(720.000,00)	93,68	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.700.479,00	33.538.300,00	(40.162.179,00)	45,51	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.2	BELANJA MODAL	353.324.732,00	307.094.400,00	(46.230.332,00)	86,92	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.478.429,00	15.000.000,00	(10.478.429,00)	58,89	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.846.303,00	282.094.400,00	(35.751.903,00)	88,75	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Lainnya	200.000.000,00	195.602.600,00	(4.397.400,00)	97,80	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.376.442,00	3.210.000,00	(4.166.442,00)	43,52	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.460.000,00	3.210.000,00	(2.250.000,00)	58,79	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.916.442,00	0,00	(1.916.442,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.2	BELANJA MODAL	192.623.558,00	192.392.600,00	(231.958,00)	99,88	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.623.558,00	192.392.600,00	(231.958,00)	99,88	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	393.900.000,00	376.777.740,00	(17.122.260,00)	95,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.600.000,00	6.160.000,00	(4.440.000,00)	58,11	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13 . 5.1.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	6.160.000,00	(4.440.000,00)	58,11	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13 . 5.2	**BELANJA MODAL**	383.300.000,00	370.917.240,00	(12.382.760,00)	96,77	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.300.000,00	370.917.240,00	(12.382.760,00)	96,77	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.456.520.014,00	2.254.073.037,00	(196.454.397,00)	91,76	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.06 . 02.2.01.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	104.462.483,00	58.129.800,00	(46.332.683,00)	55,66	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	20.210.000,00	27.850.000,00	(380.000,00)	98,65	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.252.483,00	31.799.800,00	(44.952.683,00)	41,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	2.355.060.541,00	2.204.943.837,00	(150.121.704,00)	93,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.355.060.541,00	2.204.943.837,00	(150.121.704,00)	93,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	2.966.728.000,00	2.727.305.152,00	(244.097.310,00)	91,77	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.948.379.000,00	2.691.419.192,00	(256.959.810,00)	91,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.948.379.000,00	2.691.419.192,00	(256.959.810,00)	91,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16 . 5.2	**BELANJA MODAL**	18.349.000,00	35.885.960,00	13.863.000,00	80,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.349.000,00	35.885.960,00	(3.863.000,00)	91,60	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17	Pengadaan Paket Obat Paket	1.801.656.000,00	1.615.472.845,00	(186.183.154,00)	90,67	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.781.656.000,00	1.615.472.845,00	(186.183.154,00)	90,67	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.781.656.000,00	1.615.472.845,00	(186.183.154,00)	90,67	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20	Penyediaan Vaksin dan Barkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	104.030.000,00	103.021.050,00	(1.008.950,00)	99,03	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	104.830.000,00	103.021.950,00	(1.808.050,00)	98,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.830.000,00	103.021.950,00	(1.808.050,00)	98,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.09	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.431.776.922,00	29.960.555.370,79	(10.469.602.551,21)	74,11	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	373.192.117,00	163.150.200,00	(210.041.917,00)	43,72	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	373.192.117,00	163.150.200,00	(210.041.917,00)	43,72	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	373.192.117,00	163.150.200,00	(210.041.917,00)	43,72	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	550.312.574,00	158.786.400,00	(391.526.174,00)	28,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	550.312.574,00	158.786.400,00	(391.526.174,00)	28,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.312.574,00	158.786.400,00	(391.526.174,00)	28,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	142.743.590,00	26.457.600,00	(116.285.990,00)	18,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	142.743.500,00	26.457.500,00	(116.286.000,00)	18,53	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	142.743.500,00	26.457.500,00	(116.286.000,00)	18,53	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gakin	280.679.099,00	100.329.000,00	(180.350.099,00)	35,75	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	280.679.099,00	100.329.000,00	(180.350.099,00)	35,75	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.679.099,00	100.329.000,00	(180.350.099,00)	35,75	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	305.613.561,00	95.898.400,00	(209.715.161,00)	24,81	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	305.613.561,00	75.850.400,00	(229.763.161,00)	24,81	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.613.561,00	75.850.400,00	(229.763.161,00)	24,81	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	192.736.100,00	77.504.800,00	(115.231.300,00)	40,20	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	192.736.100,00	77.504.800,00	(115.231.300,00)	40,20	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	192.736.100,00	77.504.800,00	(115.231.300,00)	40,20	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	133.063.548,00	57.078.000,00	(76.006.548,00)	42,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	133.063.548,00	57.078.000,00	(76.006.548,00)	42,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	133.063.548,00	57.078.000,00	(76.006.548,00)	42,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	29.379.537,00	2.310.000,00	(27.069.537,00)	7,86	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.379.537,00	2.310.000,00	(27.069.537,00)	7,86	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.379.537,00	2.310.000,00	(27.069.537,00)	7,86	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	58.260.000,00	31.565.500,00	(26.694.500,00)	54,18	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	58.260.000,00	31.565.500,00	(26.694.500,00)	54,18	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.260.000,00	31.565.500,00	(26.694.500,00)	54,19	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	51.280.000,00	10.874.000,00	(40.406.000,00)	21,21	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.1	BELANJA OPERASI	51.280.000,00	10.874.000,00	(40.406.000,00)	21,21	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.280.000,00	10.874.000,00	(40.406.000,00)	21,21	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.165.932.361,00	520.366.252,00	(645.566.109,00)	44,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.165.932.361,00	520.366.252,00	(645.566.109,00)	44,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.165.932.361,00	520.366.252,00	(645.566.109,00)	44,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gbl Masyarakat	1.258.927.094,00	539.395.100,00	(719.532.994,00)	42,87	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.258.227.099,00	539.395.100,00	(718.832.999,00)	42,87	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.258.227.899,00	539.395.100,00	(718.832.799,00)	42,87	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.0 . 02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Aeria dan Olahraga	86.128.700,00	43.230.500,00	(42.880.200,00)	50,20	

Produced by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.0.02.0.00.01 . 02.2.02.16 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	86.128.700,00	43.239.500,00	(42.889.200,00)	50,20	
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 02.2.02.16 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.128.700,00	43.239.500,00	(42.889.200,00)	50,20	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	275.700.699,00	144.000.000,00	(131.700.699,00)	52,25	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	275.200.699,00	144.000.000,00	(131.700.699,00)	52,25	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.200.699,00	144.000.000,00	(131.700.699,00)	52,25	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.920.285.267,00	883.246.000,00	(1.037.037.267,00)	46,00	
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 02.2.02.18 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.920.285.267,00	883.246.000,00	(1.037.037.267,00)	46,00	
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 02.2.02.18 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.285.267,00	883.246.000,00	(1.037.037.267,00)	46,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.19 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.19 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20	Pengelolaan Kesehatan Kerja	312.342.160,00	152.393.812,00	(159.948.348,00)	48,79	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	312.342.160,00	152.393.812,00	(159.948.348,00)	48,79	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312.342.160,00	152.393.812,00	(159.948.348,00)	48,79	
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.000.000,00	9.500.000,00	(3.500.000,00)	73,08	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.21 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.000.000,00	9.500.000,00	(3.500.000,00)	73,08	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.21 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	9.500.000,00	(3.500.000,00)	73,08	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	98.900.700,00	49.328.000,00	(49.472.700,00)	49,93	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	98.900.700,00	49.328.000,00	(49.472.700,00)	49,93	
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 02.2.02.22 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.900.700,00	49.328.000,00	(49.472.700,00)	49,93	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.818.506.882,00	745.245.150,00	(1.073.260.732,00)	40,98	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.818.506.882,00	745.245.150,00	(1.073.260.732,00)	40,98	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.818.506.882,00	745.245.150,00	(1.073.260.732,00)	40,98	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.945.825.199,00	17.665.833.315,00	(279.991.884,00)	98,44	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.945.825.199,00	17.665.833.315,00	(279.991.884,00)	98,44	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.945.825.199,00	17.665.833.315,00	(279.991.884,00)	98,44	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.022.497.525,00	812.242.778,00	(210.254.747,00)	79,43	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	778.359.678,00	597.377.631,00	(180.981.047,00)	76,74	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	778.359.678,00	597.377.631,00	(180.981.047,00)	76,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.2	**BELANJA MODAL**	244.138.017,00	225.365.217,00	(18.772.800,00)	92,31	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.138.017,00	168.365.217,00	(18.772.800,00)	89,97	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.909.009.024,00	7.576.289.563,78	(4.332.719.460,22)	63,62	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.586.841.139,00	7.337.443.328,78	(4.249.397.810,22)	63,33	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.906.639.182,00	4.447.799.930,33	(1.458.839.251,67)	75,30	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.701.301.757,00	2.894.652.845,45	1.193.351.088,45	170,15	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 . 5.2	**BELANJA MODAL**	322.167.885,00	238.845.935,00	(83.321.950,00)	74,14	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.167.885,00	238.845.935,00	(83.321.950,00)	74,14	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	45.000.000,00	42.564.700,00	(2.435.300,00)	94,59	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.000.000,00	42.564.700,00	(2.435.300,00)	94,59	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.564.700,00	(2.435.300,00)	94,59	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	321.450.900,00	10.774.300,00	(310.725.500,00)	3,35	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	321.450.900,00	10.774.300,00	(310.725.500,00)	3,35	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	321.450.900,00	10.774.300,00	(310.725.500,00)	3,35	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Penyakit Dan Masalah)	104.681.600,00	63.330.000,00	(41.351.600,00)	60,50	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	104.681.600,00	63.330.000,00	(41.351.600,00)	60,50	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.681.600,00	63.330.000,00	(41.351.600,00)	60,50	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	16.500.000,00	6.329.000,00	(10.170.000,00)	38,36	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.37 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.500.000,00	6.329.000,00	(10.170.000,00)	38,36	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.37 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	6.329.000,00	(10.170.000,00)	38,36	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	60.000.000,00	45.130.900,00	(14.869.100,00)	90,26	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	25.000.000,00	22.625.900,00	(2.374.100,00)	90,50	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.000.000,00	22.625.900,00	(2.374.100,00)	90,50	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.625.900,00	(2.374.100,00)	90,50	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	25.000.000,00	22.505.000,00	(2.495.000,00)	90,02	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.000.000,00	22.505.000,00	(2.495.000,00)	90,02	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.505.000,00	(2.495.000,00)	90,02	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	705.329.000,00	88.793.112,00	(616.531.888,00)	12,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	623.700.000,00	0,00	(623.700.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.09	Penemuan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	623.700.000,00	0,00	(623.700.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	623.700.000,00	0,00	(623.700.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	623.700.000,00	0,00	(623.700.000,00)	0,00	
.07 . 1-07.0-00.0-00.01 . 03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	111.625.000,00	88.793.312,00	(22.831.688,00)	79,55	
1.07 . 1-07.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.625.000,00	88.793.312,00	(22.831.688,00)	79,55	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	111.625.000,00	88.793.312,00	(22.831.688,00)	79,55	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.625.000,00	88.793.312,00	(22.831.688,00)	79,55	
1.07 . 1-07.0-00.0-00.01 . 04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	29.543.500,01	24.072.000,00	(5.471.500,00)	81,48	
1.07 . 1-07.0-00.0-00.01 . 04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	15.000.000,00	14.084.800,00	(915.200,00)	93,90	
1.07 . 1-07.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.000.000,00	14.084.800,00	(915.200,00)	93,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.000.000,00	14.084.800,00	(915.200,00)	93,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.084.800,00	(915.200,00)	93,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	13.549.800,00	10.794.000,00	(2.755.800,00)	79,66	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	13.549.800,00	10.794.000,00	(2.755.800,00)	79,66	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.549.800,00	10.794.000,00	(2.755.800,00)	79,66	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.549.800,00	10.794.000,00	(2.755.800,00)	79,66	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	122.082.199,00	66.402.300,00	(55.679.899,00)	54,41	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	29.450.250,00	15.387.600,00	(14.062.650,00)	52,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.450.259,00	15.007.600,00	(13.502.659,00)	53,05	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.450.259,00	15.007.600,00	(13.502.659,00)	53,05	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.450.259,00	15.007.600,00	(13.502.659,00)	53,05	
1.02 . 1.02.0.00.0.01.01 . 05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	53.050.000,00	46.470.000,00	(6.580.000,00)	87,59	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	53.050.000,00	46.470.000,00	(6.580.000,00)	87,59	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	53.050.000,00	46.470.000,00	(6.580.000,00)	87,59	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.050.000,00	46.470.000,00	(6.580.000,00)	87,59	
1.02 . 1.02.0.00.0.01.01 . 05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	89.571.940,00	33.044.700,00	(56.527.240,00)	36,89	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.03.01	Dukungan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	89.571.940,00	33.044.700,00	(56.527.240,00)	36,89	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.571.940,00	33.044.700,00	(56.527.240,00)	36,89	
1.02 . 1.02.0.00.0.00.01 . 05.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.571.940,00	33.044.700,00	(56.527.240,00)	36,89	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.587.890.940,00)	(77.721.224.580,78)	13.812.013.922,22	84,91	

RSUD SOLOK SELATAN

Lampiran II.3 Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal : 30 Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 00.0.00.00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	44.000.000.000,00	57.932.336.661,00	13.932.336.661,00	131,67	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 00.0.00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.000.000.000,00	57.932.336.661,00	13.932.336.661,00	131,67	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 00.0.00.00 . 4.1.1	Lain-lain PAD yang Sah	44.000.000.000,00	57.932.336.661,00	13.932.336.661,00	131,67	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.836.430.046,00	21.024.978.932,00	(811.569.114,00)	96,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.836.430.046,00	21.024.878.932,00	(811.569.114,00)	96,28	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.431.491.046,00	20.923.828.932,00	(507.662.114,00)	97,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.431.491.046,00	20.923.828.932,00	(507.662.114,00)	97,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	21.431.491.046,00	20.923.828.932,00	(507.662.114,00)	97,63	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	404.947.000,00	101.050.000,00	(303.897.000,00)	24,95	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	404.947.000,00	101.050.000,00	(303.897.000,00)	24,95	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	130.560.000,00	101.050.000,00	(29.510.000,00)	77,40	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	274.387.000,00	0,00	(274.387.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.05.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.035.501.051,00	10.514.194.266,00	(46.521.306.785,00)	18,10	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.341.515.305,00	10.514.194.266,00	(827.319.039,00)	92,72	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	10.238.135.883,00	10.105.814.266,00	(132.321.617,00)	98,71	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	105.960.000,00	46.555.000,00	(59.405.000,00)	43,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	19.980.000,00	8.340.000,00	(11.640.000,00)	41,74	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.980.000,00	38.215.000,00	(47.765.000,00)	44,45	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	10.252.215.883,00	10.059.259.266,00	(192.956.617,00)	98,12	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.252.215.883,00	10.059.259.266,00	(192.956.617,00)	98,12	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	683.337.422,00	406.380.000,00	(276.957.422,00)	59,48	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.680.000,00	9.560.000,00	(11.120.000,00)	11,05	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	15.560.000,00	9.560.000,00	(5.120.000,00)	60,97	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	602.657.422,00	396.820.000,00	(205.837.422,00)	65,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	602.657.422,00	396.820.000,00	(205.837.422,00)	65,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.794.010.450,00	46.584.260.458,30	(209.749.999,70)	99,55	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	46.794.010.450,00	46.584.260.458,30	(209.749.999,70)	99,55	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.311.514.208,00	45.264.210.291,32	(47.303.916,68)	99,90	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.296.920.366,00	4.548.804.066,50	(748.116.499,50)	85,88	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.014.593.842,00	41.165.406.224,82	740.812.382,82	101,85	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.082.504.250,00	880.058.166,98	(202.446.083,02)	81,30	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	707.000.000,00	706.200.022,00	86.800.022,00	112,40	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	93.250.144,98	(6.749.855,02)	93,25	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32 . 5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	287.504.250,00	0,00	(287.504.250,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.541.989.829,00)	(20.171.004.995,30)	15.420.984.833,70	56,63	

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG & PERTANAHAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor 3
Tanggal : 20 Jul 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	130.212.959.133,00	120.082.023.390,.2	(10.130.935.742,88)	92,23	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . G1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	14.240.405.380,00	12.064.303.191,00	(2.176.103.389,00)	84,72	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	6.333.170.267,00	6.175.271.164,00	(156.209.503,00)	97,53	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.209.010.763,00	6.054.896.184,00	(154.084.583,00)	97,50	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.209.910.767,00	6.054.896.184,00	(155.034.583,00)	97,50	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.209.910.767,00	6.054.896.184,00	(155.034.583,00)	97,50	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.200.000,00	521.975.000,00	(1.225.000,00)	99,77	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	523.200.000,00	521.975.000,00	(1.225.000,00)	99,77	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	519.270.000,00	518.045.000,00	(1.225.000,00)	99,76	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	356.563.463,00	307.109.774,00	(49.447.739,00)	86,13	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.628,00	4.800.800,00	(97.828,00)	98,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.898.628,00	4.800.800,00	(97.828,00)	98,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.898.628,00	4.800.800,00	(97.828,00)	98,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.284.035,00	39.229.004,00	(55.031,00)	99,86	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.284.035,00	39.229.004,00	(55.031,00)	99,86	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.284.035,00	39.229.004,00	(55.031,00)	99,86	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyelenggaraan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.499.800,00	34.443.424,00	(56.376,00)	99,84	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.499.800,00	34.443.424,00	(56.376,00)	99,84	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.499.800,00	34.443.424,00	(56.376,00)	99,84	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.196.000,00	231.937.246,00	(48.258.754,00)	82,78	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KENAIKAN / (PENURUNAN)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	300.736.000,00	251.537.295,00	(49.198.704,00)	83,46	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.736.000,00	251.537.295,00	(49.198.704,00)	83,46	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.245.653.700,00	4.569.591.634,00	(1.676.062.066,00)	73,16	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	6.177.926.000,00	1.502.362.500,00	(1.675.623.500,00)	72,88	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	17.926.000,00	17.230.500,00	(695.500,00)	96,12	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.926.000,00	17.230.500,00	(695.500,00)	96,12	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.03 . 5.2	BELANJA MODAL	6.160.000.000,00	4.485.072.000,00	(1.674.928.000,00)	72,81	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.160.000.000,00	4.485.072.000,00	(1.674.928.000,00)	72,81	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.738.000,00	24.681.531,00	(56.469,00)	99,77	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	24.738.000,00	24.681.531,00	(56.469,00)	99,77	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.738.000,00	24.681.531,00	(56.469,00)	99,77	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.989.700,00	42.597.663,00	(392.037,00)	99,09	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	42.989.700,00	42.597.663,00	(392.037,00)	99,09	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.989.700,00	42.597.663,00	(392.037,00)	99,09	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.391.050,00	39.457.800,00	(4.933.250,00)	88,89	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyelenggaraan Jasa Sosial Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.401.050,00	27.457.800,00	(4.943.250,00)	84,74	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	32.401.050,00	27.457.800,00	(4.943.250,00)	84,74	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.401.050,00	27.457.800,00	(4.943.250,00)	84,74	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.683.600,00	571.302.789,00	(289.380.811,00)	66,38	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	860.683.600,00	571.302.789,00	(289.380.811,00)	66,38	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	860.683.600,00	571.302.789,00	(289.380.811,00)	66,38	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2- -0.0-00.01 . 01 - -0.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	860.583.610,00	571.302.708,00	(289.280.911,00)	66,39	
1.03 . 1 03.2 10.0-00.01 . 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.001.923.412,00	6.585.022.000,00	(36.905.412,00)	98,85	
1.03 . 1-03.2-10.0 00.01 . 02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.989.789.910,00	2.971.421.200,00	(18.348.710,00)	99,39	
1.03 . 1-03.2- 0.0-00.01 . 02 - -0.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	104.909.985,00	104.699.000,00	(210.985,00)	99,80	
1.03 . 1 03.2 10.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.810.000,00	(190.000,00)	96,20	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.810.000,00	(190.000,00)	96,20	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	99.999.985,00	99.889.000,00	(110.985,00)	99,90	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.999.985,00	99.889.000,00	(110.985,00)	99,90	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perlindung Tebing	2.166.952.715,00	2.165.089.400,00	(1.863.315,00)	99,91	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	47.780.000,00	47.515.000,00	(265.000,00)	99,45	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.780.000,00	47.515.000,00	(265.000,00)	99,45	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.2	BELANJA MODAL	2.109.172.715,00	2.107.574.400,00	(1.598.315,00)	99,92	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.109.172.715,00	2.107.574.400,00	(1.598.315,00)	99,92	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	727.817.200,00	711.642.800,00	(16.174.400,00)	97,78	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.46 . 5.1	BELANJA OPERASI	727.817.200,00	711.642.800,00	(16.174.400,00)	97,78	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.01.46 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	727.817.200,00	711.642.800,00	(16.174.400,00)	97,78	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.672.152.902,00	3.613.000.000,00	(59.536.702,00)	98,41	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	79.599.991,00	79.388.000,00	(211.991,00)	99,73	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.600.900,00	(209.100,00)	99,09	
1.03 . 1 03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.600.900,00	(209.100,00)	99,09	
1.03 . 1 03.2-10.0 00.01 . 02.2.02.01 . 5.2	BELANJA MODAL	56.799.991,00	56.787.000,00	(12.991,00)	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.799.991,00	56.787.000,00	(12.991,00)	100,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.173.561.740,00	3.118.259.900,00	(55.301.840,00)	98,26	
1.03 . 1 03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.877.192,00	30.280.900,00	(596.292,00)	98,71	
1.03 . 1 03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.877.192,00	30.280.900,00	(596.292,00)	98,71	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14 . 5.2	BELANJA MODAL	3.142.884.548,00	3.087.979.000,00	(54.905.548,00)	98,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.142.804.549,00	3.067.979.000,00	(74.805.549,00)	93,25	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	424.068.768,00	421.956.000,00	(2.041.768,00)	99,28	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.22 . 5.1	BELANJA OPERASI	111.222.300,00	108.210.000,00	(3.012.300,00)	97,29	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.22 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.222.300,00	108.210.000,00	(3.012.300,00)	97,29	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.22 . 5.2	BELANJA MODAL	313.777.468,00	313.746.000,00	(31.468,00)	99,99	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.22 . 5.2.1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	313.777.468,00	313.746.000,00	(31.468,00)	99,99	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.565.132.608,00	8.673.462.031,22	(891.670.576,78)	90,72	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.565.132.608,00	8.673.462.031,22	(891.670.576,78)	90,72	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	803.735.438,00	505.130.000,00	(298.605.438,00)	62,85	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	803.735.438,00	505.130.000,00	(298.605.438,00)	62,85	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	803.735.438,00	505.130.000,00	(298.605.438,00)	62,85	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	909.950.500,00	873.699.074,22	(36.251.425,78)	96,02	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.750.500,00	6.950.000,00	(13.800.500,00)	33,50	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.750.500,00	5.700.000,00	(15.050.500,00)	27,47	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.05 . 5.2	BELANJA MODAL	889.200.000,00	867.605.074,22	(21.594.925,78)	97,57	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.05 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	889.200.000,00	867.605.074,22	(21.594.925,78)	97,57	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.852.056.670,00	7.292.885.957,00	(559.159.713,00)	92,88	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.848.056.670,00	7.292.896.957,00	(555.159.713,00)	92,93	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	25.040.000,00	0,00	(25.040.000,00)	0,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.819.016.670,00	7.292.896.957,00	(526.119.713,00)	93,27	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.07	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.390.000,00	5.680.000,00	(710.000,00)	88,89	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.390.000,00	5.680.000,00	(710.000,00)	88,89	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	5.680.000,00	(710.000,00)	88,89	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	17.510.503.470,00	17.014.700.977,00	(495.802.493,00)	97,17	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.510.503.470,00	17.014.180.977,00	(496.322.493,00)	97,17	

Scanned By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.943.350,00	35.780.000,00	(163.350,00)	99,49	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	27.651.780,00	27.545.000,00	(112.280,00)	99,59	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.651.280,00	27.545.000,00	(112.280,00)	99,59	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	8.291.570,00	8.215.000,00	(71.080,00)	99,14	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.291.570,00	8.215.000,00	(71.080,00)	99,14	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.996.607.210,00	11.604.357.000,00	(392.339.310,00)	96,73	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	621.312.419,00	492.406.800,00	(128.905.619,00)	79,25	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	621.312.419,00	492.406.800,00	(128.905.619,00)	79,25	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.2	BELANJA MODAL	11.375.294.791,00	11.111.952.077,00	(263.342.714,00)	97,68	
2.10 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Tanah	11.375.294.791,00	11.111.952.077,00	(263.342.714,00)	97,68	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Sampah	1.720.404.900,00	1.684.975.000,00	(35.429.900,00)	97,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.720.404.900,00	1.684.975.000,00	(35.429.900,00)	97,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.720.404.900,00	1.684.975.000,00	(35.429.900,00)	97,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.757.258.000,00	3.749.088.000,00	(8.170.000,00)	99,78	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.12 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.757.258.000,00	3.749.088.000,00	(8.170.000,00)	99,78	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.757.258.000,00	3.749.088.000,00	(8.170.000,00)	99,78	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06	Program Pengelolaan Dan Pengamanhangan Sistem Drainase	6.600.709.900,00	6.476.025.035,00	(124.163.865,00)	98,11	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.709.900,00	6.476.025.035,00	(124.163.865,00)	98,11	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.05	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	5.405.389.900,00	5.285.267.935,00	(120.121.965,00)	97,77	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	34.189.400,00	31.625.000,00	(2.564.400,00)	92,50	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.189.400,00	31.625.000,00	(2.564.400,00)	92,50	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.08 . 5.2	BELANJA MODAL	5.371.200.500,00	5.253.642.935,00	(117.557.565,00)	97,81	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.08 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.371.200.500,00	5.253.642.935,00	(117.557.565,00)	97,81	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	1.195.200.000,00	1.190.758.000,00	(4.442.000,00)	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.13 . 5.2	BELANJA MODAL	1.195.200.000,00	1.190.755.000,00	(4.445.000,00)	99,63	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.13 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.195.200.000,00	1.190.756.000,00	(4.442.000,00)	99,63	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.	Program Penataan Bangunan Gedung	16.914.299.016,00	14.047.210.037,90	(2.867.088.978,10)	83,05	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16.914.299.016,00	14.047.210.037,90	(2.867.088.978,10)	83,05	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	249.650.500,00	122.055.400,00	(227.595.100,00)	34,91	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	349.650.500,00	122.055.400,91	(227.595.099,09)	34,91	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.650.500,00	122.055.400,00	(227.595.100,00)	34,91	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	16.781.640.116,00	13.925.155.437,90	(2.856.484.678,10)	82,97	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.756.905.289,00	1.637.328.105,00	(119.577.184,00)	93,19	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.756.905.289,00	1.637.328.105,00	(119.577.184,00)	93,19	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.02 . 5.2	BELANJA MODAL	14.207.644.827,00	12.287.757.332,90	(2.919.886.994,10)	82,07	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.207.644.827,00	12.287.757.332,90	(2.919.886.994,10)	82,01	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.13 . 5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 08.2.01.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.	Program Penyelenggaraan Jalan	58.375.720.048,00	54.974.565.931,00	(3.351.154.217,00)	94,25	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	58.325.720.048,00	54.974.565.831,00	(3.351.154.217,00)	94,25	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.484.250.000,00	1.457.028.000,00	(27.222.000,00)	98,17	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	934.024.624,00	921.569.000,00	(13.255.624,00)	98,41	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	934.024.624,00	921.569.000,00	(13.255.624,00)	98,41	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	649.425.376,00	635.459.000,00	(13.966.376,00)	97,85	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	649.425.376,00	635.459.000,00	(13.966.376,00)	97,85	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	30.246.000,00	15.045.000,00	(15.201.000,00)	49,74	
1.03 . 1.03.2.10.0.00.01 . 10.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.246.000,00	15.045.000,00	(15.201.000,00)	49,74	

Printed By SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.245.000,00	15.015.000,00	(15.230.000,00)	49,64	
1.0[illegible] 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.05	Pembangunan Jalan	20.252.100,00	14.020.000,00	(6.232.100,00)	69,23	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.252.100,00	14.020.000,00	(6.232.100,00)	69,23	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.252.100,00	14.020.000,00	(6.232.100,00)	69,23	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	44.857.902.727,00	41.849.374.718,00	(2.960.527.521,00)	93,33	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	332.801.140,00	226.021.807,00	(105.779.333,00)	67,91	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	332.801.140,00	226.021.807,00	(105.779.333,00)	67,91	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.08 . 5.2	BELANJA MODAL	44.525.101.587,00	41.623.352.911,00	(2.852.748.188,00)	93,59	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.08 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.525.101.587,00	41.623.352.911,00	(2.852.748.188,00)	93,59	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	3.032.500.000,00	2.715.943.760,00	(316.556.240,00)	89,56	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	33.125.616,00	32.560.000,00	(565.616,00)	98,29	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.125.616,00	32.560.000,00	(565.616,00)	98,29	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.09 . 5.2	BELANJA MODAL	2.999.373.384,00	2.683.383.760,00	(315.989.224,00)	89,46	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.09 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.999.373.384,00	2.683.383.160,00	(315.990.224,00)	89,46	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.692.499.999,00	1.691.863.342,00	(636.657,00)	99,96	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.692.499.999,00	1.691.863.342,00	(636.657,00)	99,96	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.692.499.999,00	1.691.863.342,00	(636.657,00)	99,96	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	5.050.084.727,00	5.057.071.252,00	129.952.315,00	96,87	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12 . 5.1	BELANJA OPERASI	64.982.564,00	64.306.000,00	(676.564,00)	99,07	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.982.564,00	64.306.000,00	(676.564,00)	99,07	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12 . 5.2	BELANJA MODAL	5.823.077.173,00	5.802.091.352,00	(20.985.821,00)	99,65	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.823.077.173,00	5.802.091.352,00	(20.985.821,00)	99,65	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	27.500.000,00	23.570.000,00	(3.930.000,00)	85,71	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.18 . 5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	23.570.000,00	(3.930.000,00)	85,71	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.18 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	23.570.000,00	(3.930.000,00)	85,71	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.492.499.985,00	1.491.644.261,00	(855.724,00)	99,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.19 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.492.499.985,00	1.491.644.261,00	(855.724,00)	99,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.19 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.492.499.985,00	1.491.644.261,00	(855.724,00)	99,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	31.450.440,00	22.465.000,00	(8.985.440,00)	71,43	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.07	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31.450.440,00	22.465.000,00	(8.985.440,00)	71,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.05	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Sedan Usaha	18.244.700,00	13.855.000,00	(4.389.700,00)	75,94	
1.05 . 1.03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	18.244.700,00	13.855.000,00	(4.389.700,00)	75,94	
1.30 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.244.700,00	13.855.000,00	(4.389.700,00)	75,94	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketenagakerjaan/Penggunaan Kalorimi dan Peralatan	13.205.740,00	8.610.000,00	(4.595.740,00)	65,20	
1.05 . 1.03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	13.205.740,00	8.610.000,00	(4.595.740,00)	65,20	
1.01 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.205.740,00	8.610.000,00	(4.595.740,00)	65,20	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	352.029.258,00	170.847.087,00	(181.482.072,00)	47,15	
1.00 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	321.793.260,00	161.657.187,00	(160.136.073,00)	50,24	
1.01 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	147.547.760,00	62.818.687,00	(84.729.073,00)	42,58	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	147.547.760,00	62.818.687,00	(84.729.073,00)	42,58	
1.05 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.547.760,00	62.818.687,00	(84.729.073,00)	42,58	
1.02 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	144.250.000,00	100.839.000,00	(43.421.000,00)	69,90	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	144.250.000,00	100.839.000,00	(43.421.000,00)	69,90	
1.03 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.250.000,00	100.839.000,00	(43.421.000,00)	69,90	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dibang Penataan Ruang	29.986.000,00	0,00	(29.986.000,00)	0,00	
1.01 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.986.000,00	0,00	(29.986.000,00)	0,00	
1.08 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.986.000,00	0,00	(29.986.000,00)	0,00	
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	15.536.000,00	7.190.000,00	(8.346.000,00)	46,26	
1.01 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	15.536.000,00	7.190.000,00	(8.346.000,00)	46,26	
1.00 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.536.000,00	7.190.000,00	(8.346.000,00)	46,26	
1.08 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.536.000,00	7.190.000,00	(8.346.000,00)	46,26	
1.05 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	24.999.999,00	0,00	(24.999.999,00)	0,00	
1.01 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	24.999.999,00	0,00	(24.999.999,00)	0,00	
1.00 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.04.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.999.999,00	0,00	(24.999.999,00)	0,00	

Scanned By Sinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.999.999,00	0,00	(24.999.999,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.272.559.133,00)	(120.092.025.090,12)	10.170.535.742,80	92,23	

Printed By SIMDA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor :)
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
Organisasi : 1.04 . 1-04.2- 1.1-03.01 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 00.0.00.00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	275.000.000,00	132.471.000,00	(142.529.000,00)	48,17	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.0 . 00.0.00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	275.000.000,00	132.471.000,00	(142.529.000,00)	48,17	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 00.0.00.00 . 4.1.2	Hasil Aset Daerah	275.000.000,00	132.471.000,00	(142.529.000,00)	48,17	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	22.653.644.751,00	21.471.190.120,00	(1.182.346.631,00)	94,78	
1.04 . 1-04.2- 1.1-03.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.099.252.031,00	3.901.311.153,00	(197.940.878,00)	95,17	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	3.474.041.001,00	3.333.776.340,00	(140.264.341,00)	95,96	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.239.401.081,00	3.172.695.240,00	(66.705.841,00)	97,94	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.239.401.081,00	3.172.695.240,00	(66.705.841,00)	97,94	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.239.401.081,00	3.172.696.240,00	(66.704.841,00)	97,94	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.640.000,00	161.080.000,00	(73.560.000,00)	68,65	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	234.640.000,00	161.080.000,00	(73.560.000,00)	68,65	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	234.640.000,00	161.080.000,00	(73.560.000,00)	68,65	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.069.970,00	312.617.195,00	(21.452.775,00)	93,58	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.250.205,00	(1.749.795,00)	65,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.250.205,00	(1.749.795,00)	65,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.250.205,00	(1.749.795,00)	65,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.021.850,00	94.661.856,00	(36.359.994,00)	72,24	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.713.162,00	(286.838,00)	99,01	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.713.162,00	(286.838,00)	99,01	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	72.021.850,00	65.948.694,00	(6.073.156,00)	91,57	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.021.850,00	65.948.694,00	(6.073.156,00)	91,57	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KENAIKAN / (PENURUNAN)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1-04.2- 1.1-03.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.954.320,00	10.924.500,00	(29.820,00)	99.73	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.954.320,00	10.924.500,00	(29.820,00)	99.73	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.954.320,00	10.924.500,00	(29.820,00)	99,73	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	10.131.200,00	(2.868.800,00)	56,28	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	10.131.200,00	(7.868.800,00)	56,28	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	10.131.200,00	(7.868.800,00)	56,28	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Kapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.424.000,00	191.649.434,00	(5.774.566,00)	97.10	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	199.424.000,00	191.649.434,00	(5.774.566,00)	97.10	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.424.000,00	191.649.434,00	(5.774.566,00)	97,10	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.300,00	31.134.163,00	(13.865.837,00)	67,68	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	18.366.163,00	(11.633.837,00)	61,22	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	18.366.163,00	(11.633.837,00)	61,22	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	18.366.163,00	(11.633.837,00)	61,22	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	8.768.000,00	(3.232.000,00)	73,07	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	8.768.000,00	(3.232.000,00)	73,07	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.768.000,00	(3.232.000,00)	73,07	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.811.000,00	223.783.059,00	(21.027.941,00)	91.41	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.970.000,00	124.916.967,00	(21.053.033,00)	85,64	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	146.000.000,00	124.916.967,00	(21.053.033,00)	85.64	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	124.916.967,00	(21.053.033,00)	85,64	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.841.000,00	98.866.092,00	(74.908,00)	99,92	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	98.841.000,00	98.866.092,00	(74.908,00)	99,92	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.941.000,00	98.866.092,00	(74.908,00)	99,92	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02	Program Pengembangan Perumahan	329.049.046,00	329.895.140,00	(23.054.040,00)	90,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	283.637.000,00	279.095.000,00	(4.542.000,00)	98,40	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	75.207.000,00	73.015.000,00	(2.192.000,00)	97,09	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	75.207.000,00	73.015.000,00	(2.192.000,00)	97,09	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	570.000,00	(580.000,00)	49,57	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.057.000,00	72.445.000,00	(1.612.000,00)	97,82	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.04	Pembangunan Rumah Layak Korban Bencana	208.430.000,00	206.080.000,00	(2.350.000,00)	98,87	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	208.430.000,00	206.080.000,00	(2.350.000,00)	98,87	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	660.000,00	(700.000,00)	48,53	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	207.070.000,00	205.420.000,00	(1.650.000,00)	99,20	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.05 . 02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.412.000,00	900.000,00	(23.512.000,00)	3,69	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.412.000,00	900.000,00	(23.512.000,00)	3,69	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.04.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.412.000,00	900.000,00	(23.512.000,00)	3,69	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.412.000,00	900.000,00	(23.512.000,00)	3,69	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	306.091.000,00	122.279.220,00	(267.811.780,00)	31,61	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	298.439.800,00	49.794.044,00	(248.645.756,00)	23,03	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Diakibatkan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	90.765.000,00	39.710.222,00	(51.054.778,00)	43,75	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	90.765.000,00	39.710.222,00	(51.054.778,00)	43,75	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.765.000,00	39.710.222,00	(51.054.778,00)	43,75	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.06.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.952.000,00	7.240.000,00	(8.712.000,00)	45,38	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.952.000,00	7.240.000,00	(8.712.000,00)	45,38	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.952.000,00	7.240.000,00	(8.712.000,00)	45,38	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	201.765.000,00	21.771.822,00	(179.993.178,00)	10,79	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	201.765.000,00	21.771.822,00	(179.993.178,00)	10,79	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.765.000,00	21.771.822,00	(179.993.178,00)	10,79	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1-04.2-11.1.03.01 . 03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	88.422.000,00	53.555.176,00	(34.866.824,00)	60,57	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.02.01	Survei dan Penelapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	88.422.000,00	53.555.176,00	(34.866.824,00)	60,57	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	88.422.000,00	53.555.176,00	(34.866.824,00)	60,57	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.422.000,00	53.555.176,00	(34.866.824,00)	60,57	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1.03.01 . 03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1-04.2-11.1.03.01 . 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	885.285.100,00	878.841.660,00	(6.443.440,00)	99,27	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	885.285.100,00	878.841.660,00	(6.443.440,00)	99,27	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	960.145.000,00	957.937.760,00	(2.207.240,00)	99,77	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	960.145.000,00	957.937.760,00	(2.207.240,00)	99,77	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	760.000,00	(600.000,00)	55,88	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	958.785.000,00	956.977.760,00	(1.807.240,00)	99,81	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.140.100,00	21.503.900,00	(3.636.200,00)	85,54	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.140.100,00	21.503.900,00	(3.636.200,00)	85,54	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.140.100,00	21.503.900,00	(3.636.200,00)	85,54	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	14.345.643.965,00	13.937.094.840,00	(408.549.125,00)	97,15	
1.04 . 1-04.2-11.1.03.01 . 05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	14.345.643.965,00	13.937.094.840,00	(408.549.125,00)	97,15	
1.04 . 1-04.2-11.1.03.01 . 05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Sumber	14.345.643.965,00	13.937.094.840,00	(408.549.125,00)	97,15	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.032.664.874,00	3.912.763.191,00	(1.120.901.683,00)	77,73	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	195.240.000,00	0,00	(195.240.000,00)	0,00	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.836.924.874,00	3.912.763.191,00	(924.161.683,00)	80,89	
1.04 . 1-04.2-11.1.03.01 . 05.2.01.02 . 5.2	BELANJA MODAL	9.312.979.091,00	9.024.331.649,00	(287.647.442,00)	96,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.609.592.000,00	4.431.309.750,00	(178.482.250,00)	96,30	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.07 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.101.587.001,00	3.897.421.989,00	(204.165.192,00)	95,90	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Sistem Perumahan Dan Kawasan Permukiman	60.309.500,00	56.605.100,00	(3.704.400,00)	93,86	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	60.309.500,00	56.605.100,00	(3.704.400,00)	93,86	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Penyelenggara Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	25.000.000,00	23.231.100,00	(1.768.900,00)	92,92	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.231.100,00	(1.768.900,00)	92,92	
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.231.100,00	(1.768.900,00)	92,92	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.454.500,00	20.694.000,00	(1.760.500,00)	92,16	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.454.500,00	20.694.000,00	(1.760.500,00)	92,16	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.454.500,00	20.694.000,00	(1.760.500,00)	92,16	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	10.105.000,00	9.930.000,00	(175.000,00)	98,27	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.105.000,00	9.930.000,00	(175.000,00)	98,27	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.105.000,00	9.930.000,00	(175.000,00)	98,27	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	27.265.900,00	9.210.000,00	(18.055.900,00)	33,78	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	27.265.900,00	9.210.000,00	(18.055.900,00)	33,78	

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	27.265.900,00	9.210.000,00	(18.055.900,00)	33,76	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	27.265.900,00	9.210.000,00	(18.055.900,00)	33,76	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.265.900,00	9.210.000,00	(18.055.900,00)	33,76	
2.11 . 1-04.2-11.1-01.01 . 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	94.031.500,00	77.535.314,00	(16.496.186,00)	82,46	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.031.500,00	77.535.314,00	(16.496.186,00)	82,46	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	16.176.500,00	14.595.000,00	(1.581.500,00)	90,22	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.146.500,00	14.565.000,00	(1.581.500,00)	90,14	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.146.500,00	14.565.000,00	(1.581.500,00)	90,14	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	77.927.000,00	62.980.314,00	(14.946.686,00)	80,82	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	77.927.000,00	62.980.314,00	(14.946.686,00)	80,82	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.927.000,00	62.980.314,00	(14.946.686,00)	80,82	
2.11 . 1-04.2-11.1-01.01 . 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	29.280.000,00	3.820.000,00	(25.460.000,00)	13,05	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.280.000,00	3.820.000,00	(25.460.000,00)	13,05	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	29.280.000,00	3.820.000,00	(25.460.000,00)	13,05	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 09.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.280.000,00	3.820.000,00	(25.460.000,00)	13,05	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 09.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	3.820.000,00	(25.460.000,00)	13,05	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10	Program Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.117.000,00	11.333.500,00	(1.783.500,00)	86,40	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13.117.000,00	11.333.500,00	(1.783.500,00)	86,40	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.117.000,00	11.333.500,00	(1.783.500,00)	86,40	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	13.117.000,00	11.333.500,00	(1.783.500,00)	86,40	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.117.000,00	11.333.500,00	(1.783.500,00)	86,40	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11	Program Pengelolaan Persampahan	2.408.473.935,00	2.196.272.329,00	(212.201.606,00)	91,19	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.408.473.935,00	2.196.272.329,00	(212.201.606,00)	91,19	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaurun Ulang dan Pemanfaatan Kembali	25.936.000,00	10.075.000,00	(7.861.000,00)	69,69	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.936.000,00	18.075.000,00	(7.861.000,00)	69,69	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.936.000,00	18.075.000,00	(7.861.000,00)	69,69	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pendangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.120.663.535,00	1.985.748.329,00	(134.915.246,00)	93,64	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.120.663.535,00	1.985.748.329,00	(134.915.246,00)	93,64	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.663.535,00	1.985.748.329,00	(134.915.246,00)	93,64	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	217.440.400,00	157.114.000,00	(60.326.400,00)	72,26	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	185.440.400,00	125.114.000,00	(60.326.400,00)	67,47	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.440.400,00	125.114.000,00	(60.326.400,00)	67,47	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.04 . 5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	93,91	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	93,91	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.433.600,00	35.333.000,00	(9.080.600,00)	79,52	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	44.433.600,00	35.336.000,00	(9.098.600,00)	79,52	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.070.000,00	0,00	(11.070.000,00)	0,00	
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.363.600,00	35.336.000,00	(9.098.600,00)	21,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.382.644.731,00)	(21.141.827.120,00)	1.040.817.831,00	94,35	

Printed by SIMDA

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & PEMADAM KEBAKARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05 . 1-05.3-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	8.437.154.485,00	8.196.977.143,00	(240.177.342,00)	97,15	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.667.222.501,00	6.506.112.038,00	(161.110.469,00)	97,73	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.991.839.272,00	5.882.808.194,00	(109.031.078,00)	98,18	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.892.959.272,00	5.787.553.194,00	(105.406.078,00)	98,21	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.892.959.272,00	5.787.553.194,00	(105.406.078,00)	98,21	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.892.959.272,00	5.787.553.194,00	(105.406.078,00)	98,21	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.880.000,00	95.325.000,00	(3.555.000,00)	96,40	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	98.880.000,00	95.325.000,00	(3.555.000,00)	96,40	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	98.640.000,00	95.085.000,00	(3.555.000,00)	96,40	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.636.205,00	400.979.122,00	(2.657.163,00)	98,33	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.490.045,00	7.490.000,00	(3.045,00)	99,96	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.490.045,00	7.490.000,00	(3.045,00)	99,96	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.490.045,00	7.490.000,00	(3.045,00)	99,96	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.999.900,00	31.555.500,00	(444.400,00)	98,61	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.394.900,00	21.321.500,00	(67.400,00)	99,68	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.394.900,00	21.327.500,00	(67.400,00)	94,50	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	12.605.000,00	12.228.000,00	(377.000,00)	97,01	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.605.000,00	12.228.000,00	(377.000,00)	97,01	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.009.500,00	1.989.000,00	(20.500,00)	98,98	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.909.500,00	1.889.000,00	(20.500,00)	98,93	

Powered By Sinda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.0.00.0.00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.500,00	7.880.000,00	(20.500,00)	99,74	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cenkan dan Perbekalan	19.910.040,00	19.810.000,00	(19.840,00)	99,90	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.910.040,00	19.810.000,00	(10.040,00)	99,90	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.838.840,00	19.810.000,00	(18.840,00)	99,90	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.445.000,00	332.234.622,00	(2.210.378,00)	99,34	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.16.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	334.445.000,00	332.234.622,00	(2.210.378,00)	99,34	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.445.000,00	332.234.622,00	(2.210.378,00)	99,34	
1.05 . 1-05.0-01.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.589.400,00	27.205.000,00	(24.384.400,00)	52,73	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.100.400,00	27.205.000,00	(3.902.400,00)	87,45	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	30.530.400,00	26.635.000,00	(3.895.400,00)	86,98	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.530.400,00	26.635.000,00	(3.895.400,00)	86,90	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.389.000,00	0,00	(20.389.000,00)	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	BELANJA MODAL	20.389.000,00	0,00	(20.389.000,00)	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.389.000,00	0,00	(20.389.000,00)	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.329.800,00	25.927.050,00	(5.402.350,00)	82,76	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.0.00.0.00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.580.000,00	14.196.250,00	(383.750,00)	97,37	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.580.000,00	14.196.250,00	(383.750,00)	97,37	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.580.000,00	14.196.250,00	(383.750,00)	97,37	
1.05 . 1.05.0.00.0.00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	14.749.800,00	9.730.800,00	(5.019.000,00)	65,97	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.749.800,00	9.730.800,00	(5.019.000,00)	65,97	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.749.800,00	9.730.800,00	(5.019.000,00)	65,97	
1.05 . 1.05.0.00.0.00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.247.750,00	168.122.672,00	(9.625.078,00)	94,62	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.005.200,00	142.128.672,00	(7.874.528,00)	94,89	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	154.003.200,00	146.129.672,00	(7.874.528,00)	94,89	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.003.200,00	146.128.672,00	(7.874.528,00)	94,89	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.744.550,00	22.994.000,00	(1.750.550,00)	92,93	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.744.550,00	22.994.000,00	(1.750.550,00)	92,93	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.744.550,00	22.994.000,00	(1.750.550,00)	92,93	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	981.671.290,00	943.061.150,00	(38.610.648,00)	96,07	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	882.750.100,00	844.368.550,00	(38.930.550,00)	95,66	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi Deteksi Dini dan Cegah	404.760.250,00	402.750.450,00	(2.010.750,00)	97,57	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	429.960.000,00	422.220.450,00	(7.739.550,00)	98,20	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	360.000,00	360.000,00	(100.000,00)	80,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.200.000,00	421.560.450,00	(7.639.550,00)	98,22	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	64.029.200,00	60.530.000,00	(3.299.200,00)	94,37	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.029.200,00	60.530.000,00	(3.299.200,00)	94,30	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	49.999.800,00	48.110.000,00	(1.889.800,00)	96,22	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	49.999.800,00	48.110.000,00	(1.889.800,00)	96,22	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	48.110.000,00	(1.889.800,00)	96,22	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	137.331.900,00	701.600.100,00	(190.000,00)	99,97	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	132.031.900,00	131.838.100,00	(493.800,00)	99,63	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.031.900,00	131.838.100,00	(493.800,00)	99,63	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Hak Asasi Manusia	66.881.600,00	48.303.900,00	(17.497.700,00)	72,44	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	65.881.600,00	48.381.700,00	(17.497.700,00)	73,44	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.881.600,00	48.381.700,00	(17.497.700,00)	73,44	

Powered By SIKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	139.757.200,00	133.286.300,00	(6.470.900,00)	95,37	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	139.757.200,00	133.286.300,00	(6.470.900,00)	95,37	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	139.757.200,00	133.286.300,00	(6.470.900,00)	95,37	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Pencegahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	98.912.698,00	98.692.600,00	(220.098,00)	99,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	98.912.698,00	98.692.600,00	(220.098,00)	99,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	98.912.698,00	98.692.600,00	(220.098,00)	99,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.912.698,00	98.692.600,00	(220.098,00)	99,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	798.200.190,00	747.803.955,00	(50.456.235,00)	93,68	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	798.200.190,00	747.803.955,00	(50.456.235,00)	93,68	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	798.200.190,00	747.803.955,00	(50.456.235,00)	93,68	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	643.001.190,00	623.679.955,00	(19.311.345,00)	96,99	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	643.001.190,00	623.679.955,00	(19.311.345,00)	96,99	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	154.262.890,00	123.524.000,00	(30.738.890,00)	80,07	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.262.890,00	123.524.000,00	(30.738.890,00)	80,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.437.154.495,00)	(8.196.977.143,00)	240.177.352,00	97,15	

Scanned by SKOD

BADAN PENANAGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	25.472.182.868,00	24.009.926.890,30	(1.462.255.978,70)	94,26	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.050.499.136,00	3.793.417.798,00	(257.081.338,00)	93,65	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.203.429.644,00	3.134.139.723,00	(69.289.921,00)	97,84	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.086.429.644,00	3.032.884.723,00	(53.544.921,00)	98,27	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.086.429.644,00	3.032.884.723,00	(53.544.921,00)	98,27	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.086.429.644,00	3.032.884.723,00	(53.544.921,00)	98,27	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.000.000,00	101.245.000,00	(15.755.000,00)	86,53	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	117.000.000,00	101.245.000,00	(15.755.000,00)	86,53	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	117.000.000,00	101.245.000,00	(15.755.000,00)	86,53	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.469.492,00	234.934.037,00	(535.455,00)	99,77	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.914.436,00	(85.564,00)	98,29	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.914.436,00	(85.564,00)	98,29	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.914.436,00	(85.564,00)	98,29	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.999.662,00	(338,00)	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.999.662,00	(338,00)	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.999.662,00	(338,00)	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.845.000,00	(155.000,00)	98,45	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.845.000,00	(155.000,00)	98,45	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.845.000,00	(155.000,00)	98,45	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.486.692,00	14.485.039,00	(1.653,00)	99,99	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.486.692,00	14.485.039,00	(1.653,00)	99,99	

Printed by Sakti

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.486.622,00	14.485.839,30	(782,60)	99,99	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.983.170,00	210.725.700,00	(257.470,00)	99,88	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	210.983.170,00	210.725.700,00	(257.470,00)	99,88	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.983.170,00	210.725.700,00	(257.470,00)	99,88	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.030.000,00	32.346.610,00	(6.683.390,00)	82,87	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	28.836.610,00	(7.163.390,00)	80,10	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	28.836.610,00	(7.163.390,00)	80,10	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	28.836.610,00	(7.163.390,00)	80,10	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	1.510.000,00	(290.000,00)	83,89	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.510.000,00	(290.000,00)	83,89	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.510.000,00	(290.000,00)	83,89	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.000.000,00	361.960.870,00	(169.039.130,00)	68,19	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.050.000,00	194.947.658,00	(54.102.342,00)	78,28	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	249.050.000,00	194.947.658,00	(54.102.342,00)	78,28	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.050.000,00	194.947.658,00	(54.102.342,00)	78,28	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	281.950.000,00	81.557.487,00	(110.442.513,00)	40,36	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	81.557.487,00	(118.442.513,00)	40,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	81.557.487,00	(118.442.513,00)	40,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.750.000,00	6.888.208,00	(15.861.792,00)	30,28	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.750.000,00	6.888.208,00	(15.861.792,00)	30,28	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	6.888.208,00	(15.861.792,00)	30,28	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	48.557.487,00	(11.442.513,00)	97,60	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	48.557.487,00	(11.442.513,00)	97,60	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	48.557.487,00	(11.442.513,00)	97,60	
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03	Program Penanggulangan Bencana	21.421.583.437,00	20.020.309.092,30	(595.174.340,70)	97,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	41.135.378.00	24.635.625.00	(15.543.753,00)	59,83	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	41.170.378.00	24.635.625.00	(16.542.753,00)	59,83	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	41.178.378.00	24.635.625.00	(16.542.753,00)	59,83	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.178.378.00	24.635.625.00	(16.542.753,00)	59,83	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	20.760.330.455.00	20.431.055.905,30	(329.274.409,70)	98,41	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	97.660.000.00	57.025.950.00	(40.634.050,00)	58,39	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	97.660.000.00	57.025.950,00	(40.634.050,00)	58,39	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.660.000,00	57.025.950,00	(40.634.050,00)	58,39	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03	Pengembangan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	125.370.000.00	72.823.096.00	(52.546.904,00)	58,09	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	110.617.000.00	67.255.646,00	(43.361.354,00)	60,78	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.617.600,00	67.255.646,00	(46.361.954,00)	59,18	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03 . 5.2	BELANJA MODAL	11.742.000,00	5.577.750,00	(6.164.250,00)	47,50	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.742.000,00	5.577.750,00	(6.164.250,00)	47,50	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	42.015.000.00	29.580.900,00	(12.234.100,00)	90,21	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.815.000,00	20.580.900,00	(2.234.100,00)	90,21	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.815.000,00	20.580.900,00	(2.234.100,00)	90,21	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	47.370.000.00	29.052.000,00	(18.318.000,00)	61,33	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	47.370.000,00	29.052.000,00	(18.318.000,00)	61,33	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.370.000,00	29.052.000,00	(18.318.000,00)	61,33	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.159.660.855.00	20.150.211.331,30	(209.655.520,70)	98,48	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	386.578.556,00	230.510.506,00	(156.068.562,00)	59,63	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	53.440.000,00	37.300.000,00	(16.140.000,00)	69,80	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	342.138.556,00	202.479.995,00	(139.916.562,00)	59,11	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07 . 5.2	BELANJA MODAL	19.064.260.299,00	19.913.681.339,30	(50.599.960,70)	99,75	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07 . 5.2.1	Belanja Modal Tanah, Peralatan, dan Irigasi	19.064.260.299,00	19.913.681.338,30	(50.599.960,70)	99,75	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	97.247.000.00	30.060.105.00	(8.836.895,00)	90,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	97.247.000,00	88.360.405,00	(8.886.595,00)	90,86	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.247.000,00	88.360.405,00	(8.886.595,00)	90,86	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	630.166.600,00	380.809.482,00	(249.357.118,00)	60,43	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03.2.03.02	Kantor Sepat Damkar Pemadam Kab./Kota	235.046.600,00	157.698.651,00	(77.347.949,00)	67,09	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	235.046.600,00	157.698.651,00	(77.347.949,00)	67,09	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.046.600,00	157.698.651,00	(77.347.949,00)	67,09	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	47.650.000,00	9.000.000,00	(38.650.000,00)	18,81	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.650.000,00	9.000.000,00	(38.650.000,00)	18,81	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.650.000,00	9.000.000,00	(38.650.000,00)	18,81	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	347.270.000,00	214.110.831,00	(133.159.169,00)	61,65	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	347.270.000,00	214.110.831,00	(133.159.169,00)	61,65	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	347.270.000,00	214.110.831,00	(133.159.169,00)	61,65	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.04.02	Pengadaan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.472.182.869,00)	(24.609.976.290,30)	862.255.578,70	96,61	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 00.0.00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 00.0.00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	0,00	(35.000,00)	(35.000,00)	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 00.0.00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(35.000,00)	(35.000,00)	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(35.000,00)	(35.000,00)	0,00	

Printed By Siskeudes

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah
Nomor : 1
Tanggal : 20 Mei 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sosial
Organisasi : 1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAHAN / (PENGURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	7.724.010.937,00	5.523.030.404,00	(2.200.980.533,00)	71,50	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.617.956.577,00	3.539.956.143,00	(118.397.774,00)	96,77	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.738.234,00	3.047.023.107,00	(80.715.127,00)	97,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.033.956.234,00	2.953.783.107,00	(80.175.127,00)	97,36	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.033.958.234,00	2.953.783.107,00	(80.175.127,00)	97,36	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.463.487.667,00	2.388.920.607,00	(74.567.065,00)	96,97	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	570.470.572,00	564.862.500,00	(5.608.072,00)	99,02	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.200.000,00	93.240.000,00	(540.000,00)	99,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5	BELANJA OPERASI	93.780.000,00	93.240.000,00	(540.000,00)	99,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	93.780.000,00	93.240.000,00	(540.000,00)	99,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.379.193,00	291.473.047,00	(6.856.146,00)	97,70	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.412,00	3.751.000,00	(1.248.412,00)	75,03	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.999.412,00	3.751.000,00	(1.248.412,00)	75,03	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.412,00	3.751.000,00	(1.248.412,00)	75,03	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.183.565,00	70.141.121,00	(1.022.444,00)	98,56	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	71.183.565,00	70.141.121,00	(1.022.444,00)	98,56	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.183.565,00	70.141.121,00	(1.022.444,00)	98,56	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.499.816,00	2.997.000,00	(2.502.816,00)	54,49	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.499.816,00	2.997.000,00	(2.502.816,00)	54,49	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.499.816,00	2.997.000,00	(2.502.816,00)	54,49	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.514.400,00	19.401.364,00	(113.036,00)	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.514.400,00	19.401.344,00	(113.056,00)	99,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.514.400,00	19.401.344,00	(113.056,00)	99,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.102.000,00	195.102.582,00	(1.999.418,00)	99,00	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	197.102.000,00	195.102.582,00	(1.999.418,00)	99,00	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197.102.000,00	195.102.582,00	(1.999.418,00)	99,00	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	19.133.860,00	17.400.000,00	(1.733.860,00)	90,94	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.133.860,00	17.400.000,00	(1.733.860,00)	90,94	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	19.133.860,00	17.400.000,00	(1.733.860,00)	90,94	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.133.860,00	17.400.000,00	(1.733.860,00)	90,94	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	29.139.500,00	22.587.999,00	(7.151.501,00)	77,45	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.940.000,00	(600.000,00)	87,33	
1.06 . 1-06.2-13.0-0114 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.600.000,00	5.000.000,00	(600.000,00)	81,33	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.000.000,00	(600.000,00)	81,33	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.139.500,00	16.358.999,00	(5.780.501,00)	77,66	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.139.500,00	15.358.999,00	(5.780.501,00)	72,66	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.139.500,00	15.358.999,00	(5.780.501,00)	72,66	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.229.000,00	(771.000,00)	84,58	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	4.229.000,00	(771.000,00)	84,58	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.229.000,00	(771.000,00)	84,58	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	202.016.000,00	180.974.990,00	(21.041.100,00)	89,59	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	184.999.750,00	169.482.990,00	(15.516.760,00)	91,61	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	184.999.750,00	169.483.000,00	(15.516.760,00)	91,61	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.999.750,00	169.483.000,00	(15.516.760,00)	91,61	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.016.340,00	11.092.000,00	(5.824.340,00)	61,91	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.016.340,00	11.092.000,00	(5.824.340,00)	61,91	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.016.340,00	11.092.000,00	(5.824.340,00)	61,91	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 02	**Program Pemberdayaan Sosial**	135.992.610,00	134.813.750,00	(1.178.860,00)	99,13	

Printed By SiwaDi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.2.13.0-00.01 . 03.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	135.999.610,00	134.813.750,00	(1.185.860,00)	99,13	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.999.610,00	134.813.750,00	(1.185.860,00)	99,13	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.03.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	135.999.610,00	134.813.750,00	(1.185.860,00)	99,13	
1.06 . 1.06.2-13.0-00.01 . 03.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.999.610,00	134.813.750,00	(1.185.860,00)	99,13	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	75.291.200,00	68.993.250,00	(6.297.950,00)	91,64	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	75.291.200,00	68.993.250,00	(6.297.950,00)	91,64	
2.13 . 1.06.2-13.0-00.01 . 03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	75.291.200,00	68.993.250,00	(6.297.950,00)	91,64	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	75.291.200,00	68.993.250,00	(6.297.950,00)	91,64	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.291.200,00	68.993.250,00	(6.297.950,00)	91,64	
1.06 . 1.06.2-13.0-00.01 . 04	Program Rehabilitasi Sosial	1.353.588.340,00	1.322.073.730,00	(27.031.514.610,00)	39,42	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	264.967.320,00	243.206.543,00	(21.760.977,00)	91,79	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	184.057.420,00	174.319.466,00	(9.737.954,00)	94,71	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	184.057.420,00	174.319.466,00	(9.737.954,00)	94,71	
1.06 . 1.06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.057.420,00	174.319.466,00	(9.737.954,00)	94,71	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	97.000.000,00	75.911.077,00	(21.088.923,00)	94,58	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	39.010.000,00	36.911.077,00	(1.898.923,00)	94,58	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.810.000,00	35.917.077,00	(1.890.923,00)	94,98	
1.06 . 1.06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	48.100.000,00	37.976.000,00	(10.124.000,00)	78,95	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	48.100.000,00	37.976.000,00	(10.124.000,00)	78,95	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	37.976.000,00	(10.124.000,00)	78,95	
2.13 . 1.06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.04	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Dukun Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	3.088.620.920,00	1.077.867.187,00	(2.010.753.733,00)	34,82	
1.06 . 1.06.2-13.0-00.01 . 04.2.02.00	Penyediaan Pelayanan	3.088.620.920,00	1.077.867.187,00	(2.010.753.733,00)	34,82	

Printed By SiskeuDes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2 02.01 . 5.1	UCLANJA OPERASI	3.051.620.920,00	1.023.867.187,00	(2.008.753.733,00)	34,02	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2 02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.051.620.920,00	1.023.867.187,00	(2.008.753.733,00)	34,02	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	386.043.700,00	350.751.111,00	(35.292.589,00)	90,86	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	279.103.700,00	248.514.880,00	(30.352.520,00)	89,13	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.01	Perjalanan Anak-Anak Terlantar	4.932.900,00	1.265.000,00	(613.900,00)	87,60	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.932.900,00	4.265.000,00	(617.900,00)	87,60	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.932.900,00	4.265.000,00	(617.900,00)	87,60	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.02	Fasilitasi Pendataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	155.410.000,00	138.499.500,00	(16.910.500,00)	89,11	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	155.410.000,00	138.499.500,00	(16.910.500,00)	89,11	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.410.000,00	138.499.500,00	(16.910.500,00)	89,11	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	72.562.000,00	61.924.300,00	(10.637.700,00)	85,34	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	72.562.000,00	61.924.300,00	(10.637.700,00)	85,34	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.562.000,00	61.924.300,00	(10.637.700,00)	85,34	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	46.204.000,00	44.026.080,00	(2.177.920,00)	95,29	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	46.204.000,00	44.026.080,00	(2.177.920,00)	95,29	
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.204.000,00	44.026.080,00	(2.177.920,00)	95,29	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.976.000,00	101.936.231,00	(4.939.768,00)	95,38	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.976.000,00	101.936.231,00	(4.939.768,00)	95,38	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	106.976.000,00	101.936.231,00	(4.939.769,00)	95,38	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106.976.000,00	101.936.231,00	(4.939.769,00)	95,38	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 06	Program Penanganan Bencana	99.315.200,00	92.498.170,00	(7.817.030,00)	91,37	
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99.315.200,00	92.498.170,00	(7.817.030,00)	91,34	

Powered by Stella

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 06.2.01.01	Penyediaan Makanan	90.315.200,00	82.498.170,00	(7.817.030,00)	91,34	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	90.315.200,00	82.498.170,00	(7.817.030,00)	91,34	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.315.200,00	82.498.170,00	(7.817.030,00)	91,34	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.916.010,00	4.841.250,00	(74.760,00)	98,48	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.916.010,00	4.841.250,00	(74.760,00)	98,48	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 07.2.01.09	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.916.010,00	4.841.250,00	(74.760,00)	98,48	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 07.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.916.010,00	4.841.250,00	(74.760,00)	98,48	
1.05 . 1-05.2-13.0-00.01 . 07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.916.010,00	4.841.250,00	(74.760,00)	98,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.724.010.927,00)	(5.523.030.404,00)	2.200.980.523,00	71,50	

Printed By SIMDA

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja
Organisasi : 2.02 , 2-07.3-32.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.05 ,)	**BELANJA DAERAH**	4.309.319.202,00	3.057.037.739,00	(428.281.463,00)	90,06	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.226.681.010,00	2.866.104.339,00	(352.576.671,00)	88,77	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.110.166.105,00	1.900.810.614,00	(148.355.491,00)	90,06	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.076.466.105,00	1.920.110.614,00	(148.355.491,00)	92,86	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.076.466.105,00	1.928.110.614,00	(148.355.491,00)	92,86	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	2.076.466.105,00	1.928.110.614,00	(148.355.491,00)	92,86	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	Belanja Pegawai	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	221.345.768,00	190.303.597,00	(30.642.412,00)	86,16	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.076.000,00	16.076.000,00	(0,00)	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.076.000,00	10.076.000,00	(0,00)	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.076.008,00	10.076.000,00	(8,00)	100,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.500.000,00	5.498.600,00	(1.400,00)	99,97	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.500.000,00	5.498.600,00	(1.400,00)	99,97	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.498.600,00	(1.400,00)	99,97	
2.07 , 2-07.3-32.0-00.01 , 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.850.000,00	28.796.500,00	(500,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.800.000,00	29.799.500,00	(500,00)	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	29.799.500,00	(500,00)	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.969.000,00	134.328.497,00	(30.640.503,00)	81,43	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	164.969.000,00	134.328.497,00	(30.640.503,00)	81,43	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	164.969.000,00	134.328.497,00	(30.640.503,00)	81,43	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	556.119.096,00	381.082.946,00	(175.036.950,00)	68,53	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	556.119.896,00	381.082.940,00	(175.036.956,00)	68,53	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	554.319.896,00	379.282.940,00	(175.036.956,00)	68,42	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.319.896,00	379.282.940,00	(175.036.956,00)	68,42	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.000.000,00	81.683.210,00	(316.790,00)	99,61	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	74.683.210,00	(316.790,00)	99,58	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.683.210,00	(316.790,00)	99,58	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.683.210,00	(316.790,00)	99,58	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.050.000,00	221.824.778,00	(8.225.222,00)	96,42	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.050.000,00	221.824.778,00	(8.225.222,00)	96,42	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	230.050.000,00	221.824.778,00	(8.225.222,00)	96,42	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.050.000,00	221.824.778,00	(8.225.222,00)	96,42	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	979.910.192,00	932.733.700,00	(47.784.492,00)	95,17	

Printed By SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.3.32.0.00.01 . 03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	957.676.292,00	910.191.800,00	(47.484.192,00)	95,04	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	816.270.600,00	800.585.300,00	(15.691.300,00)	98,08	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	816.270.600,00	800.585.300,00	(15.691.300,00)	98,08	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	816.270.600,00	800.585.300,00	(15.691.300,00)	98,08	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	131.397.092,00	100.720.700,00	(30.676.392,00)	76,65	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	131.397.092,00	100.720.700,00	(30.676.392,00)	76,65	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	131.397.092,00	100.720.700,00	(30.676.392,00)	76,65	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.03	Pelaksanaan Peralatan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	10.301.800,00	9.185.800,00	(1.115.800,00)	89,17	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.301.800,00	9.185.800,00	(1.115.800,00)	89,17	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.301.800,00	9.185.800,00	(1.115.800,00)	89,17	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21.941.800,00	21.641.800,00	(300.000,00)	98,63	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21.941.800,00	21.641.800,00	(300.000,00)	98,63	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.941.800,00	21.641.800,00	(300.000,00)	98,63	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.941.800,00	21.641.800,00	(300.000,00)	98,63	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	38.125.000,00	35.535.900,00	(2.589.100,00)	93,21	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	38.125.000,00	35.535.900,00	(2.589.100,00)	93,21	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	38.125.000,00	35.535.900,00	(2.589.100,00)	93,21	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	38.125.000,00	35.535.900,00	(2.589.100,00)	93,21	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.125.000,00	35.535.900,00	(2.589.100,00)	93,21	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05	Program Hubungan Industrial	62.595.000,00	47.264.000,00	(15.331.000,00)	75,51	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	62.595.000,00	47.264.000,00	(15.331.000,00)	75,51	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.595.000,00	47.264.000,00	(15.331.000,00)	75,51	
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	62.595.000,00	47.264.000,00	(15.331.000,00)	75,51	

Powered by SiPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2-07.3-32.0-06.01 , 06.2.02.02 5.1.2	Utang Barang dan Jasa	62.596.000,00	47.261.000,00	(15.335.000,00)	75,51	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.309.318.202,00)	(1.881.007.709,00)	428.281.463,01	90,08	

Printed By SIPD

DINAS KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan
Organisasi : 2.09 . 2.09.0.25.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAHAN / (PENGURANGAN)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	5.620.112.601,00	5.360.536.611,00	(348.536.990,00)	95,37	
2.09 . 2.16.3.25.0.00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.021.208.261,00	2.963.861.027,00	(57.347.234,00)	98,10	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.0 . 01.2.07	Administrasi Kesetiaan Perangkat Daerah	2.447.931.401,00	2.369.956.251,00	(78.971.147,00)	96,77	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.315.923.401,00	2.254.381.254,00	(61.566.147,00)	97,34	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.315.923.401,00	2.254.381.254,00	(61.566.147,00)	97,34	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.315.923.401,00	2.254.381.254,00	(61.566.147,00)	97,34	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.000.000,00	114.595.000,00	(17.405.000,00)	86,81	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	114.595.000,00	(17.405.000,00)	86,81	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	124.620.000,00	110.215.000,00	(14.405.000,00)	88,45	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.815.860,00	214.976.053,00	(16.839.807,00)	92,74	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.828.860,00	29.648.500,00	(180.360,00)	99,39	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.961.000,00	(39.000,00)	99,87	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.961.000,00	(39.000,00)	99,87	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	10.828.860,00	10.687.500,00	(141.360,00)	98,69	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.828.860,00	10.687.500,00	(141.360,00)	98,69	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.465.500,00	(34.500,00)	99,54	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.465.500,00	(34.500,00)	99,54	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.465.500,00	(34.500,00)	99,54	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.700.000,00	14.699.813,00	(187,00)	100,00	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.699.813,00	(187,00)	100,00	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.699.813,00	(187,00)	100,00	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.787.000,00	163.162.240,00	(16.624.760,00)	95,2	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.00 . 5.1	BELANJA OPERASI	160.387.000,00	152.102.245,00	(16.624.755,00)	90,21	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.06.00 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.787.000,00	152.102.245,00	(16.624.755,00)	90,21	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.00	Pengedalian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.000.000,00	51.055.014,00	(5.744.986,00)	88,89	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.08.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.990.000,00	(4.000,00)	99,00	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	39.284.914,00	(5.715.086,00)	87,30	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	39.284.914,00	(5.715.086,00)	87,30	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	39.284.914,00	(5.715.086,00)	87,30	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.800.000,00	9.775.000,00	(25.000,00)	99,74	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.800.000,00	9.775.000,00	(25.000,00)	99,74	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.775.000,00	(25.000,00)	99,74	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.665.000,00	328.662.801,00	(6.002.199,00)	98,21	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perlelitasan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.790.000,00	129.234.501,00	(5.555.499,00)	95,88	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	134.790.000,00	129.234.501,00	(5.555.499,00)	95,88	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	134.790.000,00	129.234.501,00	(5.555.499,00)	95,88	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.875.000,00	199.628.300,00	(246.700,00)	99,88	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	199.875.000,00	199.628.300,00	(246.700,00)	99,88	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.535.000,00	198.288.300,00	(246.700,00)	99,88	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	45.000.000,00	40.601.000,00	(4.399.000,00)	90,22	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	40.601.000,00	(4.399.000,00)	90,22	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	45.000.000,00	40.601.000,00	(4.399.000,00)	90,22	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	40.601.000,00	(4.399.000,00)	90,22	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.601.000,00	(4.399.000,00)	90,22	
2.09 . 2.09.3.25.0.00.01 . 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	886.263.000,00	856.017.726,00	(42.245.274,00)	96,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kekhasan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	665.091.000,00	643.076.626,00	(21.014.374,00)	96,53	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	34.534.000,00	33.889.600,00	(644.400,00)	98,82	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.534.000,00	33.889.600,00	(644.400,00)	98,82	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.534.000,00	33.889.600,00	(644.400,00)	98,82	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000,00	147.373.750,00	(2.626.250,00)	98,42	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	463.000.000,00	460.373.750,00	(2.626.250,00)	99,43	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	463.000.000,00	460.373.750,00	(2.626.250,00)	99,43	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	65.557.000,00	48.386.976,00	(17.170.024,00)	73,81	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.557.000,00	48.386.976,00	(17.170.024,00)	73,81	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.557.000,00	48.386.976,00	(17.170.024,00)	73,81	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	90.000.000,00	87.426.300,00	(2.573.700,00)	97,14	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	90.000.000,00	87.426.300,00	(2.573.700,00)	97,14	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	87.426.300,00	(2.573.700,00)	97,14	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.02	**Pengelolaan dan Kesembangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	100.000.000,00	98.831.800,00	(1.168.200,00)	98,83	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.831.800,00	(1.168.200,00)	98,83	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.000.000,00	98.831.800,00	(1.168.200,00)	98,83	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.831.800,00	(1.168.200,00)	98,83	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	135.172.000,00	117.109.300,00	(18.062.700,00)	86,64	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	39.172.000,00	30.340.200,00	(8.831.800,00)	77,45	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.172.000,00	30.340.200,00	(8.831.800,00)	77,45	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.172.000,00	30.340.200,00	(8.831.800,00)	77,45	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000,00	72.156.000,00	(2.844.000,00)	96,21	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	75.000.000,00	72.156.000,00	(2.844.000,00)	96,21	
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.156.000,00	(2.844.000,00)	96,21	

Printed By Sirod

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 2-09.3-25.0-00.01 03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	21.000.000,00	14.613.100,00	(6.386.900,00)	69,59	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 03.2.04.03 5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	14.613.100,00	(6.386.900,00)	69,59	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 03.2.04.03 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	14.613.100,00	(6.386.900,00)	69,59	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.482.388.440,00	1.309.251.756,00	(173.136.682,00)	88,32	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	115.119.000,00	92.340.600,00	(22.778.400,00)	80,21	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	115.119.000,00	92.340.600,00	(22.778.400,00)	80,21	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04.2.01.01 5.1	BELANJA OPERASI	115.119.000,00	92.340.600,00	(22.778.400,00)	80,21	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04.2.01.01 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.119.000,00	92.340.600,00	(22.778.400,00)	80,21	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	398.492.800,00	361.190.108,00	(37.302.692,00)	90,64	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	94.093.100,00	91.590.500,00	(2.502.600,00)	97,34	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.01 5.1	BELANJA OPERASI	94.093.100,00	91.590.500,00	(2.502.600,00)	97,34	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.01 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.01 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.843.100,00	90.340.500,00	(2.502.600,00)	97,30	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.375.000,00	144.573.700,00	(5.801.300,00)	96,14	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.02 5.1	BELANJA OPERASI	150.375.000,00	144.573.700,00	(5.801.300,00)	96,14	
2.09 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.02 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.375.000,00	144.573.700,00	(5.801.300,00)	96,14	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Pemodelan/Akses Iptek Pengelolaan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	154.024.700,00	124.035.908,00	(29.088.792,00)	81,11	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.04 5.1	BELANJA OPERASI	154.024.700,00	124.935.908,00	(29.088.792,00)	81,11	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.02.04 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.024.700,00	124.935.908,00	(29.088.792,00)	81,11	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	948.776.640,00	935.011.050,00	(13.765.590,00)	98,55	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	329.490.000,00	326.675.500,00	(2.814.500,00)	99,15	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04.02 5.1	BELANJA OPERASI	221.490.000,00	218.975.500,00	(2.514.500,00)	98,86	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04.02 5.1.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04.02 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	216.240.000,00	213.725.500,00	(2.514.500,00)	98,79	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04.02 5.2	BELANJA MODAL	108.000.000,00	107.800.000,00	(200.000,00)	99,81	
3.25 2-09.3-25.0-00.01 04.2.04.02 5.2.4	Belanja Modal Irigasi, Jaringan dan Jaga	108.000.000,00	107.800.000,00	(200.000,00)	99,81	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.01.03	Pengamanan Ketersediaan Sarana Pemanfaatan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.547.900,00	54.203.550,00	(4.345.650,00)	92,58	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.04.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	58.547.900,00	54.203.850,00	(4.345.650,00)	92,58	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.547.500,00	54.203.850,00	(4.343.650,00)	92,58	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.01.05	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan Ikan di Darat	560.735.140,00	554.931.700,00	(5.807.440,00)	98,96	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.04.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	560.735.140,00	554.931.700,00	(5.807.440,00)	98,96	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.04.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	559.395.140,00	553.591.700,00	(5.803.440,00)	98,96	
3.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	64.933.400,00	55.975.500,00	(8.957.900,00)	86,20	
3.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	64.933.400,00	55.975.500,00	(8.957.900,00)	86,20	
3.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	64.033.400,00	55.975.500,00	(8.957.900,00)	86,20	
3.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1	JELANJA OPERASI	64.933.400,00	55.975.500,00	(8.957.900,00)	86,20	
3.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.933.400,00	55.975.500,00	(8.957.900,00)	86,20	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	67.319.500,00	54.838.600,00	(12.480.900,00)	81,46	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.319.500,00	54.838.600,00	(12.480.900,00)	81,46	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.319.500,00	54.838.600,00	(12.480.900,00)	81,46	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	67.319.500,00	54.838.600,00	(12.480.900,00)	81,46	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.319.500,00	54.838.600,00	(12.480.900,00)	81,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.609.112.601,00)	(5.350.535.611,00)	249.576.990,00	95,37	

Powered by SinDa

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	5.212.059.001,00	5.068.642.945,00	(143.416.056,00)	97,25	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.526.311.211,00	3.457.582.920,00	(68.728.291,00)	98,05	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.977.920.241,00	2.943.499.285,00	(34.420.956,00)	98,85	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.901.116.241,00	2.867.116.285,00	(33.999.956,00)	98,83	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.901.116.241,00	2.867.116.285,00	(33.999.956,00)	98,83	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.901.116.241,00	2.867.116.285,00	(33.999.956,00)	98,83	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.410.000,00	76.290.000,00	(120.000,00)	99,84	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	76.410.000,00	76.290.000,00	(120.000,00)	99,84	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	75.990.000,00	75.870.000,00	(120.000,00)	99,84	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.497.970,00	298.324.778,00	(2.172.992,00)	99,28	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.599.999,00	4.586.625,00	(13.374,00)	99,71	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.599.999,00	4.586.625,00	(13.374,00)	99,71	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.599.999,00	4.586.625,00	(13.374,00)	99,71	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.512.353,00	49.503.094,00	(9.259,00)	99,98	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	49.512.353,00	49.503.094,00	(9.259,00)	99,98	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.512.353,00	49.503.094,00	(9.259,00)	99,98	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	10.731.438,00	10.444.000,00	(287.438,00)	97,32	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.731.438,00	10.444.000,00	(287.438,00)	97,32	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.731.438,00	10.444.000,00	(287.438,00)	97,32	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.279.960,00	17.209.175,00	(70.785,00)	99,59	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.0. . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	37.270.080.00	37.230.375.00	(71.005.00)	99.81	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.279.980.00	37.208.375.00	(71.605.00)	99.81	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.974.000,00	197.182.684.00	(791.316,00)	99.60	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	197.974.000,00	197.182.684.00	(791.316.00)	99.60	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197.974.000.00	197.182.684,00	(791.316.00)	99.60	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.950.000.00	9.500.000.00	(450.000,00)	95.48	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.950.000.00	9.500.000.00	(450.000.00)	95,48	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	BELANJA MODAL	9.950.000,00	9.500.000.00	(450.000.00)	95.48	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.950.000,00	9.500.000.00	(450.000,00)	95.48	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.150.000.00	75.975.818.00	(11.174.182.00)	87.18	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Alat Masyarat	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	100.00	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000.00	0.00	100,00	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000.00	0.00	100,00	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	61.100.000.00	52.128.018.00	(8.971.982.00)	84.99	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	61.400.000,00	52.128.018,00	(8.971.982,00)	84.99	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000.00	52.128.018,00	(9.271.982.00)	84.90	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.750.000.00	21.847.800.00	(1.902.200.00)	91.99	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	23.750.000,00	21.847.800.00	(1.902.200.00)	91.99	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	21.847.800.00	(1.902.200,00)	91.99	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.205.200,00	129.384.039.00	(21.821.161.00)	85,57	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.225.000.00	110.709.509,00	(21.515.491.00)	83.73	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	132.225.000,00	110.709.509.00	(21.515.491,00)	83,73	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.225.000,00	110.709.509,00	(21.515.491,00)	83.73	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.980.200.00	18.674.530.00	(305.670.00)	98.39	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	18.980.200,00	18.674.530.00	(305.670,00)	98.39	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.980.200,00	18.674.530,00	(305.670,00)	98.39	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02	Program Pendaftaran Penduduk	1.307.973.691,00	1.212.781.110,00	(95.092.580,00)	97,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.0.00.0.00.01 . 02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.251.161.141,00	3.227.940.453,00	(23.220.700,00)	99,29
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Penataan Penduduk Non Cetakan dan Rekam Administrasi Kependudukan	16.854.000,00	16.824.000,00	(30.000,00)	99,82
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.854.000,00	16.824.000,00	(30.000,00)	99,82
2.12 . 2.12.0.00.0.00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.854.000,00	16.824.000,00	(30.000,00)	99,82
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pencetakan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk:	328.003.217,00	310.516.753,00	(17.510.464,00)	97,66
2.12 . 2.12.0-00.0-00.0 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	100.691.816,00	98.591.652,00	(2.104.264,00)	97,91
2.12 . 2.12.0.00.0.00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	405.975.816,00	403.871.652,00	(2.104.264,00)	99,48
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.2	BELANJA MODAL	319.231.301,00	302.925.101,00	(16.306.200,00)	94,89
2.12 . 2.12.0.00.0.00.01 . 02.2.01.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.231.301,00	302.925.101,00	(16.306.200,00)	94,89
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	196.942.000,00	196.629.000,00	(313.000,00)	99,84
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	196.942.000,00	196.629.000,00	(313.000,00)	99,84
2.12 . 2.12.0.00.0.00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.942.000,00	196.629.000,00	(313.000,00)	99,84
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	307.997.976,00	303.770.080,00	(4.227.896,00)	98,63
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	267.651.096,00	263.424.400,00	(4.227.696,00)	98,42
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	267.651.096,00	263.424.400,00	(4.227.696,00)	98,42
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.2	BELANJA MODAL	40.346.280,00	40.346.280,00	0,00	100,00
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.346.280,00	40.346.280,00	0,00	100,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	56.412.500,00	45.050.680,00	(11.361.820,00)	79,86
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.000.000,00	21.836.780,00	(8.163.220,00)	72,79
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	21.816.780,00	(8.183.220,00)	72,72
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.816.780,00	(8.183.220,00)	72,72
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	26.412.500,00	23.233.900,00	(3.178.600,00)	87,97
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	26.412.500,00	23.233.900,00	(3.178.600,00)	87,97
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.412.500,00	23.233.900,00	(3.178.600,00)	87,97
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 03	Program Pencatatan Sipil	218.006.800,00	203.291.025,00	(15.014.775,00)	93,87

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 09.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	164.123.000,00	160.007.000,00	(4.073.907,00)	97,50	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 . 01.01	Pencatatan, Perubahan, Pembetulan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting	32.926.000,00	32.911.000,00	(15.000,00)	99,95	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	32.926.000,00	32.911.000,00	(15.000,00)	99,95	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.926.000,00	32.911.000,00	(15.000,00)	99,95	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05 . 01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	111.274.300,00	107.419.000,00	(3.855.300,00)	96,54	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	111.274.300,00	107.419.000,00	(3.855.300,00)	96,54	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.274.300,00	107.419.000,00	(3.855.300,00)	96,54	
2.12 . 2-12.0-00.0-0014 . 03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	19.963.000,00	19.762.000,00	(163.000,00)	99,18	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.925.000,00	19.762.000,00	(163.000,00)	99,18	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.925.000,00	19.762.000,00	(163.000,00)	99,18	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	54.779.900,00	43.199.025,00	(11.580.875,00)	78,86	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pencatatan Pelayanan Pencatatan Sipil	19.999.900,00	16.534.800,00	(3.465.100,00)	82,67	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.999.900,00	16.534.800,00	(3.465.100,00)	82,67	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	16.534.800,00	(3.465.100,00)	82,67	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02.05	Festival terkait Pencatatan Sipil	14.780.000,00	12.107.000,00	(2.673.000,00)	81,91	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.780.000,00	12.107.000,00	(2.673.000,00)	81,92	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	12.107.000,00	(2.673.000,00)	81,91	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	20.000.000,00	14.557.225,00	(5.442.775,00)	72,79	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	14.557.225,00	(5.442.775,00)	72,79	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.557.225,00	(5.442.775,00)	72,79	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120.917.300,00	100.116.637,00	(22.800.663,00)	82,81	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	18.290.000,00	11.810.750,00	(6.479.250,00)	64,57	
2.12 . 2.12.0.00.0-00.01 . 04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	18.290.000,00	11.810.750,00	(6.479.250,00)	64,57	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	18.290.000,00	11.810.750,00	(6.479.250,00)	64,57	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.290.000,00	11.810.750,00	(6.479.250,00)	64,57	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.627.300,00	84.305.887,00	(18.321.413,00)	85,15	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.07	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.462.300,00	30.643.012,00	(6.819.288,00)	81,80	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	37.462.300,00	30.643.012,00	(6.819.288,00)	81,80	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.462.300,00	30.643.012,00	(6.819.288,00)	81,80	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.08	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.594.000,00	15.374.175,00	(5.219.825,00)	74,66	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.594.000,00	15.374.175,00	(5.219.825,00)	74,66	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.594.000,00	15.374.175,00	(5.219.825,00)	74,66	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.09	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.571.000,00	48.288.500,00	(4.282.500,00)	91,85	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	52.571.000,00	48.288.500,00	(4.282.500,00)	91,85	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.571.000,00	48.288.500,00	(4.282.500,00)	91,85	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.000.000,00	28.821.250,00	(1.178.750,00)	96,07	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	30.000.000,00	28.821.250,00	(1.178.750,00)	96,07	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	30.000.000,00	28.821.250,00	(1.178.750,00)	96,07	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.821.250,00	(1.178.750,00)	96,07	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.821.250,00	(1.178.750,00)	96,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.219.078.934,00)	(5.060.612.975,00)	143.415.039,00	93,26	

Verified By Sirud

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	7.212.135.073,00	5.867.053.673,00	(1.345.081.394,00)	81,21	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.761.032.255,00	2.652.081.480,00	(108.950.764,00)	96,05	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.304.021.403,00	2.229.315.651,00	(74.705.752,00)	96,76	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.831.403,00	2.151.260.651,00	(69.570.752,00)	96,87	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.220.831.403,00	2.151.260.651,00	(69.570.752,00)	96,87	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.220.831.403,00	2.151.260.651,00	(69.570.752,00)	96,87	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.190.000,00	78.056.000,00	(5.134.000,00)	93,83	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	83.190.000,00	78.056.000,00	(5.134.000,00)	93,83	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	83.190.000,00	78.056.000,00	(5.134.000,00)	93,83	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.184.000,00	212.304.411,00	(26.879.589,00)	88,76	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.747.000,00	35.577.700,00	(169.300,00)	99,53	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.947.000,00	19.777.700,00	(169.300,00)	99,15	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.947.000,00	19.777.700,00	(169.300,00)	99,15	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.250.000,00	13.148.500,00	(1.101.500,00)	92,27	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	13.148.500,00	(1.101.500,00)	92,27	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	13.148.500,00	(1.101.500,00)	92,27	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.09	Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.187.000,00	173.578.211,00	(15.608.789,00)	91,75	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	189.187.000,00	173.578.211,00	(15.608.789,00)	91,75	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.187.000,00	173.578.211,00	(15.608.789,00)	91,75	
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.003.000,00	16.005.000,00	(2.998.000,00)	84,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.850.000,00	16.966.000,00	(2.884.000,00)	85,47	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	BELANJA MODAL	19.583.860,00	16.995.000,00	(2.888.860,00)	86,47	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.003.000,00	16.995.000,00	(2.008.000,00)	85,47	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.647.880,00	21.354.000,00	(3.197.880,00)	07,01	
2.11 . 2.14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	3.711.000,00	(1.289.000,00)	74,22	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.001.000,00	3.711.000,00	(1.289.000,00)	74,22	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.711.000,00	(1.289.000,00)	74,22	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.846.000,00	(154.000,00)	98,46	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.846.000,00	(154.000,00)	98,46	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.846.000,00	(154.000,00)	98,46	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.542.980,00	5.897.000,00	(1.645.980,00)	78,18	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.542.980,00	5.897.000,00	(1.645.980,00)	78,18	
2.11 . 2.14.2-08.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.542.980,00	5.897.000,00	(1.645.980,00)	78,18	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.000.000,00	163.012.422,00	(10.987.578,00)	93,69	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.000.000,00	135.692.007,00	(8.307.993,00)	94,23	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	135.692.007,00	(8.307.993,00)	94,23	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	135.692.007,00	(8.307.993,00)	94,23	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	27.320.420,00	(2.679.580,00)	91,07	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.320.420,00	(2.679.580,00)	91,07	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.320.420,00	(2.679.580,00)	91,07	
2.08 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	850.950.680,00	733.920.315,00	(117.030.364,00)	86,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.00 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02.2.0.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	44.008.000,00	38.310.100,00	(5.697.900,00)	87,05	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	23.900.100,00	(99.900,00)	99,58	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.900.100,00	(99.900,00)	99,58	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.900.100,00	(99.900,00)	99,58	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.05	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.008.000,00	14.710.000,00	(5.298.000,00)	73,52	
2.00 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.008.000,00	14.710.000,00	(5.298.000,00)	73,52	
2.08 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.008.000,00	14.710.000,00	(5.298.000,00)	73,52	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.0	Pemajuan Perikesan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.600.000,00	66.059.450,00	(27.540.550,00)	70,58	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02.2.02.11	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	93.600.000,00	66.059.450,00	(27.540.550,00)	70,58	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	93.600.000,00	66.059.450,00	(27.540.550,00)	70,58	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.02.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	66.059.450,00	(27.540.550,00)	70,58	
2.00 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02.2.03	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	713.351.680,00	629.550.766,00	(83.800.914,00)	88,25	
2.08 . 2-14.2-00.0-00.01 . 02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	713.351.680,00	629.550.766,00	(83.800.914,00)	88,25	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	713.351.680,00	629.550.766,00	(83.800.914,00)	88,25	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	713.351.680,00	629.550.766,00	(83.800.914,00)	88,25	
2.00 . 2-14.2-00.0-00.01 . 03	Program Perlindungan Perempuan	1.871.925.140,00	1.573.179.804,00	(298.745.336,00)	84,04	
2.08 . 2-14.2-00.0-00.01 . 03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	609.600.200,00	443.287.059,00	(166.313.141,00)	72,72	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000,00	21.822.345,00	(177.655,00)	99,19	
2.00 . 2-14.2-00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.822.345,00	(177.655,00)	99,19	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.822.345,00	(177.655,00)	99,19	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KRPTK	13.000.000,00	12.108.714,00	(891.286,00)	93,14	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.108.714,00	(891.286,00)	93,14	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.108.714,00	(891.286,00)	93,14	
2.14 . 2-14.2-00.0-00.01 . 03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KRPTK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	135.015.000,00	70.730.000,00	(52.285.000,00)	53,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14 . 2.14.2.08.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	113.015.000,00	70.730.000,00	(42.285.000,00)	53,17	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	113.015.000,00	70.730.000,00	(42.285.000,00)	53,13	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordesi), dan Mini Lokakarya (Minilok)	151.085.200,00	110.735.500,00	(40.349.700,00)	73,29	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	151.085.200,00	110.735.500,00	(40.349.700,00)	73,29	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.085.200,00	110.735.500,00	(40.349.700,00)	73,29	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	299.500.000,00	227.890.500,00	(71.609.500,00)	76,72	
2.14 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	299.500.000,00	227.890.500,00	(71.609.500,00)	76,72	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	299.500.000,00	227.890.500,00	(71.609.500,00)	76,72	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	187.200.000,00	122.720.000,00	(64.480.000,00)	65,56	
2.14 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	187.200.000,00	122.720.000,00	(64.480.000,00)	65,56	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	187.200.000,00	122.720.000,00	(64.480.000,00)	65,56	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	122.720.000,00	(64.480.000,00)	65,56	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	752.124.940,00	719.512.335,00	(32.612.565,00)	95,66	
2.14 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.03	Pembinaan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	160.560.000,00	151.409.000,00	(9.151.000,00)	94,30	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	160.560.000,00	151.409.000,00	(9.151.000,00)	94,30	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.560.000,00	151.409.000,00	(9.151.000,00)	94,30	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15.000.000,00	10.580.000,00	(4.420.000,00)	70,53	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.000.000,00	10.580.000,00	(4.420.000,00)	70,53	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.580.000,00	(4.420.000,00)	70,53	
2.14 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	560.556.140,00	547.323.375,00	(13.232.765,00)	98,30	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	448.556.140,00	432.807.375,00	(15.748.765,00)	96,49	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	444.536.140,00	428.787.375,00	(15.748.765,00)	96,46	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	120.000.000,00	114.716.000,00	(5.284.000,00)	95,60	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	114.716.000,00	(5.284.000,00)	95,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentaan Ber-KB	324.000.000,00	287.560.370,00	(36.339.630,00)	88,78	
2.11 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.01	Pengatgan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentaan Ber-KB	13.500.000,00	10.580.870,00	(2.919.130,00)	78,38	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	10.580.870,00	(2.919.130,00)	78,38	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	10.580.870,00	(2.919.130,00)	78,38	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KRPK di Kampung KB	310.500.000,00	277.079.500,00	(33.420.500,00)	89,24	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	310.500.000,00	277.079.500,00	(33.420.500,00)	89,24	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.500.000,00	277.079.500,00	(33.420.500,00)	89,24	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.635.142.000,00	914.030.870,00	(921.011.380,00)	48,79	
2.08 . 2-11.2-08.0-00.01 . 04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.614.726.400,00	795.995.620,00	(818.732.780,00)	49,30	
2.10 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.01	Advokasi Kegiatan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	124.440.000,00	121.693.020,00	(2.746.980,00)	97,79	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	124.440.000,00	121.693.020,00	(2.746.980,00)	97,79	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124.440.000,00	121.693.020,00	(2.746.980,00)	97,79	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26.106.400,00	24.862.550,00	(1.243.850,00)	95,24	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	26.106.400,00	24.862.550,00	(1.243.850,00)	95,24	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.106.400,00	24.862.550,00	(1.243.850,00)	95,24	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.03	Pengembangan Kegatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	673.302.000,00	591.849.550,00	(81.452.450,00)	87,91	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	678.382.000,00	591.649.550,00	(86.732.450,00)	87,21	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	678.382.000,00	591.649.550,00	(86.732.450,00)	87,21	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (PKB, BKB, BKL, POKTAS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	785.000.000,00	57.790.500,00	(728.009.500,00)	7,36	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	785.000.000,00	57.790.500,00	(728.009.500,00)	7,36	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	765.800.000,00	57.793.500,00	(728.009.500,00)	7,55	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20.413.600,00	18.075.000,00	(2.338.600,00)	88,54	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.413.600,00	18.075.000,00	(2.338.600,00)	88,54	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.413.600,00	18.075.000,00	(2.338.600,00)	88,54	
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.413.600,00	18.075.000,00	(2.338.600,00)	88,54	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	14.900.000,00	11.883.700,00	(3.016.300,00)	79,76	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.900.000,00	11.883.700,00	(3.016.300,00)	79,76	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.900.000,00	11.883.700,00	(3.016.300,00)	79,76	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.900.000,00	11.883.700,00	(3.016.300,00)	79,76	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	11.883.700,00	(3.016.300,00)	79,76	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	12.380.000,00	9.215.000,00	(3.165.000,00)	74,43	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.380.000,00	9.215.000,00	(3.165.000,00)	74,43	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02.04	Pengelolaan Layanan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.380.000,00	9.215.000,00	(3.165.000,00)	74,43	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.380.000,00	9.215.000,00	(3.165.000,00)	74,43	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.380.000,00	9.215.000,00	(3.165.000,00)	74,43	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07	Program Perlindungan Khusus Anak	65.200.000,00	61.802.750,00	(3.397.250,00)	94,79	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.200.000,00	61.802.750,00	(3.397.250,00)	94,79	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.01.02	Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	65.200.000,00	61.802.750,00	(3.397.250,00)	94,79	
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	65.200.000,00	61.802.750,00	(3.397.250,00)	94,79	

Powered by Stimulsoft

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.08 . 2-14.2-00.0-00.01 07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.200.000,00	51.802.750,00	13.397.250,00)	94,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.212.139.073,00)	(5.057.053.678,00)	1.065.085.394,00	81,21	

Printed By SimDa

DINAS PERHUBUNGAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan
Organisasi : 2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 00.0.00.00 , 4	PENDAPATAN DAERAH	490.000.000,00	101.300.000,00	(388.700.000,00)	20,67	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 00.0.00.00 , 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	490.000.000,00	101.300.000,00	(388.700.000,00)	20,67	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 00.0.00.00 , 4.1.2	Retribusi Daerah	490.000.000,00	101.300.000,00	(388.700.000,00)	20,67	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.22.01 , 5	BELANJA DAERAH	6.874.009.730,00	6.603.359.405,00	(270.650.050,00)	96,06	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.782.457.540,00	5.501.966.795,00	(280.490.745,00)	95,15	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.151.009.905,00	4.922.988.423,00	(228.021.482,00)	95,57	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.071.889.885,00	4.844.503.423,00	(227.386.462,00)	95,52	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	5.071.889.885,00	4.844.503.423,00	(227.386.462,00)	95,52	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	5.071.889.885,00	4.844.503.423,00	(227.386.462,00)	95,52	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000,00	78.465.000,00	(1.535.000,00)	98,08	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.465.000,00	(1.535.000,00)	98,08	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	68.020.000,00	67.415.000,00	(605.000,00)	99,11	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.050.000,00	(30.000,00)	97,22	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.799.180,00	70.690.000,00	(109.180,00)	99,85	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.799.180,00	70.690.000,00	(109.180,00)	99,85	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.05.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	70.799.180,00	70.690.000,00	(109.180,00)	99,85	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.05.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.05.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69.549.180,00	69.440.000,00	(109.180,00)	99,84	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.246.955,00	231.692.024,00	(5.554.823,00)	97,66	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.053,00	7.963.250,00	(36.803,00)	99,27	
2.15 , 2.15.0.00.0.00.01 , 01.2.06.01 , 5..	BELANJA OPERASI	4.999.853,00	4.963.250,00	(36.603,00)	99,27	

Printed By SIKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.853,00	4.963.250,00	(36.603,00)	99,27	
2.15 . 2.15.0-00.0-00.0. . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.500.000,00	28.605.125,00	(894.875,00)	96,97	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.830.000,00	24.942.125,00	(887.875,00)	96,56	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.580.000,00	24.372.125,00	(207.875,00)	99,15	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	3.670.000,00	3.650.000,00	(20.000,00)	99,01	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.670.000,00	3.663.000,00	(7.000,00)	99,81	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.900.000,00	24.784.750,00	(115.250,00)	99,54	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.900.000,00	24.784.750,00	(115.250,00)	99,54	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	24.784.750,00	(115.250,00)	99,54	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.347.000,00	170.813.899,00	(4.533.101,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	175.347.000,00	170.813.899,00	(4.533.101,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.347.000,00	170.813.899,00	(4.533.101,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.991.710,00	15.880.000,00	(111.710,00)	99,30	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.991.710,00	15.880.000,00	(111.710,00)	99,30	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.110.000,00	(110.000,00)	91,20	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.140.000,00	(110.000,00)	91,20	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	BELANJA MODAL	14.741.710,00	14.740.000,00	(1.710,00)	99,99	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.741.710,00	14.740.000,00	(1.710,00)	99,99	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.999.912,00	26.825.561,00	(10.174.351,00)	72,50	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.912,00	15.019.791,00	(9.980.121,00)	60,08	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.999.912,00	15.019.791,00	(9.980.121,00)	60,08	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.999.912,00	15.019.791,00	(9.980.121,00)	60,08	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.10.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.805.770,00	(194.230,00)	98,06	

Generated By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	6 = 4 - 3	6	7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.805.770,01	(194.230,00)	98,06	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.805.770,00	(194.230,00)	98,06	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.500.000,00	223.949.705,00	(35.580.215,00)	86,29	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.530.000,00	169.099.785,00	(30.430.215,00)	84,35	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	193.530.000,00	169.099.785,00	(30.430.215,00)	84,35	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.530.000,00	169.099.785,00	(30.430.215,00)	84,35	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.000.000,00	54.850.000,00	(5.150.000,00)	91,42	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	54.850.000,00	(5.150.000,00)	91,42	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.250.000,00	(500.000,00)	71,43	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.250.000,00	53.600.000,00	(4.650.000,00)	92,02	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.168.606.268,00	1.079.234.015,00	(89.422.253,00)	92,35	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	558.439.100,00	493.973.247,00	(64.465.853,00)	88,46	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	558.439.100,00	493.973.247,00	(64.465.853,00)	88,46	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	80.635.129,00	43.633.247,00	(13.501.882,00)	40,09	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	760.000,00	(6.190.000,00)	11,09	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.185.129,00	42.773.247,00	(39.401.882,00)	52,03	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.2	BELANJA MODAL	469.403.971,00	450.440.000,00	(18.963.971,00)	95,96	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469.403.971,00	450.440.000,00	(18.963.971,00)	95,96	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	103.570.568,00	96.323.000,00	(7.247.568,00)	93,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	103.570.568,00	96.323.000,00	(7.247.568,00)	93,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.519.000,00	13.303.000,00	(1.216.000,00)	91,62	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	100,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.179.000,00	11.963.000,00	(1.216.000,00)	90,77	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.2	BELANJA MODAL	89.051.568,00	83.020.000,00	(6.031.568,00)	93,23	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.051.568,00	83.020.000,00	(6.031.568,00)	93,23	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	30.000.000,00	29.968.000,00	(32.000,00)	99,89	

Printed by Stimulsoft

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Pada Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.392.800,00	(607.200,00)	98,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.392.800,00	(607.200,00)	98,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.392.800,00	(607.200,00)	98,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	93.628.000,00	83.389.265,00	(10.238.735,00)	89,06	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.468.000,00	1.458.000,00	(3.010.000,00)	32,63	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.468.000,00	1.458.000,00	(3.010.000,00)	32,63	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.468.000,00	1.458.000,00	(3.010.000,00)	32,63	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	80,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	80,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	80,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	56.215.068,00	(3.784.932,00)	93,69	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	56.215.068,00	(3.784.932,00)	93,69	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.750.000,00	56.215.068,00	(2.534.932,00)	95,69	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.660.000,00	15.716.200,00	(943.800,00)	94,33	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.660.000,00	15.716.200,00	(943.800,00)	94,33	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	15.716.200,00	(943.800,00)	94,33	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	350.108.000,00	344.678.200,00	(5.430.400,00)	98,45	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.447.650,00	(2.552.350,00)	89,79	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.447.650,00	(2.552.350,00)	89,79	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.447.650,00	(2.552.350,00)	89,79	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Fisabilitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	325.108.000,00	322.230.550,00	(2.878.050,00)	99,11	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	325.108.000,00	322.230.550,00	(2.878.050,00)	99,11	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.06.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.108.000,00	322.230.550,00	(2.878.050,00)	99,11	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.680.000,00	11.494.600,00	(185.400,00)	98,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Anjakalih	11.680.000,00	11.494.600,00	(185.400,00)	98,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.680.000,00	11.494.600,00	(185.400,00)	98,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	11.494.600,00	(185.400,00)	98,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.670.000,00	15.118.400,00	(551.600,00)	96,48	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Keberadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	15.670.000,00	15.118.400,00	(551.600,00)	96,48	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.670.000,00	15.118.400,00	(551.600,00)	96,48	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.670.000,00	15.118.400,00	(551.600,00)	96,48	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.897.500,00	(702.500,00)	87,46	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12.01	Penanaman Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	5.600.000,00	4.897.500,00	(702.500,00)	87,46	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	4.897.500,00	(702.500,00)	87,46	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	4.897.500,00	(702.500,00)	87,46	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03	Program Pengelolaan Pelayaran	23.735.450,00	23.119.600,00	(615.850,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	23.735.450,00	23.119.600,00	(615.850,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	23.735.450,00	23.119.600,00	(615.850,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.13.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	23.735.450,00	23.119.600,00	(615.850,00)	97,41	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.13.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.735.450,00	23.119.600,00	(615.850,00)	97,41	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.484.889.758,00)	(6.503.059.400,00)	(18.170.150,00)	100,28	

Printed By Sim08

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor . 3
Tanggal 20 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 00.0.00.00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	271.000.000,00	507.447.501,00	236.447.501,00	187,25	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 00.0.00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	271.000.000,00	507.447.501,00	236.447.501,00	187,25	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	271.000.000,00	507.447.501,00	236.447.501,00	187,25	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	3.640.389.410,00	3.431.806.016,00	(208.583.494,00)	94,27	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.349.688.101,00	3.259.664.037,00	(90.024.064,00)	97,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.034.484.942,00	1.982.405.908,00	(52.079.034,00)	97,44	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.342.274.942,00	2.302.645.908,00	(39.629.034,00)	98,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.342.274.942,00	2.302.645.908,00	(39.629.034,00)	98,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.342.274.942,00	2.302.645.908,00	(39.629.034,00)	98,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.02	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.220.000,00	89.770.000,00	(2.450.000,00)	97,34	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	92.220.000,00	89.770.000,00	(2.450.000,00)	97,34	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	92.220.000,00	89.770.000,00	(2.450.000,00)	97,34	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000,00	11.230.000,00	(20.000,00)	99,82	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.250.000,00	11.230.000,00	(20.000,00)	99,82	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	11.230.000,00	(20.000,00)	99,82	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.230.000,00	(20.000,00)	99,82	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.014.910,00	292.117.109,00	(3.897.801,00)	98,68	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.988.000,00	(12.000,00)	99,60	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.988.000,00	(12.000,00)	99,60	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.988.000,00	(12.000,00)	99,60	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.301.920,00	90.130.000,00	(364.920,00)	99,10	

Powered by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.535.200,00	21.468.000,00	(67.200,00)	99,69	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.535.200,00	21.468.000,00	(67.200,00)	99,69	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	38.966.720,00	38.669.000,00	(297.720,00)	99,24	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.966.720,00	38.669.000,00	(297.720,00)	99,24	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	9.500.000,00	9.491.000,00	(9.000,00)	99,09	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.500.000,00	9.491.000,00	(9.000,00)	99,09	
2.16 . 2.16.2.20.2-21.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.491.000,00	(9.000,00)	99,90	
2.16 . 2.16.2.20.2-21.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.897.988,00	15.894.796,00	(3.192,00)	99,98	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.897.988,00	15.894.796,00	(3.192,00)	99,98	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.897.988,00	15.894.796,00	(3.192,00)	99,98	
2.16 . 2-16.2.20.2-21.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.115.002,00	209.606.313,00	(1.508.689,00)	99,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	209.115.002,00	209.606.313,00	(1.508.689,00)	99,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	209.115.002,00	209.606.313,00	(1.508.689,00)	99,31	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	22.643.250,00	22.550.000,00	(93.250,00)	99,59	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.643.250,00	22.550.000,00	(93.250,00)	99,59	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	22.643.250,00	22.550.000,00	(93.250,00)	99,59	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.643.250,00	22.550.000,00	(93.250,00)	99,59	
2.16 . 2-16.2.20.2-21.01 . 01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	52.409.999,00	43.209.752,00	(9.200.247,00)	82,45	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.957.900,00	(42.100,00)	98,95	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.000.000,00	3.957.900,00	(42.100,00)	98,95	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.957.900,00	(42.100,00)	98,95	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	33.576.652,00	(4.423.348,00)	88,36	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	38.000.000,00	33.576.652,00	(4.423.348,00)	88,36	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	33.576.652,00	(4.423.348,00)	88,36	
2.16 . 2.16.2.20.2-21.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.409.999,00	9.675.200,00	(734.799,00)	92,94	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.409.999,00	9.675.200,00	(734.799,00)	92,94	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.409.999,00	9.675.200,00	(734.799,00)	92,94	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	132.875.000,00	104.161.268,00	(28.713.732,00)	78,39	

Printed By Siskeudes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	132.875.000,00	104.161.268,00	(28.713.732,00)	78,39	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	132.875.000,00	104.161.268,00	(28.713.732,00)	78,39	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.875.000,00	104.161.268,00	(28.713.732,00)	78,39	
2.20 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.041.091.001,00	1.270.872.346,00	(73.218.655,00)	96,03	
2.20 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.844.091.001,00	1.770.872.346,00	(73.218.655,00)	96,03	
2.20 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72	
2.20 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72	
2.20 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.305.000,00	91.229.200,00	(4.075.800,00)	95,72	
2.21 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000,00	36.263.300,00	(1.236.700,00)	96,70	
2.21 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.263.300,00	(1.236.700,00)	94,50	
2.21 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.263.300,00	(1.236.700,00)	94,50	
2.21 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.04 . 5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.21 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	55.000.000,00	41.704.050,00	(13.295.950,00)	75,83	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	34.133.000,00	25.559.000,00	(8.574.000,00)	74,88	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.883.000,00	25.559.000,00	(7.324.000,00)	77,73	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.05 . 5.2	BELANJA MODAL	20.867.000,00	16.045.050,00	(4.821.950,00)	76,89	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.867.000,00	16.045.050,00	(4.821.950,00)	76,89	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	53.061.000,00	49.237.101,00	(3.823.899,00)	92,79	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	39.429.800,00	36.087.101,00	(3.342.699,00)	91,52	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.429.800,00	36.087.101,00	(3.342.699,00)	91,52	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.06 . 5.2	BELANJA MODAL	13.631.200,00	13.150.000,00	(201.200,00)	97,84	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.631.200,00	13.150.000,00	(201.200,00)	97,84	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.10	Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	67.305.000,00	65.546.430,00	(1.838.570,00)	97,27	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 02.2.01.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	67.305.000,00	65.546.430,00	(1.838.570,00)	97,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.386.000,00	65.548.490,00	(1.810.570,00)	97,27	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	604.584.001,00	648.668.000,00	[35.926.201,00]	94,75	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12 . 5.1	BELANJA OPERASI	650.594.801,00	608.419.600,00	(33.175.201,00)	94,87	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.594.801,00	608.419.600,00	(33.175.201,00)	94,87	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12 . 5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	22.249.000,00	(2.751.000,00)	89,00	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	22.249.000,00	(2.751.000,00)	89,00	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota	851.249.200,00	838.720.665,00	(10.071.935,00)	98,47	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13 . 5.1	BELANJA OPERASI	290.349.200,00	277.797.340,00	(12.551.860,00)	95,68	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	4.780.000,00	(120.000,00)	97,55	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.444.200,00	273.017.340,00	(12.431.060,00)	95,64	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13 . 5.2	BELANJA MODAL	560.901.000,00	560.431.325,00	(469.675,00)	99,92	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.13 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	560.901.000,00	560.431.325,00	(469.675,00)	99,92	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.445.510.970,00	2.401.248.035,00	(45.060.775,00)	98,15	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.001.667.308,00	1.062.091.027,00	(39.576.281,00)	97,92	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.02	Pemasyarakatan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.005.000,00	29.909.000,00	(96.000,00)	99,68	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.005.000,00	29.909.000,00	(96.000,00)	99,68	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.005.000,00	29.909.000,00	(96.000,00)	99,68	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.871.662.308,00	1.832.182.027,00	(39.480.281,00)	97,89	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.871.662.308,00	1.832.182.027,00	(39.480.281,00)	97,89	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.871.662.308,00	1.832.182.027,00	(39.480.281,00)	97,89	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	544.943.000,00	539.159.506,00	(5.791.494,00)	98,94	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	69.560.000,00	64.477.000,01	(5.139.000,00)	92,61	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	69.560.000,00	64.422.000,00	(5.138.000,00)	92,61	
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69.560.000,00	64.422.000,00	(5.138.000,00)	92,61	
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	419.778.000,00	418.648.000,00	(427.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	230.876.000,00	230.449.000,00	(427.000,00)	99,82	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.876.000,00	230.449.000,00	(427.000,00)	99,82	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.07 . 5.2	BELANJA MODAL	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.07 . 5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.08	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	6.765.000,00	6.760.006,00	(4.994,00)	99,93	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.765.000,00	6.760.006,00	(4.994,00)	99,93	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	6.760.006,00	(4.994,00)	99,93	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	49.342.000,00	49.127.500,00	(214.500,00)	99,57	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	49.342.000,00	49.127.500,00	(214.500,00)	99,57	
2.16 . 2.16.2.20.2.21.01 . 03.2.02.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.342.000,00	49.127.500,00	(214.500,00)	99,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.309.389.410,00)	(16.924.358.415,00)	445.030.993,00	92,66	

Printed By Sandi

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN SATU PINTU

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal

Organisasi : 2.18 , 2.18.3.29.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 00.0.00.00 , 4	**PENDAPATAN DAERAH**	0,00	757.500,00	757.500,00	0,00	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 00.0.00.00 , 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	0,00	757.500,00	757.500,00	0,00	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 00.0.00.00 , 4.1.2	Retribusi Daerah	0,00	757.500,00	757.500,00	0,00	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5	**BELANJA DAERAH**	4.129.886.197,00	3.997.758.543,00	(131.909.654,00)	96,81	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01	Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.358.105.681,00	3.272.018.917,00	(86.086.764,00)	97,45	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.782.580.936,00	2.681.242.044,00	(71.338.892,00)	97,41	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.630.711.936,00	2.566.628.044,00	(64.083.892,00)	97,56	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.630.711.936,00	2.566.628.044,00	(64.083.892,00)	97,56	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	2.630.711.936,00	2.566.628.044,00	(64.083.892,00)	97,56	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.868.000,00	114.614.000,00	(7.254.000,00)	94,05	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	121.868.000,00	114.614.000,00	(7.254.000,00)	94,05	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	121.630.000,00	114.366.000,00	(7.264.000,00)	94,03	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219.000,00	219.000,00	0,00	100,00	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.044.847,00	203.180.302,00	(42.764.511,00)	82,62	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Dayagunan Kantor	4.999.795,00	4.993.100,00	(6.695,00)	99,87	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.999.795,00	4.993.100,00	(6.695,00)	99,87	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.795,00	4.993.100,00	(6.695,00)	99,87	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.099.770,00	36.023.681,00	(76.089,00)	99,79	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	36.099.770,00	36.023.681,00	(76.089,00)	99,79	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.099.770,00	36.023.681,00	(76.089,00)	99,79	
2.18 , 2-18.3-29.0-00.01 , 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.567.752,00	6.361.010,00	(206.742,00)	96,85	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.557.752,00	8.361.010,00	(196.742,00)	97,70	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.557.752,00	8.361.010,00	(196.742,00)	97,70	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.301.500,00	29.265.710,00	(35.790,00)	99,88	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	29.301.500,00	29.265.710,00	(35.790,00)	99,88	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.301.500,00	29.265.710,00	(35.790,00)	99,88	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.686.000,00	163.224.801,00	(1.461.199,00)	97,92	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	164.686.000,00	163.224.801,00	(1.461.199,00)	97,92	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	164.686.000,00	163.224.801,00	(1.461.199,00)	97,92	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.106.557,00	41.096.344,00	(6.002.206,00)	87,26	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.359.560,00	24.438.846,01	(5.921.606,00)	80,50	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	27.034.550,00	18.937.944,00	(8.096.606,00)	90,03	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.034.550,00	18.937.944,00	(2.096.606,00)	90,03	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	9.325.000,00	5.500.000,00	(3.825.000,00)	58,98	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.325.000,00	5.500.000,00	(3.825.000,00)	58,98	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	14.350.000,00	14.588.400,00	(161.600,00)	98,90	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.350.000,00	14.588.400,00	(161.600,00)	98,90	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	14.588.400,00	(161.600,00)	98,90	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.531.378,00	307.182.227,00	(4.349.151,00)	98,60	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.711.750,00	108.461.227,00	(4.250.523,00)	96,23	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	112.711.750,00	108.461.227,00	(4.250.523,00)	96,23	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.711.750,00	108.461.227,00	(4.250.523,00)	96,23	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.819.628,00	198.721.000,00	(98.628,00)	99,95	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	198.819.628,00	198.721.000,00	(98.628,00)	99,95	
2.10 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.819.628,00	198.721.000,00	(98.628,00)	99,95	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 03	Program Promosi Penanaman Modal	57.800.000,00	30.692.600,00	(27.107.400,00)	53,10	
2.18 . 2.18.3-29.0-00.01 . 03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.800.000,00	30.692.600,00	(27.107.400,00)	53,10	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	57.800.000,00	30.692.600,00	(27.107.400,00)	53,10	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	57.800.000,00	30.692.600,00	(27.107.400,00)	53,10	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.800.000,00	30.692.600,00	(27.107.400,00)	53,10	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	220.185.560,00	209.219.730,00	(10.965.830,00)	95,02	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	220.185.560,00	209.219.730,00	(10.965.830,00)	95,02	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.01	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.127.800,00	31.909.000,00	(218.800,00)	99,32	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	32.127.800,00	31.909.000,00	(218.800,00)	99,32	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.127.800,00	31.909.000,00	(218.800,00)	99,32	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.02	Pemenuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	102.065.800,00	93.039.200,00	(9.026.600,00)	91,21	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	102.065.800,00	93.039.200,00	(9.026.600,00)	91,21	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.065.800,00	93.039.200,00	(9.026.600,00)	91,21	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.03	Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	85.391.980,00	83.671.550,00	(1.720.430,00)	97,99	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	85.391.980,00	83.671.550,00	(1.720.430,00)	97,99	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.391.980,00	83.671.550,00	(1.720.430,00)	97,99	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.07 . 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	443.734.440,00	432.231.776,00	(11.502.664,00)	97,41	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	443.734.440,00	432.231.776,00	(11.502.664,00)	97,41	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	58.336.800,00	56.747.000,00	(1.589.800,00)	97,27	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	58.336.800,00	56.747.000,00	(1.589.800,00)	97,27	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.336.800,00	56.747.000,00	(1.589.800,00)	97,27	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	266.293.140,00	263.872.048,00	(2.421.092,00)	99,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	266.793.240,00	257.872.289,00	(8.920.951,00)	96,66	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	266.793.240,00	257.872.289,00	(8.920.951,00)	96,66	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perkiraan Penanaman Modal	118.003.800,00	117.011.907,00	(991.893,00)	99,16	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	118.003.800,00	117.011.907,00	(991.893,00)	99,16	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.003.800,00	117.011.907,00	(991.893,00)	99,16	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	49.999.696,00	47.533.500,00	(2.466.196,00)	95,07	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.696,00	47.533.500,00	(2.466.196,00)	95,07	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.999.696,00	47.533.500,00	(2.466.196,00)	95,07	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	33.300.700,00	30.835.500,00	(2.465.200,00)	92,60	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.300.700,00	30.835.500,00	(2.465.200,00)	92,60	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	16.698.996,00	16.698.000,00	(996,00)	99,99	
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.698.996,00	16.698.000,00	(996,00)	99,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.129.628.697,00)	(3.991.339.643,00)	138.341.354,00	96,65	

Scanned By Sirud

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perangkat
Organisasi : 2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.01 , 5	**BELANJA DAERAH**	13.261.230.171,00	10.638.850.387,06	(2.624.801.783,94)	80,21	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.552.446.055,00	2.542.253.473,00	(10.192.578,00)	99,61	
2.23 , 2.23.2.24.0.01.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.229.291.343,00	2.222.961.400,00	(6.329.943,00)	99,72	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.140.751.243,00	2.135.116.700,00	(5.634.543,00)	99,74	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.140.751.243,00	2.135.116.700,00	(5.634.543,00)	99,74	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	2.140.751.243,00	2.135.116.700,00	(5.634.543,00)	99,74	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.540.000,00	87.835.000,00	(705.000,00)	99,20	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	88.540.000,00	87.835.000,00	(705.000,00)	99,20	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1 2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	88.540.000,00 0,00	87.835.000,00 0,00	(705.000,00) 0,00	99,20 0,00	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.527.312,00	194.488.530,00	(4.038.782,00)	97,96	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.494.532,00	4.478.000,00	(16.532,00)	99,63	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.494.532,00	4.478.000,00	(16.532,00)	99,63	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.494.532,00	4.478.000,00	(16.532,00)	99,63	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.998.880,00	28.953.189,00	(44.691,00)	99,85	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.998.880,00	28.953.189,00	(44.691,00)	99,85	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.998.880,00	28.953.189,00	(44.691,00)	99,85	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.100.000,00	12.096.209,00	(3.791,00)	99,97	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.05 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.100.000,00	12.096.209,00	(3.791,00)	99,97	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.05 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.096.209,00	(3.791,00)	99,97	
2.23 , 2.23.2.24.0.00.01 , 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.902.900,00	148.954.172,00	(3.948.728,00)	97,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	152.932.900,00	148.954.172,00	(3.978.728,00)	97,40	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.932.900,00	148.954.172,00	(3.978.728,00)	97,40	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	21.077.500,00	21.104.923,00	(1.972.977,00)	91,35	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.477.500,00	15.360.023,00	(109.477,00)	99,34	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.477.500,00	16.368.023,00	(109.477,00)	99,34	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.477.500,00	16.368.023,00	(109.477,00)	99,34	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	3.136.500,00	(1.863.500,00)	62,73	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	3.136.500,00	(1.863.500,00)	62,73	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.136.500,00	(1.863.500,00)	62,73	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	106.550.000,00	103.713.684,00	(2.836.316,00)	97,34	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.540.000,00	93.723.784,00	(2.816.216,00)	97,08	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	96.540.000,00	93.723.784,00	(2.816.216,00)	97,08	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.540.000,00	93.723.784,00	(2.816.216,00)	97,08	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.960.000,00	9.939.900,00	(20.100,00)	99,80	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.960.000,00	9.939.900,00	(20.100,00)	99,80	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	9.939.900,00	(20.100,00)	99,80	
2.23 . 2-23.2-27.0-00.01 . 02	**Program Pemeliharaan Perpustakaan**	10.633.181.800,00	8.020.951.863,06	(2.612.229,94)	75,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	10.537.161.600,00	8.088.061.360,06	(2.837.290.239,94)	76,48	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.415.028.720,00	7.831.235.860,06	(2.583.992.859,94)	75,19	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	140.737.720,00	118.316.200,00	(22.376.920,00)	84,10	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	15.120.000,00	12.970.000,00	(2.200.000,00)	85,80	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.617.720,00	105.346.200,00	(20.115.920,00)	83,90	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	10.235.096.000,00	7.713.419.060,06	(2.521.676.939,94)	75,37	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.235.096.000,00	7.713.419.060,06	(2.521.676.939,94)	75,37	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.03	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.743.280,00	178.317.000,00	(23.426.280,00)	88,39	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	201.743.280,00	178.317.000,00	(23.426.280,00)	88,39	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.743.280,00	178.317.000,00	(23.426.280,00)	88,39	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.04	Pemenuhan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	18.808.300,00	18.798.500,00	(810.600,00)	95,87	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.609.100,00	18.798.500,00	(810.600,00)	95,87	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.609.100,00	18.798.500,00	(810.600,00)	95,87	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**	88.110.516,00	87.331.550,00	(1.378.966,00)	98,45	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	26.213.800,00	25.471.950,00	(741.850,00)	97,17	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	26.213.800,00	25.471.950,00	(741.850,00)	97,17	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	26.213.800,00	25.471.950,00	(741.850,00)	97,17	
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.213.800,00	25.471.950,00	(741.850,00)	97,17	
2.24 . 2-24.2-24.0-00.01 . 03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	34.999.900,00	34.614.500,00	(385.400,00)	98,90	
2.24 . 2-24.2-24.0-00.01 . 03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	34.999.900,00	34.614.500,00	(385.400,00)	98,90	
2.24 . 2-24.2-24.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.999.900,00	34.614.500,00	(385.400,00)	98,90	
2.24 . 2-24.2-24.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900,00	34.614.500,00	(385.400,00)	98,90	
2.24 . 2-24.2-24.0-00.01 . 03.2.03	**Pengelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	27.896.816,00	27.645.100,00	(251.716,00)	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Perekaran Daerah Kecamatan	27.890.816,00	27.645.100,00	(251.716,00)	99,10	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	27.890.816,00	27.645.100,00	(251.716,00)	99,10	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.890.816,00	27.645.100,00	(251.716,00)	99,10	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.283.738.171,00)	(10.658.935.387,06)	2.624.802.783,94	80,24	

Printed By SIMDA

URUSAN PILIHAN

DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 1
Tanggal : 20 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pariwisata
Organisasi : 3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 00.0.00.00 , 4	**PENDAPATAN DAERAH**	252.500.000,00	282.505.000,00	30.005.000,00	111,88	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 00.0.00.00 , 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	252.500.000,00	282.505.000,00	30.005.000,00	111,88	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 00.0.00.00 , 4.1.2	Retribusi Daerah	252.500.000,00	282.505.000,00	30.005.000,00	111,88	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5	**BELANJA DAERAH**	6.493.769.170,00	6.125.364.357,00	(368.404.813,00)	94,33	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.731.775.170,00	3.656.063.110,00	(115.712.060,00)	96,95	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.277.305.982,00	3.196.810.228,00	(80.495.754,00)	97,54	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.165.645.982,00	3.086.810.228,00	(78.835.754,00)	97,51	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.165.645.982,00	3.086.810.228,00	(78.835.754,00)	97,51	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	3.165.645.982,00	3.086.810.228,00	(78.835.754,00)	97,51	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.660.000,00	110.000.000,00	(1.660.000,00)	98,51	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	111.660.000,00	110.000.000,00	(1.660.000,00)	98,51	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	111.660.000,00	110.000.000,00	(1.660.000,00)	98,51	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	280.939.747,00	259.526.647,00	(14.413.050,00)	94,60	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.968.398,00	(31.602,00)	99,33	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	4.968.398,00	(31.602,00)	99,33	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.968.398,00	(31.602,00)	99,33	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.600.000,00	16.092.200,00	(5.507.800,00)	74,50	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.600.000,00	16.092.200,00	(5.507.800,00)	74,50	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	16.092.200,00	(5.507.800,00)	74,50	
3.26 , 3-26.2-22.0-00.01 , 01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	7.268.335,00	6.951.224,00	(317.111,00)	95,64	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.250.735,00	6.957.224,00	(801.511,00)	89,87	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.758.735,00	6.957.224,00	(801.511,00)	89,63	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.501.000,00	22.271.975,00	(231.025,00)	98,97	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.05.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	22.502.000,00	22.271.975,00	(231.025,00)	98,97	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.502.000,00	22.271.975,00	(231.025,00)	98,97	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.0+	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.078.012,00	202.238.900,00	(7.839.112,00)	96,27	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.05.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	210.078.012,00	202.238.900,00	(7.839.112,00)	96,27	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.05.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.078.012,00	202.238.900,00	(7.839.112,00)	96,27	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	24.000.000,00	23.775.000,00	(225.000,00)	99,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	23.775.000,00	(225.000,00)	99,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	24.000.000,00	23.775.000,00	(225.000,00)	99,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	23.775.000,00	(225.000,00)	99,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	28.880.000,00	28.366.300,00	(514.700,00)	98,22	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	25.885.300,00	(514.700,00)	98,05	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	26.400.000,00	25.885.300,00	(514.700,00)	98,05	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	25.885.300,00	(514.700,00)	98,05	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	176.630.000,00	156.565.915,00	(20.064.085,00)	88,64	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.880.000,00	102.455.381,00	(14.424.619,00)	87,66	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	116.880.000,00	102.455.381,00	(14.424.619,00)	87,66	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.880.000,00	102.455.381,00	(14.424.619,00)	87,66	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.750.000,00	41.535.534,00	(3.214.466,00)	92,82	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	44.350.000,00	41.535.534,00	(3.214.466,00)	92,82	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	0,00	

Powered By Sikda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	41.670.000,00	41.335.514,00	(334.486,00)	99,20	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	12.575.000,00	(2.425.000,00)	83,83	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.575.000,00	(2.425.000,00)	83,83	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.575.000,00	(2.425.000,00)	83,83	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02	Program Pengembangan Kebudayaan	1.736.881.541,00	1.574.462.913,00	(162.424.628,00)	90,65	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	432.292.119,00	373.668.900,00	(58.623.219,00)	86,44	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	432.292.119,00	373.668.900,00	(58.623.219,00)	86,44	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	234.152.119,00	196.840.000,00	(37.312.119,00)	15,92	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	1.840.000,00	0,00	100,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	232.252.119,00	194.960.000,00	(37.312.119,00)	15,93	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	198.140.000,00	196.828.900,00	(1.321.100,00)	99,33	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.140.000,00	196.828.900,00	(1.321.100,00)	99,33	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.847.600,00	268.881.608,00	(13.965.992,00)	95,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	282.847.600,00	268.881.608,00	(13.965.992,00)	95,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	282.847.600,00	268.881.608,00	(13.965.992,00)	95,06	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.070.000,00	0,00	(1.070.000,00)	0,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	281.777.600,00	268.881.608,00	(12.895.992,00)	95,42	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.021.747.822,00	931.922.409,00	(89.825.413,00)	91,21	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	305.931.302,00	272.280.240,00	(33.651.062,00)	89,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	305.931.302,00	272.280.240,00	(33.651.062,00)	89,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.931.302,00	272.280.240,00	(33.651.062,00)	89,00	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	168.049.510,00	160.050.800,00	(7.998.710,00)	95,24	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	43.049.510,00	35.310.000,00	(7.739.510,00)	82,02	

Printed by SIKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.049.550,00	35.330.037,00	(7.719.553,00)	82,07	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.0 . 02.2.03.0 . 5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.720.800,00	(279.200,00)	99,78	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	124.720.800,00	(279.200,00)	99,78	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.04	Pengadaan/Pembelian/Pembuatan Unit Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	498.464.520,00	451.796.327,00	(47.668.193,00)	90,46	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	427.816.738,00	406.802.750,00	(21.213.988,00)	95,04	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	427.816.738,00	406.602.750,00	(21.213.988,00)	95,04	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.2	BELANJA MODAL	71.647.262,00	45.192.677,00	(26.455.205,00)	63,08	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.647.262,00	45.192.577,00	(26.455.705,00)	63,08	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	48.300.450,00	47.396.042,00	(904.408,00)	98,96	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	48.300.450,00	47.396.042,00	(904.408,00)	98,96	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.300.450,00	47.396.042,00	(904.408,00)	98,96	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	781.005.900,00	719.462.200,00	(61.543.700,00)	92,12	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	781.005.900,00	719.462.200,00	(61.543.700,00)	92,12	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	413.844.300,00	368.923.600,00	(44.920.700,00)	89,15	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	413.844.300,00	368.923.600,00	(44.920.700,00)	89,15	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	413.844.300,00	368.923.600,00	(44.920.700,00)	89,15	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	324.131.600,00	309.217.700,00	(14.915.900,00)	95,40	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	324.131.600,00	309.217.700,00	(14.915.900,00)	95,40	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	324.131.600,00	309.217.700,00	(14.915.900,00)	95,40	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	43.028.000,00	41.320.900,00	(1.707.100,00)	96,03	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	43.028.000,00	41.320.900,00	(1.707.100,00)	96,03	
1.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.028.000,00	41.320.900,00	(1.707.100,00)	96,03	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	202.100.000,00	173.316.100,00	(28.783.900,00)	85,76	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	202.100.000,00	173.316.100,00	(28.783.900,00)	85,76	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	127.124.000,00	98.550.000,00	(28.574.000,00)	77,52	
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	127.124.000,00	98.550.000,00	(28.574.000,00)	77,52	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.124.000,00	98.660.000,00	(28.574.000,00)	77.52	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah	74.976.000,00	74.766.100,00	(209.900,00)	99.72	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	74.976.000,00	74.766.100,00	(209.900,00)	99.72	
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.976.000,00	74.766.100,00	(209.900,00)	99.72	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.241.969.170,00)	(5.843.799.357,00)	398.169.813,00	93.62	

Powered by SIKD

DINAS PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pertanian
Organisasi : 3.27 , 3-27.0-00.0-00.0-01 Dinas Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01 , 1.02.01 , 5	BELANJA DAERAH	18.467.354.620,00	17.706.891.593,00	(680.463.027,00)	96,32	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.202.330.691,00	9.979.124.417,00	(223.006.154,00)	97,79	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.355.095.052,00	5.160.295.528,00	(194.799.260,00)	96,36	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.113.695.788,00	8.923.890.528,00	(191.805.260,00)	97,90	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	9.113.695.788,00	8.925.890.528,00	(191.805.260,00)	97,90	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	9.113.695.788,00	8.925.890.528,00	(191.805.260,00)	97,90	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.410.000,00	234.306.000,00	(3.104.000,00)	98,69	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	237.410.000,00	234.306.000,00	(3.104.000,00)	98,69	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	235.890.000,00	232.870.000,00	(3.020.000,00)	98,72	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	1.436.000,00	(84.000,00)	94,47	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.525.756,00	368.959.084,00	(18.566.772,00)	95,10	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.917,00	7.991.250,00	(8.667,00)	99,89	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.05.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	7.999.917,00	7.991.250,00	(8.667,00)	99,89	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.05.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.999.917,00	7.991.250,00	(8.667,00)	99,89	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.997.420,00	74.587.000,00	(5.410.420,00)	93,24	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	79.997.420,00	74.587.000,00	(5.410.420,00)	93,24	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.997.420,00	74.587.000,00	(5.410.420,00)	93,24	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.349.148,00	10.346.000,00	(3.148,00)	99,97	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1	BELANJA OPERASI	10.349.148,00	10.346.000,00	(3.148,00)	99,97	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.349.148,00	10.346.000,00	(3.148,00)	99,97	
3.27 , 3-27.0-00.0-00.01 , 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.101.271,00	34.703.100,00	601.829,00	101,76	

Powered by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 . 3-27.0-00.0 00.01 . 01.2.05.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.703.271,00	34.703.100,00	(171,00)	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.05.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.703.271,00	34.703.100,00	(171,00)	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.476.000,00	232.332.634,00	(13.143.366,00)	94,65	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	245.476.000,00	232.332.634,00	(13.143.366,00)	94,65	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.476.000,00	232.332.634,00	(13.143.366,00)	94,65	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.674.700,00	6.660.000,00	(14.700,00)	99,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.674.700,00	6.660.300,00	(14.399,00)	99,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	6.674.700,00	6.660.000,00	(14.700,00)	99,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.674.700,00	6.660.000,00	(14.700,00)	99,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.929.850,00	60.919.400,00	(2.081.450,00)	96,69	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.929.850,00	57.919.400,00	(2.081.450,00)	96,53	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	59.929.850,00	57.919.400,00	(2.081.450,00)	96,53	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.929.850,00	57.919.400,00	(2.081.450,00)	96,53	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.634.497,00	389.189.560,00	(10.444.937,00)	97,39	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.318.300,00	282.011.525,00	(10.306.775,00)	96,47	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	292.318.300,00	282.011.525,00	(10.306.775,00)	96,47	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.318.300,00	282.011.525,00	(10.306.775,00)	96,47	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.720.000,00	35.720.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	35.720.000,00	35.720.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.720.000,00	35.720.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.996.197,00	70.858.000,00	(138.197,00)	99,81	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	70.996.197,00	70.858.000,00	(138.197,00)	99,81	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.996.197,00	70.858.000,00	(138.197,00)	99,81	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	5.188.547.754,00	5.030.092.740,00	(158.455.014,00)	96,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	. 613.782.050,00	1.570.621.031,00	(47.161.919,00)	97,08	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.010.783.200,00	1.000.713.134,00	(10.070.066,00)	99,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.010.783.200,00	1.000.713.134,00	(10.070.066,00)	99,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	16.010.000,00	15.410.000,00	(600.000,00)	96,25	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	994.773.200,00	985.303.134,00	(9.470.066,00)	99,05	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	606.899.750,00	569.907.900,00	(37.091.850,00)	93,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	606.899.750,00	569.907.900,00	(37.091.850,00)	93,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	23.420.850,00	21.910.800,00	(1.510.050,00)	93,55	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.479.750,00	547.997.100,00	(35.581.850,00)	93,90	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.252.595.563,00	2.215.375.578,00	(37.220.017,00)	98,35	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	64.750.000,00	64.221.600,00	(528.400,00)	99,18	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	64.750.000,00	64.221.600,00	(528.400,00)	99,18	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.750.000,00	64.221.600,00	(528.400,00)	99,18	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.228.252.803,00	1.177.630.151,00	(50.622.652,00)	95,88	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.228.252.803,00	1.177.630.151,00	(50.622.652,00)	95,88	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	94,34	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.224.452.803,00	1.174.630.151,00	(50.422.652,00)	95,88	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	999.591.750,00	973.523.925,00	(26.069.825,00)	97,39	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03.00 . 5.1	BELANJA OPERASI	999.591.750,00	973.523.925,00	(26.069.825,00)	97,39	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	9.010.050,00	6.840.000,00	(2.170.050,00)	75,92	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	990.583.750,00	966.683.925,00	(23.899.825,00)	97,59	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	22.499.980,00	22.425.500,00	(74.480,00)	99,67	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	22.499.980,00	22.425.500,00	(74.480,00)	99,67	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	22.499.980,00	22.425.500,00	(74.480,00)	99,67	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.499.980,00	22.425.500,00	(74.480,00)	99,67	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.05	Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.258.780.271,00	1.221.030.530,00	(34.087.741,00)	97,28	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 . 3.27.0.00.0.00.01 . 02.2.06.01	Penyediaan Bibit/Benih Tanaman yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.355.308.271,00	1.321.670.530,00	(34.000.741,00)	97,28	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	996.309.991,00	980.670.530,00	(31.709.461,00)	98,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	23.300.000,00	14.490.000,00	(8.810.000,00)	62,19	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	971.009.991,00	946.080.530,00	(24.959.461,00)	97,43	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.2	BELANJA MODAL	261.420.720,00	261.100.000,00	(320.280,00)	99,87	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.2.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.500.000,00	53.450.000,00	(50.000,00)	99,91	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01 . 5.2.5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.920.720,00	207.650.000,00	(270.280,00)	99,87	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.405.061.855,00	1.314.543.011,00	(90.518.844,00)	93,56	
3.27 . 3.27.0.00.0.00.01 . 03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	351.261.912,00	277.426.400,00	(73.835.512,00)	78,97	
3.27 . 3-27.0.00.0.00.01 . 03.2.01.0	Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	100.734.312,00	107.204.250,00	(1.530.062,00)	98,55	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	93.704.312,00	92.200.250,00	(1.524.062,00)	98,38	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.704.312,00	92.200.250,00	(1.524.062,00)	98,38	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.044.000,00	(956.000,00)	89,20	
3.27 . 3.27.0.00.0.00.01 . 03.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.044.000,00	(956.000,00)	99,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	24.956.700,00	21.445.000,00	(3.554.700,00)	85,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.956.700,00	21.445.000,00	(3.554.700,00)	85,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.956.700,00	21.445.000,00	(3.554.700,00)	85,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	99.999.900,00	95.923.650,00	(4.076.250,00)	95,92	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	99.999.900,00	95.923.650,00	(4.076.250,00)	95,92	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,01	(1.500.000,00)	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.499.900,00	95.923.650,00	(2.576.250,00)	97,38	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	117.500.000,00	52.653.500,00	(64.846.500,00)	44,80	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	117.500.000,00	52.653.500,00	(64.846.500,00)	44,80	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.830.000,00	570.000,00	(1.260.000,00)	31,15	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.670.000,00	52.083.500,00	(63.586.500,00)	45,03	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.053.799.943,00	1.037.116.611,00	(16.683.332,00)	98,42	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000,00	99.611.000,00	(389.000,00)	99,61	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.613.000,00	(387.000,00)	99,61	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.750.000,00	98.363.000,00	(387.000,00)	99,61	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Usaha Tani	439.945.131,00	435.113.400,00	(4.831.731,00)	98,90	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	439.945.131,00	435.113.400,00	(4.831.731,00)	98,90	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	436.985.131,00	432.153.400,00	(4.831.731,00)	98,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	113.833.243,00	111.560.443,00	(2.272.800,00)	98,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	113.833.243,00	111.560.443,00	(2.272.800,00)	98,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.250.000,00	(90.000,00)	93,28	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.493.243,00	110.310.443,00	(2.182.800,00)	98,06	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	69.995.940,00	58.802.500,00	(11.197.340,00)	84,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	69.268.840,00	58.082.500,00	(11.197.340,00)	80,84	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.199.010,00	60.302.500,00	(1.197.340,00)	98,23	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	73.600.000,00	(6.400.000,00)	92,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	73.600.000,00	(6.400.000,00)	92,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	1.250.000,00	(2.500.000,00)	33,33	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.250.000,00	72.350.000,00	(3.900.000,00)	94,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	249.998.730,00	240.421.300,00	(9.577.430,00)	96,17	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.498.772,00	49.215.100,00	(1.283.672,00)	97,46	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.748.772,00	45.465.100,00	(1.283.672,00)	97,25	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.2	BELANJA MODAL	199.499.958,00	199.211.200,00	(288.758,00)	99,86	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.499.958,00	199.211.200,00	(288.758,00)	99,86	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	610.405.745,00	501.661.239,00	(108.744.506,00)	94,06	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	506.903.145,00	472.785.788,00	(37.217.357,00)	42,34	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	325.354.673,00	296.576.289,00	(28.778.384,00)	90,85	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	325.354.673,00	296.576.289,00	(28.778.384,00)	90,85	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.354.673,00	296.576.289,00	(28.778.384,00)	90,85	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02	Pemberdayaan Petugas Kesehatan Hewan dalam Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.548.473,00	175.609.500,00	(3.938.973,00)	97,82	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	180.548.473,00	176.609.500,00	(3.938.973,00)	97,82	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.548.473,00	176.609.500,00	(3.938.973,00)	97,82	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04 . 00	Penyelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	42.498.999,00	39.516.000,00	(2.981.999,00)	92,98	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	42.498.999,00	39.516.000,00	(2.981.999,00)	92,98	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	42.498.999,00	39.516.000,00	(2.981.999,00)	92,98	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.498.999,00	39.516.000,00	(2.981.999,00)	92,98	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	70.000.000,00	69.957.450,00	(42.550,00)	99,94	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	70.000.000,00	69.957.450,00	(42.550,00)	99,94	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.957.450,00	(42.550,00)	99,94	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.957.450,00	(42.550,00)	99,94	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	54.999.960,00	54.388.000,00	(611.960,00)	98,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	54.999.960,00	54.388.000,00	(611.960,00)	98,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.999.960,00	54.388.000,00	(611.960,00)	98,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	54.999.960,00	54.388.000,00	(611.960,00)	98,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.999.960,00	54.388.000,00	(611.960,00)	98,89	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06	Program Pembinaan Usaha Pertanian	47.519.000,00	45.781.250,00	(1.737.750,00)	96,34	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.519.000,00	45.781.250,00	(1.737.750,00)	96,34	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	47.519.000,00	45.781.250,00	(1.737.750,00)	96,34	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	47.519.000,00	45.781.250,00	(1.737.750,00)	96,34	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.519.000,00	45.781.250,00	(1.737.750,00)	96,34	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07	Program Penyuluhan Pertanian	350.282.724,00	283.900.641,00	(166.091.440,00)	62,49	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	850.997.324,00	703.960.004,00	(186.391.440,00)	82,48	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	465.046.755,00	335.674.760,00	(129.371.995,00)	72,18	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	465.046.755,00	335.674.760,00	(129.371.995,00)	72,18	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	465.046.755,00	335.674.760,00	(129.371.995,00)	72,18	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	149.612.660,00	146.345.842,00	(3.266.908,00)	97,82	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	149.612.660,00	146.345.842,00	(3.266.908,00)	97,82	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.612.660,00	146.345.842,00	(3.266.908,00)	97,82	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	134.093.456,00	110.160.307,00	(23.933.149,00)	82,15	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	134.093.456,00	110.160.307,00	(23.933.149,00)	82,15	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	134.093.456,00	110.160.307,00	(23.933.149,00)	82,15	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	34.999.950,00	34.572.600,00	(427.350,00)	98,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	34.999.950,00	34.572.600,00	(427.350,00)	98,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.999.950,00	34.572.600,00	(427.350,00)	98,78	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	167.539.513,00	157.147.375,00	(10.392.138,00)	93,80	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	167.539.513,00	157.147.375,00	(10.392.138,00)	93,80	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.539.513,00	157.147.375,00	(10.392.138,00)	93,80	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.467.251.620,00)	(11.748.791.580,00)	680.461.023,00	96,32	

Printed by SIPD

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perindustrian
Organisasi : 3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 00.0.00.00 , 4	PENDAPATAN DAERAH	461.000.000,00	418.312.400,00	(42.687.600,00)	90.74	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 00.0.00.00 , 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	461.000.000,00	418.312.400,00	(42.687.600,00)	90.74	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 00.0.00.00 , 4.1.2	Retribusi Daerah	461.000.000,00	418.312.400,00	(42.687.600,00)	90.74	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.01 , 5	BELANJA DAERAH	3.845.078.131,00	3.699.707.790,00	(145.370.341,00)	96.22	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.393.300.367,00	3.280.253.779,00	(113.126.588,00)	96.67	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.971.101.341,00	2.871.200.232,00	(99.901.109,00)	96.64	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.813.479.341,00	2.757.178.232,00	(56.301.109,00)	98.00	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	2.813.479.341,00	2.757.178.232,00	(56.301.109,00)	98.00	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	2.813.479.341,00	2.757.178.232,00	(56.301.109,00)	98.00	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.625.000,00	117.025.000,00	(600.000,00)	99.49	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	117.625.000,00	117.025.000,00	(600.000,00)	99.49	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	117.625.000,00	117.025.000,00	(600.000,00)	99.49	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0.00	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.175.896,00	244.259.400,00	(36.924.196,00)	86.87	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.946,00	4.999.000,00	(946,00)	99.98	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	4.949.946,00	4.999.000,00	(946,00)	99.98	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.946,00	4.999.000,00	(946,00)	99.98	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.097.000,00	54.141.000,00	(956.000,00)	98.26	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	26.980.000,00	25.342.000,00	(1.756.000,00)	97.10	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	1.120.000,00	570.000,00	(750.000,00)	43.18	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.778.000,00	24.772.000,00	(1.006.000,00)	98.90	
3.31 , 3-31.2-17.3-30.01 , 01.2.06.02 , 5.2	BELANJA MODAL	28.999.000,00	28.799.000,00	(200.000,00)	99.31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31 . 3.31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.589.000,00	28.389.000,00	(200.000,00)	99,31	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05	Penyertaan Peralatan Rumah Tangga	10.656.150,00	10.613.000,00	(43.150,00)	99,60	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.656.150,00	10.613.000,00	(43.150,00)	99,60	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.656.150,00	10.613.000,00	(43.150,00)	99,60	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Bahan, Cetakan dan Penggandaan	25.639.800,00	25.516.700,00	(123.100,00)	99,52	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	25.639.800,00	25.516.700,00	(123.100,00)	99,52	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.639.800,00	25.516.700,00	(123.100,00)	99,52	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.783.000,00	148.982.000,00	(35.801.000,00)	80,63	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	184.783.000,00	148.982.000,00	(35.801.000,00)	80,63	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.783.000,00	148.982.000,00	(35.801.000,00)	80,63	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.698.950,00	59.652.978,00	(2.046.372,00)	96,51	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.01	Penyiaran Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.198.950,00	51.152.578,00	(2.046.372,00)	96,15	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	53.198.950,00	51.152.578,00	(2.046.372,00)	96,15	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.198.950,00	51.152.578,00	(2.046.372,00)	96,15	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.403.900,00	105.149.269,00	(17.254.631,00)	85,90	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.195.000,00	86.112.769,00	(16.082.231,00)	84,26	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	102.195.000,00	86.112.769,00	(16.082.231,00)	84,26	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.195.000,00	86.112.769,00	(16.082.231,00)	84,26	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.638.900,00	13.466.500,00	(1.172.400,00)	91,99	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.638.900,00	13.466.500,00	(1.172.400,00)	91,99	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.638.900,00	13.466.500,00	(1.172.400,00)	91,99	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	100,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	100,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	100,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02	Program Pelayanan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.659.612.911,00	588.521.253,00	(1.071.091.658,00)	35,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1.650.248.411,00	581.063.753,00	(1.069.184.658,00)	35,21	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pendelegasian Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14.999.950,00	13.332.500,00	(1.667.450,00)	88,88	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.999.950,00	13.332.500,00	(1.667.450,00)	88,88	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.999.950,00	13.332.500,00	(1.667.450,00)	88,88	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pengembangan, Penyebaran dan Pemanfaatan Industri	55.037.500,00	24.343.870,00	(30.693.630,00)	44,23	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	55.037.500,00	24.343.870,00	(30.693.630,00)	44,23	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.037.500,00	24.343.870,00	(30.693.630,00)	44,23	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.580.211.461,00	943.387.453,00	(1.236.824.008,00)	34,39	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	625.700.000,00	543.387.453,00	(82.312.547,00)	86,84	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	625.700.000,00	543.387.453,00	(82.312.547,00)	86,84	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.05 . 5.2	BELANJA MODAL	954.451.461,00	0,00	(954.451.461,00)	0,00	
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	954.451.461,00	0,00	(954.451.461,00)	0,00	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.364.500,00	7.457.500,00	(907.000,00)	89,16	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.06.01	Pemberitahuan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8.364.500,00	7.457.500,00	(907.000,00)	89,16	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	8.364.500,00	7.457.500,00	(907.000,00)	89,16	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.364.500,00	7.457.500,00	(907.000,00)	89,16	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.504.483.343,01	2.240.602.586,07	(245.880.756,93)	89,47	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.562.483.343,00	2.256.909.586,01	(305.493.756,99)	88,07	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.829.703.992,00	1.531.135.980,07	(298.568.406,93)	83,68	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	204.501.050,00	202.276.850,00	(22.154.200,00)	98,22	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	24.140.000,00	15.900.000,00	(8.160.000,00)	65,20	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.081.050,00	246.606.850,00	(13.994.200,00)	94,63	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	1.541.952.942,00	1.268.408.736,07	(276.454.206,00)	82,11	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.546.252.942,00	1.268.490.736,07	(278.454.205,93)	82,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	732.699.350,00	696.814.000,00	(35.885.350,00)	94,97	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	732.699.350,00	696.814.000,00	(35.885.350,00)	94,97	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	732.699.350,00	696.814.000,00	(35.885.350,00)	94,97	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32.000.000,00	21.613.000,00	(10.387.000,00)	67,54	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32.000.000,00	21.613.000,00	(10.387.000,00)	67,54	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	21.613.000,00	(10.387.000,00)	67,54	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	21.613.000,00	(10.387.000,00)	67,54	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04	Program Pelayanan Kesehatan KSP/USP Koperasi	204.247.400,00	169.675.450,00	(34.571.950,00)	83,07	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01	Pelayanan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.030.600,00	17.257.850,00	(35.772.750,00)	58,92	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.01	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	32.326.600,00	6.960.500,00	(25.366.400,00)	21,53	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	32.326.600,00	6.960.500,00	(25.366.400,00)	21,53	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.326.600,00	6.960.500,00	(25.366.400,00)	21,53	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.401.900,00	21.578.250,00	(8.826.650,00)	70,97	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.401.900,00	21.570.250,00	(8.826.650,00)	70,97	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.401.900,00	21.570.250,00	(8.826.650,00)	70,97	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.298.800,00	18.719.100,00	(1.579.700,00)	92,22	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.298.800,00	18.719.100,00	(1.579.700,00)	92,22	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.298.800,00	18.719.100,00	(1.579.700,00)	92,22	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	111.470.500,00	107.163.900,00	(4.316.600,00)	96,13	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21.479.900,00	19.817.500,00	(1.662.400,00)	92,26	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.479.900,00	19.817.500,00	(1.662.400,00)	92,26	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.479.900,00	19.817.500,00	(1.662.400,00)	92,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30 . 3.31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Cakupannya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	90.000.000,00	87.346.400,00	(2.653.600,00)	97,05	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	87.346.400,00	(2.653.600,00)	97,05	
3.30 . 3.31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	87.346.400,00	(2.653.600,00)	97,05	
3.30 . 3.31.2-17.3-30.01 . 04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.736.900,00	39.253.700,00	(483.200,00)	98,78	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.03	Pengawasan Pengadaan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	39.736.900,00	39.253.700,00	(483.200,00)	98,78	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	39.736.900,00	39.253.700,00	(483.200,00)	98,78	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.736.900,00	39.253.700,00	(483.200,00)	98,78	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	469.790.250,00	416.855.000,00	(51.935.250,00)	88,92	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	469.790.250,00	416.855.000,00	(51.935.250,00)	88,92	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	469.790.250,00	416.855.000,00	(51.935.250,00)	88,92	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	469.790.250,00	416.855.000,00	(51.935.250,00)	88,92	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	469.790.250,00	416.855.000,00	(51.935.250,00)	88,92	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	287.463.900,00	215.780.000,00	(71.683.900,00)	75,06	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	287.463.900,00	215.780.000,00	(71.683.900,00)	75,06	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	210.319.980,00	161.966.400,00	(48.353.580,00)	77,01	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	87.365.500,00	65.445.400,00	(22.020.100,00)	74,97	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.930.000,00	3.160.000,00	(770.000,00)	80,41	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.435.500,00	62.285.400,00	(21.150.100,00)	74,65	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	130.554.480,00	126.521.000,00	(4.033.480,00)	96,91	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.554.480,00	126.521.000,00	(4.033.480,00)	96,91	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.02	Pengawasan/Penyidikan Metrologi Legal	60.144.000,00	23.814.600,00	(36.329.400,00)	39,59	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	60.144.000,00	23.814.600,00	(36.329.400,00)	39,59	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.144.000,00	23.814.600,00	(36.329.400,00)	39,59	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	614.344.200,00	468.484.824,00	(145.859.376,00)	76,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	614.344.800,00	480.494.884,00	(133.849.916,00)	78,22	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	108.102.000,00	98.542.750,00	(9.559.250,00)	91,16	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.0 . 07.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	108.102.000,00	98.542.750,00	(9.559.250,00)	91,16	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.102.000,00	98.542.750,00	(9.559.250,00)	91,16	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	131.452.800,00	147.032.065,00	(23.019.135,00)	86,22	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	121.052.800,00	97.912.665,00	(23.139.135,00)	80,82	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	570.000,00	(680.000,00)	45,60	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.202.800,00	97.342.665,00	(22.859.135,00)	80,98	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02 . 5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84	
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.920.000,00	(80.000,00)	99,84	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.0 . 07.2.01.03	Fasilitasi Pemudahan Perizinan Usaha Mikro	84.000.000,00	79.008.250,00	(4.991.750,00)	94,06	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	79.008.250,00	(4.991.750,00)	94,06	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	79.008.250,00	(4.991.750,00)	94,06	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	42.000.000,00	28.638.500,00	(13.361.500,00)	68,19	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	28.638.500,00	(13.361.500,00)	68,19	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	28.638.500,00	(13.361.500,00)	68,19	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	208.790.000,00	114.461.719,00	(94.328.281,00)	54,82	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	208.790.000,00	114.461.719,00	(94.328.281,00)	54,82	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.790.000,00	114.461.719,00	(94.328.281,00)	54,82	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08	Program Pengembangan UMKM	593.695.400,00	592.534.038,00	(1.161.362,00)	99,80	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	593.695.400,00	592.534.038,00	(1.161.362,00)	99,80	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.0 . 08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi	593.695.400,00	592.534.038,00	(1.161.362,00)	99,80	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	593.695.400,00	592.534.038,00	(1.161.362,00)	99,80	
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	593.695.400,00	592.534.038,00	(1.161.362,00)	99,80	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.364.015.171,00)	(7.582.395.490,07)	1.801.622.680,93	86,80	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Powered by SIPD

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 9
Tanggal 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah
Organisasi : 4.01 , 4-01 0-00 0-00 0-00 01 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 01 01 , 5	**BELANJA DAERAH**	33 093 206 366,00	33 249 601 905 00	(3 697 606 361,00)	96,03	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 0 , 07	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	28 291 867 613,00	25 836 760 078,00	(2 455 060 535,00)	91,32	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	50 099 980,00	39 230 600,00	(11 469 380,00)	77,38	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 699 980,00	39 230 600,00	(11 469 380,00)	77,38	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 0 , 01 2 01 01 , 5 1	**BELANJA OPERASI**	50 699 980,00	39 230 600,00	(11 469 380,00)	77,38	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 01 01 , 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	50 699 980,00	39 230 600,00	(11 469 380,00)	77,38	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	11 261 250 527,00	10 482 121 401,00	(779 129 126,00)	93,08	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 897 033 527,00	10 138 057 401,00	(758 976 126,00)	93,03	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 01 , 5 1	**BELANJA OPERASI**	10 897 033 527,00	10 138 057 401,00	(758 976 126,00)	93,03	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 01 , 5 1 1	Belanja Pegawai	10 897 033 527,00	10 138 057 401,00	(758 976 126,00)	93,03	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 02	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	364 220 000,00	344 070 000,00	(50 242 000,00)	94,69	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 02 , 5 1	**BELANJA OPERASI**	364 220 000,00	344 070 000,00	(50 242 070,00)	94,69	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 02 , 5 1 1	Belanja Pegawai	318 800 000,00	258 820 000,00	(58 980 000,00)	81,50	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 02 02 , 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	44 520 000,00	84 250 000,00	(282 000,00)	99,41	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	464 195 478,00	449 329 630,00	(14 865 808,00)	96,80	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	357 780 000,00	356 801 700,00	(978 300,00)	99,73	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05 02 , 5 1	**BELANJA OPERASI**	357 780 000,00	356 801 700,00	(978 300,00)	99,73	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05 02 , 5 1 1	Belanja Pegawai	2 600 000,00	2 200 000,00	(400 000,00)	85,07	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05 02 , 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	355 180 000,00	354 601 700,00	(578 300,00)	99,84	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85 395 478,00	76 400 970,00	(10 194 508,00)	89,23	
4.01 , 4-01 0-00 0-00 01 , 01 2 05 09 , 5 1	**BELANJA OPERASI**	85 595 170,00	76 400 970,00	(10 194 508,00)	89,23	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.505.438,00	76.430.870,00	(10.191.308,00)	88,23	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11	Pembayaran Tenaga Ahli Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.020.000,00	16.127.000,00	(3.893.000,00)	81,37	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.020.000,00	16.127.000,00	(3.893.000,00)	81,37	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.020.000,00	16.127.000,00	(3.893.000,00)	81,37	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.353.167.024,00	5.688.181.048,00	(664.908.606,00)	89,05	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	195.870.724,00	195.826.693,00	(44.031,00)	99,90	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	195.870.724,00	195.826.693,00	(44.031,00)	99,98	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.870.724,00	195.826.693,00	(44.031,00)	99,98	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.906.550,00	159.772.100,00	(15.134.450,00)	91,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	143.570.550,00	133.940.100,00	(9.630.450,00)	93,29	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	141.750.550,00	132.120.100,00	(9.630.450,00)	93,21	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	31.327.000,00	25.832.000,00	(5.495.000,00)	74,46	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.327.000,00	25.832.000,00	(5.495.000,00)	74,46	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	183.046.980,00	173.839.000,00	(9.207.980,00)	94,97	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	183.046.980,00	173.839.000,00	(9.207.980,00)	94,97	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	183.046.980,00	173.839.000,00	(9.207.980,00)	94,97	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.848.000,00	180.691.758,00	(156.242,00)	99,91	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	180.848.000,00	180.691.758,00	(156.242,00)	99,91	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.848.000,00	180.691.758,00	(156.242,00)	99,91	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.818.495.400,00	5.179.652.097,00	(638.843.303,00)	89,02	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.818.495.400,00	5.179.652.097,00	(638.843.303,00)	89,02	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.817.355.400,00	5.177.512.097,00	(639.843.303,00)	89,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.530.807.147,00	2.196.921.393,00	(333.975.754,00)	86,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KENAIKAN / (PENURUNAN)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.03	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.452.280.000,00	1.144.710.000,00	(307.570.000,00)	78,82	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.280.000,00	1.610.000,00	(670.000,00)	70,61	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.280.000,00	1.610.000,00	(670.000,00)	70,61	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01 . 5.2	BELANJA MODAL	1.450.000.000,00	1.143.100.000,00	(306.900.000,00)	78,83	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.150.000.000,00	1.143.100.000,00	(306.900.000,00)	78,83	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.051.000,00	57.999.000,00	(1.051.000,00)	98,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	57.800.000,00	56.749.000,00	(1.051.000,00)	98,18	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.800.000,00	56.749.000,00	(1.051.000,00)	98,18	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Sedaerah Kantor atau Bangunan Lainnya	1.019.567.142,00	964.217.392,91	(55.349.749,09)	94,57	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	52.890.000,00	50.291.150,00	(2.598.850,00)	95,01	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.050.000,00	9.370.000,00	(2.680.000,00)	77,76	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.930.000,00	40.921.150,00	(8.850,00)	99,98	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	BELANJA MODAL	966.577.142,00	913.979.232,00	(52.597.910,00)	94,56	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.477.142,00	927.824.232,00	(22.652.910,00)	97,62	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.100.000,00	16.095.000,00	(5.000,00)	99,97	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.029.408,00	1.052.672.374,00	(210.357.034,00)	83,35	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.910.000,00	14.900.000,00	(10.000,00)	99,93	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.910.000,00	14.900.000,00	(10.000,00)	99,93	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	14.900.000,00	(10.000,00)	99,93	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.523.414,00	413.737.643,00	(82.785.771,00)	83,33	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	496.523.414,00	413.737.643,00	(82.785.771,00)	83,33	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	496.523.414,00	413.737.643,00	(82.785.771,00)	83,33	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	391.090.000,00	367.769.660,00	(23.320.340,00)	94,04	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	391.090.000,00	367.769.660,00	(23.320.340,00)	94,04	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	391.090.000,00	367.769.660,00	(23.320.340,00)	94,04	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.505.994,00	256.215.071,00	(104.290.923,00)	71,08	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	360.505.994,00	256.215.071,00	(104.290.923,00)	71,08	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.10.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	353.436.844,00	251.175.071,00	(102.260.873,00)	70,93	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2.849.984.311,00	2.693.971.574,00	(155.012.737,00)	94,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	670.121.035,00	632.874.913,00	(37.246.921,00)	94,44	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	673.123.834,00	632.874.913,00	(40.248.921,00)	94,02	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	673.123.834,00	632.874.913,00	(40.248.921,00)	94,02	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.604.650.300,00	1.491.468.623,00	(113.109.677,00)	92,95	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.601.650.300,00	1.491.468.623,00	(110.109.677,00)	93,12	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.601.650.300,00	1.491.468.623,00	(110.180.677,00)	93,12	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	466.018.792,00	461.081.642,00	(4.937.150,00)	98,95	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	466.018.792,00	461.081.642,00	(4.937.150,00)	98,95	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.940.000,00	1.330.000,00	(3.610.000,00)	26,92	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	461.078.792,00	459.751.642,00	(1.327.150,00)	99,71	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.783.395,00	106.546.906,00	(236.989,00)	99,78	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	106.783.395,00	106.546.906,00	(236.989,00)	99,78	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106.783.395,00	106.546.906,00	(236.989,00)	99,78	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12	**Fasilitasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah**	1.430.059.164,00	1.390.020.833,00	(40.038.331,00)	96,61	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	807.413.184,70	777.931.623,00	(29.481.579,00)	96,35	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	602.829.600,00	573.672.225,00	(29.157.375,00)	95,16	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.020.000,00	1.020.000,00	(408.000,00)	20,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	508.809.600,00	570.052.225,00	(28.749.375,00)	95,20	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	204.583.584,00	204.259.400,00	(324.184,00)	99,84	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.583.584,00	204.259.400,00	(324.184,00)	99,84	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	579.426.000,00	565.359.208,00	(13.866.792,00)	97,64	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	417.276.000,00	405.480.058,00	(17.309.862,00)	97,04	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.340.000,00	2.940.000,00	(400.000,00)	88,02	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	414.535.000,00	402.540.058,00	(11.909.992,00)	97,11	

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.2	BELANJA MODAL	161.550.000,00	160.273.200,00	(1.276.800,00)	99,21	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.550.000,00	160.273.200,00	(1.276.800,00)	99,21	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02	Penyediaan Kelengkapan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	52.020.000,00	46.330.000,00	(5.690.000,00)	89,06	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	52.020.000,00	46.330.000,00	(5.690.000,00)	89,06	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.020.000,00	570.000,00	(1.450.000,00)	28,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.760.000,00	(4.240.000,00)	91,52	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.03 . 5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13	Penataan Organisasi	335.122.040,00	249.534.373,00	(85.587.667,00)	74,47	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	103.387.100,00	78.556.127,00	(24.831.973,00)	75,98	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	103.387.100,00	78.556.127,00	(24.831.973,00)	75,98	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.387.100,00	78.555.127,00	(24.831.973,00)	75,98	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	111.485.000,00	84.971.250,00	(26.513.750,00)	76,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	111.485.000,00	84.971.250,00	(26.513.750,00)	76,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.485.000,00	84.971.250,00	(26.513.750,00)	76,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	120.249.850,00	86.028.650,00	(34.221.050,00)	71,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	120.249.850,00	86.028.650,00	(34.221.050,00)	71,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.249.850,00	86.028.650,00	(34.221.050,00)	71,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.545.050.099,00	1.394.755.510,00	(150.303.589,00)	90,27	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01	Fasilitasi Reprotokoler	810.796.755,00	759.841.413,00	(50.964.342,00)	93,76	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	810.796.755,00	759.841.413,00	(50.964.342,00)	93,76	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.360.000,00	5.070.000,00	(290.000,00)	94,59	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	813.905.755,00	754.971.413,00	(50.064.342,00)	93,74	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	177.856.000,00	92.890.600,00	(84.957.400,00)	52,23	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	177.856.000,00	92.898.600,00	(84.957.400,00)	52,23	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.856.000,00	92.898.600,00	(84.957.400,00)	52,23	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	547.997.144,00	542.915.496,00	(5.081.338,00)	99,91	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	503.451.704,00	497.515.806,00	(5.935.898,00)	98,82	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	503.451.704,00	497.515.806,00	(5.935.898,00)	98,82	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03 . 5.2	BELANJA MODAL	44.455.440,00	44.400.000,00	(55.440,00)	99,88	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.455.440,00	44.400.000,00	(55.440,00)	99,88	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.221.227.244,00	7.179.680.366,00	(1.041.536.278,00)	87,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	316.749.502,00	263.080.638,00	(53.668.864,00)	83,05	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	119.686.700,00	99.983.628,00	(19.703.072,00)	83,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	119.686.700,00	99.983.628,00	(19.703.072,00)	83,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	119.686.700,00	99.983.628,00	(19.703.072,00)	83,54	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	30.496.190,00	21.409.500,00	(9.086.690,00)	70,20	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.496.190,00	21.409.500,00	(9.086.690,00)	70,20	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.496.190,00	21.409.500,00	(9.086.690,00)	70,20	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	175.565.102,00	144.295.500,00	(31.269.602,00)	82,19	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	175.565.102,00	144.295.500,00	(31.269.602,00)	82,19	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.565.102,00	144.295.500,00	(31.269.602,00)	82,19	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.849.231.932,00	6.675.400.558,00	(973.831.374,00)	87,21	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Ring Mental Spiritual	3.286.876.612,00	2.836.816.518,00	(450.060.094,00)	86,31	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.286.876.612,00	2.836.816.518,00	(450.060.094,00)	86,31	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.211.876.612,00	866.027.618,00	(345.850.994,00)	71,48	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.5	Belanja Hibah	2.075.000.000,00	1.971.790.900,00	(103.209.100,00)	95,03	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.334.497.320,00	1.241.516.740,00	(92.980.580,00)	93,03	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.334.497.320,00	1.241.516.740,00	(92.980.580,00)	93,03	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.334.497.320,00	1.241.516.740,00	(92.980.580,00)	93,03	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.027.856.000,00	2.597.074.300,00	(430.781.700,00)	85,77	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.027.856.000,00	2.597.074.300,00	(430.781.700,00)	85,77	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.027.856.000,00	2.597.074.300,00	(430.781.700,00)	85,77	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	255.245.330,00	240.590.700,00	(14.654.630,00)	94,26	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	68.115.580,00	54.701.680,00	(13.413.900,00)	80,31	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	68.115.580,00	54.701.680,00	(13.413.900,00)	80,31	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.115.580,00	54.701.680,00	(13.413.900,00)	80,31	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	155.234.650,00	154.330.900,00	(903.750,00)	99,42	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	155.234.650,00	154.330.900,00	(903.750,00)	99,42	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.234.650,00	154.330.900,00	(903.750,00)	99,42	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	31.835.100,00	31.553.300,00	(281.800,00)	99,11	

Scanned By SIKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	31.856.100,00	31.550.100,00	(306.000,00)	99,04	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.805.100,00	31.553.260,00	(306.900,00)	99,04	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	501.713.512,00	283.141.941,00	(200.571.571,00)	56,59	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	121.185.400,00	103.718.600,00	(17.466.800,00)	85,59	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Verifikasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan RKMD dan RIJD	43.344.600,00	35.385.600,00	(6.959.000,00)	83,91	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	43.344.600,00	36.385.600,00	(6.959.000,00)	83,94	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.344.600,00	36.385.600,00	(6.959.000,00)	83,94	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	41.001.000,00	36.582.600,00	(4.418.400,00)	89,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	41.001.000,00	36.582.600,00	(4.418.400,00)	89,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.001.000,00	36.582.600,00	(4.418.400,00)	89,22	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	Pemberdayaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	36.840.000,00	30.751.200,00	(6.088.800,00)	83,47	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	36.840.000,00	30.751.200,00	(6.088.800,00)	83,47	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.840.000,00	30.751.200,00	(6.088.800,00)	83,47	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	94.027.970,00	62.249.500,00	(31.683.470,00)	66,62	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40.334.960,00	30.468.900,00	(9.866.060,00)	75,59	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	40.334.960,00	30.488.900,00	(9.846.060,00)	75,59	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.334.960,00	30.488.900,00	(9.846.060,00)	75,59	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54.592.990,00	32.761.600,00	(21.841.390,00)	59,99	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	54.592.990,00	32.751.600,00	(21.841.390,00)	59,99	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.592.990,00	32.751.600,00	(21.841.390,00)	59,99	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	367.999.942,00	216.182.641,00	(151.817.301,00)	58,75	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	228.489.100,00	77.263.958,00	(151.225.142,00)	33,81	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	228.489.100,00	77.263.958,00	(151.225.142,00)	33,81	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.489.100,00	77.263.958,00	(1.225.142,00)	98,44	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	113.124.680,00	112.777.220,00	(347.460,00)	99,69	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	93.114.680,00	92.777.220,00	(337.460,00)	99,63	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.114.680,00	92.777.220,00	(337.460,00)	99,63	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 . 5.2	BELANJA MODAL	21.010.000,00	21.000.000,00	(10.000,00)	99,95	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.010.000,00	21.000.000,00	(10.000,00)	99,95	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4-01-0-00-0-00-01 . 03.2.03.03	Pemeliharaan dan Arkalosi Pengadaan Barang dan Jasa	25.380.162,00	26.142.463,00	(241.699,00)	99.08	
4.01 . 4-01-0-00-0-00-01 . 03.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	26.386.162,00	26.142.463,00	(241.699,00)	99.08	
4.01 . 4-01-0-00-0-00-01 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.386.162,00	26.142.463,00	(243.699,00)	99.08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.037.208.369,00)	(35.399.801.805,00)	1.637.626.564,00	95.61	

Printed By SiPD

INSPEKTORAT

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat
Organisasi : 5.01 . 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	4.736.846.335,01	4.494.200.999,00	(255.179.336,00)	94,61	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.454.400.342,00	3.209.742.151,00	(144.658.191,00)	93,81	
5.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.824.219.221,00	2.810.983.465,00	(13.235.148,00)	99,53	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.319.217,00	2.751.243.438,00	(12.075.349,00)	99,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.763.319.217,00	2.751.243.438,00	(12.075.349,00)	99,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.763.319.217,00	2.751.243.438,00	(12.075.779,00)	99,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.900.000,00	59.640.000,00	(1.260.000,00)	97,93	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	60.900.000,00	59.640.000,00	(1.260.000,00)	97,93	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	60.900.000,00	59.640.000,00	(1.260.000,00)	97,93	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.260.000,00	100.965.926,00	(31.214.074,00)	31,66	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.276.000,00	51.676.128,00	(24.599.872,00)	67,75	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	76.276.000,00	51.676.128,00	(24.599.872,00)	67,75	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.276.000,00	51.676.128,00	(24.599.872,00)	67,75	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.004.000,00	128.389.798,00	(46.614.002,00)	73,36	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	175.004.000,00	128.389.198,00	(46.614.802,00)	73,36	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.004.000,00	128.389.198,00	(46.614.802,00)	73,36	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.534.410,00	191.031.011,00	(58.502.608,00)	76,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penggilan Bangunan Kantor	4.549.455,00	4.293.200,00	(256.255,00)	94,37	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.549.455,00	4.293.200,00	(256.255,00)	94,37	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.549.455,00	4.293.200,00	(256.255,00)	94,37	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.505.000,00	31.496.340,00	(8.660,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	26.303.000,00	25.508.340,00	(10.660,00)	99,97	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.009.000,00	25.996.340,00	(0.660,00)	99,97	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.924.650,00	(75.350,00)	98,74	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.924.650,00	(75.350,00)	98,74	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.924.650,00	(75.350,00)	98,74	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.852.954,00	23.748.005,00	(104.949,00)	99,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	23.852.954,00	23.748.005,00	(104.949,00)	99,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.852.954,00	23.748.005,00	(104.949,00)	99,56	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.831.000,00	131.570.616,00	(52.260.384,00)	71,57	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	183.831.000,00	131.570.616,00	(52.260.384,00)	71,57	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	183.831.000,00	131.570.616,00	(52.260.384,00)	71,57	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.145.000,00	15.516.240,00	(2.628.760,00)	85,51	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.450.000,00	2.385.000,00	(65.000,00)	97,35	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	2.385.000,00	(65.000,00)	97,35	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.385.000,00	(65.000,00)	97,35	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.555.000,00	10.291.240,00	(2.263.760,00)	81,97	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.555.000,00	10.291.240,00	(2.263.760,00)	81,97	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.555.000,00	10.291.240,00	(2.263.760,00)	81,97	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	3.140.000,00	2.840.000,00	(300.000,00)	90,45	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.140.000,00	2.840.000,00	(300.000,00)	90,45	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.140.000,00	2.840.000,00	(300.000,00)	90,45	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.921.686,00	106.245.286,00	(4.676.400,00)	95,78	

Verified By SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.902.500,00	97.005.286,00	(3.897.214,00)	96,14	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	100.902.500,00	97.005.286,00	(3.897.214,00)	96,14	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.902.500,00	97.005.286,00	(3.897.214,00)	96,14	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.019.196,00	9.240.000,00	(779.196,00)	92,22	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.019.196,00	9.240.000,00	(779.196,00)	92,22	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.019.196,00	9.240.000,00	(779.196,00)	92,22	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	282.130.318,00	096.408.700,00	(32.682.618,00)	96,49	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	824.500.318,00	795.500.500,00	(28.999.818,00)	96,48	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	324.685.000,00	324.515.000,00	(170.000,00)	99,95	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	324.685.000,00	324.515.000,00	(170.000,00)	99,95	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	324.685.000,00	324.515.000,00	(170.000,00)	99,95	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Hasil Laporan Kinerja	244.850.000,00	232.785.000,00	(12.065.000,00)	95,07	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	244.850.000,00	232.785.000,00	(12.065.000,00)	95,07	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.850.000,00	232.785.000,00	(12.065.000,00)	95,07	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Hasil Laporan Keuangan	11.510.000,00	11.505.000,00	(5.000,00)	99,96	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.510.000,00	11.505.000,00	(5.000,00)	99,96	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.510.000,00	11.505.000,00	(5.000,00)	99,96	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	243.455.318,00	226.695.500,00	(16.759.818,00)	93,12	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	243.455.318,00	226.695.500,00	(16.759.818,00)	93,12	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.455.318,00	226.695.500,00	(16.759.818,00)	93,11	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	107.670.000,00	103.986.200,00	(3.683.800,00)	96,58	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	107.670.000,00	103.986.200,00	(3.683.800,00)	96,58	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	107.670.000,00	103.986.200,00	(3.683.800,00)	96,58	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	107.670.000,00	103.986.200,00	(3.683.800,00)	96,58	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	353.235.675,00	275.239.145,00	(78.037.530,00)	77,91	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	54.827.233,00	23.950.103,00	(30.877.130,00)	43,68	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	Penumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	54.627.273,00	23.950.100,00	(30.677.173,00)	43,84	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	54.627.273,00	23.950.100,00	(30.677.173,00)	43,84	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.627.273,00	23.950.100,00	(30.677.173,00)	43,84	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	295.648.102,00	252.288.045,00	(43.360.057,00)	84,14	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	49.971.700,00	(28.300,00)	99,94	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.971.700,00	(28.300,00)	99,94	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.971.700,00	(28.300,00)	99,94	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	199.548.650,00	169.801.348,00	(29.747.302,00)	85,09	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	199.548.650,00	169.801.348,00	(29.747.302,00)	85,09	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.548.650,00	169.801.348,00	(29.747.302,00)	85,09	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.099.752,00	31.514.997,00	(17.584.755,00)	64,19	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	49.099.752,00	31.514.997,00	(17.584.755,00)	64,19	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.099.752,00	31.514.997,00	(17.584.755,00)	64,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.719.045.335,00)	(1.464.165.996,00)	254.879.339,00	94,61	

Printed By SIMDA

BADAN PERENCANAAN PEBANGUNAN DAERAH

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan
Organisasi : 5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	5.302.064.809,00	4.643.088.920,00	(658.975.889,00)	86,57	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.781.639.184,00	3.614.520.448,00	(167.118.736,00)	95,58	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.113.907.961,00	3.063.391.927,00	(50.516.034,00)	98,38	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.996.037.961,00	2.947.471.927,00	(48.566.034,00)	98,38	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.996.037.961,00	2.947.471.927,00	(48.566.034,00)	98,38	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.996.037.961,00	2.947.471.927,00	(48.566.034,00)	98,38	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.870.000,00	115.920.000,00	(1.950.000,00)	98,35	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	117.870.000,00	115.920.000,00	(1.950.000,00)	98,35	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	94.570.000,00	92.620.000,00	(1.950.000,00)	97,94	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	100,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.731.478,00	279.514.253,00	(50.917.225,00)	84,50	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.931.400,00	4.918.000,00	(13.400,00)	99,73	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.931.400,00	4.918.000,00	(13.400,00)	99,73	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.931.400,00	4.918.000,00	(13.400,00)	99,73	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.096.400,00	64.861.250,00	(9.235.210,00)	87,54	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	43.519.600,00	37.859.250,00	(5.660.350,00)	86,99	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.519.600,00	37.859.250,00	(5.660.350,00)	86,99	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	30.577.800,00	27.003.000,00	(3.574.800,00)	88,31	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.577.800,00	27.003.000,00	(3.574.800,00)	88,31	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.784.800,00	9.771.000,00	(13.800,00)	99,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.784.800,00	9.771.000,00	(13.800,00)	99,86	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.781.000,00	9.771.000,00	(10.000,00)	99,90	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.952.220,00	22.849.720,00	(1.102.520,00)	95,39	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	23.952.220,00	22.848.700,00	(1.103.520,00)	95,39	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.952.220,00	22.848.700,00	(1.103.520,00)	95,39	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.16.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.667.000,00	177.115.303,00	(140.551.697,00)	81,37	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.16.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	317.667.000,00	177.115.303,00	(140.551.697,00)	81,37	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.16.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317.667.000,00	177.115.303,00	(140.551.697,00)	81,37	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.041.200,00	16.997.720,00	(8.043.552,00)	67,88	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.801.280,00	11.597.728,00	(203.552,00)	98,28	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	11.801.280,00	11.597.728,00	(203.552,00)	98,28	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.801.280,00	11.597.728,00	(203.552,00)	98,28	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.240.000,00	5.400.000,00	(7.840.000,00)	40,79	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.11 . 5.2	BELANJA MODAL	13.240.000,00	5.400.000,00	(7.840.000,00)	40,79	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.000,00	5.400.000,00	(7.840.000,00)	40,79	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.052.500,00	41.415.336,00	(12.666.364,00)	77,81	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	75,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.662.500,00	27.167.136,00	(11.495.364,00)	70,27	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	38.662.500,00	27.167.136,00	(11.495.364,00)	70,27	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.662.500,00	27.167.136,00	(11.495.364,00)	70,27	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.420.000,00	15.748.000,00	(671.400,00)	95,91	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.420.000,00	15.748.600,00	(671.400,00)	95,91	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.420.000,00	15.748.600,00	(671.400,00)	95,91	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.175.965,00	210.200.804,00	(44.975.161,00)	82,37	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.400.000,00	93.928.520,00	(38.571.480,00)	70,87	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	132.400.000,00	93.928.520,00	(38.571.480,00)	70,87	

Powered by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.430.085,00	93.828.520,00	(38.601.565,00)	70,85	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.778.985,00	116.372.204,00	(6.406.681,00)	94,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	122.778.985,00	116.372.204,00	(6.406.781,00)	94,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.528.985,00	116.372.204,00	(5.156.781,00)	95,75	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	857.649.835,00	557.253.469,00	(314.396.366,00)	65,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	564.391.410,00	458.715.269,00	(205.676.641,00)	69,04	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Perumusan Arah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	67.550.860,00	29.574.500,00	(37.976.360,00)	43,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	67.550.860,00	29.574.500,00	(37.976.360,00)	43,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.550.860,00	29.574.500,00	(37.976.360,00)	43,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.654.000,00	17.551.300,00	(2.102.700,00)	89,29	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.654.000,00	17.551.300,00	(2.102.700,00)	89,29	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.654.000,00	17.551.300,00	(2.102.700,00)	89,29	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Lingkup SKPD	19.493.800,00	11.172.000,00	(8.321.800,00)	57,31	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.493.800,00	11.172.000,00	(8.321.800,00)	57,31	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.493.800,00	11.172.000,00	(8.321.800,00)	57,31	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Prov/Kota	76.267.125,00	67.739.900,00	(8.527.225,00)	88,82	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	76.267.125,00	67.739.900,00	(8.527.225,00)	88,82	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.267.125,00	67.739.900,00	(8.527.225,00)	88,82	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	14.755.725,00	12.149.750,00	(2.605.975,00)	82,34	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.755.725,00	12.149.750,00	(2.605.975,00)	82,34	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.755.725,00	12.149.750,00	(2.605.975,00)	82,34	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	467.671.800,00	320.529.319,00	(147.142.581,00)	68,54	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	467.671.800,00	320.529.319,00	(147.142.581,00)	68,54	

Printed by Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.071.900,00	320.529.319,00	(147.112.581,00)	68,64	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.0- . 02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	41.894.725,00	15.360.900,00	(26.533.825,00)	36,67	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.02.02	Pembinaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	41.894.725,00	15.360.900,00	(26.533.825,00)	36,67	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	41.894.725,00	15.360.900,00	(26.533.825,00)	36,67	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.894.725,00	15.360.900,00	(26.533.825,00)	36,67	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	72.828.700,00	32.300.900,00	(40.489.800,00)	44,44	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	36.008.800,00	17.381.200,00	(18.627.600,00)	48,27	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	36.008.800,00	17.381.200,00	(18.627.600,00)	48,27	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.008.800,00	17.381.200,00	(18.627.600,00)	48,27	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bertala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	36.869.900,00	15.007.700,00	(21.862.200,00)	40,70	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	36.869.900,00	15.007.700,00	(21.862.200,00)	40,70	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.869.900,00	15.007.700,00	(21.862.200,00)	40,70	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	83.402.000,00	46.736.000,00	(36.666.100,00)	52,88	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovasi	46.132.000,00	22.127.900,00	(24.004.100,00)	47,97	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	46.132.000,00	22.127.900,00	(24.004.100,00)	47,97	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.132.000,00	22.127.900,00	(24.004.100,00)	47,97	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	42.350.000,00	24.659.000,00	(17.691.000,00)	58,23	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	42.350.000,00	24.659.000,00	(17.691.000,00)	58,23	
5.05 . 5-01.5-05.0-00.01 . 02.2.04.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.350.000,00	24.659.000,00	(17.691.000,00)	58,23	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.00 . 00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	312.776.670,00	475.314.173,00	(253.462.497,00)	64,38	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	230.249.650,00	153.365.100,00	(76.884.550,00)	60,16	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.959.950,00	35.672.900,00	(27.287.050,00)	56,66	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	62.959.950,00	35.672.900,00	(27.287.050,00)	56,66	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.959.950,00	35.672.900,00	(27.287.050,00)	56,66	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.444.800,00	40.402.000,00	(362.800,00)	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	40.444.800,00	40.002.000,00	(382.800,00)	99,10	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.444.800,00	40.000.000,00	(382.800,00)	99,10	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.268.900,00	3.984.500,00	(5.284.400,00)	42,99	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.268.900,00	3.984.500,00	(5.284.400,00)	42,99	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.268.900,00	3.984.500,00	(5.284.400,00)	42,99	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.052.925,00	9.734.900,00	(8.318.025,00)	53,93	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	18.052.925,00	9.734.900,00	(8.318.025,00)	53,93	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.052.925,00	9.734.900,00	(8.318.025,00)	53,93	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.354.050,00	29.429.400,00	(18.924.650,00)	60,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	48.354.050,00	29.429.400,00	(18.924.650,00)	60,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.354.050,00	29.429.400,00	(18.924.650,00)	60,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.149.900,00	28.042.900,00	(9.107.000,00)	75,49	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	37.149.900,00	28.042.900,00	(9.107.000,00)	75,49	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.149.900,00	28.042.900,00	(9.107.000,00)	75,49	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.822.550,00	10.347.500,00	(4.475.050,00)	69,81	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.822.550,00	10.347.500,00	(4.475.050,00)	69,81	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.822.550,00	10.347.500,00	(4.475.050,00)	69,81	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.506.575,00	16.371.000,00	(2.225.575,00)	88,03	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	18.506.575,00	16.371.000,00	(2.225.575,00)	88,03	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.506.575,00	16.371.000,00	(2.225.575,00)	88,03	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	240.040.020,00	169.901.400,00	(70.138.620,00)	70,78	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.091.070,00	55.856.698,00	(16.234.372,00)	77,48	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	72.091.070,00	55.856.698,00	(16.234.372,00)	77,48	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.091.070,00	55.856.698,00	(16.234.372,00)	77,48	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.05 . 03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.160.350,00	10.280.000,00	(5.880.350,00)	63,61	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.160.350,00	10.280.000,00	(5.880.350,00)	63,61	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.160.350,00	10.280.000,00	(5.880.350,00)	63,61	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	97.927.800,00	59.191.554,00	(38.436.246,00)	60,45	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	97.627.800,00	59.191.554,00	(38.436.246,00)	60,65	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.627.800,00	59.191.554,00	(38.436.246,00)	60,65	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.05 . 03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	15.997.800,00	13.573.240,00	(2.424.552,00)	84,84	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.997.800,00	13.573.248,00	(2.424.552,00)	84,84	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.997.800,00	13.573.248,00	(2.424.552,00)	84,84	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.528.000,00	3.126.000,00	(7.402.000,00)	29,69	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.528.000,00	3.126.000,00	(7.402.000,00)	29,69	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.528.000,00	3.126.000,00	(7.402.000,00)	29,69	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.040.000,00	15.190.000,00	(3.850.000,00)	79,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.040.000,00	15.190.000,00	(3.850.000,00)	79,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.040.000,00	15.190.000,00	(3.850.000,00)	79,78	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.339.000,00	8.210.000,00	(2.129.000,00)	79,41	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.339.000,00	8.210.000,00	(2.129.000,00)	79,41	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.339.000,00	8.210.000,00	(2.129.000,00)	79,41	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11.261.000,00	4.483.000,00	(6.780.700,00)	39,81	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.261.000,00	4.483.000,00	(6.780.700,00)	39,81	

Printed by SIKDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.264.600,00	4.484.900,00	(6.780.700,00)	39,81	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.00 . 03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	239.470.100,00	131.847.633,00	(107.622.467,00)	55,06	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	90.101.800,00	51.123.253,00	(38.978.547,00)	56,74	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	90.101.800,00	51.123.253,00	(38.978.547,00)	56,74	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.101.800,00	51.123.253,00	(38.978.547,00)	56,74	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.549.900,00	12.884.000,00	(2.665.900,00)	82,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.549.900,00	12.884.000,00	(2.665.900,00)	82,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.549.900,00	12.884.000,00	(2.665.900,00)	82,86	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.170.000,00	10.420.000,00	(8.750.000,00)	54,36	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.170.000,00	10.420.000,00	(8.750.000,00)	54,36	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.170.000,00	10.420.000,00	(8.750.000,00)	54,36	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	15.189.100,00	4.281.000,00	(10.889.100,00)	28,20	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.189.100,00	4.281.000,00	(10.889.100,00)	28,20	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.189.100,00	4.281.000,00	(10.889.100,00)	28,20	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.766.060,00	33.599.420,00	(26.166.640,00)	56,22	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	59.766.060,00	33.599.420,00	(26.166.640,00)	56,22	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.766.060,00	33.599.420,00	(26.166.640,00)	56,22	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.879.400,00	11.779.000,00	(1.100.400,00)	91,46	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.879.400,00	11.779.000,00	(1.100.400,00)	91,46	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.879.400,00	11.779.000,00	(1.100.400,00)	91,46	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.408.780,00	2.476.000,00	(9.932.780,00)	19,95	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.408.780,00	2.476.000,00	(9.932.780,00)	19,95	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.408.780,00	2.476.000,00	(9.932.780,00)	19,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14.422.360,00	5.285.000,00	(9.137.360,00)	36,64	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.422.360,00	5.285.000,00	(9.137.360,00)	36,64	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.422.360,00	5.285.000,00	(9.137.360,00)	36,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.302.061.800,00)	(4.611.000.000,00)	691.061.800,00	86,97	

PrintRJ By SimDa

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan
Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0.00.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0.00.05 . 00.0.00.00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	935.436.562.240,00	825.138.249.032,10	(110.298.313.207,90)	102,01	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.055.575.000,00	32.603.398.984,10	4.547.823.984,10	116,21	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.1.1	Pajak Daerah	12.218.045.000,00	11.076.714.870,10	(1.212.230.129,90)	90,08	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	335.000.000,00	788.902.727,00	453.902.727,00	235,19	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.415.762.950,00	15.762.950,00	100,66	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.101.580.000,00	18.392.018.437,00	8.290.438.437,00	110,30	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.2	PENDAPATAN TRANSFER	770.509.987.240,00	784.705.042.887,00	14.205.755.641,00	101,84	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	207.938.152.555,00	113.831.485.009,00	5.893.332.454,00	100,80	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.567.734.691,00	71.002.147.878,00	8.434.413.187,00	113,69	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.875.150.000,00	7.828.208.106,00	(2.046.941.894,00)	79,27	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000,00	7.828.208.106,00	(2.046.941.894,00)	79,27	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 5	BELANJA DAERAH	715.938.009.846,00	112.609.341.578,00	(2.638.738.068,00)	97,71	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.149.272.075,00	19.959.534.149,00	(1.189.737.926,00)	94,37	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.684.000,00	39.104.000,00	(2.580.000,00)	93,79	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.804.000,00	17.968.000,00	(1.836.000,00)	91,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.684.800,00	17.868.000,00	(1.816.800,00)	91,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.684.800,00	17.868.000,00	(1.816.800,00)	91,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.009.800,00	22.036.000,00	(973.800,00)	95,77	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	23.009.800,00	22.036.000,00	(973.800,00)	95,77	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.009.800,00	22.036.000,00	(973.800,00)	95,77	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.364.641.124,00	18.609.252.579,00	(902.388.545,00)	95,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.016.222.324,00	18.233.740.829,00	(782.481.495,00)	95,89	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.016.222.324,00	18.233.740.829,00	(782.481.495,00)	95,89	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	19.016.222.324,00	18.233.740.829,00	(782.481.495,00)	95,89	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446.600.000,00	334.057.150,00	(112.542.850,00)	74,80	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	446.600.000,00	334.057.150,00	(112.542.850,00)	74,80	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	427.520.000,00	316.160.000,00	(111.360.000,00)	73,95	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.080.000,00	17.897.150,00	(1.182.850,00)	93,80	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.943.800,00	16.335.000,00	(608.800,00)	96,64	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.943.800,00	16.335.000,00	(608.800,00)	96,64	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.943.800,00	16.335.000,00	(608.800,00)	96,64	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.775.000,00	18.079.600,00	(6.695.400,00)	72,98	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.775.000,00	18.079.600,00	(6.695.400,00)	72,98	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.775.000,00	18.079.600,00	(6.695.400,00)	72,98	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.200.560,00	579.971.123,00	(244.217.437,00)	70,36	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.120.000,00	2.100.000,00	(20.000,00)	99,06	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	2.100.000,00	(20.000,00)	99,06	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01 . 5.2	BELANJA MODAL	47.880.000,00	47.850.000,00	(30.000,00)	99,94	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.880.000,00	47.850.000,00	(30.000,00)	99,94	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.643.100,00	263.092.523,00	(175.550.577,00)	59,99	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	106.584.100,00	41.992.523,00	(64.591.577,00)	39,40	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.710.000,00	2.390.000,00	(320.000,00)	88,19	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.874.100,00	39.602.523,00	(64.271.577,00)	38,13	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	332.059.000,00	221.100.000,00	(110.959.000,00)	66,58	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.059.000,00	192.600.000,00	(109.459.000,00)	63,76	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)	91,67	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.899.162,00	19.163.675,00	(2.735.487,00)	87,51	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.899.162,00	19.163.675,00	(2.735.487,00)	87,51	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.899.162,00	19.163.675,00	(2.735.487,00)	87,51	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.590.000,00	11.932.250,00	(14.657.750,00)	44,87	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	26.590.000,00	11.932.250,00	(14.657.750,00)	44,87	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.590.000,00	11.932.250,00	(14.657.750,00)	44,87	

Generated By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.156.300,00	235.832.675,00	(50.323.625,00)	82,41	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	285.156.300,00	235.832.675,00	(50.323.625,00)	82,41	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.156.300,00	235.832.675,00	(50.323.625,00)	82,41	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.116.000,00	20.702.000,00	(414.000,00)	98,04	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	21.116.000,00	20.702.000,00	(414.000,00)	98,04	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	596.000,00	500.000,00	(96.000,00)	83,89	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	596.000,00	500.000,00	(96.000,00)	83,89	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	20.520.000,00	20.202.000,00	(318.000,00)	98,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.520.000,00	20.202.000,00	(318.000,00)	98,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.381.000,00	93.537.968,00	(26.907.352,00)	76,78	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.181.300,00	55.894.628,00	(19.286.672,00)	74,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	75.181.300,00	55.894.628,00	(19.286.672,00)	74,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.181.300,00	55.894.628,00	(19.286.672,00)	74,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.200.000,00	37.679.340,00	(10.520.660,00)	78,17	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	48.200.000,00	37.679.340,00	(10.520.660,00)	78,17	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.200.000,00	37.679.340,00	(10.520.660,00)	78,17	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.250.488,00	613.930.479,00	(15.320.010,00)	97,56	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.914.300,00	269.913.379,00	(1.001.921,00)	99,63	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	270.914.300,00	269.913.379,00	(1.001.921,00)	99,63	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	270.914.300,00	269.913.379,00	(1.001.921,00)	99,63	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.485.788,00	319.286.100,00	(1.199.688,00)	99,70	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	203.180.000,00	199.335.400,00	(3.844.600,00)	98,96	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.890.000,00	2.390.000,00	(3.490.000,00)	40,65	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197.600.000,00	196.945.400,00	(654.600,00)	99,67	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10 . 5.2	BELANJA MODAL	119.005.788,00	119.950.700,00	(55.088,00)	99,95	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.005.788,00	119.950.700,00	(55.088,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.850.400,00	29.732.000,00	(5.118.400,00)	85,31	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	34.850.400,00	29.732.000,00	(5.118.400,00)	85,31	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.850.400,00	29.732.000,00	(5.118.400,00)	85,31	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	93.003.589.121,00	54.165.072.532,00	(38.937.316.589,00)	58,17	
5.02 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.253.923.500,00	1.074.156.100,00	(179.767.400,00)	85,66	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	154.156.500,00	137.149.900,00	(17.006.600,00)	88,97	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	154.156.500,00	137.149.900,00	(17.006.600,00)	88,97	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.156.500,00	137.149.900,00	(17.006.600,00)	88,97	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148.782.000,00	126.051.700,00	(22.730.300,00)	84,72	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	148.782.000,00	126.051.700,00	(22.730.300,00)	84,72	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	148.782.000,00	126.051.700,00	(22.730.300,00)	84,72	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	40.860.100,00	36.659.300,00	(4.200.800,00)	89,72	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	40.860.100,00	36.659.300,00	(4.200.800,00)	89,72	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.860.100,00	36.659.300,00	(4.200.800,00)	89,72	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	43.101.100,00	31.851.900,00	(11.249.200,00)	73,90	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	43.101.100,00	31.851.900,00	(11.249.200,00)	73,90	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.101.100,00	31.851.900,00	(11.249.200,00)	73,90	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	308.045.000,00	261.961.100,00	(46.083.900,00)	85,04	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	308.045.000,00	261.961.100,00	(46.083.900,00)	85,04	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.865.000,00	261.961.100,00	(43.903.900,00)	85,65	
5.02 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	327.221.000,00	261.966.000,00	(65.255.000,00)	80,06	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	327.221.000,00	261.966.000,00	(65.255.000,00)	80,06	
5.02 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.08 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.190.000,00	0,00	(1.190.000,00)	0,00	
5.02 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	326.041.000,00	261.966.000,00	(64.075.000,00)	80,35	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Belanja Anggaran	231.353.800,00	218.513.200,00	(12.840.600,00)	94,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	231.353.800,00	218.513.200,00	(12.840.600,00)	94,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.660.000,00	2.500.000,00	(160.000,00)	93,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229.097.800,00	215.013.200,00	(13.084.600,00)	94,29	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	340.200.400,00	231.759.032,00	(111.446.368,00)	68,06	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20.040.000,00	3.972.827,00	(16.067.173,00)	34,50	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	28.040.000,00	9.972.827,00	(18.067.173,00)	34,58	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	3.972.827,00	(16.067.173,00)	34,50	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.16 . 02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pengungutan/Penutupan dan Penyebaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.297.000,00	66.097.000,00	(10.200.000,00)	78,41	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	94.297.000,00	66.097.000,00	(10.200.000,00)	78,41	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.297.000,00	66.097.000,00	(10.200.000,00)	78,41	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235.060.400,00	161.640.005,00	(74.379.395,00)	68,49	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	236.060.400,00	161.640.005,00	(74.379.395,00)	68,49	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.02.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.490.400,00	161.070.005,00	(74.379.395,00)	68,42	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	461.927.974,00	451.646.925,00	(9.902.049,00)	97,84	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	166.515.000,00	164.717.500,00	(1.797.500,00)	98,92	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	166.515.000,00	164.717.500,00	(1.797.500,00)	98,92	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166.515.000,00	164.717.500,00	(1.797.500,00)	98,92	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	94.961.500,00	94.503.325,00	(160.175,00)	99,52	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.03.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	94.963.500,00	94.503.325,00	(160.175,00)	99,52	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.963.500,00	94.503.325,00	(460.175,00)	99,52	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	61.230.274,00	59.678.600,00	(1.551.674,00)	97,47	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	61.230.274,00	59.678.600,00	(1.551.674,00)	97,47	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.03.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.230.274,00	59.678.600,00	(1.551.674,00)	97,47	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	44.319.000,00	41.451.900,00	(2.867.100,00)	93,53	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	44.319.000,00	41.451.900,00	(2.867.100,00)	93,53	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.03.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.319.000,00	41.451.900,00	(2.867.100,00)	93,53	

Created by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	94.900.200,00	91.594.600,00	(3.305.600,00)	96,52	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	94.900.200,00	91.594.600,00	(3.305.600,00)	96,52	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.900.200,00	91.594.600,00	(3.305.600,00)	96,52	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	91.028.631.243,00	90.013.161.800,00	(1.015.369.567,00)	98,88	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus	81.292.309.000,00	80.982.107.679,00	(310.201.321,00)	99,61	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	39.750.000,00	34.909.500,00	(4.840.500,00)	87,82	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	34.869.500,00	(4.840.500,00)	87,82	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.08 . 5.4	BELANJA TRANSFER	37.250.569.000,00	36.917.238.179,00	(333.330.821,00)	99,10	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.08 . 5.4.1	Belanja Bagi hasil	1.430.344.500,00	1.096.023.679,00	(334.320.821,00)	76,62	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.08 . 5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	35.822.274.500,00	35.822.274.500,00	0,00	100,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.736.222.247,00	3.061.064.001,00	(675.158.246,00)	81,93	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09 . 5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.736.222.247,00	3.061.064.001,00	(675.158.246,00)	81,93	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09 . 5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.736.222.247,00	3.061.064.001,00	(675.158.246,00)	81,93	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	513.353.450,00	429.105.100,00	(84.248.350,00)	83,59	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	513.353.450,00	429.105.100,00	(84.248.350,00)	83,59	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.03	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.084.000,00	6.909.950,00	(174.050,00)	97,54	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.084.000,00	6.909.950,00	(174.050,00)	97,54	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.084.000,00	6.909.950,00	(174.050,00)	97,54	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.900.000,00	13.931.550,00	(5.968.450,00)	70,01	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.900.000,00	13.931.550,00	(5.968.450,00)	70,01	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	13.931.550,00	(5.968.450,00)	70,01	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	19.900.000,00	17.522.300,00	(2.377.700,00)	88,05	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.900.000,00	17.522.300,00	(2.377.700,00)	88,05	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	17.522.300,00	(2.377.700,00)	88,05	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	189.610.450,00	148.754.350,00	(40.856.100,00)	78,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	189.610.450,00	148.754.350,00	(40.856.100,00)	78,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	189.610.450,00	148.754.350,00	(40.856.100,00)	78,45	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pengelolaan, Pemindahtangan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	192.457.000,00	175.062.100,00	(17.394.900,00)	90,96	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	192.457.000,00	175.062.100,00	(17.394.900,00)	90,96	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.940.000,00	2.500.000,00	(1.440.000,00)	63,46	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.517.000,00	172.562.100,00	(15.954.900,00)	91,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.413.000,00	15.573.400,00	(3.839.600,00)	80,23	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.413.000,00	15.573.400,00	(3.839.600,00)	80,23	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.413.000,00	15.573.400,00	(3.839.600,00)	80,23	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.450.000,00	12.432.000,00	(7.018.000,00)	63,92	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.12 . 5.1	BELANJA OPERASI	19.450.000,00	12.432.000,00	(7.018.000,00)	63,92	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	12.432.000,00	(7.018.000,00)	63,92	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	49.542.000,00	38.919.450,00	(10.622.550,00)	78,56	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.13 . 5.1	BELANJA OPERASI	49.542.000,00	38.919.450,00	(10.622.550,00)	78,56	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.542.000,00	38.919.450,00	(10.622.550,00)	78,56	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	547.865.000,00	503.678.792,00	(44.186.208,00)	91,93	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	547.865.000,00	503.678.792,00	(44.186.208,00)	91,93	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	62.026.000,00	50.019.555,00	(12.006.445,00)	96,14	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	52.026.000,00	50.019.555,00	(2.006.445,00)	96,14	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.026.000,00	50.019.555,00	(2.006.445,00)	96,14	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	103.442.000,00	98.960.878,00	(4.481.122,00)	95,67	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	103.442.000,00	98.960.878,00	(4.481.122,00)	95,67	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.442.000,00	98.960.878,00	(4.481.122,00)	95,67	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	307.590.000,00	292.743.869,00	(14.846.131,00)	95,17	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	307.590.000,00	292.743.869,00	(14.846.131,00)	95,17	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.590.000,00	292.743.869,00	(14.846.131,00)	95,17	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	84.807.000,00	61.954.490,00	(22.852.510,00)	73,05	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.13 . 5.1	BELANJA OPERASI	84.807.000,00	61.954.490,00	(22.852.510,00)	73,05	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 04.2.01.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.807.000,00	61.954.490,00	(22.852.510,00)	73,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	991.128.482.000,00	712.468.008.358,10	(278.660.473.641,90)	71,89	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.103.438.558,00	109.135.452.193,94	32.013.635,94	100,03	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.103.438.558,00	109.135.452.193,94	32.013.635,94	100,03	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 00.0.00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	108.603.438.558,00	108.635.452.193,94	32.013.635,94	100,02	

Created by SIPD

BADAN KEPEGAWAI DAERAH DAN SDM

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian
Organisasi : 5.03 - 5-03.5-03.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.01 - 5	**BELANJA DAERAH**	29.787.607.405,00	27.479.230.460,00	(2.279.356.945,00)	92,34	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.422.062.735,00	25.474.626.948,00	(1.947.435.787,00)	92,90	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.814.430.568,00	24.939.055.348,00	(1.875.375.220,00)	92,93	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.349.902.768,00	15.791.416.848,00	(1.558.485.920,00)	91,02	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.01 - 5.1	BELANJA OPERASI	17.349.902.768,00	15.791.416.848,00	(1.558.485.920,00)	91,02	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.01 - 5.1.1	Belanja Pegawai	17.349.902.768,00	15.791.416.848,00	(1.558.485.920,00)	91,02	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.464.527.800,00	9.127.638.500,00	(336.889.300,00)	96,44	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.02 - 5.1	BELANJA OPERASI	9.464.527.800,00	9.127.638.500,00	(336.889.300,00)	96,44	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.02 - 5.1.1	Belanja Pegawai	141.369.000,00	110.633.000,00	(30.736.000,00)	78,26	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.02.02 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.320.158.800,00	9.017.005.500,00	(303.153.300,00)	96,75	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.671.267,00	273.687.904,00	(4.983.363,00)	98,21	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.139.761,00	2.125.000,00	(14.761,00)	99,31	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.01 - 5.1	BELANJA OPERASI	2.139.761,00	2.125.000,00	(14.761,00)	99,31	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.01 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.139.761,00	2.125.000,00	(14.761,00)	99,31	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.595.640,00	22.595.000,00	(640,00)	100,00	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.02 - 5.1	BELANJA OPERASI	22.595.640,00	22.595.000,00	(640,00)	100,00	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.02 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.595.640,00	22.595.000,00	(640,00)	100,00	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.998.356,00	4.997.000,00	(2.356,00)	99,95	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.03 - 5.1	BELANJA OPERASI	4.999.356,00	4.997.000,00	(2.356,00)	99,95	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.03 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.356,00	4.997.000,00	(2.356,00)	99,95	
5.03 - 5-03.5-04.0-00.01 - 01.2.05.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.358.650,00	23.358.650,00	(350,00)	100,00	

Powered by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.358.500,00	23.358.150,00	(350,00)	100,00	
5.01 . 5-01.5-04.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.358.500,00	23.358.150,00	(350,00)	100,00	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Kapal Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.578.000,00	220.612.844,00	(4.965.156,00)	97,80	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	225.578.000,00	220.612.844,00	(4.965.156,00)	97,80	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.578.000,00	220.612.844,00	(4.965.156,00)	97,80	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.410.000,00	126.287.000,00	(15.123.000,00)	89,31	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.590.000,00	115.742.000,00	(4.848.000,00)	95,98	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	120.590.000,00	115.742.000,00	(4.848.000,00)	95,98	
5.01 . 5-01.5-04.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.590.000,00	115.742.000,00	(4.848.000,00)	95,98	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.820.000,00	10.545.000,00	(10.275.000,00)	50,65	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.820.000,00	10.545.000,00	(10.275.000,00)	50,65	
5.01 . 5-01.5-04.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.820.000,00	10.545.000,00	(10.275.000,00)	50,65	
5.01 . 5-01.5-04.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000,00	33.620.560,00	(4.267.440,00)	88,74	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.748.000,00	2.680.000,00	(68.000,00)	97,53	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.748.000,00	2.680.000,00	(68.000,00)	97,53	
5.01 . 5-01.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.748.000,00	2.680.000,00	(68.000,00)	97,53	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000,00	22.562.560,00	(2.637.440,00)	89,53	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.200.000,00	22.562.560,00	(2.637.440,00)	89,53	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	22.562.560,00	(2.637.440,00)	89,53	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000,00	8.378.000,00	(1.562.000,00)	84,29	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.940.000,00	8.378.000,00	(1.562.000,00)	84,29	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	8.378.000,00	(1.562.000,00)	84,29	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.682.910,00	131.896.046,00	(17.786.864,00)	88,12	
5.01 . 5-01.5-04.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.043.550,00	96.390.046,00	(7.563.504,00)	92,72	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	103.043.550,00	96.390.046,00	(7.563.504,00)	92,72	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.043.550,00	96.390.046,00	(7.563.504,00)	92,72	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.639.360,00	35.490.000,00	(10.223.360,00)	77,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 0...2.09.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	45.313.360,00	35.490.000,00	(10.223.360,00)	77,64	
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 01.2.09.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.313.360,00	35.490.000,00	(10.223.360,00)	77,64	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 0..	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.305.541.670,00	2.004.423.512,00	(301.121.158,00)	86,93	
5.01 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	214.204.470,01	170.235.960,00	(43.968.480,00)	79,48	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	29.999.800,00	1.849.600,00	(28.150.200,00)	6,17	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.999.800,00	1.849.600,00	(28.150.200,00)	6,17	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.999.800,00	1.849.600,00	(28.150.200,00)	6,17	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	37.500.000,00	36.330.025,00	(1.169.975,00)	96,88	
5.01 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	36.330.025,00	(1.169.975,00)	96,88	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	36.330.025,00	(1.169.975,00)	96,88	
5.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	13.255.150,00	12.494.700,00	(760.450,00)	94,26	
5.01 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	13.255.150,01	12.494.700,00	(760.450,00)	94,26	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.255.150,00	12.494.700,00	(760.450,00)	94,26	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34.999.800,00	31.816.400,00	(3.183.400,00)	90,90	
5.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	34.999.800,00	31.816.400,00	(3.183.400,00)	90,90	
5.01 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.999.800,00	31.816.400,00	(3.183.400,00)	90,90	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	15.249.820,00	12.542.500,00	(2.707.320,00)	82,25	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.249.820,00	12.542.500,00	(2.707.320,00)	82,25	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.249.820,00	12.542.500,00	(2.707.320,00)	82,25	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	28.999.900,00	22.527.200,00	(6.472.700,00)	77,68	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	28.999.900,00	22.527.200,00	(6.472.700,00)	77,68	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.999.900,00	22.527.200,00	(6.472.700,00)	77,68	
5.02 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	54.200.000,00	52.695.565,00	(1.504.435,00)	97,22	
5.01 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.11 . 5.1	BELANJA OPERASI	54.200.000,00	52.695.565,00	(1.504.435,00)	97,22	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.200.000,00	52.695.565,00	(1.504.435,00)	97,22	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.469.161.000,00	1.327.325.078,00	(141.835.922,00)	90,35	
5.02 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	65.582.870,00	53.276.883,00	(12.305.987,00)	81,24	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.582.800,00	53.276.883,00	(12.305.917,00)	81,24	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.582.800,00	53.276.883,00	(12.305.917,00)	81,24	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.09	Pengelolaan Kesejahteraan Pangkat ASN	224.962.900,00	208.297.905,00	(16.664.995,00)	92,59	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	224.962.900,00	208.297.905,00	(16.664.995,00)	92,59	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224.962.900,00	208.297.905,00	(16.664.995,00)	92,59	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	312.845.000,00	241.729.400,00	(71.115.600,00)	77,26	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	312.845.000,00	241.729.400,00	(71.115.600,00)	77,26	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312.845.000,00	241.729.400,00	(71.115.600,00)	77,26	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Ubalan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pelatihan	865.712.000,00	824.620.888,00	(41.091.112,00)	95,25	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	865.712.000,00	824.620.888,00	(41.091.112,00)	95,25	
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	865.712.000,00	824.620.888,00	(41.091.112,00)	95,25	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	370.725.300,00	250.582.658,00	(120.185.642,00)	67,58	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	276.668.800,00	211.123.714,00	(65.545.086,00)	76,31	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	276.668.800,00	211.123.714,00	(65.545.086,00)	76,31	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276.668.800,00	211.123.714,00	(65.545.086,00)	76,31	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	46.872.000,00	0,00	(46.872.000,00)	0,00	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.872.000,00	0,00	(46.872.000,00)	0,00	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.872.000,00	0,00	(46.872.000,00)	0,00	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	47.236.500,00	39.466.944,00	(7.770.556,00)	83,55	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.236.500,00	39.466.944,00	(7.770.556,00)	83,55	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.236.500,00	39.466.944,00	(7.770.556,00)	83,55	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	281.463.100,00	256.252.788,00	(25.210.312,00)	91,04	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27.488.000,00	25.585.500,00	(1.902.500,00)	93,07	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	27.488.000,00	25.585.500,00	(1.902.500,00)	93,07	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.488.000,00	25.585.500,00	(1.902.500,00)	93,07	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	41.329.400,00	40.680.000,00	(649.400,00)	98,43	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	41.329.400,00	40.680.000,00	(649.400,00)	98,43	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.329.400,00	40.680.000,00	(649.400,00)	98,43	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.06	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	24.960.800,00	16.425.600,00	(8.574.000,00)	65,79	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.999.800.00	16.425.800.00	(8.574.000.00)	65.70	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800.00	16.425.800.00	(8.574.000.00)	65.70	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.07	Pembinaan Disiplin ASN	130.606.000,00	121.255.588,00	(9.440.412,00)	92,78	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	130.606.000,00	121.255.588,00	(9.440.412,00)	92,78	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.696.000,00	121.255.588,00	(9.440.412,00)	92,78	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	56.969.400,00	52.325.400,00	(4.644.000,00)	91,85	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	56.969.400,00	52.325.400,00	(4.644.000,00)	91,85	
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.969.400,00	52.325.400,00	(4.644.000,00)	91,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.757.607.405,00)	(27.479.250.460,00)	2.278.356.945,00	92,34	

SEKRETARIAT DPRD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD
Organisasi : 4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.01 - 5	**BELANJA DAERAH**	27.084.791.050,00	26.759.102.910,00	(3.135.390.440,00)	98,37	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	15.048.769.350,00	14.385.393.476,00	(811.375.774,00)	95,59	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12.239.010.243,00	11.880.725.670,00	(358.884.573,00)	97,07	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	12.094.370.243,00	11.753.045.670,00	(341.424.573,00)	97,18	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.01 - 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.094.370.243,00	11.753.045.670,00	(341.424.573,00)	97,18	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.01 - 5.1.1	**Belanja Pegawai**	12.094.370.243,00	11.753.045.670,00	(341.424.573,00)	97,18	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.02	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	144.640.000,00	127.380.000,00	(17.460.000,00)	97,95	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.02 - 5.1	**BELANJA OPERASI**	144.640.000,00	127.380.000,00	(17.460.000,00)	97,95	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.02.02 - 5.1.1	**Belanja Pegawai**	144.640.000,00	127.380.000,00	(17.460.000,00)	80,05	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	33,33	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.05.09	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	33,33	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.05.09 - 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	33,33	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.05.09 - 5.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	33,33	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	929.208.703,00	850.167.060,00	(79.041.643,00)	92,49	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	50.952.881,00	44.764.600,00	(6.188.281,00)	87,85	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.01 - 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.952.881,00	44.764.600,00	(6.188.281,00)	87,85	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.01 - 5.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.952.881,00	44.764.600,00	(6.188.281,00)	87,85	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	218.656.590,00	208.369.340,00	(10.287.250,00)	95,30	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.02 - 5.1	**BELANJA OPERASI**	137.440.000,00	137.000.640,00	(439.360,00)	99,68	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.02 - 5.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.440.000,00	137.000.640,00	(439.360,00)	99,68	
4.02 - 4.02.0-00.0-00.01 - 01.2.06.02 - 5.2	**BELANJA MODAL**	81.515.300,00	71.368.900,00	(9.861.450,00)	87,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.515.680,00	71.668.000,00	(9.847.680,00)	87,92	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.145.742,00	45.775.500,00	(2.370.242,00)	95,10	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	48.145.742,00	45.775.500,00	(2.370.242,00)	95,10	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.145.742,00	45.775.500,00	(2.370.242,00)	95,10	
4.02 . 4-02.0-00.0-10.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.006.100,00	147.787.920,00	(218.180,00)	99,85	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	148.006.100,00	147.787.920,00	(218.180,00)	99,85	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	148.006.100,00	147.787.920,00	(218.180,00)	99,85	
4.02 . 4-02.0-00.0-10.01 . 01.2.06.04 . 5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	210.782.400,00	210.607.800,00	(174.600,00)	99,92	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	210.782.400,00	210.607.800,00	(174.600,00)	99,92	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.782.400,00	210.607.800,00	(174.600,00)	99,92	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.365.000,00	200.561.700,00	(50.803.300,00)	79,79	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	251.365.000,00	200.561.700,00	(50.803.300,00)	79,79	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.365.000,00	200.561.700,00	(50.803.300,00)	79,79	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.980.000,00	25.960.000,00	(2.990.000,00)	89,62	
1.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.470.000,00	9.460.000,00	(10.000,00)	99,89	
1.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	9.470.000,00	9.460.000,00	(10.000,00)	99,89	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.470.000,00	9.460.000,00	(10.000,00)	99,89	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.428.860,00	17.500.000,00	(2.928.860,00)	85,66	
1.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	BELANJA MODAL	20.428.860,00	17.500.000,00	(2.928.860,00)	85,66	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.428.860,00	17.500.000,00	(2.928.860,00)	85,66	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.280.304,00	93.031.000,00	(129.004,00)	99,86	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.860.304,00	78.731.300,00	(129.004,00)	99,84	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	78.860.304,00	78.731.300,00	(129.004,00)	99,84	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.860.304,00	78.731.300,00	(129.004,00)	99,84	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANGI)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.421.240,00	392.561.446,00	(74.760.794,00)	84,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.835.200,00	124.426.017,00	(43.409.183,00)	74,14	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	167.835.200,00	124.426.017,00	(43.409.183,00)	74,14	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.835.200,00	124.426.017,00	(43.409.183,00)	74,14	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.274.250,00	188.836.429,00	(18.437.821,00)	91,15	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	206.274.250,00	188.836.429,00	(18.437.821,00)	91,15	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.274.250,00	188.836.429,00	(18.437.821,00)	91,15	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.311.790,00	78.388.890,00	(12.922.790,00)	85,85	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	91.311.790,00	78.388.890,00	(12.922.790,00)	85,85	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.311.790,00	78.388.890,00	(12.922.790,00)	85,85	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	491.900.000,00	432.112.500,00	(62.057.500,00)	87,90	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.02	Penyediaan Paksian Dinas dan Atribut DPRD	444.980.000,00	432.112.500,00	(12.867.500,00)	97,11	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	444.980.000,00	432.112.500,00	(12.867.500,00)	97,11	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	0,00	(12.480.000,00)	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	432.500.000,00	432.112.500,00	(387.500,00)	99,91	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	717.390.000,00	706.046.000,00	(11.344.000,00)	98,36	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	717.390.000,00	706.046.000,00	(11.344.000,00)	98,36	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	717.390.000,00	706.046.000,00	(11.344.000,00)	98,36	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	716.610.000,00	704.866.000,00	(11.744.000,00)	98,36	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	12.980.024.900,00	12.304.008.934,00	(676.015.966,00)	94,79	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.120.052.000,00	6.681.319.704,00	(438.692.296,00)	93,84	

Powered by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	7.120.082.000,00	6.681.379.704,00	(438.682.296,00)	93,84	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.120.082.000,00	6.681.379.704,00	(438.682.296,00)	93,84	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.120.082.000,00	6.681.379.704,00	(438.682.296,00)	93,84	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	202.970.000,00	202.970.000,00	(5.000.000,00)	97,58	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	84.690.000,00	84.685.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	84.690.000,00	84.685.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.690.000,00	84.685.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	33.660.000,00	33.595.000,00	(65.000,00)	99,81	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	33.660.000,00	33.595.000,00	(65.000,00)	99,81	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.660.000,00	33.595.000,00	(65.000,00)	99,81	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	89.690.000,00	84.690.000,00	(5.000.000,00)	94,43	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	89.690.000,00	84.690.000,00	(5.000.000,00)	94,43	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.690.000,00	84.690.000,00	(5.000.000,00)	94,43	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.569.394.000,00	1.540.365.920,00	(29.568.080,00)	98,12	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.193.134.000,00	1.172.565.920,00	(20.568.080,00)	98,28	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.193.134.000,00	1.172.565.920,00	(20.568.080,00)	98,28	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.193.134.000,00	1.172.565.920,00	(20.568.080,00)	98,28	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Sekwan	120.000.000,00	116.000.000,00	(4.000.000,00)	96,67	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	116.000.000,00	(4.000.000,00)	96,67	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	116.000.000,00	(4.000.000,00)	96,67	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04	Penyelenggaraan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	567.602.500,00	553.965.000,00	(13.637.500,00)	97,60	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02	Pelaksanaan Reses	567.602.500,00	553.965.000,00	(13.637.500,00)	97,60	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	567.602.500,00	553.965.000,00	(13.637.500,00)	97,60	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	567.602.500,00	553.965.000,00	(13.637.500,00)	97,60	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.06	Fasilitasi Tugas DPRD	3.427.186.000,00	3.395.148.210,00	(32.037.790,00)	99,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.427.186.000,00	3.385.129.210,00	(42.056.790,00)	98,77	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.427.186.000,00	3.385.129.210,00	(42.056.790,00)	98,77	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.427.186.000,00	3.385.129.210,00	(42.056.790,00)	98,77	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.894.793.050,00)	(26.755.402.510,00)	1.139.390.540,00	95,92	

Scanned by CamScanner

KECAMATAN KPGD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 . 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kota Padang Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.939.607.000,00	2.876.170.107,00	(63.436.901,00)	97,84	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.692.484.500,00	2.662.459.727,01	(29.974.051,00)	98,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	2.198.249.197,00	2.186.261.293,00	(11.987.904,00)	99,46	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.198.249.197,00	2.186.261.293,00	(11.987.904,00)	99,46	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.198.249.197,00	2.186.261.293,00	(11.987.904,00)	99,46	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.198.249.197,00	2.186.261.293,00	(11.987.904,00)	99,46	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	194.190.559,00	184.590.326,00	(9.600.244,00)	95,06	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.811,00	1.999.000,00	(811,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.999.811,00	1.999.000,00	(811,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.811,00	1.999.000,00	(811,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.03	Penyediaan Perlalan Rumah Tangga	1.969.920,00	1.950.000,00	(19.920,00)	99,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.969.920,00	1.950.000,00	(19.920,00)	99,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000,00)	99,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.910.850,00	9.906.275,00	(4.575,00)	99,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.910.850,00	9.906.275,00	(4.575,00)	99,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.910.850,00	9.906.275,00	(4.575,00)	99,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.621.088,00	151.037.050,00	(9.592.038,00)	94,03	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	160.629.988,00	151.037.050,00	(9.592.938,00)	94,03	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.629.988,00	151.037.050,00	(9.592.938,00)	94,03	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.099.750,00	24.671.159,00	(5.428.591,00)	81,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.999.750,00	16.571.159,00	(5.428.591,00)	75,32	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.999.750,00	16.571.159,00	(5.428.591,00)	75,32	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.999.750,00	16.571.159,00	(5.428.591,00)	75,32	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelatihan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.985.072,00	257.036.950,00	(2.950.122,00)	98,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.995.500,00	52.513.950,00	(2.481.550,00)	95,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	54.995.500,00	52.513.950,00	(2.481.550,00)	95,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.995.500,00	52.513.950,00	(2.481.550,00)	95,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.989.572,00	199.896.000,00	(93.572,00)	99,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	1.340.000,00	(80.000,00)	94,37	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.420.000,00	1.340.000,00	(80.000,00)	94,37	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.2	BELANJA MODAL	198.569.572,00	198.556.000,00	(13.572,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.569.572,00	198.556.000,00	(13.572,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.908.772,00	14.927.000,00	(72.772,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.999.272,00	14.927.000,00	(72.272,00)	99,51	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.999.272,00	14.927.000,00	(72.272,00)	99,51	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	40.429.840,00	45.299.000,00	(3.130.840,00)	-0,52	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.080.000,00	22.040.000,00	(40.000,00)	99,82	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.080.000,00	22.040.000,00	(40.000,00)	99,82	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	22.080.000,00	22.040.000,00	(40.000,00)	99,82	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	22.040.000,00	(40.000,00)	99,82	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	25.749.840,00	22.650.000,00	(3.099.840,00)	87,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.749.840,00	22.650.000,00	(3.099.840,00)	87,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.749.840,00	22.650.000,00	(3.099.840,00)	87,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.749.840,00	22.650.000,00	(3.099.840,00)	87,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	51.022.760,00	50.981.700,00	(41.060,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	51.022.760,00	50.981.700,00	(41.060,00)	99,92	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.022.760,00	50.981.700,00	(41.060,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	51.022.760,00	50.981.700,00	(41.060,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.022.760,00	50.981.700,00	(41.060,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	105.170.200,00	104.969.760,00	(200.440,00)	99,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	105.170.200,00	104.969.760,00	(200.440,00)	99,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	54.070.940,00	53.889.760,00	(180.540,00)	99,67	

Powered by SiskeuDes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	54.070.000,00	53.889.760,00	(180.240,00)	99,67
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.070.000,00	53.889.760,00	(180.240,00)	99,67
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 05.2.01.06	Pelaksanaan Tugas Camat Koordinasi Kampung di Kecamatan	9.490.000,00	9.490.000,00	(10.000,00)	99,77
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.499.900,00	9.490.000,00	(9.900,00)	99,77
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.499.900,00	9.490.000,00	(9.900,00)	99,77
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.529.700,00	12.409.000,00	(110.700,00)	99,12
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.179.700,00	12.469.000,00	(110.700,00)	99,12
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.099.800,00	2.090.000,00	(100.800,00)	98,04
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.099.800,00	2.090.000,00	(109.800,00)	98,04
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.099.800,00	2.090.000,00	(109.800,00)	98,04
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.579.000,00	6.579.000,00	(900,00)	99,99
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.579.000,00	6.579.000,00	(900,00)	99,99
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.579.900,00	6.579.000,00	(900,00)	99,99
7.01 . 3-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penertiban dan Penegakan Atas Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.15 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.809.037.068,00)	(2.876.100.000,00)	33.400.901,00	96,85

Scanned by Sindo

KECAMATAN SUNGAI PAGU

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Sungai Pagu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2,0 01 , 5	BELANJA DAERAH	2.323.230.743,00	2.484.696.454,00	(38.341.295,00)	98,48	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.253.501.493,00	2.241.907.504,00	(11.593.991,00)	98,48	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.981.528.129,00	1.974.591.367,00	(6.936.762,00)	99,65	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.921.528.129,00	1.915.087.867,00	(6.440.262,00)	99,66	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2.02 01 , 5.1	BELANJA OPERASI	1.921.528.129,00	1.915.087.867,00	(6.440.262,00)	99,66	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2.02 01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	1.921.528.129,00	1.915.087.867,00	(6.440.262,00)	99,66	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	59.463.500,00	(536.500,00)	99,11	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2 02 02 , 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.463.500,00	(536.500,00)	99,11	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2.02 02 , 5 1 1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	49.566.000,00	(534.000,00)	98,93	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.897.500,00	(1.500,00)	99,98	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.402.620,00	114.780.960,00	(653.000,00)	99,84	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.998.000,00	(2.000,00)	99,93	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.998.000,00	(2.000,00)	99,93	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.998.000,00	(2.000,00)	99,93	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.483.860,00	(16.140,00)	99,91	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	12.599.140,00	12.583.000,00	(16.140,00)	99,87	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.599.140,00	12.583.000,00	(16.140,00)	99,87	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.02 , 5.2	BELANJA MODAL	4.900.860,00	4.900.860,00	0,00	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.02 , 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.900.860,00	4.900.860,00	0,00	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	3.720.920,00	3.708.500,00	(12.420,00)	99,67	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.02 , 01.2.06.03 , 5.1	BELANJA OPERASI	3.720.920,00	3.708.500,00	(12.420,00)	99,67	

Printed By Sinda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.771.920,00	3.700.500,00	(12.420,00)	99,67	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.900.000,00	7.885.000,00	(15.000,00)	99,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.900.000,00	7.885.000,00	(15.000,00)	99,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.885.000,00	(15.000,00)	99,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.281.300,00	142.641.800,00	(539.100,00)	99,59	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	142.281.300,00	142.003.600,00	(588.100,00)	99,59	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.0- . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	142.281.700,00	142.569.800,00	(388.100,00)	99,80	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.450.746,00	12.441.797,00	(2.008.949,00)	86,10	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.450.746,00	10.441.797,00	(2.008.949,00)	83,86	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.450.746,00	10.441.797,00	(2.008.949,00)	83,86	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.746,00	10.441.797,00	(2.008.949,00)	83,86	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.120.000,00	80.045.380,00	(2.074.620,00)	97,47	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	42.935.380,00	(2.064.620,00)	95,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	42.935.380,00	(2.064.620,00)	95,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.935.380,00	(2.064.620,00)	95,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	5.980.000,00	(10.000,00)	99,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.350.000,00	58.959.750,00	(4.390.250,00)	93,07	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.250.000,00	27.140.000,00	(110.000,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertak	27.250.000,00	27.140.000,00	(110.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	27.140.000,00	(110.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	27.140.000,00	(110.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.100.000,00	29.679.750,00	(5.420.250,00)	84,56	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.03	Peningkatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.100.000,00	28.819.750,00	(6.280.250,00)	82,11	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	28.819.750,00	(6.280.250,00)	82,11	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	28.819.750,00	(6.280.250,00)	82,11	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.000.000,00	27.151.900,00	(7.848.100,00)	77,58	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.000.000,00	27.151.900,00	(7.848.100,00)	77,58	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	4.880.900,00	(119.100,00)	97,62	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.880.900,00	(119.100,00)	97,62	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.880.900,00	(119.100,00)	97,62	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.03	Peningkatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	22.271.000,00	(7.729.000,00)	74,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.271.000,00	(7.729.000,00)	74,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.271.000,00	(7.729.000,00)	74,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.000.000,00	6.974.280,00	(25.720,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.000.000,00	6.974.280,00	(25.720,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	6.974.280,00	(25.720,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.974.280,00	(25.720,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.974.280,00	(25.720,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	136.378.254,00	124.221.120,00	(12.157.134,00)	91,08	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	136.378.254,00	124.221.120,00	(12.157.134,00)	91,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03	Pembinaan Perpolitikan dan Kesatuan Bangsa	50.054.254,00	50.000.000,00	(54.254,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03 . 5.2	BELANJA MODAL	3.804.254,00	3.780.000,00	(24.254,00)	99,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.804.254,00	3.780.000,00	(24.254,00)	99,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	76.000.000,00	63.889.120,00	(12.110.880,00)	84,06	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	76.000.000,00	63.889.120,00	(12.110.880,00)	84,06	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	63.889.120,00	(12.110.880,00)	84,06	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.325.000,00	10.302.000,00	(23.000,00)	99,78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.325.000,00	10.302.000,00	(23.000,00)	99,78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	10.302.000,00	(23.000,00)	99,78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000,00	27.771.900,00	(228.100,00)	99,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000,00	27.771.900,00	(228.100,00)	99,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	2.977.000,00	(23.000,00)	99,23	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.977.000,00	(23.000,00)	99,23	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.977.000,00	(23.000,00)	99,23	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.100.000,00	2.025.000,00	(175.000,00)	94,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	2.825.000,00	(175.000,00)	94,17	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.825.000,00	(175.000,00)	94,17	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.974.900,00	(25.100,00)	99,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	9.974.900,00	(25.100,00)	99,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.974.900,00	(25.100,00)	99,75	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.523.200.015,00)	(2.484.886.454,00)	38.344.295,00	90,43	

Printed by SIKD

KECAMATAN SANGIR

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 . 1-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Sangir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01 . 5	BELANJA DAERAH	2.389.046.581,00	2.293.226.182,00	(95.721.399,00)	95,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.031.782.082,00	1.970.351.724,00	(61.430.358,00)	96,97	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.407.788.670,00	1.403.674.772,00	(4.113.898,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.407.788.670,00	1.403.674.772,00	(4.113.898,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.407.788.670,00	1.403.674.772,00	(4.113.898,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.407.788.670,00	1.403.674.772,00	(4.113.898,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.522.659,00	186.183.963,00	(12.338.696,00)	93,78	
7.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.988.268,00	2.988.000,00	(268,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.988.268,00	2.988.000,00	(268,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.988.268,00	2.988.000,00	(268,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.521.805,00	49.523.000,00	1.195,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	17.225.805,00	17.224.000,00	(1.805,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.225.805,00	17.224.000,00	(1.805,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	32.299.000,00	32.299.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.299.000,00	32.299.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.166,00	1.997.000,00	(166,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.997.166,00	1.997.000,00	(166,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.997.166,00	1.997.000,00	(166,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.099.000,00	14.281.500,00	182.500,00	101,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.890.880,00	11.201.600,00	(618.280,00)	95,85	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.890.880,00	14.201.600,00	(618.280,00)	95,85	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.912.540,00	120.348.263,00	(9.564.277,00)	92,64	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.00 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	129.912.540,00	120.348.263,00	(9.564.277,00)	92,64	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.912.540,00	120.348.263,00	(9.564.277,00)	92,64	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.660.261,00	15.500.217,00	(4.160.044,00)	78,84	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.710.000,00	1.650.000,00	(60.000,00)	96,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.710.000,00	1.650.000,00	(60.000,00)	96,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.650.000,00	(60.000,00)	96,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.446.261,00	5.475.217,00	(3.971.544,00)	57,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.446.261,00	5.475.217,00	(3.971.544,00)	57,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.446.261,00	5.475.217,00	(3.971.544,00)	57,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	8.539.283,00	8.375.000,00	(164.283,00)	98,08	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	8.539.283,00	8.375.000,00	(164.283,00)	98,08	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.539.283,00	8.375.000,00	(164.283,00)	98,08	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.960.192,00	301.032.872,00	(48.927.320,00)	86,01	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Untuk Jabatan	49.999.500,00	48.092.656,00	(1.906.844,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	49.999.500,00	48.092.656,00	(1.906.844,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.999.500,00	48.092.656,00	(1.906.844,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	298.960.692,00	252.940.216,00	(47.047.476,00)	84,32	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	298.960.692,00	252.940.216,00	(47.047.476,00)	84,32	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.710.000,00	6.360.000,00	(1.350.000,00)	82,48	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.005.092,00	246.580.216,00	(45.697.476,00)	84,43	
7.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.961.470,00	50.063.350,00	(898.720,00)	98,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.096.279,00	45.138.750,00	(957.529,00)	97,92	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-07.0-0 0.03 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya	46.036.279,00	46.190.750,00	(391.529,00)	98,05	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	46.036.279,00	46.198.750,00	(837.529,00)	98,05	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.036.279,00	46.198.750,00	(837.529,00)	98,05	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Oleh Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.865.200,00	4.865.000,00	(200,00)	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.865.200,00	4.865.000,00	(200,00)	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.775.200,00	3.775.000,00	(200,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.200,00	3.775.000,00	(200,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03 . 5.2	BELANJA MODAL	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	52.997.860,00	43.310.000,00	(9.687.860,00)	81,72	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.997.860,00	43.310.000,00	(9.687.860,00)	81,72	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.997.860,00	43.310.000,00	(9.687.860,00)	81,72	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	52.997.860,00	43.310.000,00	(9.687.860,00)	81,72	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.997.860,00	43.310.000,00	(9.687.860,00)	81,72	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.390.000,00	6.350.000,00	(40.000,00)	99,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.790.000,00	6.750.000,00	(40.000,00)	99,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.790.000,00	6.750.000,00	(40.000,00)	99,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.790.000,00	6.750.000,00	(40.000,00)	99,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	6.750.000,00	(40.000,00)	99,41	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	208.149.600,00	200.120.658,00	(8.028.942,00)	96,14	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai Pelimpahan Kepala Daerah	208.149.600,00	200.120.658,00	(8.028.942,00)	96,14	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01.0	Pembinaan Penanganan dan Resolusi Konflik	49.999.000,00	47.296.708,00	(2.702.292,00)	94,59	

Powered by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05 . 05.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.999.800,00	47.286.708,00	(2.713.092,00)	94,57	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1 .	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	47.286.708,00	(2.713.092,00)	94,57	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intergraksi Umat Beragama, Ras, dan Pelayanan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	149.349.000,00	144.134.000,00	(5.215.000,00)	96,51	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	149.349.000,00	144.134.000,00	(5.215.000,00)	96,51	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.020.000,00	(480.000,00)	68,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.849.000,00	143.114.000,00	(4.735.000,00)	96,80	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.500.000,00	9.400.000,00	(100.000,00)	98,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 05.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.500.000,00	9.400.000,00	(100.000,00)	98,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.400.000,00	(100.000,00)	98,95	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	19.265.560,00	14.629.000,00	(4.636.560,00)	75,93	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	19.265.560,00	14.629.000,00	(4.636.560,00)	75,93	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Perdirat Kepala Desa	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.980.000,00	1.875.000,00	(105.000,00)	94,70	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.980.000,00	1.875.000,00	(105.000,00)	94,70	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.875.000,00	(105.000,00)	94,70	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.980.000,00	1.950.000,00	(30.000,00)	98,48	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.980.000,00	1.950.000,00	(30.000,00)	98,48	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.950.000,00	(30.000,00)	98,48	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	990.000,00	900.000,00	(90.000,00)	90,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	990.000,00	900.000,00	(90.000,00)	90,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	900.000,00	(90.000,00)	90,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	990.000,00	675.000,00	(315.000,00)	68,18	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	990.000,00	675.000,00	(315.000,00)	68,18	

Powered by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	675.000,00	(315.000,00)	68,18	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagan Pemerintahan Desa	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.365.560,00	9.229.000,00	(136.560,00)	98,54	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.365.560,00	9.229.000,00	(136.560,00)	98,54	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.365.560,00	9.229.000,00	(136.560,00)	98,54	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.15 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.380.046.581,00)	(2.293.325.102,00)	86.721.298,00	96,35	

Printed By SIPD

KECAMATAN SANGIR JUJUAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN: Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Sangir Kjulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.01 , 5	BELANJA DAERAH	2.109.040.799,00	1.927.020.066,70	(182.020.732,30)	91,37	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01	Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.878.021.799,00	1.734.124.646,00	(143.897.153,00)	92,34	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.651.035.837,00	1.425.254.576,00	(139.781.261,00)	91,07	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.514.034.837,00	1.375.154.576,00	(138.880.261,00)	90,82	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	1.514.034.837,00	1.375.154.576,00	(138.880.261,00)	90,82	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	1.514.034.837,00	1.375.154.576,00	(138.880.261,00)	90,82	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.101.000,00	50.100.000,00	(1.000,00)	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	50.101.000,00	50.100.000,00	(1.000,00)	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.414.000,00	187.914.700,00	(2.499.300,00)	98,69	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.664.000,00	19.580.000,00	(84.000,00)	99,57	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	19.664.000,00	19.580.000,00	(84.000,00)	99,57	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.664.000,00	19.580.000,00	(84.000,00)	99,57	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	3.914.000,00	(186.000,00)	95,35	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.03 , 5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.814.000,00	(186.000,00)	95,35	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.03 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.814.000,00	(186.000,00)	95,35	
7.01 , 7-01.0-00.0-00.04 , 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	(1.000,00)	99,99	

Printed by SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.10.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.900.000,01	11.899.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.899.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-01.01 . 01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.850.000,00	149.621.700,00	(2.228.300,00)	98,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	151.850.000,00	149.621.700,00	(2.228.300,00)	98,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.850.000,00	149.621.700,00	(2.228.300,00)	98,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	19.991.012,00	19.990.000,00	(1.012,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.991.012,00	19.990.000,00	(1.012,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	19.991.012,00	19.990.000,00	(1.012,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.991.012,00	19.990.000,00	(1.012,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	20.250.000,00	19.513.820,00	(736.180,00)	96,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	8.263.820,00	(736.180,00)	91,82	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.000.000,00	8.263.820,00	(736.180,00)	91,82	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.263.820,00	(736.180,00)	91,82	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	82.330.950,00	81.451.450,00	(879.500,00)	98,93	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.630.950,00	51.751.650,00	(879.300,00)	98,33	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.630.950,00	51.751.650,00	(879.300,00)	98,33	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.630.950,00	51.751.650,00	(879.300,00)	98,33	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.700.000,00	29.699.800,00	(200,00)	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	29.700.000,00	29.699.800,00	(200,00)	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	29.699.800,00	(200,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.375.000,00	31.055.000,00	119.320.000,00)	61,65	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	8.610.000,00	(11.390.000,00)	43,05	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertait	20.000.000,00	8.610.000,00	(11.390.000,00)	43,05	
7.0 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	8.610.000,00	(11.390.000,00)	43,05	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.610.000,00	(11.390.000,00)	43,05	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.375.000,00	22.445.000,00	(7.930.000,00)	73,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.375.000,00	22.445.000,00	(7.930.000,00)	73,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	30.375.000,00	22.445.000,00	(7.930.000,00)	73,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	22.445.000,00	(7.930.000,00)	73,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.239.000,00	24.149.000,00	(5.090.000,00)	82,59	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.239.000,00	24.149.000,00	(5.090.000,00)	82,59	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.07	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.239.000,00	24.149.000,00	(90.000,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	24.239.000,00	24.149.000,00	(90.000,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.239.000,00	24.149.000,00	(90.000,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7.01.0-00.0-00.04 . 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	132.010.000,00	129.049.520,00	(2.160.480,00)	98,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	132.010.000,00	129.849.520,00	(2.160.480,00)	98,36	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	47.510.000,00	47.510.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	47.510.000,00	47.510.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.510.000,00	47.510.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.04	Pembinaan Ketentraman, Ancaman dan Intrusi, Untuk Bela Negara, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80.000.000,00	77.839.520,00	(2.160.480,00)	97,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	77.839.520,00	(2.160.480,00)	97,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	77.839.520,00	(2.160.480,00)	97,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Turun Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.395.000,00	7.842.000,00	(5.553.000,00)	58,54	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.04 . 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.395.000,00	7.842.000,00	(5.553.000,00)	58,54	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Perpanjangan Kepala Desa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	470.000,00	(1.530.000,00)	23,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	470.000,00	(1.530.000,00)	23,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	470.000,00	(1.530.000,00)	23,50	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Preview By Siap99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.395.000,00	7.372.000,00	(23.000,00)	99,69	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.395.000,00	7.372.000,00	(23.000,00)	99,69	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.395.000,00	7.372.000,00	(23.000,00)	99,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.102.040.356,03)	(1.927.020.056,00)	182.020.400,00	91,67	

Printed by SIPD

KECAMATAN SANGIR BATANG HARI

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal 20 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Sangir Batang Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.01 5	BELANJA DAERAH	2.594.983.287,00	2.322.836.158,00	(272.147.129,00)	97,22	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01	Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.312.714.261,00	2.242.015.353,00	(70.698.908,00)	96,94	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.951.352.257,00	1.895.671.398,00	(55.680.859,00)	97,10	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.951.352.257,00	1.895.671.398,00	(55.680.859,00)	97,10	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.01 5	BELANJA OPERASI	1.951.352.257,00	1.895.671.398,00	(55.680.859,00)	97,10	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.01 5.1.1	Belanja Pegawai	1.951.352.257,00	1.895.671.398,00	(55.680.859,00)	97,10	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.02 5	BELANJA OPERASI	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.02 5.1.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.02.02 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.459.150,00	213.470.150,00	(12.989.000,00)	94,26	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.005.750,00	3.005.750,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.01 5	BELANJA OPERASI	3.005.750,00	3.005.750,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.01 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.005.750,00	3.005.750,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000,00	34.336.000,00	(2.664.000,00)	92,80	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.02 5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.02 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.02 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.02 5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	22.336.000,00	(2.664.000,00)	89,34	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.02 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	22.336.000,00	(2.664.000,00)	89,34	
7.01 7-01.0-00.0-00.05 01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.008.400,00	10.008.400,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.008.400,00	10.008.400,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.008.400,00	10.008.400,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.445.000,00	161.120.000,00	(10.325.000,00)	93,98	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	171.445.000,00	161.120.000,00	(10.325.000,00)	93,98	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	171.445.000,00	161.120.000,00	(10.325.000,00)	93,98	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.3.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.772.360,00	55.405.000,00	(367.360,00)	99,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05	Pengadaan Meja	10.716.000,00	10.600.000,00	(116.000,00)	98,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	10.716.000,00	10.600.000,00	(116.000,00)	98,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.716.000,00	10.600.000,00	(116.000,00)	98,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.598.000,00	24.500.000,00	(98.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	24.598.000,00	24.500.000,00	(98.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.598.000,00	24.500.000,00	(98.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.428.960,00	20.300.000,00	(128.960,00)	99,37	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.11 . 5.2	BELANJA MODAL	20.428.960,00	20.300.000,00	(128.960,00)	99,37	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.428.960,00	20.300.000,00	(128.960,00)	99,37	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.150.000,00	18.467.055,00	(682.944,00)	96,44	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000,00	8.822.956,00	(677.044,00)	92,87	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	8.822.956,00	(677.044,00)	92,87	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	8.822.956,00	(677.044,00)	92,87	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.400.000,00	7.395.000,00	(5.000,00)	99,93	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	7.395.000,00	(5.000,00)	99,93	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.395.000,00	(5.000,00)	99,93	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.300.000,00	58.708.594,00	(1.591.406,00)	97,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.01	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.300.000,00	58.708.854,00	(1.591.146,00)	97,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	60.300.000,00	58.708.854,00	(1.591.146,00)	97,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.300.000,00	58.708.854,00	(1.591.146,00)	97,36	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22.928.000,00	22.876.000,00	(52.000,00)	99,77	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.438.000,00	15.386.000,00	(52.000,00)	99,66	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.438.000,00	15.386.000,00	(52.000,00)	99,66	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	15.438.000,00	15.386.000,00	(52.000,00)	99,66	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.438.000,00	15.386.000,00	(52.000,00)	99,66	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02.03	Peningkatan Fleksibilitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	54.932.000,00	53.999.540,00	(932.460,00)	98,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.932.000,00	53.999.540,00	(932.460,00)	98,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditentukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	54.932.000,00	53.999.540,00	(932.460,00)	98,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	54.932.000,00	53.999.540,00	(932.460,00)	98,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.932.000,00	53.999.540,00	(932.460,00)	98,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	135.319.000,00	135.105.240,00	(213.760,00)	99,84	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	135.319.000,00	135.105.240,00	(213.760,00)	99,84	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	44.750.000,00	44.620.000,00	(130.000,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	44.750.000,00	44.620.000,00	(130.000,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.750.000,00	44.620.000,00	(130.000,00)	99,71	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.04	Pembinaan Pendidikan Ketahanan, dan Pemberdayaan Unsur Bangsa, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80.819.000,00	80.735.240,00	(83.760,00)	99,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	80.819.000,00	80.735.240,00	(83.760,00)	99,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.819.000,00	80.735.240,00	(83.760,00)	99,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.06	Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor/Unit Pimpinan di Kecamatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	62.540.000,00	62.290.000,00	(250.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	62.540.000,00	62.290.000,00	(250.000,00)	99,60	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.440.000,00	26.240.000,00	(200.000,00)	99,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	26.440.000,00	26.240.000,00	(200.000,00)	99,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.440.000,00	26.240.000,00	(200.000,00)	99,24	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.04	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.050.000,00	19.800.000,00	(50.000,00)	99,75	

Printed By SiAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.050.000,00	19.000.000,00	(50.000,00)	99,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	19.000.000,00	(50.000,00)	99,75	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.594.983.263,00)	(2.522.035.100,00)	72.147.128,00	97,22	

Powered by SiPD

KECAMATAN PAUH DUO

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Pauh Duo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.01 - 5	BELANJA DAERAH	2.143.045.550,00	2.123.361.301,00	(19.698.255,00)	99,08	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.390.406.705,00	1.375.038.861,00	(14.377.525,00)	98,74	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.611.971.406,00	1.600.200.178,00	(11.761.228,00)	99,27	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.871.406,00	1.522.108.178,00	(11.763.228,00)	99,23	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.01 - 5.1	BELANJA OPERASI	1.533.871.406,00	1.522.108.178,00	(11.763.228,00)	99,23	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.01 - 5.1.1	Belanja Pegawai	1.533.871.406,00	1.522.108.178,00	(11.763.228,00)	99,23	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.09 - 5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.02.09 - 5.1.1	Belanja Pegawai	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.458.689,00	182.023.107,00	(435.582,00)	99,71	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.496.370,00	3.492.500,00	(3.870,00)	99,89	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.09 - 5.1	BELANJA OPERASI	3.496.370,00	3.492.500,00	(3.870,00)	99,89	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.09 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.496.370,00	3.492.500,00	(3.870,00)	99,89	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.889.520,00	15.889.000,00	(520,00)	100,00	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.02 - 5.2	BELANJA OPERASI	15.889.520,00	15.889.000,00	(520,00)	100,00	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.02 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.889.520,00	15.889.000,00	(520,00)	100,00	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.993.900,00	4.987.500,00	(6.396,00)	99,83	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.03 - 5.1	BELANJA OPERASI	4.993.900,00	4.987.500,00	(6.396,00)	99,83	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.03 - 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.993.900,00	4.987.500,00	(6.396,00)	99,83	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.231.200,00	9.166.800,00	(64.400,00)	99,30	
7.01 - 7-01.0-00.0-00.06 - 01.2.06.05 - 5.1	BELANJA OPERASI	9.231.200,00	9.166.800,00	(64.400,00)	99,30	

Created By SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Perang dan Jasa	9,2[illegible] 200,00	9.168.000,00	([illegible]400,00)	99,30	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.870.211,00	128.487.807,00	(382.406,00)	99,70	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	128.870.211,00	128.487.807,00	(382.406,00)	99,70	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	128.870.211,00	128.487.807,00	(382.406,00)	99,70	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.453.960,00	25.375.400,00	(78.560,00)	99,69	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Pengadaan Alat dan Mesin	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.753.860,00	17.675.000,00	(78.860,00)	99,56	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.10 . 5.2	BELANJA MODAL	17.753.860,00	17.675.000,00	(78.860,00)	99,56	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Pengadaan dan Mesin	17.753.860,00	17.675.000,00	(78.860,00)	99,56	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.452.600,00	9.315.000,00	(1.137.600,00)	89,12	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.793.000,00	5.140.000,00	(653.000,00)	88,73	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.793.000,00	5.140.000,00	(653.000,00)	88,73	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.793.000,00	5.140.000,00	(653.000,00)	88,73	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.659.600,00	2.175.000,00	(484.600,00)	81,78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.659.600,00	2.175.000,00	(484.600,00)	81,78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.659.600,00	2.175.000,00	(484.600,00)	81,78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.040.251,00	73.107.576,00	(932.675,00)	98,74	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.041.509,00	43.607.576,00	(433.933,00)	99,01	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	44.041.509,00	43.607.576,00	(433.933,00)	99,01	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.041.509,00	43.607.576,00	(433.933,00)	99,01	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.998.742,00	29.500.000,00	(498.742,00)	98,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7.01.0.00.0.00.06 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	29.998.742,00	29.500.000,00	(498.742,00)	98,34	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.998.742,00	29.500.000,00	(498.742,00)	98,34	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	97.070.500,00	95.708.300,00	(1.362.200,00)	97,81	
7.01 . 7.01.0.00.0.00.06 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.450.800,00	40.105.000,00	(1.345.800,00)	96,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.450.800,00	40.105.000,00	(1.345.800,00)	96,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	41.450.800,00	40.105.000,00	(1.345.800,00)	96,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.450.800,00	40.105.000,00	(1.345.800,00)	96,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.619.700,00	15.603.300,00	(16.400,00)	99,90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Non Usaha	12.719.800,00	12.704.300,00	(15.500,00)	99,88	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.719.800,00	12.704.300,00	(15.500,00)	99,88	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.719.800,00	12.704.300,00	(15.500,00)	99,88	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.899.900,00	2.899.000,00	(900,00)	99,97	
7.01 . 7.01.0.00.0.00.06 . 02.2.04.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.899.900,00	2.899.000,00	(900,00)	99,97	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.899.900,00	2.899.000,00	(900,00)	99,97	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.741.700,00	46.056.000,00	(685.700,00)	98,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.661.900,00	40.641.000,00	(1.020.900,00)	97,55	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.661.900,00	40.641.000,00	(1.020.900,00)	97,55	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	41.661.900,00	40.641.000,00	(1.020.900,00)	97,55	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.661.900,00	40.641.000,00	(1.020.900,00)	97,55	
7.01 . 7.01.0.00.0.00.06 . 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.579.800,00	6.215.000,00	(364.800,00)	94,45	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.579.800,00	6.215.000,00	(364.800,00)	94,45	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.579.800,00	6.215.000,00	(364.800,00)	94,45	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.579.800,00	6.215.000,00	(364.800,00)	94,46	
7.01 . 7.01.0.00.0.00.06 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	

Created By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.06 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kodim dan kegiatan kegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 7-01.0-00.0-00.06 04.2.01.01 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	122.318.670,00	120.843.140,00	(1.475.530,00)	98,79	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	122.318.670,00	120.843.140,00	(1.475.530,00)	98,79	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.01	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Bangsa	71.293.670,00	70.148.000,00	(1.145.670,00)	98,39	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	70.993.670,00	70.148.000,00	(845.670,00)	98,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.993.670,00	70.148.000,00	(845.670,00)	98,81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.01 . 5.2	BELANJA MODAL	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.01	Pembiayaan Kegiatan Antarsektor dan Infrastruktur, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	41.024.900,00	40.874.440,00	(150.460,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	41.024.900,00	40.874.440,00	(150.460,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.024.900,00	40.874.440,00	(150.460,00)	99,63	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor/Camat di Kecamatan	9.999.900,00	9.819.900,00	(180.000,00)	98,20	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.999.900,00	9.819.900,00	(180.000,00)	98,20	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900,00	9.819.900,00	(180.000,00)	98,20	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.261.970,00	17.165.000,00	(1.096.970,00)	93,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.261.970,00	17.165.000,00	(1.096.970,00)	93,99	
7.01 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.162.200,00	4.912.200,00	(250.000,00)	95,16	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.162.200,00	4.912.200,00	(250.000,00)	95,16	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.162.200,00	4.912.200,00	(250.000,00)	95,16	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	

Powered By Sinda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7.01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.970.000,00	(30.000,00)	98,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.970.000,00	(30.000,00)	98,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,01	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.999.800,00	1.429.800,00	(570.000,00)	71,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.999.800,00	1.429.800,00	(570.000,00)	71,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	1.429.800,00	(570.000,00)	71,50	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.099.900,00	8.853.000,00	(246.900,00)	97,29	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	9.099.900,00	8.853.000,00	(246.900,00)	97,29	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.099.900,00	8.853.000,00	(246.900,00)	97,29	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.15 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.140.049.556,00)	(2.121.351.301,00)	18.698.255,00	99,08	

Printed By SiKD

KECAMATAN SANGAIR BALAI JANGGO

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 1
Tanggal : 20 [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 [illegible] Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : [illegible] Kecamatan Sangir Batang Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	6 = 4 - 3	8	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.132.451.708,00	2.051.181.888,00	(81.269.820,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.950.701.708,00	1.866.156.088,00	(84.545.620,00)	95,67	
7.01 . 7.01.0.00.0-00.07 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.460.348.148,00	1.377.119.238,00	(83.228.910,00)	94,30	
7.01 . 7.01.0.00.0-00.07 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.409.468.148,00	1.326.239.238,00	(83.228.910,00)	94,10	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.409.468.148,00	1.326.239.238,00	(83.228.910,00)	94,10	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.409.468.148,00	1.326.239.238,00	(83.228.910,00)	94,10	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.880.000,00	50.880.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.880.000,00	50.880.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7.01.0.00.0-00.07 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.603.525,00	198.452.417,00	(211.111,00)	99,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.752.000,00	16.698.150,00	(53.850,00)	99,68	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	13.752.000,00	13.740.000,00	(12.000,00)	99,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.752.000,00	13.740.000,00	(12.000,00)	99,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.02 . 5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	2.958.150,00	(41.850,00)	98,61	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.958.150,00	(41.850,00)	98,61	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.590.660,00	1.580.400,00	(700,00)	99,99	

Printed by SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAHAN / (PENGURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.999.500,00	1.998.800,00	(700,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.05.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	1.998.800,00	(700,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.011.965,00	166.855.462,00	(156.503,00)	99,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	167.011.965,00	166.855.462,00	(156.503,00)	99,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.011.965,00	166.855.462,00	(156.503,00)	99,91	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12.020.035,00	12.010.200,00	(9.835,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.020.035,00	12.010.200,00	(9.835,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	12.020.035,00	12.010.200,00	(9.835,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.020.035,00	12.010.200,00	(9.835,00)	99,92	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	10.000.000,00	9.975.500,00	(24.500,00)	99,75	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	4.976.500,00	(23.500,00)	99,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	4.976.500,00	(23.500,00)	99,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.976.500,00	(23.500,00)	99,53	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.998.800,00	(1.200,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	2.998.800,00	(1.200,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.998.800,00	(1.200,00)	99,96	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	208.670.000,00	208.598.938,00	(1.071.062,00)	99,49	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.670.000,00	59.436.138,00	(233.862,00)	99,61	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	59.670.000,00	59.436.138,00	(233.862,00)	99,61	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.670.000,00	59.436.138,00	(233.862,00)	99,61	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.162.800,00	(837.200,00)	99,44	

Scanned By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7.01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.320.800,00	1.820.800,00	(500.000,00)	78,46	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.840.000,00	1.340.000,00	(500.000,00)	72,83	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	480.800,00	480.800,00	0,00	100,00	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.09 . 5.2	**BELANJA MODAL**	147.670.200,00	147.342.900,00	(327.200,00)	99,77	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.09 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.670.200,00	147.342.900,00	(327.200,00)	99,77	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	54.950.000,00	49.423.000,00	(5.527.000,00)	89,94	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.07 . 02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	31.100.000,00	26.481.000,00	(4.619.000,00)	85,15	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.100.000,00	26.481.000,00	(4.619.000,00)	85,15	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	31.100.000,00	26.481.000,00	(4.619.000,00)	85,15	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	26.481.000,00	(4.619.000,00)	85,15	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.07 . 02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	23.850.000,00	22.942.000,00	(908.000,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.850.000,00	22.942.000,00	(908.000,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.850.000,00	22.942.000,00	(908.000,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	22.942.000,00	(908.000,00)	96,19	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	34.000.000,00	33.770.600,00	(229.400,00)	99,33	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.07 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.000.000,00	33.770.600,00	(229.400,00)	99,33	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.000.000,00	33.770.600,00	(229.400,00)	99,33	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.000.000,00	33.770.600,00	(229.400,00)	99,33	
7.01 . 7.01.0-00.0-00.07 . 03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.770.600,00	(229.400,00)	99,33	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	3.000.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	3.000.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Aparatur Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00	

Printed By Sinda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	157.800.000,00	156.924.600,00	(875.400,00)	99,45	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kebijakan Kepala Daerah	157.800.000,00	156.924.600,00	(875.400,00)	99,45	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.05	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.06	Pemeliharaan Kerukunan Antarsuku dan Intersuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	79.800.000,00	79.539.600,00	(260.400,00)	99,67	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	79.800.000,00	79.539.600,00	(260.400,00)	99,67	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	79.539.600,00	(260.400,00)	99,67	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000,00	11.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.400.000,00	31.997.600,00	(2.400,00)	98,89	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.000.000,00	31.997.600,00	(2.400,00)	99,99	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000,00	3.997.600,00	(2.400,00)	99,94	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.997.600,00	(2.400,00)	99,94	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.997.600,00	(2.400,00)	99,94	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Hunga Bantu Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.08 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.14 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Ruang Desa Serta Penerapan dan Penegakan Raperdes	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.15 . 5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.172.451.308,00)	(2.081.181.888,00)	91.269.420,00	95,80	

Powered by SIPKD

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 1
Tanggal : 20 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 0.0 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik
Organisasi : 5.01 , 5-01 , 0-00 , 0-00 , 0-00 , 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.22.01 , 5	BELANJA DAERAH	3.376.567.584,00	3.126.029.081,00	(250.538.503,00)	92,58	
0.01 , 0-01.0-00.0-00.01 , 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.636.853.984,00	1.517.703.787,00	(91.150.097,00)	96,36	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.334.565.509,00	1.293.021.622,00	(41.544.207,00)	96,88	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.263.565.504,00	1.222.341.622,00	(41.544.287,00)	96,71	
0.01 , 0-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	1.263.885.509,00	1.222.341.622,00	(41.544.007,00)	96,71	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.01 , 5.1.1	Belanja Pegawai	1.263.885.509,00	1.222.341.622,00	(41.544.007,00)	96,71	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.680.000,00	70.680.000,00	0,00	100,00	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	70.680.000,00	70.680.000,00	0,00	100,00	
0.01 , 0-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.1	Belanja Pegawai	70.680.000,00	70.680.000,01	0,00	100,00	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.02.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.072.175,00	214.964.527,00	(13.887.848,00)	93,93	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.126.200,00	1.080.000,00	(46.200,00)	95,90	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1	BELANJA OPERASI	1.126.200,00	1.080.000,00	(46.200,00)	95,90	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.01 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.126.200,00	1.080.000,00	(46.200,00)	95,90	
0.01 , 0-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.02	Penyediaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	29.532.175,00	29.171.677,00	(360.498,00)	98,78	
0.01 , 0-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1	BELANJA OPERASI	29.532.175,00	29.171.677,00	(360.498,00)	98,78	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.02 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.532.175,00	29.171.677,00	(360.498,00)	98,78	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.03 , 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
5.01 , 5-01.0-00.0-00.01 , 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.900.000,00	14.842.300,00	(57.700,00)	99,61	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.900.000,00	14.842.300,00	(57.700,00)	99,61	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.842.300,00	(57.700,00)	99,61	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.311.000,00	166.892.550,00	(13.418.450,00)	92,56	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	180.314.000,00	166.895.550,00	(13.418.450,00)	92,56	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.314.000,00	166.895.550,00	(13.418.450,00)	92,56	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	98,89	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.125.000,00	10.348.808,00	(4.776.192,00)	68,42	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.625.000,00	2.881.808,00	(4.743.192,00)	37,79	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.625.000,00	2.881.808,00	(4.743.192,00)	37,79	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	2.881.808,00	(4.743.192,00)	37,79	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.467.000,00	(33.000,00)	99,40	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.500.000,00	5.467.000,00	(33.000,00)	99,40	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.467.000,00	(33.000,00)	99,40	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.290.000,00	54.448.830,00	(841.170,00)	98,48	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.290.000,00	54.448.830,00	(841.170,00)	98,48	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.290.000,00	54.448.830,00	(841.170,00)	98,48	
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.290.000,00	54.448.830,00	(841.170,00)	98,48	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	164.185.000,00	163.042.725,00	(1.142.275,00)	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	164.186.000,00	163.012.725,00	(1.140.275,00)	99,30	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Cela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Gerakan Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	153.186.000,00	152.137.725,00	(1.048.275,00)	99,32	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	153.186.000,00	152.137.725,00	(1.048.275,00)	99,32	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	153.186.000,00	152.137.725,00	(1.048.275,00)	99,32	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06	Pembentukan dan Pengembangan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pengayaan dan Penanaman Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	11.000.000,00	10.905.000,00	(95.000,00)	99,14	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.905.000,00	(95.000,00)	99,14	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.905.000,00	(95.000,00)	99,14	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.030.670.900,00	960.153.069,00	(70.517.831,00)	93,16	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.030.670.900,00	960.153.069,00	(70.517.831,00)	93,16	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.030.670.900,00	960.153.069,00	(70.517.831,00)	93,16	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.030.670.900,00	960.153.069,00	(70.517.831,00)	93,16	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.392.000,00	120.004.125,00	(70.487.875,00)	64,83	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.5	Belanja Hibah	830.278.900,00	830.148.944,00	(29.956,00)	100,0	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	16.761.000,00	15.918.600,00	(842.400,00)	94,97	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	16.761.000,00	15.918.600,00	(842.400,00)	94,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.761.000,00	15.918.600,00	(842.400,00)	94,97	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	16.761.000,00	15.918.600,00	(842.400,00)	94,97	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 04.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.761.000,00	15.918.600,00	(842.400,00)	94,97	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	90.980.000,00	86.959.000,00	(3.941.000,00)	95,66	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90.900.000,00	86.959.000,00	(3.941.000,00)	95,66	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.900.000,00	86.959.000,00	(3.941.000,00)	95,66	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	90.900.000,00	86.959.000,00	(3.941.000,00)	95,66	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.900.000,00	86.959.000,00	(3.941.000,00)	95,66	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	396.505.000,00	283.051.900,00	(112.553.900,00)	71,39	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	396.505.000,00	283.051.900,00	(112.553.900,00)	71,39	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kejasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	396.505.000,00	283.051.900,00	(112.553.900,00)	71,39	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	396.505.000,00	283.051.900,00	(112.553.900,00)	71,39	
8.01 . 8.01.0.00.0-00.01 . 06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396.505.000,00	283.051.900,00	(112.553.900,00)	71,39	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.3[illegible]951.000,00)	(3.126.039.001,00)	250.120.500,00	92,59	

LAMPIRAN I.4

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Lampiran 1.4 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal 20 Mei 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	425.952.473.809,00	105.628.749.056,00	0,00	0,00
		326.981.375.210,16	112.830.448.243,54	0,00	0,00
1.01	**Pendidikan**	211.533.306.651,00	48.725.267.001,00	0,00	0,00
		205.153.032.930,00	45.388.467.562,14	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga**	211.533.306.651,00	48.725.267.001,00	0,00	0,00
		205.153.032.930,00	45.388.467.562,14	0,00	0,00
. 01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.145.811.988,00	4.812.008.313,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.145.811.988,00	4.812.008.313,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.145.811.988,00	4.812.008.313,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	188.902.107.215,00	247.566.788,00	0,00	0,00
		174.844.219.316,00	237.165.410,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	178.365.986.083,00	0,00	0,00	0,00
		171.310.942.901,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	177.197.966.083,00	0,00	0,00	0,00
		173.815.992.901,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	568.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		494.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06	Administasi Umum Perangkat Daerah	601.320.132,00	55.587.300,00	0,00	0,00
		341.334.493,00	51.530.036,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.2-19.0.00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.497.079,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0.00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.992.735,00	55.587.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	70.979.000,00	53.336.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.513.658,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.488.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.08	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	30.734.240,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyediaan Alat Tulis Kantor	237.051.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.06.10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.052.193,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.860.000,00	191.979.799,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.860.000,00	101.829.374,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.665.426,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.860.000,00	149.979.799,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.860.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	0,00	14.463.946,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.05	Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas	71.339.465,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.08	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.08.09	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	58.004.065,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.431.500,00	0,00	0,00	0,00
		164.562.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.842.463,00	0,00	0,00	0,00
		121.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.411.160,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 01.3.09.[illegible]	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.802.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.931.277,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 0.	Program Pengelolaan Pendidikan	34.540.750.436,00	46.437.911.107,00	0,00	0,00
		3.163.001.026,00	40.139.253.810,14	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.424.426.009,00	30.177.115.993,00	0,00	0,00
		2.042.975.469,00	29.214.360.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	404.732.524,00	26.350.269.378,00	0,00	0,00
		317.449.500,00	25.133.120.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.340.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		304.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	15.538.809.436,00	0.246.268.113,00	0,00	0,00
		203.696.734,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	143.014.900,00	0,00	0,00	0,00
		140.165.456,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	57.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	627.329.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.501.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	236.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.713.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.731.432.993,00	19.003.393.054,00	0,00	0,00
		3.735.417.200,00	14.952.026.819,14	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.239.407.302,00	16.710.341.022,00	0,00	0,00
		2.240.817.700,00	14.952.826.819,14	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.755.121.900,00	0,00	0,00	0,00
		573.158.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.038.606.731,00	1.283.351.132,00	0,00	0,00
		59.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Scanned by CamScanner

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.2.19.0.00.01 . 02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	495.440.800,00	0,00	0,00	0,00
		393.987.200,00	0,00	0,00	0,00
.01 . 1-01.2- 0.0-00.01 . 02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	112.053.020,00	0,00	0,00	0,00
		58.329.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.171.715.574,00	233.940.617,00	0,00	0,00
		1.201.926.533,00	171.907.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.09	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.030.233.454,00	197.940.617,00	0,00	0,00
		976.242.513,00	171.907.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.12	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.805.156.116,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		150.020.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.2.19.0.00.01 . 02.2.01.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	117.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.813.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.03.17	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	37.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.2.19.0.00.01 . 02.2.04	Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.182.360.500,00	43.431.438,00	0,00	0,00
		63.576.804,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.100.390.500,00	43.431.438,00	0,00	0,00
		61.576.804,00	0,00	0,00	0,00
1.02	**Kesehatan**	151.068.251.623,00	20.137.608.386,00	0,00	0,00
		137.486.904.344,10	18.486.230.832,08	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	**Dinas Kesehatan**	85.330.659.609,00	8.200.230.834,00	0,00	0,00
		70.685.700.120,78	1.140.083.460,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.976.232.001,78	238.846.935,00	0,00	0,00
. 02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 09.0.30	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.976.252.001,78	238.846.935,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.976.252.001,78	238.846.935,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01	**Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	37.799.731.436,00	920.658.967,00	0,00	0,00
		35.314.678.712,70	774.498.300,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 1-02.0-00.0-00.01 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	$5 505,430,198.00	0.00	0,00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 863 340,523.00	0.00	0,00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 075,160,108,00	0.00	0.00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 279,925,523.00	0,00	0.00	0.00
		430 000 000.00	0.00	0,00	0,00
		383,415,000.00	0.00	0.00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424,275,665.00	530 351 930,00	0.00	0,00
		306,260,392.00	508,054,900,00	0.00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57,349,999.00	0.00	0,00	0.00
		52,892,500,00	0.00	0,00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,606,982.00	406,393,010.00	0.00	0.00
		70,003,980.00	462,801,376.00	0.00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,078,805.00	124,358,915.00	0,00	0,00
		5,352,500.00	108,061,527.00	0.00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,020,000,00	0.00	0.00	0,00
		49,431,103.00	0,00	0.00	0.00
1.02 1-02.0-00.0-00.01 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217,000,000.00	0.00	0,00	0.00
		204,786,709.00	0.00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,092,072.00	289,910,926.00	0.00	0.00
		2,020,000,00	265,544,833,00	0.00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10,092,072.00	280,007,026,00	0.00	0,00
		2,000,000.00	255,344,992.00	0.00	0.00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,000,000,00	0,00	0.00	0,00
		82,889,508.00	0,00	0.00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	0.00	0,00	0,00
		1,866,000.00	0.00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108,000,000,00	0.00	0.00	0.00
		70,000,248,00	0.00	0.00	0.00
1.02 1-02.0-00.0-00.01 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		9,803,750.00	0.00	0.00	0.00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.986.960,00	0,00	0,00	0,00
		100.111.350,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.986.960,00	0,00	0,00	0,00
		180.111.798,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	1s 130 $08.234,00	7.379.270.971,00	0,00	0,00
		78.235.744.356,00	6.134.746.709,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.180.938.234,00	5.813.266.031,00	0,00	0,00
		4.022.484.270,00	5.000.381.508,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	35.200.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00
		12.815.000,00	222.981.045,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05	Pengembangan Puskesmas	119.035.800,00	1.265.562.240,00	0,00	0,00
		87.021.200,00	2.575.535.035,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas kesehatan Lainnya	65.400.479,00	353.021.732,00	0,00	0,00
		44.238.100,00	307.001.400,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.376.442,00	192.623.558,00	0,00	0,00
		1.210.000,00	192.392.500,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.11	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.800.000,00	303.300.000,00	0,00	0,00
		6.160.000,00	370.617.240,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	104.462.493,00	2.355.056.541,00	0,00	0,00
		59.129.800,00	2.204.943.833,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.948.379.000,00	35.749.000,00	0,00	0,00
		2.691.419.182,00	35.068.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.781.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.615.472.846,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	191.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.091.060,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.870.070.000,00	566.305.002,00	0,00	0,00
		23.628.119.617,00	225.355.217,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	573.187.117,00	0,00	0,00	0,00
		168.150.700,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	950.312.574,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	159.766.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	147.243.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26.463.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	280.079.699,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.359.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	305.612.551,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	75.808.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	192.780.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	37.501.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Akibat Penyalahgunaan Napza	133.981.548,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	97.078.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Akibat Penyalahgunaan Napza	29.479.537,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	58.260.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Hepatitis C	31.585.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	91.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Konflik dan/atau Berpotensi Konflik	10.834.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.165.922.361,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk pada Pasca Bencana	520.366.252,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penduduk pada Pasca Konflik	1.256.227.898,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	539.396.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	86.128.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.259.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	276.000.699,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.920.283.267,00	0,00	0,00	0,00
		952.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	312.342.180,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	157.393.012,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia di RS/PSTW/BPSTW/UPTD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	58.600.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	49.328.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.010.205.052,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	745.245.150,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.945.825.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	17.093.833.315,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Pemenuhan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	778.369.506,00	241.130.017,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	587.377.561,00	225.385.217,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	11.526.041.108,00	322.167.886,00	0,00	0,00
		1.461.191.127,00	0,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.564.700,00	0,00	0,00	0,00
		371.498.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.774.300,00	0,00	0,00	0,00
		104.681.600,00	0,00	0,00	0,00
		69.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.130.900,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.525.900,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.505.000,00	0,00	0,00	0,00

Printing By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	715.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.793.312,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Penyelenggaraan Kebijakan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	623.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.02.0-	Pemenuhan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	623.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.793.312,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.793.312,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	29.549.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.879.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03	Pengendalian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.064.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.064.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) selain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.549.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.814.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	13.549.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.794.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	172.002.199,00	0,00	0,00	0,00
		96.402.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.450.259,00	0,00	0,00	0,00
		15.387.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	29.450.259,00	0,00	0,00	0,00
		15.387.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.02	Pelaksanaan Survei cepat dalam rangka Operasional Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.430.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	53.060.000,00	0.00	0.00	0,00
		40.470.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 05 . 00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.571.940,00	0,00	0,00	0,00
		33.044.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.01 . 05.2.03.01	Dukungan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	89.571.940,00	0,00	0,00	0,00
		33.044.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02	**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**	67.314.592.264,00	11.927.377.565,00	0,00	0,00
		66.785.204.223,32	11.738.177.432,60	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.704.210.291,32	880.058.166,98	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.704.210.291,32	880.058.166,98	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.704.210.291,32	880.058.166,98	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	21.836.438.045,00	0,00	0,00	0,00
		21.024.878.932,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.035.430.010,00	0,00	0,00	0,00
		21.024.878.932,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.431.491.046,00	0,00	0,00	0,00
		20.923.828.932,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.947.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	45.858.154.208,00	1.937.377.565,00	0,00	0,00
		30.113.000,00	10.458.070.266,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.0.00.0-00.02 . 02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	106.540.000,00	10.354.073.305,00	0,00	0,00
		55.115.000,00	10.150.015.266,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	105.000.000,00	10.253.215.283,00	0,00	0,00
		46.555.000,00	10.059.259.366,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.68?.000,00	602.857.422,00	0,00	0,00
		9.550.000,00	396.870.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kab/Kot Dinas Daerah Kabupaten/Kota	45.711.514.298,00	1.082.504.250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	45.711.514.298,00	1.082.504.250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	30.215.020.386,00	87.904.690.177,00	0,00	0,00
		20.110.022.156,00	60.305.883.357,12	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01	**Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan**	30.215.020.386,00	87.904.690.177,00	0,00	0,00
		20.110.022.156,00	60.305.883.357,12	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	9.012.679.000,00	6.227.727.700,00	0,00	0,00
		7.311.951.991,00	4.952.351.191,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.733.130.763,00	0,00	0,00	0,00
		6.575.871.184,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.209.930.307,00	0,00	0,00	0,00
		6.051.086.104,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		521.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.0. . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.557.463,00	0,00	0,00	0,00
		307.109.724,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.697.628,00	0,00	0,00	0,00
		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.284.055,00	0,00	0,00	0,00
		25.229.301,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan	34.499.900,00	0,00	0,00	0,00
		34.443.424,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.537.296,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.928.000,00	6.227.727.700,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.01	Pengadaan Alat Besar	17.293.000,00	4.552.351.194,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	17.928.000,00	4.180.000.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.928.000,00	4.485.073.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	24.738.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	14.601.531,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	42.080.700,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	42.502.663,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.381.160,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.01	Pemeliharaan Alat Besar	35.417.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.03	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.401.040,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Alat Angkutan	27.457.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Alat Bantu	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.07	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.08	Pemeliharaan Peralatan Pertanian	860.693.809,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan Kantor	571.302.789,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.11	Pemeliharaan Rambu-rambu dan Perlengkapan Jalan	860.693.809,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.12	Pemeliharaan Peralatan Olahraga	571.302.789,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.13	Pemeliharaan Peralatan Komputer	945.306.892,00	5.716.540.720,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.14	Pemeliharaan Peralatan Studio Film dan Rekaman	926.139.400,00	5.859.002.400,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.15	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	780.997.200,00	2.209.132.710,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.16	Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran	763.997.800,00	2.207.453.400,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.17	Pemeliharaan Peralatan Kedokteran	5.040.000,00	99.999.995,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.18	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	4.910.000,00	99.679.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.19	Pemeliharaan Peralatan Kebersihan	42.780.600,00	2.109.172.115,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.20	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	42.515.000,00	2.102.574.400,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 01.2.09.46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lainnya	727.012.200,00	0,00	0,00	0,00
		711.842.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sim.ID

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.2-10.0-00.01 . 02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diberikan 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	164.799.492,00	3.597.108.010,00	0,00	0,00
		161.171.800,00	3.452.429.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.01	Penyusunan Perkara Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	22.690.000,00	50.705.994,00	0,00	0,00
		22.680.400,00	50.704.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perkotaan	30.677.102,00	1.142.624.543,00	0,00	0,00
		30.200.900,00	3.080.070.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 02.2.02.12	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	111.242.300,00	313.777.468,00	0,00	0,00
		108.210.000,00	313.776.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	8.675.932.508,00	869.201.000,00	0,00	0,00
		7.039.796.957,00	867.605.074,22	0,00	0,00
1.03 . 1.03.2-10.0-00.01 . 03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.675.932.508,00	869.200.000,00	0,00	0,00
		7.809.796.957,00	867.605.074,22	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	820.733.438,00	0,00	0,00	0,00
		505.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	20.350.500,00	869.200.000,00	0,00	0,00
		0.000.000,00	867.605.074,22	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.018.050.070,00	0,00	0,00	0,00
		7.292.895.957,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	1.471.662.900,00	0,00	0,00	0,00
		5.434.063.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.477.662.900,00	0,00	0,00	0,00
		5.434.063.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.120.401.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.684.035.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.17	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.757.258.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.749.988.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	34.189.400,00	6.566.600.400,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.625.000,00	6.444.730.935,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.05	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	34.189.400,00	6.566.600.400,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.06	Pengelolaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	31.625.000,00	6.444.400.935,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 05.2.01.07	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	34.189.400,00	5.371.400.400,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Pendirian Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31.625.000,00	5.293.042.935,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0,00	1.195.700.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.02	Pengecekan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1.100.358.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 08.2.01.10	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.200.564.650,00	14.707.644.327,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	1.859.433.506,00	12.187.757.332,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.200.564.650,00	14.707.644.327,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Bidang Jalan	1.859.433.506,00	12.187.757.332,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.03	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	340.658.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.055.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.756.985.706,00	14.707.644.327,00	0,00	0,00
		1.037.308.106,00	12.187.757.332,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.528.141.018,00	53.796.977.030,00	0,00	0,00
		4.380.679.410,00	50.595.886.421,00	0,00	0,00
		4.528.743.018,00	53.796.977.030,00	0,00	0,00
		4.380.679.410,00	50.595.886.421,00	0,00	0,00
		824.824.624,00	948.425.376,00	0,00	0,00
		321.550.000,00	635.450.000,00	0,00	0,00
		30.216.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.015.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.05	Pemeliharaan Jalan	20.262.100,00	0.00	0.00	0,00
		14.020.000,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	3.2 001 140,00	44,3?? 101 867,00	0.00	0.00
		226.021.607,00	41.437.362.200,00	0.00	0.00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	33.125.616,00	2.999 373 394,00	0.00	0.00
		32.580.000,00	2.833.303.160,00	0.00	0.00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.602.406.909,00	0,00	0.00	0.00
		1.601.963.342,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	64.992.551,00	5.523.317.172,00	0.00	0.00
		64.336.000,00	5.502.647.357,00	0.00	0.00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	27.500.000,00	0.00	0.00	0,00
		23.370.000,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.492.489.535,00	0.00	0.00	0.00
		1.491 844 761,00	0.00	0.00	0.00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	31.450.440,00	0.00	0.00	0,00
		22.465.000,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.09	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31.450.440,00	0.00	0,00	0.00
		22.465.000,00	0,00	0,00	0.00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.06	Pengelolaan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	18.244.700,00	0.00	0.00	0.00
		13.855.000,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	13.205.740,00	0.00	0.00	0.00
		8.610.000,00	0,00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	362.329.759,00	0.00	0.00	0,00
		170 047.867,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	321.793.360,00	0.00	0.00	0.00
		163.657.687,00	0.00	0.00	0.00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.01	Pelaksanaan Penangkatan Substansi Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	147.543.760,00	0.00	0.00	0,00
		62.014.007,00	0.00	0.00	0,00
1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	144.250.000,00	0,00	0,00	0.00
		100.875.000,00	0.00	0,00	0.00

Scanned By SiRiD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.09 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	29.956.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	15.536.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.09 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12.2.03.0.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	15.536.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.09 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	24.999.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 . 1.03.2-10.0-00.01 . 12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	24.999.999,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	10.024.509.275,00	8.784.000.741,00	0,00	0,00
		10.016.666.574,00	8.490.280.343,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01	**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**	10.824.509.275,00	8.784.000.741,00	0,00	0,00
		10.472.666.574,00	8.490.280.343,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.027.230.401,00	73.021.650,00	0,00	0,00
		1.025.962.463,00	65.946.694,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.474.041.081,00	0,00	0,00	0,00
		1.333.770.740,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.239.401.081,00	0,00	0,00	0,00
		1.132.686.740,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.084.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.510.320,00	72.021.650,00	0,00	0,00
		246.660.501,00	65.946.694,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.159.205,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000,00	72.021.650,00	0,00	0,00
		28.713.162,00	65.946.694,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.2-11.1-03.01 . 01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.954.320,00	0,00	0,00	0,00
		10.924.550,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERHINGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	0.00	0.00	0,00
		10.131.200,00	0.00	0.00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.424.000,00	0.00	0,00	0,00
		193.519.454,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000,00	0.00	0,00	0,00
		31.134.163,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0.00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	0.00	0,00	0,00
		18.360.103,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.00.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	0.00	0,00	0,00
		6.780.300,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.811.000,00	0.00	0,00	0,00
		221.783.000,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.070.000,00	0.00	0,00	0,00
		124.916.967,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.941.000,00	0.00	0,00	0,00
		96.866.032,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02	**Program Pengembangan Perumahan**	300.049.000,00	0.00	0,00	0,00
		209.995.300,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	282.697.000,00	0.00	0,00	0,00
		209.995.300,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	75.207.000,00	0.00	0,00	0,00
		73.015.000,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	208.490.000,00	0.00	0,00	0,00
		206.980.000,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.04	Pendataan dan Sarah Tenang Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.412.300,00	0.00	0,00	0,00
		900.000,00	0.00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	24.412.300,00	0.00	0,00	0,00
		900.000,00	0.00	0,00	0,00

Powered By Sinda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REVISI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1-04.2-11.1-01.01 . 03	**Program Kawasan Permukiman**	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.374.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-11.1-03.01 . 03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.374.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman dan Pemeliharaan Kumuh	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.374.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-11.1-03.01 . 04	**Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**	960.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		837.337.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	960.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		851.337.760,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	960.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		851.337.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	5.835.681.074,00	8.711.979.091,00	0,00	0,00
		5.491.597.291,00	8.424.331.649,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01	Dukungan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.835.681.074,00	8.711.979.091,00	0,00	0,00
		5.491.597.291,00	8.424.331.649,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.835.681.074,00	8.711.979.091,00	0,00	0,00
		5.491.597.291,00	8.424.331.649,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Pembangunan Rumah serta Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.2-11.1-03.01 . 06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	13.650.586.537,00	20.258.348.787,00	0,00	0,00
		12.654.711.045,00	20.142.186.036,30	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	9.151.439.005,00	202.716.450,00	0,00	0,00
		7.974.000.140,00	22.917.000,00	0,00	0,00

Printed by Sipd3

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	6	8
1.05 . 1.05.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.560.585.107,00	60.821.400,00	0,00	0,00
		6.467.240.038,00	30.963.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.991.839.272,00	0,00	0,00	0,00
		5.802.970.191,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.892.069.272,00	0,00	0,00	0,00
		5.787.393.104,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.325.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.071.285,00	12.605.000,00	0,00	0,00
		388.751.122,00	12.228.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.490.005,00	0,00	0,00	0,00
		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.294.900,00	12.605.000,00	0,00	0,00
		21.327.500,00	12.228.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	7.908.900,00	0,00	0,00	0,00
		7.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Sewa Gedung Kantor dan Penggandaan	19.828.840,00	0,00	0,00	0,00
		19.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		332.234.622,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570.000,00	51.019.400,00	0,00	0,00
		570.000,00	26.635.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Mebel	570.000,00	26.635.000,00	0,00	0,00
		570.000,00	26.635.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.07.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.399.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.328.800,00	0,01	0,00	0,00
		25.027.050,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.166.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	14.749.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.747.750,00	0,00	0,00	0,00
		160.122.672,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perjalanan Dinas, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.200,00	0,00	0,00	0,00
		146.120.672,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.744.550,00	0,00	0,00	0,00
		22.004.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	916.042.590,00	64.529.000,00	0,00	0,00
		697.531.150,00	60.530.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	817.029.900,00	64.529.000,00	0,00	0,00
		783.838.550,00	60.530.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum meliputi Tertib Diri dan Cegah	429.860.000,00	64.529.000,00	0,00	0,00
		422.220.450,00	60.530.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	49.996.800,00	0,00	0,00	0,00
		48.110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pengkajian dan Ketertiban Umum	709.321.900,00	0,00	0,00	0,00
		131.838.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bersumber Hak Asasi Manusia	65.881.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.303.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	139.767.200,00	0,00	0,00	0,00
		133.286.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	98.812.690,00	0,00	0,00	0,00
		28.897.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	38.812.690,00	0,00	0,00	0,00
		98.092.600,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sinda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	643.987.300,00	154.262.890,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	643.987.300,00	154.262.890,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	624.279.956,00	123.524.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	643.987.300,00	154.262.890,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	624.279.956,00	123.524.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.496.150.572,00	10.478.032.287,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.590.852.902,00	10.619.756.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.060.406.486,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.783.417.709,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi (Unit/Perseorangan Bangunan Kantor	3.203.429.844,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.134.129.723,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.086.429.644,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.032.884.723,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.02.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.245.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi (Unit/Perseorangan Bangunan Kantor	275.469.352,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.990.637,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.934.136,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.999.662,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.849.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.486.622,00	0,00	0,00	0,00
		14.485.830,00	0,00	0,00	0,00
		210.803.170,00	0,00	0,00	0,00
		210.795.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.346.618,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.036.810,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Alat Besar	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	341.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 01	**Program Penanggulangan Bencana**	249.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	194.947.058,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	31.557.427,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.03	Pengelolaan Operasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.068.208,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 03.2.02.05	Pengelolaan Pos Pos Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.557.463,00	0,00	0,00	0,00
		1.445.651.136,00	19.936.683.297,00	0,00	0,00
		907.240.004,00	19.919.269.088,30	0,00	0,00
		41.178.378,00	0,00	0,00	0,00
		24.635.625,00	0,00	0,00	0,00
		41.178.378,00	0,00	0,00	0,00
		24.635.625,00	0,00	0,00	0,00
		774.306.158,00	19.976.002.297,00	0,00	0,00
		591.704.837,00	19.919.269.088,30	0,00	0,00
		97.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.025.550,00	0,00	0,00	0,00
		13.637.600,00	11.747.000,00	0,00	0,00
		67.253.646,00	5.513.750,01	0,00	0,00
		22.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.300.900,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sri.03

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	47.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.052.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.02.07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	305.576.545,00	19.561.250.291,00	0,00	0,00
		230.519.306,00	14.913.697.334,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.02.08	Pengembangan Kawasan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	97.247.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	530.166.600,00	0,00	0,00	0,00
		280.809.482,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.03.02	Respon Cepat Operasi Bencana Kabupaten/Kota	235.246.600,00	0,00	0,00	0,00
		157.560.651,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	47.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	347.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		214.119.031,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.02 . 03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Sosial**	7.200.711.177,00	19.133.860,00	0,00	0,00
		5.044.031.381,00	17.400.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01	**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	7.200.711.177,00	19.133.860,00	0,00	0,00
		5.044.031.381,00	17.400.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.658.723.017,00	19.133.860,00	0,00	0,00
		3.541.650.143,00	17.400.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.732.234,00	0,00	0,00	0,00
		3.041.033.197,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.033.038.034,00	0,00	0,00	0,00
		2.053.283.107,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.240.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIKD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.329.193,00	0,00	0,00	0,00
		291.471.041,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pengaturan Kantor	4.999.412,00	0,01	0,00	0,00
		3.351.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.162.365,00	0,00	0,00	0,00
		70.101.121,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.499.816,00	0,00	0,00	0,00
		2.997.000,00	0,00	0,01	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.514.700,00	0,00	0,00	0,00
		18.401.344,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.132.000,00	0,00	0,00	0,00
		195.182.562,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	19.133.000,00	0,00	0,00
		0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.07.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.133.860,00	0,00	0,00
		0,00	17.400.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.128.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.597.929,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.139.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.358.929,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.229.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.816.093,00	0,00	0,00	0,00
		180.534.947,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.08.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.299.750,00	0,00	0,00	0,00
		109.482.990,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 01.2.06.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.916.240,00	0,00	0,00	0,00
		17.097.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1.06.2.13.0-00.01 . 02	**Program Pemberdayaan Sosial**	135.268.810,00	0,00	0,00	0,00
		134.813.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 02 . 00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	135.268.810,00	0,00	0,00	0,00
		134.813.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosi al Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.268.810,00	0,00	0,00	0,00
		134.813.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04	**Program Rehabilitasi Sosial**	3.160.060.410,00	0,00	0,00	0,00
		1.173.917.837,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	115.277.520,00	0,00	0,00	0,00
		100.050.050,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.01	Penyediaan Pemakaman	61.177.570,00	0,00	0,00	0,00
		62.074.550,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	46.193.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Dukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	3.060.820.920,00	0,00	0,00	0,00
		1.073.867.187,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.02.01	Penyediaan Pemakaman	3.060.820.920,00	0,00	0,00	0,00
		1.073.867.187,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	111.858.900,00	0,00	0,00	0,00
		106.301.231,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	4.982.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.365.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	4.982.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.365.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.876.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.936.231,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.876.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.936.231,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 06	**Program Penanganan Bencana**	90.315.200,00	0,00	0,00	0,00
		82.480.170,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	90.315.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 06.2.01	Penyediaan Makanan	82.498.170,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 06	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	82.498.170,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.01 . 07.2.07	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.916.010,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.2-13.0-00.0 . 07.2.01.07	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Bersejarah Kabupaten/Kota	4.841.250,00	0,00	0,00	0,00
		4.916.010,00	0,00	0,00	0,00
		4.841.250,00	0,00	0,00	0,00
		4.916.010,00	0,00	0,00	0,00
		4.841.250,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	59.247.930.469,00	26.291.232.915,00	0,00	0,00
2.07	Tenaga Kerja	46.246.303.225,00	20.141.467.595,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.744.697.506,00	554.319.896,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.492.568.899,00	379.282.940,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.670.951.114,00	554.319.896,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.486.921.199,00	379.282.940,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.139.166.103,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.890.910.614,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.076.466.103,00	0,00	0,00	0,00
		1.928.110.614,00	0,00	0,00	0,00
		62.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.345.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.707.597,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.076.006,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.076.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar/Majalah	5.385.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.06.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.799.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.569.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.328.487,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	554.319.896,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	379.282.940,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000,00	554.319.896,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.300.000,00	379.282.940,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.603.210,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	74.603.210,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		230.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.824.778,00	0,00	0,00	0,00
		230.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.824.778,00	0,00	0,00	0,00
		959.816.392,00	0,00	0,00	0,00
		922.047.800,00	0,00	0,00	0,00
		547.074.592,00	0,00	0,00	0,00
		901.300.300,00	0,00	0,00	0,00
		816.278.600,00	0,00	0,00	0,00
		800.565.300,00	0,00	0,00	0,00

Powered by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03 2.07.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Insentif dan Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	131.393.692,00	0,00	0,00	0,00
		100.720.700,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03 2.07	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21.941.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.641.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03 2.07.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21.941.800,00	0,00	0,00	0,00
		21.641.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	38.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.535.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04 2.07	Penyebaran Informasi Pasar Kerja	38.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.535.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 04 2.07.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	38.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.535.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05	**Program Hubungan Industrial**	82.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.264.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05 2.07	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	82.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.264.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.3-32.0-00.01 . 05 2.07.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Strategis/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.264.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1.596.328.080,00	0,00	0,00	0,00
		1.410.416.937,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1.560.328.080,00	0,00	0,00	0,00
		1.410.416.937,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	797.359.680,00	0,00	0,00	0,00
		687.060.065,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 2.07.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	46.068.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.310.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07 2.07.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.710.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	713.231.600,00	0,00	0,00	0,00
		620.550.766,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	712.351.060,00	0,00	0,00	0,00
		620.550.766,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03	**Program Perlindungan Perempuan**	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.822.345,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01	Peningkatan Kebijakan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.822.345,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.822.345,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	726.400.100,00	0,00	0,00	0,00
		637.832.276,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	726.400.100,00	0,00	0,00	0,00
		637.832.276,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.820.116,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26.706.400,00	0,00	0,00	0,00
		24.862.560,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	678.382.000,00	0,00	0,00	0,00
		591.649.950,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.883.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.883.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 05.2.01.01	Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.883.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	12.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.215.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 06.2.02.04	Pengelolaan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.215.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07	**Program Perlindungan Khusus Anak**	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.802.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.01	Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.802.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-14.2-08.0-00.01 . 07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.802.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**Pangan**	4.259.069.901,00	10.828.860,00	0,00	0,00
		4.071.543.063,00	10.687.500,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	4.259.069.901,00	10.828.860,00	0,00	0,00
		4.071.543.063,00	10.687.500,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01	**Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.060.379.401,00	10.828.860,00	0,00	0,00
		2.953.164.527,00	10.687.500,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.443.697.401,00	0,00	0,00	0,00
		2.368.956.254,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.315.927.401,00	0,00	0,00	0,00
		2.254.361.254,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.595.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.987.000,00	10.828.860,00	0,00	0,00
		204.288.558,00	10.687.500,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	10.828.860,00	0,00	0,00
		29.961.700,00	10.687.500,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.465.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.698.013,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN SKPKSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2-09.1-25.0-00.01 . 01.2.05.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.787.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.102.245,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.065.914,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.986.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.284.914,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.665.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.862.801,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.234.501,01	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		199.028.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.601.007,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.601.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	950.263.000,00	0,00	0,00	0,00
		926.017.726,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab./prov/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	563.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		540.036.626,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	54.534.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.589.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	458.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		450.370.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.03	Kombinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	65.557.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.380.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.426.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.02	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.031.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.02.03	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.831.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.03	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	135.172.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.108.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	39.172.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.340.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.158.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.613.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	190.494.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.765.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	115.119.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	115.119.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.340.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.424.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 04.2.02.07	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kewenangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.424.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.0-00.01 . 05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	84.933.400,00	0,00	0,00	0,00
		55.975.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 2-09.3-25.0-00.01 05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dalam Kabupaten/Kota	54.933.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09 2.09.3.25.0.00.01 05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Kabupaten/Kota	55.026.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10	**Pertanahan**	64.933.400,00	0,00	0,00	0,00
2.10 1-30.2-10.0-00.01	**Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan**	55.575.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10 1.03.2.10.0.00.01 05	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	648.869.699,00	11.303.370.871,00	0,00	0,00
2.10 1-03.2-10.0-00.01 05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	519.950.800,00	11.120.167.077,00	0,00	0,00
2.10 1.03.2.10.0.00.01 05.2.01.01	Penerapan Data Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota	648.869.699,00	11.303.370.871,00	0,00	0,00
2.10 1-03.2-10.0-00.01 05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	519.950.800,00	11.120.167.077,00	0,00	0,00
2.11	**Lingkungan Hidup**	648.869.699,00	11.303.370.871,00	0,00	0,00
2.11 1-04.2-11.1-00.01	**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**	519.950.800,00	11.120.167.077,00	0,00	0,00
2.11 1.04.2.11.1-00.01 03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	27.057.280,00	8.286.000,00	0,00	0,00
2.11 1-04.2-11.1-00.01 03.2.03	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	27.519.000,00	8.215.000,00	0,00	0,00
2.11 1.04.2.11.1-00.01 03.2.03.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	621.312.419,00	11.275.584.791,00	0,00	0,00
2.11 1-04.2-11.1-00.01 03.2.07.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	492.405.800,00	11.111.952.077,00	0,00	0,00
		3.017.054.735,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		2.480.851.263,00	30.500.000,00	0,00	0,00
		3.017.054.735,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		2.480.851.263,00	30.500.000,00	0,00	0,00
		366.394.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.805.220,00	0,00	0,00	0,00
		298.472.800,00	0,00	0,00	0,00
		50.721.040,00	0,00	0,00	0,00
		80.755.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.016.222,00	0,00	0,00	0,00
		15.252.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.249.000,00	0,00	0,00	0,00

Permendagri Sinkron

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	201.766.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.273.822,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03.01	Pembinaan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	87.922.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.161.176,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	87.922.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.161.176,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	25.140.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	21.503.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.140.100,00	0,00	0,00	0,00
		21.503.900,00	0,00	0,00	0,00
		25.140.100,00	0,00	0,00	0,00
		21.503.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	21.165.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.165.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	60.309.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.605.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawas Lingkungan Hidup	20.251.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN TIRTISAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 1-01 2-11.1-01.01 . 06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.454.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.894.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum dan Rencana PPLH	10.106.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-01 2-11.1-01.01 . 07	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH**	27.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	27.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	27.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	94.073.500,00	0,00	0,00	0,00
		77.535.314,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-01 2-11.1-01.01 . 08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.073.500,00	0,00	0,00	0,00
		77.535.314,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-01 2-11.1-01.01 . 08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	16.146.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.555.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	77.927.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.980.314,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-01 2-11.1-03.01 . 09	**Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	28.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 09.2.01	Pembentukan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Figur/Tokoh dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	09.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.820.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	13.117.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.313.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 1-01.2-11.1-03.01 . 10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13.117.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.333.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.117.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.333.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11	**Program Pengelolaan Persampahan**	2.176.473.035,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		2.165.372.329,00	30.500.000,00	0,00	0,00
2.11 . 1-01.2-11.1-03.01 . 11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.176.473.035,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		2.165.372.329,00	30.500.000,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurulangan dan Pemanfaatan Kembali	23.035.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.075.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-01.2-11.1-03.01 . 11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.120.651.675,00	0,00	0,00	0,00
		1.986.140.329,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	185.440.700,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		125.614.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00
2.11 . 1-04.2-11.1-03.01 . 11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.435.640,00	0,00	0,00	0,00
		15.335.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	4.842.400.423,00	760.627.581,00	0,00	0,00
		1.711.041.564,00	353.771.381,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	4.842.400.423,00	369.627.581,00	0,00	0,00
		4.714.841.564,00	353.771.381,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.515.381.211,00	9.560.000,00	0,00	0,00
		3.446.082.920,00	9.500.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.877.520.641,00	0,00	0,00	0,00
		2.843.408.285,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.901.118.241,00	0,00	0,00	0,00
		2.867.179.285,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.116.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Created By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.497.779,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	289.329.779,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.085.625,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.513.053,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.570.084,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.731.438,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.444.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.974.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.308.375,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.934.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.192.084,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Instalasi	87.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.075.818,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor	61.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Kesehatan	92.128.018,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Laboratorium	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Pertanian	21.247.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Studio Alam dan Komunikasi	151.205.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Olahraga	120.384.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	102.225.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Persenjataan	110.058.509,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Mesin Lainnya	19.380.200,00	0,00	0,00	0,00
		18.674.530,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2-12.0-00.0-0-0.01 . 02	**Program Pendaftaran Penduduk**	910.196.112,00	358.677.621,00	0,00	0,00
		970.519.702,00	344.271.791,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	891.361.612,00	359.677.581,00	0,00	0,00
		985.469.052,00	344.271.001,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16.096.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.874.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pencatatan, Penandatanganan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	109.095.910,00	319.101.301,00	0,00	0,00
		108.597.052,00	343.925.101,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	108.542.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelayanan Peristiwa Kependudukan	257.651.660,00	40.346.790,00	0,00	0,00
		263.421.400,00	40.346.790,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.412.500,00	0,00	0,00	0,00
		45.030.680,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.016.730,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 02.2.03.06	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	26.412.500,00	0,00	0,00	0,00
		33.233.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-0-0.01 . 03	**Program Pencatatan Sipil**	210.905.000,00	0,00	0,00	0,00
		205.291.023,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	164.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.092.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.906.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.011.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	111.274.300,00	0,00	0,00	0,00
		107.419.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	15.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.757.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	34.779.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.199.023,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SiKD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERHINGGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03 c 02.05	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	16.999.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06	Fasilitasi terkait Penerbitan Sipil	16.534.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	12.107.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02	Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.957.225,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	128.913.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	109.116.637,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.03	Fasilitasi terkait Penggunaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.970.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	11.810.350,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	110.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	94.305.807,00	0,00	0,00	0,00
		37.463.300,00	0,00	0,00	0,00
		30.048.012,00	0,00	0,00	0,00
		20.596.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.374.375,00	0,00	0,00	0,00
		52.571.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.821.250,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.821.250,00	0,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.821.250,00	0,00	0,00	0,00
		504.105.800,00	0,00	0,00	0,00
		461.599.072,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01	**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	504.1xx.900,00	0,00	0,00	0,00
		451.509.023,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03	**Program Pembinakatan Kerjasama Desa**	93.291.200,00	0,00	0,00	0,00
		60.893.250,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	75.291.200,00	0,00	0,00	0,00
		68.993.250,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	75.291.200,00	0,00	0,00	0,00
		68.993.250,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	154.683.200,00	0,00	0,00	0,00
		140.155.893,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	54.686.900,00	0,00	0,00	0,00
		149.155.893,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	110.979.900,00	0,00	0,00	0,00
		112.274.676,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	37.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.911.077,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 04.2.01.09	Penyelenggaraan Penataan, Pemangkasan dan Penebangan Pohon Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	274.184.800,00	0,00	0,00	0,00
		244.469.980,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.184.200,00	0,00	0,00	0,00
		244.419.080,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.02	Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	155.418.800,00	0,00	0,00	0,00
		138.499.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	32.567.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.974.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 1-06.2-13.0-00.01 . 05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	46.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.026.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SiAD

KODE	URAIAN TIRISAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.458.727.133,00	155.683.860,00	0,00	0,00
		4.299.125.742,00	147.911.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.458.727.133,00	155.683.860,00	0,00	0,00
		4.299.125.742,00	147.911.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.326.340.093,00	35.005.860,00	0,00	0,00
		2.620.186.456,00	32.092.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.304.021.401,00	0,00	0,00	0,00
		2.229.315.551,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.831.403,01	0,00	0,00	0,00
		2.151.260.651,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.055.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.784.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		205.504.411,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.947.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00
		19.477.700,00	15.800.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.148.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.06.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.167.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.570.211,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	19.883.860,00	0,00	0,00
		0,00	16.840.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.960.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.342.990,00	0,00	0,00	0,00
		21.357.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 01.2.09.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Powered By Sirud

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 01.2.09.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 01.2.09.03	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.946.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.547.980,01	0,00	0,00	0,00
		5.807.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.012.727,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.692.007,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.320.420,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 02	**Program Pengendalian Penduduk**	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.059.450,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 02.2.02	Pemenuhan Perlatan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.059.450,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 02.2.02.11	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Penduduk dan Pelayanan KB	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.059.450,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	1.729.925.140,00	120.000.000,00	0,00	0,00
		1.498.641.158,00	114.710.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 03.2.03	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB serta Kemitraan Institusi Lokal	588.600.200,00	0,00	0,00	0,00
		421.464.714,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 03.2.03.09	Penyelenggaraan Dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.100.714,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 03.2.03.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	133.0 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.730.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.2.09.0.00.01 . 03.2.03.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Pelaporan (Rakorlap), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	151.805.200,00	0,00	0,00	0,00
		110.735.200,00	0,00	0,00	0,00

Scanned by CamScanner

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Pelayanan KKLPK	288.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	227.890.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	187.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03	Pengadaan dan Pendistribusian Kontrasepsi dan Obat Kontraseptif serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	122.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	157.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Kebidanan dan Kewaspadaan Kegawatan	122.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	632.124.040,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	602.356.375,00	114.716.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.01	Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	169.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.14.2-08.0-00.01 . 03.2.04.02	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KRBPK di Kampung KB	161.409.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	10.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.01	Pembentukan Pelayanan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	448.556.170,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	432.807.375,00	114.716.000,00	0,00	0,00
		324.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		267.000.375,00	0,00	0,00	0,00
		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		310.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		257.079.500,00	0,00	0,00	0,00
		505.653.600,00	0,00	0,00	0,00
		176.238.344,00	0,00	0,00	0,00
		500.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		258.140.344,00	0,00	0,00	0,00
		102.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.372.844,00	0,00	0,00	0,00
		705.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.750.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.14 . 2-14.0-00.0-00.01 . 04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	20.413.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.075.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-14.2-08.0-00.01 . 04.2.02.10	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKB, BKL, UPPKS, P4K, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.413.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.075.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Perhubungan				
		6.398.022.000,00	576.061.248,00	0,00	0,00
		6.052.496.408,00	551.961.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	6.398.022.000,00	576.857.248,00	0,00	0,00
		6.052.496.408,00	551.961.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.761.045.830,00	18.411.010,00	0,00	0,00
		5.420.582.783,00	18.403.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.161.830.865,00	0,00	0,00	0,00
		4.882.968.421,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.071.809.865,00	0,00	0,00	0,00
		4.041.902.123,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000,00	0,00	0,01	0,00
		68.465.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.759.100,00	0,00	0,00	0,00
		70.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.200.180,00	0,00	0,00	0,00
		70.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.566.853,00	3.670.000,00	0,00	0,00
		227.989.021,00	3.663.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.853,00	0,00	0,00	0,00
		4.963.250,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.030.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00
		24.947.175,00	3.663.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyelenggaraan Rumah Tangga Kantor	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.485.000,00	0,00	0,00	0,00

Powered by SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.284.150,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.347.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.013.998,00	0,00	0,00	0,00
		1.250.000,00	14.241.710,00	0,00	0,00
		1.140.000,00	14.240.000,00	0,00	0,00
		1.250.000,00	14.741.310,00	0,00	0,00
		1.140.000,00	14.740.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.090.0[illegible].00	0,00	0,00	0,00
		28.825.361,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.912,00	0,00	0,00	0,00
		15.019.291,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.00.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.805.770,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		223.919.785,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.365,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	610.240.729,00	968.455.539,00	0,00	0,00
		945.814.015,00	523.160.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	09.035.129,00	460.403.071,00	0,00	0,00
		43.503.217,00	450.440.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	85.035.129,00	468.405.971,00	0,00	0,00
		43.503.247,00	150.440.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	14.519.000,00	80.051.568,00	0,00	0,00
		13.309.000,00	83.020.000,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	14.510.000,00	89.051.563,00	0,00	0,00
		13.302.000,00	83.020.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Penetapan dan Penyelenggaraan dan Perlengkapan Fasilitas Parkir	30.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.568.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Perlengkapan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.199.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.628.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.389.268,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.486.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.04	Penyelesaian Buku Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.215.068,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.628.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.716.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.08	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	350.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.678.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01	Penyusun Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.447.050,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.08.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	325.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		322.230.550,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07	Penetapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.484.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Hasil Andalalin	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.484.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09	Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.110.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	15.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.110.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.897.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02.2.12.01	Perumusan kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan kewenangan kabupaten/kota	5.000.000,00	0,01	0,00	0,00
		4.997.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03	**Program Pengelolaan Pelayaran**	23.316.450,00	0,00	0,00	0,00
		23.116.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	23.735.450,00	0,00	0,00	0,00
		23.119.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 03.2.13.01	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	23.735.450,00	0,00	0,00	0,00
		23.119.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16	**Komunikasi dan Informatika**	6.837.475.240,00	870.169.170,00	0,00	0,00
		6.442.619.041,00	861.694.375,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	6.837.475.240,00	870.169.170,00	0,00	0,00
		6.442.619.041,00	861.694.375,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	5.200.076.131,00	61.669.970,00	0,00	0,00
		5.180.469.057,00	61.219.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.834.464.047,00	0,00	0,00	0,00
		2.782.415.908,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.742.274.942,00	0,00	0,00	0,00
		2.692.845.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.02.02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.730.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.05.01	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.048.180,00	38.964.720,00	0,00	0,00
		233.448.109,00	38.500.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.988.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	21.532.200,00	38.966.720,00	0,00	0,00
		21.460.000,00	38.609.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.491.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.797.950,00	0,00	0,00	0,00
		15.894.356,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.115.002,00	0,00	0,00	0,00
		204.805.113,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	22.049.250,00	0,00	0,00
		0,00	21.950.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	22.049.250,00	0,00	0,00
		0,00	22.050.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.400.260,00	0,00	0,00	0,00
		47.209.352,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.857.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.536.652,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	10.409.999,00	0,00	0,00	0,00
		9.675.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.161.268,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.161.268,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**	1.091.196.801,00	620.089.200,00	0,00	0,00
		1.031.304.471,00	612.675.315,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01	Pengelolaan Komunikasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.091.196.801,00	620.089.200,00	0,00	0,00
		1.031.304.471,00	612.675.315,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.10	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34.433.000,00	20.561.000,00	0,00	0,00
		25.659.000,00	16.045.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	39.429.800,00	10.637.200,00	0,00	0,00
		35.067.101,00	13.350.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.10	Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	67.356.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.546.430,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.12	Penyelenggaraan Kemitraan Masyarakat, Media dan Kehumasan Komunikasi	859.554.001,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		826.419.800,00	22.240.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.17	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	290.344.200,00	560.901.300,00	0,00	0,00
		237.792.340,00	580.101.349,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	2.252.210.940,00	188.400.000,00	0,00	0,00
		2.217.849.513,00	188.400.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.901.663.308,00	0,00	0,00	0,00
		1.852.091.027,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.02	Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.035.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.909.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.871.662.308,00	0,00	0,00	0,00
		1.932.182.027,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	356.543.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00
		350.358.586,00	188.400.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.06	Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Keamanan Informasi	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.422.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pelayanan Berbasis Elektronik	231.276.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00
		230.449.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	6.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.763.016,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.16.2-20.2-21.01 . 03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	49.342.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.123.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1.646.037.350,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.781.307,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.2-21.2-21.01	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	1.646.037.350,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.781.307,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	34.489.900,00	0,00	0,00	0,00
		24.320.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.489.900,00	0,00	0,00	0,00
		24.320.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01	Pengawasan Kelurahan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangsungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.413.060,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.996.900,00	0,00	0,00	0,00
		11.907.240,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	45.060.800,00	0,00	0,00	0,00
		25.857.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.989.800,00	0,00	0,00	0,00
		15.057.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.564.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.279.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.02	Pengawasan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.407.900,00	0,00	0,00	0,00
		21.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	468.790.250,00	0,00	0,00	0,00
		416.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	480.790.250,00	0,00	0,00	0,00
		416.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 05.2.01.01	Peningkatan Penelitian dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	468.790.250,00	0,00	0,00	0,00
		416.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.295.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.295.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Perbaikan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.295.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	433.892.100,00	0,00	0,00	0,00
		346.916.219,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	170.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.697.219,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	138.102.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.572.730,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	31.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.257.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.000.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.038.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.451.219,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08	**Program Pengembangan UMKM**	593.695.400,00	0,00	0,00	0,00
		582.534.038,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	593.695.400,00	0,00	0,00	0,00
		582.534.038,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 3-31.2-17.3-30.01 . 08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	593.695.400,00	0,00	0,00	0,00
		582.534.038,00	0,00	0,00	0,00
2.18	**Penanaman Modal**	4.103.862.401,00	26.023.996,00	0,00	0,00
		3.970.018.543,00	22.196.000,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	4.103.862.401,00	26.023.996,00	0,00	0,00
		3.970.018.543,00	22.196.000,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.340.041.601,00	9.321.000,00	0,00	0,00
		3.267.116.017,00	5.500.000,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.252.580.036,00	0,00	0,00	0,00
		2.601.242.041,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.18 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.030.711.936,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.02.07	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.566.028.044,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.369.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.614.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.944.917,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	210.160.302,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.020.795,01	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.903.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.999.770,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.960.861,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.167.312,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	8.361.010,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-10.3-29.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.401.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.663.710,00	0,00	0,00	0,00
		166.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.224.801,00	0,00	0,00	0,00
		37.701.550,00	9.125.000,00	0,00	0,00
		75.526.344,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.014.650,00	9.325.000,00	0,00	0,00
		18.937.944,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		14.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.588.400,00	0,00	0,00	0,00
		111.531.370,00	0,00	0,00	0,00
		107.132.227,00	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.311.750,00	0,00	0,00	0,00
		109.161.227,00	0,00	0,00	0,00
		137.019.650,00	0,00	0,00	0,00
		108.721.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05	**Program Promosi Penanaman Modal**	57.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.692.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.692.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	37.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.692.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	220.185.590,00	0,00	0,00	0,00
		209.219.350,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	220.185.590,00	0,00	0,00	0,00
		209.219.350,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01	Penyusunan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.127.800,00	0,00	0,00	0,00
		31.906.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	102.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.639.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	85.391.990,00	0,00	0,00	0,00
		81.671.550,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 08	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	443.734.440,00	0,00	0,00	0,00
		432.231.775,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 08.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	443.734.440,00	0,00	0,00	0,00
		432.231.775,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	58.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.747.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 08.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	266.793.340,00	0,00	0,00	0,00
		257.872.380,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 08.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.611.100,00	0,00	0,00	0,00
		117.611.507,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 09	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	33.300.700,00	16.850.986,00	0,00	0,00
		30.835.500,00	16.650.000,00	0,00	0,00
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 09.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota	33.300.700,00	16.650.986,00	0,00	0,00
		30.835.500,00	16.650.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	6	8
2.18 . 2-18.3-29.0-00.01 . 06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	33.300.000,00	16.096.988,00	0,00	0,00
		30.936.500,00	76.050.000,00	0,00	0,00
2.19	**Kepemudaan dan Olah Raga**	3.501.426.720,00	1.823.645.332,00	0,00	0,00
		2.050.321.070,00	1.741.534.352,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga**	3.501.426.720,00	1.823.645.332,00	0,00	0,00
		2.050.321.070,00	1.741.534.352,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	746.797.800,00	0,00	0,00	0,00
		593.508.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01	Penyelarasan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kreatif Kabupaten/Kota	746.797.800,00	0,00	0,00	0,00
		593.508.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdaya Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	257.096.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.273.100,01	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	400.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		436.235.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	2.433.147.120,00	1.823.645.332,00	0,00	0,00
		1.895.693.170,00	1.741.534.352,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.300.500,00	1.823.645.332,00	0,00	0,00
		178.811.450,00	1.741.534.352,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	179.308.500,00	1.823.645.332,00	0,00	0,00
		138.811.450,00	1.741.534.352,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.106.897.160,00	0,00	0,00	0,00
		876.021.460,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	285.166.700,00	0,00	0,00	0,00
		229.585.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 1-01.2-19.0-00.01 . 03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	821.024.460,00	0,00	0,00	0,00
		640.005.560,00	0,00	0,00	0,00

Produk by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.19 1-01.2-19.0-00.01 03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	144.560.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Iptek Pengelenggaraan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	83.154.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	144.669.400,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Kelembagaan	83.154.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	503.050.560,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 03.2.05.01	Pengelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	280.856.560,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 04	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	503.656.560,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	503.656.560,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	438.520.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19 1-01.2-19.0-00.01 04.2.01.03	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	242.199.100,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**Statistik**	321.481.800,00	0,00	0,00	0,00
2.20 2-16.2-20.2-21.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	264.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20 2-16.2-20.2-21.01 02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	321.481.800,00	0,00	0,00	0,00
2.20 2-16.2-20.2-21.01 02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	264.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20 2-16.2-20.2-21.01 02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	121.481.800,00	0,00	0,00	0,00
		64.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.229.200,00	0,00	0,00	0,00
		95.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.229.200,00	0,00	0,00	0,00
		95.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.229.200,00	0,00	0,00	0,00
		95.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.229.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.21	**Persandian**	22.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	21.263.300,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	22.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.263.300,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.01 . 02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.22	**Kebudayaan**	21.263.300,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	1.261.046.321,00	198.160.000,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	1.084.134.748,00	196.838.900,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	791.178.021,00	198.160.000,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	691.352.948,00	196.838.900,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Kebudayaan	234.132.119,00	198.160.000,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	176.820.000,00	196.838.900,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Tradisional	234.132.719,00	198.160.000,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	176.820.000,00	196.838.900,00	0,00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Adat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		251.112.500,00	0,00	0,00	0,00
		230.252.708,00	0,00	0,00	0,00
		251.112.600,00	0,00	0,00	0,00
		238.252.709,00	0,00	0,00	0,00
		305.933.302,00	0,00	0,00	0,00
		214.200.240,00	0,00	0,00	0,00
		306.933.302,00	0,00	0,00	0,00
		272.260.240,00	0,00	0,00	0,00

Produced by Sistda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 00	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	342.744.300,00	0.00	0.00	0.00
		298.231.800,00	0.00	0.00	0.00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01	Pembinaan Kesenan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	342.744.300,00	0,00	0.00	0.00
		298.231.800,00	0,00	0.00	0,00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01	Pelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Asosiasi Tradisional	342.744.300,00	0.00	0,00	0.00
		298.231.800,00	0,00	0.00	0.00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	127.124.000,00	0.00	0,00	0.00
		98.550.000,00	0.00	0.00	0.00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	127.124.000,00	0,00	0.00	0.00
		98.550.000,00	0,00	0.00	0.00
2.22 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	127.124.000,00	0.00	0,00	0,00
		98.550.000,00	0.00	0,00	0.00
2.23	**Perpustakaan**	2.050.745.655,00	10.275.096.000,00	0.00	0.00
		2.823.709.227,00	7.713.419.060,06	0.00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	2.886.745.655,00	10.275.096.000,00	0,00	0,00
		2.823.709.227,00	7.713.419.060,06	0.00	0.00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.867.146.055,00	0,00	0.00	0.00
		2.647.253.427,00	0.00	0.00	0.00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.229.291.243,00	0.00	0,00	0.00
		2.222.951.700,00	0.00	0,00	0.00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.140.751.243,00	0,00	0.00	0.00
		2.135.116.700,00	0,00	0.00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.540.000,00	0.00	0.00	0,00
		87.835.000,00	0.00	0.00	0.00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.521.312,00	0.00	0.00	0,00
		194.483.570,91	0.00	0,00	0.00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penggilan Daya/Jaringan Kantor	4.494.432,00	0.00	0.00	0.00
		2.439.000,00	0,00	0.00	0.00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.969.000,00	0.00	0.00	0.00
		25.665.150,00	0.00	0.00	0.00

Powered by Sandi

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.096.209,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.912.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.994.172,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	23.077.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.104.523,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	16.437.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.368.021,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.03	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.136.500,00	0,00	0,00	0,00
		106.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.713.684,00	0,00	0,00	0,00
		96.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.773.791,00	0,00	0,00	0,00
		9.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.939.900,00	0,00	0,00	0,00
		302.005.000,00	10.275.006.000,00	0,00	0,00
		258.053.000,00	7.713.419.060,06	0,00	0,00
		302.066.800,00	10.275.006.000,00	0,00	0,00
		258.053.800,00	7.713.419.060,06	0,00	0,00
		110.702.400,00	10.275.006.000,00	0,00	0,00
		88.709.000,00	7.713.419.060,06	0,00	0,00
		171.743.800,00	0,00	0,00	0,00
		148.476.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	18.809.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.790.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01	**Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**	25.213.800,00	0,00	0,00	0,00
		25.471.950,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	26.213.800,00	0,00	0,00	0,00
		25.471.950,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	26.213.800,00	0,00	0,00	0,00
		25.471.950,00	0,00	0,00	0,00
2.24	**Kearsipan**	127.898.516,00	0,00	0,00	0,00
		121.729.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	122.898.516,00	0,00	0,00	0,00
		121.729.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02	**Program Pengelolaan Arsip**	59.939.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.468.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	59.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		59.468.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	29.999.070,00	0,00	0,00	0,00
		29.627.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.280,00	0,00	0,00	0,00
		29.841.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03	**Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**	62.959.716,00	0,00	0,00	0,00
		62.259.600,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	34.999.900,00	0,00	0,00	0,00
		34.614.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.02.01	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	34.999.900,00	0,00	0,00	0,00
		34.614.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dihentikan dan Perekaman Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	27.896.816,00	0,00	0,00	0,00
		27.645.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 03.2.03.01	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Perekaman Daerah Kecamatan	27.896.816,00	0,00	0,00	0,00
		27.645.100,00	0,00	0,00	0,00

Powered by SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3	URUSAN PEMERINTAHAN Pilihan	29.519.305.420,00	1.530.200.604,00	0,00	0,00
		26.217.398.530,00	2.287.142.210,00	0,00	0,00
3.25	Kelautan dan Perikanan	1.231.213.940,00	108.000.000,00	0,00	0,00
		1.123.506.058,00	107.800.000,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.231.213.940,00	108.000.000,00	0,00	0,00
		1.110.305.058,00	107.800.000,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.151.894.440,00	108.000.000,00	0,00	0,00
		1.113.666.458,00	107.800.000,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	320.111.240,00	0,00	0,00	0,00
		317.655.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.01.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	94.095.160,00	0,00	0,00	0,00
		91.590.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.01.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.179.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.01.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	154.024.780,00	0,00	0,00	0,00
		124.305.958,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.01	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	840.776.840,00	108.000.000,00	0,00	0,00
		820.011.040,00	107.800.000,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	221.400.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
		218.875.500,00	107.800.000,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.04.03	Penjaminan Keberadaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.543.500,00	0,00	0,00	0,00
		34.933.650,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 04.2.04.05	Pemulihan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	560.739.140,00	0,00	0,00	0,00
		554.931.708,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	67.319.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.300.800,00	0,00	0,00	0,00
3.25 . 2-08.3-25.0-00.01 . 06.2.07	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.319.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.838.600,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIPD

KODE	URAIAN BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK KELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.25 . 3-26.2-22.0-00.01 . 06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.319.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.838.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pariwisata	4.010.811.067,00	220.647.782,00	0,00	0,00
		4.560.642.334,00	193.688.377,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.813.915.067,00	220.647.782,00	0,00	0,00
		1.060.042.332,00	193.688.377,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.749.775.179,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		3.634.288.140,00	23.775.000,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.277.305.982,00	0,00	0,00	0,00
		3.196.010.220,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.165.645.982,00	0,00	0,00	0,00
		3.086.810.220,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.030.747,00	0,00	0,00	0,00
		252.926.697,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.986.190,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.092.200,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.758.735,00	0,00	0,00	0,00
		6.957.774,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.303.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.271.975,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.070.012,00	0,00	0,00	0,00
		202.239.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	23.775.000,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	23.775.000,00	0,00	0,00

Printed By SKPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.385.300,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.08.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09		25.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perjalanan Dinas, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.805.300,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.630.010,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 01.2.09.10	Penataan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.565.015,00	0,00	0,00	0,00
		116.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.436.301,00	0,00	0,00	0,00
		44.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.335.514,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	12.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.901.738,00	196.047.782,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	320.237.092,00	169.913.377,00	0,00	0,00
		31.735.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	30.620.900,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	31.735.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30.028.900,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.04	Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	319.166.738,00	196.047.782,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	480.228.742,00	169.913.377,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03	**Program Pemasaran Pariwisata**	43.049.550,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		35.930.000,00	124.720.000,00	0,00	0,00
		427.016.700,00	71.647.782,00	0,00	0,00
		406.602.750,00	45.162.573,00	0,00	0,00
		48.300.450,00	0,00	0,00	0,00
		47.790.042,00	0,00	0,00	0,00
		438.961.600,00	0,00	0,00	0,00
		421.270.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	430.001.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.01	Pengelolaan Pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	421.230.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	30.691.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	124.131.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	309.217.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 3-26.2-22.0-00.01 . 05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kembaran Pariwisata	43.020.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27	**Perumdam**	41.020.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01	**Dinas Perumdam**	34.070.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	74.765.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.806.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.366.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.976.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.700.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.034.861.502,00	492.002.938,00	0,00	0,00
		17.204.834.393,01	491.913.200,00	0,00	0,00
		17.974.052.682,00	497.540.955,00	0,00	0,00
		17.284.876.395,00	491.915.700,00	0,00	0,00
		10.135.655.691,00	6.674.300,00	0,00	0,00
		9.966.764.417,00	6.660.000,00	0,00	0,00
		9.359.095.788,00	0,00	0,00	0,00
		9.180.296.128,00	0,00	0,00	0,00
		9.117.666.788,00	0,00	0,00	0,00
		8.925.000.528,00	0,00	0,00	0,00
		237.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		378.525.356,00	0,00	0,00	0,00
		359.095.084,00	0,00	0,00	0,00
		7.998.817,00	0,00	0,00	0,00
		7.991.250,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sim01

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	78.992.400,00	0,00	0,00	0,00
		74.587.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga	10.349.144,00	0,00	0,00	0,00
		10.346.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.703.271,00	0,00	0,00	0,00
		34.703.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.416.160,00	0,00	0,00	0,00
		212.332.634,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	9.674.700,00	0,00	0,00
		0,00	9.660.000,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	9.674.700,00	0,00	0,00
		0,00	9.660.000,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.589.050,00	0,00	0,00	0,00
		80.810.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.999.050,00	0,00	0,00	0,00
		57.810.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.034.497,00	0,00	0,00	0,00
		388.580.525,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.318.300,00	0,00	0,00	0,00
		282.011.525,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.720.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.996.197,00	0,00	0,00	0,00
		70.850.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	4.927.210.474,00	261.428.280,00	0,00	0,00
		4.708.992.740,00	261.000.000,00	0,00	0,00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.817.702.950,00	0,00	0,00	0,00
		1.570.621.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK ULANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.27 . 3.27.0 00.0-00.01 . 02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.010.783,900.00	0.00	0.00	0,00
		1.000.713.134,00	0,00	0.00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	900.999.750.00	0.00	0.00	0.00
		999.991.900,00	0,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Ternak, Tanaman, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.252.535.553.00	0,00	0.00	0.00
		2.215.373.678.00	0,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Penjaminan Kemanfaatan dan Keberlanjutan SDG Hewan/Tanaman	84.150.000,00	0.00	0.00	0.00
		84.121.600,00	0.00	0.00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.329.252.803.00	0,00	0.00	0.00
		1.127.630.151.00	0.00	0.00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	999.582.750.00	0.00	0,00	0.00
		933.522.925,00	0.00	0.00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	22.499.000.00	0,00	0.00	0.00
		22.423.500.00	0,00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	22.499.000,00	0.00	0.00	0.00
		22.426.500,00	0.00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06	Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	994.339.00.,00	261.478.280,00	0.00	0,00
		960.970.530.00	261.100.000,00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	994.339.981,00	261.428.280,00	0,00	0.00
		960.970.530,00	261.100.000,00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	1.180.551.898,00	221.498.950,00	0.00	0.00
		1.080.387.843.00	224.155.200,00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	326.603.81c.00	25.000.000,00	0,00	0.00
		267.402,400.00	24.841.000,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	83.786.312,00	25.000.000.00	0.00	0,00
		82.260.230.00	24.944.000.00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	24.999.700,00	0.00	0.00	0.00
		21.445.000.00	0.00	0.00	0.00

Printed By Siskeu

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	59.986.900,00	0,00	0,00	0,00
		85.021.850,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.05 . 03.2.01.01	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Aksesbilitas dan Konektifitas Perkebunan	111.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.050.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	854.277.286,00	199.499.950,00	0,00	0,00
		837.995.443,00	199.211.200,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Usaha Tani	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.610.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	439.946.131,00	0,00	0,00	0,00
		435.713.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	110.000.240,00	0,00	0,00	0,00
		111.580.443,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	69.999.840,00	0,00	0,00	0,00
		68.302.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	50.499.372,00	199.499.950,00	0,00	0,00
		49.216.100,00	199.211.200,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	610.400.745,00	0,00	0,00	0,00
		581.697.239,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	505.903.145,00	0,00	0,00	0,00
		472.385.789,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	329.354.673,00	0,00	0,00	0,00
		296.576.439,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.548.473,00	0,00	0,00	0,00
		176.005.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	42.169.899,00	0,00	0,00	0,00
		34.910.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	42.499.999,00	0,00	0,00	0,00
		30.515.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Siska

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	70.000.000,00	0.00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	69.057.450,00	0.00	0.00	0.00
3.27 . 3.27.0-00.0-00.01 . 06	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	30.000.000,00	0.00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	69.057.450,00	0.00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01.06	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.999.950,00	0.00	0,00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	54.000.000,00	0,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.000.050,00	0.00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	Penerbitan dan Pengawasan Penampungan Usaha Pertanian	54.383.000,00	0.00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07	**Program Penyuluhan Pertanian**	54.999.950,00	0,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	54.999.950,00	0,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	47.519.000,00	0.00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelompoktan Petani di Kecamatan dan Desa	45.781.250,00	0.00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	960.092.321,00	0,00	0.00	0.00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.04	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Petani	783.900.824,00	0.00	0,00	0,00
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	950.292.324,00	0.00	0,00	0.00
		783.900.884,00	0.00	0.00	0.00
		465.916.755,00	0,00	0.00	0.00
		335.634.764,00	0,00	0.00	0,00
		148.612.650,00	0.00	0.00	0,00
		110.315.342,00	0,00	0.00	0.00
		134.093.456,00	0.00	0.00	0,00
		110.160.207,00	0.00	0,00	0,00
		34.999.950,00	0,00	0.00	0.00
		24.572.000,00	0,00	0.00	0.00
		157.539.513,00	0,00	0.00	0.00
		157.147.775,00	0.00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.29	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.29 . 2-18.3-29.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.29 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.29 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
3.29 . 2-18.3-29.0-00.01 . 05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00
3.30	**Perdagangan**	1.341.322.850,00	1.725.507.421,00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	1.341.322.850,00	1.725.507.421,00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	20.990.000,00	0.00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	13.332.500,00	0.00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.01	Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Penerbitan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.332.500,00	0.00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7.457.500,00	0.00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	7.457.500,00	0.00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	912.318.500,00	1.544.962.913,00	0.00	0.00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	880.318.500,00	1.544.962.913,00	0.00	0.00
		853.484.564,00	1.268.496.736,07	0.00	0.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERSIAGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.01	Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan	263.341.050,00	1.340.452.963,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	250.259.800,00	1.788.458.736,07	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	[illegible]	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03.2.02.01	Pengkajian dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	603.224.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.613.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	130.271.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	160.017.709,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	37.060.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21.400.150,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	16.762.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.02	Pengawasan Pengedaran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.298.900,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	18.719.100,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	111.469.500,00	0,00	0,00	0,00
		107.163.900,00	0,00	0,00	0,00
		21.479.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.817.500,00	0,00	0,00	0,00
		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.346.470,00	0,00	0,00	0,00
		35.730.900,00	0,00	0,00	0,00
		35.255.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		39.316.900,00	0,00	0,00	0,00
		35.255.700,00	0,00	0,00	0,00
		105.809.610,00	130.554.460,00	0,00	0,00
		80.984.000,00	128.521.000,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	126.908.500,00	130.554.480,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	60.987.900,00	126.521.300,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 06.2.01.02	Pengawasan/Penyidikan Metrologi Legal	57.765.500,00	3.933.180,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	37.150.400,00	126.521.000,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	69.144.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 3-31.2-17.3-30.01 . 07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	23.814.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**Perindustrian**	90.432.800,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	41.646.865,00	49.920.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	20.452.800,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.646.865,00	49.920.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90.432.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.02.02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.646.865,00	49.920.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.147.000.087,00	903.450.461,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.899.872.032,00	20.000.000,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.147.000.087,00	903.450.461,00	0,00	0,00
		3.059.072.002,00	28.799.000,00	0,00	0,00
		3.304.381.081,00	28.999.000,00	0,00	0,00
		3.251.454.779,00	28.799.000,00	0,00	0,00
		2.901.101.041,00	0,00	0,00	0,00
		2.874.700.232,00	0,00	0,00	0,00
		2.813.476.341,00	0,00	0,00	0,00
		2.757.175.232,00	0,00	0,00	0,00
		117.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		252.176.896,00	28.999.000,00	0,00	0,00
		215.432.700,00	28.799.000,00	0,00	0,00
		4.999.916,00	0,00	0,00	0,00
		4.999.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.098.000,00	28.999.000,00	0,00	0,00
		25.342.000,00	28.799.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERSURA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	10.856.150,00	0,00	0,00	0,00
		10.613.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.039.800,00	0,00	0,00	0,00
		25.516.700,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.283.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.582.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.680.950,00	0,00	0,00	0,00
		56.657.570,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.190.950,00	0,00	0,00	0,00
		51.152.573,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.403.950,00	0,00	0,00	0,00
		105.149.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.185.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.117.769,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.038.500,00	0,00	0,00	0,00
		13.466.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.570.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	680.797.000,00	954.451.461,00	0,00	0,00
		567.731.253,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	630.797.000,00	954.451.461,00	0,00	0,00
		567.731.253,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pengembangan, Penyebaran dan Pemerataan Industri	35.037.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.343.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	825.760.000,00	954.451.461,00	0,00	0,00
		543.387.453,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	102.722.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.686.000,00	0,00	0,00	0,00

Powered By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.31 . 3.31.2-17.3-30.07 . 01.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	102.722.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.685.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	102.722.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.685.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 3-31.2-17.3-30.01 . 04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	Transmigrasi	10.301.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.185.900,00	0,00	0,00	0,00
3.32 . 2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.301.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.185.900,00	0,00	0,00	0,00
3.32 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.301.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.185.900,00	0,00	0,00	0,00
3.32 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.301.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.185.900,00	0,00	0,00	0,00
3.32 . 2-07.3-32.0-00.01 . 03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Sekampung Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	10.301.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.185.900,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	61.044.283.033,00	3.047.718.586,00	0,00	0,00
		57.464.140.161,00	2.994.661.732,00	0,00	0,00
4.01	Sekretariat Daerah	34.159.905.223,00	2.937.303.146,00	0,00	0,00
		30.802.669.153,00	2.586.932.832,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	34.159.905.223,00	2.937.303.146,00	0,00	0,00
		30.802.669.153,00	2.586.932.832,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	25.575.514.467,00	2.913.293.146,00	0,00	0,00
		23.260.836.946,00	2.561.902.832,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	50.099.980,00	0,00	0,00	0,00
		39.230.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.099.980,00	0,00	0,00	0,00
		39.230.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.261.253.521,00	0,00	0,00	0,00
		10.402.101.401,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.807.033.521,00	0,00	0,00	0,00
		10.178.033.401,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		331.078.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	464.195.478,00	0,00	0,00	0,00
		449.129.670,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	357.703.000,00	0,00	0,00	0,00
		356.801.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-01.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.595.478,00	0,00	0,00	0,00
		76.400.970,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.097.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.127.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.521.840.654,00	37.321.000,00	0,00	0,00
		5.864.949.010,00	23.232.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	195.000.724,00	0,00	0,00	0,00
		195.826.093,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.578.550,00	31.321.000,00	0,00	0,00
		135.940.100,00	23.232.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	183.046.980,00	0,00	0,00	0,00
		173.839.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08	Fasilitasi Pegunjung Tamu	180.248.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.031.758,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.0.00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.818.495.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.178.052.097,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.540.000,00	2.404.377.142,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.03	Pengadaan Mebel	53.163.150,00	2.111.765.232,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.610.000,00	1.143.100.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.0.00.0-00.01 . 01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.250.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00	99.749.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.950.000,00	996.673.142,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.0.00.0-00.01 . 01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.293.110,00	943.919.232,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.201.029.408,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.032.072.374,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.910.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.08	Penyediaan Jasa Perbankan dan Keuangan	496.533.414,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	413.757.043,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas	397.090.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.760.660,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	360.505.994,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	256.215.071,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.14	Penyediaan Jasa Pengelolaan Aset Tetap Lainnya	2.049.304.211,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	2.031.071.574,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	870.125.834,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	542.071.813,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	1.601.658.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	1.491.468.621,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	486.010.792,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	460.001.042,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	106.765.386,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	106.546.396,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12	Fasilitasi Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Daerah	1.072.725.600,00	366.137.564,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.025.488.231,00	364.532.600,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	602.429.800,00	201.561.564,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	573.672.226,00	201.459.400,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13	Penataan Organisasi	417.870.000,00	161.510.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	400.408.000,00	160.273.200,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	52.020.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46.350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	335.122.050,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.01	Fasilitasi Kepemimpinan	249.454.377,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	103.387.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	78.955.127,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	111.405.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	94.971.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	120.249.950,00	0,00	0,00	0,00
		96.928.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.600.456,00	44.455.140,00	0,00	0,00
		1.350.366.819,00	44.400.000,00	0,00	0,00
		819.295.733,00	0,00	0,00	0,00
		752.911.478,00	0,00	0,00	0,00
		177.056.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.838.600,00	0,00	0,00	0,00
		500.451.704,00	44.455.440,00	0,00	0,00
		497.515.086,00	44.400.000,00	0,00	0,00
		8.221.227.244,00	0,00	0,00	0,00
		7.179.600.366,00	0,00	0,00	0,00
		316.749.582,00	0,00	0,00	0,00
		251.880.620,00	0,00	0,00	0,00
		116.689.700,00	0,00	0,00	0,00
		94.986.628,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERSANGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	30.496.180,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	21.408.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	175.665.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Pos Lintas Batas	144.295.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Program Lembaga Kesejahteraan Sosial	3.649.251.932,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Lembaga Kesejahteraan Masyarakat	6.675.409.550,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.280.678.012,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	2.036.218.518,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.334.401.220,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.241.516.740,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	3.027.956.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.581.071.930,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BUMN	255.246.330,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	240.690.780,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.04	Pengawasan dan Pengawasan Ekonomi Mikro lemah	60.112.500,00	0,00	0,00	0,00
		50.835.600,00	0,00	0,00	0,00
		155.234.650,00	0,00	0,00	0,00
		154.330.900,00	0,00	0,00	0,00
		31.085.100,00	0,00	0,00	0,00
		31.553.200,00	0,00	0,00	0,00
		563.103.512,00	21.010.500,00	0,00	0,00
		362.141.041,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		121.705.800,00	0,00	0,00	0,00
		101.710.900,00	0,00	0,00	0,00
		43.344.600,00	0,00	0,00	0,00
		39.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.502.800,00	0,00	0,00	0,00
		36.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.751.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SiMDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	91.927.970,00	0,00	0,00	0,00
		60.240.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40.334.980,00	0,00	0,00	0,00
		30.468.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54.292.980,00	0,00	0,00	0,00
		32.751.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	346.989.943,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		196.102.641,00	21.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	228.480.100,00	0,00	0,00	0,00
		77.262.058,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	92.114.080,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		81.777.220,00	21.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	26.388.167,00	0,00	0,00	0,00
		26.142.463,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**Sekretariat DPRD**	27.784.373.410,00	110.415.440,00	0,00	0,00
		26.661.771.010,00	97.628.900,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01	**Sekretariat DPRD**	27.784.373.410,00	110.415.440,00	0,00	0,00
		26.661.774.010,00	97.628.900,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	14.093.133.910,00	110.415.440,00	0,00	0,00
		14.297.705.076,00	97.628.900,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.239.610.243,00	0,00	0,00	0,00
		11.820.725.670,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.084.730.243,00	0,00	0,00	0,00
		11.753.515.670,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Scanned by CamScanner

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4-02.1-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.692.123,00	81.516.580,00	0,00	0,00
		787.498.169,00	31.668.900,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.2-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.352.001,00	0,00	0,00	0,00
		44.364.601,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.440.000,00	81.516.580,00	0,00	0,00
		131.068.040,00	71.068.900,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.145.142,00	0,00	0,00	0,00
		46.776.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		147.707.920,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.787.400,00	0,00	0,00	0,00
		210.607.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.303.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.501.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	78.898.980,00	0,00	0,00
		0,00	25.960.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.460.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.478.860,00	0,00	0,00
		0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.860.304,00	0,00	0,00	0,00
		83.751.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.860.304,00	0,00	0,00	0,00
		78.751.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.421.240,00	0,00	0,00	0,00
		332.651.446,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.835.200,00	0,00	0,00	0,00
		124.420.017,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.274.250,00	0,00	0,00	0,00
		149.036.428,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.311.250,00	0,00	0,00	0,00
		78.389.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	494.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		432.112.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan DPRD	414.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		432.112.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	317.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		306.040.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	717.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		705.040.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	12.005.021.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.000,934,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.120.062.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.681.379.704,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	7.120.062.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.681.379.704,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	208.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.970.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	84.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.685.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	31.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.595.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	89.6911.00,00	0,00	0,00	0,00
		84.690.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.565.124.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.340.593.020,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 4-02.0-00.0-00.0- . 02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.193.134.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.172.565.020,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0,00	0,01	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	252.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	567.602.500,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	551.965.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Perencanaan	567.602.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	558.955.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.407.706.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.335.129.210,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.01	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.185.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.306.129.210,00	0,00	0,00	0,00
		58.740.476.561,00	318.490.928,00	1.736.222.247,00	01.252.559.000,00
		54.233.997.520,00	579.350.428,00	3.061.094.001,00	85.911.230.179,00
		5.206.892.549,00	55.619.140,00	0,00	0,00
		1.245.139.462,00	44.000.728,00	0,00	0,00
		5.206.892.549,00	55.619.140,00	0,00	0,00
		4.545.139.462,00	44.000.728,00	0,00	0,00
		3.726.020.044,00	0,00	0,00	0,00
		3.513.901.961,00	0,00	0,01	0,00
		3.063.391.027,00	0,00	0,00	0,00
		2.996.037.961,00			
		2.947.471.927,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.870.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.020.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	249.053.610,00	30.377.390,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.511.250,00	27.005.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.931.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.918.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.518.610,00	30.512.060,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.858.250,00	27.010.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.704.398,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.771.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.052.220,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.848.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.857.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.06	Pengadaan Mebel	177.115.301,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	25.041.700,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	18.807.726,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	11.807.280,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	11.597.728,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	13.240.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00
		97.082.500,00	0,00	0,00	0,00
		44.415.736,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.862.500,00	0,00	0,00	0,00
		77.161.106,00	0,00	0,00	0,00
		16.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		255.176.965,00	0,00	0,00	0,00
		210.700.804,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.09 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perekliraasi, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.07 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.928.520,00	0,00	0,00	0,00
		122.775.565,01	0,00	0,00	0,00
		116.352.284,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	740.999.035,00	0,00	0,00	0,00
		498.206.569,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	633.332.410,00	0,00	0,00	0,00
		451.555.760,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	36.167.260,00	0,00	0,00	0,00
		22.413.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.02	Koordinasi Penelahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.564.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.661.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Antar SKPD	19.495.800,00	0,00	0,00	0,00
		11.172.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	36.267.125,00	0,00	0,00	0,00
		67.330.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	14.735.725,00	0,00	0,00	0,00
		12.148.750,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	467.871.900,00	0,00	0,00	0,00
		320.529.310,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	11.094.725,00	0,00	0,00	0,00
		75.350.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	41.804.725,00	0,00	0,00	0,00
		15.160.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	74.070.700,00	0,00	0,00	0,00
		52.305.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	36.009.200,00	0,00	0,00	0,00
		17.381.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.00 . 02.2.01.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	56.869.900,00	0,00	0,00	0,00
		15.007.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	702.776.070,00	0,00	0,00	0,00
		475.571.011,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	250.249.650,00	0,00	0,00	0,00
		133.385.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.959.900,00	0,00	0,00	0,00
		35.547.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.444.800,00	0,00	0,00	0,00
		40.062.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.760.800,00	0,00	0,00	0,00
		7.986.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.652.325,00	0,00	0,00	0,00
		9.734.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.354.050,00	0,00	0,00	0,00
		29.479.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.149.900,00	0,00	0,00	0,00
		29.042.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.922.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.341.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.596.575,00	0,00	0,00	0,00
		16.331.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	243.340.820,00	0,00	0,00	0,00
		160.001.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.091.070,00	0,00	0,00	0,00
		55.950.098,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.02	Asistensi Pengolahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.160.350,00	0,00	0,00	0,00
		10.291.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	87.027.800,00	0,00	0,00	0,00
		59.191.554,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	15.597.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.575.740,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPIPD, RPJMD dan Renja)	10.528.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.125.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.190.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.539.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11.264.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.483.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	259.478.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.071.670,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	20.101.260,00	0,00	0,00	0,00
		51.121.253,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.545.900,00	0,00	0,00	0,00
		12.084.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.420.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	15.190.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.201.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	59.766.060,00	0,00	0,00	0,00
		33.550.420,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.079.400,00	0,00	0,00	0,00
		11.719.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.408.760,00	0,00	0,00	0,00
		5.476.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.03 . 03.2.03.10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14.422.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.295.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Keuangan	23.397.831.610,00	571.464.709,00	3.036.222.240,00	87.252.530.000,00
			476.107.200,00	2.761.051.031,00	86.917.238.179,00
		22.281.946.698,00			

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5 02.0 00.0-00.05	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	23.707.933.600,00	521.464.780,00	3.796.222.947,00	87.252.559.000,00
		22.281.046.698,00	409.102.700,00	3.061.054.901,00	83.917.238.179,00
5.02 . 5 02.0-00.0-00.01 . 00	*Non Program*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37.621.151.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 05.0.00	*Non Kegiatan*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37.621.151.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 05.0.00.01	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37.621.151.000,00
5.02 . 5 02.0 00.0-00.05 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	20.627.807.266,00	521.464.780,00	0,00	0,00
		19.550.431.849,00	409.102.700,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	43.664.600,00	0,00	0,00	0,00
		39.104.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.004.600,00	0,00	0,00	0,00
		17.004.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.036.020,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5 02.0-00.0-00.05 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	19.504.541.124,00	0,00	0,00	0,00
		18.502.951.575,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.016.222.024,00	0,00	0,00	0,00
		18.223.740.029,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		334.057.150,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyiapan/Verifikasi Keuangan SKPD	16.941.600,00	0,00	0,00	0,00
		16.479.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.079.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0 00.0 00.05 . 01.2.05	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	443.349.962,00	399.999.000,00	0,00	0,00
		311.021.121,00	268.950.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5 02.0-00.0-00.05 . 01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.120.000,00	47.080.000,00	0,00	0,00
		2.120.200,00	47.850.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	3	4	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.534.100,00	331.059.000,00	0,00	0,00
		41.992.523,00	221.100.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.059.102,00	0,00	0,00	0,00
		12.161.675,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.032.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.156.400,00	0,00	0,00	0,00
		245.812.625,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	996.000,00	20.525.000,00	0,00	0,00
		500.000,00	20.202.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.07.01	Pengadaan Mebel	996.000,00	20.525.000,00	0,00	0,00
		500.000,00	20.202.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	128.381.300,00	0,00	0,00	0,00
		98.579.988,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.101.300,00	0,00	0,00	0,00
		55.891.628,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.08.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.679.340,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	502.244.705,00	141.101.709,00	0,00	0,00
		498.959.779,00	119.950.700,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.02	Pemeliharaan Alat Pengangkutan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.914.100,00	0,00	0,00	0,00
		269.912.379,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.480.000,00	120.036.780,00	0,00	0,00
		159.315.420,00	119.950.700,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.850.400,00	0,00	0,00	0,00
		29.732.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02	***Program Pengelolaan Keuangan Daerah***	2.104.807.674,00	0,00	1.736.232.247,00	87.252.559.000,00
		1.745.753.354,00	0,00	1.061.051.001,00	19.296.087.179,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01	*Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah*	1.253.923.505,00	0,00	0,00	0,00
		1.074.356.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	154.356.500,00	0,00	0,00	0,00
		137.149.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	140.782.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.031.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	40.850.100,00	0,00	0,00	0,00
		35.659.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.06	Koordinasi, Penelaahan dan Verifikasi Penyusunan DPA-SKPD	43.101.100,00	0,00	0,00	0,00
		32.851.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	308.245.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.964.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	327.321.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kerjasama tentang Anggaran	231.757.800,00	0,00	0,00	0,00
		218.513.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02	*Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*	349.206.400,00	0,00	0,00	0,00
		297.259.014,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.06	Koordinasi, Pembinaan, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.972.827,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penatausahaan/Pembinaan dan Penyaluran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.007.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	236.069.400,00	0,00	0,00	0,00
		161.690.036,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	461.027.074,00	0,00	0,00	0,00
		451.945.925,05	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.01	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	165.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.717.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	91.963.500,00	0,00	0,00	0,00
		91.503.325,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 02.2.03.07	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	61.230.271,00	0,00	0,00	0,00
		59.078.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.08 . 02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	44.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.451.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.09 . 02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	94.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.944.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04	*Penataan Sistem Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	89.750.000,00	0,00	3.736.222.247,00	87.252.558.000,00
		34.809.500,00	0,00	3.061.091.001,00	19.206.087.179,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyiapan Bahan Kerjasama	39.750.000,00	0,00	0,00	87.252.558.000,00
		34.869.500,00	0,00	0,00	19.206.087.179,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09	Pengelolaan Data Daerah dan Pembiayaan	0,00	0,00	3.736.222.247,00	0,00
		0,00	0,00	3.061.091.001,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03	***Program Pengelolaan Barang Milik Daerah***	517.351.490,00	0,00	0,00	0,00
		429.105.102,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	517.351.490,00	0,00	0,00	0,00
		429.105.102,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.284.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.549.950,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.997.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.522.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	389.610.450,00	0,00	0,00	0,00
		348.754.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	192.457.200,00	0,00	0,00	0,00
		175.761.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.573.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.472.030,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perwakilan Kabupaten/Kota	49.542.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.919.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 04	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	547.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.576.792,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*	547.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.576.792,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 04.2.01.02	Analisa dan Perumusan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	103.442.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.060.878,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 04.2.01.13	Penagihan Pajak Daerah	307.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		292.743.869,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.06 . 04.2.01.13	Pengelolaan, Pengelolaan dan Pengawasan Pajak Daerah	84.807.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.954.490,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Kepegawaian	28.720.485.605,00	141.410.000,00	0,00	0,00
		26.526.492.972,00	126.287.000,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.720.485.605,00	141.410.000,00	0,00	0,00
		26.526.492.972,00	126.287.000,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	27.230.612.715,00	141.410.000,00	0,00	0,00
		25.348.519.948,00	126.287.000,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	23.814.400.908,00	0,00	0,00	0,00
		24.909.355.348,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	17.349.003.268,00	0,00	0,00	0,00
		15.781.416.849,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-10-00.01 . 01.2.02.02	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.454.577.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.127.930.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	278.671.257,00	0,00	0,00	0,00
		273.687.994,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.139.761,00	0,00	0,00	0,00
		2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.595.640,00	0,00	0,00	0,00
		22.595.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.989.356,00	0,00	0,00	0,00
		4.987.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.368.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.359.150,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	705.508.500,00	0,00	0,00	0,00
		700.617.264,20	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	141.410.000,00	0,00	0,00
		0,00	126.387.000,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	120.920.000,00	0,00	0,00
		0,00	115.742.000,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.5-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	10.645.000,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	37.885.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.620.580,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.562.580,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-01.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.378.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	142.663.010,00	0,00	0,00	0,00
		131.876.045,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.943.593,00	0,00	0,00	0,00
		96.300.045,50	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.479.360,00	0,00	0,00	0,00
		35.496.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02	*Program Kepegawaian Daerah*	1.439.032.070,00	0,00	0,00	0,00
		1.177.953.024,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01	*Pendidikan, Pembentukan dan Informasi Kepegawaian ASN*	181.201.670,00	0,00	0,00	0,00
		166.105.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengelolaan ASN	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.230.025,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15.750.170,00	0,00	0,00	0,00
		12.494.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	24.999.600,00	0,00	0,00	0,00
		31.010.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.08	Analisis Tempat Prasa ASN	15.279.620,00	0,00	0,00	0,00
		12.542.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	28.979.900,00	0,00	0,00	0,00
		22.522.200,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	54.410.010,00	0,00	0,00	0,00
		52.095.525,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02	*Mutasi dan Promosi ASN*	603.383.800,00	0,00	0,00	0,00
		502.701.188,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	85.582.800,00	0,00	0,00	0,00
		53.346.081,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	229.567.200,00	0,00	0,00	0,00
		200.297.905,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	312.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		241.129.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03	*Pengembangan Kompetensi ASN*	370.775.350,00	0,00	0,00	0,00
		263.529.658,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.01	Pengelolaan Assessment Center	76.666.800,00	0,00	0,00	0,00
		211.125.218,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.03 . 5 03.5-04.0-00.01 . 02 2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aj.t.	46.872.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.03.13	Pembinaan Jaminan Pensiun Aj.N	47.236.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.465.944,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04	*Asesmen dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	321.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.252.758,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.965.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5 03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	41.320.400,00	0,00	0,00	0,00
		40.680.005,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	24.999.600,00	0,00	0,00	0,00
		16.475.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	130.696.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.255.598,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5 03.5-04.0-00.01 . 02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	56.960.800,00	0,00	0,00	0,00
		52.325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**	895.711.800,00	0,00	0,00	0,00
		826.470.488,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	895.711.800,00	0,00	0,00	0,00
		826.470.488,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02	***Program Pengembangan Sumber Daya Manusia***	895.711.800,00	0,00	0,00	0,00
		826.470.488,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01	*Pengembangan Kompetensi Teknis*	29.599.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.849.600,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inh, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	29.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.049.600,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.01 . 02.2.02	*Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	865.712.000,00	0,00	0,00	0,00
		824.620.038,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.04 . 5 03.5 04.0 03.01 . 02.2.04.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Aparatur Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Profesional	865.712.300,00 824.620.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.06	Penelitian dan Pengembangan	115.553.000,00 53.947.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	115.553.000,00 53.947.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	115.553.000,00 53.947.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan*	31.071.000,00 7.161.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.01.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	31.071.000,00 7.161.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	83.482.000,00 46.786.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Sesuai Inovatif	46.132.000,00 21.127.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.03 . 02.2.04.05	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	45.350.000,00 24.659.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.734.346.335,00 4.478.966.926,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.01	Inspektorat	4.734.346.335,00 4.478.966.926,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	4.734.346.335,00 4.478.966.926,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	3.449.803.342,00 3.204.242.151,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.824.219.237,00 2.610.881.488,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
6.01 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 703 319 227,00	0,00	0,00	0,00
		2 751 243 468,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Kegiatan Tugas ASN	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		52.649.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	*Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah*	251.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.063.326,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.276.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.676.178,00	0,00	0,00	0,00
6.01 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 004 000,00	0,00	0,00	0,00
		128.309.198,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	244.034.119,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		39..531.811,00	5.500.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Kantor	4.545.455,00	0,00	0,00	0,00
		4.292.201,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.106.500,00	5 500.000,00	0,00	0,00
		25 996.140,00	5 500.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		5.92-1650,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyelenggaraan Urusan Cetakan dan Penggandaan	23.852.064,00	0,00	0,00	0,00
		23.748.015,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	383.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		131 570.616,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1c.445.0c0,00	0,00	0,00	0,00
		15.516.240,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 450.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 385.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.555.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.251.340,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.840.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.921.586,00	0,00	0,00	0,00
		106.275.286,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.502.500,00	0,00	0,00	0,00
		97.005.286,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.019.086,00	0,00	0,00	0,00
		9.240.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	992.170.310,00	0,00	0,00	0,00
		969.406.703,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	824.503.318,00	0,00	0,00	0,00
		795.503.503,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	124.685.300,00	0,00	0,00	0,00
		124.515.681,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	94.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.795.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	11.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.505.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.07	Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	245.455.318,00	0,00	0,00	0,00
		226.095.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	107.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.986.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	107.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.986.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 08	**Program Penunjang Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	153.776.676,00	0,00	0,00	0,00
		145.230.146,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 08.2.01	Administrasi Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	54.627.273,00	0,00	0,00	0,00
		23.950.100,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.01	Penerimaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	[illegible]	0,00	0,00	0,00
		[illegible]	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02	*Pendampingan dan Asistensi*	290.640.402,00	0,00	0,00	0,00
		251.388.045,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.371.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190.548.650,00	0,00	0,00	0,00
		159.851.348,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengaduan Pelayanan	49.091.752,00	0,00	0,00	0,00
		31.516.997,00	0,00	0,00	0,00
7	**URUSAN KEWILOYAHAN**	16.997.320.057,00	537.010.001,00	0,00	0,00
		15.777.784.006,00	530.887.210,00	0,00	0,00
7.01	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**	16.507.028.867,00	535.010.881,00	0,00	0,00
		15.777.781.006,00	530.887.210,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01	**Kecamatan Kota Baik Gadang Bisah**	2.706.007.288,00	209.720.800,00	0,00	0,00
		2.497.264.187,00	205.406.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	2.468.784.788,00	205.720.800,00	0,00	0,00
		2.459.050.727,00	205.406.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.190.349.197,00	0,00	0,00	0,00
		2.186.261.293,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	2.143.249.197,00	0,00	0,00	0,00
		2.131.261.293,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	389.010.509,00	5.150.000,00	0,00	0,00
		378.140.225,00	5.150.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyelenggaraan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.810,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
		14.500.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.998.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.910.850,00	0,00	0,00	0,00
		9.906.275,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.620.058,00	0,00	0,00	0,00
		151.037.050,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	33.953.250,00	0,00	0,00	0,00
		24.571.159,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.599.750,00	0,00	0,00	0,00
		16.571.159,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	71.415.200,00	190.579.200,00	0,00	0,00
		68.720.950,00	198.250.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.995.900,00	0,00	0,00	0,00
		52.513.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.420.000,00	188.579.800,00	0,00	0,00
		1.340.000,00	198.256.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.300,00	0,00	0,00	0,00
		14.927.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	40.429.090,00	0,00	0,00	0,00
		45.290.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.640.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.01	Koordinasi/Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.640.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	25.749.840,00 22.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Penyediaan Stabilitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.749.840,00 22.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	51.022.760,00 50.901.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.1.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	51.022.760,00 50.901.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.03	Penyediaan Stabilitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.022.760,00 50.901.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	105.170.200,00 104.969.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Kepada Daerah*	105.170.200,00 104.969.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.600.000,00 42.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51.070.300,00 51.050.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.199.900,00 8.460.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	12.376.700,00 12.469.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	12.376.700,00 12.469.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.920.800,00 2.890.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.02	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.09	Fasilitasi Kerja sama Penyelesaian Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Desa	6.579.920,00	0,00	0,00	0,00
		6.579.020,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Potensi Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02	Kecamatan Sungai Pagu	2.511.525.635,00	8.705.114,00	0,00	0,00
		2.476.205.594,00	8.689.867,20	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01	*Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	2.049.603.695,00	4.900.550,00	0,00	0,00
		2.036.906.644,00	4.900.550,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.02	*Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah*	1.901.520.129,00	0,00	0,00	0,00
		1.974.551.107,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.921.528.129,00	0,00	0,00	0,00
		1.915.087.867,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.02.07	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.463.240,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.06	*Administrasi Umum Kewilayahan Daerah*	109.501.765,00	4.900.060,00	0,00	0,00
		109.865.102,00	4.900.860,20	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penyiapan Bangunan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.998.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.590.140,00	4.900.850,00	0,00	0,00
		12.589.100,00	4.900.850,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.04	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	5.700.970,00	0,00	0,00	0,00
		5.700.910,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.05	Penyelesaian Tagihan Listrik dan Penggandaan	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.885.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.281.700,00	0,00	0,00	0,00
		142.693.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0-00.0-00.02 . 01.2.09	*Penyediaan Jasa Kewilayahan Pemerintah Daerah*	14.490.346,00	0,00	0,00	0,00
		12.491.247,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0 00.0 00.02 . 01 2 00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0 00.0 00.02 . 01.2 05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.450.746,00	0,00	0,00	0,00
		10.441.747,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	97.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.065.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.03.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perjalanan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.915.380,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.04.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01.2.09.10	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.990.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	60.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.998.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.140.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertkait	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.140.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	33.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.019.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02.2.02.09	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kantor Penyelenggara di Wilayah Kecamatan	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.819.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.151.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01	*Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Desa*	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.151.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.880.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.271.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04	*Program Kebijakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.974.280,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01	*Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.974.280,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.974.280,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	132.575.000,00	3.804.254,00	0,00	0,00
		120.441.120,00	3.780.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05.2.01	*Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum secara Penugasan Kepala Daerah*	132.575.000,00	3.804.254,00	0,00	0,00
		120.441.120,00	3.780.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45.250.000,00	3.804.254,00	0,00	0,00
		45.250.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05.2.01.04	Pembinaan Ketahanan Ketahanan Pangan, Ideologi, Unsur Paragama, Ras, dan Golongan Lainnya Termasuk Pencegahan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.880.120,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Rutin Sekretariat Pemerintah Kecamatan	10.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.771.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01	*Fasilitasi, rekomendasi dan Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.771.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Desa Pemerintahan Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.995.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.977.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIPKD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 05.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.825.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.03	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.974.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03	**Kecamatan Sangli**	2.196.557.581,00	33.389.000,00	0,00	0,00
		2.251.856.182,00	33.389.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	2.019.483.607,00	32.299.000,00	0,00	0,00
		1.946.017.774,00	32.299.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02	*Administrasi Kewilayah Perangkat Daerah*	1.442.799.670,00	0,00	0,00	0,00
		1.472.674.772,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.382.889.670,00	0,00	0,00	0,00
		1.422.574.772,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	167.093.869,00	32.299.000,00	0,00	0,00
		150.838.863,00	32.299.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	2.988.268,00	0,00	0,00	0,00
		2.988.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perlengkapan Kantor	37.235.805,00	32.299.000,00	0,00	0,00
		37.224.000,00	32.299.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.166,00	0,00	0,00	0,00
		1.997.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.899.880,00	0,00	0,00	0,00
		14.281.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.972.540,00	0,00	0,00	0,00
		110.340.763,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	19.666.561,00	0,00	0,00	0,00
		15.500.217,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIKD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.445.761,00	0,00	0,00	0,00
		5.175.217,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.800,00	0,00	0,00	0,00
		8.375.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.023.052,00	0,00	0,00	0,00
		301.036.872,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03 . 01.2.09.01	Pemeliharaan Alat Pendidikan, Biaya Penghapusan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Unsur Pimpinan	49.990.900,00	0,00	0,00	0,00
		49.052.855,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01.3.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.993.092,00	0,00	0,00	0,00
		252.946.216,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	49.671.479,00	1.040.000,00	0,00	0,00
		48.073.750,00	1.050.000,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.096.279,00	0,00	0,00	0,00
		45.148.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.096.279,00	0,00	0,00	0,00
		45.155.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02	Penyelenggaraan Organ Pemerintahan yang Baru Dibentuksesuai oleh Sub Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.775.200,00	1.040.000,00	0,00	0,00
		3.775.200,00	1.050.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.775.200,00	1.040.000,00	0,00	0,00
		3.775.200,00	1.050.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	52.997.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.310.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.997.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.310.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.997.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.310.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7.01.0.00.0.00.01.2.01	*Kontribusi Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.01 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7.01.0.00.0.00.05 . 05	**Program *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	208.149.600,00	0,00	0,00	0,00
		208.149.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7.01.0.00.0.00.05 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Kewenangan Kepala Daerah*	208.149.600,00	0,00	0,00	0,00
		208.149.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.05 . 05.2.01.03	Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa	49.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		47.285.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.01 . 05.2.01.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Kemitraan Lokal, Regional, dan Nasional	119.349.800,00	0,00	0,00	0,00
		141.134.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.05 . 05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7.01.0.00.0.00.03 . 06	**Program *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	19.265.560,00	0,00	0,00	0,00
		14.629.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.03 . 06.2.01	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	19.265.560,00	0,00	0,00	0,00
		14.629.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.03 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	960.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.03 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.03 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.03 . 06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	990.000,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7.01.0.00.0.00.03 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	990.000,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0 00.0 00.03 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	991.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0 00.0 00.01 . 06.2.01.00	Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Evaluasi Pembangunan Desa	9.365.560,00	0,00	0,00	0,00
		9.220.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06.2.01.05	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0 00.0 00.04	**Kecamatan Sangir Jujuan**	2.686.649.007,00	19.991.012,00	0,00	0,00
		1.937.030.066,00	19.990.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	1.810.020.787,00	19.991.012,00	0,00	0,00
		1.724.134.546,00	19.990.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.565.035.837,00	0,00	0,00	0,00
		1.425.254.576,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.514.936.837,00	0,00	0,00	0,00
		1.375.154.576,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.101.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	190.414.000,00	0,00	0,00	0,00
		187.914.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.664.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.530.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.814.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0 00.0 00.04 . 01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.971.700,00	0,00	0,00	0,00

printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	19.990.012,00	0,00	0,00
		0,00	19.990.000,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.990.012,00	0,00	0,00
		0,00	19.990.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	67.299.992,00	0,00	0,00	0,00
		19.211.920,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Tenaga Penyuluh	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.283.820,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Sarana	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	82.330.992,00	0,00	0,00	0,00
		81.451.490,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemasangan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.630.960,00	0,00	0,00	0,00
		51.751.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.699.840,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	50.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.055.050,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.610.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.610.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	30.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.445.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.445.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	29.239.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.140.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	29.739.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.149.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.239.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.149.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04.2.01	*Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	132.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.899.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum selain Penugasan Kepala Daerah*	132.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.899.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	47.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.510.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mencegah Disintegrasi Sosial, Regional, dan Nasional	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.879.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05.2.01.30	Pelaksanaan Tugas Forum Kamtibmas Pangkon di Kecamatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	13.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.842.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	13.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.842.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.020.200,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Serta Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.395.300,00	0,00	0,00	0,00
		7.372.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Sungai Batang Hari	2.514.340.497,00	80.792.860,00	0,00	0,00
		2.415.109.138,00	77.736.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	2.231.971.407,00	80.792.860,00	0,00	0,00
		2.161.279.358,00	77.736.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.953.962.257,00	0,00	0,00	0,00
		1.896.871.398,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.01	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	1.953.962.257,00	0,00	0,00	0,00
		1.896.871.398,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.05	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	201.409.150,00	25.020.000,00	0,00	0,00
		191.194.150,00	22.336.020,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.05.01	Pelayanan Komunikasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.005.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.005.750,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	23.295.002,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	55.740.000,00	0,00	0,00
		0,00	55.400.000,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.06	Pengadaan Mebel	0,00	10.716.000,00	0,00	0,00
		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	21.538.000,00	0,00	0,00
		0,00	21.500.000,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.425.865,00	0,00	0,00
		0,00	20.300.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	19.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.462.916,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.822.056,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.395.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.705.654,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.2-00.0-00.05 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lainnya	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.705.654,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 02	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	22.928.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.876.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	15.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.186.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01.03	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	15.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.186.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01.07	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang lain Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.490.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 02.2.01.08	Pelaksanaan Helpdesk Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.190.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	54.232.240,00	0,00	0,00	0,00
		53.999.240,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	54.232.240,00	0,00	0,00	0,00
		53.999.240,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.999.240,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04	***Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05	***Program Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Umum***	135.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.105.240,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum lainnya Penugasan Kepala Daerah*	135.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.105.240,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.03	Pembinaan Penataan dan Kerukun Bangsa	44.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.450.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80.819.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.736.240,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAM	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	62.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.290.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01	*Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	62.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.290.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.240.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06	**Kecamatan Pasir Ibu**	2.117.295.686,00	25.750.000,00	0,00	0,00
		2.097.970.301,00	25.375.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	1.864.952.926,00	25.165.000,00	0,00	0,00
		1.855.653.861,00	25.375.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.01	*Administrasi Kesekretariatan Daerah*	1.617.971.406,00	0,00	0,00	0,00
		1.606.308.178,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.971.406,00	0,00	0,00	0,00
		1.502.308.178,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	162.488.680,00	0,00	0,00	0,00
		162.023.107,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.01	Penyelenggaraan Internet Desa/Penerangan Sangkuran Kanba	2.456.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.492.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.06 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.819.520,00	0,00	0,00	0,00
		15.819.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7401.0400.0-002.06 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.995.965,00	0,00	0,00	0,00
		4.907.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-002.06 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.231.200,00	0,00	0,00	0,00
		9.166.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-002.06 . 01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.876.213,00	0,00	0,00	0,00
		128.457.807,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-002.06 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	5.453.350,00	0,00	0,00
		0,00	5.453.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-002.06 . 01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
		0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-002.06 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	17.755.860,00	0,00	0,00
		0,00	17.675.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-003.06 . 01.2.08	*Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	10.452.600,00	0,00	0,00	0,00
		9.315.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-003.06 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-003.06 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.740.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.170.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-003.06 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	2.659.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-004.09 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	74.040.251,00	0,00	0,00	0,00
		73.197.576,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-005.06 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.041.509,00	0,00	0,00	0,00
		43.607.576,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-005.06 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.998.742,00	0,00	0,00	0,00
		29.590.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-005.06 . 02	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	57.070.500,00	0,00	0,00	0,00
		55.708.370,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7401.0400.0-005.06 . 02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	41.450.800,00	0,00	0,00	0,00
		40.101.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SIPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.105.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15.619.700,00	0,00	0,00	0,00
		15.028.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	12.719.850,00	0,00	0,00	0,00
		12.704.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kesenangan Lain yang Dilimpahkan	2.899.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.996.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	48.241.700,00	0,00	0,00	0,00
		46.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.651.900,00	0,00	0,00	0,00
		40.041.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.661.900,00	0,00	0,00	0,00
		45.641.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.579.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.215.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6.579.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.215.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	122.018.650,00	300.000,00	0,00	0,00
		120.843.140,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum segan Pengatan Kepala Daerah	122.018.650,00	300.000,00	0,00	0,00
		120.843.140,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70.963.870,00	300.000,00	0,00	0,00
		70.148.800,00	0,00	0,00	0,00

Printed by Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 05.2.01.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Integrasi, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Kemanunan Lokal, Regional dan Nasional	41.024.900,00 40.874.445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.300.300,00 9.819.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05 . 06	*Program* **Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	10.761.900,00 17.165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01	*Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antardesa dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	10.761.900,00 17.165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi dan Pemerintahan Desa	3.102.200,00 4.912.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.500,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.992.800,00 1.424.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.095.900,00 8.853.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Barang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07	**Kecamatan Sungai Bahar Jangga**	2.009.752.473,00 1.915.671.530,00	162.849.215,00 162.310.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01	*Program* **Pemantapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.726.002.473,00 1.647.995.735,00	162.039.235,00 162.310.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.02	*Administrasi Kepegawai Daerah*	1.450.348.148,00 1.377.119.238,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.402.468.148,00	0,00	0,00	0,00
		1.326.239.235,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.600.200,20	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-20.07 . 01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.060.525,00	2.938.150,00	0,00	0,00
		195.484.252,00	2.938.150,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.752.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		13.740.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.994.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.011.065,00	0,00	0,00	0,00
		66.855.462,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	12.020.035,00	0,00	0,00
		0,00	12.010.202,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	12.020.035,00	0,00	0,00
		0,00	12.010.202,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.375.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.976.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.998.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000,00	147.679.200,00	0,00	0,00
		61.266.918,00	147.347.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.430.138,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.320.800,00	147.679.200,00	0,00	0,00
		1.830.830,00	147.342.000,00	0,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.07 . 02	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	54.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.423.030,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.481.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.481.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.912.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 02.2.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.912.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.770.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.770.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.770.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06	*Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.910.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01	*Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.910.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.910.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	157.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.924.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Penyerahan Kepada Daerah*	157.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.924.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.02	Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Banjar	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Antaretnis, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.803.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.905.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06	*Program Pendidikan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.997.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01	*Fasilitasi Kelembagaan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.997.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.997.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.09	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 05.2.01.03	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.07 . 06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.15	Fasilitas Perkantoran, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Ruang Office Serta Penataan dan Pengawasan Kantor Desa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	3.356.057.584,00 3.106.920.081,00	20.000.000,00 19.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	3.356.057.584,00 3.106.979.401,20	20.000.000,00 19.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	3.356.957.584,00 3.106.979.401,20	20.000.000,00 19.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	1.058.057.584,00 1.597.803.787,00	20.000.000,00 19.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.334.566.909,00 1.293.021.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.263.886.509,00 1.222.341.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.680.400,00 70.680.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	228.872.175,00 214.984.527,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penambahan Daya Kantor	1.126.200,00 1.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.572.175,00 29.171.677,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00 2.985.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000,00 14.842.306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.314.000,00 166.096.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Printed by SIPD

Kode	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.500,50	0,00	0,00	0,00
		24.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Konstruksi dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.900.000,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	15.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.249.908,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.249.908,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.467.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	55.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.446.850,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.446.850,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02	***Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan***	164.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.042.725,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	*Penyusunan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	164.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.042.725,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	133.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.137.725,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.905.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03	***Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik***	1.090.670.905,00	0,00	0,00	0,00
		960.151.069,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelayanan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pembangunan Pemerintahan, Pemerataan dan Suara Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	1.030.670.900,00 960.151.069,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerataan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.030.670.900,00 960.151.069,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01	*Program Pembendayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	16.761.500,00 15.918.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemberian Pelaksanaan Bidang Pembendayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	16.761.000,00 15.918.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendaftaran Ormas, Pembentukan Ormas, Evaluasi dan Modus Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.761.000,00 15.918.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 05	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	92.900.000,00 86.980.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemberian Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	90.300.000,00 86.469.401,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01	Fasilitasi Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyuluh Kepercayaan di Daerah	40.500.000,00 36.959.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 06	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	395.585.800,00 283.051.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	395.585.800,00 283.051.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0.01 . 0-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kegiatan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan Warga Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	395.585.800,00 283.051.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
JUMLAH		651.903.804.887,00	219.977.614.670,00	3.710.222.277,00	87.252.550.000,00
		608.487.257.791,10	209.072.297.511,67	3.051.051.001,00	86.967.238.179,00

Printed By SIPD

LAMPIRAN II

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	109.103.438.557,94	69.573.319.582,89
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	109.137.058.386,94	69.505.673.546,89
3	Sub Total (1 - 2)	(33.619.829,00)	67.646.036,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	92.755.109.943,27	109.103.438.557,94
5	Sub Total (3 + 4)	92.721.490.114,27	109.171.084.593,94
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	33.059.324,00	(67.646.036,00)
7	Lain-lain	561.505,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	92.755.109.943,27	109.103.438.557,94

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, April 2023

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.4.1.A.1	12.512.860.774,10	18.619.066.283,00	(6.106.215.508,90)	(32,80)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8.4.1.A.2	2.206.416.790,00	1.630.097.483,00	576.319.307,00	35,35
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO	8.4.1.A.3	2.415.762.950,00	1.700.551.019,00	715.211.931,00	42,06
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	8.4.1.A.4	75.630.433.976,04	63.404.625.826,00	13.265.798.152,04	20,56
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		93.825.454.492,14	85.354.340.611,00	8.471.113.881,14	9,92
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO					
10	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	8.4.1.B.1.a	51.990.340.949,00	37.537.868.415,00	14.452.472.534,00	38,50
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	8.4.1.B.1.b	23.754.376.171,00	14.837.087.066,00	8.917.289.105,00	60,10
12	Dana Alokasi Umum - LO	8.4.1.B.1.c	486.837.980.582,00	487.174.072.000,00	(276.111.439,00)	(0,06)
13	Dana Alokasi Khusus - LO	8.4.1.B.1.c	165.703.060.980,00	113.243.038.502,00	20.460.042.376,00	14,38
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		676.345.758.582,00	632.792.065.983,00	43.553.692.579,00	6,88
15	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO					
16	Dana Penyesuaian - LO	8.4.1.B.2.a	0,00	8.567.934.000,00	(8.567.934.000,00)	(100,00)
17	Dana WISM - LO	8.4.1.B.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		0,00	8.567.934.000,00	(8.567.934.000,00)	(100,00)
19	Transfer Pemerintah Provinsi - LO					
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	8.4.1.B.3	51.465.719.839,00	52.032.790.607,00	(567.070.768,00)	(1,09)
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	8.4.1.B.5	11.500.000.000,00	2.500.000.000,00	9.000.000.000,00	360,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		62.965.719.839,00	54.532.790.607,00	8.432.929.232,00	15,46
23	JUMLAH PENDAPATAN		739.311.478.401,00	695.892.790.590,00	43.418.687.811,00	6,24

NO	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	TRANSFER - LO					
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
25	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.C.1	53.844.977.132,00	28.726.073.750,00	24.118.903.382,00	83,94
26	Pendapatan Dana Darurat - LO	5.4.1.C.2	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.C.3	7.892.677.406,00	22.940.542.735,00	(15.047.865.329,00)	(65,60)
27	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		61.737.651.538,00	52.666.616.485,00	9.071.035.053,00	17,22
28	JUMLAH PENDAPATAN - LO		894.874.584.431,14	833.913.747.686,00	60.960.836.745,14	7,31
29	BEBAN					
30	Beban Pegawai - LO	5.4.2.A	380.297.108.562,34	379.803.845.441,00	493.263.121,34	0,13
31	Beban Persediaan	5.4.2.B	82.071.209.264,75	76.269.509.782,60	5.801.704.482,15	7,61
32	Beban Jasa	5.4.2.C	85.078.361.312,52	88.345.686.795,45	(3.267.325.483,93)	(3,47)
33	Beban Pemeliharaan	5.4.2.D	6.866.731.757,00	4.000.887.392,50	2.865.844.364,50	71,63
34	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.E	41.087.206.641,00	39.692.430.561,00	1.394.776.080,00	3,51
35	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Hibah	5.4.2.F	5.965.710.904,00	8.036.990.895,00	(2.071.279.991,00)	(25,78)
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.G	-	145.680.080,00	(145.680.080,00)	(100,00)
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.H	137.472.897.465,09	137.652.250.857,63	(179.353.392,54)	(0,13)
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.I	799.037.713,85	4.644.677.550,52	(3.845.639.836,67)	(82,79)
41	Beban Transfer	5.4.2.J	49.467.550.912,00	47.924.600.888,00	1.542.949.024,00	3,22
42	Beban Lain-lain	5.4.2.K	4.592.976.904,72	4.694.973.227,00	(101.996.322,28)	(2,17)
43	JUMLAH BEBAN		793.698.394.937,27	788.911.631.669,70	4.786.763.267,57	0,61
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		101.176.189.493,87	45.002.116.016,30	56.174.073.477,57	124,83
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
46	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	(13.139.345.434,88)	13.139.345.434,88	(100,00)
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3	10.809.237.485,00	0,00	10.809.237.485,00	0,00
52	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(10.809.237.485,00)	(13.139.345.434,88)	2.329.107.949,88	(17,73)

NO	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		90.366.952.008,87	31.863.770.581,42	58.503.181.427,45	183,60
54	POS LUAR BIASA					
55	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Beban Luar Biasa	5.4.5	840.000.000,00	641.815.000,00	198.185.000,00	30,88
57	POS LUAR BIASA		(840.000.000,00)	(641.815.000,00)	198.185.000,00	(30,88)
58	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	89.526.952.008,87	31.221.955.581,42	58.701.366.427,45	188,01

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, April 2023

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	1.915.664.775.152,30	1.874.225.572.551,55
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	89.525.952.006,867	31.221 955 591,42
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	19.536.019.882,71	10.217.247.019,33
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	32 013.536,00	0,00
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	19.504.006.226,71	10.217.247 019,33
6	EKUITAS AKHIR	2.024.726.747.023,88	1.915.664.775.152,30

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, April 2023

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN V

Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**			
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.A.1	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.A.2	37.220.678,00	30.456.756,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.3	167.208.566,69	13.741.409,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.A.4	12.193.379.820,62	1.906.618.457,94
7	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	5.3.1.A.5	549.090.169,22	0,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.A.6	701.982.844,00	495.668.011,00
9	Kas di Bendahara BPBD	5.3.1.A.7	0,00	38.080.865,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.A.8	0,00	211.073.903,00
11	Setara Kas		0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.B.1	18.018.014.963,00	16.514.438.842,00
14	*Penyisihan Piutang Pajak Daerah*		*(10.381.931.529,09)*	*(10.181.746.128,64)*
15	Piutang Pajak Daerah Netto		7.636.083.433,91	6.332.692.713,36
16	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.B.2	1.970.109.750,00	2.117.868.088,00
17	*Penyisihan Piutang Retribusi*		*(1.926.103.288,00)*	*(1.582.549.958,19)*
18	Piutang Retribusi Daerah Netto		44.006.462,00	535.318.129,81
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.B.3	0,00	0,00
20	*Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan*		*0,00*	*0,00*
21	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		0,00	0,00
22	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	5.3.1.B.4	30.242.352.032,38	41.898.865.185,94
23	*Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah*		*(24.556.779.579,28)*	*(36.213.142.053,10)*
24	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto		5.685.572.453,09	5.685.723.132,84
25	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.B.5	3.534.765.320,00	11.641.193.359,00
26	*Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya*		0,00	0,00
27	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		3.534.765.320,00	11.641.193.359,00
28	Piutang Lainnya		155.055.500,00	0,00
29	*Penyisihan Piutang Lainnya*		*(775.277,50)*	*0,00*
30	Piutang Lainnya Netto		154.280.222,50	0,00
31	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.C	380.518.319,00	153.311.622,00
32	Persediaan	5.3.1.D	27.293.655.844,90	17.887.521.348,90
33	**JUMLAH ASET LANCAR**		**137.521.110.127,67**	**151.550.272.766,85**

NO	URAIAN	REF	2022	2021
34	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
35	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
36	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0.00	0,00
37	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
38	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0,00
39	Dana Bergulir		0.00	0,00
40	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
41	Investasi Non Permanan Lainnya		0,00	0,00
42	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0.00
43	Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3 2	58.874.415.357,24	41.574.364.596,00
45	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
46	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		58.874.415.357,24	41 574.364.596,00
47	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**58.874.415.357,24**	**41.574.364.596,00**
48	**ASET TETAP**			
49	Tanah	5.3.3.1	366.709.927.859,00	352.946.797.525,00
50	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	343.963.123.810,99	318.584.122.340,99
51	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	757.522.080.597,20	673.008.616.814,20
52	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	1 410.782.448.374,04	1.318.365.723.727,04
53	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	46.007.519.047,04	36.511.102 598,04
54	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	67.015.563.293,00	55.599.395.198,00
55	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.3.7	(1.150.700.964.067,79)	(1.013.560.818.039,70)
56	**JUMLAH ASET TETAP**		**1.841.299.698.913,48**	**1.741.454.940.163,57**
57	**DANA CADANGAN**			
58	Dana Cadangan		0,00	0.00
59	**JUMLAH DANA CADANGAN**		**0,00**	**0,00**
60	**ASET LAINNYA**			
61	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
63	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.1	1.458.943,875,00	1.387.043.795,00
64	*Amortisasi Aset Tak Berwujud*		(856.628.646.00)	(744.544.259,00)
65	Aset Tidak Berwujud Setelah Amortisasi		602.315.229,00	642.499.536,00
66	Aset Lain-lain	5.3.4.2	27.677.715.899,24	20.711,701.602 24
67	*Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain*		(23 310.222.672,24)	(19.517.028.295,36)
68	Aset Lain-lain Setelah Penyusutan		4.367.493.227,00	1.194,673.306,88
69	Aset yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
70	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	5.3.4 3	5.364.179.953,00	0,00
71	Aset Lainnya Non Lancar		0,00	0,00
72	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**10.333.988.409,00**	**1.837.172.842,88**
73	**JUMLAH ASET**		**2.048.029.212.807,39**	**1.936.416.750.369,30**

NO	URAIAN	REF	2022	2021
74	**KEWAJIBAN**			
75	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
76	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.A.1	0,00	179.060.267,00
77	Utang Bunga		0,00	0,00
78	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
79	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.A.2	44.512.023,00	62.071.788,00
80	Utang Beban	5.3.5.A.3	23.220.835.631,51	20.478.829.526,00
81	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.A.4	37.118.129,00	32.013.636,00
82	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran SKPD	5.3.5.A.5	0,00	0,00
83	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**23.302.465.783,51**	**20.751.975.217,00**
84	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.5.B		
85	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
86	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
87	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		**0,00**	**0,00**
88	**JUMLAH KEWAJIBAN**		23.302.465.783,51	20.751.975.217,00
89	**EKUITAS**			
90	**EKUITAS**	5.3.6	**2.024.726.747.023,88**	**1.915.664.775.152,30**
91	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		2.048.029.212.807,39	1.936.416.750.369,30

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, April 2023

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN VI

Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Metode Langsung)

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	11.006.714.870,10	16.500.163.327,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	2.354.215.126,00	1.235.010.343,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.415.762.950,00	1.730.551.019,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	74.594.228.998,00	59.649.067.559,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	51.492.398.775,00	37.537.858.415,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam	18.897.650.392,00	14.837.087.266,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	436.897.960.562,00	437.174.072.200,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	163.261.780.862,00	143.243.038.502,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	8.567.924.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	59.572.147.878,00	49.536.630.420,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	11.500.000.000,00	0,00
15	Penerimaan Hibah	0,00	21.750.000.000,00
16	Penerimaan Dana darurat	0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya	7.828.209.106,00	25.440.542.735,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
19	Jumlah Arus Kas Masuk Kas	**839.801.556.539,10**	**817.173.079.386,00**
20	**Arus Keluar Kas**		
21	Pembayaran Pegawai	375.196.146.727,83	372.632.719.871,00
22	Pembayaran Barang	234.250.350.259,27	221.828.878.307,95
23	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah	5.565.696.404,00	7.969.922.995,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	145.686.080,00
27	Pembayaran Tak Terduga	3.061.054.001,00	841.815.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	923.275.367,00	1.527.461.160,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	171.747.312,00	133.878.744,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	-
31	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	48.201.083.500,00	48.242.173.725,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas	**655.371.333.571,10**	**651.402.525.883,95**
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	184.430.222.968,00	165.770.553.502,05
34	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
35	**Arus Masuk Kas**		
36	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
37	Penjualan Atas tanah	0,00	0,00
38	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	1.735.201.100,00	1.327.472.599,00
39	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	800.000,00
40	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

NO	URAIAN	2022	2021
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Lainnya	24.925.000,00	45.675.000,00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
45	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00
46	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**1.760.126.100,00**	**1.374.147.599,00**
47	**Arus Keluar Kas**		
48	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	11.111.952.077,00	18.254.516.900,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	31.337.496.900,00	24.156.830.388,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	69.268.571.660,08	20.600.027.739,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.128.228.699,59	62.841.156.713,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.205.918.175,00	1.194.424.750,00
54	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
57	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**202.572.297.511,67**	**127.546.956.090,00**
58	**Arus Kas Bersih dari Aktivasi Investasi**	**(200.812.171.411,67)**	**(126.172.788.491,00)**
59	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
60	**Arus Masuk Kas**		
61	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
62	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
63	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
64	Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
65	Pinjaman dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
66	Pinjaman dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00
70	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**0,00**	**0,00**
71	**Arus Keluar Kas**		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
81	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**0,00**	**0,00**
82	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**0,00**	**0,00**
83	**Arus kas dari Aktivitas Transitoris**		
84	**Arus Masuk Kas**		
85	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	55.672.597.374,54	44.270.899.449,00
86	Penerimaan Sisa Lebih Salur BOS	0,00	41.263.636,00
87	Penerimaan Jasa Giro BOS Swasta Yang Harus Dikembalikan	2.866.179,00	0,00

NO	URAIAN	2022	2021
88	Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Negeri dan Entitas Lain Yang Harus Dikembalikan	34.251.950,00	0,00
89	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**55.709.715.503,54**	**44.312.163.084,00**
90	**Arus Keluar Kas**		
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.851.867.641,54	44.480.358.921,00
92	Pengeluaran Sisa Lebih Satuan BOS	32.013.636,00	18.450.000,00
93	Pengeluaran Jasa Giro BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	39.343.479,00
94	Pengeluaran Kelebihan Pembayaran BPJS Yang Harus Dikembalikan	0,00	299.775,00
95	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**55.883.671.277,54**	**44.238.452.069,00**
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(173.955.774,00)	73.711.015,00
95	Kenaikan Penurunan Kas	(16.555.904.217,67)	39.671.476.026,05
96	Saldo Awal Kas di Kasda	**106.618.873.069,00**	66.950.909.774,00
97	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	13.741.409,00	395.484.726,00
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	**30.456.756,00**	34.159.242,00
99	Saldo Awal Kas BLUD	**1.906.618.457,94**	7.643.392.939,89
96	Saldo Awal Kas JKN	**0,00**	0,00
100	Saldo Awal Bendahara BOS	**495.868.011,00**	492.522.346,00
101	Saldo Awal Kas Bendahara BPBD	**38.080.855,00**	38.110.855,00
102	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	**211 073.903,00**	166.102.586,00
103	Saldo Awal Kas BUD (96 sd 102)	109.314.512.460,94	69.710.682.470,89
104	Saldo Akhir Kas di BUD Sebelum Koreksi Saldo Awal (95+103)	92.758.608.243,27	109 382.158.496,94
105	Koreksi Saldo Awal	33.619.829,00	(67.645.036,00)
106	Saldo Akhir Kas di BUD (95+103)	92.792.228.072,27	109 314.512.460,94
107	Saldo Akhir Kas di Kasda	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00
108	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	167.208.566,69	13,741.409,00
109	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	37.220.678,00	30.456.756,00
110	Saldo Akhir Kas di BLUD	12.193.379.820,62	1.906.618.457,94
107	Saldo Akhir Kas di JKN	549.090.169,22	0,00
111	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	701.982.344,00	495.868.011,00
112	Saldo Akhir Kas Bendahara BPBD	0,00	38.080.855,00
113	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	211.073.903,00
114	Saldo Akhir Kas	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94

Catatan atas Laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Padang Aro, April 2023

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN VII

Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I
PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Hal itu Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan system dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal itu terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2014, Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan; basis akrual pada sub sitem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015, Kabupaten Solok Selatan mengawali penerapannya pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah diterapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan bebasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah itu kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapanan basis akrual dengan

segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan opeasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan-undangan-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai *(user)* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten solok selatan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di

Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud;
23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solok Selatan;

24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan;
26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
27. Peraturan Bupati Solok Sefatan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
28. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi;
- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan kerentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Pendapatan –LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Surplus/defisit-LRA
  - 5.1.4 Pembiayaan
  - 5.1.5 Stsa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 LPSAL
  - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.2 Penggunaan Saldo Awal Lebih
  - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
  - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Neraca
5.3.1 Aset Lancar
5.3.2 Investasi Jangka Panjang
5.3.3 Aset Tetap
5.3.4 Aset Lainnya
5.3.5 Kewajiban
5.3.6 Ekuitas Dana
5.4 Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan-LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Surplus/defisit-LO
5.5 Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas da
ri Aktifitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD
5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD
5.5.8 Saldo Akhir Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas awal
5.6.2 Surplus/Defisit-LO
5.6.3 Koreksi-koreksi
5.6.4 Ekuitas Akhir
BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
6.1 Domisili dan Operasional Entitas
6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

1. Kondisi Topografi

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan memiliki bentang alam yang sebagian besar berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (886,00 Km²) dan yang sangat curam (482,11 Km²) Keadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

Tabel 2.1
Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km²)
1	Datar, Agak Landai	0 – 8	792,12
2	Landai	8 – 15	530,68
3	Agak Curam	15 – 25	608,32
4	Curam	25 – 40	885,17
5	Sangat Curam	> 40	482,11
Total			3.294,39

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

Peta Kelas Lereng Kabupaten Solok Selatan

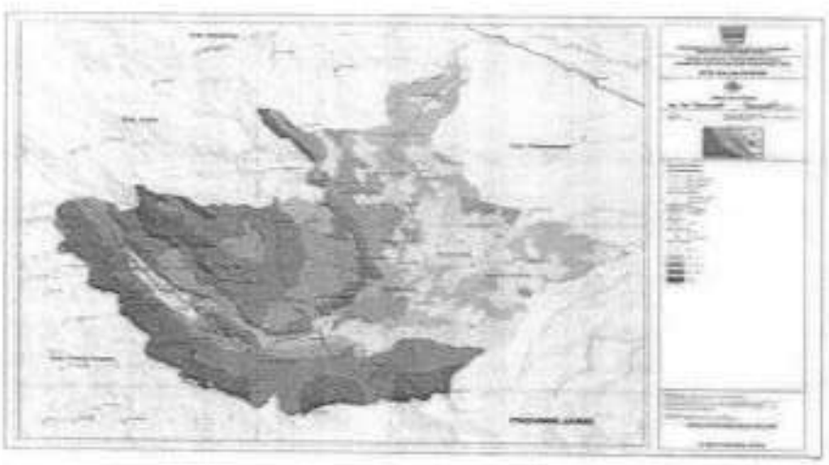

2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 168.411 jiwa pada tahun 2018 menjadi 184.854 jiwa pada tahun 2022. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% dan yang terendah pada tahun 2021 yaitu 1.55%. Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari Rasio jenis ketamin penduduk Solok Selatan diatas 100%.

Tabel 2.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (jiwa)	168.411	171.075	182.027	184.854	188.64 9
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	51.7	51.9	55.3	56.1	57,20
Jumlah keluarga	40.485	40.976	43.287	44.199	45.070
Rata-rata jumlah anggota Keluarga	4,16	4,18	4,20	4,18	4,19
Pertumbuhan penduduk (%)	1,72	1,58	6,40	1,55	2,05
Sex ratio (%)	101,39	107,74	103,59	104,21	104,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2021 berdasarkan luas wilayah adalah 56,11 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (113,60 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sangir (80,49 jiwa/km²), Pauh Duo (73,65 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diateh (69,69 jiwa/km²), Sangir Jujuan (43,01 jiwa/km²), Kecamatan Sangir Balai Janggo (37,01 jiwa/km²) dan Sangir Batang Hari (20.69 jiwa/km²).

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk			Sex ratio (%)	Kepadatan (jiwa/km²)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Sangir	26.629	25.532	52.161	104,30	80.49
2	Sungai Pagu	16.570	16.575	33.146	99,95	113,60
3	Koto Parik Gadang Diateh	14.92[illegible]	14.387	29.306	103,71	69 69
4	Sangir Jujuan	7.467	7.057	14.524	105,81	43.01
5	Sangir Batang Hari	8.496	8.029	16.525	105,82	20 60
6	Pauh Duo	9.843	9.597	19.440	102,56	73 65
7	Sangir Balai Janggo	10.408	9.340	19 748	111,43	37,01
Jumlah		**94.334**	**90.520**	**184.854**	**104,21**	**56,11**

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk. Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk. yaitu: tidak padat dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km^2, kurang padat antara 51-250 jiwa/Km^2, cukup padat 251-400 jiwa/Km^2, dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km^2).

Sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 dapat menggambarkan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 52,40%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 52-53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.216	7.890	16.106
05-9	7.819	7.385	15.204
10-14	9.280	7.772	18.052
15-19	8.739	8.269	17.008
20-24	8.819	8.028	16.847
25-29	7.796	7.436	15.232
30-34	7.788	7.729	15.517
35-39	7.378	7.109	14.487
40-44	6.869	6.554	13.423
45-49	5.883	5.634	11.517
50-54	4.987	4.665	9.652
55-59	3.826	3.781	7.607
60-64	2.937	3.044	5.981
65-69	2.246	2.255	4.471
70-74	1.490	1.477	2.967
75+	1.271	1.522	2.793
Jumlah	94.354	90.529	184.854

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator makro salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Solok Selatan merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Solok Selatan. Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang tergambar pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nilai PDRB Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,02	4,89	4,22	
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.893.871,25	5.302.502,22	5.571.732,28	5.528.507,31	6.777.977,93
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3.612.139,52	3.795.200,14	3.977.409,14	3.928.031,94	4.059.514,72
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (jt)	30,14	30,97	32,58	30,37	31,28
Persentase Penduduk Miskin	7,07	7,33	7,15	7,52	6,51
Indeks Gini	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253
Tingkat Pengangguran	5,85	4,91	5,62	4,84	3,7

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika Dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHB) dalam kurun waktu tahun 2017-2021 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 4.893.871,25 juta (ADHB) dan Rp. 3.612.139,52 juta (ADHK) pada tahun 2017 menjadi Rp 5.777.977,93 juta (ADHB) dan Rp. 4.059.514,72 juta (ADHK) pada tahun 2021 Selama periode 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pertumbuhannya cendrung mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan sebesar 4,89 persen dan terus mengalami perlambatan sampai tahun 2020 menjadi 4,22 persen. Namun pada tahun 2021 seiring dengan pulihnya kondisi masyarakat dari pandemic covid 19 yang sudah tidak lagi membatasi masyarakat ke aktifitas ekonomi PDRB Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.777.977,93,- juta (ADHB) dan Rp. 4 059.514.72 juta (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Dalam melihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga Berlaku yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010).

Jika dilihat perkembangan dan peningkatan PDRB Kabupaten Solok Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berfluktuasi dari tahun ketahun namun peningkatan ini diikuti oleh perlambatan pertumbuhannya cendrung mengalami perlambatan. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meskipun pada periode tahun 2017-2019 secara jumlah terus mengalami peningkatan dari Rp. 4.893.870,69- juta pada tahun 2017 menjadi Rp 5.571.732,28 juta pada tahun 2019, namun jika dilihat dari pertumbuhannya terus mengalami penurunan yaitu dari 6,54% menjadi 5,08. Hal ini juga terjadi pada Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga mengalami peningkatan dari Rp. 3.612 139,52

juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.977.409,14 juta pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan dari 5,18% menjadi 4,80%. Penurunan ini terjadi seiring dengan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang diiringi oleh penurunan harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian.

Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi (pertumbuhan dibawah 0%) dalam perekonomian yang ditandai oleh menurunnya PDRB dari tahun sebelumnya dari Rp. 5,571.732,28 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528,507.31 juta pada tahun 2020 (mengalami penurunan 0,78%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan dari Rp. 3.977.409,14 juta menjadi Rp. 3.928.031,94 juta (mengalami penurunan -1.24%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 yaitu melalui social distancing dan physical distancing, yang diikuti oleh kebijakan yang lebih luas dibeberapa daerah yang salah satunya Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik dari penawaran (supply) dan sektor permintaan (demand).

Namun pada tahun 2021, seiring dengan menurunnya kasus covid 19 serta keberhasilan program herd imunnity melalui program vaksinasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah melakukan beberapa kebijakan antara lain pelonggaran pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid. Selain itu membaiknya harga dan produksi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Kondisi ini berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya PDRB menjadi Rp. 5.777.977,93,- (mengalami peningkatan 4,51%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 4.059.514,72 juta (mengalami penurunan 3,35%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Pertumbuhan ini terjadi dihampir seluruh sektor perekonomian terutama sektor utama yag merupakan pembentuk perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan.

2.1.2 Laju Inflasi

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 915,33 milyar pada tahun 2017 menjadi 1 160,98 milyar pada tahun 2021. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten yaitu dari 18,70% pada tahun 2017 menjadi 20,42% pada tahun 2021. Untuk inflasi daerah Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena di Sumatera Barat, BPS hanya menerbitkan inflasi untuk dua daerah yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Dilihat dari perkembangan indikator inflasi tahun 2021 cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi inflasi yag mengalami penurunan dari 2,12 pada tahun 2020 menjadi 1,37 pada tahun 2021.

Dilihat dari ketersediaan sarana perdagangan dari tahun 2017-2021 tidak mengalami pertumbuhan yakni terdapat 2 pasar Kabupaten (pasar Padang Aro dan Pasar Muaralabuh) serta 33 Pasar Nagari. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,70	19,44	20,21	20,20	20,42
2	Tingkat Inflasi	%	2,11	2,55	4,72	2,12	1,37
3	Jumlah sarana perdagangan (pasar) ➢ Pasar Kabupaten ➢ Pasar Tradsonal	unit	 2 31	 2 31	 2 31	 2 31	 2 31

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3 PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan. Dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2019 PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 30,14 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.32,58 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 30,37 juta pertahun namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perekonomian daerah hingga menjadi 31,26 juta.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan anggaran Tahun 2022 diarahkan pada penyiapan perangkat pengelolaan anggaran, baik sumberdaya maupun sistem pengelolaan anggaran agar dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah daerah. Pada aspek pendapatan diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan.

Arah kebijakan Keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.
b. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional seperti penerimaan daerah bukan pajak.
c. Meningkatnya porsi pengeluaran pembangunan dalam belanja dan pembiayaan daerah sehingga mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Solok Selatan.
d. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, terutama melalui peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, koordinasi dan penyempurnaan prosedur pembayaran pajak.
e. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Analisis Belanja (SAB), Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
f. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah.
g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pelaksana keuangan daerah dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian.
h. Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan APBD.
i. Meningkatkan pengawasan anggaran melalui peningkatan penyusunan dan pengawasan anggaran oleh eksekutif dan legislatif.
j. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
k. Merintis program audit keuangan publik oleh kelembagaan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik dari penggunaan keuangan daerah terutama pengeluaran keuangan untuk belanja pelayanan publik dan infrastruktur ekonomi.
l. Meningkatkan mutu laporan keuangan setiap satuan kerja terkait dengan memberikan keterampilan penyusunan standar akuntansi keuangan untuk tujuan umum, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta kerepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Tabel 2.7
Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan	850.969.790.150,00	854.286.052.246,00
Belanja	823.552.936.400,00	962.869.500.804,37
Penerimaan Pembiayaan	69.573.319.583,00	109.103.438.558,00
Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00

Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, pendapatan daerah anggarannya mengalami peningkatan begitu pun dengan realisasinya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan belanja daerah mengalami kenaikan begitupun penerimaan Pembiayaan daerah mengalami kenaikan yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan nomor 23 tahun 2021 dan nomor 21/ tahun 2021 tanggal 26 September 2022 tentang Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 serta nota kesepakaran nomor 180.16/ NK/BUP-SS/VIII/2022 tahun 2022 tanggal 23 Agustus tahun 2022 tentang Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut;

Penyusapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan- terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow function*. Fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan obyek pendapatan tersebut.

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menentukan beberapa kebijakan dalam rangka mengelola pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
b. Peningkatan kualitas dan memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak;
c. Inventarisasi potensi obyek pajak;
d. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta SDM yang ada guna meningkatkan PAD;
f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD; dan
g. Optimalisasi BUMD.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 – 2026 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan

anggaran dari pemerintah kabupaten, dapat juga dari pemerintah provinsi atau pusat atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

Adapun kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah tahun 2022 kabupaten solok selatan adalah:

a. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja;
b. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
c. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (*money follows program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan organisasi;
e. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra;
f. Dalam rangka kebijakan kemitraan swasta – pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan didasari atas prinsip keadilan;
g. Belanja Investasi, diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022; dan
h. Belanja Operasi diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional, pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, serta mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Solok Selatan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan penerimaan kembali investasi pemerintah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun anggaran 2022, yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 menunjukkan SiLPA sebesar Rp92.754.864.911,27,-;
b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
c. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang

diruangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PENDAPATAN	854.266.062.246,00	884.555.899.039,10	103,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	73.585.025.000,00	92.121.043.046,10	125,58
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	770.505.887.246,00	784.706.642.887,00	101,84
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	9.875.150.000,00	7.826.208.106,00	79,27
BELANJA	675.616.941.804,00	913.620.609.303,77	92,92
BELANJA OPERASI	651.903.104.887,00	608.487.257.791,10	93,34
BELANJA MODAL	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86
BELANJA TAK TERDUGA	3.736.222.247,00	3.061.054.001,00	81,93
TRANSFER	87.252.559.000,00	86.917.238.179,00	99,62
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.450.344.500,00	1.095.023.679,00	75,50
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	85.822.214.500,00	85.822.214.500,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT	(108.603.438.558,(	(15.881.948.443,67)	14,62
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.103.438.558,00	109.137.059.386,94	100,03
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	108.603.438.558,00	108.637.058.386,94	100,03
SISALEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	92.755.109.943,27	0,00

Dari gambaran di atas, pencapaian Perda APBD Tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang bisa terealisasi sebesar 103,56% dari target yang telah ditetapkan dalam Perda APBD, sedangkan efisiensi pengeluaran dapat dicapai dengan penghematan belanja dan pembiayaan.

Namun demikian, dinamika sosial-pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum atau pun asumsi dalam penyusunan APBD. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila: 1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) APBD awal, 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, dan antar jenis belanja, 3). Keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta 4).Keadaan darurat.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 dilakukan sehubungan:

1. Adanya perubahan pada penerimaan pendapatan daerah. Pada Tahun 2022 diperkirakan pendapatan daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan ini disebabkan terjadinya pemulihan ekonomi dikarenakan Corona Virus Disease

(Covid-19) yang sudah semakin mereda berdampak terhadap perekonomian dunia, nasional dan daerah yang menyerang kedua sisi perekonomian baik sisi produksi atau penawaran (*supply*) maupun dari sisi permintaan (*demand*. Penurunan aktifitas ekonomi ini pada akhirnya berdampak terhadap perubahan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian dan rasionalisasi perkiraan pendapatan Negara berdampak terhadap penurunan kemampuan Negara dalam membiayai belanja negara, sehingga dilakukan Efisiensi, Realokasi dan Recofusing dari anggaran belanja negara. Dampak dari penurunan belanja negara ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan dana perimbangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kab. Solok Selatan perlu melakukan rasionalisasi perkiraan pendapatan.

2. Adanya penurunan dari prediksi target SILPA tahun 2022 berdasarkan Audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar Rp92.740.090.448,27.
3. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ringkasan Perubahan atas Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Ringkasan Anggaran
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2022

Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Tambah/(kurang) (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Pendapatan	843.767.287.021	10.498.775.225	854.266.062.246
Belanja	931.903.844.963	30.965.655.841	962.869.500.804
Surplus/Defisit	(88.136.557.942)	(20.466.880.616)	(108.603.438.550)
Penerimaan Pembiayaan	96.136.557.942	20.966.880.616	109.103.438.558
Pengeluaran Pembiayaan	0.00	500.000.000	500.000.000
Pembiayaan Netto	88.136.557.942	20.466.880.616	108.603.438.558

Dan pendapatan sebelum perubahan, ditargetkan sebesar 843.767.287.021,00 setelah anggaran perubahan menjadi Rp854.266.062.246,00 atau terjadi Kenaikan sebesar Rp10.498.775.225,00 atau sebesar 1 %.

Tabel 2.10
Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2022

Pendapatan	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik Turun	(%)
Pendapatan Asli Daerah	73.535.025.000,00	73.885.025.000,00	350.000.000,00	0
Pendapatan Transfer	760.357.112.021,00	770.505.887.246,00	10.148.775.225,00	1
Lain-lain Pendapatan yg sah	9.875.150,00	9.875.150,00	0	0
Total Pendapatan	843.767.287.021,00	854.266.062.246,00	10.498.775.225,00	1

Secara keseluruhan anggaran belanja pada tahun 2022 terjadi peningkatan anggaran belanja pada anggaran perubahan sebesar Rp30.965.655.841,00 atau 3%.

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD sebagai berikut .

Tabel 2.11
Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan
per SKPD Tahun 2022

No	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	272.639.271.262	267.583.646.604	5.055.624.658	2
2.	Dinas Kesehatan	89.893.636.983	91.533.890.503	1.640.253.520	2
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	75.847.010.367	79.671.969.809	3.824.959.442	5
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	115.218.989.459	130.212.559.133	14.993.569.674	12
5.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	22.471.136.597	22.657.644.751	186.448.154	1
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.783.136.012	8.437.154.495	2.654.018.483	31
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.951.699.729	7.724.010.937	(227.688.792)	(3%)
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.736.858.184	4.309.319.202	(427.538.982)	(10%)
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.446.790.215	5.609.112.601	162.326.386	3%
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.634.913.641	5.212.028.004	577.114.363	11%
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.713.681.154	7.212.139.073	498.457.919	7%
12.	Dinas Perhubungan	4.545.768.980	6.974.989.258	2.429.120.278	35%
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.009.864.081	7.640.389.410	630.525.329	8%
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.107.621.881	4.129.886.397	22.264.516	1%
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.895.276.026	13.283.738.171	388.462.145	3%
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.221.247.804	6.493.709.170	272.521.366	4%
17.	Dinas Pertanian	26.317.594.109	18.467.254.620	(7.850.439.489)	(43%)
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.521.069.265	9.845.018.171	1.323.018.906	13%
19.	Sekretariat Daerah	29.105.866.829	37.097.208.369	7.991.341.540	22%
20.	Sekretariat DPRD	28.616.892.571	27.894.790.850	1.278.901.779	5%
21.	Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh	2.382.515.585	2.909.637.088	527.121.503	18%
22.	Kecamatan Sungai Pagu	2.341.629.324	2.523.230.749	181.601.425	7%
23.	Kecamatan Sangir	2.178.457.256	2.389.946.581	2.389.946.581	9%
24.	Kecamatan Sangir Lujuan	1.844.816.818	2.109.040.799	264.223.981	13%
25.	Kecamatan Sangir Batang Hari	2.051.502.949	2.594.983.267	543.480.318	21%
26.	Kecamatan Pauh Duo	1.805.269.789	2.143.049.556	337.779.767	16%
27.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	1.804.161.526	2.172.451.706	968.290.202	17%
28.	Badan Penanggulangan	26.784.793.821	25.472.182.869	(1.312.610.952)	(5%)

No	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)	%
	Bencana Daerah				
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.604.329.994	3.376.957.584	772.127.590	23%
30.	Inspektorat Daerah	4.710.759.412	4.739.845.335	29.085.923	1%
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.810.839.686	5.382.064.489	(428.775.197)	(8%)
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	113.979.470.273	115.309.079.646	1.329.609.373	1%
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.928.387.721	29.757.607.405	2.829.219.684	10%
JUMLAH		931.903.644.963	962.869.500.604	30.965.855.41	3%

BAB. III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2021. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD tidak hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, dan untuk pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah ditetapkan dalam APBD. Sebagai contoh, pendapatan dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Solok Selatan tanpa melalui rekening kas umum daerah dan pendapatan dan belanja dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh masing-masing Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2022 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan pendapatan sebesar Rp854.266.062.246,00 dan terealisasi sebesar Rp884.656.560.392,10 atau sebesar 103,56%.

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp866.235.598.985,00, realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.420.961.407,10 atau sebesar 2,82 %. Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan sebesar Rp962.869.500.804,00 dan terealisasi sebesar Rp900.537.847.482,77 atau sebesar 93.53%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar

Rp826.137.833.973,95 mengalami kenaikan sebesar Rp74.400.013.508,82 atau 9,01% Sedangkan untuk Transfer Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan Rp87.252.559.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.917.238.179,00 atau 99,62% Dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2021 sebesar Rp95.571.875.630,00 terdapat penurunan sebesar Rp -8.654.637.451,00 atau -9,06%

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan, belanja tahun 2022 dan tahun 2021 beserta realisasinya.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	PENDAPATAN	854.256.062.246,00	884.656.630.392,10	103,56	866.235.598.985,00
2.	BELANJA	982.869.500.604,37	813.620.609.309,77	99,53	826.137.833.973,95
	a. BELANJA OPERASI	651.993.104.687,00	608.487.257.791,10	99,34	602.977.207.253,95
	b. BELANJA MODAL	219.977.514.670,37	202.072.297.511,67	91,86	127.048.926.090,00
	c. BELANJA TIDAK TERDUGA	3.730.222.247,00	3.061.054.001,00	1,93	641.815.500,00
3.	TRANSFER	87.252.559.000,00	86.917.238.179,00	99,62	95.571.875.630,00

Target dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (SKPD)	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	122.519.000,00	0,00	8.273.473.901,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	44.080.050.00,00	57.952.336.031,00	131,47	36.724.375.884,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	275.000.500,00	132.471.000,00	48,17	64.339.300,00
4.	Dinas Perhubungan	490.050.000,00	101.300.500,00	20,70	86.908.500,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	271.050.000,00	507.417.501,00	187,25	234.832.514,00
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	141.472.529,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	252.520.000,00	282.505.000,00	111,88	125.476.000,00
8.	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	461.000.000,00	418.312.400,00	90,74	160.419.000,00
10.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	809.436.562.246,00	825.138.249.977,10	102,07	805.885.643.230,29
JUMLAH		854.256.062.246,00	884.655.899.039,10	103,56	866.235.598.985,00

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	267.593.048.804	255.036.361.914,14	95,31	241.633.579.039,00
2.	Dinas Kesehatan	91.583.890.503,00	77.843.793.580,78	85,04	84.245.111.617,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	79.671.989.809,00	78.123.341.656,30	98,06	85.537.243.087,95
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	130.212.559.133,00	120.092.023.390,12	92,23	85.917.528.324,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	22.657.244.751,00	21.474.298.125,00	94,78	29.306.407.031,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.437.164.435,00	8.196.977.143,00	97,15	7.209.833.981,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.724.010.937,00	5.529.050.404,00	71,6	7.466.791.459,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.309.319.202,00	3.881.037.739,00	90,06	3.790.922.193,00
9.	Dinas Kelautan Pangan dan Perikanan	5.600.112.601,00	5.350.535.611,00	95,57	5.735.295.357,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.212.028.004,00	5.068.612.945,00	97,25	4.745.298.593,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.212.139.073,00	5.857.053.673,00	81,21	7.393.469.232,00
12	Dinas Perhubungan	6.974.889.259,00	6.604.359.409,00	94,69	6.970.693.486,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.640.389.410,00	7.431.825.916,00	97,27	6.451.529.328,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.129.856.397,00	3.992.296.543,00	96,67	4.012.724.556,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.283.736.171,00	10.659.936.387,05	80,24	2.745.371.324,00
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.493.769.170,00	6.125.304.357,00	94,33	5.541.106.551,00
17.	Dinas Pertanian	18.467.264.620,00	17.796.791.593,00	96,32	19.471.056.102,00
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.845.018.171,00	8.000.707.690,07	81,27	11.909.345.833,00
19.	Sekretariat Daerah	37.097.208.369,00	33.399.601.935,00	90,03	30.294.496.875,00
20.	Sekretariat DPRD	27.894.793.650,00	26.759.452.910,00	95,93	27.759.275.912,00
21.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	2.909.657.088,00	2.876.170.187,00	98,85	2.482.021.010,00
22	Kecamatan Sungai Pagu	2.525.230.719,00	2.484.886.454,00	98,49	2.442.543.091,00
23	Kecamatan Sangir	2.309.946.581,00	2.293.225.182,00	99,96	2.037.687.666,00
24.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.109.040.799,00	1.927.020.056,00	91,37	1.846.289.148,00

No	SKPD	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
25	Kecamatan Sangir Batang Hari	3.594.983.267,00	3.522.836.138,00	97,22	2.222.839.013,00
26.	Kecamatan Pauh Duo	3.146.043.556,00	2.125.351.301,00	99,09	1.920.302.789,00
27.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.172.451.706,00	2.081.161.889,00	95,8	1.684.369.321,00
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.472.182.889,00	24.609.926.890,30	96,61	4.815.032.913,00
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.370.957.584,00	3.126.829.031,00	92,59	2.541.902.896,00
30.	Inspektorat Daerah	4.729.846.335,00	4.481.456.995,00	94,81	4.682.582.698,00
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.392.064.639,00	4.648.053.090,00	86,27	5.058.422.702,00
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.328.079.646,00	112.809.341.578,00	97,71	23.660.767.103,00
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.757.607.405,00	27.479.250.460,00	92,34	17.045.263.010,00
	JUMLAH	875.616.941.804,00	813.620.609.303,77	92,92	730.565.968.343,95

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel 3.3 tersebut, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2022 dan 2021 yang dibagi dalam kelompok belanja operasi dan belanja modal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	217.034.733.371,00	207.906.360.000,00	95,79	224.210.133.096,00
2.	Dinas Kesehatan	83.333.659.659,00	70.695.700.120,78	84,83	80.813.781.396,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	67.754.592.254,00	66.785.254.223,32	98,60	61.373.681.617,95
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	30.923.398.095,00	28.685.972.956,00	92,76	9.809.305.411,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	13.841.644.010,00	12.952.517.777,00	93,58	21.720.193.711,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.154.438.006,00	7.974.060.143,00	97,79	7.192.187.981,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.704.877.577,00	5.505.830.404,00	71,46	7.438.395.469,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.754.999.306,00	3.501.754.799,00	93,26	3.756.903.196,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.490.283.741,00	5.242.048.111,00	95,48	5.587.130.357,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.842.400.423,00	4.714.841.554,00	97,37	4.571.686.906,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	7.056.456.213,00	5.709.542.679,00	80,91	6.209.535.732,00

No	SKPD	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
	Perlindungan Anak				
12.	Dinas Perhubungan	6.398.022.009,00	6.052.498.408,00	94,60	6.817.125.586,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.756.290.240,00	6.555.111.541,00	97,04	6.153.414.327,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.103.882.401,00	3.970.095.548,00	96,74	3.917.073.866,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.008.842.171,00	2.945.517.327,00	97,90	2.507.065.355,00
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.074.951.388,00	5.734.777.090,00	94,40	5.442.877.381,00
17.	Dinas Pertanian	17.374.851.662,00	17.294.876.395,00	98,22	18.694.185.942,00
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.136.060.287,00	6.526.962.154,00	91,46	4.937.030.761,00
19.	Sekretariat Daerah	34.159.905.229,00	30.822.869.153,00	90,17	24.831.237.015,00
20.	Sekretariat DPRD	27.784.578.410,00	26.661.774.010,00	95,96	27.228.103.162,00
21.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	2.705.907.288,00	2.672.764.187,00	98,78	2.195.353.010,00
22.	Kecamatan Sungai Pagu	2.514.525.835,00	2.476.205.594,00	98,48	2.442.543.081,00
23.	Kecamatan Sangir	2.356.557.581,00	2.259.836.152,00	95,90	1.906.918.905,00
24.	Kecamatan Sangir Jujuan	2.089.049.787,00	1.907.030.066,00	91,29	1.836.439.149,00
25.	Kecamatan Sangir Batang Hari	2.514.240.407,00	2.445.102.138,00	97,25	2.005.798.013,00
26.	Kecamatan Pauh Duo	2.117.295.095,00	2.097.976.301,00	99,09	1.912.384.769,00
27.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.009.752.473,00	1.913.871.536,00	95,48	1.593.430.721,00
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.496.150.572,00	4.690.657.902,00	85,34	4.288.780.103,00
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.355.957.564,00	3.106.929.091,00	92,58	2.490.789.624,00
30.	Inspektorat Daerah	4.734.346.535,00	4.478.966.998,00	94,61	4.682.532.696,00
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.026.446.049,00	4.599.067.362,00	95,34	4.971.351.332,00
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	23.797.823.810,00	22.281.946.698,00	93,63	22.792.879.579,00
33.	Badan Kesbangwaslinmas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.616.197.405,00	27.352.963.460,00	92,36	17.045.288.010,00
	JUMLAH	651.903.104.887,00	608.487.257.791,10	93,34	602.877.207.253,95

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	50.545.913.253,00	47.130.001.914,14	93,24	17.423.445.543,00
2.	Dinas Kesehatan	8.200.230.854,00	7.146.093.460,00	87,17	3.431.393.221,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	11.937.377.555,00	11.338.137.482,98	94,98	4.168.561.460,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	99.288.561.048,00	91.426.050.464,12	92,08	76.606.232.913,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8.816.000.741,00	8.520.780.343,00	96,65	7.586.317.320,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	282.716.490,00	222.917.000,00	78,85	17.646.000,00

No	SKPD	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.133.860,00	17.400.000,00	90,94	27.398.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	554.319.806,00	379.282.940,00	68,42	34.019.000,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	118.928.860,00	118.487.500,00	99,71	148.165.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	369.627.581,00	353.771.381,00	95,71	173.612.697,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	155.883.660,00	147.511.000,00	94,75	1.183.934.500,00
12.	Dinas Perhubungan	576.367.249,00	551.863.000,00	95,67	153.567.900,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	885.109.170,00	876.694.375,00	99,05	298.114.999,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.023.995,00	22.198.000,00	85,30	95.650.750,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.275.093.000,00	7.713.419.050,06	75,07	238.307.969,00
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	419.907.782,00	390.527.277,00	93,25	98.431.170,00
17.	Dinas Pertanian	492.802.938,00	491.915.200,00	99,86	776.870.160,00
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.708.957.884,00	1.473.736.736,07	54,40	6.972.906.072,00
19	Sekretariat Daerah	2.937.303.146,00	2.596.932.532,00	88,41	5.463.259.860,00
20.	Sekretariat DPRD	110.415.140,00	97.629.900,00	88,42	533.172.750,00
21.	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	203.729.200,00	203.406.000,00	99,84	282.666.000,00
22	Kecamatan Sungai Pagu	8.705.114,00	8.680.960,00	99,72	0,00
23.	Kecamatan Sangir	33.389.000,00	33.389.000,00	100,00	110.768.700,00
24.	Kecamatan Sangir Jujuan	19.981.012,00	19.990.000,00	99,99	9.850.000,00
25.	Kecamatan Sangir Batang Hari	80.742.860,00	77.796.000,00	96,26	217.041.000,00
26.	Kecamatan Pauh Duo	26.753.960,00	26.375.000,00	98,53	17.198.000,00
27.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	162.699.235,00	162.310.950,00	99,76	90.937.600,00
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	19.976.032.297,00	19.919.269.086,30	99,72	526.252.810,00
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50	51.113.272,00
30.	Inspektorat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.619.140,00	44.000.728,00	79,11	87.071.400,00
31.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	521.484.789,00	409.102.700,00	78,45	226.092.614,00
32.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	141.410.000,00	126.287.000,00	89,31	0,00
	JUMLAH	219.977.814.670,00	202.072.297.511,67	91,86	127.045.936.090,00

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Kabupaten Solok Selatan, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solok Selatan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas ini terdiri dari SKPD dan BUD.

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

1) **Pendapatan-LO**
   Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.
2) **Pendapatan-LRA**
   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) **Beban**
   Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
2) **Belanja**
   Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunanggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran

pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.4 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) **Kas di Kas Daerah**
   Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**
   Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.
3) **Kas di Bendahara Penerimaan**
   Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.
4) **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**
   Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5) **Kas Lainnya**
   Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

4.3.5 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR, Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

(2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
c. Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
d Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

(4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*netrealizable value*)

(5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
b. Penghapusbukuan (*write down*) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c. Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukumkepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.

d. Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.6 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengurakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
   Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan memproduksi Sendiri
   Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secar sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
   Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.7. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:
   a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan
      Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas

dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan menguranglan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.8. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.9. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus dikajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran + 1.

4.3.10. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi;
2) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
3) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan Dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
4) Biaya lain yang secara khusus dibebankan schubungan konstruksi Yang bersangkutan.

4.3.11. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1) Tagihan Jangka Panjang.
   a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   a) Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
   b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
   c) Bangun Guna Serah/BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
   d) Bangun Serah Guna/BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3) Aset Tidak Berwujud (ATB)
   ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak

diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4) Aset Lain-Lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.12. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masingmasing pos.

3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

   a) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

   b) Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.13. Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

   Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persedian, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2) Ekuitas SAL

   Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

3) Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kesalahan tidak berulang
   a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
   b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
   Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut.
   - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
   - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan berulang
   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
2) Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.

BAB. V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan LRA	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	884.655.899.039,10	866.235.598.985,00

Realisasi pendapatan tahun 2022 adalah sebesar Rp884.656.560.392,10 atau 103,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp854.266.062.246,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp866.235.598.985,00 maka realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.420.300.054,10 atau naik sebesar 2,13%.
Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2022 dan tahun 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.885.025.000,00	92.121.048.046,10	124,68
2.	PENDAPATAN TRANSFER	770.005.887.246,00	784.706.842.887,00	101,84
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.875.150.000,00	7.828.209.106,00	79,27
Jumlah		854.266.062.246,00	884.655.899.039,10	103,56

Tabel V.1.2 Rincian Kenaikan/Penurunan Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	92.121.048.046,10	80.459.853.847,00	11.661.194.199,10	14,49
2.	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	784.706.842.887,00	741.085.202.403,00	43.621.440.484,00	5,89
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	7.828.209.106,00	44.690.542.735,00	(36.862.334.629,00)	(82,48)
Total		884.655.899.039,10	866.235.598.985,00	18.420.300.054,10	2,13

A. Pendapatan Asli Daerah	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	92.121.048.046,10	80.459.853.847,00

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp92.121.048.046,10 atau 124,68% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp73.885.025.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar

Rp80.459.853.847,00 maka realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.661.194.199,10 atau naik sebesar 14,49%.

Tabel V.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	12.218.945.000,00	11.006.714.870,10	90,08
2.	Retribusi Daerah	2.084.500.000,00	2.354.215.128,00	112,94
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.415.702.950,00	100,66
4.	Lain-lain PAD yang Sah	57.181.580.000,00	76.344.355.098,00	133,51
Jumlah		**73.885.025.000,00**	**92.121.048.046,10**	**124,68**

Tabel V.1.4 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	11.006.714.870,10	16.500.169.327,00	(5.493.454.456,90)	(33,29)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.354.215.128,00	1.235.018.343,00	1.119.196.785,00	90,62
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.415.702.950,00	1.700.551.019,00	715.211.931,00	42,06
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	76.344.355.098,00	61.024.115.158,00	15.320.239.940,00	25,11
Total		**92.121.048.046,10**	**80.459.853.847,00**	**11.661.194.199,10**	**14,49**

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022:

1. **Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp11.006.714.870,10 atau 90,08% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp12.218.945.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp16.500.169.327,00 maka realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.493.454.456,90 atau 33,29%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel – LRA	100.000.000,00	97.145.159,00	97,15
2	Pajak Restoran – LRA	1.509.200.000,00	1.999.906.655,00	132,53
3	Pajak Hiburan - LRA	9.170.000,00	9.170.000,00	100,00
4	Pajak Reklame – LRA	110.000.000,00	139.606.846,00	126,92
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	6.090.775.000,00	6.457.965.948,00	107,21
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.000.000.000,00	1.575.708.186,10	65,75
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) – LRA	2.900.000.000,00	1.294.461.936,00	44,64
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	500.000.000,00	692.749.243,00	138,55
Total		**12.218.945.000,00**	**11.006.714.870,10**	**90,08**

Tabel V.1.6 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pajak Hotel – LRA	97.148.159,00	22.584.045,00	74.564.114,00	330,16
2	Pajak Restoran – LRA	1.999.905.855,00	1.541.963.799,00	457.942.056,00	29,70
3	Pajak Hiburan - LRA	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00
4	Pajak Reklame – LRA	139.606.846,00	172.022.776,00	(32.415.930,00)	(18,84)
5	Pajak Penerangan Jalan-LRA	5.457.965.943,00	4.725.524.231,00	732.441.712,00	15,50
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	1.315.706.188,10	784.906.432,00	530.899.756,10	67,65
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA	1.294.461.836,00	882.445.406,00	412.016.430,00	46,69
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	892.750.243,00	8.570.822.638,00	(7.678.073.395,00)	(91,72)
Total		11.006.714.870,10	16.500.169.327,00	(5.493.454.456,90)	(33,29)

Sistem pemungutan pajak di Kabupaten Solok Selatan terbagi atas dua sistem, *yaitu Self Assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terhutang dan *Official Assessment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Jenis pajak yang dipungut dengan sistem *self assessment* adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Untuk Pajak reklame dan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dipungut dengan sistem *official assessment*.

Pada tahun 2022 realisasi pajak yang telah melebihi anggaran adalah Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sedangkan untuk Pajak hotel, Pajak mineral bukan logam dan batuan dan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) belum melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak reklame yang dipungut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp139.606.846,00 (126,92% dari anggaran) dan mengalami penurunan sebesar Rp32.415.930,00 (18,84% dari tahun 2021).

Pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) yang dipungut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.294.461.836,00 (44,64% dari anggaran) dan mengalami kenaikan sebesar Rp412.016.430,00 (46,69% dari tahun 2021).

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel - LRA

Pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp97.148.159,00 atau sebesar 97,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 7, ayat (2). huruf c dinyatakan PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD adalah melaksanakan pemungutan pajak daerah , namun dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak hotel Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelolaaan Keuangan

Daerah melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, khususnya penerimaan atas belanja penginapan atau hotel. Realisasi penerimaan pajak hotel untuk masing-masing OPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.7 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Untuk Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	363.636,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	505.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.000,00
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.000.005,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	31.818,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	435.000,00
7	Dinas Pertanian	450.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	86.184.705,00
Total		**97.148.159,00**

b) Pajak Restoran - LRA

Pajak restoran yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.999.906.655,00 atau sebesar 132,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.509.000.000,00.

Dalam realisasi pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp1.999.906 655,00 terdapat realisasi penyetoran pajak restoran atas pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 yang baru disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp3.628.850,00 yang terdiri dari Organisasi Perangat Daerah (OPD) sebagai berikut:

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD-SKPKD) sebesar Rp2.437.850,00.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp10.000,00.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp909.000,00.
- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp272.000,00.

Sesuai fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai kewenangan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran, sama halnya dengan pemungutan pajak hotel maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, khususnya penerimaan atas belanja makan dan minum. Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.8 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Untuk Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.404.820,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.776.400,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.110.500,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.523.960,00
5	Dinas Kesehatan	78.963.750,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.748.600,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.626.931,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	26.389.900,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	9.012.500,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.351.400,00
11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	67.762.041,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.877.800,00
13	Dinas Perhubungan	2.865.500,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	29.420.407,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.919.000,00
16	Dinas Pertanian	35.658.500,00
17	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8.799.600,00
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.941.600,00
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.913.500,00
20	Inspektorat	2.857.700,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10.168.800,00
22	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	8.320.100,00
23	Kecamatan Pauh Duo	12.697.500,00
24	Kecamatan Sangir	11.878.954,00
25	Kecamatan Sangir Balai Janggo	11.090.600,00
26	Kecamatan Sangir Jujuan	8.589.700,00
27	Kecamatan Sangir Batang Hari	9.570.000,00
28	Kecamatan Sungai Pagu	9.281.500,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8.748.095,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.434.500,00
31	Sekretariat Daerah	229.819.461,00
32	Sekretariat DPRD	84.011.697,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.177.442.612,00
Total		1.996.277.305,00

c) Pajak Reklame - LRA

Pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp139.606.846,00 atau sebesar 126,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp110.000.000,00. Pajak reklame merupakkan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

d) Pajak Penerangan Jalan - LRA

Pajak penerangan jalan, merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, artinya tidak dipungut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kepada wajib pajak, akan tetapi dilakukan oleh PT. PLN. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan pihak PT. PLN Wilayah Sumatera Barat. Jumlah pajak penerangan jalan yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5.457.965.943,00 atau sebesar 107,21% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp5.090.775.000,00.

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

Pajak mineral bukan logam dan batuan, juga termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, namun dibawah monitoring dan evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.315.706.188,10 atau sebesar 65,79% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00.

f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh Bupati, untuk besaran pajak terhutang yang dalam pemungutannya melibatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.294.461.836,00 atau sebesar 44,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak kabupaten yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Solok Selatan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp692.749.243,00 atau sebesar 138,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.354.215.128,00 atau sebesar 112,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.084.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2021 maka realisasi retribusi daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.119.196.785,00 atau naik sebesar 90,62%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	0,00	122.519.000,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	275.000.000,00	132.471.000,00	48,17
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	461.000.000,00	416.312.400,00	90,74
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	250.000.000,00	56.252.000,00	22,50
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LRA	271.000.000,00	507.447.501,00	187,25
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	335.000.000,00	753.745.227,00	225,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	240.000.000,00	45.048.000,00	18,77
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	252.500.000,00	282.505.000,00	111,88
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0,00	36.915.000,00	0,00
Total		2.084.500.000,00	2.354.215.128,00	112,94

Tabel V.1.10 Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	122.519.000,00	0,00	122.519.000,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	132.471.000,00	64.339.000,00	68.132.000,00	105,9
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	416.312.400,00	150.419.000,00	267.893.400,00	178,1
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	56.252.000,00	56.457.500,00	(205.500,00)	(0,364)
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	507.447.501,00	234.832.814,00	272.614.687,00	116,1

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	Telekomunikasi - LRA				
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	752.745.227,00	430.070.500,00	323.674.727,00	75,26
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	45.048.000,00	30.451.000,00	14.597.000,00	47,94
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	282.505.000,00	125.476.000,00	157.029.000,00	125,1
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	35.915.000,00	141.472.529,00	(105.557.529,00)	(74,61)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Total	2.354.215.128,00	1.235.018.343,00	1.119.196.785,00	90,62

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10, ayat (1), huruf f, disebutkan "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Pada tahun 2022 ada 9 (sembilan) jenis objek retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berikut daftar jenis objek retribusi dan Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab pemungutan diantaranya :

Tabel V.1.11Daftar OPD Penanggung Jawab dan Pemungut Retribusi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

No	Objek retribusi	OPD Pemungut
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Perkim LH
3	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan UKM
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA

Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp122.519.000,00. Retribusi pelayanan kesehatan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Kesehatan. Di awal tahun 2022 Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak ada rencana penerimaan dikarenakan pola pelayanannya menggunakan Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, namun pada tanggal 17 Maret 2022 ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Psat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, dengan demikian pelayanan kesehatan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan kembali pada pola retribusi dengan penerapan kembali Peraturan daerah Nomor 4 Tahu 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

b) **Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA**
Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp132.471.000,00 atau sebesar 48,17% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp275.000.000,00. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

c) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA**
Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp56.404.500,00 atau sebesar 22,56% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp250.000.000,00. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perhubungan.

d) **Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA**
Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp507.447.501,00 atau sebesar 187,25% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp271.000.000,00. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

e) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA**
Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp753.745.227,00 atau sebesar 225% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp335.000.000,00. Target Retribusi pemakaian kekayaan daerah berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, akan tetapi untuk memenuhi pencapaian realisasi dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Pada tahun 2022, retribusi pemakaian kekayaan daerah terbagi kepada 3 macam pemungutan yaitu:

Tabel V.1.12 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan – LRA	25.000.000,00	105.173.227,00	420,69	74.398.000,00
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LRA	110.000.000,00	110.500.000,00	100,45	151.522.500,00
3.	Retribusi Pemakaian Alat – LRA	200.000.000,00	538.072.000,00	269,04	204.150.000,00
Total		335.000.000,000	753.745.227,000	225,00	225.920.500,00

Berikut rincian realisasi penyetoran dan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

Tabel V.1.13Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Masing-masing OPD Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Retribusi Pemakaian Ruangan	Retribusi Pemakaian Alat
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kesbangpol dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.700.000,00	120.000,00	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.300.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.700.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	33.590.000,00	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.700.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.300.000,00	424.727,00	0,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.300.000,00	100.000,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	2.900.000,00	0,00	457.722.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.300.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	2.200.000,00	1.726.000,00	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.900.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	1.400.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.100.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.400.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Pertanian	11.700.000,00	4.205.000,00	0,00
17	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.400.000,00	0,00	80.000.000,00
18	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.700.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.700.000,00	0,00	0,00
20	Inspektorat	1.500.000,00	0,00	0,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	900.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	1.100.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Pauh Duo	800.000,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Sangir	800.000,00	300.000,00	0,00
25	Kecamatan Sangir Balai Janggo	1.200.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Sangir Jujuar	1.200.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Sangir Batang Hari	1.000.000,00	802.000,00	0,00
28	Kecamatan Sungai Pagu	1.100.000,00	0,00	0,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	5.400.000,00	5.040.000,00	0,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	0,00	0,00
31	Sekretariat Daerah	17.600.000,00	3.800.000,00	0,00
32	Sekretariat DPRD	3.500.000,00	0,00	0,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.700.000,00	50.469.500,00	350.000,00
Total		110.500.000,00	105.173.227,00	538.072.000,00

f) Retribusi Pelayanan Pasar – LRA

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp418.312.400,00 atau sebesar 90,74% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp461.000.000,00. Retribusi pelayanan pasar di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Tabel V.1.14 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar – LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	91.000.000,00	105.147.400,00	115,55
2.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	370.000.000,00	313.165.000,00	84,64
Total		461.000.000,00	418.312.400,00	90,74

g) **Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA**
Retribusi tempat khusus parkir yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp45.048.000,00 atau sebesar 18,77% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp240.000.000,00. Retribusi tempat khusus parkir di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Perhubungan.

h) **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA**
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp282.505.000,00 atau sebesar 111,88% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp252.500.000,00. Retribusi tempat khusus parkir di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

i) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA**
Retribusi izin mendirikan bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 35 915.000,00. Di awal tahun anggaran 2022 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak menjadi target kinerja Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang melarang pemungutan Retribusi IMB, namun pada tanggal 25 Februari 2022 ditetapkan Surat Edaran Bersama Nomor: 973/1030/SJ NOMOR: SE-1/MK.07/2022 NOMOR: 06/SE/M/2022 NOMOR. 399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Godung yang membolehkan penarikan retribusi atas PBG dengan Perda Perda Tentang IMB/Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.415.762.950,00 atau sebesar 100,66% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.400.000.000,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 maka realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp715.211.931,00 atau naik sebesar 42,06%.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp57.181.580.000,00 atau sebesar 133,51% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp76.344.355 098,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2021 sebesar Rp61.024.11.158,00 maka realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.320.239.940,00 atau 25,11%.
Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	575.433.904,00	1.760.126.100,00	305,86
2.	Jasa Giro	5.800.000.000,00	2.032.953.705,00	35,05
3.	Pendapatan Bunga	0,00	5.376.329.638,00	0,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.299.096.037,00	0,00
5.	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	6.725.146.093,00	$ 841.059.102,00	101,71
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	78.060 065,00	0,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	4.397.900,00	0,00
9.	Pendapatan BLUD	44 280.000.000,00	57.952.356.661,00	131,47
	Jumlah	**57.181.580.000,00**	**76.344.355 088,00**	**133,51**

Tabel V.1.16 Kenaikan/Penurunan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan %
1	Hasil Penjua an BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	1.760.126.100,00	1,374 147.599,00	385.978.501,00	28,09
5	Penerimaan Jasa Giro – LRA	2.034.220.056,00	3.157 787.116,00	(1.123.567.058,00)	(35,58)
4	Pendapatan Bunga - LRA	5.376.329.638,00	2.897 849,402,00	2.478.480.236,00	85,53
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA	2 299.096.037,00	273.098.963,00	2.025.997.874,00	741,9
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LRA	6.841.059,102,00	6.934.297.565,00	(93 238.463,00)	(1,345)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	76.060 065,00	92.424.593,00	(14.358.538,00)	(15,54)
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	0,00	21 040,00	(21 040,00)	(100)
10	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	4.397.900,00	1.296.641.195,00	(1 292.253.395,00)	(99,66)
12	Pendapatan BLUD - LRA	57.552.336.661,00	44,997.918.235,00	12.954.498.376,00	28,79
	Total	76.345.821.451,00	61.024.115.159,00	15.321.506.293,00	25,11

B. Pendapatan Transfer	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	784.706.642.887,00	741.085.202.403,00

Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp784.706.642.887,00 atau sebesar 101,84% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp770.505.897.246,00. Apabila

dibandingkan dengan realiasi pendapatan transfer tahun 2021 maka realisasi pendapatan transfer tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp43.621.440.484,00 atau naik sebesar 5,98%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer tahun 2022:

Tabel V.1.17Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	670.317.001.555,00	676.013.344.009,00	100,85
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	62.567.734.691,00	71.072.147.878,00	113,59
Total		770.505.887.246,00	784.706.642.887,00	101,84

Tabel V.1.18Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	676.013.344.009,00	632.792.065.983,00	43.221.278.026,00	6,83
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	37.621.151.000,00	56.256.306.000,00	(18.635.155.000,00)	(33,15)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	71.072.147.878,00	52.036.830.420,00	19.035.317.458,00	36,58
Total		784.706.642.887,00	741.085.202.403,00	43.621.440.484,00	5,89

1. **Transfer Pemerintah Pusat**

   Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2022 adalah sebesar Rp676.013.344.009,00 atau sebesar 100,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp670.317.001.555,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2021 maka realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat untuk ahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp43.221.278.026,00 atau naik sebesar 6,83%.

   Rincian transfer pemerintah pusat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.19Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	30.823.276.000,00	51.462.886.775,00	167,03
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	14.346.949.000,00	18.897.650.392,00	131,72
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	436.929.074.199,00	436.897.900.562,00	99,99
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	188.218.602.357,00	168.734.846.280,00	89,65
Total		670.317.001.555,00	676.013.344.009,00	100,85

Tabel V.1.20Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	51.482.886.775,00	37.602.028.224,00	13.880.858.551,00	36,92
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	18.897.650.392,00	14.772.927.257,00	4.124.723.135,00	27,92
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	436.697.960.562,00	437.174.072.300,00	(276.111.438,00)	(0,06)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	168.734.846.280,00	143.243.038.502,00	25.491.807.778,00	17,80
Total		676.013.344.009,00	632.792.065.983,00	43.221.278.026,00	6,83

a) Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp30.823.276.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp51.482.886.775,00 atau sebesar 167,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak tahun 2021 maka realisasi bagi hasil pajak tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.880.858.551,00 atau naik sebesar 36,92%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.21 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	26.091.360.000,00	45.379.028.988,00	173,93
2	DBH PPh Pasal 21 – LRA	4.102.300.000,00	4.719.940.065,00	115,06
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN – LRA	0,00	342.350.091,00	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA	39.616.000,00	41.567.633,00	104,93
Total		30.823.276.000,00	51.482.886.775,00	167,03

Tabel V.1.22 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	45.379.028.988,00	31.986.411.209,00	14.392.617.779,00	45,00
2	DBH PPh Pasal 21 - LRA	4.719.940.063,00	5.372.092.839,00	(652.142.776,00)	(12,14)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN – LRA	342.350.091,00	179.374.367,00	162.975.724,00	90,86
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA	41.567.633,00	64.159.809,00	(22.592.176,00)	(35,21)
Total		51.482.886.775,00	37.602.028.224,00	13.880.858.551,00	36,92

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2022 adalah sebesar Rp14.346.949.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp18.897.650.392,00 atau sebesar 131,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak/ sumber daya alam tahun 2021 maka realisasi bagi hasil pajak/

sumber daya alam tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.124.723.135,00 atau naik sebesar 27,92%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.23 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA	11.055.042.000,00	15.016.724.363,00	135,47
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent – LRA	1.126.612.000,00	258.334.073,00	22,75
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty – LRA	0,00	1.639.733.356,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	176.984.000,00	26.547.600,00	15,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
Total		**14.346.948.000,00**	**18.897.650.392,00**	**131,72**

Tabel V.1.24 Kenaikan/Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA	0,00	516.000,00	(516.000,00)	(100,00)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA	15.016.724.363,00	11.905.608.624,00	3.111.115.739,00	26,13
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent – LRA	258.334.073,00	20.322.900,00	236.011.173,00	1.161,31
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty – LRA	1.639.733.356,00	675.332.718,00	964.400.638,00	142,80
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	26.547.600,00	496.646.865,00	(470.099.265,00)	(94,65)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LRA	1.958.311.000,00	1.674.503.150,00	283.810.850,00	16,95
Total		**18.897.650.392,00**	**14.772.927.257,00**	**4.124.723.135,00**	**27,92**

c) Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan dana alokasi umum tahun 2022 adalah sebesar Rp436.929.974.198,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp436.897.960.562,00 atau sebesar 99,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi umum tahun 2021 maka realisasi dana alokasi umum tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp276.111.438,00 atau turun sebesar 0,06%.

d) **Dana Alokasi Khusus**

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp188.216.802.357,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp168.734.846.280,00 atau sebesar 89,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana alokasi khusus tahun 2021 maka realisasi dana alokasi khusus tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.491.807.778,00 atau naik sebesar 17,80%.

Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.25Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LRA	1.026.647.000,00	947.799.433,00	92,32
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LRA	24.967.168.000,00	23.778.006.100,00	95,24
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LRA	19.494.836.000,00	17.326.967.300,00	88,89
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah – LRA	13.329.593.000,00	8.777.853.393,00	64,93
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian – LRA	5.917.320.000,00	3.666.569.223,00	93,80
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LRA	4.724.078.000,00	4.074.871.956,00	86,26
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting – LRA	178.342.000,00	177.990.250,00	99,80
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat – LRA	673.644.000,00	510.817.000,00	75,83
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB – LRA	0,00	445.693.375,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LRA	10.360.124.000,00	9.243.898.842,00	89,23
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - LRA	7.358.459.739,00	7.166.080.009,00	97,41
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler – LRA	5.412.852.000,00	5.412.783.000,00	100,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan – LRA	1.282.762.000,00	1.200.076.142,00	93,55
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana – LRA	451.965.000,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik - BOS Reguler – LRA	24.450.257.118,00	23.971.223.294,00	98,04
16	DAK Non Fisik - BOS Kinerja – LRA	920.000.000,00	920.000.000,00	100,00
17	DAK Non Fisik - TPG PNSD – LRA	54.351.593.000,00	49.390.073.742,00	90,87
18	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD - LRA	1.275.000.000,00	750.187.600,00	58,84
19	DAK Non Fisik - TKG PNSD - LRA	4.351.144.000,00	4.351.144.000,00	100,00
20	DAK Non Fisik - BOP PAUD – LRA	2.830.500.000,00	2.302.200.000,00	81,33
21	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan – LRA	1.086.500.000,00	1.093.500.000,00	100,64
22	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK – LRA	5.120.624.470,00	146.691.270,00	2,86
23	DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan - LRA	231.908.000,00	0,00	0,00
24	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB – LRA	0,00	2.017.879.200,00	0,00
25	DAK Non Fisik - PK2UKM – LRA	400.500.000,00	377.183.000,00	94,11
26	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal – LRA	374.485.000,00	167.531.760,00	44,74
27	DAK Non Fisik - BOKB - KB – LRA	2.086.269.000,00	0,00	0,00
28	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian – LRA	559.700.000,00	535.766.500,00	95,72
Total		**188.216.802.357,00**	**168.734.846.280,00**	**89,65**

Tabel V.1.26Kenaikan/Penurunan Realisasi Pendapatan Alokasi Khusus Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA	947.799.433,00	1.344.471.451,00	(396.672.018,00)	(29,50)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA	23.778.066.100,00	12.626.719.818,00	11.151.346.282,00	88,32
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	17.308.987.900,00	5.332.018.832,00	11.976.949.496,00	224,62
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB - LRA	0,00	1.709.656.627,00	(1.709.656.627,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah - LRA	8.777.853.393,00	199.246.608,00	8.578.606.785,00	4.305,52
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - LRA	0,00	1.518.432.473,00	(1.518.432.473,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - LRA	0,00	2.679.065.710,00	(2.679.065.710,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LRA	3.686.669.222,00	1.928.130.927,00	1.758.438.295,00	92,16
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LRA	4.074.871.956,00	0,00	4.074.871.956,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting - LRA	177.990.250,00	0,00	177.990.250,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - LRA	510.617.000,00	0,00	510.617.000,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB - LRA	443.699.375,00	1.160.546.500,00	(716.847.125,00)	(61,77)
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM - LRA	0,00	7.829.347.003,00	(7.829.347.003,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Desa Pembenguhan	0,00	2.313.639.060,00	(2.313.639.060,00)	(100,00)

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	Pertanian – LRA				
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan - LRA	0,00	771.678.933,00	(771.678.933,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LRA	9.245.896.842,00	11.337.420.349,00	(2.093.521.507,00)	(18,47)
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - LRA	7.166.060.008,00	0,00	7.166.060.008,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler - LRA	5.412.783.000,00	0,00	5.412.783.000,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan - LRA	1.200.076.143,00	0,00	1.200.076.143,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan - LRA	0,00	4.685.199.200,00	(4.685.199.200,00)	(100,00)
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan - LRA	0,00	3.322.453.000,00	(3.322.453.000,00)	(100,00)
22	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA	0,00	5.079.724.000,00	(5.079.724.000,00)	(100,00)
23	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi - LRA	0,00	5.712.069.600,00	(5.712.069.600,00)	(100,00)
24	DAK Non Fisik - BOS Reguler - LRA	23.971.223.294,00	0,00	23.971.223.294,00	0,00
25	DAK Non Fisik - BOS Kinerja - LRA	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00
26	DAK Non Fisik - TPG PNSP - LRA	49.290.079.742,00	59.824.027.000,00	(10.533.953.258,00)	(17,58)
27	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD - LRA	750.187.500,00	393.690.000,00	356.597.500,00	90,60
28	DAK Non Fisik - TKG PNSD – LRA	4.351.144.000,00	0,00	4.351.144.000,00	0,00
29	DAK Non Fisik - BOP PAUD – LRA	2.302.200.000,00	2.454.718.000,00	(152.518.000,00)	(6,21)
30	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan - LRA	1.093.500.000,00	1.360.752.500,00	(267.252.500,00)	(19,64)
31	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK - LRA	146.691.270,00	5.309.426.817,00	(5.162.714.547,00)	(97,47)
32	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB – LRA	2.017.979.200,00	1.712.218.000,00	305.661.200,00	17,85
33	DAK Non Fisik - PK2UKM - LRA	377.183.000,00	679.222.000,00	(302.039.000,00)	(44,47)
34	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal - LRA	167.531.750,00	0,00	167.531.750,00	0,00
35	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LRA	535.766.500,00	1.379.279.924,00	(843.513.424,00)	(61,16)
Total		168.734.646.280,00	143.243.038.502,00	25.491.607.778,00	17,80

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp37.621.151.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan sebesar

Rp37.621.151.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp18.635.155.000,00, atau turun sebesar 33,13%.
Pada tahun 2022 transfer pemerintah pusat lainnya hanya terdiri dari Dana Desa. Adapun rincian realisasi transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.27Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	8.567.934.000,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD) – LRA	37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00	47.689.372.000,00
Total		**37.621.151.000,00**	**37.621.151.000,00**	**100,00**	**56.256.306.000,00**

3. **Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2022 merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target sebesar Rp62.567.734.691,00 dengan realisasi sebesar Rp71.072.147.878,00 atau 113,59%.
Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2021 maka realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp19.035.317.458,00, atau naik sebesar 36,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	51.067.734.691,00	59.572.147.878,00	116,65	49.536.830.420,00
2	Bantuan Keuangan – LRA	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Total		**62.567.734.691,00**	**71.072.147.878,00**	**113,59**	**52.036.830.420,00**

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil adalah transfer bagi hasil pajak dari provinsi sumatera barat kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp59.572.147.878,00 atau 116,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.067.734.691,00. Dari seluruh realisasi tahun 2022 untuk penyaluran bagi hasil pajak provinsi, terdapat penyaluran Kurang Bayar pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2021 sejumlah Rp13.343.216.486,00 dan penyaluran bagi hasil tahun 2022 Rp46.228.931.392,00.

Tabel V.1.29 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	17.834.170.221,00	11.251.535.102,00	94,50	9.208.670.377,00
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	2.536.060.385,00	0,00	5.955.772.246,00
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	5.276.162.640,00	5.546.303.231,00	105,18	4.347.994.708,00
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	1.913.553.839,00	0,00	856.798.143,00
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	21.379.295.209,00	17.630.058.352,00	82,46	15.083.773.936,00
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	0,00	7.128.667.832,00	0,00	4.252.965.979,00
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	344.165.275,00	264.925.689,00	76,98	240.511.565,00
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	0,00	62.961.359,00	0,00	79.698.004,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	12.176.956.215,00	11.536.138.455,00	94,74	9.985.900.096,00
	Kurang Bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	0,00	1.702.023.127,00	0,00	1.624.746.630,00
Jumlah Penerimaan Reguler		51.007.734.691,000	46.228.931.392,000	90,62	38.966.650.712,000
Jumlah Penerimaan Kurang Bayar		0,00	13.343.316.486,000	0,00	10.869.979.703,000
Total		51.007.734.691,000	59.572.147.878,000	116,65	49.536.630.420,000

b) Bantuan Keuangan

Realtsasi Bantuan keuangan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp[1.500.000000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp[1.500.000000,00

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	7.828.208.106,00	44.690.542.735,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya tahun 2022 mempunyai target anggaran Rp9.875.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.828.208.106,00 atau 79,27%.

1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LRA

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2022 adalah pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mempunyai target sebesar Rp9.875.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.828.208.106,00 atau 79,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2021 maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.862.334.629,00, atau turun sebesar 82,48%. Penurunan ini disebabkan oleh Dana Hibah BOS sudah tergabung kedalam DAK Non Fisik BOS Reguler dan Kinerja pada Dana Transfer Pusat Tahun 2022.

Rincian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel V.1.30 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dan Pemerintah Pusat - LRA	0,00	0,00	0,00	21.750.000.000,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	22.940.542.735,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LRA	9.875.150.000,00	7.828.208.106,00	79,27	0,00
Total		9.875.150.000,00	7.828.208.106,00	79,27	44.690.542.735,00

5.1.2. Belanja	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	813.620.609.303,77	730.565.958.343,95

Realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp813.620.609.303,77 atau 92,92% dari anggaran belanja sebesar Rp875.616.941.804,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp730.565.958.343,95 terjadi kenaikan sebesar Rp83.054.650.959,82 atau 11,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran2022 (Rp)	Realisasi2022 (Rp)	%	Realisasi2021 (Rp)
1.	BELANJA OPERASI	651.903.104.687,00	609.467.257.791,10	93,34	602.877.207.253,95
2.	BELANJA MODAL	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86	127.046.936.090,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.736.222.447,00	3.081.054.001,00	81,98	641.815.000,00
	Jumlah	875.616.941.804,00	813.620.609.303,77	92,92	730.565.958.343,95

A. Belanja Operasi	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	608.487.257.791,10	602.877.207.253,95

Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp608.487.257.791,10 atau 93,34% dari total anggaran Belanja Operasi sebesar Rp651.903.104.887,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp602.877.207.253,95 terjadi kenaikan sebesar Rp5.610.050.537,15 atau 0,93% yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel V.1.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	389.819.286.181,00	375.198.145.727,83	96,25	372.832.719.871,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	252.797.163.246,00	224.250.352.259,27	88,71	221.928.376.307,95
3.	Belanja Hibah	9.286.655.460,00	9.038.761.804,00	97,33	7.969.922.995,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	145.686.080,00
	Jumlah	651.903.104.887,00	608.487.257.791,10	93,34	602.877.207.253,95

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp375.198.145.727,83 atau 96,25% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp389.819.286.181,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp372.832.719.871,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.365.425.856,83 atau 0,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	228.416.794.110,00	225.722.201.481,00	97,95	222.652.560.450,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.389.237.796,00	73.675.662.913,50	94,25	71.016.462.973,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.948.231.181,00	67.482.226.575,33	92,69	68.480.353.741,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.548.197.120,00	9.325.586.809,00	97,66	9.911.649.575,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	312.952.974,00	283.592.074,00	90,62	334.140.120,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.976.000,00	100,00	437.544.000,00
	Jumlah	389.819.286.181,00	375.198.145.727,83	96,25	372.832.719.871,00

Didalam realisasi belanja pegawai terdapat yang bersumber dari belanja BLUD RSUD sebesar Rp5.296.920.566,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.34 Rincian belanja pegawai yang berasal dari dana BLUD RSUD Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.060.450.566,00
2.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	123.680.000,00
3.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	112.790.000,00
Jumlah		5.296.920.566,00

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja pegawai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp223.722.201.461,00 atau 97,95% dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp228.415.784.110,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp222.652.569.450,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.069.632.011,00 atau 0,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	168.861.573.193,00	165.873.654.870,00	98,23	185.186.909.365,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.901.766.230,00	16.391.303.890,00	96,98	16.369.121.840,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.058.387.033,00	3.796.998.712,00	93,56	4.311.091.950,00
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.599.613.567,00	10.505.802.400,00	99,11	10.143.529.000,00
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.221.541.230,00	8.041.445.000,00	95,00	8.008.242.772,00
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.813.152.243,00	10.526.857.500,00	97,35	10.617.607.920,00
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	219.256.493,00	203.277.525,00	92,71	113.397.850,00
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.104.922,00	2.529.727,00	41,29	2.477.506,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.146.781.200,00	11.913.947.046,00	98,08	11.593.059.626,00
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	481.126.305,00	386.381.618,00	80,31	391.490.588,00
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.128.393.700,00	1.082.012.143,00	95,89	915.042.233,00
Jumlah		228.415.784.110,00	223.722.201.461,00	97,95	222.652.569.450,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2022 sebesar Rp73.875.662.813,50 atau 94,25% dari total anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp78.383.237.796,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp71.016.462.979,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.859.199.834,50 atau 4,03% dengan rincian sebagai berikut

Tabel V.1.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.974.857.796,00	72.790.377.813,50	94,68	71.016.462.979,00
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	170.400.000,00	85.285.000,00	50,06	0,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	239.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		78.383.237.796,00	73.875.662.813,50	94,25	71.016.462.979,00

c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp67.482.226.576,33 atau 92,89% dari total anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp72.648.234.181,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp68.480.353.741,00 terjadi penurunan sebesar Rp998.127.164,67 atau 1,46%.

Tabel V.1.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	471.850.775,00	327.112.308,00	70,81	623.852.270,00
2.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	23.815.000,00	18.041.000,00	75,75	0,00
3.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.351.593.000,00	52.158.718.813,00	95,97	65.973.328.695,00
4.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.351.144.000,00	4.346.927.100,00	99,90	3.518.897.100,00
5.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.275.000.000,00	1.015.500.000,00	79,65	378.750.000,00
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.944.156.406,00	4.278.237.355,33	71,97	2.552.971.346,00
7.	Belanja Honorarium	5.787.666.000,00	4.999.240.000,00	86,39	5.165.366.529,00
9.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	442.800.000,00	391.450.000,00	88,40	267.188.000,00
Jumlah		72.648.234.181,00	67.482.226.576,33	92,89	68.480.353.741,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.323.586.808,00 atau 97,65% dari total anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.548.197.120,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp9.911.649.575,00 terjadi penurunan sebesar Rp588.062.772,00 atau 5,93%.

Tabel V.1.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	561.540.000,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	65.679.600,00	56.677.200,00	81,77	54.765.900,00
3.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	76.175.520,00	65.577.000,00	85,75	56.215.000,00
4.	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	48.132.000,00
5.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.233.000,00
6.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.157.700,00	98.859.300,00	72,82	98.554.800,00
7.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.049.300,00	0,00	0,00	7.049.175,00
8.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.392.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
9.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	57.880.000,00	50.033.107,00	86,43	49.949.700,00
11.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.891.950.000,00	1.810.735.036,00	95,71	2.011.400.000,00
12.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.511.200.000,00	3.471.300.000,00	98,86	3.856.800.000,00
13.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.490.000,00	0,00	0,00	6.510.000,00
	Jumlah	**9.548.197.120,00**	**9.323.586.643,00**	**97,65**	**9.911.649.575,00**

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp283.592.074,00 atau 90,62% dari total anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH daerah sebesar Rp312.952.974,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp334.140.126,00 terdapat penurunan sebesar Rp50.548.052,00 atau 15,13%.

Tabel V.1.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	48.800.000,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	6.552.000,00	100,00	5.596.000,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	84.240.000,00
4.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.214.240,00	85,71	5.214.240,00
5.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	469.056,00	448.414,00	95,60	442.299,00
6.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	1.200,00	85,71	1.060,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000,00	5.010.720,00	91,10	0,00
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.000,00	102.560,00	89,53	0,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.000,00	308.830,00	90,85	0,00
10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	139.077.239,00	111.264.660,00	80,00	191.844.527,00
11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.935.005,20	1.809.000,00	93,49	0,00
Jumlah		317.952.974,00	283.592.074,00	90,62	334.140.126,00

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.880.000,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.880.000.00 Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp437.544.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp73.332.000,00 atau 16,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.40 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	110.880.000,00
2.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	100,00	326.664.000,00
Jumlah		510.880.000,00	510.876.000,00	100,00	437.544.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp224.250.350.259,27 atau 88,71% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp252.797.163.246,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp221.928.878.307,95 terdapat kenaikan sebesar Rp2.321.471.951,32 atau 1,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Barang	100.562.180.695,82	89.272.128.190,27	88,77	78.673.917.200,00
2.	Belanja Jasa	89.527.216.206,70	83.334.133.413,52	93,08	85.734.665.648,95
3.	Belanja Pemeliharaan	8.193.101.736,48	7.843.048.047,48	95,81	16.271.333.402,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	50.633.582.680,00	41.056.368.641,00	81,11	39.601.440.561,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.888.572.927,00	2.734.073.007,00	70,31	1.447.521.496,00
Jumlah		252.797.163.246,00	224.250.350.259,27	88,71	221.928.878.307,95

Didalam realisasi belanja barang dan jasa terdapat yang bersumber dari belanja BLUD dan dana BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp8.186.082.381,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.42 Rincian belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan BLUD RSUD Tahun 2022

No	Uraian	BOS	BLUD	JUMLAH
1.	Belanja Barang	7.907.893.176,00	15.616.187.545,82	23.524.080.721,82
2.	Belanja Jasa	8.092.355.522,00	22.242.580.735,70	30.334.736.257,70
3.	Belanja Pemeliharaan	607.680.890,00	955.321.099,46	1.563.201.989,46
4.	Belanja Perjalanan Dinas	1.899.777.803,00	551.932.294,00	2.451.710.052,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	1.048.772.027,00	1.048.772.027,00
	Jumlah	18.507.907.416,00	40.414.593.642,00	58.922.501.058,00

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Rp89.272.128.130,27 atau 88,77% dari total anggaran Belanja Barang sebesar Rp100.562.180.595,82. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2021 sebesar Rp78.873.917.200,00 terdapat kenaikan sebesar Rp10.398.210.930,27 atau 13,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	100.529.317.585,82	89.239.537.601,27	88,77	78.845.835.168,00
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	32.863.010,00	32.590.529,00	99,17	28.082.032,00
	Jumlah	100.562.180.595,82	89.272.128.130,27	88,77	78.873.917.200,00

1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Rp89.239.537.601,27 atau 88,77% dari total anggaran Belanja Barang Rp100.529.317.585,82. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2021 sebesar Rp78.845.835.168,00 terdapat kenaikan sebesar Rp10.398.210.930,27 atau 13,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.276.931.238,00	1.175.561.253,00	92,06	1.174.058.503,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	726.606.131,00	554.157.761,00	76,27	304.372.574,00
3.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.837.339.041,00	4.822.536.110,45	82,62	4.479.222.964,00
4.	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.045.000,00	9.045.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	215.641.000,00	215.199.000,00	99,79	201.332.434,00
6.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	0,00
7.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	526.865.000,00	512.393.000,00	97,25	1.123.814.428,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
8.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	141.312.900,00	141.250.000,00	99,96	118.494.705,00
9.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.534.513.294,00	12.875.756.658,00	102,81	9.820.806.175,00
10.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.119.423.959,00	2.775.303.269,00	88,87	2.670.619.152,00
11.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	16.560.000,00
12.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	75.603.383,00	75.603.383,00	100,00	0,00
13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.332.800,00	1.332.800,00	100,00	0,00
14.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.540.000,00	3.540.000,00	100,00	13.670.000,00
15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.799.660.208,92	4.279.954.289,92	89,17	3.776.019.745,00
16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.713.221.854,00	1.476.176.576,00	86,28	2.108.839.529,00
17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.687.766.196,00	5.426.227.504,00	81,14	6.372.601.832,00
18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Pos	341.927.000,00	280.432.700,00	82,02	384.584.608,00
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	12.744.520,00	12.396.000,00	97,26	1.400.000,00
20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	114.149.648,00	110.075.273,00	96,43	0,00
21.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	914.207.448,90	857.092.535,90	93,75	733.326.670,00
22.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.197.600,00	1.197.600,00	100,00	23.103.000,00
23.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	225.335.946,00	225.329.948,00	100,00	269.919.256,00
24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata	124.649.100,00	120.744.258,00	96,87	74.890.000,00
25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	304.031.662,00	276.977.762,00	90,95	85.318.276,00
26.	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.060.054.243,00	6.978.535.535,00	98,85	6.584.916.535,00
27.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.714.990,00	22.464.000,00	98,90	1.341.366.329,00
28.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.975.479.391,00	28.431.972.561,00	88,92	21.336.471.047,00
29.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.051.220.463,00	659.792.293,00	32,85	672.172.381,00
30.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
31.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	987.022.086,00	1.941.267.264,00	196,68	794.903.826,00
32.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	265.509.600,00	263.693.676,00	99,27	206.069.500,00
33.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	38.284.000,00	38.284.000,00	100,00	323.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
34.	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	118.000,00	118.000,00	100,00	0,00
35.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.286.353.080,00	4.306.980.305,00	81,47	4.004.953.430,00
36.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.979.940.991,00	1.909.228.618,00	96,46	1.436.823.093,00
37.	Belanja Peningkatan Daya Tahan Tubuh	81.975.000,00	80.761.000,00	98,54	622.338.844,00
38.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.445.922.090,00	1.345.022.090,00	93,02	970.639.064,00
39.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.219.854.094,00	139.538.750,00	11,44	1.531.721.900,00
40.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.630.919.449,00	4.208.416.205,00	74,74	3.416.093.706,00
41.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	358.802.000,00	356.513.000,00	99,36	267.000.000,00
42.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	425.000.000,00	424.612.500,00	99,91	325.375.000,00
43.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.741.000,00
44.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	683.126.680,00	672.727.690,00	98,48	287.708.425,00
45.	Belanja Pakaian Penyelamatan	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
46.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	71.750.000,00	71.750.000,00	100,00	53.249.999,00
47.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	22.013.001,00
48.	Belanja Pakaian Adat Daerah	145.299.999,00	145.049.998,00	99,83	97.350.000,00
49.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	105.400.000,00	105.400.000,00	100,00	56.142.650,00
50.	Belanja Pakaian Olahraga	757.556.490,00	695.950.264,00	91,87	271.851.825,00
51.	Belanja Pakaian Paskibraka	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	93.500.000,00
52.	Belanja Pakaian Jas/Safari	46.000.000,00	1.000.000,00	2,17	168.252.000,00
	Jumlah	100.629.317.585,82	89.259.537.691,27	88,77	78.845.835.168,00

2) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Rp32.590.529,00 atau 99,17% dari total anggaran Belanja Barang sebesar Rp32.863.010,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2021 sebesar Rp28.082.032,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.508.497,00 atau 16,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	20.458.904,00	20.458.904,00	100,00	0,00
2.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.889.105,00	11.616.625,00	97,71	28.082.032,00
3.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	515.000,00	515.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	32.863.010,00	32.590.529,00	99,17	28.082.032,00

b. **Belanja Jasa**

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp83.334.133.413,52 atau 93,08% dari total anggaran Belanja Jasa sebesar Rp89.527.216.206,70. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bahan/Material tahun 2021 sebesar **Rp**85.734.665.648,95 terdapat penurunan sebesar Rp2.400.532.235,43 atau 2,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Jasa Kantor	63.773.861.492,70	59.016.760.703,52	92,54	64.429.390.297,95
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.290.470.612,00	18.095.570.500,00	98,93	15.402.377.570,00
3.	Belanja Sewa Tanah	12.950.020,00	1.950.000,00	15,06	2.750.000,00
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.276.394.910,00	1.096.622.026,00	85,13	892.137.393,00
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.311.454.213,00	982.225.155,00	74,87	1.129.227.849,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.683.819.189,00	1.554.678.460,00	92,00	1.248.580.000,00
7.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.602.500.000,00	1.202.188.000,00	75,02	543.332.182,00
8.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	37.850.000,00	0,00	0,00	70.900.000,00
10.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.531.515.490,00	1.394.129.490,00	91,03	1.913.272.357,00
	Jumlah	**89.527.216.206,70**	**83.334.133.413,52**	**93,08**	**85.734.665.648,95**

Adapun Rincian Belanja Jasa Sebagai Berikut:

1) **Belanja Jasa Kantor**

Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp59.016.769.703,52 atau 92,54% dari total anggaran Belanja Jasa sebesar Rp63.773.861.492,70. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2021 sebesar Rp64.429.390.297,95 terdapat penurunan sebesar Rp5.412.620.594,43 atau 8,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.219.139.499,00	2.180.458.000,00	67,76	1.604.035.000,00
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.673.324.958,12	1.230.594.558,12	73,54	937.192.500,00
3.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	12.600.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
4.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	511.719.739,00	489.261.496,00	95,61	241.529.120,00
5.	Honorarium Rohaniwan	251.300.000,00	104.800.000,00	41,70	36.450.000,00
6.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,	350.000,00	350.000,00	100,00	4.685.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website				
7.	Honorarium Penyelenggara Ujian	30.932.000,00	30.932.000,00	100,00	0,00
8.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	1.000.000,00
9.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	73.100.000,00	73.100.000,00	100,00	0,00
10.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	487.200.000,00	442.600.000,00	90,85	446.000.000,00
11.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.652.294.000,00	2.550.094.000,00	96,23	1.935.479.000,00
12.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.629.818.535,56	20.963.790.118,40	101,62	19.431.164.303,95
13.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	31.000.000,00	24.330.222,00	78,48	25.152.000,00
14.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.532.447.000,00	1.492.147.000,00	97,37	329.005.000,00
15.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	702.000.000,00	699.400.000,00	99,63	234.850.000,00
16.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	469.000.000,00	460.200.000,00	98,13	182.000.000,00
17.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
19.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	31.200.000,00	26.000.000,00	83,33	10.400.000,00
20.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	29.200.000,00
21.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	598.110.000,00	381.674.000,00	99,11	10.500.000,00
22.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.100.640.000,00	3.249.940.000,00	79,25	8.979.409.000,00
23.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	270.350.000,00	270.350.000,00	100,00	74.400.000,00
24.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	178.820.000,00	177.385.320,00	99,21	264.871.685,00
25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.919.647.719,00	1.683.798.150,00	87,97	643.824.838,00
26.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.954.497.400,00	2.890.997.400,00	97,85	2.672.669.000,00
27.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.466.650.000,00	1.444.550.000,00	98,49	1.007.847.756,00
28.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.286.600.000,00	1.254.100.000,00	97,47	1.042.400.000,00
29.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.407.600.000,00	1.383.550.000,00	98,29	496.900.000,00
30.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.269.308.025,00	1.832.159.459,00	80,74	2.112.210.319,00
31.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	69.470.000,00	62.620.000,00	90,14	20.250.000,00
32.	Belanja Jasa Tata Rias	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00	16.500.000,00
33.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknolog	889.000.000,00	821.984.000,00	92,46	481.030.000,00
34.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	154.800.500,00	132.916.745,00	85,86	179.971.739,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
36.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
37.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
38.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00	416.540.000,00
39.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
40.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	153.722.125,00	153.318.000,00	99,74	0,00
41.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	43.375.000,00
42.	Belanja Jasa Perawatan Peralatan Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	11.814.000,00	11.814.000,00	100,00	1.375.635,00
43.	Belanja Jasa Kalibrasi	53.612.000,00	53.612.000,00	84,12	99.809.000,00
44.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	76.600.000,00	76.600.000,00	100,00	112.887.800,00
45.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
46.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	166.552.000,00	147.463.000,00	88,54	28.398.000,00
47.	Belanja Tagihan Telepon	347.413.515,00	296.987.999,00	85,49	405.178.369,00
48.	Belanja Tagihan Air	548.915.046,00	432.594.956,00	78,81	398.446.649,00
49.	Belanja Tagihan Listrik	7.030.495.890,00	6.679.311.326,00	95,00	1.565.751.361,00
50.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	354.255.000,00	337.625.000,00	95,30	361.750.000,00
51.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.401.764.925,00	2.877.033.992,00	84,57	2.669.112.878,00
52.	Belanja Paket/Pengiriman	60.922.123,00	11.480.953,00	18,85	3.010.500,00
53.	Belanja Penambahan Daya	10.123.845,00	10.123.845,00	100,00	10.490.600,00
54.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	392.852.500,00	228.583.650,00	58,22	259.912.828,00
55.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	4.278.444.645,00
56.	Belanja Lembur	1.219.097.048,00	1.165.360.548,00	95,59	409.642.000,00
57.	Belanja Medical Check Up	120.000.000,00	37.642.956,00	31,37	0,00
58.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	2.247.736.500,00
59.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	7.729.662.064,00
Jumlah		63.773.881.492,70	59.016.768.703,52	92,54	64.429.390.297,95

2) Belanja Iuran Jaminan Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebesar Rp18.095.570.500,00 atau 98,93% dari total anggaran Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebesar Rp18.290.470.612,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan Asuransi tahun 2021 sebesar Rp15.402.374.570,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.693.195.930,00 atau 17,49% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.1.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Asuransi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	570.470.572,00	564.862.500,00	99,02	655.907.520,00
2.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00	14.816.467.050,00
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.705.000.040,00	17.515.708.000,00	98,93	0,00
4.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Jumlah		18.290.470.612,00	18.095.570.500,00	98,93	15.402.374.570,00

3) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.950.000,00 atau 15,06% dari total anggaran Belanja Sewa Tanah sebesar Rp12.950.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Tanah tahun 2021 sebesar Rp2.750.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp800.000,00 atau 29,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
2.	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Sewa Tanah Pesi Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
4.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.950.000,00	1.950.000,00	15,06	2.750.000,00

4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.086.622.025,00 atau 85,13% dari total anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.276.394.910,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp992.137.393,00 terdapat kenaikan sebesar Rp94.484.632,00 atau 9,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Sewa Excavator	20.000.000,00	0,00	0,00	279.920.000,00
2.	Belanja Sewa Alat Pengangkat	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	16.000.000,00	0,00	0,00	20.850.001,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.	Belanja Sewa Electric Generating Set	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	151 747.600,00	99.744.600,00	75,71	107 690.000,00
6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7 835.000,00	7.835.000,00	100,00	0,00
7.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	168 900.000,00	123.900.000,00	73,36	165.359.092,00
8.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	436.027.220,00	407 066.415,00	93,35	325.236.020,00
9.	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.000.000,00	5 712.000,00	95,20	0,00
10.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.097.920,00	46 082.900,00	99,97	0,00
11.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	147.900.000,00	144 296.000,00	97,56	0,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	75.000.000,00	65.440.000,00	87,25	0,00
13	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
14.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1 902.310,00	1 902.310,00	100,00	950.000,00
15	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2 080.000,00	2.080.000,00	100,00	0,00
16.	Belanja Sewa Peralatan Umum	196 754.000,00	172.412.800,00	87,63	89.432.350,00
17.	Belanja Sewa Personal Computer	300.000,00	300.000,00	100,00	2.400.000,00
18	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Jumlah		1.276.394.910,00	1.086.622.025,00	85,13	992.137.393,00

5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa gedung Dan Bangunan sebesar Rp982.225.155,00 atau 74,87% dari total anggaran Belanja Sewa gedung Dan Bangunan sebesar Rp1.311.854.213.00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa gedung Dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp1.129.227.849,00 terdapat penurunan sebesar Rp147.002.694.00 atau 13,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	109.000.000,00	109 000.000,00	100,00	205 500.000,00
2.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	410.063.000,00	241 785.000,00	58,96	299 082.000,00
3.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	159.134.655,00	159.134.655,00	100,00	147.936.192,00
5.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	418 368.000,00	373.270 000,00	89,65	319.010.687,00
6.	Belanja Sewa Hotel	215 832.558,00	97.585.500,00	45,21	157.400.000,00
Jumlah		1.311.854.213,00	982.225.155,00	74,87	1.129.227.849,00

6) Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi sebesar Rp1.554.678.460,00 atau 92,00% dari total anggaran Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi sebesar Rp1.689.819.489,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp1.248.580.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp306.098.460,00 atau 24,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	768.173.642,00	763.191.000,00	99,35	53.835.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00
3.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peralatan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	559.846.000,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.458.906,00	14.696.750,00	95,38	24.625.000,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	254.625.000,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	360.000.000,00	254.627.500,00	67,01	312.650.000,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Kesiran	525.192.941,00	521.963.210,00	99,20	0,00
Jumlah		1.689.819.489,00	1.554.678.460,00	92,00	1.248.580.000,00

7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.202.188.080,00 atau 75,02% dari total anggaran Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi sebesar Rp1.602.500.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi dan Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp543.333.182,00 terdapat kenaikan sebesar Rp658.854.898,00 atau 121,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00	39.677.900,00	99,19	440.538.182,00
3.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.332.500.000,00	1.062.810.190,00	79,76	102.795.000,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
Jumlah		1.602.500.000,00	1.202.188.090,00	75,02	543.333.182,00

8) **Belanja Jasa Ketersediaan Layanan(Avaibility Payment)**

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan(Avaibility Payment) tahun 2022 tidak ada dianggarkan, pada tahun 2021 terdapata realisasi sebesar Rp2.700.000,00.

9) **Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2022 tidak terealisasi dari total anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp37.850.000,00. Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2021 sebesar Rp70.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.350.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	33.500.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
Jumlah		37.850.000,00	0,00	0,00	70.900.000,00

10) **Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

Realisasi Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.394.129.490,00 atau 91,03% dari total anggaran Belanja Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.531.515.490,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 sebesar Rp1.913.272.357,00 terdapat penurunan sebesar Rp519.142.867,00 atau 27,13% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	451.675.450,00	394.375.490,00	87,31	1.530.292.357,00
2.	Belanja Bimbingan Teknis	376.000.000,00	294.914.000,00	78,64	498.580.000,00
3.	Belanja Diklat Kepemimpinan	704.840.040,00	704.940.000,00	100,00	84.400.000,00
Jumlah		1.531.515.490,00	1.394.129.490,00	91,03	1.913.272.357,00

c. **Belanja Pemeliharaan**

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.843.048.047,48 atau 95,81% dari total anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.186.161.736,48. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp16.271.333.402,00 terdapat penurunan sebesar Rp8.428.285.354,52 atau 51,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.076.445.233,48	1.879.271.791,48	90,50	1.614.494.647,00
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.943.753.682,00	2.798.163.528,00	95,05	13.578.065.805,00
3.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.153.792.821,00	3.150.422.728,00	99,99	1.059.364.033,00
4.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.190.000,00	12.190.000,00	100,00	19.408.917,00
Jumlah		8.186.161.736,48	7.843.048.047,48	95,81	16.271.333.402,00

d. **Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp41.066.968.641,00 atau 81,11% dari total anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp50.633.032.680,00, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp39.601.440.561,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.465.528.080,00 atau 3.70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.333.032.680,00	41.066.968.641,00	81,59	39.601.440.561,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		50.633.032.680,00	41.066.968.641,00	81,11	39.601.440.561,00

e. **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.734.072.027,00 atau 70,31% dari total anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.888.572.027,00, dibandingkan dengan tahun 2021

yang terealisasi sebesar **Rp1.447.521.496,00** terdapat **kenaikan** sebesar Rp1.286.550.531,00 atau 88,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.58 Rincian Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.845.900.000,00	1.691.300.000,00	59,43	720.992.000,00
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.042.772.027,00	1.042.772.027,00	100,00	725.538.595,00
Jumlah		**3.888.672.027,00**	**2.734.072.027,00**	**70,31**	**1.447.521.496,00**

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp9.038.761.804,00 atau 97,33% dari total anggaran Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp9.286.655.460,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.969.922.995,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.068.838.809,00 atau 13,41% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.346.056.560,00	6.131.147.460,00	96,61	7.173.439.100,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	2.110.320.000,00	2.077.565.400,00	98,44	0,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	830.278.900,00	830.248.944,00	100,00	796.483.895,00
Jumlah		**9.286.655.460,00**	**9.038.761.804,00**	**97,33**	**7.969.922.995,00**

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi tahun 2022 sebesar Rp6.131.147.460,00 atau 96,61 dari anggaran sebesar Rp6.346.056.560,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.173.439.100,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.042.291.640,00 atau 14,53%.

Tabel V.1.60 Rincian Penerima Hibah kepada kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.826.056.560,00	4.611.147.460,00	95,55	5.639.572.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	100,00	396.922.100,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	1.136.945.000,00
Jumlah		6.346.056.560,00	6.131.147.460,00	96,61	7.173.439.100,00

1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi tahun 2022 sebesar Rp4.611.147.460,00 atau 95,55 dari anggaran sebesar Rp4.826.056.560,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp5.639.572.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp 1.028.424.540,00 atau 18.24%.

Tabel V.1.61 Rincian Penerima Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Penerima Hibah	Jumlah
1.	KONI Kab. Solok Selatan	563.656.560,00
2.	BAZNAS Kab. Solok Selatan	326.790.900,00
3.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran(LPTQ)Kab.SOLSEL TA 2022	200.000.000,00
4.	Yayasan Widyaswara Indonesia (WI) Kab Solsel	75.000.000,00
5.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Solsel TA	50.000.000,00
6.	Hibah Uang Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.302.200.000,00
7.	Hibah Untuk Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.093.500.000,00
	Jumlah	4.611.147.460,00

Untuk penerimaan Hibah Uang Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dapat dilihat di **lampiran 1**, sedangkan untuk Hibah Untuk Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan dapat dilihat dirincian berikut:

Tabel V.1.62 Rincian Penerima Hibah Untuk Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

No	Penerima	Alamat	Jumlah
1.	PAUD PKBM SOLOK SELATAN SEJAHTERA	Sangir	52.500.000
2.	PKBM AL FATHIR	Pauh Duo	236.100.000
3.	PKBM AT TARIQ	Sungai Pagu	203.800.000
4.	PKBM FASTABIQUL KHAIRAT	Sangir Jujuan	0,00
5.	PKBM FATAN RPC	Sangir Batang Hari	133.200.000
6.	PKBM FATHURRAHMAN	Sungai Pagu	101.700.000
7.	PKBM GADING SEJATI	Sangir Balai Janggo	34.400.000
8.	PKBM MADYA	Sangir	15.000.000
9.	PKBM PERMATA BUNDA	Sangir	124.500.000
10.	PKBM PINANG MALAKO	Sangir Jujuan	37.800.000
11.	PKBM Solok Selatan Sejahtera (S-3)	Sangir	39.600.000
12.	PKBM WIDYA DHARMA NAGARI SOLOK SELATAN	Koto Parik Gadang Diateh	65.100.000
Jumlah			1.093.500.000

2. **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi tahun 2022 sebesar Rp1.320.000.000,00 atau 100,00 dari anggaran sebesar Rp1.320.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp396.922.100,00 terdapat penurunan sebesar Rp923.077.900,00 atau 232,56%.
Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.1.63 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	Penerima	Alamat	Anggaran	Pencairan
1	Mushallah Hikmah Rimbo tengah	lubuk Gadang	400.000.000	400.000.000
2	Masjid Al Muhajirin	Jorong Talunan Baru	20.000.000	20.000.000
3	Masjid Al Muhajirin Talao	Talao	50.000.000	50.000.000
4	Masjid Al Munawarah Jorong Taratak Paneh	Jorong Taratak Paneh Pakan Rabaa Tangah	20.000.000	20 000.000
5	Masjid Al Mushrrin Sungai Jangkar	Jorong Sungai Cangkar Pesir Talang Barat	70.000.000	70 000.000
6	Masjid Al-Taqwa Bangun Rejo	Jorong Bangun Rejo Lubuk Gadang Selatan	20 000.000	20.000.000
7	Masjid Baitul Muhajirin	Jorong Mukli Tarusa	20.000.000	20.000.000
8	Masjid Baitul Rahman Lawe Barat	Jorong Lawe Barat	50.000.000	50.000.000
9	Masjid Baiturrahmar	Jorong Sungai Padi Selatar	20.000.000	20 000.000
10	Masjid Istiqomah Panirjauan	Jorong Panirjauan Pauh Duo Nan Batigo	20.000.000	20 000.000
11	Masjid Jabal Nur Mantral Indah	Jorong Mantral Indah Pulakek	20.000.000	20.000.000
12	Masjid Jami'	Jorong Padang Air Dingin	200.000.000	200 000.000
13	Masjid Mr. Syafruddin Prawira Negara	Jorong Simpang Tigo	20.000 000	20.000.000
14	Masjid Nurul Hidayah	Jorong Ngalau Indah I	20.000.000	20.000.000
15	Masjid Nurul Hikmah Durian Capang Tigo	Jorong Durian Capang Tigo Pakan Selasa	20.000 000	20.000.000
16	Masjid Nurul Huda Lubuk Jaya	Jorong Lubuk Jaya Nagari Koto Baru	20.000.000	20 000.000
17	Masjid Nurul Huda Padang Gantiang	Jorong Padang Gantiang Padang Air Dingin	20.000.000	20 000.000
18	Masjid Nurul Huda Sapan Karang Putih	Jorong Sapan Karang Putih Lubuk Gadang Selatan	20.000 000	20.000.000
19	Masjid Nurul Iman Batu Gajah	Jorong Batu Gajah Lubuk Ulang Aling	20.000.000	20.000.000
20	Masjid Nurul Iman koto japang	Jr. Koto Jepang	50.000.000	50.000.000
21	Masjid Nurul Iman RPC	Jorong Simpang Tigo RPC	20.000.000	20.000.000
22	Masjid Nurul Iman Sungai Duo	Jorong Sungai Duo Alam Pauh Duo	20.000.000	20.000 000
23	Masjid Nurul Ulum Simpang Ampek SBH	Jorong Simpang Ampek Nagari Abai	20.000.000	20.000.000
24	Masjid Nurul Yaqin Lubuk Betung Lubuk Malako	Jorong Lubuk Betung Nagari Lubuk Malako	20.000.000	20.000.000
25	Masjid TAQWA Jorong Ulu Sulit 4	Jorong Ulu Sulit 4	20.000.000	20.000.000
26	Mushalla Al Aqso Taratak Bukareh	Jorong Taratak Bukareh	60.000.000	60.000.000
27	Mushalla M. Nur Pinti Kayu	Pinti Kayu	50.000.000	50.000.000
28	Mushalla Titipan Hati Balai Akad	Jorong Balai Akat Salon	20 000.000	20.000.000
Jumlah			1.320.000.000	1.320.000.000

3. **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi tahun 2022 sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00

dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.136.945.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp936.945.000,00 atau 82,41%. Hibah diberikan kepada Kwarcab 03.19 Gerakan Pramuka Solok Selatan.

b. Belanja Hibah Dana Bos

Belanja Hibah Dana Bos tahun 2022 sebesar Rp2.077.365.400,00 atau 98,44 dari anggaran sebesar Rp2.110.320.000,00. Adapun rincian penerimanya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel V.1.64 Rincian Penerima Hibah Dana Bos Tahun 2022

No	SEKOLAH	ALAMAT	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1.	SD 04 YTKA	Sungai Talang Perumahan PT. TKA	297.960.000,00	292.340.000,00	5.640.000,00
2.	SDIT AL-FATH SOLOK SELATAN	Jorong Bukik Patanahan	257.560.000,00	223.720.000,00	33.840.000,00
3.	SD IT MARHAMAH	Jl. Imam Bonjol Batang Labuh	377.880.000,00	375.060.000,00	2.820.000,00
4.	SD YPMK MITRA KERINCI	Sungai Lamsai Mitra Kerinci	129.720.000,00	129.720.000,00	0,00
5.	SD YPTSS SUNGAI KUNYIT	Sungai Tanyah PT. KSI	521.700.000,00	525.246.400,00	(3.546.400,00)
6.	SMP IT MARHAMAH	Jl. Sawah Aceh Jorong Batang Limpajung	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00
7.	SMP PLUS DARUSSHALEH	Pekonina	208.800.000,00	215.760.000,00	(6.960.000,00)
8.	SMP YTKA	Sungai Talang Perumahan PT. TKA	270.280.000,00	269.120.000,00	1.160.000,00
Jumlah			2.110.320.000,00	2.077.366.400,00	32.954.600,00

c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp830.248.944,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2022 sebesar Rp830.278.900,00. Dibandingkan realisasi 2021 sebesar Rp796.483.895,00 atau 4,24% terdapat kenaikan sebesar Rp33.765.049,00.

Tabel V.1.65 Rincian Penerima Hibah kepada Partai Politik

No	Partai Politik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	69.066.816,00	69.066.816,00	100,00	69.066.816,00
2	Partai Nasdem	88.533.984,00	88.533.984,00	100,00	88.099.056,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	84.440.328,00	84.440.328,00	100,00	84.437.000,00
4	Partai Amanat Nasional	142.029.048,00	142.029.048,00	100,00	142.029.048,00
5	Partai Golongan Karya	145.448.688,00	145.448.688,00	100,00	145.000.200,00
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.367.128,00	36.367.128,00	100,00	36.367.126,00
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	37.199.856,00	37.199.856,00	100,00	37.170.000,00
8	Partai Gerindra	124.227.096,00	124.227.096,00	100,00	124.227.096,00
9	Partai Demokrat	70.087.752,00	70.087.752,00	100,00	70.087.752,00
10	Partai Berkarya	32.878.104,00	32.878.104,00	100,00	0,00
Jumlah		830.278.900,00	796.483.895,00	100,00	796.483.895,00

4. **Belanja Bantuan Sosial**
Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp145.686.080,00.

B. Belanja Modal	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	202.072.297.511,67	127.046.936.090,00

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp202.072.297.511,67 atau 91,86% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp219.977.614.670,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp127.046.936.090,00 terjadi kenaikan sebesar Rp75.025.361.421,67 atau 59,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	11.375.584.791,00	11.111.952.077,00	97,68	18.254.516.800,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.627.253.955,00	31.337.496.900,00	87,96	24.156.830.388,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.624.325.056,00	69.289.671.660,08	88,13	20.600.007.739,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.071.814.561,00	89.129.228.699,59	95,76	62.841.156.713,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.279.636.307,00	1.205.946.175,00	94,32	1.194.424.450,00
	Jumlah	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86	127.046.936.090,00

Didalam realisasi belanja modal terdapat yang bersumber dari belanja BLUD dan dana bos bos Dinas Pendidikan sebesar Rp13.628.523.226,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.67 Rincian Belanja Modal yang berasal dari belanja BOS dan BLUD

No	Uraian	BOS	BLUD	JUMLAH
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.442.277.640,00	3.742.277.640,00	8.184.555.280,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.307.550,00	9.809.300,00	402.116.850,00
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.278.636.307,00	1.278.636.307,00	2.557.272.614,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.278.636.307,00	1.205.946.175,00	2.484.582.482,00
	Jumlah	7.391.857.804,00	6.236.665.422,00	13.628.523.226,00

1. **Belanja Modal Tanah**
Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp11.111.952.077,00 atau 97,68% dari total anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp11.375.584.791,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.254.516.800,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.142.564.723,00 atau 39,13%.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Realisasi Belanja Modal Peralatan danMesin sebesar Rp31.337.496.900,00 atau 87,96% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.627.253.955,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp24.156.830.388,00 terdapat penurunan sebesar Rp7.180.666.512,00 atau 29,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	4.979.630.567,00	4.955 758.796,00	99,52	34.100.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	2 110.000.000,00	1.143.100.000,00	36,76	5.025.131.499,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	13.975.500,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	1 010.951.461,00	56.447.000,00	5,58	1.934.831.039,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.155.080.282,00	4.652 321.105,00	90,25	7.496.835 269,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.360.290.379,00	1.336 749.140,00	98,27	498.129.100,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3 974.464.509,00	3.593.214.023,00	90,42	3.664.346.010,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	12.104.446.[illegible]52,00	11 919.821.656,00	98,47	2.341,018 344,00
9.	Belanja Modal Komputer	3.285.805.580,00	3.066 151.703,20	93,32	2.878,740 327,00
10.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	17.770.000,00	17.770.000,00	100,00	0,00
11.	Belanja Modal Alat Pengeboran	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
12.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	36.867 782,00	35.630.077,00	96,64	0,00
13.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
14.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.480.000,00	16.126.000,00	97,91	25 390.000,00
15.	Belanja Modal Alat Peraga	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	7.800.000,00
16.	Belanja Modal Rambu-Rambu	581.205.539,00	556.210.000,00	95,55	33.550.000,00
17.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	88.461.700,00	72.351.700,00	81,80	204.935.920,00
Jumlah		35.627.253.955,00	31.337.498.900,00	87,96	24.156.830.383,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.288.671.660,08 atau 88,13% dari total anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp78.624.325.056,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp20.600.007.739,00 terdapat kenaikan sebesar Rp48.688.663 921,08 atau 236,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	76.919.042.753,00	67.660.355.910,08	87,96	18.614 390.429,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	19.944.400,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1 705.282.303,00	1 628.315.750,00	95,49	1.965,672 900,00
Jumlah		78.624.325.056,00	69.288.671.660,08	88,13	20.600.007.739,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp89.128.228.699,59 atau 95,76% dari total anggaran Belanja Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp93.071.814.561,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp62.841.156.713,00 terjadi kenaikan sebesar Rp26.287.071.986,59 atau 41,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.70 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.612.759.992,00	68.204.299.400,20	95,32	49.054.784.926,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	13.535.033.949,00	13.207.916.130,27	97,58	11.759.092.152,00
3.	Belanja Modal Instalasi	1.113.200.000,00	1.090.556.970,22	97,97	0,00
4.	Belanja Modal Jaringan	1.410.780.620,00	1.305.425.899,00	92,53	2.026.400.055,00
	Jumlah	93.071.814.561,00	89.128.228.699,59	95,76	62.841.156.713,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.205.948.175,00 atau 94,32% dari total anggaran Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.278.636.307,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.194.424.450,00 terjadi penurunan sebesar Rp11.523.725,00 atau 0,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.160.709.626,00	1.088.021.474,00	93,74	1.164.936.350,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	116.426.701,00	116.426.701,00	100,00	29.488.100,00
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.278.636.307,00	1.205.948.175,00	94,32	1.194.424.450,00

C. Belanja Tak Terduga	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	3.061.054.001,00	641.815.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.061.054.001,00 atau 81,93% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.736.222.247,00,-. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2021 sebesar Rp641.815.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.419.239.001,00 atau 376,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.72 Rincian Belanja BTT Tahun 2022

NO	TANGGAL	SP2D	URAIAN	JUMLAH
1.	31-Mar-2022	00271/SP2D/BUD/2022	LS Pembayaran Pencairan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak di rencanakan Kebakaran Rumah An. APRIANTO/DINA OFRI YANTI	15.000.000,00
2.	31-Mar-2022	00278/SP2D/BUD/2022	LS Pembayaran Pencairan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak di rencanakan Kebakaran Rumah An. YELVANINDA	15.000.000,00
3.	14-Apr-2022	00388/SP2D/BUD/2022	LS Pembayaran Pencairan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak di rencanakan Kebakaran Rumah An. HERMANTO	15.000.000,00
4.	14-Apr-2022	00389/SP2D/BUD/2022	LS Pembayaran Pencairan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak di rencanakan Kebakaran Rumah An. NURHASNI	15.000.000,00
5.	08-Jun-2022	00009/SP2D/BUD/NIHIL/T I/2022	Tambahan Uang SPJ(TU) Nilai Pembayaran Pencairan Dana BTT untuk pemberian kebuluhan sembilan bahan pokok bagi masyarakat vaksin perlama dan vaksin ke dua sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 360-31-2022 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga	765.000.000,00
6.	14-Dec-2022	03372/SP2D/BUD/2022	LS Pembayaran Pencairan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak di rencanakan Kebakaran Rumah An. MASRIWALIH DAYATUL RAHMI	15.000.000,00
7.	28-Dec-2022	04220/SP2D/BUD/2022	LS Permintaan Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan	2.221.054.001,00
		Jumlah		3.061.054.001,00

5.1.3. Transfer	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	86.917.238.179,00	95.571.875.630,00

Realisasi transfer Tahun 2022 sebesar Rp86.917.238.179,00 atau 99,62% dari anggaran transfer sebesar Rp87.252.559.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp95.571.875.630,00 naik sebesar Rp8.654.637.451,00 atau 9,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.73 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Transfer Bagi Hasil	1.430.344.500,00	1.095.023.679,00	76,56	1.641.329.910,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	85.822.214.500,00	85.822.214.500,00	100,00	93.930.545.720,00
	Jumlah	87.252.559.000,00	86.917.238.179,00	99,62	95.571.875.630,00

B. Transfer Bagi Hasil

Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp1.095.023.679,00 atau 76,56% dari anggaran belanja sebesar Rp1.430.344.500,00. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp1.641.329.910,00 terjadi penurunan sebesar Rp546.306.231,00 atau 33,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.74 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.221.897.300,00	923.276.367,00	75,56	1.507.451.166,00
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	208.447.200,00	171.747.312,00	82,39	133.878.744,00
Jumlah		1.430.344.500,00	1.095.023.679,00	76,56	1.641.329.910,00

1. **Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

   Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp923.276.367,00 atau 75,62% dari anggaran sebesar Rp1.221.897.300,00. dibandingakan dengan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.507.451.166,00 terdapat penurunan sebesar Rp584.174.799,00 atau 38,75%.

2. **Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

   Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa yang terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp171.747.312,00 atau 82,39% dari anggaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp208.447.200,00. Dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp133.878.744,00 terjadi kenaikan sebesar Rp37.868.568,00 atau 28,29%.

C. **Transfer Bantuan Keuangan**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp85.822.214.500,00 atau 100,00% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Rp85.822.214.500,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp93.930.545.720,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.108.331.220,00 atau 8,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.75 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	48.201.063.500,00	48.201.063.500,00	100,00	47.688.372.000,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00	46.242.173.720,00
Jumlah		85.822.214.500,00	85.822.214.500,00	100,00	93.930.545.720,00

1. **Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

   Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2022 sebesar Rp48.201.063.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp48.201.063.500,00 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp47.688 372.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp512 691.500,00 atau 1,08 %.

Adapun rincian Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2022 dapat sebagai berikut:

Tabel V.1.76 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	LUBUK GADANG	1.869.688.492,00	1.869.688.492,00	100,00	1.984.726.000,00
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.569.310.600,00	1.569.310.600,00	100,00	2.024.536.000,00
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.669.080.543,00	1.669.080.543,00	100,00	2.046.848.000,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.209.110.940,00	1.209.110.940,00	100,00	1.626.605.000,00
5	PASIR TALANG	1.169.874.654,00	1.169.874.654,00	100,00	1.402.164.000,00
6	KOTO BARU	1.240.637.776,00	1.240.637.776,00	100,00	995.405.000,00
7	SAKO PASIA TALANG	1.047.352.224,00	1.047.352.224,00	100,00	836.796.000,00
8	PASAR MUARA LABUH	1.045.625.133,00	1.045.625.133,00	100,00	1.133.725.000,00
9	PULAKEK KOTO BARU	1.258.962.000,00	1.258.962.000,00	100,00	1.276.980.000,00
10	BOMAS	1.236.409.546,00	1.236.409.546,00	100,00	1.235.748.000,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.063.808.931,00	1.063.808.931,00	100,00	1.232.536.000,00
12	SAKO SELATAN PASIA TALANG	1.048.927.867,00	1.048.927.867,00	100,00	961.562.000,00
13	PASIR TALANG BARAT	1.087.527.292,00	1.087.527.292,00	100,00	916.721.000,00
14	PASIR TALANG TIMUR	1.149.565.845,00	1.149.565.845,00	100,00	961.064.000,00
15	PASIR TALANG SELATAN	1.098.567.705,00	1.098.567.705,00	100,00	1.029.045.000,00
16	PAKAN RABAA	1.227.368.179,00	1.227.368.179,00	100,00	1.430.526.000,00
17	PAKAN RABAA TIMUR	1.569.573.205,00	1.569.573.205,00	100,00	1.137.045.000,00
18	PAKAN RABAA UTARA	1.397.237.413,00	1.397.237.413,00	100,00	1.319.282.000,00
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.403.087.749,00	1.403.087.749,00	100,00	1.567.675.000,00
20	LUBUK MALAKO	1.548.030.415,00	1.548.030.415,00	100,00	1.053.301.000,00
21	BIDAR ALAM	1.159.751.478,00	1.159.751.478,00	100,00	990.732.000,00
22	PADANG AIR DINGIN	1.105.289.362,00	1.105.289.362,00	100,00	1.072.901.000,00
23	PADANG LIMAU SUNDA	1.060.088.448,00	1.060.088.448,00	100,00	1.008.618.000,00
24	PADANG GANTIANG	1.036.223.234,00	1.036.223.234,00	100,00	1.278.513.000,00
25	ABAI	1.252.236.925,00	1.252.236.925,00	100,00	1.192.191.000,00
26	DUSUN TENGAH	1.163.654.719,00	1.163.654.719,00	100,00	955.824.000,00
27	LUBUK ULANG ALING	1.127.204.528,00	1.127.204.528,00	100,00	1.045.770.000,00
28	RANAH PANTAI CERMIN	1.109.839.466,00	1.109.839.166,00	100,00	922.616.000,00
29	SITAPUS	1.069.057.018,00	1.069.057.018,00	100,00	946.023.000,00
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.322.398.089,00	1.322.398.089,00	100,00	1.137.789.000,00
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.073.404.387,00	1.073.404.387,00	100,00	1.095.748.000,00
32	ALAM PAUH DUO	1.358.009.817,00	1.358.009.817,00	100,00	1.722.277.000,00
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.212.159.967,00	1.212.159.967,00	100,00	1.109.385.000,00
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.196.727.334,00	1.196.727.534,00	100,00	1.247.280.000,00
35	PAUH DUO NAN BATIGO	1.090.936.859,00	1.090.936.529,00	100,00	975.293.000,00
36	SUNGAI KUNYIT	1.368.820.289,00	1.368.820.289,00	100,00	1.123.147.000,00
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.207.266.963,00	1.207.266.963,00	100,00	949.944.000,00
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.117.475.650,00	1.117.475.650,00	100,00	1.161.853.000,00
39	TALUNAK MAJU	1.200.894.490,00	1.200.894.490,00	100,00	963.250.000,00
JUMLAH		48.201.063.500,00	48.201.063.500,00	100,00	47.688.372.000,00

2) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2022 sebesar Rp37.621.151.000,00 atau 100,00% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp37.621.151.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan

Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2021 sebesar Rp46.242.173.720,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.621.022.720,00 atau 18,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.77 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	LUBUK GADANG	1.565.741.783,00	1.398.978.000,00	100,00	1.632.844.170,00
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.614.591.780,00	1.206.637.000,00	100,00	1.552.263.227,00
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.597.147.719,00	1.440.604.000,00	100,00	1.507.304.710,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.283.221.669,00	1.218.106.000,00	100,00	1.188.980.771,00
5	PASIR TALANG	1.106.161.132,00	1.173.256.000,00	100,00	1.132.208.905,00
6	KOTO BARU	785.270.712,00	836.976.000,00	100,00	1.174.559.167,00
7	SAKO PASIA TALANG	739.034.324,00	779.879.000,00	100,00	1.055.469.360,00
8	PASAR MUARA LABUH	894.300.763,00	954.317.000,00	100,00	1.069.231.961,00
9	PULAKEK KOTO BARU	1.007.395.337,00	1.049.589.000,00	100,00	1.179.443.386,00
10	BOMAS	974.852.601,00	1.007.513.000,00	100,00	1.166.779.518,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	972.342.330,00	1.017.433.000,00	100,00	1.053.586.860,00
12	SAKO SELATAN PASIA TALANG	753.573.115,00	756.170.000,00	100,00	1.061.738.264,00
13	PASIR TALANG BARAT	758.179.245,00	753.021.000,00	100,00	1.066.362.612,00
14	PASIR TALANG TIMUR	723.197.245,00	1.003.532.000,00	100,00	1.103.897.501,00
15	PASIR TALANG SELATAN	811.809.162,00	851.737.000,00	100,00	1.112.259.920,00
16	PAKAN RABAA	1.128.519.225,00	1.254.777.000,00	100,00	1.266.807.047,00
17	PAKAN RABAA TIMUR	897.009.907,00	904.410.000,00	100,00	1.327.479.731,00
18	PAKAN RABAA UTARA	1.436.223.724,00	1.108.181.000,00	100,00	1.390.393.747,00
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.236.732.046,00	1.062.477.000,00	100,00	1.390.107.695,00
20	LUBUK MALAKO	830.944.510,00	964.288.000,00	100,00	1.190.350.274,00
21	BIDAR ALAM	781.564.202,00	936.942.000,00	100,00	1.110.371.006,00
22	PADANG AIR DINGIN	846.405.372,00	873.962.000,00	100,00	1.085.450.532,00
23	PADANG LIMAU SUNDAI	795.852.169,00	812.590.000,00	100,00	1.048.248.240,00
24	PADANG GANTIANG	1.007.035.602,00	814.175.000,00	100,00	1.101.897.921,00
25	AGAI	940.506.448,00	1.283.484.000,00	100,00	1.175.101.271,00
26	DUSUN TANGAH	754.045.431,00	829.020.000,00	100,00	1.124.759.914,00
27	LUBUK ULANG ALING	825.003.443,00	853.492.000,00	100,00	1.112.693.362,00
28	RANAH PANTAI CERMIN	727.847.783,00	765.404.000,00	100,00	1.090.794.374,00
29	SITAPUS	746.313.485,00	701.342.000,00	100,00	1.084.752.371,00
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	897.596.815,00	850.995.000,00	100,00	1.218.270.642,00
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	864.430.871,00	814.339.000,00	100,00	1.086.477.411,00
32	ALAM PAUH DUO	1.359.696.897,00	1.071.596.000,00	100,00	1.387.923.032,00
33	KAPALI ALAM PAUH DUO	875.189.042,00	947.329.000,00	100,00	1.148.095.371,00
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	983.973.813,00	984.220.000,00	100,00	1.148.731.083,00
35	PAUH DUO NAN BATIGO	769.404.441,00	831.477.000,00	100,00	1.076.886.442,00
36	SUNGAI KUNYIT	866.515.824,00	995.606.000,00	100,00	1.238.805.507,00
37	TALAC SUNGAI KUNYIT	748.617.829,00	841.755.000,00	100,00	1.196.109.074,00
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	932.358.735,00	988.757.000,00	100,00	1.076.003.054,00
39	TALUNAN MAJU	759.903.771,00	861.168.000,00	100,00	1.122.436.647,00
Jumlah		37.621.151.000,00	37.621.151.000,00	100,00	46.242.173.720,00

5.1.4. Surplus / (Defisit)	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	(15.881.948.443,67))	40.097.765.011,05

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalami defisit sebesar Rp(15.881.948.443,67). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp40.097.765.011,05 penurunan sebesar Rp55.979.713.454,72 atau 139,61%.

5.1.5. Penerimaan Pembiayaan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	109.137.058.386,94	69.505.673.546,89

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp109.137.058.386,94 atau 100,03% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp109.103.438.558,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp69.505.673.546,89 terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.631.384.840,05 atau 57,02.

5.1.6. Pengeluaran Pembiayaan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	500.000.000,00	500.000.000,00

Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Pembiayaan Rp500.000.000,00. Realisasi tahun 2022 sama besar dengan tahun 2021yang terealisasi sebesar Rp500.000.00. Realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan ke Bank Nagari tahun 2022.

5.1.7. PEMBIAYAAN NETTO	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	108.637.058.386,94	69.005.673.546,89

Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp108.637.058.386,94 atau 100,03% dari anggaran Pembiayaan Netto Rp108.603.438.558,00. Dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp69.005.673.546,89 terjadi kenaikan Pembiayaan Netto sebesar Rp39.631.384.840,05 atau sebesar 57,43%.

5.1.8. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	92.755.109.943,27	109.103.438.557,94

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp92.755.109.943,27. Dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp109.103.438.557,94 terjadi penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp16.348.328.614,67 atau sebesar 14,98%.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2022 adalah sebagai berikut:

		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
5.2.1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	109.103.438.557,94	69.573.319.582,89

Nilai SAL awal sebesar Rp109.103.438.557,94 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2021. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2022.

		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
5.2.2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	109.137.058.386,94	69.505.673.546,89

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah seluruh SAL akhir tahun 2021. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp109.137.058.386,94. Terdapat selisih kurang atas penggunaan SAL tahun berjalan dari Saldo SAL awal sebesar Rp33.619.829,00.

		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
5.2.3	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA) Sebelum Koreksi	92.755.109.943,27	109.103.438.557,94

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp92.755.109.943,27.

		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
5.2.4.	Koreksi SiLPA	33.619.829,00	67.646.036,11

Terdapat koreksi SiLPA Rp33.619.829,00. Dibandingan dengan koreksi Silpa tahun 2021 sebesar Rp67.646.036,11 terdapat penurunan sebesar Rp 34.026.207,11 atau 50,30%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.2.1 Rincian Koreksi SILPA Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi saldo awal kas di bendahara pos	(1.044.688,50)
2.	Koreksi atas ulang lalu pendapatan	(32.013.835,50)
3.	Koreksi Penggunaan silpa tahun 2022 karena kurang cata sebesar 0,05 dalam penganggaran tahun 2022	0,00
4.	Biaya administrasi bank kas di bendahara BPBD Tahun 2022	30.000,00
5.	Koreksi Silpa dan nilai saldo Kas Bendahara BPBD akibat pemotongan biaya adm bank selama tahun 2022	5.000,00
6.	Pengembalian kas ke Kasda Tahun 2022 Dari Kas Bos Sekolah Yang Tutup	214.680,00
7.	Koreksi SILPA atas kurang catat nilai kas pada beberapa sekolah yang berasal dari rekening selain BOS	(290.319,50)
8.	Koreksi Silpa dan nilai Saldo Kas di Kasda yang berasal dari Kas Bendahara BOS sekolah yang tutup	80.557,00
9.	Koreksi kurang catat saldo kas bendahara pengeluaran yang berasal hibah Dana BOP Paud dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Paud dan Dikmas men	(701.623,50)
	Jumlah	(33.819.828,94)

5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Koreksi	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
		92.755.109.943,27	109.103.438.557,94

SAL akhir setelah koreksi merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2022 adalah sebesar Rp92.755.109.943,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.2.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Koreksi Tahun 2022

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	79.106.227.884,74	106.618.873.089,00	(27.512.645.204,26)	(25,80)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	167.208.526,69	15.741.409,00	153.467.157,69	1.116,82
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	37.220.673,00	30.456.756,00	6.765.922,00	22,21
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	12.193.379.620,62	1.906.617.457,94	10.286.761.562,68	539,53
5	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	721.982.844,00	495.668.011,00	226.314.833,00	41,62
6	Saldo Akhir Kas Bendahara BPBD	0,00	38.080.855,00	(38.080.855,00)	(100,00)
7	Saldo Akhir Kas Bendahara Kapossi JKN	549.090.769,22	0,00	549.090.769,22	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	211.073.903,00	(211.073.903,00)	-100,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	92.755.109.943,27	109.314.512.460,94	(16.559.402.517,67)	(15,15)

5.3 NERACA

Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2022. adalah Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. Aset Lancar	31-Des-22	31-Des-21
	(Rp)	(Rp)
	137.521.110.127,67	151.550.272.766,85

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp137.521.110.127,67 yang terdiri dari Kas dan Bank, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel V.3.3 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas dan Bank	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94	(16.522.284.388,67)	(15,11)
2	Piutang	52.920.297.565,38	72.172.365.474,34	(19.252.067.909,56)	(25,29)
3	Penyisihan Piutang	(36.365.589.670,88)	(47.877.438.135,93)	11.111.845.466,05	(23,16)
4	Beban Dibayar Dimuka	380.619.319,00	153.311.022,00	227.308.697,00	148,20
5	Persediaan	27.293.655.844,90	17.887.521.348,90	9.406.134.496,00	52,58
	Jumlah	137.521.110.127,67	151.550.272.766,85	(14.029.162.639,18)	(9,26)

Aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.550.272.766,85. Aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp14.029.162.639,18 atau turun sebesar 9,26%. Berikut akan dijelaskan secara rinci asset lancar tersebut.

1. Kas dan Bank	31-Des-2022	31-Des-2021
	(Rp)	(Rp)
	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.792.228.072,27 merupakan saldo buku kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BPBD dan Kas Lainnya.
Jika dibandingkan dengan nilai Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp109.314.512.460,94 maka terdapat penurunan sebesar Rp16.522.284.388,67 atau sebesar 15,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.4 Rincian Kas dan Bank

No	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas di Kas Daerah	79.143.345.993,74	106.618.873.069,00	(27.475.527.075,26)	(25,77)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	167.208.586,69	13.741.409,00	153.467.157,69	1.116,82
3	Kas di Bendahara Penerimaan	37.220.078,00	30.456.756,00	6.763.922,00	22,21
4	Kas di Bendahara BLUD	12.193.379.820,52	1.906.618.457,94	10.286.761.362,58	539,63
5	Kas Dana Kapitasi FKTP	649.090.160,22	0,00	649.090.160,22	0,00
6	Kas di Bendahara BOS	701.962.844,00	495.668.011,00	206.314.833,00	41,62
7	Kas di Bendahara BPBD	0,00	38.080.855,00	(38.080.855,00)	(100,00)
8	Kas Lainnya	0,00	211.073.903,00	(211.073.903,00)	(100,00)
Jumlah		92.792.228.072,27	109.314.512.460,94	(16.522.284.388,67)	(15,11)

1) Kas di Kas Daerah

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.143.345.993,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.5 Rincian Kas Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang No. Rek 1301.0101.00286.6	79.025.469.443,74
2	Mutasi Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas	515.015,00
3	Mutasi Saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang ditutup	79.315.680,00
4	Mutasi Saldo Kas Bendahara BPBD	38.045.855,00
Jumlah		79.143.345.993,74

a. Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah

Berdasarkan rekening Koran kas Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdaftar pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang dengan nomor rekening 1301.0101.00286.6, saldo kas di rekening koran kas umum daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.025 469.443.74.

Apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp106.618.873.069,00 kas di Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp27.475.527.075,26 atau turun sebesar 25,77%.

b. Mutasi Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo direkening BLUD Puskesmas atas nama UPT BLUD PUSKESMAS KAB. SOLSEL dengan nomor rekening 1301010100G202 yang terdaftar pada Bank Nagari Cabang Muara Labuh sebesar Rp515.015,00. Saldo tersebut merupakan penerimaan dari jasa giro bulan Oktober 2022 dimana sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 9 Maret 2023 sekaligus atas rekening tersebut sudah dilakukan penutupan

Untuk selanjutnya, nomor rekening tersebut sudah tidak aktif seiring dengan perubahan status UPT BLUD PUSKESMAS KAB. SOLSEL menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

c. Mutasi Saldo Kas Bendahara BOS pada sekolah yang ditutup

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo direkening Kas Bendahara BOS pada sekolah yang sudah ditutup sebesar Rp79.315.680,00 atas saldo sekolah yang sudah ditutup tersebut telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Adapun rincian saldo Kas Bnedahara BOS pada sekolah yang tutup tersebut sebagai berikut:

Tabel V.3.6 Rincian Rekening BOS Sekolah Yang Tutup

No	Sekolah	Rekening	Tanggal Penyetoran ke Kasda dan Penutupan Rekening	Saldo Akhir Direkening Saat Penutupan	Penyetoran Tunai		Saldo Akhir Yang Disetor ke Kasda
					Kas Tunai	Tanggal Penyetoran ke Kasda	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6
1	SD N 06 PAKAN RABAA	1300021002094	Per 9 Maret 2023	41.351,00			41.351,00
2	SD N 01 KUTI ANYIR	1300021002391	Per 9 Maret 2023	6.845.795,00			6.845.795,00
3	SD N 06 SAWAH SILUAK	1300021002397	Per 9 Maret 2023	6.440.742,00			6.440.742,00
4	SD N 15 SIKUNEANG	1300021002879	Per 9 Maret 2023	947.632,00	11.091,00	10 Maret 2023	958.723,00
5	SD N 16 SIPOTU	1300021002707	Per 9 Maret 2023	5.108.505,00	66.926,00	10 Maret 2023	5.175.431,00
6	SD N 17 SUNGAI CANGKAR	1300021002330	Per 9 Maret 2023	3.561.200,00			3.561.200,00
7	SD N 20 BARIANG RAO-RAO	1300021002471	Per 9 Maret 2023	6.571.894,00			6.571.894,00
8	SD N 50 SUNGAI SALAK	1300021007691	Per 9 Maret 2023	7.641.122,00			7.641.122,00
9	SD N 13 KANDANG BANYAK	1300021004997	Per 9 Maret 2023	2.515.041,00			2.515.041,00
10	SD N 11 BATU NAGO	1300021002967	Per 9 Maret 2023	1.296.369,00			1.296.369,00
11	SD N 14 SINJEK	1300021007471	Per 9 Maret 2023	302.795,00	90.000,00	10 Maret 2023	392.795,00
12	SMP NEGERI 22 SOLOK SELATAN	1300021009489-2	Per 9 Maret 2023	5.351.027,00			5.351.027,00
13	SMP NEGERI 33 SOLOK SELATAN	1300021008340-1	Per 9 Maret 2023	488.595,00			488.595,00
14	SMP NEGERI 34 SOLOK SELATAN	1300021008377-1	Per 9 Maret 2023	16.226.204,00			16.226.204,00
15	SMP NEGERI 35 SOLOK SELATAN	1300021014731-1	Per 9 Maret 2023	15.763.450,00	53.151,00	10 Maret 2023	15.816.601,00
	JUMLAH			79.094.517	221.168,00		79.315.680,00

d. Mutasi Saldo Kas Bendahara BPBD

Kas Di Bendahara BPBD merupakan kas yang berasal dari sumbangan dana untuk bantuan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok Selatan. Dana ini berasal dari sumbangan masyarakat dan badan usaha lainnya serta dari Pemerintah daerah lainnya. Saldo kas di bendahara BPBD sebesar Rp38.045.855,00 terdapat pada 2 (dua) rekening sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian	Rekening	Saldo	Penyetoran Ke Kasda
1	Bank Nagari Kantor Kas Kantor Bupati - Nama Rek. Bantuan Bencana Alam Kab. Solok Selatan	1301.0101.00378-2	140.200,00	9 Maret 2023
2	BRI Unit Lubuk Gadang - Nama Rek. Bantuan Bencana Solok Selatan TH 2016	554401000188302	37.905.655,00	9 Maret 2023
JUMLAH			38.045.855,00	

Terhadap nilai saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp79.143.345.993,74 di atas, terdapat kas lainnya yang bukan menjadi haknya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp37.118.129,00 yang tercatat sebagai kewajiban jangka pendek lainnya yang berasal dari jasa giro entitas lain di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tersetorkan oleh Bank Nagari ke rekening kas daerah.

Jasa giro entitas lain di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tersebut antara lain:

a. Jasa Giro dari Rekening Pemerintahan Nagari
   Jasa giro dari rekening Pemerintahan Nagari yang dipotong dan disetorkan oleh Bank Nagari ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp32.985.597,00. Jasa giro tersebut berasal dari rekening Pemerintahan Nagari periode Januari sampai dengan Maret 2022 dimana sampai dengan 31 Desember 2022 jasa giro tersebut belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari
b. Jasa Giro dari Rekening BOS Sekolah Swasta
   Jasa giro dari rekening BOS Sekolah Swasta yang dipungut dan disetorkan ke kas daerah oleh Bank Nagari sebesar Rp2.866.179,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan kembali ke rekening sekolah swasta tersebut.
c. Jasa Giro dari Rekening Entitas Lainnya
   Jasa giro dari rekening entitas lainnya yang dipungut dan disetorkan ke kas daerah oleh Bank Nagari sebesar Rp1.266.353,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan kembali ke rekening entitas tersebut.

   Adapun rincian Jasa giro entitas lain di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di atas, lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp167.208.566,69 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp153.467.157,69 atau sebesar 1.116,82%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	994.398,86	3.518.464,00	(2.524.065,14)	(71,74)
2	Dinas Kesehatan	355.000,00	1.716.200,00	(1.361.200,00)	(79,31)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.037.027,02	0,00	3.037.027,02	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	43.147,83	0,00	45.147,83	0,00
5	Badan Penanggulangan	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Bencana Daerah				
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	6.618.600,00	(6.618.600,00)	(100,00)
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24.640.000,00	280.000,00	24.360.000,00	8.700,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.392,93	721.000,00	(716.607,07)	(99,39)
10	Sekretariat Daerah	54.763.600,00	200,00	54.763.400,00	27.381.700,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
13	Sekretariat DPRD	40.970.000,00	0,00	40.970.000,00	0,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	886.945,00	1.113.055,00	125,49
Jumlah		167.208.566,69	13.741.409,00	153.467.157,69	1.116,62

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 lebih rinci terdapat pada **Lampiran 3**.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dibendahara penerimaan merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada Tahun 2022, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke kas daerah. Kas tersebut baru disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Atas penyetoran kas tersebut dihitung sebagai realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022. Selain itu terdapat saldo kas yang berada pada rekening pendapatan QRIS Bank Nagari.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.220.678,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.763.922,00 atau turun sebesar 22,21% jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.456.756,00. Rincian kas di bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.6 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Perhubungan	545.001,00	0,00	545.001,00	100,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.662.500,00	0,00	14.662.500,00	0,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	757.500,00	0,00	757.500,00	100,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	17.502.677,00	30.456.756,00	(12.954.079,00)	(42,53)
Jumlah		37.220.678,00	30.456.756,00	6.763.922,00	22,21

Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 desember 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

4) Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan kas pada BLUD RSUD Kabupaten Solok Selatan. yang terhitung tanggal 1 Januari 2015 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 440.437-2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 31 Desember 2014.

Saldo pada Kas BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.193.379.820,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.9 Kas BLUD RSUD

No	Uraian	Rekening	31-Dec-22	31-Dec-21	Peningkatan/ Penurunan	Persentase (%)
1	Bank Nagar Muara Labuh	1300 0210 120873 1	11.949.252.109,32	502.828.000,00	11.446.424.109,00	2.276,41
2	Bank Nagari Muara Labuh	1300010006298	209.334.967,60	262.391.403,26	(53.048.435,66)	(20,22)
3	Kas Tunai		34.792.745,00	63.139.241,64	(28.346.496,64)	(44,90)
JUMLAH			12.193.379.820,62	828.348.644,94	11.365.031.175,68	1.372,01

5) Kas di Bendahara Kapitasi JKN

Kas di di Bendahara Kapitasi JKN merupakan kas pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Dimana pada tahun sebelumnya, Puskesmas tergabung kedalam UPT BLUD Puskesmas Kabuparen Solok Selatan yang telah berdiri semenjak 1 Januari 2017. Namun pada tahun 2022 berubah statusnya menjadi UPT PUSKESMAS.

Per 31 Desember 2022 saldo kas pada UPT PUSKESMAS sebesar Rp549.090.169,22

Tabel V.3.10 Kas di Bendahara Kapitasi JKN

No	Uraian	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan	Persentase (%)
1	BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan	0,00	1.078.269.813,00	(1.078.269.813,00)	(100,00)
2	UPT Puskesmas Dinas Kesehatan	549.090.169,22	0,00	549.090.169,22	100,00
JUMLAH		549.090.169,22	1.906.618.457,94	549.090.169,22	28,80

Saldo kas pada UPT PUSKESMAS sebesar Rp549.090.169,22,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.3.11 Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN

No	Uraian	Rekening	31-Dec-22	31-Dec-21	Peningkatan/ Penurunan	Persentase (%)
1	Bank Nagari Lubuk Gadang	1201.0101.00320-2	0,00	1.378.046.633,00	(1.078.046.633,00)	(100,00)
2	Puskesmas Sungai Kala	1301.0101.00457-4	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Puskesmas Pakan Rabaa (KPGD)	1301.0101.00454-4	4.802.127,00	0,00	4.802.127,00	0,00
4	Puskesmas Muara Labuh	1301.0101.00455-2	147.013.792,00	0,00	147.013.792,00	0,00
5	Puskesmas Pakan Selasa	1301.0101.00452-9	60.373.757,22	0,00	60.373.757,22	0,00
6	Puskesmas Lubuk Gadang	1301.0101.00451-1	216.769.242,00	0,00	216.769.242,00	0,00
7	Puskesmas Bidar Alam	1301.0101.00453-0	54.382.676,00	0,00	54.382.676,00	0,00
8	Puskesmas Merci	1301.0101.00456-6	33.202.996,00	0,00	33.202.996,00	0,00
9	Puskesmas Lubuk Ulang Aling	1301.0101.00426-1	32.545.330,00	0,00	32.545.330,00	0,00
10	Kas Tuns		0,00	223.180,00	(223.180,00)	(100,00)
JUMLAH			540.090.169,22	1.078.269.813,00	(529.179.643,78)	(49,08)

6) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada pada bendahara Sekolah Negeri (SDN dan SMPN) yang masih aktif yang berasal dari sisa bantuan opersional sekolah pada 31 Desember 2022, sebesar Rp701.982.844,00, sementara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp495.668.011,00 artinya terdapat peningkatan sebesar Rp206.314.833,00 atau 41,62% seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3.12 Kas di Bendahara BOS

No	Sekolah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SD	428.498.073,00	268.524.028,00	159.974.045,00	59,58
2	SMP	273.484.771,00	227.143.983,00	46.340.788,00	20,40
	JUMLAH	**701.982.844,00**	**495.668.011,00**	**206.314.833,00**	**41,62**

Adapun rincian sisa kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

7) Kas di Bendahara BPBD

Saldo kas di Bendahara BPBD per 31 Desember 2022 dimutasikan ke kas daerah sebesar Rp38.045.000,00.

Tabel V.3.13 Kas di Bendahara BPBD

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	38.080.855,00	(38.080.855,00)	(100,00)
	JUMLAH	**0,00**	**38.080.855,00**	**(38.080.855,00)**	**(100,00)**

8) Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas untuk menampung kas yang berasal dari setoran kepada pihak ketiga. Kas lainnya terdiri dari kas yang berasal dari pemungutan pajak pusat namun sampai dengan akhir tahun yang belum disetorkan ke kas Negara.
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 Sementara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp211.073.903,00.seperti terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel V.3.14Kas Lainnya

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	176.928.629,00	(176.928.629,00)	(100,00)
2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.153.638,00	(2.153.638,00)	(100,00)
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	32.013.036,00	5.833.140,00	17,99
	JUMLAH	0,00	211.073.903,00	(175.222.127,00)	(83,01)

B. Piutang	31-Dec-22	31-Dec-21
	(Rp)	(Rp)
	17.054.707.891,50	24.194.927.335,01

Saldo piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.054.707.891,50 Jika dibandingkan dengan saldo piutang 31 Desember 2021 sebesar Rp24.194.927.335,01, mengalami penurunan sebesar Rp7.140.219.443,51 atau turun 29,51%, dengan rincian.

Tabel V.3.15Piutang Netto

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/	Persentase
		(Rp)	(Rp)	Penurunan	
1	PIUTANG	53.920.297.555,38	72.172.365.474,94	(18.252.067.909,56)	(25,29)
2	PENYISIHAN PIUTANG	(36.865.589.673,88)	(47.977.438.139,93)	11.111.848.466,05	(23,16)
	PIUTANG NETTO	17.054.707.891,50	24.194.927.335,01	(7.140.219.443,51)	(29,51)

Dalam melakukan penyisihan piutang, metode penyisihan piutang tak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tak tertagih pada saat pelaporan keuangan, metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.16 Rincian Piutang

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/	Persentase
		(Rp)	(Rp)	Penurunan	
I	PIUTANG PENDAPATAN	53.765.242.065,38	72.172.365.474,94	(18.407.123.409,56)	(25,52)
	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	(36.864.914.336,38)	(47.977.438.139,93)	11.112.623.743,55	(23,16)

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	PIUTANG PENDAPATAN NETTO	**16.900.427.669,00**	**24.194.927.335,01**	**(7.294.499.666,01)**	**(30,15)**
II	PIUTANG LAINNYA	155.055.500,00	0,00	155.055.500,00	100,00
	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	(775.277,50)	0,00	(775.277,50)	100,00
	PIUTANG LAINNYA NETTO	**154.280.222,50**	**0,00**	**154.280.222,50**	**100,00**

Rincian piutang di atas terdiri dari:

I. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.900.427.669,00 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel V.3.17 Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	PIUTANG PENDAPATAN	**53.765.242.065,38**	**72.172.365.474,94**	**(18.407.123.409,56)**	**(25,52)**
	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	(36.864.814.396,38)	(47.977.438.139,93)	11.112.623.743,55	(23,16)
	PIUTANG PENDAPATAN NETTO	**16.900.427.669,00**	**24.194.927.335,01**	**(7.294.499.666,01)**	**(30,15)**
1	Piutang Pajak	18.018.014.963,00	16.514.438.842,00	1.503.576.121,00	9,10
	Penyisihan Piutang Pajak	(10.381.921.529,09)	(10.181.746.128,64)	(200.185.400,45)	1,97
	Piutang Pajak Netto	***7.636.093.433,91***	***6.332.692.713,36***	***1.303.390.720,55***	**20,58**
2	Piutang Retribusi	1.970.109.750,00	2.117.865.088,00	(147.755.338,00)	(6,98)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.926.103.288,00)	(1.582.549.958,19)	(343.553.329,81)	21,71
	Piutang Retribusi Netto	***44.006.462,00***	***535.315.129,81***	**(491.311.667,81)**	**(91,78)**
3	Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dividen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	30.242.352.032,38	41.898.865.185,94	(11.656.513.153,56)	(27,82)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(24.556.779.579,29)	(36.237.142.053,10)	11.656.362.473,81	(32,16)
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	***5.685.572.453,09***	***5.685.723.132,84***	**(150.679,75)**	**(0,00)**
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.524.765.320,00	11.641.193.259,00	(8.116.427.939,00)	(69,64)

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	*3.534.765.320,00*	*11.641.193.359,00*	*(8.106.428.039,00)*	*(69,64)*

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.900.427.669.00 sebagaimana terinci dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

Nilai saldo piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.636.083.433.91. Jika dibandingkan dengan nilai saldo piutang pajak piutang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.332.692.713,36 terjadi kenaikan saldo piutang pajak sebesar Rp1.350 288.407,79 atau naik sebesar 21,32%.

Tabel V.3.18Rincian Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Piutang Pajak	18.018.014.963,00	16.514.438.842,00	1.550.709.475,00	9,39
	Penyisihan Piutang Pajak	(10.381.931.529,09)	(10.181.746.128,64)	(200.421.087,21)	1,97
	Piutang Pajak Netto	**7.636.083.433,91**	**6.332.692.713,36**	**1.350.288.407,79**	**21,32**
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.546.901.546,00	15.995.337.053,00	1.551.564.493,00	9,70
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	(10.379.575.962,00)	(10.179.150.619,70)	(200.425.342,30)	1,97
	Piutang Pajak Netto	7.167.325.584,00	5.816.186.433,30	1.351.139.150,70	23,23
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	471.113.417,00	518.246.771,00	(47.133.354,00)	(9,09)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.355.567,09)	(2.591.233,85)	235.666,76	(9,09)
	Piutang Pajak Netto	468.757.849,91	515.655.537,15	(46.897.687,24)	(9,09)
5	Piutang Pajak Reklame	0,00	855.018,00	(855.018,00)	100,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	0,00	(4.275,09)	4.275,09	100,00
	Piutang Pajak Netto	0,00	850.742,91	(850.742,91)	100,00

Nilai saldo piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.636.083.433,91 terdiri dari:

1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.546.901.546,00 yang merupakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan penyisihan piutang pajak sebesar (Rp10.379.575,962), jika dibandingkan dengan nilai piutang pajak dan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp15.995.337.053,00 dan (Rp10.179.150.619,70), terjadi kenaikan piutang pajak sebesar Rp1.551.564.493,00 atau naik sebesar 9,70%. Sedangkan untuk penyisihan piutang pajak terjadi penurunan sebesar (Rp200.425.342,30) dengan persentase 1.97%.

Tabel V.3.19 Rincian Piutang Pajak

Jenis Pajak	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.546.901.546,00	15.996.337.053,00
Jumlah	17.546.901.546,00	15.996.337.053,00
Penyisihan Piutang Pajak	(10.379.575.962,00)	(10.179.150.619,70)
Piutang Pajak Netto	7.167.325.584,01	5.816.186.433,30

Pada Tahun 2022 total ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebesar Rp2.846.026.329,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 81.849 lembar, dan atas ketetapan Tahun 2022 tersebut terealisasi sebesar Rp1.200.850.590,00 dan dengan tidak terealisasinya ketetapan tersebut secara keseluruhan menambah nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.645.175.739,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 30.479 lembar. Untuk rincian pengelolaan PBB P2 pada Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Adapun nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2022 untuk masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1.	Kecamatan KPGD	1.919.779.614
2.	Kecamatan Pauh Duo	1.251.225.264
3.	Kecamatan Sangir	7.938.561.044
4.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	1.394.852.434
5.	Kecamatan Sangir Batang Hari	1.112.901.413
6.	Kecamatan Sangir Jujuan	1.373.507.397
7.	Kecamatan Sungai Pagu	2.556.074.366
	Jumlah	**17.546.901.546**

Sampai dengan Tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB P2 untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan yaitu Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangai Balai Janggo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir Batang Hari serta Kecamatan Sangir Jujuan yang bertujuan untuk menyempurnakan data objek pajak dan subjek pajak di setiap kecamatan dengan cara mencocokan data dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang terdapat dalam Daftar Hasil Rekaman (DHR) di aplikasi SISMIOP PBB P2 dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Basis Data Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.63-2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Sangir Balai Janggo serta Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.216-2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Solok Selatan.

Untuk hasil validasi dituangkan dalam laporan hasil kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 sebagaiman yang telah disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintahan

Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020

Nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.379.575.962,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Lancar dengan persentase penyisihan sebesar 10,5%, berjumlah Rp210.575.206;
2. Kategori Kurang Lancar dengan persentase pinyisihan sebesar 50%, berjumlah Rp221.850;
3. Kategori Diragukan dengan persentase pinyisahan sebesar 50%, berjumlah Rp3.760.645.788,00; dan
4. Kategori Macet dengan persentase pinyisihan sebesar 100%, berjumlah Rp6.408.133.119,00.

Untuk penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember Tahun 2022 selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran** 7.

2) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp468.757.849,92,00 adalah alokasi pembayaran pajak penerangan jalan untuk Kabupaten Solok Selatan dari PT PLN (Persero) untuk alokasi bulan Desember 2021. Penyisihan piutang ini adalah sebesar 0,5% atau Rp2.355.567,09 dengan kategori lancar.

Tabel V.3.20 Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Jenis Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	471.113.417,00	518.246.771,00	(47.133.354,00)	(9,09)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.355.567,09)	(2.591.233,85)	235.666,76	(9,09)
	Piutang Pajak Netto	**468.757.849,91**	**515.655.537,15**	**(46.897.687,24)**	**(9,09)**

3) Piutang Pajak Reklame

Per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak memiliki Piutang Pajak Reklame atau nilai Piutang Pajak Reklame sebesar Rp0,00 sehubungan dengan wajib pajak telah melunasi pajaknya sebelum 31 Desember 2022.

Tabel V.3.21 Piutang Pajak Reklame

No	Jenis Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Pajak Reklame	0,00	855.018,00	(855.018,00)	100,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	0,00	(4.275,09)	4.275,09	100,00
	Piutang Pajak Netto	**0,00**	**850.742,91**	**(850.742,91)**	**100,00**

2. Piutang Retribusi

Nilai Saldo Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.006.462,00. Piutang ini mengalami penurunan sebesar Rp491.311.667,81 atau turun sebesar 91,78% jika dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi tahun 2021 yang berjumlah Rp535.318.129,81. Adapun rincian piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3.22 Piutang Retribusi

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	PIUTANG RETRIBUSI	1.370.109.752,00	2.117.869.386,00	(147.758.339,00)	(6,98)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	*(1.926.103.288,00)*	*(1.582.549.961,19)*	*(343.553.325,81)*	21,71
	PIUTANG RETRIBUSI NETTO	**44.006.462,00**	**535.318.129,81**	**(491.311.667,81)**	**(91,78)**
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	82.817.800,00	272.546.338,00	(189 728.438,00)	(69,61)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	*(82.817.300,00)*	*(83.766.542,19)*	949.642,19	(1 13)
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) Netto	0,00	188.779.795,81	(188.779.795,81)	100,00
2	Piutang Rembusi IMB Dinas PTSP	25.446.250,00	26.163.750,00	(717 500,00)	(2,74)
	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	*(25.446.250,00)*	*(26.163.750,00)*	*717.500,00*	*(2,74)*
	Piutang Retribusi IMB Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.375 000,00	8.375.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*(8.375.000,00)*	*(8 375.000,00)*	*0,00*	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Sekretariat DPRD	3.450.000,00	3.450 000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*(3.450.000,00)*	*(3.450 000,00)*	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kecamatan Sungai Pagu	4.925 000,00	4.925.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*(4.925.000,00)*	*(4.925.000,00)*	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.853.472.800,00	1.810.785.000,00	42.687.800,00	2,36
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.809 461.138,00)	(1.464.244.666,00)	(345.219.472,00)	23,58
	Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Netto	**44.006.462,00**	**346.538.334,00**	**(302.531.872,00)**	**(87,30)**

1) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Saldo Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan piutang tahun 2021 sebesar Rp188.779.795,81 piutang ini mengalami penurunan sebesar Rp188.779.795,81 atau turun sebesar 100%.

Tabel V.3.23 Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	82.817.900,00	272.546.338,00	(189.728.438,00)	(69,61)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(82.817.900,00)	(83.766.542,19)	948.642,19	(1,13)
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) Netto	0,00	188.779.795,81	(188.779.795,81)	100,00

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp82.817.900,00 merupakan piutang kepada PT.INDOSAT sebesar Rp82.817.900,00 merupakan piutang atas kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Tahun 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan sampai tanggal Neraca belum pernah diterbitkan Surat Tagihan atas Retribusi tersebut. Adapun rincian dari Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3.24 Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No	Nomor SKRD	Tanggal SKRD	Wajib Retribusi	Jumlah (Rp)
1	2388	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.142.000,00
2	2390	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.268.000,00
3	2391	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.145.000,00
4	2392	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.193.000,00
5	2393	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.193.000,00
6	2394	19-Nov-13	PT. INDOSAT	12.025.000,00
7	2395	19-Nov-13	PT. INDOSAT	11.851.900,00
	JUMLAH PIUTANG KEPADA PT. INDOSAT			**82.817.900,00**
	PENYISIHAN PIUTANG			**-82.817.900,00**

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp82.817.900,00 kepada PT. INDOSAT dengan Penyisihan atas Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar (Rp82.817.900,00) termasuk penyisihan piutang Kategori Macet dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100%.

Atas piutang retribusi menara telekomunikasi tersebut telah dilakukan pelimpahan pengurusan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui KPKNL Padang dengan surat Sekretaris Daerah nomor 900/71/BPKD/II-2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal permintaan pengurusan piutang dan surat Bupati Solok Selatan nomor 900/140/BPKD/III-2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal permintaan pelimpahan pengurusan piutang, dan pelimpahan piutang tersebut telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan surat nomor : SP3N-111/PUPNG.04/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pengurusan piutang Rembusi Menara Telekomunikasi milik Pemerintah Kabuparen Solok Selatan telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan upaya penagihanpun telah dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan Surat Paksa Nomor SP-86/PUPNC.04.00/2019 tanggal 26 April 2019, akan tetapi sampai

saat penyajian Laporan Keuangan ini Pihak Penanggung Hutang belum melunasi Piutang tersebut.

2) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp26.163.750,00

Tabel V.3.25 Piutang Retribusi IMB

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Piutang Retribusi IMB Cipta PTSP	25.446.250,00	26.163.750,00	(717.500,00)	(2,74)
	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	*(25.446.250,00)*	*(26.163.750,00)*	*717.500,00*	*(2,74)*
	Piutang Retribusi IMB Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Retribusi IMB sebesar Rp25.446.250,00 adalah piutang retribusi IMB yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Piutang ini disisihkan sebesar 100% atau Rp25.446.250,00 dengan kategori macet.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas pemanfaatan/pemakaian fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan yang dipisahkan ini sebesar Rp8.375.000,00 dengan penyisihan 100% dan kategori macet.

Tabel V.3.26 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*(8.375.000,00)*	*(8.375.000,00)*	*0,00*	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	0,00	0,00	**0,00**	0,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Sekretariat DPRD	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*(3.450.000,00)*	*(3.450.000,00)*	*0,00*	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kecamatan Sungai Pagu	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*(4.925.000,00)*	*(4.925.000,00)*	*0,00*	0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Netto	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00

4) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo Piutang Retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.006.462.00 yang terdiri dari piutang retribusi tahun 2016 sd 2022. Penetapan piutang retribusi pelayanan pasar baru dilakukan pada tahun 2017 maka total piutang retribusi saat ini merupakan gabungan piutang pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel V.3.27 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.853.470.600,00	1.810 783.000,00	42.687.600,00	2,36
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.809.464.138,00)	(1.464.244.666,00)	(345.219.472,00)	23,58
	Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Netto	**44.006.462,00**	**346.538.334,00**	**(302.531.872,00)**	**(87,30)**

Nilai piutang retribusi pelayanan pasar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.853.470.600,00 dengan penyisihan sebesar Rp1.809.464.138,00.
Untuk rincian piutang retribusi pasar selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 8**

3. Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun sekarang nilai dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Soluk selatan ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) belum disampaikan berhubung RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat belum terlaksana, sementara piutang dari PT Balairung tahun ini tidak ada disebabkan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian.

Jenis Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0,00
Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Nilai Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.685,572,453,09. Jika dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2021 sebesar Rp5.685.723.132,84 terdapat penurunan piutang sebesar Rp150.679,75 atau naik sebesar 0,00% sesuai dengan tabel berikut.

Tabel V.3.28Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	30.242.352.032,38	41.898.965 185,94	(11.656.613.153,56)	(27 82)
	PENYISIHAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	*(24.556.779.579,29)*	*(36.213.142.053,10)*	11.656.362.473,81	(32.19)

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH NETTO	**5.685.572.453,09**	**5.685.723.132,84**	**(150.679,75)**	**(0,00)**
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR	18.402.559,62	89.351.615,94	(70.949.056,32)	(79,40)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(9.759.123,07)*	*(53.810.986,56)*	*43.641.846,49*	(81,78)
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**8.633.436,55**	**35.740.646,38**	**(27.107.209,83)**	**(75,84)**
2	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD RSUD	5.747.915.543,00	5.427.740.347,00	320.175.196,00	5,90
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(72.277.503,22)*	*(49.624.706,74)*	*(22.652.794,48)*	45,65
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**5.675.638.039,78**	**5.378.115.638,26**	**297.522.401,52**	**5,53**
3					
3	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD PUSKESMAS	0,00	90.586.200,00	(90.586.200,00)	(100,00)
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD PUSKESMAS	0,00	*(452.931,00)*	452.931,00	(100,00)
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	**90.133.269,00**	**(90.133.269,00)**	**(100,00)**
4	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Piutang Tuntutan Perbendaharaan	21.700.661.271,00	21.700.661.271,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(21.700.661.271,00)*	*(21.700.661.271,00)*	0,00	0,00
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Piutang Tuntutan Kerugian Daerah	454.333.948,00	454.333.948,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(454.333.948,00)*	*(272.600.368,80)*	*(181.733.579,20)*	66,67
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	**181.733.579,20**	**(181.733.579,20)**	**(100,00)**
6	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	2.319.737.734,00	14.136.191.804,00	(11.816.454.070,00)	(83,59)
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	*(2.319.737.734,00)*	*(14.136.191.804,00)*	*11.816.454.070,00*	(83,59)
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Piutang Dana Revolving Dinas BPMPrKB (DINSOSPMD)	2.114.475.400,00	13.929.828.470,00	(11.815.353.070,00)	(84,82)
	Penyisihan Piutang	*(2.114.475.400,00)*	*(13.929.828.470,00)*	*11.815.353.070,00*	(84,82)

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Dana revolving				
	Piutang Dana Revolving Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2	Piutang Dana Revolving Dinas KOPERINDAG	205.262.334,00	206.363.334,00	(1.101.000,00)	(0,53)
	Penyisihan Piutang Dana revolving	*(205.262.334,00)*	*(206.363.334,00)*	*1.101.000,00*	*(0,53)*
	Piutang Dana Revolving Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	1.300.976,76	0,00	1.300.976,76	100,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah -Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
	Piutang Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	**1.300.976,76**	**0,00**	**1.300.976,76**	**100,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

1) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang yang berasal dari denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan. Pada tahun 2022, nilai saldo piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp8.633.436,55 dimana nilai piutang sebesar Rp18.402.559,62 dengan penyisihan sebesar Rp9.769.123,07.

Tabel V.3.29 Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR	18.402.559,62	89.351.615,94	(70.949.056,32)	(79,40)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(9.769.123,07)*	*(53.610.969,56)*	*43.841.846,49*	*(81,78)*
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**8.633.436,55**	**35.740.646,38**	**(27.107.209,83)**	**(75,84)**

2) Piutang BLUD RSUD

Per 31 Desember 2022 Nilai Saldo Piutang BLUD RSUD sebesar Rp5.675.638.039,78, dimana nilai piutang sebesar Rp5.747.915.543,00 dengan penyisihan sebesar Rp72.277.503,22. Jika dibandingkan dengan piutang yang sama

pada tahun 2021 sebesar Rp5.378.115.638,26 terjadi kenaikan piutang sebesar Rp297.522.401,52 atau sebesar 5,53%.

Tabel V.3.30 Piutang BLUD RSUD

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-BLUD RSUD	5.747.315.643,00	5.427.740.347,00	320.175.196,00	5,90
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(72.277.503,22)*	*(49.624.708,74)*	*(22.652.794,48)*	45,65
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**5.675.638.039,78**	**5.378.115.638,26**	**297.522.401,52**	5,53

Adapun rincian piutang BLUD RSUD per 31 desember 2022 sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 9**.

3) Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Piutang Tuntutan Perhendaharaan sebesar Rp21.700.661.271,00 adalah Piutang yang telah dikeluarkan Surat Penetapannya oleh **BPK-RI**, dengan penyisihan 100% sebesar (Rp21.700.661.271,00) dengan kategori macet. Pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi atas piutang ini. Adapun rincian piutang ini sabagai berikut:

Tabel V.3.31 Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Piutang Tuntutan Perbendaharaan	21.700.661.271,00	21.700.661.271,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(21.700.661.271,00)*	*(21.700.661.271,00)*	0,00	0,00
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Adapun rincian piutang di atas sebagai berikut:

Tabel V.3.32 Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan Sesuai dengan SKP BPK

NO	NO. SK BPK	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		Piutang Tuntutan Perbendaharaan	**21.700.661.271,00**	**21.700.661.271,00**		
1	NOMOR 27.TP12-2013/VI/2017.SKP	Sekretariat Daerah	16.734.568.040,00	16.734.568.040,00	0,00	0,00
2	NOMOR 31.TP12-2013/VII/2017.SKP	Sekretariat DPRD	520.775.212,00	520.775.212,00	0,00	0,00
3	NOMOR 33.TP12-2013/VII/2017.SKP	Dinas Kesehatan	2.188.550,00	2.188.550,00	0,00	0,00
4	NOMOR 36.TP12-2013/VII/2017.SKP	Dinas Pekerjaan Umum	313.791.787,00	313.791.787,00	0,00	0,00

NO	NO. SK BPK	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
5	NOMOR 38.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas PTSP	45.719.665,00	45.719.665,00	0,00	0,00
6	NOMOR 25.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas Satpolpp dan Damkar	12.564.246,00	12.984.246,00	0,00	0,00
7	NOMOR 44.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas Sosial PMD	157.603.500,00	157.603.500,00	0,00	0,00
8	NOMOR 52.TP12-2018/MW2017.SKP	Kantor Camat Sangir	9.706.782,00	9.706.782,00	0,00	0,00
9	NOMOR 54.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas Pertanian	110.443.909,00	110.443.909,00	0,00	0,00
10	NOMOR 55.TP12-2018/MW2017.SKP	DPKD	3.647.030.343,00	3.647.030.343,00	0,00	0,00
11	NOMOR 58.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas Pendidikan	59.807.408,00	59.807.408,00	0,00	0,00
12	NOMOR 60.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	600,00	600,00	0,00	0,00
13	NOMOR 62.TP12-2018/MW2017.SKP	Kantor Kesbangpol Pmas	19.000.263,00	19.000.263,00	0,00	0,00
14	NOMOR 67.TP12-2018/MW2017.SKP	Dinas Satpol PP dan Damkar	17.627.066,00	17.627.066,00	0,00	0,00

Untuk rincian piutang Tuntutan Perbendaharaan lebih lanjut dilihat pada **Lampiran 10.**

4) Piutang Tuntutan Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Kerugian sebesar Rp454.333.948,00 adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Penyisihan piutang ini adalah 100% sebesar Rp454.333.948 dengan kategori macet. Pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi atas piutang ini

Tabel V.3.33 Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Piutang Tuntutan Kerugian Daerah	454.333.948,00	454.333.948,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	*(454.333.948,00)*	*(272.600.368,80)*	*(181.733.579,20)*	66,67
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	**181.733.579,20**	***(181.733.579,20)***	***(100,00)***

Piutang Tuntutan Kerugian sebesar Rp454.333.948,00 terdapat pada OPD berikut:

NO	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**454.333.948,000**	**454.333.948,000**	0,00	0,00
1	Sekretariat Daerah	70.310.000,000	70.310.000,000	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	384.023.948,000	384.023.948,000	0,00	0,00

Untuk rincian piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah lebih lanjut dilihat pada **Lampiran 11.**

5) Piutang Dana Revolving

Nilai Saldo Piutang Dana Revolving sebesar Rp0,00 dimana piutang tersebut seluruhnya sudah macet dengan penyisihan sebesar Rp2.319737.734,00.

Piutang revolving adalah Piutang yang dipersepsikan sebagai dana bergulir pada SKPD BPMPprKB sekarang menjadi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperindag sekarang menjadi Dinas Perindagkop UKM.

Tabel V.3.34 Dana Revolving

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	2.319.737.734,00	14.136.191.804,00	(11.816.454.070,00)	(83,59)
	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah-Dana Revolving	*(2.319.737.734,00)*	*(14.136.191.804,00)*	*11.816.454.070,00*	*(83,59)*
	Piutang Lain - lain PAD yang Sah Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Piutang Dana Revolving Dinas BPMPrKB (DINSOSPMD)	2.114.475.400,00	13.929.828.470,00	(11.815.353.070,00)	(84,82)
	Penyisihan Piutang Dana revolving	*(2.114.475.400,00)*	*(13.929.828.470,00)*	*11.815.353.070,00*	*(84,82)*
	Piutang Dana Revolving Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Piutang Dana Revolving Dinas KOPERINDAG	205.262.334,00	206.363.334,00	(1.101.000,00)	(0,53)
	Penyisihan Piutang Dana revolving	*(205.262.334,00)*	*(206.363.334,00)*	*1.101.000,00*	*(0,53)*
	Piutang Dana Revolving Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada tahun 2022 tidak ada realisasi piutang dana revolving Piutang ini termasuk kategori macet dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100%, Rincian Piutang Revolving tersebut adalah sebagai berikut;

a. Revolving Fund BPMPPr&KB

Piutang Dana Bergulir (revolving) per 31 Desember 2022 pada BPMPrKB (sekarang DINSOSPMD) adalah sebesar Rp2.114.475.400,00 dengan penyisihan piutang sebesar (Rp2.114.475.400,00) dimana saat ini piutang tersebut termasuk dalam kategori macet.

Pada tahun 2022 ini, dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang revolving tersebut dimana sesuai dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 460.128-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penghapusan Denda Pada Dana Kegiatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving Tahun 2006. nilai denda sebesar Rp11.063.949.170,00 dihapuskan dari perhitungan piutang, sehingga piutang revolving tersebut hanya terdiri dari sisa nilai pokok ditambah dengan sisa bunga.

Tabel V.3.35 Piutang Dana Revolving BPMPPr&KB (DINSOSPMD)

No	Uraian	Jumlah	Kategori Likuiditas	Persentase Penyisihan	JUMLAH PENYISIHAN
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pokok Dana Bergulir BPM.Pr&KB 2006	1.847.681.700,00	Macet	100.00%	1.847.681.700,00
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPM.Pr&KB 2006	266.793.700,00	Macet	100.00%	266.793.700,00
JUMLAH		2.114.475.400,00			2.114.475.400,00

Rincian piutang revolving lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 460.128-2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penghapusan Denda Pada Dana Kegatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pola Revolving Tahun 2006 huruf B sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 12**.
Selain itu, dalam Keputusan Bupati di atas, sebagaimana yang terdapat pada huruf C, juga ditetapkan bahwa nilai piutang revolving yang disalurkan ke PDAM sebesar Rp751.266.400 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp636.666.400 dan sisa bunga sebesar Rp114.600.000,00 seluruhnya dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

b. Revolving Fund Koperindag (DINAS PERINDAGKOP-UKM)

Nilai piutang Dana Revolving Fund Koperindag Per Desember 2022 sebesar Rp205.262.334,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp182.669.067,00 dan Piutang Bunga Rp22.593.267,00. Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp205.262.334,00 merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100%.

Tabel V.3.36 Rincian Piutang Revolving KOPERINDAG (DINAS PERINDGKOP dan UKM)

No.	Uraian	Piutang Lain-lain PAD yang Sah - KOPERINDAG (DINAS PERINDGKOP dan UKM)					
		Jumlah Dana di Salurkan		Setor Ke Kas Daerah s/d 31 Desember 2022		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi	329.000.000,00	35.540.000,00	296.864.533,00	30.136.733,00	62.115.467,00	3.340.267,00
2	UKM	357.000.000,00	42.840.000,00	336.446.400,00	29.537.300,00	120.553.600,00	13.253.000,00
JUMLAH		686.000.000,00	82.380.000,00	503.330.933,00	59.786.733,00	182.669.067,00	22.593.267,00

a) Revolving Fund 2006

Nilai piutang yang berasal dari Dana Revolving Fund Koperindag 2006 Per Desember 2022 sebesar Rp48.491.500,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp42.763.400,00 dan Piutang Bunga Rp5.728.100,00 dengan plafon awal sebesar Rp336.000.000,- terdiri dari plafon pokok Rp300.000.000,00 dan plafon bunga pinjaman Rp36.000.000,00. Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp49.592.500,00 merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

Tabel V.3.37 Rincian Piutang Revolving Tahun 2006 - KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)

No.	Uraian	2006					
		Jumlah Dana di Salurkan		Setor Ke Kas Daerah s/d 31 Desember 2022		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi	140.000.000,00	16.800.000,00	129.936.600,00	10.073.400,00	10.063.400,00	6.726.600,00
2	UKM	160.000.000,00	19.200.000,00	130.300.000,00	17.196.500,00	29.700.000,00	2.001.500,00
JUMLAH		300.000.000,00	36.000.000,00	257.236.600,00	30.271.900,00	42.763.400,00	5.728.100,00
JUMLAH PIUTANG							48.491.500,00
PENYISIHAN PIUTANG							(48.491.500,00)

b) Revolving Fund Koperindag 2008

Nilai piutang lain-lain yang berasal dari Dana Revolving Fund Koperindag 2008 Per Desember 2022 sebesar Rp156.770.834,00 terdiri dari Piutang Pokok sebesar Rp139.905.667,00 dan Piutang Bunga Rp16.865.167,00 Penyisihan piutang atas dana bergulir sebesar Rp156.770.834,00 dan merupakan kategori macet dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

Tabel V.3.38 Rincian Piutang Revolving Tahun 2006 - KOPERINDAG (DINAS PERINDAGKOP dan UKM)

No.	Uraian	2008					
		Jumlah Dana di Salurkan		Setor Ke Kas Daerah s/d 31 Desember 2022		Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi	189.000.000,00	22.680.000,00	139.947.933,00	17.126.833,00	49.052.067,00	5.553.167,00
2	UKM	207.000.000,00	23.640.000,00	106.146.400,00	12.388.500,00	90.853.600,00	11.251.500,00
JUMLAH		396.000.000,00	46.320.000,00	246.094.333,00	29.514.833,00	139.905.667,00	16.865.167,00
JUMLAH PIUTANG						156.770.834,00	
PENYISIHAN PIUTANG						(156.770.834,00)	

5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.534.765.320,00 dimana piutang ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp8.106.428.039,00 atau turun sebesar 69,64%.

Tabel V.3.39 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/	Persentase
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.534.765.320,00	11.641.193.359,00	(8.106.428.039,00)	(69,64)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	3.534.765.320,00	11.641.193.359,00	(8.106.428.039,00)	(69,64)

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.534.765.320,00 adalah Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak

Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dimana alokasi untuk Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.40 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Kurang Saur Tahun 2022
	(Rp)
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.154.959.077,00
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	681.047.607,00
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.691.359.974,00
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	27.398.662,00
Jumlah	**3.534.765,320,00**

II. Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.280,222,50 dengan penyisihan sebesar Rp775 277,50.

Tabel V.3.41 Rincian Piutang Lainnya

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/	Persen
		(Rp)	(Rp)	Penurunan	tase
1	**PIUTANG LAINNYA**	155.055.500,00	0,00	155.055.500,00	0,00
	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	(775.277,50)	0,00	(775.277,50)	0,00
	PIUTANG LAINNYA NETTO	**154.280.222,50**	**0,00**	**154.280.222,50**	**0,00**
	Piutang Pendapatan Kapitasi FKTP	155.055.500,00	0,00	155.055.500,00	(1,00)
	Penyisihan Piutang PendapatanKapitasi FKTP	(775.277,50)	0,00	(775.277,50)	(1,00)
	Jumlah Piutang Lainnya Netto	**154.280.222,50**	**0,00**	**154.280.222,50**	**(1,00)**

Adapun rincian Piutang FKTP Puskesmas per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel V.3.42Piutang Lainnya - Kapitasi FKTP

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021					TOTAL HUTANG
		RAWATAN	PERSALINAN	RUJUKAN	KB	PROLA NIS	
1	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas KPGO	2.200.000	10.775.000	483.000	1.290.000	1.710.000	16.438.000
2	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sungai Pagu		8.025.000	-	2.000.000	620.000	10.645.000
3	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Pauh Duo			80.000	710.000		790.000
4	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir	32.000.000	2.800.000	13.236.000	400.000	-	48.436.000
5	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Lunang	11.025.000	-	5.124.000	-		16.149.000
6	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Batu Jangga	32.200.000	4.800.000	11.090.000			48.090.000
7	Utang Kegiatan Non Kapitasi UPT Puskesmas Sangir Batang Hari	7.400.000	800.000	5.507.500			13.707.500
	JUMLAH	84.825.000	27.200.000	36.300,500	4.400.000	2.330.000	156.055.500

C. Beban Dibayar Dimuka	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	380.518.319,00	153.311.622,00

Beban dibayar dimuka pada kondisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp380.518.319,00 jika dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2021 sebesar Rp153.311.622,00 terjadi penaikan saldo sebesar Rp227.206.697,00 atau sebesar 148,20%, jumlah tersebut merupakan beban dibayar dimuka yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel V.3.43 Beban dibayar dimuka

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	267.500,00	4.624.188,00	(4.356.688,00)	(94,22)
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	3.884.696,00	6.888.292,00	(3.003.596,00)	(43,60)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	3.256.233,00	5.046.796,00	(1.790.563,00)	(35,47)
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	7.476.992,00	3.174.598,00	4.302.394,00	135,53
6	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	1.643.496,00	8.002.229,00	(6.359.733,00)	(79,46)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	825.000,00	1.714.500,00	(889.500,00)	(51,71)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.068.671,00	2.167.454,00	(98.783,00)	(4,56)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.062.296,00	2.012.579,00	49.717,00	2,47
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.402.432,00	2.772.587,00	(370.155,00)	(13,35)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.304.113,00	0,00	3.304.113,00	0,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	5.477.049,00	(5.477.049,00)	(100,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.154.696,00	16.859.648,00	260.295.050,00	1.543,99
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	766.829,00	926.454,00	(159.625,00)	(17,23)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	74.933,00	(74.933,00)	(100,00)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	654.771,00	15.673.333,00	(15.018.562,00)	(95,82)
17	Dinas Pertanian	12.134.567,00	5.889.863,00	6.244.704,00	106,02
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.556.925,00	2.764.621,00	(1.207.696,00)	(47,09)
19	Sekretariat Daerah	29.180.602,00	31.605.309,00	(2.424.645,00)	(7,67)
20	Sekretariat DPRD	2.829.433,00	3.961.542,00	(1.132.109,00)	(28,58)
21	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	1.027.038,00	975.571,00	31.467,00	3,22
22	Kecamatan Sungai Pagu	1.285.267,00	1.308.558,00	(23.291,00)	(1,78)
23	Kecamatan Sangir	936.913,00	1.124.183,00	(187.270,00)	(16,66)
24	Kecamatan Sangir Jujuan	1.403.800,00	1.302.783,00	101.017,00	10,06
25	Kecamatan Sangir Batang Hari	1.753.150,00	1.932.692,00	(179.542,00)	(9,29)
26	Kecamatan Pauh Duo	1.312.683,00	1.266.575,00	46.108,00	3,64
27	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.111.338,00	1.635.796,00	475.542,00	29,07
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.378.117,00	9.535.660,00	(2.157.543,00)	(22,63)
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6.834.588,00	6.824.158,00	10.425,00	0,15
30	Inspektorat Daerah	1.016.438,00	697.167,00	319.271,00	45,65

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	515.525,00	901.408,00	(385.783,00)	(42.80)
32	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	2.581.646,00	5.419.391,00	(2.837.745,00)	(52.36)
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	969.408,00	918.708,00	39.700,00	4,16
Jumlah		380.518.319,00	153.311.622,00	227.206.697,00	148,20

Jenis Beban dibayar dimuka Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3.44 Rincian Beban dibayar Dimuka

No	Jenis Beban Dibayar Dimuka	31-Des-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Premi Asuransi Kecelakaan Diri	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Teritorial	0,00	9.533.333,00	(9.533.333,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Tempat Pembelajaran Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	380.518.319,00	90.940.085,00	289.565.234,00	318,39
6	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	20.279.204,00	(20.279.204,00)	(100,00)
7	Beban Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		380.518.319,00	153.311.622,00	227.206.697,00	148,20

D.Persediaan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	27.293.655.844,90	17.887.521.348,90

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.293.655.844,90 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.887.521.348,90 terjadi penungkatan saldo persediaan sebesar Rp9.406.134.496,00 atau naik sebesar 52,58%, berikut rincian rekapitulasi saldo dan mutasi secara keseluruhan persediaan selama tahun 2022 pada tiap Perangkat Daerah:

Tabel V.3.45 Rekapitulasi Persediaan per OPD

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	31.837.455,00	114.410.182,00	(82.572.727,00)	(72,16)
2	Dinas Kesehatan	8.112.979.572,00	8.163.533.807,00	(50.554.235,00)	(0,62)
3	UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan	0,00	9.343.390,00	(9.343.390,00)	(100,00)

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	5.179.352.943,00	4.293.216.147,00	(1.053.368.204,00)	(24,89)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perlangahan	13.391.725.942,00	1.150.036.000,00	12.241.689.942,00	1.064,46
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	235.476.539,00	213.289.189,00	22.187.350,00	10.40
7	Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran	5.204.000,00	550.500,00	4.653.500,00	845.32
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.625.000,00	40.548.600,00	(22.923.600,00)	(56.53)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	727.000,00	1.518.600,00	(791.600,00)	(52.13)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perkanan	584.467.527,90	444.757.577,30	139.709.950,00	31.41
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	653.609.359,00	216.848.545,00	436.961.814,00	201,69
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.278.000,00	1.145.000,00	1.133.000,00	98,95
13	Dinas Perhubungan	0,00	2.400.310.500,00	(2.400.310.500,00)	(100,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.415.500,00	310.500,00	1.105.000,00	355,88
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.525.000,00	5.786.000,00	(4.261.000,00)	(73.64)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.335.000,00	10.000.000,00	(8.665.000,00)	(86.65)
18	Dinas Pertanian	87.217.134,00	10.091.360,00	77.125.774,00	764,28
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	56.214.500,00	4.156.000,00	52.058.500,00	1.252,61
20	Sekretariat Daerah	6.141.000,00	0,00	6.141.000,00	0,00
21	Sekretariat DPRD	8.244.450,00	3.710.635,00	4.533.815,00	122,18
22	Kecamatan Kolo Parik Gadang Diateh	192.000,00	263.000,00	(71.000,00)	(27,00)
23	Kecamatan Sungai Pagu	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Sangir	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Sangir Jujuan	586.000,00	412.000,00	174.000,00	42,23
26	Kecamatan Sangir Batang Hari	202.000,00	504.000,00	(302.000,00)	(59,92)
27	Kecamatan Pauh Duo	510.000,00	346.500,00	164.000,00	47,40
28	Kecamatan Sangir Balai Janggo	860.500,00	690.500,00	170.000,00	24,62
29	Badan Penenggulangan Bencana Daerah	424.185.813,00	445.833.700,00	(21.647.887,00)	(4,86)
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.174.000,00	1.071.000,00	103.000,00	9,62
31	Inspektorat Daerah	925.500,00	1.571.500,00	(646.000,00)	(41,11)
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.108.500,00	3.087.500,00	(579.000,00)	(15,70)
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	480.315.610,00	407.560.610,00	72.755.000,00	17,85
34	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.220.000,00	3.724.000,00	496.000,00	13,32

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Jumlah		27.293.655.844,90	17.887.521.348,90	9.406.134.496,00	52,58

Rincian persediaan berdasarkan jenis persediaan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.46 Rincian persediaan per jenis persediaan

No	Jenis Persediaan	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ATK	558.559.655,00	162.742.239,00	395.817.416,00	243,22
2	Obat-obatan	9.963.519.422,00	12.395.511.974,00	(2.415.992.552,00)	(19,51)
3	Barang Cetakan	669.425.794,00	604.141.776,00	65.284.018,00	10,81
4	Materai dan Benda Pos Lainnya	2.950.000,00	6.133.000,00	(3.183.000,00)	(51,90)
5	Alat Kebersihan	1.385.066.262,00	25.096.840,00	1.360.369.422,00	5.290,92
6	Material Logistik	595.485.245,90	549.912.077,90	45.540.168,00	8,28
7	Bahan Kimia	123.424.424,00	130.205.640,00	(6.781.216,00)	(5,21)
8	Alat Listrik	79.856.600,00	36.413.350,00	43.445.250,00	119,31
9	Barang yang Dicetakkan ke Masyarakat	10.428.228.942,00	2.547.954.500,00	9.880.274.442,00	278,48
10	Bahan Bakar Minyak / Gas	32.235.015,00	0,00	32.235.015,00	0,00
11	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bahan Baku Bangunan	0,00	6.039.152,00	(6.039.152,00)	(100,00)
13	Bahan Makanan Pokok/Natural dan Pakan lainnya	129.564.686,00	40.155.600,00	89.409.285,00	222,66
14	Bibit Ternak	318.357.600,00	307.284.200,00	11.073.400,00	3,60
15	Bibit Tanaman	0,00	7.375.000,00	(7.375.000,00)	(100,00)
16	Obat-obatan Hewan	0,00	28.274.000,00	(28.274.000,00)	(100,00)
17	Suku cadang sarana mobilitas	0,00	51.072.000,00	(51.072.000,00)	(100,00)
	Jumlah	27.293.655.844,90	17.887.521.348,90	9.406.134.496,00	52,58

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp558.559.655,00 sementara pada 31 Desember 2021 sebesar Rp162.742.239,00. Terjadi kenaikan nilai persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp395.817.416,00 atau naik sebesar 243,22%. Berikut daftar persediaan Alat Tulis Kantor pada setiap OPD:

Tabel V.3.47 Persediaan Alat Tulis Kantor

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	22.335.285,00	83.366.979,00	(61.031.694,00)	(73,21)
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.848.300,00	(1.848.300,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	792.000,00	195.500,00	596.500,00	305,12
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	1.651.500,00	727.000,00	924.500,00	125,44
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	4.944.000,00	3.011.000,00	1.933.000,00	64,20
6	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	704.050,00	550.500,00	153.500,00	27,89
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.326.050,00	464.000,00	2.862.000,00	616,81

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	727.000,00	1.198.600,00	(471.600,00)	(39,35)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.289.750,00	4.033.800,00	(1.744.050,00)	(43,24)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip	481.498.975,00	36.173.625,00	445.325.350,00	1.231,08
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.140.000,00	1.146.000,00	(6.000,00)	(0,44)
12	Dinas Perhubungan	0,00	890.000,00	(890.000,00)	(100,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.353.520,00	310.520,00	1.043.000,00	335,91
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	740.000,00	1.716.000,00	(976.000,00)	(56,88)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
17	Dinas Pertanian	8.663.000,00	1.436.500,00	7.226.500,00	503,06
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.195.000,00	796.000,00	2.399.000,00	301,38
19	Sekretariat Daerah	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	0,00
20	Sekretariat DPRD	3.317.500,00	2.552.635,00	764.865,00	29,96
21	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	192.000,00	263.000,00	(71.000,00)	(27,00)
22	Kecamatan Sangir Jujuar	376.000,00	202.000,00	174.000,00	86,14
23	Kecamatan Pauh Duo	510.000,00	216.000,00	294.000,00	136,11
24	Kecamatan Sangir Balai Janggo	860.500,00	690.500,00	170.500,00	24,62
25	Kecamatan Sangir Batang Hari	122.000,00	194.500,00	(72.000,00)	(37,11)
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.464.645,00	1.741.200,00	(276.555,00)	(15,88)
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.094.000,00	671.000,00	423.000,00	63,04
28	Inspektorat Daerah	925.500,00	1.571.500,00	(646.000,00)	(41,11)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.908.500,00	3.537.500,00	(629.000,00)	(17,78)
30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	5.260.000,00	10.380.500,00	(5.120.000,00)	(49,33)
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.293.000,00	2.849.000,00	444.000,00	15,58
	Jumlah	558.559.655,00	162.742.239,00	395.817.416,00	243,22

Persediaan Alat tulis Kantor Per 31 Desember 2022 terdiri dari Persediaan Alat tulis Kantor dan Kertas dan Cover. Adapun rincian Persediaan Alat tulis Kantor dan Kertas dan Cover pada setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.48 Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor

No	Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	22.335.285,00	0,00	22.335.285,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	792.000,00	0,00	792.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	1.163.500,00	498.000,00	1.661.500,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	4.944.000,00	0,00	4.944.000,00
6	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	704.000,00	0,00	704.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.678.000,00	1.648.000,00	3.326.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	227.600,00	499.400,00	727.000,00

No	Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Jumlah
9	Dinas Kebahanan Pangan dan Perikanan	2.289.750,00	0,00	2.289.750,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	481.498.975,00	0,00	481.498.975,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	435.000,00	705.000,00	1.140.000,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.353.500,00	0,00	1.353.500,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	740.000,00	0,00	740.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
17	Dinas Perlanian	2.327.500,00	6.335.500,00	8.663.000,00
18	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
19	Sekretariat Daerah	3.266.000,00	265.000,00	3.531.000,00
20	Sekretariat DPRD	3.317.500,00	0,00	3.317.500,00
21	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	192.000,00	0,00	192.000,00
22	Kecamatan Sangir Jujuan	376.000,00	0,00	376.000,00
23	Kecamatan Pauh Duo	235.000,00	275.000,00	510.000,00
24	Kecamatan Sangir Balai Janggo	860.500,00	0,00	860.500,00
25	Kecamatan Sangir Batang Hari	0,00	122.000,00	122.000,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.030.635,00	434.010,00	1.464.645,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	455.000,00	639.000,00	1.094.000,00
28	Inspektorat Daerah	925.500,00	0,00	925.500,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.908.500,00	0,00	2.908.500,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	430.000,00	4.830.000,00	5.260.000,00
31	Badan Kesegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
Jumlah		542.308.745,00	16.250.910,00	558.559.655,00

2. Persediaan Obat-Obatan

Persediaan obat-obatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.969.519.422,00 dan rincian persediaan obat-obatan per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.49 Persediaan obat-obatan

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	619.170,00	0,00	619.170,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	6.112.979.572,00	9.165.533.807,00	(50.554.255,00)	(0,62)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.777.366.546,00	4.220.698.307,00	(2.443.331.761,00)	(57,89)
4	Dinas Pertanian	78.554.134,00	1.270.300,00	77.274.274,00	6.027,71
Jumlah		9.969.519.422,00	12.385.511.974,00	(2.415.992.552,00)	(19,51)

3. Persediaan Barang Cetakan

Persediaan barang cetakan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp783.814.354,00 dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel V.3.50 Persediaan barang Cetakan

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	3.268.250,00	(3.268.250,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan	0,00	6.246.496,00	(6.246.496,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	765.000,00	(765.000,00)	(100,00)
5	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	561.600,00	975.000,00	(413.400,00)	(42,40)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.639.584,00	176.966.420,00	(7.327.836,00)	(4,14)
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	485.000,00	3.620.000,00	(3.135.000,00)	(86,60)
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	14.855.000,00	3.360.000,00	11.495.000,00	342,11
12	Sekretariat Daerah	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
13	Sekretariat DPRD	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
14	Kecamatan Sangir Jujuan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Sangir Batang Hari	80.000,00	310.000,00	(230.000,00)	(74,19)
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	310.000,00	(310.000,00)	(100,00)
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	475.055.610,00	397.180.610,00	77.875.000,00	19,61
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	802.000,00	680.000,00	122.000,00	17,94
Jumlah		669.425.794,00	604.141.776,00	65.284.018,00	10,81

Dari persediaan barang cetakan di atas, sudah dikeluarkan/ tidak termasuk persediaan barang cetakan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, serta Akta Perceraian dicetak menggunakan Kertas HVS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp114.388.560,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Lembar)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Barang (Rp)
1	Akta kematian	8.460,00	4.545,00	38.450.700,00
2	Akta Perceraian	1.259,00	4.545,00	5.722.155,00
3	Akta Perkawinan	2.490,00	4.545,00	11.317.050,00
4	Akta Kelahiran	12.959,00	4.545,00	58.898.655,00
	Jumlah			114.388.560,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Nomor 109 tentang Penggunaan Kertas HVS menegaskan bahwa Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, serta Akta Perceraian dicetak menggunakan Kertas HVS dan sudah

TTE sehingga tidak perlu lagi dilakukan legalisir dokumen. Atas keputusan tersebut, maka sejak tahun 2019 blanko cetak diatas tidak dapat digunakan lagi.

4. Persediaan Benda Pos

Persediaan benda pos terdiri dari materai, perangko dan benda-benda pos lainnya. Persediaan benda pos per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.950.000 dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah seperti dibawah ini:

Tabel V.3.51 Persediaan Benda Pos

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.700.000,00	5.013.000,00	(3.313.000,00)	(66,09)
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	460.000,00	(460.000,00)	(100,00)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	110.000,00	(110.000,00)	(100,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
8	Sekretariat Daerah	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
9	Kecamatan Pauh Duo	0,00	130.000,00	(130.000,00)	(100,00)
10	Kecamatan Sangir Balai Janggo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	80.000,00	90.000,00	(10.000,00)	(11,11)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000,00	30.000,00	70.000,00	233,33
	Jumlah	2.950.000,00	6.133.000,00	(3.183.000,00)	(51,90)

5. Persediaan Bahan Lainnya dan Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Perlengkapan Kebersihan dan Bahan Pembersih Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.386.412.262,00 dengan rincian pada setiap Perangkat Daerah seperti tabel di bawah ini:

Tabel V.3.52 Persediaan Bahan Lainnya dan Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.464.000,00	2.934.000,00	530.000,00	18,06
2	Dinas Kesehatan	0,00	245.000,00	(245.000,00)	(100,00)
3	UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan	0,00	12.322.340,00	(12.322.340,00)	(100,00)
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.375.553.462,00	7.320.500,00	1.368.232.962,00	18.690,43
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan	185.000,00	361.000,00	(176.000,00)	(48,75)

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Perikanan				
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.070.800,00	1.212.000,00	(141.200,00)	(11,65)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.000,00	400.000,00	(330.000,00)	(82,50)
10	Sekretariat DPRD	2.208.000,00	737.000,00	1.471.000,00	199,59
11	Kecamatan Pauh Duo	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
12	Kecamatan Sangir Balai Janggo	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Sangir Batang Hari	0,00	165.000,00	(165.000,00)	(100,00)
14	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Jumlah		1.386.412.262,00	25.696.840,00	1.360.715.422,00	5.295,28

Persediaan Bahan Lainnya dan Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.386.412.262,00 dengan rincian persediaan pada setiap Perangkat Daerah seperti tabel di bawah ini:

Tabel V.3.53 Rincian Persediaan Bahan Lainnya dan Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

No	Perangkat Daerah	Persediaan Bahan Lainnya	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5.464.000,00	0,00	3.464.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.368.083.779,00	7.469.683,00	1.375.553.462,00
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	40.000,00	40.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	185.000,00	0,00	185.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.070.800,00	0,00	1.070.800,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	70.000,00	70.000,00
8	Sekretariat DPRD	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
9	Kecamatan Pauh Duo	346.000,00	0,00	346.000,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	25.000,00	25.000,00
	Jumlah	1.375.337.579,00	11.074.683,00	1.386.412.262,00

6. Persediaan Material / Logistik

Persediaan Bahan Material/Logistik per 31 Desember 2022 sebesar Rp549.490.245,90 dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut

Tabel V.3.54 Persediaan Material / Logistik

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	175.849.577,90	105.949.577,90	70.000.000,00	66,13
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.025.668,00	444.092.500,00	(24.456.832,00)	(5,51)
Jumlah		595.485.245,90	549.942.077,90	45.543.168,00	8,28

Persediaan Bahan Material/Logistik per 31 Desember 2022 sebesar Rp549.490.245,90 merupakan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga.

7. Persediaan Bahan Kimia

Persediaan bahan kimia per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123.424.424,00 dengan rincian persediaan bahan kimia per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.55 Persediaan Bahan Kimia

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	6.457.951,00	(6.457.951,00)	(100,00)
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	123.424.424,00	123.637.689,00	(113.265,00)	(0,09)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	210.000,00	(210.000,00)	(100,00)
Jumlah		**123.424.424,00**	130.205.640,00	**(6.781.216,00)**	(5,21)

8. Persediaan Alat-alat Listrik

Persediaan alat listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.858.600,00 dengan rincian persediaan alat listrik per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.56 Persediaan Alat-alat listrik

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.219.000,00	6.230.850,00	(3.011.850,00)	(48,34)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	74.508.600,00	27.888.000,00	46.620.600,00	167,17
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.400.000,00	2.594.500,00	(894.500,00)	(38,99)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
6	Dinas Perdagangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Jumlah		**79.858.600,00**	**36.413.350,00**	**43.445.250,00**	119,31

11. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Persediaan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.428.228.942,00. Persediaan tersebut merupakan pekerjaan fisik atas belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dilakukan serah terima kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2022. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.3.57 Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22 (Rp)	44.561,00 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	13.390.064.442,00	1.149.534.000,00	12.241.530.442,00	1.065,84
2	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi usaha kecil dan menengah	38.164.500,00	-	38.164.500,00	0,00

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	44.561,00	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Dinas Perumahan	0,00	2.399.420.500,00	2.399.420.500,00	(100,00)
Jumlah		13.428.228.942,00	3.547.954.500,00	9.880.274.442,00	278,48

Rincian Persediaan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2022 pada Dinas PUPR adalah sebesar Rp14.084.220.662,00 selanjutnta dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

12. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.085.500,00. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas pada tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Tabel V.3.58Rincian Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.085.500,00	0,00	3.085.500,00	0,00
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	29.149.515,00	0,00	29.149.515,00	0,00
Jumlah		32.235.015,00	0,00	29.149.515,00	0,00

13. Persediaan Bahan Makanan Pokok

Persediaan Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp129.564.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.59Rincian Persediaan Bahan Makanan Pokok

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	25.601.935,00	0,00	25.601.935,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	2.718.950,00	171.000,00	2.547.950,00	1.490,03
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.500.000,00	39.964.600,00	(25.964.600,00)	(64,99)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	87.244.000,00	0,00	87.244.000,00	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		129.564.885,00	40.135.600,00	89.429.285,00	222,66

14. Persediaan Bibit Ternak

Persediaan Bibit Ternak berupa benih ikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp318.337.600,00 yang terdapat pada Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tabel V.3.60 Rincian Persediaan Bibit Ternak

No	Perangkat Daerah	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	318.337.600,00	307.264.200,00	11.073.400,00	3,60
Jumlah		318.337.600,00	307.264.200,00	11.073.400,00	3,60

5.3.2 Investasi Jangka Panjang	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	58.874.415.357,24	41.574.364.596,00

Investasi Jangka Panjang tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24 dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp17.300.050.761,24 atau naik 41,61%. dari tahun 2021 sebesar Rp41.574.364.596,00. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Investasi Permanen	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	58.874.415.357,24	41.574.364.596,00

Total Investasi permanen pada tahun 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp41.574.364.596,00 terjadi kenaikan sebesar Rp17.300.050.761,24 atau naik 41,61%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.61 Rincian Investasi Permanen

No	Jenis Penyertaan	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Bank Nagari	15.496.000.000,00	14.996.000.000,00	500.000.000,00	3,33
2	PT. Balairung Citra Jaya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3	PDAM Solok Selatan Tirta Sarbu Sungai	41.878.415.357,24	25.078.364.596,00	16.800.050.761,24	66,99
	Jumlah	58.874.415.357,24	41.574.364.596,00	17.300.050.761,24	41,61

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada masing-masing perusahaan/BUMD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.62 Metode Penilaian Investasi Permanen

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Metode Penilaian
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	15.496.000.000,00	Metode Biaya
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Balairung Citra Jaya	1.500.000.000,00	Metode Biaya
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Solok Selatan Tirta Sarbu Sungai	41.878.415.357,24	Metode Ekuitas
Jumlah		58.874.415.357,24	

Berikut rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2022:

a. Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp14.996.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.63 Nilai Penyertaan Modal Bank Nagari

No	Uraian	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Saldo Awal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	14.996.000.000,00	14.496.000.000,00	500.000.000,00	0,03
2	Penyertaan Modal Tahun Berjalan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.496.000.000,00	14.996.000.000,00	500.000.000,00	0,03

Terdapat kenaikan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera sebesar Rp500.000.000,00. Nilai penyataan modal ini meningkat sebesar 0,03%.
Adapun rician penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ke BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) per tahunnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel V.3.64 Nilai Penyertaan Modal di Bank Nagari

No	Tahun Penyertaan	Konversi Modal Disetor	Nomor Urut Saham	Tgl Sertifikat Saham	Nomor Seri Saham
1	2007	2.000.000.000,00	A.000012	20 September 2007	361,642 s/d 263,641
2	2009	421.000.000,00	A.000032	03 September 2009	360,836 s/d 361,256
3	2010	1.579.000.000,00	A.000051	06 September 2010	405,726 s/d 407,304
4	2012	633.000.000,00	A.000078	28 June 2012	481,691 s/d 482,323
5	2012	1.363.000.000,00	A.000101	10 January 2013	597,398 s/d 598,760
6	2015	2.000.000.000,00	A.000178	2 Februari 2016	1,149,261 s/d 1,151,260
7	2016	2.000.000.000,00	A.000200	09 Februari 2017	1,358,722 s/d 1,360,721
8	2018	1.530.000.000,00	A.000226	07 Juni 2018	1,574,986 s/d 1,576,406
9	2019	1.000.000.000,00	A.000242	07 April 2020	1,679,145 s/d 1,680,144
10	2020	2.000.000.000,00	A.000250	26 Januari 2021	1,713,848 s/d 1,715,647
11	2021	500.000.000,00	A.000xxx		
12	2022	500.000.000,00	A.000xxx		
	JUMLAH	15.496.000.000,00			

b. Penyertaan Modal pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.65 Nilai Penyertaan Modal PT. Balairung Citra Jaya per Tahun

Tahun	Jumlah	Jenis Saham
2007	900.000.000,00	seri A no 52-708 s.d 53-607
2009	600.000.000,00	seri B no. 35-137-400 s.d 35-737-399
TOTAL	1.500.000.000,00	

Penyertaan modal yang dilakukan pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyertaan modal.

c. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PDAM Tirta Saribu Sungai Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.878.415.357,24 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.3.66 Nilai Penyertaan Modal di PDAM Tirta Saribu Sungai

No	Jenis Penyertaan	31-Dec-22 (Rp)	31-Dec-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	Penyetaan Modal Awal	25.078.364.596,00	23.979.705.556,40	1.099.658.039,60	0,04
2	Penyesuaian Penyertaan Modal Tahun Berjalan	18.479.223.597,96	2.081.350.200,60	16.397.873.197,36	1,20
3	Penyesuaian yang diakibatkan oleh Perhitungan kompensasi rugi operasional PDAM	(1.579.172.636,72)	(981.692.161,00)	(597.480.475,72)	0,42
	Jumlah	**41.978.415.357,24**	**25.078.364.596,00**	**16.900.050.761,24**	**0,40**

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada PDAM Tirta Saribu Sungai per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh adanya:

a. Penyesuaian penyertaan modal yang berasal dari pengalihan nilai piutang revolving ke PDAM menjadi penyertaan modal sebesar Rp751.266.400,00.
b. Penambahan nilai penyertaan modal yang berasal dari penyesuaian asset sesuai dengan hasil pemeriksaan KAP sebesar Rp17.727.956.997,96.
c. Selain itu terdapat penyesuaian nilai kerugian yang dialami oleh PDAM Tirta Saribu Sungai pada tahun 2022 sebesar Rp1.679.172.636,72 sebagaimana terdapat pada laporan keuangan PDAM Tahun 2022 *audited*.

Semenjak tahun 2018, kepemilikan PDAM Tirta Saribu Sungai 100% dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga seluruh aktivitas operasional PDAM mempengaruhi nilai penyertaan modal.

5.3.3 ASET TETAP	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	2.992.000.662.981,27	2.755.015.758.203,27

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Nilai perolehan per 31 Desember 2021	Rp	**2.755.015.758.203,27**
Penambahan Tahun 2022	Rp	295.171.064.253,85
Jumlah	**Rp**	**3.050.186.822.457,12**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	58.186.159.475,85
Aset tetap per 31 Desember 2022	**Rp**	**2.992.000.662.981,27**
Akumulasi penyusutan s/d Tahun 2022	Rp	(1.150.700.964.067,79)
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 (Nilai Buku)	**Rp**	**1.841.299.698.913,48**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.67 Rincian Aset Tetap per Golongan

Jenis Aset	31 Desember 2021 (RP)	Penambahan (RP)	Pengurangan (RP)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Tanah	352.946.797.525,00	16.612.670.411,00	2.849.540.077,00	366.709.927.859,00
Peralatan dan Mesin	318.284.122.340,89	37.740.783.953,00	12.981.497.483,00	343.983.123.810,89
Gedung dan Bangunan	673.088.616.814,20	100.741.115.968,26	24.227.652.182,26	757.522.080.597,20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.319.366.723.737,04	104.057.597.687,59	17.640.873.020,59	1.410.782.446.274,04
Aset Tetap Lainnya	36.511.100.599,04	9.583.692.849,00	88.215.903,00	46.007.519.047,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.599.286.194,00	18.436.555.907,00	7.020.390.812,00	67.015.583.289,00
Nilai Aset Tetap	**2.755.015.756.203,27**	**296.171.064.253,85**	**68.186.159.475,85**	**2.932.000.662.981,27**
Akumulasi Penyusutan	(1.013.560.816.039,70)			(1.150.700.964.067,79)
Nilai Buku	**1.741.454.940.163,57**			**1.841.299.698.913,48**

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lebih rinci disajikan pada *Lampiran 14* sampai dengan *Lampiran 29*. Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.3.1 TANAH	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	366.709.927.859,00	352.946.797.525,00

Perhitungan nilai aset tetap tanah sebesar Rp 366.709.927.859,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**352.946.797.525,00**
Penambahan Tahun 2022	Rp	16.612.670.411,00
Jumlah	**Rp**	**369.559.467.936,00**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	2.849.540.077,00
Nilai aset tetap tanah Tahun 2022	**Rp**	**366.709.927.859,00**

Aset tetap berupa tanah senilai Rp366.709.927.859,00 merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah sebanyak 407 persil, dari jumlah aset tanah tersebut sebagian sudah memiliki sertifikat sebanyak 174 bidang/persil dari 407 persil bidang tanah, sementara untuk yang belum bersertifikat masih dalam proses alas hak maupun peningkatan sertifikasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan.

Adapun rincian penambahan nilai aset tanah sebesar Rp 16.612.670.411,00 terdiri dari:

Belanja Modal Tanah	Rp	11.111.952.077,00
Hibah	Rp	5.229.130.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	66.788.334,00
Koreksi nilai pencatatan	Rp	204.800.000,00
Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah	**Rp**	**16.612.670.411,00**

Rincian Penambahan nilai aset tetap tanah sebesar Rp11.111.952.077,00 yang berasal dari belanja modal tanah Tahun 2022 digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana

pemerintah dan bangunan gedung pada dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.68 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah

No.	Rencana Peruntukan	Harga Perolehan (Rp)	Luas m²
1.	Pengadaan tanah pelebaran jalan poros kantor bupati	3.602.909.000,00	4.070
2.	Pengadaan tanah pelebaran jalan padang air dingin (koto japang)	605.883.000,00	6.576
	Pelebaran jalan padang air dingin-lubuk malako (penggantian tanaman)	738.517.170,00	
3.	Pengadaan tanah pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah	2.237.414.000,00	2.952
4.	Pengadaan tanah pelebaran jalan poros kantor bupati	824.911.000,00	1.427
5.	Pengadaan tanah pelebaran jalan timbulun-simpang samsat	597.178.000,00	1.121
6.	Pengadaan tanah pelebaran jalan durian terung-sungai padi	416.608.815,00	56
7.	Pengadaan tanah pembangunan Crainase Perkotaan	1.688.551.092,00	511
Jumlah		11.111.952.077,00	16.713

Penambahan nilai aset tetap tanah sebesar Rp 5.229.130.000,00 merupakan penambahan nilai aset tetap tanah yang berasal dari hibah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 750.000.000.00 dengan luas 70 000 m² dari Nagari Sungai Kunyit Barat ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang beralamat di Jorong Ngalau Indah Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan objek Wisata Goa Batu kapal. Dan pada Kecamatan Sungai Pagu sebesar Rp4.479.130.000 dengan luas 5798 m² dari KAN Koto Baru ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang beralamat di Nagari Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu. Tanah tersebut merupakan yang dimanfaatkan untuk kawasan RTH Muara Labuh.

Penambahan nilai aset tanah sebesar Rp 66.788.334,00 merupakan penambahan nilai aset tetap tanah yang berasal dari atribusi atas belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan yang merupakan jasa konsultan appraisal untuk pengadaan tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.69 Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah dari Atribusi Atas Belanja Barang dan Jasa

No.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah (Rp)
1.	Jasa appraisal pengadaan tanah perlung perpustakaan	33.855.000,00
2.	Jasa appraisal pengadaan tanah pelebaran jalan poros kantor bupati	16.466.667,00
3.	Jasa appraisal pengadaan tanah pelebaran jalan timbulun – samsat	16.466.667,00
Jumlah		66.788.334,00

Penambahan nilai aset tetap tanah sebesar Rp 204.800.000.00 merupakan penambahan nilai aset tetap tanah yang berasal dari koreksi pencatatan tanah pada OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, tanah ini merupakan tanah yang telah dikuasai Pemerintah Kabupaten Solok Selatan namun sebelumnya belum tercatat dalam buku inventaris, yang terletak di Jorong Wonorejo Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kec. Sangir, tanah tersebut

dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung dan Bangunan Pendidikan SDN 31 Sungai Tambai dengan luas nya – 3.200M^2. Nilai yang jadikan sebagai acuan awal dalam pencatatan tanah tersebut berdasarkan kepada NJOP tanah pada daerah setempat.

Adapun pengurangan nilai tanah sebesar Rp 2.849.540.077,00 adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB E	Rp	2.849.540.077,00
Jumlah Pengurangan Nilai Aset Tetap Tanah	**Rp**	**2.849.540.077,00**

Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB E (aset renovasi) aset tetap tanah sebesar Rp 2.849.540.077,00 adalah merupakan pengadaaan tanah yang peruntukannya digunakan untuk pelebaran jalan provinsi pada OPD Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.70 Reklasifikasi Entry Belanja Modal Aset Tetap Tanah ke KIB E

No.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan lahan pelebaran jalan padang ai -Sagin	744.130.170,00
2	Pengadaan lahan pelebaran jalan durian tarung-sungai padi	416.808.815,00
3	Pengadaan lahan drainase perkotaan	1,688.551.092,00
Jumlah		2.849.540.077,00

Selain penambahan dan pengurangan nilai aset tetap tanah untuk Tahun 2022, juga terdapat mutasi aset tetap tanah antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai sebesar Rp374.587.500,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel V.3.71 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah antar OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Tanah (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Tanah (Rp)
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	374.587.500,00	-
2.	Sekretariat Daerah	-	374.587.500,00
Jumlah		374.587.500,00	374.587.500,00

Mutasi aset tetap tanah sebesar Rp. 374.587.500,00 merupakan tanah Pasar Muara Labuh pada Sekretariat Daerah yang dimutasikan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	343.963.123.810,99	318.584.122.340,99

Perhitungan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp343.963.123.810,99 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**318.584.122.340,99**
Penambahan Tahun 2022	Rp	37.740.488.953,00
Jumlah	**Rp**	**356.324.611.293,99**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	12.361.487.483,00
Nilai aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2022	**Rp**	**343.963.123.810,99**
Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022	Rp	(238.731.854.803,09)
Nilai Buku	**Rp**	**105.231.269.007,90**

Tabel V.3.72 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No.	Jenis	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)	Penambahan (RP)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1.	Alat Besar	9.317.861.643,00	4.591.220.331,00	8.500.000,00	13.895.611.979,00
2.	Alat Angkutan	78.272.522.974,00	2.033.641.600,00	7.202.957.641,00	73.103.206.933,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.216.503.973,00	28.253.500,00	1.909.431,00	2.243.248.047,00
4.	Alat Pertanian	2.616.398.990,00	75.776.755,00	0,00	2.692.175.745,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.541.597.574,00	9.539.927.884,00	2.591.875.375,00	68.949.649.083,00
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.492.218.563,00	1.033.451.470,00	175.451.047,00	13.350.218.983,00
7.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	74.860.086.328,91	3.249.535.716,00	217.840.440,00	77.921.787.580,91
8.	Alat Laboratorium	32.869.984.140,00	842.075.779,00	436.976.321,00	33.300.083.598,00
9.	Alat Persenjataan	124.205.000,00	500.000,00	500.000,00	124.205.000,00
10.	Komputer	57.503.416.772,40	1.598.601.758,00	1.560.973.520,00	57.541.045.010,40
11.	Alat Keselamatan Kerja	1.850.119.225,00	81.740.000,00	131.040.000,00	1.800.819.225,00
12.	Rambu - Rambu	3.437.031.841,00	548.977.000,00	10.189.000,00	3.975.719.841,00
13.	Peralatan Olah Raga	637.741.409,00	60.983.200,00	29.274.200,00	654.450.409,00
Jumlah		318.584.122.340,99	37.740.488.953,00	12.361.487.483,00	343.963.123.810,99

Terdapat penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 37.740.488.953,00 yang berasal dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	26.954.432.020,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BOS dan BLUD)	Rp	4.383.064.880,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB C	Rp	3.841.606.093,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB D	Rp	63.095.000,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB E	Rp	52.320.050,00
Hibah	Rp	1.775.481.640,00
Atribusi belanja barang dan jasa dan belanja pegawai	Rp	670.489.270,00
Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp**	**37.740.488.953,00**

Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp 26.954.432.020,00, berikut rincian belanja modal aset tetap peralatan dan mesin untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

Tabel V.3.73 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	11.994.763.910,00
2	Dinas Kesehatan	3.818.159.029,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	998.820.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Pertanahan	4.552.351.194,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.000.728,00
6	Dinas Perhubungan	551.863.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	95.418.594,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	353.771.381,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	379.282.940,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	78,719.000,00
11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	68.967.577,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa	13.900.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	222.917.000,00
14	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	5.577.750,00
15	Sekretariat Daerah	2.580.837.832,00
16	Sekretariat DPRD	97.625.900,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	213.802.000,00
18	Inspektorat Daerah	5.500.000,00
19	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	126.287.000,00
20	Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu	22.198.000,00
21	Kecamatan KPGO	5.150.000,00
22	Kecamatan Sungai Pagu	8.680.860,00
23	Kecamatan Sangir	33.389.000,00
24	Kecamatan Sangir Jujuan	19.990.000,00
25	Kecamatan Sangir Batang Hari	77.736.000,00
26	Kecamatan Pauh Duo	25.375.000,00
27	Kecamatan Sangir Balai Janggo	14.968.350,00
28	Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	10.687.500,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	147.511.000,00
30	Dinas Pertanian	85.054.000,00
31	Dinas Komunikasi Dan Informatika	876.694.375,00
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	17.400.000,00
Jumlah		28.954.432.020,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dan belanja modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.383.064.880,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.74 Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari BOS dan BLUD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3.596.256.858,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	786.808.022,00
Jumlah		4.383.064.880,00

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.596.256.858,00, adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel V.3.75 Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari BOS

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Besar	1.500.000,00
2.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	999.500,00
3.	Alat Pertanian	55.969.610,00
4.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.666.535.164,00
5.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	53.872.880,00
6.	Alat Laboratorium	127.740.217,00
7.	Alat Persenjataan	500.000,00
8.	Komputer	1.602.447.287,00
9.	Alat Keselamatan Kerja	31.250.000,00
10	Peralatan Olah Raga	35.422.200,00
Jumlah		**3.596.256.858,00**

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD sebesar Rp 786.808.022,00 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.76 Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dari BLUD

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Alat Besar	2.401.431,00
2.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.525.250,00
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	139.778.795,00
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	420.408.546,00
5.	Alat Laboratorium	800.000,00
6.	Komputer	220.894.000,00
Jumlah		**786.808.022,00**

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KIB C sebesar Rp 3.841.606.093,00 merupakan reklasifikasi dari entry belanja modal gedung dan bangunan yang direalisasikan dalam bentuk aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berupa alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar dan alat komputer, sehingga menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.77 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	2.781.595.098,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	943.829.484,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	116.181.511,00
Jumlah		3.841.606.093,00

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KIB D sebesar Rp 63.095.000,00 merupakan reklasifikasi dari entry belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan direalisasikan dalam bentuk aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa stabilisator/stavolt, sehingga menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.78 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1	Dinas Kesehatan	18.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	16.095.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	27.500.000,00
Jumlah		63.095.000,00

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi entry belanja modal KIB E sebesar Rp52.320.050,00 merupakan reklasifikasi atas belanja modal aset tetap lainnya yang realisasinya dalam bentuk aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.79 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga		
1.	SMP N 1 Solok Selatan	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.500.000,00
2.	SMP N 9 Solok Selatan	Suling/Seruling	500.000,00
3.	SMP N 9 Solok Selatan	Gendang	1.500.000,00
4.	SMP N 11 Solok Selatan	Pianika	1.500.000,00
5.	SMP N 23 Solok Selatan	Paper Name Pretasi	7.210.000,00
6.	SMP N 23 Solok Selatan	Sound System	13.254.000,00
7.	SDN 07 Sitapus	Sound System	4.500.000,00
8.	SDN 05 Simumbuk	Recorder	535.500,00
9.	SDN 02 Sungai Kunyit	Pianika	2.000.000,00
10.	SDN 08 Karang Pulah	Pianika	975.000,00
11.	SDN 19 Teluak Air Putiah	Pianika	2.040.000,00
12.	SDN 19 Teluak Air Putiah	Harmonika	320.000,00
13.	SDN 01 Lasuang Batu	Pianika	1.798.200,00
14.	SDN 01 Lasuang Batu	Recorder	427.350,00
15.	SDN 16 BLOK NDL	Sound System	5.150.000,00
16.	SDN 16 BLOK NDL	Pianika	2.040.000,00
17.	SDN 16 BLOK NDL	Harmonika	320.000,00
18.	SDN 10 Pasar Muara Labuh	Sound System	5.000.000,00
19.	SDN 13 Bangko	Pianika	940.000,00
20.	SDN 13 Bangko	Recorder	800.000,00
Jumlah			52.320.050,00

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang bersumber dari **hibah** sebesar Rp1.775.481.640,00 merupakan hibah dari Instansi lain yang menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.80 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah

No.	OPD	Harga Perolehan (Rp)	Uraian	Instansi Pemberi Hibah
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	11.320.000,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
		170.465.000,00	Komputer	
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	481.289.890,00	Alat Kedokteran	Kementerian Perindustrian

No.	OPD	Harga Perolehan (Rp)	Uraian	Instansi Pemberi Hibah
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.500.000,00	Alat Angkutan	BNPB Pusat
		211.500.000,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
		81.200.000,00	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
		322.744.000,00	Komputer	
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	394.721.550,00	Alat Angkutan	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		6.200.000,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
		28.901.250,50	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
		59.040.000,00	Komputer	
Jumlah		1.775.481.640,00		

Perolehan aset dari hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Peralatan Pendidikan berbasis TIK Nomor : 36652/C3/KPA/XII/BMD/2021 tanggal 31 Desember 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Perolehan Aset Peralatan dan Mesin dari hibah pada Rumah Sakit Umum Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Nomor : 1073/SJ-IND.6/BMN/XII/2021, tentang Hibah Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1074/SJ-IND.6/BMN/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021.

Perolehan Aset dari hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 30/BNPB/SU/RT.03.03/11/2022, tanggal 8 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : 30/BNPB/SU/RT.03.03/11/2022, tanggal 8 November 2022.

Perolehan Aset dari hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Pemberian Hibah 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), Koleksi Buku dan Perlengkapan Multimedia Nomor : 5553/NPHD/2022, tanggal 24 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 5553/4.2/PLK.03.03/XI.2022, tanggal 24 November 2022.

Penambahan nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang bersumber dari atribusi belanja barang/jasa dan belanja pegawai yang menambah harga perolehan aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp670.489.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.31 Penambahan Aset Tetap dan Peralatan Mesin dari Atribusi Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Pegawai

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	45.292.500,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
2.	Dinas Kesehatan	111.391.136,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.203.334,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	12.200.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
5.	Dinas Perhubungan	17.460.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	570.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
7.	Sekretariat Daerah	19.480.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.390.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
9.	Kecamatan Sangir	16.638.900,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.340.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
11.	Dinas Pertanian	427.793.400,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.530.000,00	merupakan atribusi belanja barang dan jasa dan atribusi belanja pegawai
Jumlah		670.489.270,00	

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 12.361.487.483,00 terdiri dari :

Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB C	Rp	47.270.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB D	Rp	51.675.127,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke KIB E	Rp	10.085.550,00
Reklasifikasi ke aset lainnya – aset lain-lain (Rusak Berat)	Rp	8.859.566.377,00
Reklasifikasi ke aset lainnya – aset lain-lain (Hilang)	Rp	7.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	15.000.000,00
Dibawah nilai minimum kapitalisasi/Ekstrakontabel	Rp	803.528.363,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	1.284.753.398,00
Penghapusan dari Buku Inventaris	Rp	1.240.132.300,00
Koreksi Nilai Pencatatan	Rp	42.476.368,00
Jumlah Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	**Rp**	**12.361.487.483,00**

Reklasifikasi entry belanja modal peralatan dan mesin ke KIB C sebesar Rp47.270.000,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap gedung dan bangunan pada OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, dengan rincian sebagai berikut

Tabel V.3.82 Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UPT	Jumlah (Rp)	Ket
1.	SMP N 11 Solok Selatan	8,400,000.00	Pemasangan teralis
2.	SMP N 11 Solok Selatan	4,800,000.00	Pagar
3.	SDN 18 Trans Duo ur Tengah	2,500,000.00	Pemasangan teralis
4.	SDN 10 Padang Darek	6,000,000.00	Pemasangan teralis
5.	SDN 03 Sungai Takuak	8,000,000.00	Pemasangan teralis
6.	SDN 07 Sungai Lamasi	4,500,000.00	Pagar
7.	SDN 14 Sapan Sari	1,320,000.00	Pemasangan teralis
8.	SDN 05 Pasar Muara Labuh	2,000,000.00	Pemasangan teralis
9.	SDN 08 Mudiak Lolo	1,775,926.00	Pemasangan teralis
10.	SDN 08 Mudiak Lolo	1,349,004.20	Pemasangan teralis
11.	SDN 08 Batang Lolo	3,450,000.00	Pagar
12.	SMP N 36 Solok Selatan	1,975,000.00	Pemasangan teralis
Jumlah		47,270,000.00	

Reklasifikasi entry belanja modal peralatan dan mesin ke KIB D sebesar Rp51.675.127,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.83 Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	35.630.077.00	Sumur dangan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)
2.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	16.045.050.00	Instalasi Penangkal Petir Manual
Jumlah		51.675.127,00	

Reklasifikasi entry belanja modal peralatan dan mesin ke KIB E sebesar Rp10.085.550,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.84 Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	SMP N 11 Solok Selatan	980.000,00	Alat Peta (Map)
2.	SMP N 32 Solok Selatan	8.855.550,00	Alat Musik Tradisional/Daerah
3.	SDN 22 Kiambang	250.000,00	Peta (Map)
Jumlah		10,085 550,00	

Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya pada aset lain-lain dengan kondisi rusak berat sebesar Rp8.859.566.377,00 merupakan reklasifikasi yang mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin disebabkan kondisi aset tersebut yang rusak berat dan tidak dioperasikan lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.85 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya pada Aset Lain-lain dengan Kondisi Rusak

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peralatan dan Mesin								Jumlah (Rp)
		Alat Besar (Rp)	Alat Angkutan (Rp)	Alat Bengkel dan Alat Ukur (Rp)	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp)	Komputer (Rp)	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (Rp)	Alat Kedokteran dan Kesehatan (Rp)	Alat Keselamatan Kerja (Rp)	
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	-	288.300.000,00	-	-	-	-	-	-	288.300.000,00
2.	Dinas Kesehatan	-	535.940.106,00	-	-	-	-	-	-	535.940.106,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	317.500.000,00	1.076.81 ,27	105.152.789,00	15[illegible].670.825,00	15.828.294,00	64.197.570,00	-	857.345.515,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perumahan	-	42.000.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000.000,00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	18.000.000,00	-	8.500.930,00	111.920.746,00	21.[illegible].594,00	-	-	159.271.246,00
6.	Dinas Perhubungan	-	-	-	2.130.000,00	38.222.850,00	1.350.000,00	-	-	44.022.850,00
7.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	24.000.000,00		21.[illegible].250,00	9.723.600,00	3.600.000,00			64.226.150,00
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.500.000,00			25.250.250,00	22.[illegible].975,00	24.852.300,00			78.121.225,00
9.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		12.[illegible].000,00		19.000.000,00	11.[illegible].728,00				53.306.728,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		102.000.000,00		34.[illegible].000,00	46.[illegible].000,00	9.[illegible].228,00		11.[illegible].000,00	203.452.228,00
11.	Sekretariat Daerah		1.[illegible].900,00		1.344.[illegible].076,00	337.[illegible].000,00			99.[illegible].000,00	5.[illegible].752,00
12.	Sekretariat DPRD		12.000.000,00							12.000.000,00
13.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		21.[illegible].000,00		139.[illegible].607,00	227.[illegible].000,00	60.[illegible].784,00			476.[illegible].000,00
14.	Inspektorat Daerah		1[illegible].000.000,00							115.000.000,00
15.	Kecamatan KPGD				2.000.000,00	4.500.000,00				7.500.000,00
16.	Kecamatan Sangir Batang Hari		14.[illegible].000,00				8.000.000,00			22.[illegible].000,00
17.	Dinas Pemberdayaan Dan Kependudukan				14.[illegible].000,00	1.[illegible].000,00	2.750.000,00		1.[illegible].000,00	19.[illegible].000,00
18.	Dinas Pertanian		97.[illegible].000,00							97.[illegible].000,00
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika				27.[illegible].000,00	36.[illegible].000,00	6.[illegible].000,00			69.[illegible].000,00
Jumlah		1.[illegible].000,00	5.[illegible].000,00	1.[illegible].000,00	1.[illegible].000,00	1.[illegible].000,00	191.[illegible].000,00	64.[illegible].000,00	121.[illegible].000,00	6.[illegible].000,00

Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya pada aset lain-lain dengan kondisi hilang sebesar Rp7.000.000,00 yang mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin pada Kecamatan KPGD berupa camera digital yang hilang karena pencurian.

Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp15.000.000,00 yang mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan berupa e-barcode untuk pencatatan obat-obatan.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang mempunyai harga perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (ekstrakomtable) tahun 2022 adalah sebesar

Rp803.528.363,00 dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

Tabel V.3.86 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Ekstrakomtable)

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	509.612.098,00
2.	Dinas Kesehatan	110.176.630,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	30.214.025,00
4.	Dinas Perhubungan	10.522.000,00
5.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.220.000,00
6.	Sekretariat Daerah	140.425.220,00
7.	Kecamatan Sangir	300.000,00
8.	Inspektorat Daerah	200.000,00
9.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.858.400,00
Jumlah		**803.528.363,00**

Reklasifikasi entry belanja modal peralatan dan mesin ke belanja barang dan jasa sebesar Rp1.284.753.398,00, merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang merupakan barang habis pakai dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak memenuhi kriteria aset tetap peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.87 Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	796.077.816,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
2.	Dinas Kesehatan	217.711.210,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	123.519.172,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.047.500,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
6.	Sekretariat Daerah	115.799.750,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
7.	Sekretariat DPRD	2.000.000,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
8.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu	13.198.000,00	Realisasi belanja barang dan jasa dan habis pakai
Jumlah		**1.284.753.398,00**	

Terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan penghapusan dari daftar inventaris atas aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.240.132.300,00. merupakan aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan berupa kapal motor pada Dinas Perhubungan yang dihapuskan karena aset tersebut belum dihibahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan hingga saat ini aset tersebut masih tercatat pada inventaris Kementerian Perhubungan Berdasarkan surat nomor : PL 301/9/19/DJPD/2021, tanggal 23 September 2022, Hal Tindak Lanjut Hibah BMN kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp42.476.368,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan aset ekstrakomtabel yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin pada beberapa organisasi perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.88 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Aset Ekstrakomtabel

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	7.225.000,00
2.	Dinas Kesehatan	5.638.900,00
3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.377.895,00
4.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu	8.395.000,00
5.	Dinas Pertanian	5.338.673,00
Jumlah		**42.476.368,00**

Selain penambahan dan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin untuk Tahun 2022, juga terdapat mutasi terhadap aset tetap peralatan dan mesin antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai sebesar Rp 5.794.030.462,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel V.3.1 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan Saldo Awal Peralatan dan Mesin (Rp)	Pengurangan Saldo Awal Peralatan dan Mesin (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	288.600.000,00	33.388.000,00
2.	Dinas Kesehatan	390.425.650,00	-
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	145.827.362,00	287.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	975.184.000,00	656.138.000,00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.500.000,00	-
6.	Dinas Perhubungan	-	861.525.300,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	284.350.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.705.220,00	-
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.000.000,00	287.920.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	513.454.800,00	-
11.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	110.000.000,00	54.848.100,00
12.	Sekretariat Daerah	453.261.900,00	1,502.665.027,00
13.	Sekretariat DPRD	716.288.242,00	-
14.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	933.341.334,00	27.520.000,00
15.	Inspektorat Daerah	351.000.000,00	177.100.000,00
16.	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	228.485.667,00	164.250.000,00
17.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu	23.705.220,00	-
18.	Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan	170.000.000,00	630.079.403,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	674.819.000,00
20.	Dinas Pertanian	354.875.975,00	76.516.353,00
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	115.351.575,00
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	152.874.892,00	-
Jumlah		**5.794.030.462,00**	**5.794.030.462,00**

5.3.33 Gedung dan Bangunan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	757.522.080.597,20	673.008.616.814,20

Perhitungan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp757.522.080.597,20 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**673.008.616.814,20**
Penambahan Tahun 2022	Rp	108.741.115.966,26
Jumlah	**Rp**	**781.749.732.780,46**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	24.227.652.183,26
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022	Rp	**757.522.080.597,20**
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	**Rp**	**(143.527.793.479,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	**Rp**	**613.994.287.118,20**

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3.90 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

No.	Jenis	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)	Penambahan (RP)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	624.863.691.926,83	95.836.558.590,26	23.634.220.753,26	700.866.029.765,83
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	26.289.800.454,00	4.857.675.836,00	194.752.530,00	30.952.723.760,00
3.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	847.550.961,00	2.241.909.380,00	98.879.900,00	2.990.580.461,00
4.	Bangunan Menara Perambuan	730.511.520,00	-	0,00	730.511.520,00
5.	Tugu/Tanda Batas	20.279.221.960,57	1.804.973.360,00	0,00	22.084.195.320,57
Jumlah		673.008.616.844,20	108.741.115.966,26	24.227.652.183,26	757.522.080.597,20

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 108.741.115.966,26 dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	69.182.581.188,08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BOS dan BLUD)	Rp	106.090.472,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB B	Rp	47.270.000,00
Reklasifikasi dari entry belanja modal KIB E	Rp	11.000.000,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	5.208.765.836,00
Hibah	Rp	32.848.864.714,00
Atribusi belanja barang dan jasa	Rp	708.400.756,00
Koreksi Tambah Nilai Pencatatan	Rp	628.143.000,18

Jumlah penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan	**Rp**	**108.741.115.966,26**

Realisasi belanja modal atas aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp69.182.581.188,08, adapun rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut :

Tabel V.3.91 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	30.323.229.671,14
2.	Dinas Kesehatan	3.019.852.555,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.066.222.258,98
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	12.187.757.332,90
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4.531.500.750,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	126.521.000,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	321.559.700,00
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	119.950.700,00
9.	Kecamatan KPGD	198.266.000,00
10.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	147.342.000,00
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.713.419.060,06
12	Dinas Pertanian	405.861.250,00
Jumlah		**69.182.581.188,08**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang bersumber dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan belanja modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp106.090.472,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.92 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	9.803.300,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	96.287.172,00
Jumlah		106.090.472,00

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp47.270.000,00, merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.93 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UPT	Jumlah (Rp)	Ket
1.	SMP N 11 Solok Selatan	9.400.000,00	Pemasangan teralis
2.	SMP N 11 Solok Selatan	4.500.000,00	Pagar
3.	SDN 18 Trans Gusun Tangah	2.500.000,00	Pemasangan teralis
4.	SDN 10 Padang Darek	6.000.000,00	Pemasangan teralis
5.	SDN 03 Sungai Talusuk	8.600.000,00	Pemasangan teralis
6.	SDN 07 Sungai Lambai	4.500.000,00	Pagar
7.	SDN 14 Sapan Sari	1.320.000,00	Pemasangan teralis

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UPT	Jumlah (Rp)	Ket
8.	SDN 05 Pasar Muara Labuh	2.000.000,00	Pemasangan teralis
9.	SDN 06 Mudiak Lolo	1.775.956,00	Pemasangan teralis
10.	SDN 36 Mudiak Lolo	1.949.004,00	Pemasangan teralis
11.	SDN 38 Berang Lolo	3.452.000,00	Pagar
12.	SMP N 36 Solok Selatan	1.975.000,00	Pemasangan teralis
Jumlah		47.270.000,00	

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi entry belanja modal KIB E sebesar Rp11.000.000,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga SDN 02 Sikumbang berupa pengadaan teralis ruang kelas.

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi KIB F sebesar Rp5.208.765.836,00, merupakan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaan fisik bangunannya dan telah dimanfaatkan, sehingga pencatatannya dilakukan reklasifikasi ke golongan aset gedung dan bangunan dengan rincian yang terdiri atas :

Tabel V.3.34 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / UPB	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	12.400.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perlanahan	487.173.400,00	Tugu Peringatan Lainnya
		3.945.816.176,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
		49.300.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	496.134.900,00	Bangunan Gedung Instalasi Permanen
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	209.941.360,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)
5.	Dinas Pertanian	9.500.000,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)
Jumlah		5.208.765.836,00	

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari hibah sebesar Rp32.848.864.714,00, merupakan gedung dan bangunan yang perolehannya bersumber dari hibah instansi lain kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebesar Rp31.626.646.402,00 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Bangunan Menara Songket dan sarana dan prasarana penunjangnya berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor : 581/BA/DC/2022 dan Nomor : 900/562/BPKD/2022 dan sebesar Rp1.222.218.312,00 merupakan hibah yang berasal dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal berupa Bangunan Villa di Caminoran Kec. Sangir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.95 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

No.	OPD	Harga Perolehan (Rp)	Uraian	Instansi Pemberi Hibah
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31.626.649.402,00	Kawasan Menara Songket Seribu Rumah Gadang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		1.222.218.312,00	Villa Gamintoran	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Jumlah		32.848.884.714,00		

Penambahan nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang bersumber dari atribusi belanja barang/jasa dan belanja pegawai yang menambah nilai perolehan aset gedung dan bangunan adalah sebesar Rp708.400.756,00. Penambahan nilai gedung bangunan tersebut berasal dari kegiatan rehabilitasi gedung dan bangunan yang penganggarannya pada belanja operasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 serta atribusi atas honorarium Panitia Pelaksana Pekerjaan pada beberapa OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.96 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Atribusi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Pegawai

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / UPB	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.200.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	81.860.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
3.	Dinas Perhubungan	54.850.000,00	Rehabilitasi bangunan gedung kantor (pemasangan keramik)
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	10.500.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	197.323.000,00	Rehabilitasi gedung pertokoan pasar
		1.300.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.840.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.381.540,00	Rehabilitasi bangunan gedung kantor
8.	Kecamatan KPGD	1.340.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
9.	Kecamatan Sungai Pagu	30.000.000,00	Rehabilitasi bangunan gedung kantor (partisi ruangan)
10	Kecamatan Sangir	252.946.216,00	Rehabilitasi bangunan gedung kantor
11.	Kecamatan Sangir Balai Janggo	1.340.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
12.	Dinas Pertanian	2.520.000,00	merupakan atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
Jumlah		708.400.756,00	

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 628.143.000,18 merupakan penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan gedung dan bangunan pada Rumah sakit Umum Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.97 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan

No.	OPD	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,16	SMPN 32 Solok Selatan
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	628.143.000,00	Rumah Dinas Dokter
		0,02	Bangunan Gedung Instalas.
Jumlah		**628.143.000,18**	

Penambahan koreksi pencatatan Gedung dan Bangunan sebesar Rp628.143.000,18, merupakan koreksi tambah atas pencatatan nilai gedung dan bangunan yang berada pada dua OPD, pada OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp0,16 merupakan koreksi atas pembulatan pencatatan nilai gedung dan bangunan. Sedangkan koreksi tambah pencatatan nilai gedung dan bangunan pada RSUD Solok Selatan sebesar Rp628.143.000,02 merupakan pencatatan gedung dan bangunan berupa Rumah Dinas Dokter spesialis yang telah ada sejak tahun 2004 namun sebelumnya belum tercatat pada inventaris RSUD Solok Selatan. Nilai pencatatan didasarkan pada hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah Pejabat Penilai KPKNL Padang dengan Nomor Laporan : LAP-0044/1/PRO-07/KNL.0301/07.01.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp628.143.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp0,02 yang merupakan koreksi pembulatan atas pencatatan nilai gedung dan bangunan pada RSUD Solok Selatan.

Sementara pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp24.227.652.183,26, berasal dari :

Reklasifikasi ke KIB B	Rp	3.841.606.093,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	84.952.000,00
Reklasifikasi ke KIB F	Rp	18.217.965.906,90
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	23.239.189,00
Penghapusan aset	Rp	2.059.888.994,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	0,36
Jumlah pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan	**Rp**	**24.227.652.183,26**

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.841.606.093,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke KIB B karena realisasi merupakan aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.98 Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.781.595.058,00	Realisasi Belanja Modal Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Pertanian
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	116.181.511,00	Realisasi Belanja Modal Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	943.929.484,00	Realisasi Belanja Modal Berupa Alat

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
			Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, dan Komputer
Jumlah		3.841.608.093,00	

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp84.952.000,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke KIB D karena realisasi merupakan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.99 Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	32.300.000,00	Realisasi Belanja Modal berupa honorarium pekerjaan saluran drainase
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.652.000,00	Realisasi Belanja Modal berupa Instalasi penangkal petir
Jumlah		84.952.000,00	

Realisasi belanja modal berupa honorarium sebesar Rp32.300.000,00 merupakan reklasifikasi entry belanja modal KIB C ke KIB D yang merupakan pembayaran atas honorarium panitia pelaksana kegiatan pembangunan drainase jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Sedangkan reklasifikasi entry belanja modal KIB C ke KIB D pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp52.652.000,00 merupakan pekerjaan pembangunan instalasi penangkal petir pada gedung layanan perpustakaan.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang di reklasifikasi ke KIB F merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022 yang belum selesai proses pengerjaannya sehingga direklasifikasi ke KIB F berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp 18.217.965.906,90 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.100 Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Paket Pekerjaan
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	95.514.000,00	Pembangunan Gedung pendidikanTKN 2 Sungai Pagu
2.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	10.580.501.252,90	Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati
4	Rumah Sakit Umum Daerah	90 287.172,00	Perencanaan Gedung Rawat Inap RSUD Solok Selatan
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.491.195.629,00	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	199 678.920,00	Pembangunan Rumah Adat Lubuk Uang Aling
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hid up	755.784.953,00	Bangunan Kios/Pujasera RTH Padang Aro
Jumlah		18.217.965.906,90	

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp23.239.189,00 merupakan Reklasifikasi entry belanja modal gedung dan bangunan ke belanja barang dan jasa, yang merupakan belanja perencanaan kegiatan rata bangunan yang dilaksanakan secara swakelola

pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp.18.900.000,00 dan reklasifikasi belanja gedung dan bangunan berupa pekerjaaan pemeliharaan pintu masuk ruangan sebesar Rp4.339.189,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.101 Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Belanja Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	18.900.000,00
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.339.189,00
Jumlah		**23.239.189,00**

Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 2.059.888.994,00 merupakan penghapusan atas gedung dan bangunan yang disebabkan karena kondisi aset tetap yang tidak layak dan tidak representative lagi digunakan, serta efisiensi pemanfaatan lokasi untuk pembangunan gedung baru yang anggaran pembangunannya telah tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, sehingga harus dilakukan pembongkaran dan dihapus dari inventaris yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.320-2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan, Jalan dan Irigasi Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tanggal 02 September 2022 dan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.421-2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.102 Rincian Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Kecamatan Sangir Batang Hari SDN 03 Dusun Tangah	2006	85.363.000,00
		Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kecamatan Sangir SDN 05 Tanggo Aka	2007	402.292.100,00
		Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	Kecamatan Pauh Duo SDN 12 Pinang Awan	2007	56.909.000,00
		Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	Kecamatan Pauh Duo SDN 12 Pinang Awan	2007	56.909.000,00
		Rumah Negara Golongan I Lain-lain (dst)	Kecamatan Pauh Duo SDN 03 Pekonina	2007	6.560.000,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kecamatan KPGO SDN 01 Pakan Rabaa	1984	46.000.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Kecamatan Sungai Pagu	2007	571.184.908,00
		Gedung Garasi/Pool Permanen	Kecamatan Sungai Pagu	2013	211.432.798,00
		Gedung Garasi/Pool Permanen	Kecamatan Sungai Pagu	2015	15.400.000,00
3.	Sekretariat Daerah	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Kecamatan Sangir	2015	276.033.200,00
		Gedung Garasi/Pool	Kecamatan Sangir	2015	332.205.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
		Pertanian			
Jumlah					2.050.888.994,00

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp0,36 merupakan koreksi kurang pembulatan atas pencatatan nilai gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.103 Koreksi atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,30	SMP N 26 Solok Selatan
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,06	Gedung Layanan Perpustakaan
Jumlah		0,36	

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	1.410.782.448.374,04	1.318.365.723.727,04

Perhitungan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.410.782.448.374,04 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**1.318.365.723.727,04**
Penambahan Tahun 2022	Rp	104.057.597.667,59
Jumlah	**Rp**	1.422.423.321.394,63
Pengurangan Tahun 2022	Rp	11.640.873.020,59
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022	**Rp**	**1.410.782.448.374,04**
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan s.d 31 Desember 2022	**Rp**	**(768.441.315.785,70)**
Nilai Buku	**Rp**	**642.341.132.588,34**

Jumlah tersebut dengan rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

Tabel V.3.104 Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1	Jalan	869.284.243.690,00	47.727.452.757,00	269.317.000,00	916.742.379.447,00
2	Jembatan	199.647.670.201,00	21.150.344.331,30	1.261.457.850,30	219.535.556.682,00
3	Bangunan Air Ingas	152.745.717.692,00	4.270.069.930,00	315.746.000,00	156.702.041.792,00
4	Bangunan Pengaman Pasang Surut	112.913.506,00	-	-	112.912.506,00

5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	378.175.445,00	-	-	378.175.445,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	53.913.828.263,04	14.674.879.670,07	4.321.254.835,07	70.267.251.098,04
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	5.442.678.071,00	222.981.896,00	-	5.665.659.967,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.763.656.538,00	871.405.074,22	871.405.074,22	2.763.695.538,00
9	Bangunan Air Kotor	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	1.351.015.874,00	-	-	1.351.015.874,00
11	Instalasi Air Kotor	1.577.327.000,00	-	-	1.577.327.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	336.606.538,00	-	-	336.606.538,00
13	Instalasi Gardu Listrik	5.473.343.566,00	14.914.521.989,00	2.000.000,00	20.385.865.555,00
14	Instalasi Pengaman	76.322.000,00	91.547.050,00	-	167.869.050,00
15	Jaringan Air Minum	15.598.426.077,00	-	4.513.597.261,00	11.072.828.816,00
16	Jaringan Listrik	3.276.645.566,00	125.595.000,00	88.096.000,00	3.314.145.566,00
17	Jaringan Telepon	80.717.500,00	-	-	80.717.500,00
18	Jaringan Gas	6.400.000,00	-	-	6.400.000,00
	Jumlah	1.318.365.723.727,04	104.057.597.667,59	11.840.873.020,59	1.410.782.448.374,04

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp104.057.597.667,59 berasal dari:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	89.128.228.699,59
Reklasifikasi entry belanja modal KIB B	Rp	51.675.127,00
Reklasifikasi dari KIB C	Rp	84.952.000,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	382.183.363,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	Rp	109.722.700,00
Hibah	Rp	13.928.027.778,00
Koreksi Nilai Pencatatan	Rp	372.808.000,00)
Jumlah Penambahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp**	**104.057.597.667,59**

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari belanja modal adalah sebesar Rp89.128.228.699,59, berikut rincian penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari realisasi belanja modal Tahun anggaran 2022:

Tabel V.3.105 Rincian Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1.	Dinas Kesehatan	279.987.696,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	63.573.989.630,22
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.892.821.899,00
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.288.499.735,07
5.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	19.973.691.338,30
6.	Sekretariat Daerah	16.095.000,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	75.350.000,00
8.	Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	107.800.000,00
Jumlah		89.126.228.699,59

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp51.675.127,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal aset peralatan dan mesin yang menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Parwisata dan Kebudayaan dan Dinas Komuntkasi dan Informatika, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.106 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.630.077,00	Pembangunan Sumur Bor
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.045.050,00	Instalasi Penangkal Petir
Jumlah		51.675.127,00	

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari reklasifikasi dari KIB C sebesar Rp84.952.000,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan yang menambah nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaa Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.107 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	32.300.000,00	Belanja Honorarium perencanaan dan pengawasan
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.652.000,00	Instalasi Penangkal Petir
Jumlah		84.952.000,00	

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari reklasifikasi dari KIB F sebesar Rp 382.183.363,00, merupakan reklasifikasi dari aset Kontruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya dan reklasifikasi sehingga menambah nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaa Umum Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.108 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kontruksi Dalam Pengerjaan

No.	Jenis	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Saluran Drainage	50.175.000,00	Perencanaan Paving Blok dan Drainase Perkantoran

No.	Jenis	Jumlah (Rp)	Ket
2.	Saluran Drainase	75.075.000,00	Perencanaan Lanscape Lokasi Perkantoran Pemda Solok Selatan
3.	Jalan Kabupaten Aren	185.721.000,00	Jalan Timbulun-Seberang
4	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	69.875.000,00	Perencanaan Daerah Irigasi KPGD
5.	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	1.337.393,00	Perencanaan Irigasi Ayia Menyuruak
Jumlah		382.183.393,00	

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menambah harga perolehan aset adalah sebesar Rp 109.722.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.109 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)	Keterangan
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	65.395.700,00	atribusi belanja barang dan jasa (perencanaan)
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.780.000,00	atribusi belanja barang dan jasa (honorarium Pelaksanaan Kegiatan)
3.	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	37.305.000,00	atribusi belanja barang dan jasa (perencanaan pengawasan dan honorarium pelaksanaan kegiatan)
4.	Kantor Ketahanan Pangan	1.250.000,00	atribusi belanja barang dan jasa (honorarium Pelaksanaan Kegiatan)
Jumlah		109.722.700,00	

Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari hibah sebesar Rp 13.928.027.778,00, yang terdiri atas sebesar Rp13.750.246.090,00 merupakan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang perolehan melalui hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara berupa Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kawasan Menara Songket Seribu Rumah Gadang dari Kemeneterian PUPR kepada Pemerintah Kabuparen Solok Selatan Nomor : 581/BA/DC/2022, tanggal 5 Juli 2022, dan sebesar Rp177.781.688,00 merupakan hibah yang berasal dari Kementerian Pembangunan Desa Tertingal berupa Jalan Setapak Taman Canuntoran di Kecamatan Sangir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.110 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Pemberi Hibah
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.750.246.090,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		177.781.688,00	Kementerian Pembangunan Desa Tertingal
Jumlah		13.928.027.778,00	

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp372.808.000,00 merupakan penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari koreksi pencatatan

jalan, irigasi, dan jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.111 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)	Keterangan
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.370.000,00	Perencanaan Jembatan sungai pangkue
		24.820.000,00	Perencanaan Irigasi bandar pauh kec. Sangir
		99.380.000,00	Perencanaan Jembatan gantung lalantam
		24.850.000,00	Perencanaan Bangunan pengaman sungai bateng pulakek
		99.838.000,00	Perencanaan Bangunan pengaman sungai bateng sungai pasia panjang kpgd
		24.950.000,00	
Jumlah		372.808.000,00	

Sedangkan untuk perhitungan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp11.640.873.020,59 adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi ke KIB B	Rp	63.095.000,00
Reklasifikasi ke KIB E	Rp	4.000.874.935,00
Reklasifikasi ke KIB F	Rp	218.593.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	1.630.645.974,22
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	4.513.597.261,00
Penghapusan aset	Rp	1.214.066.850,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	0,37
Pengurangan nilai aset tetap Jalan, Irigas dan Jaringan	**Rp**	**11.640.873.020,59**

Pengurangan atas reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke KIB B sebesar Rp63.095.000,00, merupakan reklasifikasi atas belanja modal jalan irigasi dan jaringan yang realisasinya merupakan aset tetap peralatan dan mesin berupa stabilisator, dengan rincian sebgai berikut:

Tabel V.3.112 Reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)
1	Dinas Kesehatan	19.502.000,00
2	Sekretariat Daerah	16.095.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	27.500.000,00
	Jumlah	63.095.000,00

Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke KIB E sebesar Rp4.000.874.935,00 merupakan reklasifikasi atas belanja modal jalan irigasi dan jaringan yang realisasinya merupakan aset tetap lainnya berupa aset renovasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.113 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	2.409.853.000,00	Drainase pada jalan simpang padang aro lubuk maleko (durian tarung)
		795.330.935,00	Trotoar Padang Aro
		794.691.000,00	Drainase Trotoar Kawasan RTH Muar Labuh
Jumlah		**4.000.874.935,00**	

Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 218.593.000,00 merupakan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan berupa perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan dicatat dalam Buku Inventaris sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut .

Tabel V.3.114 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Paket Pekerjaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perencanaan Jalan Bariang Kuok Serak Tabs	50.889.000,00
2.	Perencanaan Jalan Tanggo Akar-Banda Runluh	99.528.000,00
3.	Perencanaan Jembatan Simpang PB Talao	69.176.000,00
	Jumlah	218.593.000,00

Reklasifikasi entry belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke belanja barang dan jasa sebesar Rp1.630.645.974,22 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan ke belanja barang dan jasa yang merupakan alokasi belanja kegiatan yang bukan merupakan aset tetap atau yang tidak menambah nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan. serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.115 Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Belanja Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	109.900.000,00	survey perencanaan dilaksanakan secara swakelola
		8.215.000,00	belanja pengadaan pipa pancang tanah
		313.746.000,00	kegiatan pemeliharaan jaringan irrigasi yang dilaksanakan secara swakelola
		19.985.000,00	pemeliharaan Sungai
		79.884.000,00	pemeliharaan Sungai
		871.405.974,22	reservoar yang akan diserahkan kepada pihak ketiga PDAM
		49.922.900,00	bronjong di batu nago SBH
		99.874.000,00	pengecatan sungai batang bangko
		50.704.000,00	perancanaan swakelola pemeliharaan
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	Perencanaan dan pengawasan pengadaan tiang listrik yang diserahkan pada pihak ketiga

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)	Keterangan
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	25.000.000,00	Pemasangan peningkatan daya listrik kepada PLN
Jumlah		1.630.645.974,22	

Reklasifikasi atas belanja modal jalan irigasi dan jaringan ke belanja barang dan jasa sebesar Rp871.405.074,22 pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dapat dijelaskan bahwa merupakan belanja modal jalan irigasi dan jaringan berupa reservoar air bersih/minum Golden yang telah diserahterimakan dengan PDAM sebagai bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600/541/ASET/DPU.TRP/XII-2022 Antara Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke Aset Lainnya (aset yang dimanfaatkan pihak lain) merupakan aset tetap yang telah diserahterimakan kepada PDAM sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan berupa Jaringan Air Bersih/Minum yang telah dimanfaatkan dan dioperasikan oleh PDAM dengan nilai sebesar Rp4.513.597.261,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.116 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (RP)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	1.196.418.250,00	Pembangunan Jaringan Air bersih Kec.Sangir
		800.209.511,00	Jaringan Air Bersih Balun - Pasir Talang (Kec.KPGD,Sel.Pagu)
		490.413.000,00	Peningkatan SPAM Pekonina dan Ampalu (DAK Reguler)
		550.930.000,00	Peningkatan Jaringan Air Bersih Pauh Duo (IPD)
		1.475.627.500,00	Peningkatan Jaringan Air Bersih Sangir (IPD)
Jumlah		4.513.597.261,00	

Penghapusan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 1.214.066.850,00 merupakan penghapusan atas jalan, irigasi dan jaringan yang disebabkan karena terkena bencana dan kondisi aset tetap yang tidak layak, serta efisiensi pemanfaatan lokasi untuk pembangunan jembatan baru dan sehingga harus dihapus yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.320-2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan, Jalan dan Irigasi Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tanggal 02 September 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.117 Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan Gantung Kampung Tarandam Kecamatan Sungai Pagu	2005	278.640.850,00
		Jembatan Pada	Jembatan Gantung	2010	526.241.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jenis	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
		Jalan Kabupaten Lokal	Talantam- Sei.Pantuh Kecamatan Gangir Batang Hari		
		Jembatan Pada Jalan Kabupaten Antar	Jembatan Sungai Pangkua Kecamatan KPGC	2017	400.185.000,00
Jumlah					1.214.066.850,00

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0,37 merupakan koreksi pembulatan atas pencatatan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.118 Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Pencatatan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,07	Pekerjaan Drainase Pasar Muara Labuh
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah:	0,30	Pekerjaan Jembatan Gantung Talantam
Jumlah		0,37	

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	46.007.519.047,04	36.511.102.598,04

Perhitungan aset tetap lainnya sebesar Rp46.007.519.047,04 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	**36.511.102.598,04**
Penambahan Tahun 2022	Rp	9.582.632.349,00
Jumlah	**Rp**	**46.093.734.947,04**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	86.215.900,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	**Rp**	**46.007.519.047,04**

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp9.582.632.349,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS)	Rp	1.205.948.175,00
Reklastfikasi entry belanja modal dari KIB A	Rp	2.849.540.077,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB B	Rp	10.085.550,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB D	Rp	4.000.874.935,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	1.429.441.613,00
Atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	Rp	60.271.999,00
Hibah	Rp	26.470.000,00
Jumlah Penambahan nilai aset tetap lainnya	**Rp**	**9.582.632.349,00**

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang bersumber dari belanja modal Aset Tetap Lainnya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.205.948.175,00 berupa buku-buku pendidikan/bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat musik tradisional dan modern/band dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.119 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Lainnya Belanja BOS

No.	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Jumlah (Rp)
		Bahan Perpustakaan (Rp)	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga (Rp)	
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.047.067.874,00	158.880.301,00	**1.205.948.175,00**

Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB A sebesar Rp 2.849.540.077,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal tanah yang direalisasikan dalam bentuk aset tetap lainnya (aset renovasi), yang peruntukannya digunakan untuk pelebaran ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional di Kabupaten Solok Selatan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.120 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Tanah

No.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan tanah pelebaran jalan padang air dingin	744.190.172,00
2.	Pengadaan tanah pelebaran jalan duriga taruang-sungai padi	415.808.815,00
3.	Pengadaan tanah drainase porkopaan	1.686.551.092,00
Jumlah		**2.849.540.077,00**

Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB B sebesar Rp10.085.550,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin direalisasikan dalam bentuk aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.121 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Jumlah (Rp)
		Bahan Perpustakaan (Rp)	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga (Rp)	
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.230.000,00	8.855.550,00	**10.085.550,00**

Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi entry belanja modal KIB D sebesar Rp4.000.874.935,00 merupakan reklasifikasi atas realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan direalisasikan dalam bentuk aset tetap lainnya berupa aset renovasi berupa pekerjaan atas ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional yang berada di Kabupaten Solok

Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.122 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	2,409 855.000.00	Pekerjaan Crainase pada jalan simpang padang aro lubuk malako (durian terung)
		790.330.935.00	Pekerjaan Trotoar Padang Aro
		794.691.000,00	Pekerjaan Crainase Trotoar Kawasan RTH Muara Labuh
Jumlah		4.000.874.935,00	

Penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari reklasifikasi KIB F sebesar Rp1.429.441.613,00, terdiri atas sebesar Rp807.910.388,00 reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan berupa perencanaan dan pekerjaan pembangunan fisik drainase jalan Lubuk Gadang–Padang Aro merupakan ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten Solok Selatan dan telah selesai dilaksanakan, dan sebesar Rp621.531.225,00 merupakan pekerjaan pelebaran Jalan Golden Arm-Padang Aro yang telah selesai pengerjaan dan di lakukan reklasifikasi pencatatan ke aset tetap lainnya (Aset Renovasi) yang merupakan ruas jalan nasional yang berada di Kabupaten Solok Selatan.
Penambahan aset tetap lainnya dari atribusi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang menambah harga perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp 60.271.999,00 merupakan atribusi atas biaya jasa appraisal penilaian untuk pembebasan/ganti rugi tanah pada ruas jalan provinsi dan nasional pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.123 Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	16.559.333.00	Pengadaan tanah pelebaran jalan padang air dingin
		16.559.333.00	Pengadaan tanah pelebaran jalan durian terung - sungai padi
		27.153.333.00	Pengadaan tanah drainase perkotaan
Jumlah		60.271.999,00	

Penambahan aset tetap lainnya dari hibah sebesar Rp26.470.000,00 merupakan perolehan aset tetap lainnya dari hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa bahan perpustakaan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Pemberian Hibah 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), Koleksi Buku dan Perlengkapan Multimedia Nomor : 5553/NPHD/2022, tanggal 24 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 5553/4.2/PLK 03.03/XI.2022, tanggal 24 November 2022.

Sedangkan perhitungan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp86.215.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi ke KIB B	Rp	52.320.050,00
Reklasifikasi ke KIB C	Rp	11.000.000,00
Reklasifikasi entry belanja modal ke belanja barang dan jasa	Rp	22.895.850,00
Pengurangan nilai aset tetap lainnya	**Rp**	**86.215.900,00**

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp52.320.050,00 merupakan realisasi atas entry belanja modal aset tetap lainnya ke KIB B realisasinya dalam bentuk aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, dan alat laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.124 Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga		
1.	SMP N 1 Solok Selatan	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.500.000,00
2.	SMP N 9 Solok Selatan	Suling/Seruling	500.000,00
3.	SMP N 9 Solok Selatan	Gendang	1.500.000,00
4.	SMP N 11 Solok Selatan	Pianika	1.500.000,00
5.	SMP N 23 Solok Selatan	Papan Nama Instansi	7.210.000,00
6.	SMP N 32 Solok Selatan	Sound System	13.284.000,00
7.	SDN 07 Sitapus	Sound System	4.500.000,00
8.	SDN 05 Sirumbuk	Recorder	535.500,00
9.	SDN 02 Sungai Kunyit	Pianika	2.000.000,00
10.	SDN 08 Karang Putian	Pianika	975.000,00
11.	SDN 19 Tanjak Alo Putiah	Pianika	2.040.000,00
12.	SDN 19 Tanjak Alo Putiah	Harmonika	320.000,00
13.	SDN 01 Lasiang Batu	Pianika	1.756.200,00
14.	SDN 01 Lasiang Batu	Recorder	427.350,00
15.	SDN 16 BLOK NOL	Sound System	5.150.000,00
16.	SDN 16 BLOK NOL	Pianika	2.040.000,00
17.	SDN 16 BLOK NOL	Harmonika	320.000,00
18.	SDN 10 Pasar Muara Labuh	Sound System	5.000.000,00
19.	SDN 13 Rangko	Pianika	940.000,00
20.	SDN 13 Rangko	Recorder	800.000,00
Jumlah			52.320.050,00

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp11.000.000,00 merupakan realisasi atas entry belanja modal aset tetap lainnya ke KIB C pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa pengadaan reralis ruang kelas di sekolah SDN 02 Sikumbang.

Reklasifikasi entry belanja modal aset tetap lainnya ke belanja barang dan jasa sebesar Rp22.895.850,00 merupakan belanja barang berupa barang habis pakai dan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak memenuhi kriteria aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.125 Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Belanja Barang dan Jasa yang Mempunyai Masa Manfaat Kurang dari 12 Bulan

No.	OPD/UPT	Nama Barang	Nilai (Rp)
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga		
1.	SMP N 3 Solok Selatan	Bahan Perpustakaan (alquran)	500.000,00
2.	SMP N 11 Solok Selatan	Bahan Perpustakaan (buku induk siswa)	500.000,00
3.	SMP N 14 Solok Selatan	Alat Kesenian Lain-lain (stik tabla dan tas alat musik)	638.260,00
4.	SMP N 23 Solok Selatan	Bahan Perpustakaan	9.000,00
5.	SMP N 28 Solok Selatan	Alat Musik Modern/Band (stik drum band)	260.000,00
6.	SMP N 29 Solok Selatan	Bahan Perpustakaan (alquran dan buku induk)	1.345.000,00
7.	SMP N 32 Solok Selatan	Alat Musik Modern/Band (stik drum band)	674.000,00
8.	SDN 03 Dusun Tangah	Alat Kesenian Lain-lain (puzzle)	2.700,00
9.	SDN 04 Pasang Limau Sungai	Bahan Perpustakaan (buku saku pramuka)	10.000,00
10.	SDN 03 Sungai Takuak	Bahan Perpustakaan (buku saku pramuka)	21.000,00
11.	SDN 05 Sungai Sungkai	Bahan Perpustakaan (buku induk siswa)	1.225.000,00
12.	SDN 07 Merou	Bahan Perpustakaan (buku saku)	9.700,00
13.	SDN 06 Durian Tarung	Bahan Kerajinan Lain-lain (pot)	600.000,00
14.	SDN 19 Taluak Aia Putiah	Bahan Perpustakaan (alquran) Alat Musik Modern/Band (stik drum band)	720.600,00
15.	SDN 20 Sungai Landeh	CDM/CD/DVD/LD	600.000,00
16.	SDN 23 Tandai	Alat Kesenian Lain-lain (pakaian adat)	1.000.000,00
17.	SDN 28 Jujutar	Bahan Perpustakaan (peraga baca dan tulis alquran)	140.000,00
18.	SDN 12 Pinang Awar	Bahan Perpustakaan (buku saku)	2.700,00
19.	SDN 10 BLOK NOL	Alat Musik Modern/Band	490.000,00
20.	SDN 02 Sikumbang	Alat Kesenian Lain-lain (pakaian drum band dan pakaian tari)	11.000.000,00
21.	SDN 05 Jiu Sulih	Bahan Kerajinan Lain-lain (lem)	900,00
22.	SDN 12 Sungai Manau	Bahan Perpustakaan (Administrasi)	132.000,00
23.	SDN 18 Sungai Kapur	Bahan Perpustakaan (LKS)	2.000.000,00
24.	SDN 17 Pintu Kayu Kalek	Bahan Perpustakaan (LKS dan Referensi)	724.400,00
25.	SDN 19 Sapan Salak	Bagan, Gambar (Diagram)	300.000,00
Jumlah			22.895.850,00

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	67.015.563.293,00	55.599.395.198,00

Perhitungan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp67.015.563.293,00adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**55.599.395.198,00**
Penambahan Tahun 2022	Rp	18.436.558.907,00
Jumlah	**Rp**	**74.035.954.105,00**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	7.020.390.812,00
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**67.015.563.293,00**

Penambahan nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp18.436.558.907,00 terdiri dari.

Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB C	Rp	18.217.965.907,00
Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB D	Rp	218.593.000,00
Jumlah Penambahan nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan	**Rp**	**18.436.558.907,00**

Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp18.217.965.907,00 merupakan reklasifikasi atas aset tetap gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya beserta koreksi pencatatan nilai yang menambah harga perolehan aset tetap tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.126 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Paket Pekerjaan
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	95.514.000,00	Pembangunan Gedung pendidikanTKN 2 Sungai Pagu
2.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	10.580.501.252,90	Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati
		0,10	Koreksi nilai tambah
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	96.337.172,00	Perencanaan Gedung Rawat Inap
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.491.199.629,00	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	199.678.900,00	Pembangunan Rumah Adat Lubuk Ulang Aling
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	755.764.953,00	Bangunan Kios/Pujasera RTH Padang Aro
Jumlah		18.217.965.907,00	

Penambahan konsruksi dalam pengerjaan sebesar Rp218.593.000.00 merupakan reklasifikasi atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berupa pekerjaan perencanaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.127 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Paket Pekerjaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perencanaan Jalan Sarilang Kuok Sarlak Taba	59.889.000,00
2.	Perencanaan Jalan Tanggo Akar-Banda Runtuh	99.528.000,00
3.	Peencanaan Jembatan Simpang PB Talao	59.176.000,00
	Jumlah	**218.593.000,00**

Sedangkan perhitungan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp7.020.390.812,00, dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi ke KIB C	Rp	5.208.765.836,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	382.183.363,00
Reklasifikasi ke KIB E	Rp	1.429.441.613,00
Pengurangan nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan	**Rp**	**7.020.390.812,00**

Pengurangan atas aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp5.208.765.836,00 merupakan reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke KIB C aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Pertanian, karena pembangunan fisik gedung dan bangunan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.128 Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / UPB	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	12.400.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen/Bangunan Sekolah
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	467.173.400,00	Tugu Peringatan Lainnya/Tugu Pemekaran
		3.943.816.176,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen/Kampus PSDKU
		49.900.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	496.134.900,00	Bangunan Gedung Instalasi Permanen
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	209.941.360,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)/ Rumah SPA
5.	Dinas Pertanian	9.500.000,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)
Jumlah		5.208.765.836,00	

Pengurangan atas aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp382.183.363,00, merupakan reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke KIB D aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, yang telah selesai pekerjaan pembangunannya dan telah dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3.129 Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Saluran Drainage	50.175.000,00	Perencanaan Paving Blok dan Drainase Perkantoran
2.	Saluran Drainage	75.075.000,00	Perencanaan Lanscape Lokasi Perkantoran Pemda Solok Selatan
3.	Jalan Kabupaten Aspal	185.721.000,00	Jalan Timpuluh-Seberang
4	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	69.875.000,00	Perencanaan Daerah Irigasi KPGD
5.	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	1.357.363,00	Perencanaan Irigasi Ayla Maryuzak
Jumlah		382.183.363,00	

Pengurangan atas aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.429.441.613,00, merupakan reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke Aset Tetap Lainnya (aset renovasi) pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan yang telah selesai pekerjaannnya dan telah dimanfaatkan berupa pekerjaan pelebaran jalan Golden Arm-Padang Aro sebesar Rp621.531.225,00 pada ruas jalan nasional dan pekerjaan pembangunan dranase Lubuk Gadang-Padang Aro pada ruas jalan provinsi sebesar Rp807.910.388,00 yang telah selesai pembangunannya.

5.3.3.7Akumulasi Penyusutan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	Rp(1.150.700.964.067,79)	(1.013.560.818.039,70)

Kabupaten Solok Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan juga menyajikan penyusutan terhadap Aset tetap, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus tanpa nilai sisa, sesuai kebijakan perhitungan penyusutan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan melalui Aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp(1.150.700.964.067,79), dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**(1.013.560.818.039,70)**
Koreksi Kebijakan Akuntansi		
Penambahan	Rp	9.933.529.255,00
Pengurangan	Rp	9.709.162.205,00
Jumlah Setelah Koreksi/ Saldo per 1 Januari 2022	**Rp**	**(1.013.336.450.989,70)**
Beban Penyusutan Tahun 2022	Rp	(137.364.513.078,09)
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**(1.150.700.964.067,79)**

Atas penghapusan aset tetap yang telah dipindahtangankan dan dihapus, reklasifikasi aset tetap ke aset rusak berat dan hilang serta pemutakhiran KIB pada Aplikasi SIMDA BMD

saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2022 terkoreksi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.3.130 Koreksi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(214,650,864,338.30)	6,136,542,782.00	796,377,679.00	(207,308,215,235.00)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(128,073,301,317.30)	471,183,596.00	(3,561,016.00)	(127,598,140,305.00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(670,836,681,794.70)	1,325,803,877.00	8,919,285,542.00	(678,430,091,449.7)
Jumlah Penyusutan		(1,013,560,847,450.30)	9,933,529,255.00	9,709,182,205.00	(1,013,336,450,989.7)

Akumulasi penyusutan aset tetap masing-masing golongan aset per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3.131 Beban dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)	Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(207.528.215.535,00)	(31.423.625.568,09)	(238.731.854.503,09)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(127.598.140.305,00)	(15.329.653.174,00)	(142.927.793.479,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(678.430.091.449,70)	(90.611.224.336,30)	(768.441.315,786.70)
Jumlah Akumulasi Penyusutan		**(1.013.336.450.989,70)**	**(137.364.513.078,09)**	**(1.150.700.964.067,79)**

Sedangkan daftar rincian akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2022 untuk tiap golongan aset pada masing-masing OPD disajikan pada lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

5.3.4 Aset Lainnya	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	10.333.988.409,00	**1.837.172.842,88**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 tersebut meliputi aset tak berwujud dan aset lain-lainnya. Jenis dan nilai saldo Aset lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.132 Rekapitulasi Aset Lainnya

No	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Aset Tidak Berwujud	1.458.943.875,00	1.387.043.795,00	71.900.080,00	5,18
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(856.829.646,00)	(744.544.259,00)	(112.084.387,00)	15,05

No	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Aset Tidak Berwujud Setelah Amortisasi	602.315.229,00	642.499.536,00	(40.184.307,00)	(6,25)
4	Aset Lain-lain	27.677.279.399,27	20.711.721.602,24	6.965.557.797,03	33,63
5	Akumulasi Penyesuaian Aset Lain-lain	(23.310.222.872,24)	(19.547.028.295,36)	(3.763.194.576,88)	19,44
6	Aset Lain-lain Setelah Penyesuaian	4.367.493.227,00	1.164.673.306,88	3.172.819.920,12	265,58
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.364.179.953,00	0,00	5.364.179.953,00	100,00
Jumlah		10.333.988.409,00	1.837.172.842,88	8.496.815.566,12	462,49

5.3.4.1 Aset Tak Berwujud	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	602.315.229,00	642.499.536,00

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp602.315.229,00 adapun mutasi rincian aset tak berwujud tahun 2022 dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	**1.387.043.795,00**
Penambahan Tahun 2022	Rp	71.900.080,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi	**Rp**	**1.458.943.875,00**
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	**Rp**	**(856.628.646,00)**
Saldo Per 31 Desember 2022 (setelah amortisasi)	**Rp**	**602.315.229,00**

Tabel V.3.133 Rincian Aset Tak Berwujud 2022

SKPD/ Jenis	31 Des 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	Pengurangan 2022 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1. Rumah Sakit Umum Daerah				
- Biling Sistim	496.100.000,00	0,00	0,00	496.100.000,00
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
- Website	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
- SIPPD	148.500.000,00	0,00	0,00	148.500.000,00
- Sistem Perencanaan RKPD	48.510.000,00	0,00	0,00	48.510.000,00
- E-Musrembang	100.775.000,00	0,00	0,00	100.775.000,00
- ARGIS	164.038.795,00	0,00	0,00	164.038.795,00
- E-RAPAT		19.900.080,00	0,00	19.900.080,00
3.Badan Pengelola Keuangan Daerah				
- Software oracle, dan	54.750.000,00	0,00	0,00	54.750.000,00
- SIM BPHTB PBB P2	98.870.000,00	0,00	0,00	98.870.000,00
- Sistem Integrasi BPHTB	96.920.000,00	0,00	0,00	96.920.000,00
- Sistem E-Colekter PBB P2	96.930.000,00	0,00	0,00	96.930.000,00

4.Dinas Perhubungan - Simcard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Microsoft Office	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
6.Dinas Kesehatan - E-Barcode Obat-obatan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah	1.387.043.795,00	71.900.080,00	0,00	1.458.943.875,00

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp71.900.080,00 pada tahun 2022 merupakan pengadan sistem E-Rapat pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nilai 19.900.080,00 dan Sistem E-Barcode pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp.15.000.000,00 dan perolehan atas hibah pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari BNPB berupa software Microsoft Office dengan nilai Rp37.000.000,00. Perolehan hibah ini adalah pada tahun 2021 yang lalu, namun sebelumnya belum terlaporkan pada LKPD tahun anggaran 2021.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Nilai amortisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.134 Amortisasi per SKPD
Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Tahun Pelaporan	Umur Ekonomis 120 bulan	Amortisasi
1	Rumah Sakit Umum Daerah	496.100.000,00				471.900.000,00
	Billing System	121.000.000,00	31-Des-14	31-Des-22	96	96.800.000,00
		375.100.000,00	31-Des-09	31-Des-22	120	375.100.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	501.723.875,00				225.717.846,00
	Web Site	20.000.000,00	31-Des-14	31-Des-22	96	16.000.000,00
	SIPPD	148.500.000,00	31-Des-18	31-Des-22	72	89.100.000,00
	Sistem Perencanaan RKPD	48.510.000,00	31-Des-16	31-Des-22	72	29.106.000,00
	E-Musrenbang	100.775.000,00	31-Des-19	31-Des-22	48	40.310.000,00
	ARCGIS	164.036.795,00	21-Jan-20	31-Des-22	36	49.211.638,00
	E-RAPAT	19.900.080,00	24-Nov-22	31-Des-22	12	1.990.008,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	351.370.000,00				132.796.000,00
	Software Oracle	54.750.000,00	31-Des-14	31-Des-22	96	43.800.000,00
	SIM BPHTB PSB P2	98.870.000,00	31-Des-20	31-Des-22	36	29.661.000,00
	Sistem Integrasi BPHTB	98.920.000,00	31-Des-20	31-Des-22	36	29.676.000,00
	Sistem E-Collector PSB P2	98.830.000,00	31-Des-20	31-Des-22	36	29.649.000,00
4	Dinas Perhubungan	57.750.000,00				17.325.000,00
	Simcard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	31-Des-20	31-Des-22	36	17.325.000,00
5	Badan	37.000.000,00				7.400.000,00

No.	Uraian	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Tahun Pelaporan	Umur Ekonomis 120 bulan	Amortisasi
	Penanggulangan Bencana Daerah					
	Microsoft Office	37.000.000,00	04-Okt-21	31-Des-22	24	7,400,000,00
6	Dinas Kesehatan	15.000.000,00				1.500.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	15.000.000,00	15-Nov-22	31-Des-22	12	1.500.000,00
	Jumlah	1,456.943.875,00				856.628.646,00

Tabel V.3.135 Beban dan Akumulasi Amortisasi
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi s/d 2021	Beban Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi s/d 2022	Nilai Buku s/d 31 des 2022
1	Rumah Sakit Umum Daerah	496.100.000,00	459.800.000,00	12.100.000,00	471.900.000,00	24.200.000,00
	Billing System	121.300.000,00	84.700.000,00	12.100.000,00	96.800.000,00	24.200.000,00
		375.100.000,00	375.100.000,00	0,00	375.100.000,00	0,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	501.723.875,00	175.545.250,00	50.172.387,00	225.717.646,00	276.006.229,00
	Web Site	20.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00
	SFFD	148.500.000,00	74.250.000,00	14.850.000,00	89.100.000,00	59.400.000,00
	Sistem Perencanan RKPD	48.510.000,00	24.255.000,00	4.851.000,00	29.106.000,00	19.404.000,00
	E-Musrenbang	100.775.000,00	90.232.500,00	10.077.500,00	40.310.000,00	60.465.000,00
	ARCGIS	184.038.785,00	92.907.759,00	18.403.879,00	89.211.638,00	114.827.157,00
	E-PAPAT	19.900.090,00	0,00	1.990.009,00	1.990.009,00	17.910.072,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	351.370.000,00	97.649.000,00	35.137.000,00	132.786.000,00	218.584.000,00
	Software Oracle	54.750.000,00	38.325.000,00	5.475.000,00	43.800.000,00	10.950.000,00
	SIM BPHTB PBB P2	98.870.000,00	19.774.000,00	9.887.000,00	29.661.000,00	69.209.000,00
	Sistem Integrasi BPHTB	98.920.000,00	19.784.000,00	9.892.000,00	29.676.000,00	69.244.000,00
	Sistem E-Collecting PBB P2	98.830.000,00	19.766.000,00	9.883.000,00	29.649.000,00	69.181.000,00
4	Dinas Perhubungan	57.750.000,00	11.550.000,00	5.775.000,00	17.325.000,00	40.425.000,00
	Simcard Pengujian Kendaraan	57.750.000,00	11.550.000,00	5.775.000,00	17.325.000,00	40.425.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.000.000,00	0,00	3.700.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
	Microsoft Office	37.000.000,00	0,00	3.700.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
6	Dinas Kesehatan	15.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
	E-Barcode Obat-obatan	15.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
	JUMLAH	1.456.943.875,00	744.544.259,00	102.334.387,00	856.628.646,00	802.315.229,00

5.3.4.2. Aset Lain lain	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	4.367.493.227,00	20.711.701.602,24

Perhitungan aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp27.677.715.899,24 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**20.711.701.602,24**
Penambahan Tahun 2022	Rp	13.382.663.638,00
Jumlah Aset Lain-lain	**Rp**	**34.094.365.240,24**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	6.416.649.341,00
Saldo Aset lain-lain Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**27.677.715.899,24**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(23.310.222.672,24)
Nilai Buku Aset Lain-lain setelah Akumulasi	**Rp**	**4.367.493.227,00**

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp13.382.663.638,00 merupakan penambahan dari reklasifikasi aset tetap dengan kondisi rusak berat. Adapun rincian penambahan aset lain-lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan aset lain-lain dengan kondisi rusak berat sebesar Rp 8.859.566.377,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.136 Penambahan Aset Lain-Lain dengan Kondisi Rusak Berat

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peralatan dan Mesin								Jumlah (Rp)
		Alat Besar (Rp)	Alat Angkutan (Rp)	Alat Bengkel dan Alat Ukur (Rp)	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp)	Komputer (Rp)	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (Rp)	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Alat Keselamatan Kerja (Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
2	Dinas Kesehatan	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
4	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Penataan	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
6	Dinas Perhubungan	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
10	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
11	Sekretariat Daerah		[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
12	Sekretariat DPRD		[illegible]							[illegible]
13	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
14	Inspektorat Daerah		[illegible]							[illegible]
15	Kecamatan IPGD				[illegible]	[illegible]				[illegible]
16	Kecamatan Sangir Balai Janggo		[illegible]				[illegible]			[illegible]
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
18	Dinas Pertanian		[illegible]							[illegible]
19	Dinas Komunikasi dan Informatika				[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Jumlah		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2. Penambahan aset lain-lain dengan kondisi hilang sebesar Rp 9.500.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin pada Kecamatan KPGD berupa camera digital dan Printer.
3. Penambahan aset lainnya (aset dimanfaatkan pihak lain) berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp 4.513.597.261,00 merupakan reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jaringan air bersih/air minum.

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp6.416.649.341,00 terdiri atas :

1. Reklasifikasi atas aset lain-lain kondisi rusak berat yang hilang karena pencurian ke aset hilang sebesar Rp 2.500.000,00 berupa printer pada Kecamatan KPGD.
2. Pemindahtanganan melalui hibah kepada Pemerintah Nagari atas aset lain-lain/aset yang dimanfaatkan pihak lain berupa alat angkutan kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp453.666.000,00 pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.339-2022 tentang Penghapusan barang milik daerah pemerintah Kabupaten Solok Selatan atas pelaksanaan hibah berupa kendaraan dinas operasional ke Pemerintah Nagari Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022.
3. Penghapusan atas aset lain-lain berupa alat angkutan yang telah dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan sebesar Rp5.960.483.341,00 dan kemudian dihapus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.321-2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tanggal 2 September 2022, Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.360-2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Tahap II Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, dan, dengan rincian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

Tabel V.3.137 Pengurangan Aset Lain-Lain dari Penghapusan atas Aset Lain-Lain

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	255.390.000,00
2.	Dinas Kesehatan	535.946.108,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	317.500.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	42.000.000,00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.000.000,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.546.000,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	160.000.000,00
9.	Sekretariat Daerah	4.331.404.900,00
10.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	66.813.000,00
11.	Inspektorat Daerah	119.000.000,00
12	Dinas Pertanian	82.883.333,00
Jumlah		5.960.483.341,00

Adapun rincian terhadap penghapusan Aset Lain lain (rusak berat dan aset dimanfaatkan pihak lain) pada masing-masing OPD beserta nilai dan jenis asetnya disajikan pada lampiran.

Selain penambahan dan pengurangan nilai aset lain lain untuk Tahun 2022, juga terdapat mutasi aset lain lain antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai sebesar Rp 487.625.875,00 berupa generator listrik, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel V.3.138 Mutasi Aset Lain-Lain antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	487.625.875,00	-
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	487.625.875,00
Jumlah		487.625.875,00	487.625.875,00

5.3.4.3. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	5.364.179.953,00	0,00

Sesuai dengan PMK Nomor 218 /PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 terdapat alokasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp5.364.179.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
I.	DBH Pajak	507.454.174,00
1.	DBH Pajak Penghasilan PPh 21	486.975.777,00
2.	DBH Pajak Penghasilan PPh 26/29	20.478.397,00
II.	DBH SDA	4.856.725.779,00
1.	DBH PBB	3.300.192.053,00
2.	DBH CUKAI	4.930.185,00
3.	DBH SDA MINERBA	127.621.154,00
4.	DBH SDA PANAS BUMI	1.195.631.492,00
5.	DBH SDA KEHUTANAN	19.137.374,00
6.	DBH SDA PERIKANAN	21.753.211,00
JUMLAH		5.364.179.953,00

Pada akhir tahun 2022 Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKO Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.

5.3.5. KEWAJIBAN	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	23.302.465.783,51	20.751.975.217,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp23.302.465.783,51 merupakan jumlah kewajiban per 31 Desember 2022, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3.139 Rincian Kewajiban

JENIS KEWAJIBAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**23.302.465.783,51**	20.751.975.217,00	2.550.490.566,51	12,29
Jumlah Kewajiban	23.302.465.783,51	**20.751.975.217,00**	2.550.490.566,51	**12,29**

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.302.465.783,51 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.751.975.217,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.550.490.566,51 atau naik sebesar 12,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.140 Kewajiban Jangka Pendek

No	JENIS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	179.060.267,00	(179.060.267,00)	(100,00)
2	Pendapatan diterima dimuka	44.512.323,00	62.071.788,00	(17.559.765,00)	(28,29)
3	Utang Beban	23.220.935.637,51	20.478.829.526,00	2.742.006.105,51	13,39
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.118.128,00	32.013.636,00	5.104.492,00	15,94
JUMLAH		**23.302.465.783,51**	**20.751.975.217,00**	**2.550.490.566,51**	**12,29**

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 artinya seluruh pajak pusat yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaransudah disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2022.

Tabel V.3.141 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
1	Utang PPh 21	0,00	21,093,764,00	(21.093.764,00)	(100,00)
2	Utang PPh 22	0,00	19.511.370,00	(19.511.370,00)	(100,00)
3	Utang PPN	0,00	138.455.133,00	(138.455.133,00)	(100,00)
JUMLAH		0,00	179.060.267,00	(179.060.267,00)	(100,00)

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.071.788,00 sebagai berikut.

Tabel V.3.142 Pendapatan Diterima Dimuka

No	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
1	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD	37.500.000,00	52.500.000,00	(15.000.000,00)	(28,57)
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	7.012.023,00	9.571.788,00	(2.559.765,00)	(26,74)
Jumlah		44.512.023,00	62.071.788,00	(17.559.765,00)	(28,29)

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.500.000,00 pada BLUD RSUD merupakan pendapatan atas sewa ATM. Sementara Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.012.023 pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame.

3. Utang beban

Saldo Utang beban per 31 Desember 2022 Rp23.220.835.631,51 terdiri dari utang beban pegawai, utang barang dan jasa, utang beban transfer dan utang belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.143 Jenis Utang Beban

No	UTANG BEBAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
1	UTANG BEBAN PEGAWAI	1.572.923.669,51	9.661.205.105,00	(8.088.281.475,49)	(83,72)
2	UTANG BEBAN BARANG DAN JASA	20.687.008.389,00	10.040.126.401,00	10.646.881.988,00	106,04
3	UTANG BEBAN TRANSFER	358.040.853,00	186.578.020,00	171.462.833,00	91,90
4	UTANG BEBAN BELANJA MODAL	602.862.700,00	590.920.000,00	11.942.700,00	2,02
JUMLAH		23.220.835.631,51	20.478.829.526,00	2.742.006.105,51	13,39

Utang beban tersebut terdapat pada OPD sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.3.144 Utang Beban Per OPD

No	OPD	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	206.439.964,00	366.610.844,00	(87.170.880,00)	(18,37)
2	Dinas Kesehatan	4.927.021.205,00	4.614.807.163,00	312.214.042,00	6,77
3	UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (APBD)	0,00	14.443.742.130,00	(14.443.742.130,00)	(100,00)
5	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	16.596.260.093,00	0,00	16.596.260.093,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan	139.629.646,00	200.460.713,00	(60.831.067,00)	(30,35)

No	OPD	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
7	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	494.050.306,00	375.242.171,00	118.808.135,00	31,66
8	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	0,00	4.935.290,00	(4.935.290,00)	(100,00)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.469.521,00	0,00	1.469.521,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	7.710.600,00	(7.710.600,00)	(100,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.514.697,00	4.041.485,00	3.473.212,00	85,94
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	1.134.995,00	(1.134.995,00)	(100,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.932.882,00	(2.932.882,00)	(100,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.163.432,00	8.725.000,00	(6.561.568,00)	(75,21)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.293.416,00	(1.293.416,00)	(100,00)
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.726.210,00	4.910.655,00	1.815.555,00	36,97
19	Dinas Pertanian	2.687.100,00	3.335.671,00	(648.571,00)	(19,44)
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.490.786,00	5.470.677,00	(788.891,00)	(14,94)
21	Sekretariat Daerah	24.569.082,00	530.120,00	24.038.962,00	4.534,63
22	Sekretariat DPRD	5.691.990,00	15.216.096,00	(9.524.106,00)	(62,59)
23	Kecamatan Kota Padang Gadang Diateh	1.330.086,00	1.611.996,00	(281.410,00)	(17,46)
24	Kecamatan Sungai Pagu	4.498.451,00	961.305,00	3.537.146,00	367,95
25	Kecamatan Sangir	529.933,00	3.110.742,00	(2.580.809,00)	(82,96)
26	Kecamatan Sangir Jujuan	1.896.968,00	2.964.646,00	(1.067.678,00)	(35,99)
27	Kecamatan Sangir Batang Hari	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00
28	Kecamatan Pauh Duo	136.000,00	1.447.100,00	(1.311.100,00)	(90,60)
29	Kecamatan Sangir Balai Janggo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.069.875,00	4.168.600,00	(3.098.727,00)	(74,33)
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	225.104,00	2.358.301,00	(2.133.197,00)	(90,45)
32	Inspektorat Daerah	8.310.000,00	15.542.300,00	(7.232.300,00)	(46,53)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.400.000,00	2.800.000,00	(1.400.000,00)	(50,00)
34	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	688.569.026,51	380.131.741,00	308.437.285,51	81,14
35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.737.968,00	3.821.897,00	(2.083.929,00)	(54,53)
	JUMLAH	23.220.835.631,51	20.478.829.526,00	2.742.006.105,51	13,39

Utang beban tersebut dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1) Utang beban pegawai

Saldo Utang beban pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.572.923.689,51 merupakan utang kepada pegawai terhadap pengajuan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah, yang belum direalisasikan sampai dengan tahun anggaran berakhir.

Tabel V.3.145 Utang Beban pegawai

No	SKPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	291.791.074,00	360.351.619,00	(68.560.545,00)	(19,03)
2	Dinas Kesehatan	385.495.862,00	174.356.850,00	211.139.012,00	121,10
3	UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (APBD)	0,00	8.705.003.672,00	(8.705.003.672,00)	(100,00)
5	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	406.789.729,00	-	406.789.729,00	-
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	137.512.815,00	197.690.000,00	(60.177.185,00)	(30,44)
7	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	377.444,00	0,00	377.444,00	0,00
8	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	0,00	4.809.290,00	(4.809.290,00)	(100,00)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	705.000,00	-	705.000,00	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	8.818.000,00	(8.818.000,00)	(100,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.903.132,00	0,00	1.903.132,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.293.446,00	(1.293.446,00)	(100,00)
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	710.000,00	1.925.865,00	(1.215.865,00)	(63,13)
19	Dinas Pertanian	710.100,00	-	710.100,00	-
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	812.560,00	(812.560,00)	(100,00)
21	Sekretariat Daerah	4.800.000,00	530.120,00	4.269.880,00	805,46
22	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	232.080,00	0,00	232.080,00	0,00

No	SKPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	Persentase
1	2	3	4	5	6
24	Kecamatan Sungai Pagu	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	0,00
25	Kecamatan Sangir	0,00	3.045.742,00	(3.045.742,00)	(100,00)
26	Kecamatan Sangir Jujuan	0,00	2.695.258,00	(2.695.258,00)	(100,00)
27	Kecamatan Sangir Balang Hari	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Pauh Duo	0,00	1.320.100,00	(1.320.100,00)	(100,00)
29	Kecamatan Sangir Batang Jangguh	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(100,00)
32	Inspektorat Daerah	8.310.000,00	8.180.000,00	130.000,00	1,59
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPC)	326.516.453,51	188.447.706,00	138.068.747,51	73,28
35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.974.307,00	(1.974.307,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.572.923.889,51**	**3.661.205.105,00**	**(8.088.281.415,49)**	**(83,72)**

Jenis Utang beban pegawai selanjutnya dijelaskan dalam **lampiran 30.**

2) **Utang Beban Barang dan Jasa**

Saldo utang beban barang jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.687.005.389,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.3.146 Utang Beban Barang dan Jasa

No	Nama OPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	6.619.590,00	5.250.225,00	1.369.365,00	26,42
2	Dinas Kesehatan	3.950.605.345,00	3.849.530.315,00	101.075.030,00	2,63
3	UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (APBD)	0,00	5.738.736.458,00	(5.738.736.458,00)	(100,00)
5	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	16.175.527.664,00	0,00	16.175.527.664,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	2.116.831,00	2.770.713,00	(653.882,00)	(23,60)
7	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	493.673.362,00	375.242.171,00	118.431.191,00	31,56
8	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	0,00	126.000,00	(126.000,00)	(100,00)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	764.521,00	0,00	764.521,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	1.092.000,00	(1.092.000,00)	(100,00)
12	Dinas Kependudukan dan	7.514.697,00	4.041.485,00	3.473.212,00	85,94

No	Nama OPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
	Pencatatan Sipil				
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	1.134.995,00	(1.134.995,00)	(100,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.932.582,00	(2.932.582,00)	(100,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	260.000,00	8.725.000,00	(8.465.000,00)	(97,02)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.016.210,00	2.984.790,00	3.031.420,00	101,56
19	Dinas Pertanian	1.977.000,00	3.335.871,00	(1.358.871,00)	(40,73)
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.490.786,00	4.467.117,00	23.669,00	0,53
21	Sekretariat Daerah	19.769.082,00	0,00	19.769.082,00	0,00
22	Sekretariat DPRD	5.691.900,00	15.216.006,00	(9.524.106,00)	(62,59)
23	Kecamatan Kota Padang Gadang Diatas	1.096.500,00	1.611.996,00	(515.496,00)	(31,85)
24	Kecamatan Sungai Pagu	858.451,00	961.305,00	(102.854,00)	(10,70)
25	Kecamatan Sangir	529.923,00	65.000,00	464.923,00	715,28
26	Kecamatan Sangir Jujuan	1.898.968,00	271.388,00	1.627.580,00	599,72
27	Kecamatan Sangir Batang Hari	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00
28	Kecamatan Pauh Duo	136.000,00	127.000,00	9.000,00	7,09
29	Kecamatan Sangir Balai Janggo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.069.873,00	4.168.600,00	(3.098.727,00)	(74,33)
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	225.104,00	208.301,00	16.803,00	8,07
32	Inspektorat Daerah	0,00	7.362.300,00	(7.362.300,00)	(100,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
34	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	3.981.720,00	5.106.015,00	(1.124.295,00)	(22,02)
35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.737.958,00	1.847.580,00	(109.622,00)	(5,93)
	Jumlah	20.687.008.389,00	10.040.126.401,00	10.646.881.988,00	106,04

Jenis Utang beban barang dan jasa selanjutnya dijelaskan dalam **lampiran 31.**

3) Utang Beban Transfer

Utang beban transfer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp358.040.853,00. Utang beban transfer merupakan utang yang timbul akibat kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, belum dibayarkan atau dibagihasilkan kepada Pemerintah Nagari.

Utang transfer tersebut merupakan utang transfer terhadap alokasi kurang bayar bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari Tahun 2022.

No	Jenis Bagi Hasil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / Penurunan	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)		
1	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil Pajak Daerah	214.824.512,00	161.236.184,00	121.681.532,00	75,44
2	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil retribusi daerah	143.215.341,00	25.291.836,00	49.781.300,00	196,91
Jumlah		358.040.853,00	186.528.020,00	171.462.832,00	91,9

Adapun perhitungan urang transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil	Alokasi sementara	Yang telah disalurkan	Alokasi Kurang Bayar
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil Pajak Daerah Tahun 2021	1.044.957.900,00	761.980.184	282.977.716,00
2	Alokasi Kurang Bayar bagi hasil retribusi daerah Tahun 2021	221.528.612,00	146.465.476,00	75.063.136,00
Jumlah		1.266. 486.612,00	908.445.660,00	358.040.853,00

4)Utang Beban Belanja Modal

Utang beban belanja modal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp602 862.700.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.147 Utang Beban Belanja Modal

No	OPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / Penurunan	Persentase
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Kesehatan	590.920.000,00	590.920.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	11.942.700,00	0,00	11.942.700,00	100,00
JUMLAH		602.862.700,00	590.920.000,00	11.942.700,00	2,02

Utang beban belanja modal pada Dinas Kesehatan merupakan Utang Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas Mereu sebesar Rp590.920.000,00 pada tahun 2020 sampai 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayarannya

Utang beban belanja modal pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan:

1) Utang belanja modal bangunan dan air atas pembangunan drainasse pada 4 jorong, dimana biaya perencanaannya belum dibayarkan sebesar rp7.393.100,00.
2) Utang belanja modal bangunan dan air atas pembangunan drainasse pada 4 jorong, dimana biaya pengawasannya belum dibayarkan sebesar Rp4,549.600,00.

4. **Utang Jangka Pendek Lainnya**
Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.118.129,00

Tabel V.3.148 Utang Jangka Pendek Lainnya

No	OPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	37.118.129,00	32.013.636,00	5.104.493,00	0,00
1	Utang Sisa BOS kepada RKUN	0,00	32.013.636,00	(32.013.636,00)	(100,00)
2	Utang Jasa Giro kepada Pemerintahan Nagari	32.985.597,00	0,00	32.985.597,00	0,00
3	Utang Jasa Giro kepada Sekolah Swasta	2.966.179,00	0,00	2.966.179,00	100,00
4	Utang Jasa Giro kepada Instansi Lain	1.266.353,00	0,00	1.266.353,00	100,00
JUMLAH		37.118.129,00	32.013.636,00	5.104.493,00	15,94

Adapun rincian utang jangka pendek selanjutnya dijelaskan pada **Lampiran 32**.

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang jangka panjang adalah sebesar Rp0,00.

5.3.6 EKUITAS	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	2.024.726.747.023,88	1.915.664.775.142,30

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp2.024.726.747.023,88 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir 2021 sebesar Rp1.915.664.775.142,30 terdapat peningkatan sebesar Rp109.061.971.871,58 atau naik 5,69%. Penghitungan nilai ekuitas tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	EKUITAS AWAL	1.915.664.775.152,30	1.874.225.572.551,55	41.439.202.600,75	2,21
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	89.526.952.006,37	31.221.355.581,42	58.304.996.427,45	186,74
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	19.535.019.962,71	10.217.247.019,33	9.317.772.943,38	91,20
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	32.013.636,00	0,00	32.013.636,00	100,00
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	19.503.006.226,71	10.217.247.019,33	9.285.759.207,38	90,88
6	EKUITAS AKHIR	2.024.726.747.023,88	1.915.664.775.152,30	109.061.971.871,58	5,69

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2022. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.

5.4.1 Pendapatan – LO	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	894.874.584.431,14	833.913.747.686,00

Pendapatan-LO tahun 2022 dengan realisasi Rp894.874.584.431,14 sedangkan tahun 2021 realisasi Rp833.913747.686,00 terjadi kenaikan sebesar Rp60.960.836.745,14 atau 7,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.1 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	93.825.454.492,14	85.354.340.611,00	8.471.113.881,14	9,92
2.	Pendapatan Transfer-LO	739.311.478.401,00	695.892.790.590,00	43.418.687.811,00	6,24
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	61.737.651.538,00	52.666.616.485,00	9.071.035.053,00	17,22
	Jumlah	894.874.584.431,14	833.913.747.686,00	60.960.836.745,14	7,31

Apabila diperbandingkan dengan Pendapatan - LRA dengan Pendapatan -LO maka terjadi selisih sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4.2 Perbedaan Pendapatan LRA dengan Pendapatan-LO

No	Uraian Pendapatan	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	92.121.048.049,10	93.825.454.492,14	(1.704.406.446,04)
2.	Pendapatan Transfer	794.706.642.887,00	739.311.478.401,00	45.395.164.486,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.828.208.106,00	61.737.651.538,00	(53.909.443.432,00)
Jumlah		894.655.899.039,10	894.874.584.431,14	(10.218.685.392,04)

Dari tabel rincian pendapatan - lo diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan asli daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp93.825.454.492,14 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp85.354.340.611,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.471.113.881,14 atau 9,92% Pendapatan Asli Daerah-LO ini memiliki proporsi sebesar 100% dari keseluruhan

Pendapatan-LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	12.512.850.774,10	18.619.066.283,00	(6.106.215.508,90)	(32,80)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.206.416.790,00	1.630.097.483,00	576.319.307,00	35,35
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	2.415.762.950,00	1.700.551.019,00	715.211.931,00	42,06
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	76.690.423.978,04	63.404.625.826,00	13.285.798.152,04	20,95
Jumlah		**93.825.454.492,14**	**85.354.340.611,00**	**8.471.113.881,14**	**9,92**

Apabila diperbandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA dengan Pendapatan Asli Daerah -LO maka terjadi selisih sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4.4 Perbedaan Pendapatan Asli Daerah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian Pendapatan	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	14.006.714.870,10	12.512.850.774,10	(1.506.135.904,00)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.354.215.128,00	2.206.416.790,00	147.798.338,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.415.762.950,00	2.415.762.950,00	-
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	76.344.355.098,00	76.690.423.978,04	(346.068.880,04)
	Jumlah	**92.121.048.046,10**	**93.825.454.492,14**	**(1.704.406.446,04)**

Dari tabel rincian pendapatan asli daerah – lo diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp12.512.850.774,10 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp18.619.066.283,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.106.215.508,90atau (32,80%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.5 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	97.148.159,00	22.584.045,00	74.564.114,00	330,16
2	Pajak Restoran-LO	1.999.906.655,00	1.541.963.799,00	457.942.856,00	29,70
3	Pajak Hiburan-LO	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	141.311.611,00	184.181.635,00	(42.870.024,00)	(23,28)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	5.410.832.589,00	4.789.003.387,00	621.829.202,00	12,98
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.315.706.188,10	784.806.432,00	530.899.756,10	67,65
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.846.026.329,00	2.925.704.347,00	(79.678.018,00)	(2,72)
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	692.749.243,00	8.370.822.638,00	(7.678.073.395,00)	(91,72)
Jumlah		12.512.850.774,10	18.619.086.283,00	(6.106.235.508,90)	(32,80)

Rincian masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. **Pajak Hotel-LO**
Pajak Hotel-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp96.148.159,00 sedangkan tahun 2021 Rp22.584.045,00 terjadikan kenaikan sebesar Rp74.564.114,00 atau 330,16%.

b. **Pajak Restoran-LO**
Pajak Restoran-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.999.906.655,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.541.963.799,00 terjadi kenaikan Rp457.942.856,00 atau 29,70%

c. **Pajak Hiburan - LO**
Pajak Hiburan -LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.170.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan Rp9.170.000,00 atau 100,00%

d. **Pajak Reklame-LO**
Pajak Reklame-LO pada tahun 2022 sebesar Rp141.311.611,00 sedangkan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp184.181.635,00 terjadi penurunan sebesar Rp42.870.024,00 atau (23,28 %) dengan rincian sebagai berikut:

e. **Pajak Penerangan Jalan– LO**
Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.410.832.589,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp4.789.003.387,00 terjadi kenaikan sebesar Rp621.829.202,00 sebesar 12,98 %.

f. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO**
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2022 sebesar Rp1.315.706.188,10 sedang tahun 2021 sebesar Rp784.806.432,00 terjadi kenaikan sebesar Rp530.899.756,10 atau 67,65%.

g. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-LO**
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-LO tahun 2022 sebesar Rp2.846.026.329,00 Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp2.925.704.347,00 terjadi penurunan Rp79.678.018,00 atau (2,72 %).

h. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2022 sebesar Rp692.749.243,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak- LO, sedang tahun 2021 sebesar Rp8.370.822.638,00 dari BPHTB-Pemindahan Hak-LO dengan BPHTB-Pemberian Hak baru-LO terjadi penurunan Rp7.678 073.396,00 atau (91,72%)

Dari Pendapatan Pajak Daerah - LO diatas tersebut diperbandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel V.4.6 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah –LO

No	Uraian Pendapatan Daerah	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	97.148.150,00	97.148.150,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	1.999.906.855,00	1.999.906.855,00	0,00
3	Pajak Hiburan-LO	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	139.606.846,00	141.311.611,00	(1.704.765,00)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	5.457.965.943,00	5.410.832.589,00	47.133.354,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.315.706.188,10	1.315.706.188,10	0,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.294.461.836,00	2.846.026.329,00	(1.551.564.493,00)
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	892.749.243,00	892.749.243,00	0,00
	Jumlah	11.006.714.870,10	12.512.850.774,10	(1.506.135.904,00)

Terjadi selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO dikarenakan.

1. Pendapatan Pajak reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron terjadi perbedaan antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebesar (Rp1.704.765,00) berasal dari Jurnal Balik Pendapatan di terima di muka lainnya Rp7.012.023,00 dan pelunasan piutang reklame sebesar Rp855.000,00 dikurangi dengan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan karena masa ketetapannya lewat 31 desember 2022 sebesar Rp9.571.788,00
2. Pendapatan Penerangan Jalan terjadi selisih Rp47.133.354 dikarenakan piutang pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2021 sebesar Rp518.246.771,00 yang diterima tahun 2022 dikurangi dengan munculnya piutang tahun 2022 sebesar Rp471.113.417,00 yang akan diterima tahun 2023
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terjadi perbedaan sebesar (Rp1.551.564.493) karena penetapan tahun 2022 sebesar Rp2..846.026.329,00 sedangkan yang diragih sebesar Rp1.294.461.836,00 terdapat selisihnya yang akan menambah piutang sebesar Rp1.551.564.493,00

B. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp2.206.416.790,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1.630.097.483,000 terjadi kenaikan sebesar Rp576.319.307,00 atau 35,35% dengan Rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.4.7 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	122.519.000,00	64.339.000,00	58.180.000,00	90.43
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	132.471.000,00	0,00	132.471.000,00	0,00

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ Penurunan	%
	-LO				
3	Retribusi Pelayanan Pasa-LO	461.000.000,00	483.592.200,00	(22.592.200,00)	(4,67)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	56.252.000,00	56.457.500,00	(205.500,00)	(0,36)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	317.719.063,00	296.738.754,00	20.980.309,00	7,07
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	753.745.227,00	430.070.500,00	323.674.727,00	75,26
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	45.048.000,00	30.451.000,00	14.597.000,00	47,94
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	282.605.000,00	125.476.000,00	157.029.000,00	125,15
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	35.157.500,00	141.472.529,00	(106.315.029,00)	(75,15)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		2.206.416.790,00	1.530.097.483,00	676.319.307,00	35,35

Dengan Rincian Retribusi Daerah - LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO
   Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2022 Rp122.519.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp64.339.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp58.180.000,00 atau 90,43 %
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO
   Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO Tahun 2022 Rp132.471.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp0,00 terdapat peningkatan sebesar Rp132.471.000,00 atau 100,00 %
3. Retribusi Pelayanan Pasar – LO
   Retribusi Pelayanan Pasar – LO Tahun 2022 Rp461.000.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp483.592.200,00 terdapat penurunan sebesar Rp22.592.200,00 atau (4,67%)
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO
   Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2022 Rp56.252.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp56.457.500,00 terdapat penurunan sebesar Rp205.500,00 atau (0,36 %)
5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO
   Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO Tahun 2022 Rp317.719.063,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp296.738.754,00 terdapat kenaikan sebesar Rp20.980.309,00 atau 7,07%
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO
   Retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO Tahun 2022 Rp753.745.227,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp430.070.500,00 terdapat peningkatan sebesar Rp323.674.727,00 atau 75,26%
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO
   Retribusi Tempat Khusus Parkir LO Tahun 2022 Rp45.048.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp30.451.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp14.597.000,00 atau 47,94%
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO Tahun 2022 Rp282.505.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp125.476.000.00 terdapat kenaikan sebesar Rp157.029.000,00 atau 125,15%

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO
   Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO Tahun 2022 Rp35.157.500,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp141.472.529,00 terdapat penurunan sebesar Rp106.315.029.100 atau (75,15%)
10. Retribusi Rumah Potong Hewan – LO
    Retribusi Rumah Potong – LO Tahun 2022 Rp0,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1 500 000,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.500.000,00 atau (100,00 %)

Dari Pendapatan Retribusi Daerah –LO diatas apabila diperbandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah –LRA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.8 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LO

No	Uraian Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi - LRA (Rp)	Realisasi - LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	122.519.000,00	122.519.000,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan –LO	132.471.000,00	132.471.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	418.312.400,00	461.000.000,00	(42.687.600,00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	56.252.000,00	56.252.000,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	507.447.501,00	317.719.063,00	189.728.438,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	753.746.227,00	753.746.227,00	0,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.048.000,00	45.048.000,00	0,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	282.505.000,00	282.505.000,00	0,00
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	35.915.000,00	35.157.500,00	757.500,00
Jumlah		2.354.215.128,00	2.206.416.790,00	147.798.338,00

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapaatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi - LO dikarenakan :

1. Ada perbedaan pada Retribust Perlayanan Pasar sebesar Rp42.687.600,00 dikarenakan adanya penetapan retribusi pelayan pasar sebesar Rp461.000.000,00 sedangkan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp.418.312.400 maka selisihnya Penambahan Piutang Retribusi Pelayan Pasar sebesar Rp42.687.600,00
2. Adanya perbedaan antara pendapatan Retribusi pengendalian menara Telekomonikasi sebesar Rp189.728.438 dikarenakan Penetapan pendapatan retribusi pengendalian menara Telekomonikasi sebesar Rp317.719.063,00 sedangkan realisasi sebesar Rp507.447.501 adanya penerimaan piutang Retribusi pengendalian menara Telekomonikasi tahun sebelum sebesar Rp189.728.438,
3. Adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Banguan sebesar Rp. 757.500.00 adanya penerimaan piutang Izin Mendirikan Bangunan

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp2.415.762.950,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1.700.551.019,00 terdapat kenaikan sebesar Rp715.211.931,00 atau 42,06% .

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp76.690.423.978,04 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp63.404.625.826,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.285.798.152,04 atau 20,95% dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.9 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	1.735.201.100,00	1.327.472.599,00	407.728.501,00	30,71
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	24.925.000,00	45.875.000,00	(20.950.000,00)	(45,67)
4	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.909.852.339,00	2.943.362.914,00	(1.033.710.575,00)	(35,12)
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	123.301.368,00	214.424.202,00	(91.122.836,00)	(42,50)
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	1.300.976,76	0,00	1.300.976,76	0,00
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.376.329.638,00	2.897.849.402,00	2.478.480.236,00	85,53
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	2.299.096.057,00	273.098.383,00	2.025.997.674,00	741,86
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	6.841.059.102,00	6.934.297.585,00	(93.238.483,00)	(1,34)
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	87.658.762,28	92.424.593,00	(4.765.830,72)	(5,16)
11	Pendapatan Denda PBBP2-LO	0,00	21.040,00	(21.040,00)	(100,00)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	4.387.900,00	1.293.941.195,00	(1.289.553.295,00)	(99,66)
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penelanan Biaya Biasa-LO	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(100,00)
14	Pendapatan dari BLUD-LO	58.287.511.857,00	47.378.368.953,00	10.909.152.904,00	23,03
Jumlah		76.690.423.978,04	63.404.625.826,00	13.285.798.152,04	20,95

Perbedaan lain-lain PAD yang sah LRA dengan lain-lain PAD yang sah LO dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.10 Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO

No	Uraian Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi - LRA	Realisasi - LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.735.201.100,00	1.735.201.100,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.909.652.339,00	1.909.652.339,00	0,00
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	122.301.956,00	122.301.300,00	0,00
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	1.300.976,76	(1.300.976,76)
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.376.329.638,00	5.376.329.638,00	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.299.096.037,00	2.299.096.037,00	0,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.841.059.102,00	6.841.059.102,00	0,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	78.066.056,00	87.658.762,28	(9.592.707,28)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.387.800,00	4.387.800,00	0,00
11	Pendapatan dari BLUD	57.952.338.661,00	58.287.511.857,00	(335.175.196,00)
Jumlah		76.344.355.098,00	76.690.423.976,04	(346.068.880,04)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan antara Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA di pendapatan blud LO dikarena sebagai berikut:

1. Adanya Perbedaan sebesar Rp1.300.976,76 karena penambahan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah - Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility
2. Adanya pebedaan sebesar Rp9.592.707,28 karena adanya penambahan piutang denda keterlambatan pelaksaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum
3. Adanya perbedaan sebesar Rp335.175.196,00 dikarenakan adanya realisasi piutang tahun 2022 sebesar Rp5.325.185.447,00 dikuangi dengan penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp5.645.360.643,00 dan ditambah dengan pedapatan diterima dimuka sebesar Rp15.000.000,00

2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2022 terdapat sebesar Rp739.311.478.401,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp695.892.790.590,00 terjadi kenaikan sebesar Rp43.418.687.811,00 atau 6,24% yang mana di dalamnya terdiri dari :

Tabel V.4.11 Rincian Pendapatan Transfer –LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	75.744.717.120,00	52.374.955.481,00	23.369.761.639,00	44,62
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	436.897.360.562,00	437.174.072.000,00	(276.111.438,00)	(0,06)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	163.753.080.880,00	143.293.038.502,00	20.460.042.378,00	14,28
4	DID-LO	0,00	8.567.934.000,00	(8.567.934.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	51.465.719.839,00	52.032.790.607,00	(567.070.768,00)	(1,09)
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.500.000.000,00	2.500.000.000,00	9.000.000.000,00	360,00
Jumlah		739.311.478.401,00	695.892.790.590,00	43.418.687.811,00	6,24

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

   Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2022 sebesar Rp75.744.717.120,00 tahun 2021 Rp52.374.955.481,00 terdapat kenaikan sebesar Rp23.369.761.639,00 atau 44,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	DBH PBB-LO	49.679.511.041,00	31.986.411.209,00	17.693.099.832,00	55,31
2	DBH PPh Pasal 21-LO	5.206.015.840,00	5.372.042.839,00	(165.186.999,00)	(3,07)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	382.828.469,00	173.374.367,00	193.754.121,00	102,27
4	DBH CHT-LO	46.468.129,00	64.153.809,00	(17.631.681,00)	(27,57)
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	516.000,00	(516.000,00)	(100,00)
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	16.215.355.855,00	11.926.609.624,00	4.289.747.231,00	36,20
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	378.155.227,00	20.322.900,00	357.832.327,00	1760,73
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.639.735.356,00	675.332.718,00	964.400.638,00	142,80
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	45.684.974,00	496.646.865,00	(450.961.891,00)	(90,80)
10	DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.674.500.160,00	495.564.051,00	29,59
	Jumlah	**75.744.717.120,00**	**52.374.955.481,00**	**23.369.761.639,00**	**44,62**

2. **Dana Alokasi Umum (DAU)-LO**
Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp436.897.960.562,00 sedang pada Tahun 2021 sebesar Rp437.174.072.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp276.111.438,00 atau (0,06%).

3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO**
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp163.703.080.880,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp143.243.038.502,00 terjadi kenaikan sebesar Rp20.460.042.378,00 atau 14,28% dimana rincian sebagai berikut :

Tabel V.4.13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	947.799.433,00	1.344.471.451,00	(396.672.018,00)	(29,50)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	23.778.036.100,00	12.626.713.818,00	11.151.346.282,00	88,32
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	17.209.987.300,00	5.322.019.892,00	11.976.949.408,00	224,62
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	1.709.658.827,00	(1.709.658.827,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	8.777.853.383,00	199.246.608,00	8.578.606.785,00	4306,52
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	1.518.432.473,00	(1.518.432.473,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	2.679.065.710,00	(2.679.065.710,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	3.686.569.225,00	1.908.130.927,00	1.758.438.298,00	92,16
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	4.074.871.956,00	0,00	4.074.871.956,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	177.990.250,00	0,00	177.990.250,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	510.617.000,00	0,00	510.617.000,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	449.693.375,00	1.160.540.500,00	(716.847.125,00)	(61,77)

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	7.829.347.003,00	(7.829.347.003,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	2.313.638.060,00	(2.313.638.060,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	771.879.933,00	(771.879.933,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	9.243.898.842,00	11.337.420.349,00	(2.093.521.507,00)	(18,47)
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	7.168.090.009,00	4.685.199.200,00	2.482.890.809,00	52,99
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	5.412.783.000,00	3.322.463.000,00	2.090.320.000,00	62,92
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	1.200.076.143,00	0,00	1.200.076.143,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	5.079.724.000,00	(5.079.724.000,00)	(100,00)
21	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	0,00	5.712.069.600,00	(5.712.069.600,00)	(100,00)
22	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	22.813.857.894,00	0,00	22.813.857.894,00	0,00
23	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	49.390.073.742,00	59.924.027.000,00	(10.533.953.258,00)	(17,58)
24	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	750.187.500,00	383.600.000,00	366.587.500,00	90,62
25	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.351.144.000,00	0,00	4.351.144.000,00	0,00
26	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	441.300.000,00	2.454.718.000,00	(2.013.418.000,00)	(82,02)
27	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.360.752.500,00	(1.360.752.500,00)	(100,00)
28	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	146.691.270,00	5.809.405.817,00	(5.662.714.547,00)	(97,47)
29	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.017.879.200,00	1.712.218.000,00	305.661.200,00	17,85
30	DAK Non Fisik-FK2LKM-LO	377.183.000,00	679.222.000,00	(302.039.000,00)	(44,47)
31	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	167.531.750,00	0,00	167.531.750,00	0,00
32	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	535.766.500,00	0,00	535.766.500,00	0,00
33	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.379.279.924,00	(1.379.279.924,00)	(100,00)
	Jumlah	163.703.080.880,00	143.243.038.502,00	20.460.042.378,00	14,28

Perbedaan DAK - LRA dengan DAK - LO dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel V.4.14 Perbedaan DAK – LRA dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	947.799.433,00	947.799.433,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	23.778.066.100,00	23.778.066.100,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	17.308.987.300,00	17.308.987.300,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	8.777.853.393,00	8.777.853.393,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	3.666.569.223,00	3.666.569.223,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	4.074.871.956,00	4.074.871.956,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	177.990.250,00	177.990.250,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	510.817.000,00	510.817.000,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	443.693.375,00	443.693.375,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	9.243.698.842,00	9.243.698.842,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	7.169.080.009,00	7.169.080.009,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	5.412.783.000,00	5.412.783.000,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	1.200.076.143,00	1.200.076.143,00	0,00
14	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	23.971.223.294,00	22.813.657.894,00	1.157.565.400,00
15	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00
16	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	49.390.073.742,00	49.390.073.742,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	750.187.500,00	750.187.500,00	0,00
18	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.351.144.000,00	4.351.144.000,00	0,00
19	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	441.300.000,00	-441.300.000,00
20	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	2.302.200.000,00	146.691.270,00	2.155.508.730,00
21	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.003.500.000,00	0,00	1.003.500.000,00
22	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	146.691.270,00	0,00	146.691.270,00
23	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.017.879.200,00	2.017.879.200,00	0,00
24	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	377.183.000,00	377.183.000,00	0,00
25	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	167.531.750,00	167.531.750,00	0,00
26	DAK Non Fisik-Dana Kelahanan Pangan Dan Pertanian-LO	535.766.500,00	535.766.500,00	0,00
	Jumlah	**168.734.846.280,00**	**163.703.080.880,00**	**5.031.765.400,00**

Dari Tabel diatas terdapat selisih antara DAK – LRA dengan DAK –LO sebesar Rp5.031.765.400 dimana

1. Terdapat pencatatan di LRA sebesar Rp5.473.065.400,00 karena adanya penyaluran dana DAK Non Fisik ke sekolah Swasta yang penyaluran tidak melalui kasda tetapi langsung kepada Rekening sekolah swasta yang bersangkutan.
2. Terdapat Penyaluran DAK Non Fisik dari Kementrian Pendikan sebesar Rp441.300 000,00 yang dicatat di LO

4. **Dana Insentif Daerah (DID) -LO**

Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp8.567.934.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp8.567.934.000,00 atau (100,00%)

5. **Pendapatan Bagi Hasil Pajak– LO**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2022 sebesar Rp51.465.719.839,00 sedang untuk tahun 2021 sebesar Rp52.032.790.607,00 terdapat penurunan sebesar Rp567.070.768,00 atau (1,09%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.15Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak– LO

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	12.406.464.179,00	11.744.730.707,00	661 733.472,00	5,63
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	6 297.350.941,00	6.281.548 547.00	(54.197.706.00)	(0.87)
3	Pendapatan Bagi Hasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19 321.416.506,00	22.212,441.798.00	(2.891.022,892 00)	(13,02)
4	Pendapatan Bagi Hasi Pajak Air Permukaan- LO	292.324.351,00	303.422.923.00	(11.098,572,00)	(3.66)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	13.236.181.562.00	11.510.646.632.00	1.727.514.930.00	15.01
	Jumlah	51.465.719.839.00	52.032.790.607,00	(567.070.768,00)	(1,09)

6. **Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 sebesar Rp11.500.000.000,00 sedang tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 360%

3. **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Tahun 2022 sebesar Rp61.737.651.538,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp52.666.616.485,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.071.035.053,00 atau 17,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	48.615.844.132,00	29.026.073.750,00	19.589.770.382,00	67,49
2	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat – LO	5.229.130.000,00	750.000.000,00	4.529.130.000,00	647,02
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	7.892.677.406,00	0,00	7.892.677.406,00	0,00
4	Dana Bos-LO	0,00	22.940.542.735,00	(22.940.542.735,00)	(100,00)
Jumlah		61.737.651.538,00	52.666.616.485,00	9.071.035.053,00	17,22

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA sebagai mana dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.4.17 Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Realisas LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dan Pemerintah – LO	0,00	48.615.844.132,00	(48.615.844.132,00)
2	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat – LO	0,00	5.229.130.000,00	(5.229.130.000,00)
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	7.828.208.106,00	7.892.677.406,00	(64.469.300,00)
	Jumlah	7.828.208.106,00	61.737.651.538,00	(53.909.443.432,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan tersebut pada Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp48.615.844.132,00 merupakan bantuan pemerintah pusat dengan rincian:

No	URAIAN	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	181.785.000,00
2	RSUD	481.289.890,00
3	BPBD	869.944.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	515.932.750,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	46.776.892.492,00
	Jumlah	48.615.844.132,00

2. Pendapatan Hibah dari Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp5.229.130.000,00 berupa hibah tanah dari masyarakat ke kabupaten Solok Sekatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sebesar Rp750.000.000,00 dan Kecamatan Sungai Pagu sebesar Rp4.479.130.000,00
3. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp64.469.300,00 karen ada penerimaan piutang sebesar Rp90.586.200.00 dan adanya piutang tahun 2022 sebesar Rp173.275.000,00

5.4.2 BEBAN	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	793.698.394.937,27	788.911.631.669,70

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mempedomani Peraturan Kementerian Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan implementasi Permendagri ini terdapat penyesuaian dalam penyajian Laporan Operasional Tahun 2022.

Jumlah Beban Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp793.698.394.937,27 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp788.911.631.669,70 mengalami kenaikan sebesar Rp4.786.763.267,57 atau (0,61%) yang merupakan Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.18 Rincian Beban

NO	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Pegawai - LO	380,297,198,562.34	379,803,845,441.00	493,353,121.34	0.13
2	Beban Persediaan	82,071,288,261.75	76,259,592,782.60	5,811,704,482.15	7.61
3	Beban Jasa	85,078,891,312.52	86,346,686,796.45	(1,267,795,483.93)	(1.47)
4	Beban Pemeliharaan	6,906,731,757.00	4,040,887,392.50	2,865,844,364.50	71.65
5	Beban Perjalanan Dinas	41,087,226,641.00	39,692,430,561.00	1,394,776,080.00	3.51
6	Beban Hibah	5,965,116,904.00	8,036,995,995.00	(2,071,879,091.00)	(25.79)
7	Beban Bantuan Sosial	0.00	145,686,080.00	(145,686,080.00)	(100.00)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	137,472,897,465.29	137,652,250,857.63	(179,353,392.34)	(0.13)
9	Beban Penyisihan Piutang	799,037,143.85	4,344,677,550.52	(3,545,640,406.67)	(81.61)
10	Beban Transfer	49,767,550,012.00	47,924,603,986.00	1,842,946,026.00	3.22
11	Beban Lain-lain	4,592,976,904.72	4,694,979,227.00	(101,996,322.28)	(2.17)
Jumlah		793,698,394,937.27	788,911,631,669.70	4,786,763,267.57	0.61

Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut :

A. **BEBAN PEGAWAI - LO**

Beban Pegawai Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp380.297.198.562,34 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp379.803.845.441.00 terjadi Kenaikan sebesar Rp193.353.121,34 atau 0,13% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.4.19Rincian Beban Pegawai-LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	224.046.460.925,00	220.803.246.133,00	3.243.214.792,00	1,47
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	146.098.384.744,71	148.317.265.807,00	(2.218.880.662,29)	(1,50)
3	Beban Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	9.333.528.903,00	9.911.549.575,00	(583.002.772,00)	(5,93)
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	317.890.089,03	334.140.126,00	(10.252.036,97)	(4,86)
5	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.876.000,00	437.544.000,00	73.332.000,00	16,75
Jumlah		380.297.198.562,34	379.803.845.441,00	493.353.121,34	0,13

Dari tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Rincian beban Gaji dan Tunjangan – LO**

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan - LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp224.046.460.925,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp220.803.246.133,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.243.214.792,00 atau 1,47 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.20Rincian Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan –LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Gaji PNS / Uang Representasi – LO	160.135.004.611,00	162.971.550.334,00	(2.836.545.690,00)	(1,74)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	5.715.086.200,00	0,00	5.715.086.200,00	0,00
3	Beban Tunjangan Keluarga – LO	15.802.598.138,00	16.401.553.419,00	(598.932.281,00)	(3,65)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	583.947.776,00	0,00	583.947.776,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan – LO	3.797.580.900,00	4.324.420.850,00	(526.839.950,00)	(12,18)
6	Beban Tunjangan Fungsional – LO	10.455.039.400,00	10.268.004.000,00	187.035.400,00	1,82
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	2.675.085.000,00	3.010.707.772,00	(335.622.772,00)	(11,15)
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	384.310.000,00	0,00	384.310.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Beras – LO	10.087.526.640,00	10.622.201.520,00	(534.674.880,00)	(5,03)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	434.737.260,00	0,00	434.737.260,00	0,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	207.434.083,00	116.915.222,00	90.518.887,00	77,42
12	Beban Pembulatan Gaji – LO	2.425.139,00	2.510.969,00	(85.830,00)	(3,42)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	96.807,00	0,00	96.807,00	0,00

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	11.716.590.031,00	11.778.844.426,00	(62.254.395,00)	(0,53)
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	239.525.008,00	0,00	239.525.008,00	0,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	695.087.717,00	0,00	695.087.717,00	0,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	54.396.033,00	0,00	54.396.033,00	0,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	995.955.297,00	0,00	995.955.297,00	0,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	86.056.846,00	0,00	86.056.846,00	0,00
20	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	915.042.233,00	(915.042.233,00)	(100,00)
21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	391.490.388,00	(391.490.388,00)	(100,00)
Jumlah		224.046.460.925,00	220.803.246.133,00	3.243.214.792,00	1,47

2. **Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO**

Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS – LO Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp146.098.384.744,71 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp148.317.265.607,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.218.880.862,29 atau (1,50%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.21 Rincian Beban Pegawai Tambahan Penghasilan PNS –LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	73.796.477.813,50	71.312.043.979,00	2.493.433.834,50	3,48
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	85.285.000,00	0,00	85.285.000,00	100,00
3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.737.500,00	0,00	2.737.500,00	100,00
4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	125.143.500,00	0,00	125.143.500,00	100,00
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	100,00
6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	282.576.729,88	0,00	282.576.729,88	100,00
7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	81.100.000,00	0,00	81.100.000,00	100,00
8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	42.340.000,00	0,00	42.340.000,00	100,00
9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	100,00

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan				
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	4.891.000,00	0,00	4.891.000,00	100,00
11	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	100,00
12	Beban TPG PNSD	52.156.718.813,00	0,00	52.156.718.813,00	100,00
13	Beban TKG PNSD	4.346.927.100,00	0,00	4.346.927.100,00	100,00
14	Beban Tamsil Guru PNSD	1.015.500.000,00	0,00	1.015.500.000,00	100,00
15	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.806.542.288,33	0,00	6.806.542.288,33	100,00
16	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.047.360.000,00	0,00	4.047.360.000,00	100,00
17	Beban Honorarium Pengacaan Barang/Jasa	872.070.000,00	0,00	872.070.000,00	100,00
18	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	396.250.000,00	0,00	396.250.000,00	100,00
19	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya – LO	0,00	77.005.221.628,00	(77.005.221.628,00)	(100,00)
	JUMLAH	146.098.364.744,71	148.317.265.607,00	(2.218.880.862,29)	(1,50)

3. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.323.586.803,00 sedang tahun 2021 sebesar Rp. 9.911.649.575,00 terdapat penurunan sebesar Rp.588.062.772,00 atau (5,93%) dengan rincian sebagai berikut;

Tabel V.4.22Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Uang Representasi DPRD	661.540.000,00	661.540.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	56.677.500,00	54.766.500,00	911.400,00	1,66
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	65.577.060,00	55.215.000,00	10.362.060,00	18,77
4	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.232.500,00	814.233.000,00	0,00	0,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.859.300,00	83.554.800,00	304.500,00	0,36
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	7.049.175,00	(7.049.175,00)	(100,00)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	0,00
9	Beban Tunjangan Reses – LO	472.900.000,00	472.900.000,00	0,00	0,00

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50 083.107,00	49.949.720,00	83.407,00	0,17
11	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	44.978.032,00	0,00	44.978.032,00	0,00
12	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	966 376,00	0,00	966.376,00	0,00
13	Beban Jaminan Kematian DPRD	2 599 128,00	0,00	2.599.128,00	0,00
14	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	1.782.291.500,00	0,00	1.782.291.500,00	0,00
15	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	2.011.400.000,00	(2.011.400 000,00)	(100,00)
16	Beban Tunjangan Transportasi – LO	3.471.300.000,00	3.866 900.000,00	(395.500.000,00)	(10,00)
17	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	6.510.000,00	(6.510.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	**9.323.586.803,00**	**9.911.649.575,00**	**(588.062.772,00)**	**(5,93)**

4. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 adalah sebesar Rp317.890.089,63 sedang tahun 2021 sebesar Rp334.140.126,00 terdapat penurunan sebesar Rp16.250.036,37 atau (4,86%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.23 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	46 800.000,00	7.800 000,00	16,67
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	5 598 000,00	954.000,00	17,04
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.240 000,00	14.040.000,00	16,67
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	5.214.240,00	0,00	0,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	448.414,00	442.299,00	6.115,00	1,38
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00	1.060,00	140,00	13,21
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5 010.720,00	0,00	5.010.720,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	102 960,00	0,00	102.960,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	308.880,00	0,00	308.880,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	145.582.675,63	191.844.527,00	(46.281.851,37)	(24,12)
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Rembusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.809.000,00	0,00	1.809 000,00	0,00
	JUMLAH	**317.890.089,63**	**334.140.126,00**	**(16.250.036,37)**	**(4,86)**

5. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH – LO

Beban Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH – LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp510.876.000,00 sedang tahun 2021 sebesar Rp437.544.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp73.332.000,00 atau 16,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.24 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	210.880.000,00	326.664.000,00	(215.784.000,00)	(66,05)
2	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	309.996.000,00	110.880.000,00	289.116.000,00	260,75
	JUMLAH	510.876.000,00	437.544.000,00	73.332.000,00	16,76

Realisasi belanja pegawai di LRA adalah sebesar Rp375.198.145.727,83 Sementara itu realisasi beban pegawai di LO adalah sebesar Rp380.297.198.562,34. Terdapat perbedaan sebesar Rp5.099.052.834,51 Perbedaan belanja pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel V.4.25 Perbedaan Belanja Pegaawai- LRA dengan Beban Pegaawai-LO

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH
1	Gaji dan tunangan	223.722.201.461,00	224.046.460.925,00	(324.259.464,00)
2	Tambahan penghasilan PNS	141.357.883.289,83	146.098.384.744,71	(4.740.495.354,88)
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.323.586.803,00	9.323.586.803,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	283.592.074,00	317.890.089,63	(34.298.015,63)
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.876.000,00	510.876.000,00	0,00
Jumlah		375.198.145.727,83	380.297.198.562,34	(5.099.052.834,51)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaaan tersebut sebagai berikut:

a. Gaji Dan Tunjangan

Perbedaan gaji dan tunjangan sebesar Rp324.259.464,00 dikarenakan adanya pembayaran utang beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp 682.460.350,00 yang mengurangi Beban Gaji dan tunjangan - LO dan adanya utang beban pegawai yang akan muncul tahun 2022 sebesar Rp 1.006.719.814,00 yang akan dibayar tahun 2023 yang akan menambah Beban Gaji dan Tunjangan – LO.

b. Tambahan Penghasilan PNS

Perbedaan sebesar Rp4.740.495.354,88 dikarenakan adanya reklasifikasi beban dan adanya pembayaran utang tahun lalu yang mana menguragi beban sebesar Rp 9.130.934.217,00 dan adanya utang beban beban tahun 2022 yang akan dibayar tahun 2023 yang menambah beban sebesar Rp 13.871.429.571,88

c. **Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**
Perbedaan sebesar Rp34.298.015.63 dikarenakan adanya utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang akan menambah beban

B. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp82.071.298.264.75 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp76.269.593.782.60 terjadi kenaikan sebesar Rp5.801.704.482,15 atau 7,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.26 Rincian Beban persediaan

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	82,039,707,735.75	76,241,511,750.60	5,797,195,985.15	7.60
2	Beban Bahan Tak Pakai Habis	32,590,529.00	28,082,032.00	4,508,497.00	16.05
Jumlah		82,071,298,264.75	76,269,593,782.60	5,801,704,482.15	7.61

Dari tabel diatas Rincian Beban persediaan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai beikut

a. Beban Bahan Pakai Habis
Beban Bahan Pakai Habis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebesar Rp82.038.707.735,75 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp76.241.511.750,60 terjadi kenaikan sebesar Rp5.797.195.985,15 atau 7,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.27 Rincian Beban Bahan Pakai Habis

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.195.723.248,00	1.474.474.451,00	(278.751.203,00)	(18,91)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	562.938.977,00	298.851.834,00	262.087.143,00	87,69
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.891.440.925,45	4.300.398.529,00	591.042.396,45	13,74
4	Beban Bahan-Bahan Baku	9.045.000,00	952.821.305,00	(943.776.305,00)	(99,05)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	252.574.000,00	202.697.434,00	49.876.566,00	9,81
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	799.629.400,00	1.168.206.426,00	(368.577.026,00)	(31,55)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	130.176.600,00	16.337.505,00	113.839.095,00	696,80
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	13.112.225.238,00	6.291.701.523,60	6.820.523.714,40	108,41
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.826.360.288,00	2.619.547.162,00	206.813.126,00	7,90
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	250.549.959,00	0,00	250.549.959,00	0,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.332.800,00	0,00	1.332.800,00	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	16.960.000,00	(16.960.000,00)	(100,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.540.000,00	13.670.000,00	(10.130.000,00)	(74,10)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.876.465.037,92	3.742.295.933,00	134.169.104,92	3,59
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.471.322.186,00	2.099.443.023,00	(628.120.881,00)	(29,92)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.356.288.146,00	6.212.520.262,00	(856.232.116,00)	(13,78)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	283.615.700,00	381.012.608,00	(97.396.908,00)	(25,56)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.398.000,00	1.400.000,00	10.998.000,00	785,57
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	110.075.275,00	0,00	110.075.275,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	785.159.285,90	686.806.192,00	98.353.093,90	14,32
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.197.600,00	23.103.000,00	(21.905.400,00)	(94,82)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	225.329.949,00	269.919.256,00	(44.589.308,00)	(16,53)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata	120.744.268,00	74.890.000,00	45.854.268,00	61,23
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	566.138.841,48	85.467.040,00	480.671.801,48	562,41
26	Beban Obat-Obatan-Obat	11.118.231.514,00	8.413.151.314,00	2.705.080.200,00	32,15
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.687.215.041,00	1.359.427.309,00	327.835.732,00	24,12
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.893.894.629,00	19.973.181.547,00	(5.089.286.918,00)	(25,48)
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	669.792.293,00	872.172.361,00	(202.380.068,00)	(23,20)
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.451.832,00	70.000.000,00	451.832,00	0,65
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.963.397.527,00	728.474.228,00	1.234.923.299,00	169,52

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	176.338.675,00	208.059.500,00	(31.720.825,00)	(15,25)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	64.558.000,00	323.000,00	64.235.000,00	19887,00
34	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	118.500,00	0,00	118.000,00	0,00
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.306.889.305,00	4.041.264.430,00	265.595.875,00	6,57
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.909.228.618,00	1.436.823.093,00	472.405.525,00	32,88
37	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	80.781.000,00	822.338.844,00	(741.557.844,00)	(90,18)
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.345.922.080,00	970.639.054,00	375.283.026,00	38,68
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	139.538.750,00	1.348.792.943,00	(1.209.254.193,00)	(89,66)
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.208.416.305,00	3.418.093.708,00	790.322.597,00	23,12
41	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	356.513.000,00	267.000.000,00	89.513.000,00	33,53
42	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	424.612.500,00	323.375.000,00	101.237.500,00	31,31
43	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	15.744.000,00	(5.744.000,00)	(36,48)
44	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	672.727.690,00	287.708.425,00	385.019.265,00	133,82
45	Beban Pakaian Penyelenggaraan	450.000,00		450.000,00	0,00
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	71.750.000,00	53.249.999,00	18.500.001,00	34,74
47	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	22.013.001,00	(22.013.001,00)	(100,00)
48	Beban Pakaian Adat Daerah	145.049.999,00	97.350.000,00	47.699.999,00	49,00
49	Beban Pakaian Batik Tradisional	105.400.000,00	56.142.650,00	49.257.350,00	87,74
50	Beban Pakaian Olahraga	695.950.264,00	271.951.825,00	424.098.439,00	156,00
51	Beban Pakaian Paskibraka	117.000.000,00	93.500.000,00	23.500.000,00	25,13
52	Beban Pakaian Jas/Safari	0.000.000,00	159.252.000,00	(157.252.000,00)	(98,37)
	Jumlah	82.038.707.735,75	78.241.511.750,60	5.797.195.985,15	7,60

b. Beban Bahan Tak Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebesar Rp32.590.529,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp28.082.032,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.508.497,00 atau 16,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.28 Rincian Beban Bahan Tak Pakai Habis

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	20.456.904,00	0,00	20.456.904,00	0,00
2	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.616.625,00	28.082.032,00	(16.465.407,00)	(58,63)
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
	Jumlah	32.590.529,00	28.082.032,00	4.508.497,00	16,05

C. BEBAN JASA

Beban Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp85.078.381.312,52 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp86.345.686.796,45 terjadi penurunan sebesar Rp1.267.305.483,93 atau (1,47%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.29 Rincian Beban Jasa

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Jasa Kantor	58.171.290.161,52	63.739.247.798,45	(5.567.957.636,93)	(8,74)
2	Beban Premi Asuransi	18.095.570.500,00	15.397.374.570,00	2.698.195.930,00	17,52
3	Beban Sewa Tanah	1.950.000,00	16.250.000,00	(14.300.000,00)	(88,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.079.747.025,00	992.137.393,00	87.609.632,00	8,83
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	989.672.864,00	1.137.792.664,00	(148.119.780,00)	(13,02)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	38.458.334,00	(38.458.334,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultasi	2.609.926.127,00	1.480.998.182,00	1.128.907.945,00	76,23
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)		2.700.000,00	(2.700.000,00)	(100,00)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.082.000.000,00	70.900.000,00	1.011.100.000,00	1426,09
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.394.129.430,00	1.913.272.357,00	(519.142.867,00)	(27,13)
11	Beban Ganti yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	598.500.000,00	720.982.930,00	(122.482.930,00)	(16,99)
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.055.615.125,00	837.572.598,00	218.042.527,00	26,03
Jumlah		85.078.381.312,52	86.345.686.796,45	(1.267.305.483,93)	(1,47)

Dan rincian beban jasa diatas dapat pula dirinci beban jasa sebagai berikut.

1. **Beban Jasa kantor – LO**

Beban Jasa Kantor tahun 2022 sebesar Rp58.171.290.161,52 sedang tahun 2021 sebesar 63.739.247.798,45 terdapat penurunan sebesar Rp.5.567.957.,93 atau (8,74%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.30 Rincian Beban Jasa Kantor

No	URAIAN	2022	2021	Penurunan/ kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.171.863.000,00	1.621.605.000,00	550.258.000,00	33,93
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.321.791,12	1.063.587.500,00	136.734.291,12	12,85
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Bendara	0,00	44.800.000,00	(44.800.000,00)	(100,00)
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	489.261.496,00	241.509.120,00	247.752.376,00	102,59
5	Beban Honorarium Rohaniwan	104.900.000,00	36.450.000,00	68.350.000,00	187,52
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	350.000,00	4.685.000,00	(4.335.000,00)	(92,53)
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	30.932.000,00	0,00	30.932.000,00	0,00
8	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.040.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	104,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	73.100.000,00	0,00	73.100.000,00	0,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	442.600.000,00	446.000.000,00	(3.400.000,00)	(0,76)
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.580.364.000,00	1.935.479.000,00	644.885.000,00	33,32
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	20.119.981.253,40	18.213.510.202,95	1.906.471.050,45	10,46
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	24.330.222,00	25.152.000,00	(821.778,00)	(3,27)
14	Beban Jasa Tenaga Perangkatan Prasarana dan Sarana Umum	1.492.147.500,00	329.005.000,00	1.163.142.000,00	353,53

No	URAIAN	2022	2021	Penurunan/ kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
15	Beban Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	699.400.000,00	234.950.000,00	464.550.000,00	197,81
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	460.200.000,00	182.000.000,00	278.200.000,00	152,86
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	26.000.000,00	10.400.000,00	15.600.000,00	150,00
19	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	29.400.000,00	29.200.000,00	200.000,00	0,68
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	384.674.000,00	10.500.000,00	374.174.000,00	3563,56
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.249.940.000,00	8.973.409.000,00	(5.723.469.000,00)	(63,78)
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	270.350.000,00	74.400.000,00	195.950.000,00	263,37
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	177.385.320,00	264.871.885,00	(87.486.565,00)	(33,03)
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.725.364.050,00	643.824.838,00	1.081.539.212,00	167,99
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.886.797.400,00	2.576.689.000,00	309.926.400,00	12,03
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.444.550.000,00	1.007.647,756,00	436.702.344,00	43,33
27	Beban Jasa Tenaga Supir	1.251.400.000,00	1.045.100.000,00	206.300.000,00	19,74
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	1.386.550.000,00	496.900.000,00	889.650.000,00	178,44
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.832.130.459,00	2.112.210.319,00	(280.079.860,00)	(13,26)
30	Beban Jasa Jun Perlombaan/Pertandingan	62.020.000,00	20.250.000,00	42.370.000,00	209,23
31	Beban Jasa Tata Rias	23.200.000,00	16.500.000,00	6.700.000,00	40,61
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	821.984.000,00	481.030.000,00	340.954.000,00	70,88
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	132.915.745,00	178.971.709,00	(46.055.964,00)	(25,73)
34	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	5.360.000,00	(5.360.000,00)	(100,00)
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
36	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	45.600.000,00	416.540.000,00	(370.940.000,00)	(89,05)
37	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	153.318.000,00	0,00	153.318.000,00	0,00
38	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	5.550.000,00	(5.550.000,00)	(100,00)

No	URAIAN	2022	2021	Penurunan/ kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	43.375.000,00	(13.375.000,00)	(30,84)
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	11.814.000,00	1.375.635,00	10.438.365,00	758,80
41	Beban Jasa Kalibrasi	54.999.500,00	99.809.000,00	(44.809.500,00)	(44,90)
42	Beban Jasa Pengolahan Sampah	76.600.000,00	112.887.800,00	(36.287.800,00)	(32,15)
43	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
44	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	147.463.000,00	26.398.000,00	121.065.000,00	458,61
45	Beban Tagihan Telepon	302.054.143,00	416.250.441,00	(114.196.298,00)	(27,45)
46	Beban Tagihan Air	430.476.466,00	410.740.147,00	19.736.319,00	4,80
47	Beban Tagihan Listrik	6.884.148.558,00	1.934.095.389,00	4.950.053.169,00	255,94
48	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	337.825.000,00	361.750.000,00	(23.925.000,00)	(6,61)
49	Beban Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	2.604.477.086,00	2.673.075.126,00	(68.598.040,00)	(2,57)
50	Beban Paket/Pengiriman	11.480.953,00	3.010.500,00	8.470.453,00	281,36
51	Beban Penambahan Daya	10.123.845,00	10.490.800,00	(366.755,00)	(3,50)
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	270.145.370,00	231.137.321,50	39.008.048,50	16,88
53	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	4.278.444.645,00	(4.278.444.645,00)	(100,00)
54	Beban Lembur	1.165.360.548,00	409.642.000,00	755.718.548,00	184,48
55	Beban Medical Check Up	37.642.956,00		37.642.956,00	0,00
56	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	2.247.736.500,00	(2.247.736.500,00)	(100,00)
57	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	7.729.662.064,00	(7.729.662.064,00)	(100,00)
	Jumlah	**58.171.290.161,52**	**63.739.247.798,45**	**(5.567.957.636,93)**	**(8,74)**

2. Beban Jasa Premi Asuransi – LO

Beban Jasa Premi Asuransi tahun 2022 sebesar Rp18.095.570.500,00 sedang untuk tahun 2021sebesar Rp15.397.374.570,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.698.195.930,00 atau 17,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.31 Rincian Beban Jasa Premi Asuransi – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	564.862.520,00	555.907.520,00	8.954.980,00	1,61
2	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PB	0,00	14.816.467.050,00	(14.816.467.050,00)	(100,00)
3	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.515.708.000,00	0,00	17.515.708.000,00	0,00
4	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
	Jumlah	18.095.570.500,00	15.397.374.570,00	2.698.195.930,00	17,52

3. **Beban Sewa Tanah**

Beban sewa tanah tahun 2022 sebesar Rp1.950.000,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp16.250.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp14.400.000,00 atau 88,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.32 Rincian Beban Sewa Tanah – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.200.000,00	13.500.000,00	(12.300.000,00)	(91,11)
2	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3	Beban Sewa Tanah Fasi Lainnya	0,00	2.750.000,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.950.000,00	16.250.000,00	(14.300.000,00)	(88,00)

4. **Beban Sewa Peralatan dan Mesin – LO**

Beban Sewa Sewa Peralatan dan Mesin LO tahun 2022 sebesar Rp1.079.747.025,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp992.137.393,00 terdapat kenikan sebesar Rp87.609.932,00 atau 8,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.33Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Sewa Alat Pengangkat	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2	Beban Sewa Electric Generating Set	9.275.000,00	0,00	9.275.000,00	0,00
3	Beban Sewa Excavator	0,00	279.920.000,00	(279.920.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	20.850.001,00	(20.850.001,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan	99.744.650,00	107.890.000,00	(8.145.400,00)	(7,55)
6	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.835.000,00	0,00	7.835.000,00	0,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	123.900.000,00	165.359.092,00	(41.459.092,00)	(25,07)
8	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	400.191.415,00	325.236.000,00	74.955.415,00	23,05
9	Beban Sewa Alat Pendingin	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	0,00
10	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.082.900,00	0,00	46.082.900,00	0,00
11	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	144.296.000,00	0,00	144.296.000,00	0,00
12	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	65.440.000,00	0,00	65.440.000,00	0,00
13	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
14	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.932.310,00	950.000,00	982.310,00	100,34
15	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00
16	Beban Sewa Peralatan Umum	172.412.800,00	89.432.300,00	82.980.500,00	92,79
17	Beban Sewa Personal Computer	900.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	(87,50)
18	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.079.747.025,00**	**992.137.393,00**	**87.609.632,00**	**8,83**

5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO

Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO tahun 2022 sebesar Rp989.672.884,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp1.137.792.664,00 terdapat penurunan Rp148.119.780,00 atau (13,02%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.34 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	114.000.000,00	199.550.000,00	(85.550.000,00)	(42,87)
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	241.785.000,00	299.082.000,00	(57.297.000,00)	(19,16)
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
4	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	161.582.384,00	147.935.182,00	13.647.202,00	9,23
5	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	373.270.500,00	319.010.667,00	54.259.333,00	17,01
6	Beban Sewa Hotel	97.585.500,00	157.400.000,00	(59.814.500,00)	(38,00)
7	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	14.814.815,00	(14.814.815,00)	(100,00)
	Jumlah	**989.672.884,00**	**1.137.792.664,00**	**(148.119.780,00)**	**(13,02)**

6. Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi – LO

Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi – LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp36.458.334,00 terdapat penurunan Rp36.458.334,00 atau (100%) dengan rincian sebagai berikut:

7. **Beban Jasa Konsultasi – LO**

Beban Jasa Konsultasi – LO tahun 2022 sebesar Rp2.609.906.127,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1.480.998.182,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.128.907.945,00 atau 76,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.35 Rincian Beban Jasa Konsultasi - LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Konsultansi Perencangan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	763.194.000,00	9.750.000,00	753.444.000,00	7727,63
2	Beban Jasa Konsultansi Perencangan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	24.800.000,00	(24.800.000,00)	(100,00)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencangan Penataan Ruang-Jasa Perencangan Wilayah	0,00	549.645.000,00	(549.645.000,00)	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	14.893.750,00	14.845.000,00	48.750,00	0,33
5	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	127.567.167,00	0,00	127.567.167,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	254.625.000,00	(254.625.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	84.000.000,00	(84.000.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Kegiatan	521.963.210,00	0,00	521.963.210,00	100,00
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	100,00
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	59.677.900,00	440.538.182,00	(400.860.282,00)	(90,99)
11	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.042.910.100,00	102.795.000,00	940.115.100,00	914,55
12	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	100,00
	Jumlah	2.609.906.127,00	1.480.998.182,00	1.128.907.945,00	76,23

8. **Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) – LO**

Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp2.700.000,00

9. **Beban Beasiswa – LO**

Beban Beasiswa Pendidikan PNS – LO tahun 2022 sebesar Rp1.082.000.000,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp70.900.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.011.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.36 Rincian Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0.00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0.00	30.900.000,00	(30.900.000,00)	(100,00)
3	Beban Beasiswa	1.082.000.000,00	0.00	1.082.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.082.000.000,00	70.900.000,00	1.011.100.000,00	1426,09

10. **Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS – LO**

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS – LO tahun 2022 sebesar Rp1.394.129.490,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.913.272.357,00 terdapat penurunan sebesar Rp519.142.867,00 atau 27,13% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.37 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS- LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	394.375.490,00	1.330.232.357,00	(235.916.867,00)	(70,35)
2	Beban Bimbingan Teknis	294.914.000,00	498.580.000,00	(203.666.000,00)	(40,85)
3	Beban Diklat Kepemimpinan	704.840.000,00	84.460.000,00	620.440.000,00	735,12
	Jumlah	1.394.129.490,00	1.913.272.357,00	(519.142.867,00)	(27,13)

11. **Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO**

Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO tahun 2022 sebesar Rp598.500.000,00 sedangkan tahun 20221 sebesar Rp720.982.900,00 terdapat penurunan sebesar Rp122.482.900,00 atau (16,99%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.38 Rincian Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	328.500.000,00	321.340.000,00	7.160.000,00	2,23
2	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	270.000.000,00	399.642.900,00	(129.642.900,00)	(32,44)
	Jumlah	598.500.000,00	720.982.900,00	(122.482.900,00)	(16,99)

12. Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO

Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat- LO tahun 2022 sebesar Rp1.055.615.125,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp837.572.598,00 terdapat kenaikan sebesar Rp218.042.527,00 atau 26,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.39 Rincian Beban Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat-LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.044.815.125,00	806.209.836,00	238.605.289,00	29,60
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	31.362.762,00	(31.362.762,00)	(100,00)
3	Belanja Bantuan Fasilitasi Pem. Astransi Pemerintah	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
	Jumlah	**1.055.615.125,00**	**837.572.598,00**	**218.042.527,00**	**26,03**

D. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.866.731.757,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.000.887.392,50 terjadi kenaikan sebesar Rp2.865.844.364,50 atau 71,63 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.40 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	1.629.731.457,00	1.698.241.954,50	(68.510.497,50)	(4,03)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.086.887.572,00	1.744.854.421,00	342.033.151,00	19,60
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.137.922.728,00	538.382.100,00	2.599.540.628,00	482,84
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.190.000,00	19.408.917,00	(7.218.917,00)	(37,19)
	Jumlah	**6.866.731.757,00**	**4.000.887.392,50**	**2.865.844.364,50**	**71,63**

Beban Pemeliharaan diatas dapat pula dirinci sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO tahun 2022 sebesar Rp1.629.731.457,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp1.698.241.954,50 terdapat penurunan sebesar Rp.68.510.497,50 atau (4,03%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.41 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	47.019.530,00	(47.019.530,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	259.178.230,00	0,00	259.178.230,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	37.090.660,00	0,00	37.090.660,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	178.034.116,50	(178.034.116,50)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	105.603.126,00	0,00	105.603.126,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.302.783,00	0,00	1.302.783,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	7.301.000,00	10.279.900,00	(2.978.900,00)	(28,98)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.182.400,00	0,00	10.182.400,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.070.000,00	0,00	11.070.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	874.273.358,00	1.025.286.353,00	(151.012.995,00)	(14,73)
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.256.000,00	800.000,00	54.456.000,00	6807,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	74.537.050,00	0,00	74.537.050,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Perencar Lainnya				
17	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	404.887.055,00	(404.887.055,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	86.260.550,00	6.210.000,00	80.050.550,00	1289,06
20	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Kesenian	4.650.000,00	4.500.000,00	150.000,00	3,33
22	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.975.000,00	600.000,00	19.375.000,00	3229,17
24	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.825.000,00	1.125.000,00	700.000,00	62,22
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	23.716.800,00	0,00	23.716.800,00	0,00
30	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	10.610.000,00	0,00	10.610.000,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	793.500,00	0,00	793.500,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.629.731.457,00	1.698.241.954,50	(68.510.497,50)	(4,03)

2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO tahun 2022 sebesar Rp2.086.887.572,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp1.744.854.421,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.342.033.151,00 atau 19,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.42 Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.015.755.714,00	892.477.902,00	1.023.275.812,00	114,66
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	55.945.000,00	850.376.519,00	(794.431.519,00)	(93,42)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.985.000,00	0,00	24.985.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	52.863.000,00	0,00	52.863.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.045.000,00	2.000.000,00	(955.000,00)	(47,75)
11	Beban Pemeliharaan Tugu Tilik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	13.911.858,00	0,00	13.911.858,00	0,00
	Jumlah	**2.086.887.572,00**	**1.744.854.421,00**	**342.033.151,00**	**19,60**

3. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO tahun 2022 sebesar Rp3.137.922.728,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp538.382.100,00 perdapat kenaikan Rp.2.599.540.628,00 atau 482,84% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.4.43 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.635.325.342,00	399.778.200,00	1.235.547.142,00	309,05
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.435.289.261,00	0,00	1.435.289.261,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	100,00
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	6.689.000,00	0,00	6.689.000,00	100,00
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	54.120.125,00	133.600.900,00	(79.479.775,00)	(59,49)
8	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	3.137.922.728,00	538.382.100,00	2.599.540.628,00	482,84

4. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya – LO

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya – LO tahun 2022 sebesar Rp12.190.000,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp19.408.917,00 terdapat penurunan sebesar Rp7.218.917,00 atau 37,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.44 Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya – LO

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	9.250.000,00	19.408.917,00	(10.158.917,00)	(52,34)
2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00
	Jumlah	12.190.000,00	19.408.917,00	(7.218.917,00)	(37,19)

Perbedaan antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebagai mana Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.45 Perbedaan Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA

No	URAIAN	LRA	LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	1.879.271.791,48	1.629.731.457,00	249.540.334,48
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.798.163.528,00	2.086.887.572,00	711.275.950,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	3.162.422.728,00	3.137.922.728,00	15.500.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainya	12.190.000,00	12.190.000,00	0,00
Jumlah		7.843.048.047,48	6.866.731.757,00	976.316.290,48

Dari Tabel diatas terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan sebesar Rp249.540.334,48 karena adanya pengurangan beban pemeliharaan-LO kapitalisasi ke asset Tetap Peralatan dan mesin.
2. Adanya perbedaan sebesar Rp711.275.956 karena adanya pengurangan beban pemeliharaan gedung dan bangunan kapitalisasi ke asset tetap Gedung dan Bangunan.
3. Adanya perbedaan sebesar Rp.15.500.000,00 karea adanya pengurangan beban pemeliharaan - LO kapitalisir ke asset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan.

E. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp41.087.206.641,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp39.692.430.561,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.394.776.080.00 atau 3,51 % dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.46 Rincian Beban Perjalanan Dinas- LO

No	Uraian	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.752.489.986.00	6.820.157.457,00	2.932.331.209,00	43,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	94.760.000,00	664.123.000.00	(569.363.000,00)	(85,73)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.228.357.976.00	32.206.460.104.00	(978.102.128,00)	(3,04)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.590.000.00	0,00	11.590.000 00	100,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0 00	1.880.000.00	(1.680.000,00)	(100,00)
	Jumlah	41.087.206.641.00	39.692.430.561,00	1.394.776.080,00	3,51

Perbedaan Beban perjalanan Dinas – LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA dengan Tabel dibawah ini

Tabel V.4.47 Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA

No	URAIAN	LRA	LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.752.188.666,00	9.752.488.666,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	94.780.000,00	94.780.000,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.208.119.975,00	31.228.357.975,00	(20.238.000,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.580.000,00	11.580.000,00	
Jumlah		41.068.968.641,00	41.087.206.641,00	(20.238.000,00)

Dari Tabel diatas terdapat selisih pada perjaanan dinas dalam kota sebesar Rp20.238.000 karena

1. Ada utang perjalanan dinas tahun 2021 pada sebesar Rp. 12.915.000,00) yang mengurangi beban
2. Adanya penambahan beban perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebesar Rp33.153.000,00 berasal dari DAK Non Fisik BOP PAUD dari Kemendikbud

F. BEBAN HIBAH

Beban Hibah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebesar Rp5.965.116.904,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp8.036.995.995,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.071.879.091,00 atau (25,78%) dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel V.4.48 Rincian Beban Hibah - LO

No	Uraian	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	0,00	67.073.000,00	(67.073.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.215.447.460,00	5.437.369.000,00	(4.221.922.540,00)	(77,65)
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	202.222.000,00	(202.222.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.320.000.000,00	396.922.100,00	923.077.900,00	232,56
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.020.000,00	937.030.000,00	(737.000.000,00)	(78,66)

No	Uraian	2022 Rp	2021 Rp	kenaikan/ penurunan	%
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.399.420.500,00	199.945.000,00	2.199.475.500,00	1120,04
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	830.248.944,00	796.483.695,00	33.765.049,00	4,24
	Jumlah	5.965.116.904,00	8.036.995.995,00	(2.071.879.091,00)	(25,78)

Perbedaan beban hibah - LO dengan belanja Hibah LRA sebagai mana Tabel dihawah ini:

Tabel V.4.49 Perbedaan Beban Hibah- LO dengan Belanja Hibah - LRA

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Ditentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4,811 147.450,00	1.215.447,400.00	3.595.700.050,00
2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Ditentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Jang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.320.000 000,00	1.320.000.000,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	Belanja Hibah Lang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2 077.365.400.00	0,00	2.077.365.400.00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	2 399,420.500,00	-2.399.420 500,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	830.248.944.00	830.248.944,00	0,00
Jumlah		9.038.761.804,00	5.965.116.904.00	3.073.644.900.00

Dari tabel diatas terdapat selisih sebesar Rp 3.073.644.900,00 dikarenakan adanya belanja tidak melalui kasda, kas diterima lansung oleh penerima dan kementerian terkait ke rekening sekolah tanpa melalui SP2D. dikarenakan dianggarkan di APBD sehingga pencatatannya di mangkan dalam LRA dan tidak di dicatat di Laporan Operasional sebesar Rp5.473.065.400,00 dan adanya Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.399.420.500,00 merupakan barang yang akan disalurkan kepada masyarakat pada Dinas Perhubungan yang menambah Laporan Operasional.

G. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp145.686.080,00 terjadi penurunan sebesar Rp145.686.080,00 atau (100,00 %) dapat dirinci sebagai berikut.

H. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp137.472.897.465,09 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp137.652.250.857,63 maka terdapat penurunan sebesar Rp179.353.392,54 atau (0,13%) dengan rincian terdiri dari :

Tabel V.4.50 Rincian Beban Penyusutan dan Amortiasasi

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin *)	31.423.635.588,09	29.912.330.021,00	1.511.305.547,09	5,05
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan*)	15.925.553.168,00	13.287.919.048,00	2.637.740.120,00	19,85
3	Beban Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan *)	90.011.224.336,00	91.939.141.422,94	(1.927.917.086,94)	(2,10)
4	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Kelija-Sama	0,00	87.155.358,65	(87.155.358,65)	(100,00)
5	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	0,00	2.324.510.627,54	(2.324.510.627,54)	(100,00)
6	Beban Amortisasi Asel Tidak Berwujud-	108.364.287,00	101.194.379,50	7.169.907,50	7,11
Jumlah		137.472.897.465,09	137.652.250.857,63	(179.353.392,54)	(0,13)

I. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 adalah sebesar Rp799.037.113,85 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.344.677.550,52 terjadi penurunan sebesar Rp3.545.640.436,67 atau (81,61%) . Rincian Beban penysihan Piutang sebagai berikut:

Tabel V.4.51 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	(4.275,09)	4.275,09	(8.550,18)	(200,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	(235.666,76)	317.395,77	(553.062,53)	(174,25)
3	Beban Penyisihan Piutang PBB-P2	200.425.342,30	3.770.302.464,76	(3.570.377.122,46)	(94,68)

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	345.219.472,00	267.545.746,00	77.673.726,00	29,03
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(946.842,19)	303.529,69	(1.250.171,88)	(406,48)
6	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	28.124.000,00	227.166.974,00	(199.042.974,00)	(87,62)
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	36.699.917,11	44.675.907,97	(7.975.990,86)	(17,85)
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	35.825.040,98	33.855.357,24	1.969.683,74	5,82
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	413.444,00	0,00	413.444,00	0,00
10	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	153.609.579,00	0,00	153.609.579,00	0,00
11	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(91.097,50)	0,00	(91.097,50)	0,00
	Jumlah	**799.037.113,85**	**4.344.677.550,52**	**(3.545.640.436,67)**	**(81,61)**

J. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp49.467.550.012,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp47.924.603.986,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.542.946.026,00 atau 3,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.52 Rincian Beban Transfer

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan/ penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan desa	976.804.606,00	1.523.269.690,00	(546.464.991,00)	(35,87)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	289.681.817,00	159.160.580,00	130.521.237,00	82,01
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	48.201.063.589,00	46.242.173.720,00	1.958.889.780,00	4,24
Jumlah		**49.467.550.012,00**	**47.924.603.986,00**	**1.542.946.026,00**	3,22

Tabel V.4.53 Perbedaan Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer LRA

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	923.278.367,00	976.804.695,00	(53.526.328,00)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	171.747.312,00	289.681.817,00	(117.934.505,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	48.201.363.500,00	48.201.063.500,00	0,00
Jumlah		49.296.087.179,00	49.467.550.012,00	(171.462.833,00)

Dari tabel diatas terdapat selisih sebagai berikut;

1. Adanya perbedaan sebesar Rp53.528.328,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan desa krena adanya utang tahun 2021 yang dibayar ditahun 2021 sebesar Rp.161.296.184,00 dan adanya utang yang muncul tahun 2022 yang akan dibayar tahun 2023 sebesar Rp. 214.824.512,00
2. Adanya perbedaan sebesar Rp117.934.505,00 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa karena adanya utang tahun 2021 yang dibayar tahun 2022 sebesar Rp.25.281.836,00 dan adanya utang tahun 2022 yang akan dibayar tahun 2023 sebesar Rp143.216.341,00

K. BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain – lain Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.592.976.904,72 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.694.973.227,00 terjadi penurunan sebesar Rp101.996.322,28 atau (2,17%). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.54 Rincian Beban lain-lain

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	772.276.160,00		772.276.160,00	0,00
2	Beban Lain-lain	3.820.700.744,72	4.694.973.227	(874.272.482,28)	(18,62)
Jumlah		4.592.976.904,72	4.694.973.227,00	(101.996.322,28)	(2,17)

Beban Lain-lain yang merupakan reklasifikasi dari Aset tetap yang tidak dimasukan sebagai aset tetap dalam neraca dan beban penurunan nilai investasi dan adanya penyertaan Modal Ke PDAM

5.4.3 Surplus/Defisit Operasional	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	101.176.189.493,87	45.002.116.016,30

Surplus/Defisit Operasional adalah jumlah pendapatan-LO setelah dikurangi dengan beban operasional. Surplus/Defisit Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp101.176.189.493,87

dibandingkan dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional Tahun 2021 sebesar Rp45.002.116.016,30 terdapat kenaikan sebesar Rp56.174.073.477,57 atau 124,83 %.

5.4.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	90.366.952.008,87	31.863.770.581,42

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa tahun 2022 adalah sebesarRp90.366.952.008,87 Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp31.863.770.581,42 terjadi kenaikan sebesar Rp58.503.181.427,45 atau 183,60%.
Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp840.000.000,00 dan Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp 641.815.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp198.185.000,00 atau 30,88% merupakan beban tak terduga

5.4.5 Surplus/Defisit LO	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	89.526.952.008,87	31.221.955.681,42

Surplus/Defisit LO Kahuparen Solok Selatan tahun 2022 sebesar Rp89.526.952.008,87Jika dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp31.221.955.681,42 terjadi kenaikan sebesar Rp58.304.996.427,45 atau 186,74% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.4.55 Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	kenaikan/ penurunan	%
	Rp	Rp		
Pendapatan- LO	894.874.584.491,14	833.913.747.686,00	60.960.836.745,14	7,31
Beban	-795.698.394.997,27	-788.971.631.669,70	-6.726.763.267,57	0,61
Surplus / Defisit dari Operasi	101.176.189.493,87	45.002.116.016,30	56.174.073.477,57	124,83
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	-13.138.345.434,98	13.138.345.434,98	-100
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-10.809.237.485,00	0,00	10.809.237.485,00	0,00
Surplus/Defisit Non Operasional	-10.809.237.485,00	-13.138.345.434,98	2.329.107.949,98	-17,73
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	90.366.952.008,87	31.863.770.581,42	58.503.181.427,45	183,60
Beban Luar Biasa – LO	-840.000.000,00	-641.815.000,00	-198.185.000,00	-30,88
Surplus / Defisit -LO	89.526.952.008,87	31.221.955.681,42	58.304.996.427,45	186,74

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 disusun berdasarkan basis Laporan Realisasi Anggaran.

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	839.801.556.539,10	817.173.079.386,00
Arus Kas Keluar	655.371.333.571,10	651.402.525.883,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	184.430.222.968,00	165.770.553.502,05

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp839.801.556.539,10 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp817.173.079.386,00 atau terjadi peningkatan arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp22.628.477.153,10 atau naik 2,77%.

Sementara itu, Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp655.371.333.571,10 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp651.402.525.883,95 atau terjadi kenaikan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp3.968.807.687,15 atau naik 0,61%.

Sehingga Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.430.222.968,00 sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp165.770.553.502,05 atau terjadi peningkatan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp18.659.669.465,95 atau naik sebesar 11,26%.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Sampai dengan 31 Desember 2022 Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp839.801.556.539,10 Sementara realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp884.655.899.039,10 dimana terdapat selisih sebesar Rp44.854.342.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		Rp	Rp	
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.036.714.870,10	11.036.714.870,10	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.354.215.126,00	2.354.215.126,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.415.762.950,00	2.415.762.950,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	74.584.226.969,00	76.344.356.069,00	(1.760.126.100,00)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	51.482.886.775,00	51.482.886.775,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam	18.897.650.392,00	18.897.650.392,00	0,00

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
		Rp	Rp	
7	Penerimaan Dana Alokasi umum	436.697.950.562,00	436.697.950.562,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	163.261.790.680,00	168.734.846.280,00	(5.473.065.400,00)
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	37.621.151.000,00	(37.621.151.000,00)
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	53.572.147.879,00	53.572.147.878,00	0,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	7.826.208.106,00	7.826.208.106,00	0,00
	JUMLAH	839.801.556.539,10	884.656.899.039,10	(44.854.342.500,00)

Selisih antara Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas dengan realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp44.854.342.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Laporan Arus Kas sebesar Rp74.584.897.335,00 sedangkan Lain-lain PAD yang Sah di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp76.334.678.791,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp1.760.126.100,00. Selisih tersebut disebabkan karena Penjualan atas peralatan dan mesin sebesar Rp1.735.201.100,00 dan Penjualan Aset lainnya sebesar Rp24.925.000,00 tidak termasuk dilaporkan dalam arus kas masuk aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas, sementara pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sudah termasuk pendapatan tersebut.
2. Penerimaan Dana Alokasi Khusus di Laporan Arus Kas sebesar Rp 163.261.780.880,00 sedangkan Penerimaan Dana Alokasi Khusus di Laporan Realisassi Anggaran sebesar Rp168.734.846.280,00 Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp5.473.065.400,00. Selisih tersebut disebabkan karena BOS Swasta sebesar Rp2.077.365.400,00 dan BOP PAUD sebesar Rp3.395.700.000,00 tidak termasuk dilaporkan dalam arus kas masuk aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas, sementara Penerimaan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Realisasi Anggaran sudah termasuk penerimaan tersebut.
3. Penerimaan Dana penyesuaian di Laporan Arus Kas sebesar Rp0,00 sementara di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp37.621.151.000,00 dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp37.621.151.000,00. Selisih tersebut adalah pendapatan dana desa sebesar Rp37.621.151.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf C menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp839.801.556.539,10 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp817.173.079.386,00 atau terjadi peningkatan arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp22.628.477.153,10 atau naik 2,77%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.005.714.370,10	16.500.169 327,00	(5.493.454.456,90)	(33,29)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.354.215.128,00	1.235.018.343,00	1.119.196 785,00	90,62
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.415 762.950,00	1 700.551.019,00	715.211.931,00	42,06
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	74.584.228.998 00	59.049.367 559,00	14.934.281.439,00	25,04
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	51.482.886.775,00	37.537.868.415,00	13.945.018.360,00	37,15
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam	18.897.650.392,00	14.837.087 066,00	4.060.585.326,00	27,37
7	Penerimaan Dana Alokasi umum	436.897 980.562,00	437.174.072.000,00	(276.111 438,00)	(0,06)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	163.261 780.880,00	143.243.038 502,00	20.018.742.378,00	13,98
9	Penerimaan Dana Otonom Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	8.567.934.000,00	(8.567.934 000,00)	(100,00)
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	59.572.147.378,00	49.536.930 420,00	10.035.317.459,00	20,26
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	11.505.000.000 00	0,00	11.505.000.000,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	21.750.000.000,00	(21 750.000.000,00)	(100,00)
14	Penerimaan Lainnya	7.328.368.106,00	25.440.542.735,00	(17.812.034.629,00)	100,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**839.901.556.539,10**	**817.173.079.396,00**	**22.628.477.153,10**	2,77

5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp655.371.333.571,10 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp698.465.549.971,10. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp43.094 216.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
1	Pembayaran Pegawai	375,158.145,727.83	375,198.145,727.83	0.00
2	Pembayaran Barang	224,250.350,259.27	224.250.350.259.27	0.00
3	Pembayaran Hibah	3,565.696.404.00	9,039.761.804.00	(5,473,065.400,00)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
5	Pembayaran Tak Terduga	3,061.054.001.00	3,061,054,001.00	0.00
6	Pembayaran Bagi hasil Pajak	923,276,367.00	923.276.367.00	0.00
7	Pembayaran Bagi hasil Retribusi	171,747,312.00	171,747,312.00	0.00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00
9	Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa dan Partai Politik	48,251,063,500.00	95,822.214,500.00	(37,621.151,000.00)
Jumlah		**655,371,333,571.10**	**698,465,549,971.10**	**(43,094,216,400.00)**

Selisih sebesar Rp43 094.216.400,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa pada Laporan Arus Kas dengan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Laporan Realisasi Anggaran, dimana transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp37.621.151 000,00 tidak dilaporkan dalam Laporan

Arus Kas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf C menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

2. Pengeluaran untuk pembayaran hibah kepada sekolah swasta dan BOP PAUD juga tidak tidak laporkan dalam arus kas keluar aktivitas operasi sebesar Rp5.473.065.400,00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp3.968.807.687,15 atau turun sebesar 0,61%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	375,798,145,727.63	373,432,719,871.00	2,365,425,856.63	0,63
2	Pembayaran Barang	224,250,350,259.27	221,928,878,307.95	2,321,471,951.32	1.05
3	Pembayaran Hibah	3,505,696,407.00	7,969,922,995.00	(4,464,226,591.00)	(55.26)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0.00	145,686,080.00	(145,686,080.00)	100.00
5	Pembayaran Tak Terduga	3,061,054,001.00	641,815,000.00	2,419,239,001.00	376.94
6	Pembayaran Bagi hasil Pajak	923,276,367.00	1,507,451,106.00	(584,174,739.00)	(38.75)
7	Pembayaran Bagi hasil Retribusi	171,747,312.00	133,878,744.00	37,868,568.00	28.29
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pembayaran Transfer bantuan Keuangan ke Desa	48,201,065,500.00	46,242,178,720.00	1,958,886,780.00	4.24
Jumlah Arus Kas Keluar		655,371,333,571.10	651,402,525,883.95	3,968,807,687.15	0.61

5.5.1.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.415.794.978,00 sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp165.820.251.002,05 atau terjadi peningkatan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp18.645.241.475,95 atau naik sebesar 11,25%.

5.5.2.Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	1,760,126,100.00	1,374,147,599.00
Arus Kas Keluar	202,572,297,511.67	127,546,936,090.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(200,812,171,411.67)	(126,172,788,491.00)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.760.126.100,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.374.147.599,00 atau terjadi peningkatan arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp385.978.501,00 atau turun naik sebesar 28,09%.
Sementara itu, Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp202.572.297.511,67 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp127.546.936.090,00 atau terjadi penurunan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp75.025.361.421,67,00 atau turun 58,82%.
Sehingga, Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp200.812.171.411,67) sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp126.172.788.491,00) atau terjadi penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar Rp74.639.382.920,67 atau turun sebesar 59,16%.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp1.760.126.100,00 sementara realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp0,00 Dimana terdapat selisih sebesar Rp1.760.126.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
1	Penjualan Atas tanah	0.00	0.00	0.00
2	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	1.735.201.100.00	0.00	1.735.201.100.00
3	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4	Penjualan Aset Lainnya	24.925.000.00	0.00	24.925.000.00
JUMLAH		1,760,126,100.00	0.00	1,760,126,100.00

Perbedaan antara Arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas dengan realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan bahwa Penjualan Aset Tetap di Laporan Arus Kas sebesar Rp1.760.126.100,00 merupakan penjualan atas aset yang dilelang tahun 2021, dimana dalam Laporan Arus Kas dilaporkan sebagai Penjualan Aset Tetap sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran dilaporkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar Rp385 978.501,00 atau naik sebesar 28,09%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penjualan Atas tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	1,735,201,100.00	1,327,472,599.00	407,728,501.00	30.71
3	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0.00	800,000.00	(800,000.00)	(100.00)
4	Penjualan Aset Lainnya	24,925,000.00	45,875,000.00	(20,950,000.00)	(45.67)
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		1,760,126,100.00	1,374,147,599.00	385,978,501.00	28.09

5.5.2.2 Arus Keluar Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas sebesar Rp202.572.297.511,67,00 sama halnya dengan realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp202.572.297.511,67,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
1	Perolehan Tanah	11,111,952,077.00	11,111,952,077.00	0.00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	31,337,496,900.00	31,337,496,900.00	0.00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	69,268,671,660.08	69,268,671,660.08	0.00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	89,129,228,699.59	89,129,228,699.59	0.00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1,205,948,175.00	1,205,948,175.00	0.00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
JUMLAH		202,572,297,511.67	202,572,297,511.67	0.00

Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp75,025,361,421.67 atau naik sebesar 58.82%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Perolehan Tanah	11,111,952,077.00	18,254,456,800.00	(7,142,504,723.00)	(39.13)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	31,337,496,900.00	24,156,820,388.00	7,180,676,512.00	29.73
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	69,268,671,660.08	30,630,007,739.00	38,638,663,921.08	236.36
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	89,129,228,699.59	63,891,156,713.00	25,237,071,986.59	41.83
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1,205,948,175.00	1,194,424,450.00	11,523,725.00	0.96
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		202,572,297,511.67	127,546,936,090.00	75,025,361,421.67	58.82

5.5.2.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp200.812.171.411,67) sedangkan Arus Kas Bersih sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp126.172.788.491,00) atau terjadi peningkatan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar Rp74.639.382.920, 67 atau naik 59,16%.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar Selama tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak melaksanakan aktivitas pendanaan, baik penerimaan maupun pengeluaran aktivitas pendanaan.

5.5.4.Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	55.709.715.503,54	44.312.163.084,00
Arus Kas Keluar	55.883.671.277,54	44.238.452.069,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(173.955.774,00)	73.711.015,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.709.715.503,54 Jika dibandingkan dengan arus kas masuk aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2021 sebesar Rp44.312.163.084,00 terdapat peningkatan sebesar Rp11.397.552.419,54 atau sebesar 25,72%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.672.537.374,54	44.270.800.448,00	11.401.697.926,54	25,75
2	Penerimaan Sisa Lebih Belur BOS	0,00	41.263.636,00	(41.263.636,00)	100,00
3	Penerimaan Jasa Giro BOS Swasta Yang Harus Dikembalikan	2.996.179,00	0,00	2.996.179,00	0,00
4	Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Negari dan Entitas Lain Yang Harus Dikembalikan	34.251.950,00	0,00	34.251.950,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		55.709.715.503,54	44.312.163.084,00	11.397.552.419,54	25,72

1. Penerimaan PFK sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp55.672.597.374,54 tersebut di atas terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PFK yang dipungut oleh BUD melalui SP2D	50.767.272.047,00
2	PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD	1.103.728.535,00
3	PFK yang dipungut oleh Bendahara BLUD RSUD	2.976.927.467,54
4	PFK yang dipungut oleh Bendahara BOS	575.614.109,00
5	PFK yang dipungut oleh Bendahara Kapitasi JKN	229.056.217,00
Jumlah Arus Kas Keluar		55.672.597.374,54

2. Penerimaan dari Jasa Giro BOS Sekolah Swasta. Dimana pada tahun 2022 terdapat jasa giro BOS Sekolah Swasta disetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.866.179,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan kembali ke rekening sekolah swasta tersebut. Adapun rincian Jasa Giro BOS Sekolah Swasta tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	SD IT MARHAMAH	432.364,00
2	SD YPTSS SUNGAI KUNYIT	904.192,00
3	SD YPTSS SUNGAI KUNYIT	663.972,00
4	SDN YTKA	141.148,00
5	SDN YTKA	311.162,00
6	SMP YTKA	176.410,00
7	SMP YTKA	154.946,00
8	SMP IT MARHAMAH	81.973,00
	JUMLAH	**2.866.179,00**

3. Penerimaan Jasa Giro Kepada Pemerintahan Nagari yang berasal dari Jasa Giro Rek. Pemerintahan Nagari sebesar Rp32.985.597,00 yang dipotong oleh pihak Bank Nagari dan disetorkan ke kas daerah pada periode Januari sampai dengan Maret 2022, dimana per 31 Desember 2022 Jasa Giro tersebut belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari.

   Adapun jasa giro rekening Pemerintahan Nagari yang dipotong oleh Bank Nagari periode Januari sampai dengan Maret 2022 dan belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintahan Nagari sebagai berikut:

No.	NO_REK	NAMA_SINGKAT	JASA GIRO TH 2022 MASUK KE REK KASDA			
			JAN	FEB	MAR	TOTAL
1	1301010[illegible]003172	LUBUK GADANG	218.831,00	235.043,00	626.656,00	1.080.509
2	1301010103093	LUBUK GADANG TIMUR	90.893,00	57.228,00	320.764,00	468.982
3	1301010103007	LUBUK GADANG SELATAN	115.541,30	127.240,00	501.261,00	744.042
4	1301010103101	LUBUK GADANG UTARA	134.624,30	143.959,00	451.485,00	730.067
5	1303010100049	LUBUK MALAKO	51.256,00	241.040,00	525.634,00	818.310
6	1303010100051	BIDAR ALAM	357.282,00	345.664,00	633.766,00	1.330.726
7	1303010100062	PADANG AIR DINGIN	191.982,00	215.118,30	385.791,00	792.261
8	1303010100098	PADANG LIMAU SUNDAI	74.710,00	76.372,00	243.510,00	394.592
9	1303010100025	PADANG GANTANG	263.796,00	306.935,00	427.906,00	998.658
10	1303010100291	ADN	127.625,00	191.739,00	342.874,00	662.238
11	1303010100120	SULSUN TANGAH	132.708,00	134.961,00	429.705,00	697.409
12	1301010103019	LUBUK ULANG ALING	233.058,00	372.909,00	479.920,00	1.085.280
13	1303010100965	LUBUK ULANG ALING SELATAN	310.525,00	461.501,00	478.383,00	1.250.942
14	1301010100354	LUBUK ULANG ALING TENGAH	112.169,00	254.582,00	409.471,00	776.842

No.	NO_REK	NAMA_SINGKAT	JASA GIRO TH 2022 MASUK KE REK KASDA			
			JAN	FEB	MAR	TOTAL
15	1303013[illegible]0096	RANAH PANTAI CERMIN	129.053,00	260.042,00	366.102,00	755.197
16	1303013[illegible]0074	SITAPUS	49.848,00	119.727,00	159.132,00	328.707
17	1303013[illegible]0131	SUNGAI KUNYIT	181.693,00	305.871,00	526.909,00	1.014.213
18	1303013[illegible]0104	TANJUNG SUNGAI KUNYIT	84.978,00	102.876,00	409.022,00	596.874
19	1303013[illegible]0219	SUNGAI KUNYIT BARAT	135.795,00	310.467,00	533.496,00	979.857
20	1303013[illegible]0037	TALUNAN RAJO	70.175,00	125.069,00	441.349,00	641.593
21	1300010[illegible]0341	PASIR TALANG	130.632	146.268	509.047	793.947
22	1300010[illegible]0383	PASIR TALANG BARAT	301.370	365.453	494.479	1.161.298
23	1300010[illegible]0350	PASIR TALANG TIMUR	329.705	412.977	693.357	1.436.039
24	1300010[illegible]0375	PASIR TALANG SELATAN	237.958	214.948	517.666	970.572
25	1300010[illegible]0337	SAKO PASIA TALANG	64.902	145.922	171.268	402.090
26	1300010[illegible]0421	SAKO UTARA PASIA TALANG	438.367	346.375	590.467	1.375.219
27	1300010[illegible]0442	SAKO SELATAN PASIA TALANG	59.994	99.929	126.066	285.988
28	1300010[illegible]0390	KOTO BARU	79.727	136.474	298.532	514.729
29	1300010[illegible]0403	PIT AKEK KOTO BARU	193.593	135.751	339.072	668.357
30	1300010[illegible]0417	PASAR MUARA LABUH	534.980	475.567	733.874	1.744.906
31	1300010[illegible]0429	BOMAS	88.264	139.810	362.411	639.965
32	1300010[illegible]0302	PAKAN RABAA	87.120	273.437	296.405	656.962
33	1300010[illegible]0395	PAKAN RABAA TIMUR	84.511	101.200	310.598	496.309
34	1300010[illegible]0314	PAKAN RABAA UTARA	133.765	272.906	316.075	722.745
35	1300010[illegible]0326	PAKAN RABAA TENGAH	84.933	110.090	435.056	630.081
36	1300010[illegible]0454	ALAM PAUH DUO	222.929	198.247	575.362	996.457
37	1300010[illegible]0431	KAPAU ALAM PAUH DUO	137.924	213.079	409.775	760.778
38	1300010[illegible]0476	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	373.932	467.830	731.625	1.573.377
39	1300010[illegible]0488	PAUH DUO NAN BATIGO	224.713	317.900	477.258	1.019.871
	TOTAL KESELURUHAN		6.851.499,00	9.080.324,00	17.053.774,00	32.985.597,00

Selain itu, terdapat jasa giro rekening entitas lainnya yang dipotong oleh Bank Nagari periode Januari sampai dengan Desember 2022 dan belum diserorkan kembali ke rekening entitas tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Zakat Dinkes Solsel	954.022,00
2.	DAK SMKN 3 Solok Selatan	25.341,00
3.	Kwarcab	296.990,00
	Jumlah	1.266.353,00

5.5.4.2. Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.883.671.277,54. Jika dibandingkan dengan arus kas keluar aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.238.452.069,00 terdapat peningkatan sebesar Rp11.645.219.208,54 atau naik sebesar 26,32%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55 651.657.641,54	44.180 358.324,00	11.671.298.817,54	26,42
2	Pengeluaran Sisa Lebih Salur BOS	32.013.636,00	18 450.020,00	13 563.636,00	100,00
3	Pengeluaran Jasa Giro BOS Yang Harus Dikembalikan	0,00	39 343.470,00	(39.343.470,00)	100,00
4	Pengeluaran Kelebihan Pembayaran BPJS Yang Harus Dikembalikan	0,00	299.775,00	(299.775,00)	100,00
Jumlah Arus Kas Keluar		55.883.671.277,54	44.238.452.069,00	11.645.219.208,54	26,32

a Pengeluaran PFK sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp55.851.657,641,54 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PFK yang disetorkan oleh BUD melalui pemotongan SP2D	50.787.272.047,00
2	PFK yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran OPD	1.128.729.535,00
3	PFK yang disetorkan oleh Bendahara BLUD RSUD	3.156.987.734,54
4	PFK yang disetorkan oleh Bendahara BOS	575.614.108,00
5	PFK yang disetorkan oleh Bendahara Kapitasi JKN	229.055.217,00
Jumlah Arus Kas Keluar		55.851.657.841,54

b. Pengeluaran sisa salur BOS tahun 2011 yang disetorkan ke kasda berdasarkan Laporan Pelaksanaan Monitoring Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Solok Selatan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 2014 sebesar Rp32.013.636,00.

5.5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris pada Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp173.955.774,00). Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73.711.015,00 terdapat penurunan sebesar Rp247.666.789,00 atau turun sebesar 336,00%.

5.5.4. Kenaikan / Penurunan Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(16.555.904.217,67)	39.671.476.026,05

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2022 sebesar Rp16.555.904.217,67 Sementara pada Tahun 2021 sebesar Rp39.671 476.026,05. Terdapat penurunan kas sebesar Rp56 227.380.243,72 atau turun sebesar 141,73%. Hal ini menunjukkan adanya etisiensi realisasi APBD tahun 2022 dibanding tahun 2021. Penurunan kas tersebut dapat diinci sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	184.430.222.568,00	165.770.553.502,05	18.659.669.466,95	11,26
2.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(200.612.171.411,67)	(126.172.788.491,00)	(74.439.382.920,67)	59,16
3.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(173.955.774,00)	73.711.015,00	(247.666.789,00)	(336,00)
Kenaikan/Penurunan Kas bersih		(16.555.904.217,67)	39.671.476.026,05	(56.227.380.243,72)	(141,73)

5.5.4. Saldo Awal Kas di KASDA	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	106.618.873.069,00	60.950.909.774,00

Saldo Awal Kas Daerah sebesar Rp106.618.873.069,00 merupakan saldo Kas di Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang per 1 Januari 2022. Sementara itu saldo awal Kas Daerah per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp60.950.909.774,00.

5.5.6. Saldo Akhir Kas di BUD	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.792.228.072,27. Sedangkan Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.314.512.460,94 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.522.284.388,67 atau turun sebesar 15,11%.

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Saldo Awal Kas di Kasda	106.618.873.069,00	60.950.909.774,00	45.667.963.295,00	74,93
2	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	13.741.409,00	385.484.726,00	(371.743.317,00)	(96,44)
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	30.458.756,00	31.159.242,00	(700.486,00)	(2,24)
4	Saldo Awal Kas BLUD	1.906.619.457,94	7.643.392.939,89	(5.736.773.481,95)	(75,06)
5	Saldo Awal Bendahara BOS	495.668.011,00	492.522.346,00	3.145.665,00	0,64
6	Saldo Awal Kas Bendahara BPBD	38.080.655,00	68.110.855,00	(30.000,00)	100,0
7	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	211.070.903,00	166.102.558,00	44.971.315,00	100,00
8	Saldo Awal Kas BUD (1 sd 7)	109.314.512.460,94	69.710.682.470,89	39.603.829.990,05	56,81
9	Kenaikan/Penurunan Kas bersih	(16.555.901.217,67)	39.671.476.026,05	(56.227.380.243,72)	(141,73)
10	Saldo Akhir Kas di BUD Sebelum Koreksi Saldo Awal (8+9)	92.758.608.242,27	109.382.158.496,94	(16.623.550.253,67)	(15,20)
11	Koreksi Saldo Awal	33.619.829,00	(67.646.036,00)	101.265.865,00	(100,00)
	Saldo Akhir Kas di BUD (10-11)	**92.792.228.072,27**	**109.314.512.460,94**	**(16.522.284.388,67)**	**(15,11)**

5.5.7.Saldo Akhir Kas	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
	92.792.228.072,27	109.314.512.460,94

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.792.228.072,27. Sedangkan Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.314.512.460,94 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.522.284.388,67 atau turun sebesar 15,11%.
dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	70 144 105.193,74	106.618.979.069,00	(27.474.763.575,26)	(25,77)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	187.908.066,69	15.741.408,00	103.467.157,59	1.116,82
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	36 463.178,00	30.456.756,00	6.006.422,00	19,72
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	12.193.379.620,62	1.506.613.457,94	10.286 761.362,68	539,53
5	Saldo Akhir Kas Bendahara BOS	701.982.844,05	495.668.011,00	206.314.833,00	41,62
6	Saldo Akhir Kas Bendahara BPBD	0,00	38.080.355,00	(38.080.355,00)	100,00
7	Saldo Akhir Kas Bendahara Kapitas JKN	549.090 169,22	0,00	549.090.169,22	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	211 073.903,00	(211.073.903,00)	100,00
	Jumlah Kas	82 792.228.072,27	109.314.512.450,94	(16.522.284.388,67)	(15,11)

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca, yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat diterangkan beberapa hal sebagai berikut:

		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
5.6.1	Saldo Awal Ekuitas	1.915.664.775.152,30	1.874.225.572.551,55

Saldo Ekuitas Awal adalah Saldo Akhir Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.874.225.572.551,55 yang sama dengan saldo ekuitas akhir tahun 2021. Jika dibandingkan saldo awal ekuitas tahun 2021 sebesar Rp1.874.225.572.551,55 terjadi peningkatan saldo awal ekuitas sebesar Rp41.439.202.600,75 atau 2,21%.

		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
5.6.2	Surplus/Defisit – LO	89.526.952.008,87	31.221.955.581,42

Nilai Surplus/Defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp89.526 952.008,87 merupakan surplus atas Kegiatan Operasional yang menambah Nilai Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi kenaikan surplus sebesar Rp58.304.996.427,45 atau sebesar 186,74%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar.	31 Des 2022 (Rp) 19.535.019.862,71	31 Des 2021 (Rp) 10.217.247.019,33

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 sebesar Rp19.535.019.862,71 merupakan akumulasi koreksi yang mengurang Nilai Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp10.217.247.019,33 terjadi peningkatan sebesar Rp9.317.772.843,38 atau turun 91,20%.

Adapun rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 sebesar Rp19.535.019.862,71 sebagai berikut:

NO	URAIAN	1. Dampak Kumulatif Penambahan Ekuitas	2. Dampak Kumulatif Penurunan/Pengurangan Ekuitas	Jumlah
1	2	3	4	5
1	KAS	2.262.068,38	653.875,12	1.608.192,94
2	PERSEDIAAN	45.995.000,00	0,00	45.995.000,00
3	PIUTANG	40.000,00	16,00	39.982,00
4	PENYISIHAN PIUTANG	765.190.146,30	40.000,00	765.156.146,30
5	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH	16.162.389.703,74	0,00	16.162.395.723,74
6	ASET TETAP	1.205.751.000,28	21.759.800,67	1.183.991.199,61
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	193.348.173,00	3.766.875.499,69	(3.573.527.326,69)
8	ASET LAINNYA	0,00	119.000.000,00	(119.000.000,00)
9	KEWAJIBAN	32.013.636,00	0,00	32.013.636,00
10	BEBAN	7.295.403.330,00	2.221.054.001,00	5.035.249.329,00
	JUMLAH	25.663.405.057,38	6.128.385.194,67	19.535.019.862,71

5.6.4 Ekuitas Akhir	31 Des 2022 (Rp) 2.024.726.747.023,88	31 Des 2021 (Rp) 1.915.664.775.152,30

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp2.024.726.747.023,88 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir 2021 sebesar Rp1.915.664.775.142,30 terdapat peningkatan sebesar Rp109.061.971.871,58 atau naik 5,69%. Penghitungan nilai ekuitas tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	EKUITAS AWAL	1.915.664.775.152,30	1.874.225.572.551,55	41.439.202.600,75	2,21
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	89.526.952.033,87	31.221.955.581,42	58.304.996.427,45	186,74
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	19.535.019.862,71	10.217.247.019,33	9.317.772.843,38	91,20
4	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	32.013.636,00	0,00	32.013.636,00	100,00
5	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	19.503.006.226,71	10.217.247.019,33	9.285.759.207,38	90,88
6	EKUITAS AKHIR	2.024.726.747.023,88	1.915.664.775.152,30	109.061.971.871,58	5,69

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang berada di ujung selatan selatan Sumatera Barat dengan ketinggian 300–950 m di atas permukaan air laut terletak diantara 01^0 17' 13" - $01^0$45" *Lintang Selatan* dan 100^0 53' 24" - 101^0 26' 27" Bujur Timur yang wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan, dan dataran rendah dengan berbagai potensi hasil pertanian. Batas wilayah KabupatenSolok Selatan meliputi;

Sebelah Utara	:	Kabupaten Solok
Sebelah Timur	:	Kabuaten Dharmasraya
Sebelah Selatan	:	Propinsi Jambi
Sebelah Barat	:	Kabupaten Pesisir Selatan

dengan luas wilayah 3.346,20 kilometer persegi yang meliputi kawasan hutan mencapai 212.821 hektar, lahan sawah 9.490 hektar dan lahan lainnya 112.809 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 156.901 jiwa sebagaimana data Solok Selatan Dalam Angka Tahun 2015, bertempat tinggal tersebar di 7 kecamatan yang terbagi dalam 39 nagari dan 269 jorong.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencakup urusan:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan,
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
f. Sosial;
g. Tenaga Kerja;
h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. Pangan;
j. Administrasi kependudukan dan capil;
k. Pengendalian penduduk dan KB;
l. Perhubungan;
m. Komunikasi dan informatika;
n. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
o. Penanaman modal;

p. Perpustakaan;
q. Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga melaksanakan urusan yang mencakup:
    aa. Pariwisata;
    bb Pertanian;
    cc. Perindustrian;
    dd. Administrasi Pemerintahan;
    ee. Pengawasan;
    ff. Perencanaan;
    gg. Keuangan; dan
    hh. kepegawaian.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6.2 Penjelasan tentang Penerapan Perpres Nomor 75 tahun 2017

Terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum melaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan lebih lanjut penilaian kembali barang Milik daerah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2017 pasal 21.

6.3 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Terkait Kewajiban Kontingensi ini, adapun kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sudah berada dalam masa sidang atau sudah masuk kepengadilan sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdapat di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok melalui http://sipp.pn-kotobaru.go.id/list_perkara/search yaitu:

1. Perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PNKbr yang diajukan oleh Heri Lotiansyah an CV Gusti Family ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok dengan kalsifikasi

perkara perbuatan melawan hukum CV. Gusti Family selaku penyedia atas Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan mengajukan gugatan perdata terhadap 1). Bapak Bupati Solok Selatan selaku Kepala Daerah sebagai Tergugat I, 2), Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran sebagai Tergugat II, serta 3) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tergugat III ke Pengadilan Negeri Kota Baru Solok. Gugatan tersebut diajukan karena CV. Gusti Family tidak terima atas penghentian kontrak secara permanen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan.

Penghentian kontrak secara permanen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok selatan didasari dengan berbagai pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah wabah penyakit non alam yang disebabkan oleh virus yang belum bisa diperkirakan/ diprediksi kapan akan berakhirnya, serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang sangat besar.
2) Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Menerangkan bahwa penghentian kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kondisi kahar dapat bersifat permanen apabila tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikan nya pekerjaan.
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempunyai kewenangan terhadap fungsi anggaran yang dapat menjamin ketersediaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2023, apabila proses kontrak ini dilanjutkan dengan menggunakan hasil tender yang sama.

Sampai saat ini, status perkara berada dalam putusan sela dengan lama proses 154 hari.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Solok selatan dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2022 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2022, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran sefalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Solok selatan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Solok selatan yang lebih baik.

Padang Aro, April 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN VIII

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PEMBAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PEMBAKUAN PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Daerah	2016	16.514.438.842,00	1.551.564.493,00	47.356.372,00	18.018.646.963,00
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2016	15.095.337.053,00	1.551.564.493,00	0,00	17.646.901.546,00
	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2016	518.246.771,00	0,00	47.150.364,00	471.113.457,00
	Piutang Pajak Reklame	2021	855.018,00	0,00	855.018,00	0,00
2	Piutang Retribusi	2017	2.162.095.688,00	0,00	191.585.938,00	1.970.109.750,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2019	272.546.338,00	0,00	189.730.438,00	82.815.900,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2017	8.375.000,00	0,00	0,00	8.375.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar		1.865.010.600,00	0,00	0,00	1.863.410.600,00
		2015	340.381.400,00	0,00	0,00	340.381.400,00
		2017	362.316.400,00	0,00	0,00	362.316.400,00
		2018	227.208.000,00	0,00	0,00	227.208.000,00
		2019	267.208.800,00	0,00	0,00	267.208.800,00
		2020	274.694.200,00	0,00	0,00	274.694.200,00
		2021	348.873.200,00	0,00	1.640.000,00	347.433.200,00
		2022	44.227.800,00	0,00	0,00	44.227.800,00
	Piutang Retribusi IMB		28.163.750,00	0,00	717.500,00	28.446.250,00
		2018	28.163.750,00	0,00	0,00	
		2020	0,00			
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		41.508.185.962,70	229.588.595,00	11.887.403.126,32	29.842.352.032,38
	Piutang BLUD	2020	5.515.328.647,00	229.588.595,00	0,00	5.747.915.543,00
	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2018	89.351.618,94	0,00	70.849.056,32	18.502.559,62
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (bendahara Bendahara	2017	21.700.661.271,00	0,00	0,00	21.700.661.271,00
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (selain dr PNS atau Bendahara	2018	454.333.948,00	0,00	0,00	454.333.948,00
	Dana Revolving	2016	14.136.191.804,00	0,00	11.816.454.070,00	2.319.737.734,00
	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2022	1.500.976,76	0,00	0,00	1.500.976,76
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2022	11.641.193.359,00	0,00	8.106.428.039,00	3.534.765.320,00
	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2022	11.641.193.359,00	0,00	8.106.428.039,00	3.534.765.320,00
6	Piutang Lainnya	2022	155.055.500,00	0,00	0,00	155.055.500,00
	Piutang Pendapatan Koperasi PKTP Purwaringa	2022	155.055.500,00	0,00	0,00	155.055.500,00
	JUMLAH		72.372.949.551,70	1.781.153.088,00	20.233.866.475,32	53.920.297.065,38

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IX

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PENGAKUAN PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	**Piutang Pajak Daerah**		(10.181.748.126,64)	(208.420.342,36)	(238.843,36)	(10.381.931.625,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2021	(10.179.150.619,70)	(200.420.342,30)	0,00	(10.379.570.962,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	2021	(2.591.238,85)	0,00	(235.668,76)	(2.355.687,09)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2021	(4.275,09)	0,00	(4.275,09)	-
2	**Piutang Retribusi**	2016	(1.582.549.958,19)	(345.219.472,00)	(1.866.142,19)	(1.925.903.288,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2015	(83.768.542,19)	0,00	(968.642,19)	(82.817.900,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2017	(8.375.000,00)	0,00	0,00	(8.375.000,00)
	Penyisihan Retribusi Pelayanan Pasar	2016 - 2022	(1.484.244.686,00)	(345.219.472,00)	0,00	(1.829.464.158,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	2016	(26.153.780,00)	0,00	(717.000,00)	(25.446.250,00)
3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	2019	(36.213.142.803,10)	(293.835.442,00)	(11.860.296.816,49)	(24.646.779.578,29)
	Penyisihan Piutang BLUD	2020	(50.077.639,74)	(22.199.663,48)	0,00	(72.277.003,22)
	Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2019	(53.610.968,56)	0,00	(43.841.849,40)	(9.769.123,07)
	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2017	(21.700.661.271,00)	0,00	0,00	(21.700.661.271,00)
	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap PNS Non Bendahara	2019	(272.000.368,80)	(181.739.576,20)	0,00	(464.339.945,00)
	Penyisihan Dana Revolving	2006	(14.136.191.804,00)	0,00	(11.816.454.070,00)	(2.319.737.734,00)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Deposito	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Piutang Lainnya**	2022	(775.277,50)	0,00	0,00	(775.277,50)
	Penyisihan Piutang PendapatanKapitasi FKTP Puskesmas	2022	(775.277,50)	0,00	0,00	(775.277,50)
	JUMLAH		(47.978.213.417,43)	(749.978.258,86)	(11.862.202.080,63)	(36.865.989.673,69)

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN X

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

No	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PENGAKUAN PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	**Piutang Dana Bergulir - Dana Revolving**		14.136.191.804,00	0,00	11.816.454.070,00	2.319.737.734,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir BPM,PPr&KB 2006	2006	1.847.681.700,00	0,00	0,00	1.847.681.700,00
	Piutang Denda Dana Bergulir BPM,PPr&KB 2006	2006	11.083.949.170,00	0,00	11.083.949.170,00	0,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir Koperindag 2006	2006	50.763.400,00	0,00	8.000.000,00	42.763.400,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir Koperindag 2009	2006	131.305.667,00	0,00	(8.600.000,00)	139.905.667,00
	Piutang Pokok Dana Bergulir PDAM	2006	636.803.900,00	0,00	636.803.900,00	0,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir BPM,PPr&KB 2006	2006	266.793.700,00	0,00	0,00	266.793.700,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperindag 2006	2006	7.429.100,00	0,00	1.701.000,00	5.728.100,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperindag 2009	2006	16.865.167,00	0,00	0,00	16.865.167,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir PDAM	2006	114.600.000,00	0,00	114.600.000,00	0,00
	Piutang Lain-lain	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan piutang Lainnya - Revolving	2006	(14.136.191.804,00)	0,00	(11.816.454.070,00)	(2.319.737.734,00)
	JUMLAH		**14.136.191.804,00**	**0,00**	**11.816.454.070,00**	**2.319.737.734,00**

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XI

Daftar Penyertaan Modal

(Investasi Daerah)

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun	Jenis Barang/ Kelompok	Uraian Nomor Register/ Merk/ Type	Nomor Polisi/ Nomor Rangka/ Nomor Mesin	Jumlah Barang	Harga Perolehan Barang	Penyusutan/ Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi Barang (Baik, Kurang Baik, Rusak Berat)	Keterangan
1	2006	Barang Negara	Pada No 1501[5	Semen	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00		
	2007				1.500.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
	2008				2.000.000.000,00	4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
	2009				500.000.000,00	4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		
	2012				1.500.000.000,00	6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
	2013				1.000.000.000,00	7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		
	2014				1.000.000.000,00	8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		
	2015				1.500.000.000,00	11.000.000.000,00		11.000.000.000,00		
	2016				1.000.000.000,00	12.000.000.000,00	1.000.000.000,00	12.000.000.000,00		
	2020				2.000.000.000,00	14.000.000.000,00	2.000.000.000,00	14.000.000.000,00		
	2021				500.000.000,00	14.500.000.000,00	500.000.000,00	14.500.000.000,00		
	2022				500.000.000,00	15.000.000.000,00	500.000.000,00	15.000.000.000,00		
	JUMLAH				15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
2	2007	Bata yang			500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00		
	2008	alberta			500.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
	JUMLAH				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
3	2005	AGYA			2.058.324.999,00	2.058.324.999,00		2.058.324.999,00		
	2006				2.604.641.000,00	4.662.965.999,00		4.662.965.999,00		
	2007				2.472.000.000,00	7.134.965.999,00		7.134.965.999,00		
	2008				3.297.000.000,00	10.431.965.999,00		10.431.965.999,00		
	2009				3.396.859.145,00	13.828.825.144,00		13.828.825.144,00		
	2010				0,00	13.828.825.144,00		13.828.825.144,00		
	2011				1.504.819.000,00	15.333.644.144,00		15.333.644.144,00		
	2012				3.478.807.826,37	18.812.451.970,37		18.812.451.970,37		
	2013				-328.681.000,00	18.483.770.970,37		18.483.770.970,37		
	2014				-91.957.419,75	18.391.813.550,62		18.391.813.550,62		
	2015				2.889.031.335,13	21.280.844.885,75		21.280.844.885,75		
	2016				1.394.000.000,00	22.674.844.885,75		22.674.844.885,75		
	2017				-1.073.661.951,40	21.601.182.934,35		21.601.182.934,35		
	2018				709.891.799,23	22.311.074.733,58		22.311.074.733,58		
	2019				68.400.000,00	22.379.474.733,58	82.400.000,00	22.379.474.733,58	(888.999.750,00)	
	2020				1.008.000.000,00	23.387.474.733,58	1.082.000.000,00	23.387.474.733,58	(1.350.646.242,00)	
	2021				2.001.999.200,00	25.389.473.933,58	2.081.999.200,00	25.389.473.933,58	(901.692.151,00)	
	2022				15.479.223.207,00	40.868.697.140,58	16.672.223.207,00	40.868.697.140,58	(1.579.173.885,73)	
	JUMLAH				40.868.697.140,58	40.868.697.140,58	20.318.622.407,00	40.868.697.140,58	0,00	0,00	0,00	40.868.697.140,58

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XII

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	352.946.797.525,00	16.612.670.411,00	2.849.540.077,00	366.709.927.859,00
2	Peralatan dan Mesin	318.584.122.340,99	37.740.488.953,00	12.361.487.483,00	343.963.123.810,99
3	Gedung dan Bangunan	673.008.616.814,20	108.741.115.966,26	24.227.652.183,26	757.522.080.597,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.318.365.723.727,04	104.057.597.667,59	11.640.873.020,59	1.410.782.448.374,04
5	Aset Tetap Lainnya	36.511.102.598,04	9.582.632.349,00	86.215.900,00	46.007.519.047,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.599.395.198,00	18.436.558.907,00	7.020.390.812,00	67.015.563.293,00
JUMLAH		**2.758.015.758.203,27**	**295.171.064.253,85**	**58.186.159.475,85**	**2.992.000.662.981,27**

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIII

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	352.946.797.525,00	16.612.670.411,00	2.849.540.077,00	366.709.927.859,00
2	Peralatan dan Mesin	318.584.122.340,99	37.740.468.953,00	12.361.487.483,00	343.963.123.810,99
3	Gedung dan Bangunan	673.008.616.814,20	108.741.115.966,26	24.227.652.183,26	757.522.080.597,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.318.365.723.727,04	104.057.597.667,59	11.640.873.020,59	1.410.782.448.374,04
5	Aset Tetap Lainnya	36.511.102.598,04	9.582.632.349,00	86.215.900,00	46.007.519.047,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.599.395.198,00	18.436.558.907,00	7.020.390.812,00	67.015.563.293,00
JUMLAH		2.755.015.758.203,27	295.171.064.253,85	58.186.159.475,85	2.992.000.662.981,27

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIV

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN 2022	PENGURANGAN 2022	SALDO AKHIR 2022
1	2	3	4	5	6
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.599.395.198,00	18.436.558.907	7.020.390.812	67.015.563.293,00
JUMLAH		**55.599.395.198,00**	**18.436.558.907,00**	**7.020.390.812,00**	**67.015.563.293,00**

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XV

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUB ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN 2022	PENGURANGAN 2022	SALDO AKHIR 2022
1	2	3	4	5	6
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	1.387.043.795,00	71.900.080,00	0,00	1.458.943.875,00
3	Aset Lain-lain	20.711.701.602,24	13.382.663.638,00	6.416.649.341,00	27.677.715.899,24
4	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	5.364.179.953,00	0,00	5.364.179.953,00
JUMLAH		**22.098.745.397,24**	**18.818.743.671,00**	**6.416.649.341,00**	**34.500.839.727,24**

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XVI

Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIHIL						

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XVII

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN 2022	PENGURANGAN 2022	SALDO AKHIR 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	179.060.267,00	0,00	179.060.267,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	62.071.788,00	44.512.023,00	62.071.788,00	44.512.023,00
3	Utang Beban	20.478.829.526,00	23.220.835.631,51	20.478.829.526,00	23.220.835.631,51
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	32.013.636,00	37.118.129,00	32.013.636,00	37.118.129,00
5	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**20.751.975.217,00**	**23.302.465.783,51**	**20.751.975.217,00**	**23.302.465.783,51**

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XVIII

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN DAERAH	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI (RP)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH REALISASI TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					NIHIL						

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIX

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN n-1,TAHUN n-1, TAHUN n			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D AKHIR TAHUN n	JUMLAH YANG DI ANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
		Tahun n -2 2020	Tahun n -1 2021	Tahun n 2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	-			-	-	-
2	-			-	-	-
3	-					
JUMLAH		-	-	-	-	-

NIHIL

Padang Aro, 20 Juli 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XX

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank		122.049.313	419.396.306
Piutang usaha - Bersih			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang usaha)		717.408.223	1.168.278.198
Persediaan		924.969.162	959.220.583
Biaya dibayar di muka		15.468.324	26.301.658
Jumlah Aset Lancar		1.779.895.022	2.573.196.745
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap			
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 14.834.397.727 (2020 : Rp 13 764.366.176)		40.772.948.553	23.625.537.411
Aset lain-lain		-	794.969.140
Jumlah Aset Tidak Lancar		**40.772.948.553**	**24.420.506.551**
JUMLAH ASET		**42.552.843.574**	**26.993.703.296**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Utang usaha		364.936.000	364.936.000
Utang lain-lain		148.475.000	34.393.600
Utang pajak		12.439.217	646.818.700
Jumlah Kewajiban Lancar		**525.850.217**	**1.046.148.300**
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Utang sewa pembiayaan		148.578.000	232.524.000
Dana revolving Pemda		-	636.666.400
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		**148.578.000**	**869.190.400**
Jumlah Kewajiban		**674.428.217**	**1.915.338.700**
EKUITAS			
Modal disetor		50.627.606.864	32.148.383.466
Saldo rugi		(8.749.191.507)	(7.070.018.870)
Jumlah Ekuitas		**41.878.415.357**	**25.078.364.596**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**42.552.843.574**	**26.993.703.296**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA SARIBU SUNGAI KABUPATEN SOLOK SELATAN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan Usaha			
Penjualan air		5.814.445.600	5.720.817.700
Penjualan non air		769.185.675	759.844.464
Jumlah Pendapatan Usaha		6.583.631.275	6.480.662.164
Beban Usaha			
Beban sumber air		35.059.500	32.279.789
Beban pengolahan air		755.869.758	40.896.038
Beban transmisi dan distribusi		1.125.241.055	1.062.774.066
Beban administrasi dan umum		6.354.801.947	6.343.057.836
Jumlah Beban Usaha		8.270.972.260	7.479.007.729
RUGI USAHA		**(1.687.340.985)**	**(998.345.565)**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan Lain-Lain		8.168.348	16.653.404
Jumlah Pendapatan (Beban Lain-Lain)		**8.168.348**	**16.653.404**
RUGI BERSIH		**(1.679.172.637)**	**(981.692.161)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.